

Peraturan Daerah Kabupaten Samosir

Tentang



**Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Samosir
Tahun 2025-2029**



**Samosir Unggul,
Inklusif dan Berkelanjutan**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan 22392 SUMUT
Telp./Faks (0626) 20692 laman www.samosirkab.go.id

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 37 TAHUN 2025 **SERI E NOMOR 46**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 263 dan pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Acara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2025 Nomor 27 Seri E Nomor 45).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

dan

BUPATI SAMOSIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Samosir
3. Bupati adalah Bupati Samosir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappeda Litbang adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan

penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan pada Rencana Jangka Panjang Daerah dan RPJM Nasional terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah Kabupaten, penetapan kawasan strategis Kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
12. Kajian lingkungan hidup strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Prioritas Pembangunan Daerah adalah Fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
16. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
17. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
18. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk

upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

19. Program Prioritas Daerah adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik cascading (penurunan) kinerja.
20. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil dan dampak) dari program/kegiatan/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.

BAB II VISI DAN MISI

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan dapat menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Pasal 3

RPJMD menjadi pedoman bagi :

- a. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD;
- b. Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah; dan/atau
- c. Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

BAB III SISTEMATIKAN RPJMD

Pasal 4

- (1) Sistematika RPJM Daerah meliputi:

a. BAB I:..../

- a. Bab I : pendahuluan;
- b. Bab II : gambaran umum kondisi Daerah;
- c. Bab III : gambaran Keuangan Daerah;
- d. Bab IV : permasalahan dan isu strategis Daerah
- e. Bab V : visi, misi, tujuan dan sasaran
- f. Bab VI : strategi, arah kebijakan dan program Pembangunan Daerah;
- g. Bab VII : kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
- h. Bab VIII : kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah
- i. BAB IX : Penutup

- (2) Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 5

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- (1) Seluruh Perangkat Daerah dan seluruh pemangku kepentingan mendukung pencapaian target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029;
- (2) Seluruh Perangkat Daerah dan seluruh pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya; dan
- (3) Seluruh Pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa harus mempedomani RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.

- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah, indikasi program prioritas, dan kebutuhan pendanaan;
- (4) Evaluasi terhadap RPJMD mencakup evaluasi terhadap indikasi rencana program prioritas, kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan, dan sasaran dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah;
- (5) Hasil evaluasi RPJMD dapat digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJMD untuk periode berikutnya.

BAB VI

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 7

Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

- a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. Terjadi perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, perubahan struktur organisasi dan tata kerja, atau perubahan kebijakan nasional.
- d. Perubahan RPJMD menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD dapat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KEADAAN KAHAR

Pasal 8

Keadaan darurat/keadaan kahar (force majeure) dimaksud antara lain berupa

bencana alam, kerusuhan massal, konflik sosial, gempa bumi, perubahan kebijakan, hal-hal di luar kewenangan pemberi dan penerima tugas.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan

Pada tanggal 19 Agustus 2025

BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Samosir

Nomor 37 Tahun 2025

Seri E Nomor 46

Tanggal 19 Agustus 2025

Nomor Register (4 - 52/2025)

Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir


MARUDUT TUA SITINJAK

Kata Pengantar

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Samosir tahun 2025-2029 ini disusun sebagai dokumen perencanaan strategis yang komprehensif untuk memandu pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan hasil dari proses perencanaan yang partisipatif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dan berorientasi pada pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Samosir terpilih.

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Samosir akan dilaksanakan melalui 9 Program Prioritas Daerah dan 10 Kegiatan *Quick Wins*/Kegiatan Hasil Terbaik Cepat (KHTC) yang dirancang untuk menjawab tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Kabupaten Samosir, dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, penguatan ekonomi lokal, dan pelestarian lingkungan hidup. Dokumen ini juga berorientasi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Prioritas Nasional.

Kami berharap RPJMD ini dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Samosir dalam melaksanakan pembangunan daerah, serta menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya dan melaksanakan program-program pembangunan dalam mewujudkan Kabupaten Samosir yang unggul, inklusif dan berkelanjutan.

Pangururan, 19 Agustus 2025
Bupati Samosir,

Cap/dto

Vandiko T. Gultom

Ikhtisar Eksekutif

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Samosir Tahun 2025-2029 adalah Rencana Pembangunan 5 Tahunan yang disusun mengacu kepada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Samosir 2025-2045, Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara 2025-2029 serta Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2025-2029 yang kemudian digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di kabupaten Samosir melalui program dan kegiatan yang selaras dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Vandiko Timotius Gultom dan Ariston Tua Sidauruk untuk periode pemerintahan 2025-2030.

Untuk menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah yang sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah sekaligus mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi, serta isu-isu strategis, maka visi Kabupaten Samosir Tahun 2025-2029 maka pemerintah Kabupaten Samosir 2025-2029 mengusung Visi yaitu **Samosir Unggul, Inklusif dan Berkelanjutan** yang ingin menunjukkan gambaran masa depan yang ideal bagi masyarakat kabupaten samosir 5 tahun kedepan.

Untuk mengimplemetasikan visi tersebut maka disusun langkah-langkah yang dituangkan dalam 3 misi yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing;
2. Memantapkan Kemandirian Ekonomi Kerakyatan yang Berkelanjutan Berbasis Pertanian, Pariwisata didukung Infrastruktur Berkualitas;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Responsif, Berintegritas dan Adaptif.

Pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan berikut ini :

Tujuan 1 Meningkatnya derajat hidup masyarakat

Dengan semakin meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan akan dapat meningkatkan derajat hidup masyarakat, hal ini akan berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdampak pada kesejahteraan seluruh masyarakat Samosir.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan ini dituangkan dalam 5 (lima) sasaran, yaitu:

Sasaran 1.1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Menitik beratkan pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Samosir. Dengan meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, akan menghasilkan derajat hidup yang lebih baik

Sasaran 1.2 Meningkatnya kualitas pendidikan

dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan diantaranya melalui peningkatan akses dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, pemberian beasiswa, dan penguatan kecerdasan emosional dan spiritual bagi tenaga pendidik dan anak didik. Dengan adanya peningkatan kualitas pendidikan, diharapkan akan meningkatkan daya saing sumber daya masyarakat Samosir

Sasaran 1.3 Meningkatnya pendapatan masyarakat

dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata dan inklusif. Peningkatan pendapatan masyarakat ini akan meningkatkan derajat hidup masyarakat yang akhirnya akan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat

Sasaran 1.4 Meningkatnya ketahanan pangan

dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan pangan untuk menjamin

ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, dan keamanan pangan yang cukup dan aman bagi seluruh masyarakat Samosir. Selain itu, ketahanan pangan Samosir juga bertujuan mencakup aspek kedaulatan pangan, maksudnya Samosir mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya sendiri melalui produksi sendiri

Sasaran 1.5 Meningkatnya ketahanan Sosial

Sasaran ini dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan masyarakat untuk mengatasi berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal, serta memelihara kohesi sosial dan stabilitas dalam menghadapi perubahan. Ini melibatkan berbagai aspek, termasuk membangun kapasitas individu dan komunitas, memperkuat lembaga-lembaga sosial, serta mempromosikan nilai-nilai seperti solidaritas, toleransi, dan kerjasama.

Tujuan 2 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan memperhatikan pemerataan dan keberlanjutan melalui program yang berkaitan dengan pertanian, pariwisata, UMK, industri serta sektor usaha lainnya dengan menjaga kualitas lingkungan hidup yang baik. Dengan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan memperhatikan aspek lingkungan hidup akan memberikan **dukungan terhadap pencapaian misi kedua RPJMD**, yaitu memantapkan kemandirian ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan berbasis pertanian, pariwisata didukung infrastruktur berkualitas.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan ini dituangkan dalam 2 (dua) sasaran, yaitu:

Sasaran 2.1 Meningkatnya PDRB sektor unggulan

dimaksudkan untuk meningkatkan PDRB sektor-sektor unggulan yang dimiliki oleh Samosir, terutama sektor pertanian dan pariwisata. Dengan meningkatnya PDRB sektor unggulan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Sasaran 2.2 Meningkatnya produktivitas Koperasi, UMK dan IKM dalam perekonomian daerah

bertujuan untuk meningkatkan produktivitas koperasi, UMK dan IKM. Pada sasaran ini dikhususkan pada koperasi, UMK dan IKM karena sebagian usaha masyarakat masih berbasis mikro dan kecil

Tujuan 3 Meningkatnya infrastruktur berkualitas

dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas infrastuktur melalui program pembangunan infrastruktur yang mantap dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Samosir mencakup daerah yang berada di lokasi terpencil/terisolir. Dengan terlaksananya peningkatan kualitas infrastruktur akan memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat Samosir untuk dapat mengakses layanan publik dan pusat-pusat kegiatan perekonomian, meningkatkan kegiatan perekonomian sehingga dapat **mendukung ketercapaian misi kedua RPJMD**, yaitu memantapkan kemandirian ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan berbasis pertanian, pariwisata didukung infrastruktur berkualitas.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan ini dituangkan dalam 2 (dua) sasaran, yaitu:

Sasaran 3.1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur

dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur hingga kemerataannya untuk mendukung seluruh aktivitas masyarakat Samosir, terutama pada aktivitas sektor ekonomi.

Sasaran 3.2 Meningkatnya kualitas ekologi

dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas ekologi termasuk peningkatan kualitas lingkungan hidup yang bertujuan untuk kelestarian alam dan Danau Toba, serta pencegahan dan penanggulangan bencana alam.

Tujuan 4 Meningkatnya kualitas kinerja birokrasi pemerintahan

Tujuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kinerja birokrasi pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien, serta fleksibel terhadap perubahan dan kebutuhan. Tujuan ini dilaksanakan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan inovasi dan implementasinya. Dengan dilaksanakannya program ini, diharapkan dapat mendukung ketercapaian misi ketiga RPJMD, yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, berintegritas dan adaptif.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan ini dituangkan

dalam 1 (satu) sasaran, yaitu:

Sasaran 4.1 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada pelayanan, kemudahan birokrasi, dan senantiasa beradaptasi terhadap kebutuhan dan perubahan.

Dalam rangka mengoperasionalkan seluruh rangkaian perencanaan diatas maka akan disusun rencana strategis organisasi perangkat daerah melalui program unggulan dan kegiatan hasil terbaik cepat serta program dan kegiatan lainnya dengan sumber pendanaan APBN, APBD maupun sumber pendanaan lain yang diharapkan dapat mempercepat pembangunan, memberikan pelayanan yang menyentuh dan berdampak pada seluruh masyarakat kabupaten Samosir.

Berbagai kekurangan yang ada, tentunya menjadi pemacu untuk memotivasi agar lebih bersemangat dalam bekerja dan berusaha demi terwujudnya Samosir Unggul, Inklusif dan berkelanjutan.

Daftar Isi

Kata Pengantar i

Iktisar ii

Daftar Isi vii

Daftar Tabel xi

Daftar Gambar xvi

BAB I PENDAHULUAN I- 1

 1.1 Latar Belakang I- 2

 1.2 Dasar Hukum I- 5

 1.3 Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan
 Dokumen Perencanaan Lainnya I- 7

 1.3.1 Hubungan RPJMD Kabupaten Samosir
 dengan RPJM Nasional I- 8

 1.3.2 Hubungan RPJMD Kabupaten Samosir
 dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara..... I- 8

 1.3.3 Hubungan RPJMD Kabupaten Samosir
 dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
 (RTRW) Kabupaten Samosir..... I- 9

 1.3.4 Hubungan RPJMD Kabupaten Samosir
 dengan RPJPD Kabupaten Samosir Tahun
 2025-2045, RKPD, Renstra PD dan Renja PD I- 10

 1.3.5 Hubungan RPJMD Kabupaten Samosir
 dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 (KLHS) RPJMD Kabupaten Samosir I- 10

 1.3.6 Hubungan RPJMD Kabupaten Samosir
 dengan Rencana Induk Pembangunan
 Kepariwisata Kabupaten Samosir 2022-
 2032 I- 11

 1.3.7 Hubungan RPJMD Kabupaten Samosir
 dengan Rencana Induk Sistem Penyediaan
 Air Minum Kabupaten Samosir..... I- 12

 1.4 Maksud dan Tujuan Penyusunan RPJMD I- 13

 1.5 Sistematika Penulisan I- 14

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II- 1

 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah II- 2

 Aspek Geografi dan Demografi II- 2

 1. Posisi dan Peran Strategis Kabupaten
 Samosir II- 2

 2. Potensi Sumber Daya Alam II- 6

 3. Daya Dukung dan Daya Tampung
 Lingkungan Hidup..... II- 10

4.	Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	II- 13
5.	Lingkungan Hidup Berkualitas.....	II- 15
6.	Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.....	II- 16
7.	Demografi.....	II- 16
	Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II- 20
1.	Kesejahteraan Ekonomi.....	II- 20
2.	Kesejahteraan untuk Semua	II- 26
3.	Pendidikan Berkualitas yang Merata	II- 29
4.	Perlindungan Sosial yang Adaptif	II- 31
5.	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju.....	II- 32
6.	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif.....	II- 33
	Aspek Daya saing Daerah	II- 33
1.	Daya Saing Sumber Daya Manusia.....	II- 33
2.	Iptek, Inovasi, dan produktivitas ekonomi	II- 34
3.	Penerapan Ekonomi Hijau	II- 35
4.	Transformasi Digital	II- 36
5.	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global.....	II- 37
6.	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	II- 38
7.	Stabilitas Ekonomi Makro	II- 39
	Aspek Pelayanan Umum	II- 41
1.	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif.....	II- 41
2.	Hukum berkeadilan, keamanan nasional yang tangguh, dan demokrasi substansial.....	II- 41
3.	Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan.....	II- 42
4.	Kinerja setiap urusan pemerintah daerah	II- 43
2.2	Gambaran Keuangan Daerah	II- 103
	Kinerja Keuangan Masa Lalu	II- 104
	Kinerja Pelaksanaan APBD	II- 105
	Kinerja Pendapatan Daerah	II- 106
	Kinerja Belanja Daerah	II- 109
	Kinerja Pembiayaan Daerah	II- 112
	Kinerja Neraca Daerah	II- 113
	Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.....	II- 116
1.	Kebijakan Pendapatan Daerah	II- 116
2.	Kebijakan Belanja Daerah	II- 117
3.	Kebijakan Pembiayaan Daerah	II- 119
	Kerangka Pendanaan	II- 109
1.	Proyeksi Pendapatan Daerah	II- 121
2.	Proyeksi Belanja Daerah.....	II- 127
3.	Proyeksi Pembiayaan Daerah	II- 130
2.3	Permasalahan dan Isi Strategis	II- 135
	Permasalahan Pembangunan Kabupaten Samosir	II- 135

	Permasalahan Pembangunan per Urusan Pemerintahan	II- 138
	Isu Strategis.....	II- 145
	1. Isu Strategis Internasional.....	II- 146
	2. Isu Strategis Nasional.....	II- 148
	3. Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara.....	II- 150
	4. Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan dalam KLHS RPJMD Kabupaten Samosir	II- 154
	5. Isu Strategis Kabupaten Samosir	II- 154
BAB III	VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	III- 1
3.1	Visi Misi, Tujuan dan Sasaran	III- 2
	Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Samosir.....	III- 2
	Sinkronisasi RPJMD dan RPJPD.....	III- 6
a.	Sinkronisasi Visi Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Samosir	III- 6
b.	Penyelarasan RPJMD dan RPJPD Kabupaten Samosir, RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029.....	III- 10
	Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Samosir	III- 31
3.2	Strategi dan Arah Kebijakan	III- 41
	Arah Kebijakan Tahunan Pembangunan Daerah	III- 76
	Prioritas Prioritas Pembangunan Daerah	III- 79
a.	Program Unggulan Daerah	III- 79
b.	Kegiatan Hasil Terbaik Cepat (<i>Quick Wins</i>)	III- 102
c.	Proyek Strategis Jangka Panjang Daerah Tahap I.....	III- 117
d.	Perumusan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Samosir	III- 123
BAB IV	PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	IV- 1
4.1	Program Perangkat Daerah	IV- 2
4.2	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	IV- 124
1.	Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2029	IV- 124
2.	Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2029	IV- 127
3.	Dukungan Program Daerah terhadap RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029.....	IV- 162
BAB V	PENUTUP.....	V- 1
5.1	Kaidah Pelaksanaan	V- 2
	Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan.....	V- 3
	Kerangka Pengendalian.....	V- 5

Sistem Insentif..... V- 15

Mekanisme Perubahan V- 15

Komunikasi Publik..... V- 16

5.2 Pembiayaan Pembangunan V- 17

5.3 Kesimpulan..... V- 19

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Luas Wilayah Kabupaten Samosir Berdasarkan Kecamatan	II- 3
Tabel 2.2	Persentase Ketinggian Lahan Di Kabupaten Samosir	II-4
Tabel 2.3	Persentase Kemiringan Lahan Di Kabupaten Samosir	II-4
Tabel 2.4	Indikator Ketahanan Energi dan Air Kabupaten Samosir	II- 14
Tabel 2.5	Indikator Lingkungan Hidup Berkualitas Kabupaten Samosir	II- 15
Tabel 2.6	Jumlah Kejadian Bencana di Kabupaten Samosir	II- 16
Tabel 2.7	Indikator Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	II- 16
Tabel 2.8	Indikator Demografi Kabupaten Samosir	II- 17
Tabel 2.9	Proyeksi Indikator Demografi Kabupaten Samosir	II- 19
Tabel 2.10	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan berdasarkan Lapangan Usaha Kabupaten Samosir.....	II-21
Tabel 2.11	Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Samosir	II-26
Tabel 2.12	Perkembangan Indikator Kesehatan Kabupaten Samosir	II-28
Tabel 2.13	Indikator Proporsi Kasus TBC yang diobati dan sembuh di Kabupaten Samosir	II-29
Tabel 2.14	Indikator Angka Kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten Samosir	II-29
Tabel 2.15	Perkembangan Indikator Pendidikan Kabupaten Samosir	II-31
Tabel 2.16	Perkembangan Indikator Perlindungan Sosial Kabupaten Samosir	II-31
Tabel 2.17	Perkembangan Indikator Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju Kabupaten Samosir	II-33
Tabel 2.18	Perkembangan Indikator Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif Kabupaten Samosir	II-33
Tabel 2.19	Perkembangan Indikator Daya Saing Sumber Daya Manusia Kabupaten Samosir.....	II-34
Tabel 2.20	Perkembangan Indikator IPTEK, Inovasi dan Produktivias Ekonomi Kabupaten Samosir	II-35
Tabel 2.21	Perkembangan Indikator Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru Kabupaten Samosir.....	II-36
Tabel 2.22	Perkembangan Indikator Transformasi Digital Kabupaten Samosir	II-36
Tabel 2.23	Perkembangan Indikator Integrasi Ekonomi Domestik dan Global Kabupaten Samosir	II-37

Tabel 2.24	Perkembangan Indikator Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Samosir	II-38
Tabel 2.25	Perkembangan Indikator Stabilitas Ekonomi Makro Kabupaten Samosir	II-39
Tabel 2.26	Perkembangan Indikator Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif Kabupaten Samosir	II-41
Tabel 2.27	Perkembangan Indikator Hukum Berkeadilan, Kemanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial Kabupaten Samosir	II-42
Tabel 2.28	Perkembangan Indikator Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan Kabupaten Samosir	II-43
Tabel 2.29	Perkembangan Indikator Kependidikan Kabupaten Samosir	II-44
Tabel 2.30	Perkembangan Indikator Kesehatan Kabupaten Samosir	II-45
Tabel 2.31	Perkembangan Indikator Kinerja RSUD dr. Hadrianus Sinaga	II-45
Tabel 2.32	Perkembangan Indikator Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir	II-46
Tabel 2.33	Perkembangan Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Samosir	II-47
Tabel 2.34	Perkembangan Indikator Satpol PP Kabupaten Samosir	II-48
Tabel 2.35	Perkembangan Indikator Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir	II-48
Tabel 2.36	Perkembangan Indikator Penanggulangan Bencana Kabupaten Samosir	II-49
Tabel 2.37	Perkembangan Indikator Sosial Kabupaten Samosir	II-49
Tabel 2.38	Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Samosir	II-50
Tabel 2.39	Perkembangan Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Samosir	II-51
Tabel 2.40	Perkembangan Indikator Pangan Kabupaten Samosir	II-51
Tabel 2.41	Perkembangan Indikator Pertanahan Kabupaten Samosir	II-52
Tabel 2.42	Perkembangan Indikator Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir	II-53
Tabel 2.43	Perkembangan Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir	II-54
Tabel 2.44	Perkembangan Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir	II-54
Tabel 2.45	Perkembangan Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Samosir	II-55
Tabel 2.46	Perkembangan Indikator Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir	II-55

Tabel 2.47	Perkembangan Indikator Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Samosir	II-56
Tabel 2.48	Perkembangan Indikator Penanaman Modal Kabupaten Samosir	II-57
Tabel 2.49	Perkembangan Indikator Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir	II-58
Tabel 2.50	Perkembangan Indikator Statistik Kabupaten Samosir	II-58
Tabel 2.51	Perkembangan Indikator Kebudayaan Kabupaten Samosir	II-59
Tabel 2.52	Perkembangan Indikator Perpustakaan Kabupaten Samosir	II-60
Tabel 2.53	Perkembangan Indikator Kelautan dan Perikanan Kabupaten Samosir	II-60
Tabel 2.54	Perkembangan Indikator Pariwisata Kabupaten Samosir	II-61
Tabel 2.55	Perkembangan Indikator Pertanian Kabupaten Samosir	II-63
Tabel 2.56	Perkembangan Indikator Perdagangan Kabupaten Samosir	II-63
Tabel 2.57	Perkembangan Indikator Perindustrian Kabupaten Samosir	II-64
Tabel 2.58	Perkembangan Indikator Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir	II-65
Tabel 2.59	Perkembangan Indikator Sekretariat Dewan Kabupaten Samosir	II-66
Tabel 2.60	Perkembangan Indikator Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir	II-66
Tabel 2.61	Perkembangan Indikator Perencanaan Pembangunan Kabupaten Samosir	II-67
Tabel 2.62	Perkembangan Indikator Keuangan Kabupaten Samosir	II-68
Tabel 2.63	Perkembangan Indikator Pengawasan Kabupaten Samosir	II-68
Tabel 2.64	Perkembangan Indikator Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Samosir	II-69
Tabel 2.65	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir	II-70
Tabel 2.66	Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir	II-107
Tabel 2.67	Perkembangan Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir (dalam miliar rupiah)	II-108
Tabel 2.68	Perkembangan Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Samosir (dalam miliar rupiah)	II-111
Tabel 2.69	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Samosir (dalam miliar rupiah)	II-113
Tabel 2.70	Perkembangan Realisasi Neraca Daerah Kabupaten Samosir (dalam miliar rupiah)	II-114

Tabel 2.71	Perkembangan Rasio Keuangan Neraca Daerah Kabupaten Samosir	II-115
Tabel 2.72	Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir	II-124
Tabel 2.73	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Samosir	II-128
Tabel 2.74	Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Samosir	II-131
Tabel 2.75	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan Pemerintahan	II-138
Tabel 2.76	Penetapan Isu Strategis Kabupaten Samosir	II-155
Tabel 2.77	Sinkronisasi Isu strategis KLHS dan RPJMD Kabupaten Samosir	II-158
Tabel 3.1	Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2029	III-3
Tabel 3.2	Sasaran Utama Pembangunan RPJPD Kabupaten Samosir Tahap I (2025-2029)	III-3
Tabel 3.3	Makna Misi RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2029	III-5
Tabel 3.4	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029 Dengan Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045.....	III-12
Tabel 3.5	Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Samosir dengan Dokumen RPJPD Kabupaten Samosir, RPJMD Provinsi Sumatera Utara, dan RPJMN.....	III-15
Tabel 3.6	Target Indikator Makro Kabupaten Samosir	III-17
Tabel 3.7	Penyelarasan Target Indikator Makro	III-18
Tabel 3.8	Penyelarasan Indikator Utama Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Samosir	III-19
Tabel 3.9	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Outcome	III-35
Tabel 3.10	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Samosir Tahun 2025-2029	III-37
Tabel 3.11	Strategi dan Arah Kebijakan	III-41
Tabel 3.12	Penahapan Pembangunan RPJMD.....	III-77
Tabel 3.13	Program Unggulan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir	III-80
Tabel 3.14	Daftar Situs Budaya Potensial Dikembangkan Kabupaten Samosir	III-91
Tabel 3.15	Kegiatan Hasil Terbaik Cepat: Berantas (Berobat Tanpa Batas)	III-103
Tabel 3.16	Kegiatan Hasil Terbaik Cepat: Layanan Jaminan untuk Tenaga Kerja Rentan (LANJUTKAN).....	III-104
Tabel 3.17	Kegiatan Hasil Terbaik Cepat: Rantang Samosir Penurunan Angka Stunting (RAMOS PANTAS).....	III-106
Tabel 3.18	Kegiatan Hasil Terbaik Cepat: Samosir Marsikkola.....	III-107
Tabel 3.19	Kegiatan Hasil Terbaik Cepat: Infrastruktur Berkelanjutan dan Berkualitas	III-108
Tabel 3.20	Kegiatan Hasil Terbaik Cepat: Samosir Bersih	III-109
Tabel 3.21	Kegiatan Hasil Terbaik Cepat: Samosir Pusat Pariwisata.....	III-110

Tabel 3.22	Kegiatan Hasil Terbaik Cepat: Samosir Na Las (Samosir Naik Kelas).....	III-111
Tabel 3.23	Kegiatan Hasil Terbaik Cepat: Bertani Selaras Alam (Pangula Nature).....	III-112
Tabel 3.24	Kegiatan Hasil Terbaik Cepat: Konservasi Daya Dukung dan Daya Tampung (SERDADU DATA).....	III-113
Tabel 3.25	Indikator Keberhasilan dan Target Kegiatan Hasil Terbaik Cepat Kabupaten Samosir.....	III-114
Tabel 3.26	Keterkaitan antara Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Nasional, Provinsi Sumatera Utara dengan Kegiatan Hasil Terbaik Cepat(KHTC)Kabupaten Samosir	III-116
Tabel 3.27	Proyek Strategis RPJPD Tahap I	III-118
Tabel 3.28	Perumusan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2029	III-124
Tabel 3.29	Prioritas Kabupaten, Program Prioritas, dan Kegiatan Strategis Daerah Kabupaten Samosir	III-148
Tabel 3.30	Sinkronisasi Prioritas Nasional dan Prioritas Kabupaten.....	III-151
Tabel 3.31	Sinkronisasi Prioritas Provinsi dan Prioritas Kabupaten.....	III-153
Tabel 4.1	Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Samosir	IV-3
Tabel 4.2	Target Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2029	IV-125
Tabel 4.3	Target Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2029	IV-128
Tabel 4.4	Dukungan Program Daerah terhadap Kegiatan Prioritas Utama RPJMN Tahun 2025-2029 dan Prioritas Provinsi Tahun 2025-2029	IV-163
Tabel 4.5	Dukungan Program Daerah terhadap Kegiatan Prioritas Utama RPJMN Tahun 2025-2029	IV-172
Tabel 4.6	Dukungan Pemerintah Kabupaten Samosir terhadap PHTC Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2030.....	IV-174
Tabel 4.7	Dukungan Pemerintah Kabupaten Samosir terhadap Program Prioritas/Proyark Strategis Daerah (PSD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2030.....	IV-186
Tabel 5.1	Risiko dan Rencana Mitigasi.....	V-11

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya	I-12
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Samosir	II-2
Gambar 2.2	Peta Topografi Kabupaten Samosir	II-3
Gambar 2.3	Tingkat Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan Kabupaten Samosir	II-10
Gambar 2.4	Peta Jasa Lingkungan Penyediaan Air Bersih Kabupaten Samosir	II-11
Gambar 2.5	Tingkat Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim Kabupaten Samosir	II-12
Gambar 2.6	Tingkat Jasa Lingkungan Pengaturan Perlindungan dari Bencana Alam Kabupaten Samosir	II-13
Gambar 2.7	Tingkat Jasa Lingkungan Pengaturan Pengelolaan dan penguraian Limbah Kabupaten Samosir	II-13
Gambar 2.8	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Samosir.....	II-17
Gambar 2.9	Piramida Penduduk Kabupaten Samosir 2024.....	II-18
Gambar 2.10	Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Samosir.....	II-21
Gambar 2.11	Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Samosir.....	II-22
Gambar 2.12	Jumlah Pengangguran Kabupaten Samosir	II-22
Gambar 2.13	IPM Kabupaten Samosir dan Komponen Pembentuknya.....	II-23
Gambar 2.14	Angka Kemiskinan Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Samosir.....	II-25
Gambar 2.15	Angka Kemiskinan Kabupaten Samosir dan Jumlah Penduduk Miskin.....	II-25
Gambar 2.16	Indeks Keparahan Kemiskinan dan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Samosir.....	II-25
Gambar 2.17	Gini Rasio Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Samosir	II-26
Gambar 2.18	Perkembangan kunjungan wisatawan.....	II-62
Gambar 2.19	Realisasi Pendapatan Kabupaten Samosir	II-107
Gambar 2.20	Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir	II-108
Gambar 2.21	Rasio Ketergantungan Fiskal dan Indeks Kemandirian Fiskal Kabupaten Samosir	II-109
Gambar 2.22	Struktur Belanja Daerah Kabupaten Samosir	II-111
Gambar 2.23	Isu Strategis Global Jangka Menengah	II-146
Gambar 2.24	Isu Strategis Naional.....	II-149
Gambar 5.1	Kerangka Kerja MPRN.....	V-6
Gambar 5.2	Tahapan Manajemen Risiko untuk Mencapai Target RPJMD.....	V-7

Bab I

Pendahuluan

Samosir Unggul,
Inklusif dan
Berkelanjutan



1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah juga harus mendukung terhadap pencapaian target pembangunan Nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan Nasional. Berdasarkan konsep pembangunan daerah dimaksud, maka daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk meningkatkan dan pemeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodisasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah (PD). Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPD) dijabarkan oleh dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD), selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD).

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Perda RPJPD Tahun 2025-2045, maka daerah berkewajiban untuk segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, mulai dari Rancangan Teknokratik (Rantek) RPJMD. Penyusunan RPJMD harus diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pelantikan Kepala daerah terpilih. Apabila penyelenggara pemerintahan daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah

(Perda) RPJMD dalam waktu tersebut, maka Kepala daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya selama 3 (tiga) bulan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029. Sebagian substansi Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi dan misi, program Kepala daerah Bupati Samosir, Vandiko Timotius Gultom, ST dan Wakil Bupati Ariston Tua Sidauruk, SE, MM yang telah dilantik oleh Presiden RI Bapak Jenderal TNI (Purn) H. Prabowo Subianto pada tanggal 20 Februari 2025 berdasarkan hasil Pemilukada Serentak pada tanggal 27 November 2024 dengan masa bakti/periodisasi tahun 2025 hingga 2030. Penyusunan RPJMD disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). RPJMD Tahun 2025-2029 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan Nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah harus menitikberatkan masyarakat sebagai penerima manfaat dan pelaku pembangunan.

Sebagai landasan, untuk mewujudkan visi RPJMN Tahun 2025-2029 **Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045**, dan visi pembangunan Provinsi Sumatera Utara 2025-2029, yakni **Kolaborasi Sumut Berkah menuju Sumatera Utara yang Unggul, Maju dan Berkelanjutan**, dan untuk mendukung visi Nasional dan Provinsi Sumatera Utara yang mencerminkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dan

transformasi menuju daya saing global, maka visi pembangunan Kabupaten Samosir 2025-2029 yaitu **Samosir Unggul, Inklusif dan Berkelanjutan**.

Dalam 5 tahun ke depan, Kabupaten Samosir akan menghadapi sejumlah tantangan pembangunan strategis yang perlu diantisipasi, yaitu keterbatasan infrastruktur dasar, daya saing SDM yang masih rendah, ketergantungan pada sektor pertanian, minimnya diversifikasi ekonomi, tata kelola pariwisata yang belum optimal, penurunan kualitas lingkungan, investasi yang masih rendah, dan ketimpangan wilayah yang masih menonjol. Untuk menjawab tantangan ini, Samosir perlu strategi pembangunan inklusif dan berkelanjutan yang fokus pada infrastruktur, pendidikan, industrialisasi, reformasi tata kelola pariwisata, serta penguatan ekosistem dan ketahanan sosial ekonomi, dan diharapkan RPJMD Kabupaten Samosir 2025-2029 dapat memperkuat ketahanan wilayah dan mendorong diversifikasi ekonomi dan memastikan kesinambungan program pembangunan berdasarkan tahapan pembangunan, sehingga pembangunan berjalan secara terarah dan tetap berkomitmen dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, adalah: pendekatan teknokratik; pendekatan partisipatif; pendekatan politis; pendekatan atas-bawah dan bawah-atas; pendekatan holistik-tematik; pendekatan integratif; dan pendekatan spasial. Hal-hal yang diperhatikan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 yaitu:

1. RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029.
2. RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029.
3. RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029.
4. RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029.

5. Data capaian pembangunan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sebagai salah satu dasar proyeksi target capaian pembangunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029.
6. Kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam serta kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan/atau tujuan pembangunan berkelanjutan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta isu-isu strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2025-2029.
7. Dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 191);
12. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 76);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Samosir Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 73 Seri E Nomor 31);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Samosir Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2025 Nomor 27 Seri E Nomor 45).

1.3 Hubungan antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus saling terintegrasi dan sinergi dengan perencanaan pembangunan nasional. RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahunan dimana penyusunannya harus berpedoman pada RPJPD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2045 sekaligus memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029. Selanjutnya RPJMD dijabarkan menjadi RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan dan mengacu pada RKP serta sebagai pedoman Renstra OPD.

Selain itu, sebagaimana pasal 12 ayat (2) Permendagri 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa RPJMD juga berpedoman pada RTRW sehingga RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2029 berpedoman pada RTRW Kabupaten Samosir 2018- 2038, RTRW Provinsi Sumatera Utara 2017-2037, RTRW Nasional 2008-2028.

1.3.1 Hubungan RPJMD Kabupaten Samosir dengan RPJM Nasional

Perencanaan pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, diperlukan penyelarasan RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029. Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan periodesasinya. Aspek penyelarasan dimaksud bermakna bahwa disamping RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2029 menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah, dan wakil kepala daerah terpilih, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (delapan) Asta Cita, 17 (tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029 melalui penyelarasan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan sasaran, agenda pembangunan, strategi, arah pengembangan wilayah, dan program strategis nasional dengan memperhatikan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

1.3.2 Hubungan RPJMD Kabupaten Samosir dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Samosir Tahun 2025–2029 dilaksanakan dengan mengacu dan menyelaraskan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan sinergi antara pemerintah daerah kabupaten dengan pemerintah provinsi dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan.

RPJMD Provinsi Sumatera Utara menekankan pada penguatan daya saing wilayah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan

infrastruktur wilayah, serta penguatan sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian, dan industri. Kabupaten Samosir sebagai bagian dari kawasan strategis Danau Toba turut mengambil peran dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan provinsi, khususnya pada pengembangan destinasi pariwisata prioritas nasional, penguatan pertanian berkelanjutan, serta peningkatan konektivitas wilayah.

Sejalan dengan hal tersebut, RPJMD Kabupaten Samosir memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar, pengembangan kawasan pariwisata terpadu, revitalisasi pertanian, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang mendukung arah kebijakan Provinsi Sumatera Utara. Penyelarasan ini diwujudkan melalui harmonisasi program dan kegiatan perangkat daerah Kabupaten Samosir dengan program prioritas provinsi, guna mendorong percepatan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Dengan demikian, hubungan antara RPJMD Kabupaten Samosir dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara bersifat sinergis, saling mendukung, dan menjadi dasar untuk membangun integrasi perencanaan yang berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah yang efektif dan efisien.

1.3.3 Hubungan RPJMD Kabupaten Samosir dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Samosir

Penyusunan RPJMD Kabupaten Samosir dilakukan dengan mengacu pada arah penataan ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 3 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Samosir Tahun 2018-2038 dan Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya. RTRW memberikan kerangka spasial berupa struktur ruang, pola ruang, serta arahan pemanfaatan kawasan yang menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

Dengan keterpaduan tersebut, RPJMD berfungsi sebagai instrumen operasional pembangunan jangka menengah yang menerjemahkan arahan tata ruang menjadi program sektoral yang terarah dan terukur. Hubungan ini memastikan pembangunan Kabupaten Samosir berlangsung selaras dengan penataan ruang wilayah, sehingga mampu menghindari konflik pemanfaatan

ruang, menjaga kelestarian lingkungan, serta mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

1.3.4 Hubungan RPJMD Kabupaten Samosir dengan RPJPD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2045, RKPD, Renstra PD dan Renja PD

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan RPJMD tahap dari tahapan pelaksanaan RPJPD Tahun 2005 -2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah periode tahun 2025-2029, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan tahap I yang termuat dalam RPJPD Tahun 2025-2045 melalui penyelarasan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka Panjang Daerah.

Selanjutnya RPJMD nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yang menjabarkan RPJMD menjadi kebijakan, program strategis dan operasional dalam rangka menangani isu strategis dan peningkatan pelayanan publik untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Kemudian, pelaksanaan RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2029 ini nantinya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Kabupaten Samosir yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Renja PD. Dalam pelaksanaan tahunannya, RPJMD melalui RKPD menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

1.3.5 Hubungan RPJMD Kabupaten Samosir dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Samosir

Dalam rangka memastikan bahwa pembangunan daerah Kabupaten Samosir berjalan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Samosir Tahun 2025–2029 dilengkapi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS merupakan instrumen penting dalam mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen perencanaan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

KLHS RPJMD Kabupaten Samosir disusun untuk mengidentifikasi isu-isu strategis lingkungan hidup serta potensi risiko dan dampak terhadap keberlanjutan pembangunan. Hasil KLHS menjadi dasar pertimbangan dalam merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, hingga program prioritas dalam RPJMD.

Hubungan antara RPJMD dan KLHS bersifat saling melengkapi: KLHS memberikan masukan substantif dan analisis lingkungan hidup terhadap dokumen RPJMD, sementara RPJMD mengakomodasi hasil KLHS dalam bentuk program dan kegiatan yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan inklusif.

Dengan demikian, KLHS RPJMD Kabupaten Samosir bukan hanya menjadi persyaratan formal perencanaan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa kebijakan pembangunan daerah dapat melestarikan lingkungan hidup, menjaga kualitas sumber daya alam, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang.

1.3.6 Hubungan RPJMD Kabupaten Samosir dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Samosir 2022-2032

RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2025–2029 disusun dengan memperhatikan arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) Tahun 2022–2032. Hal ini dilakukan agar pembangunan sektor pariwisata sebagai unggulan daerah dapat berjalan selaras, terarah, dan berkelanjutan.

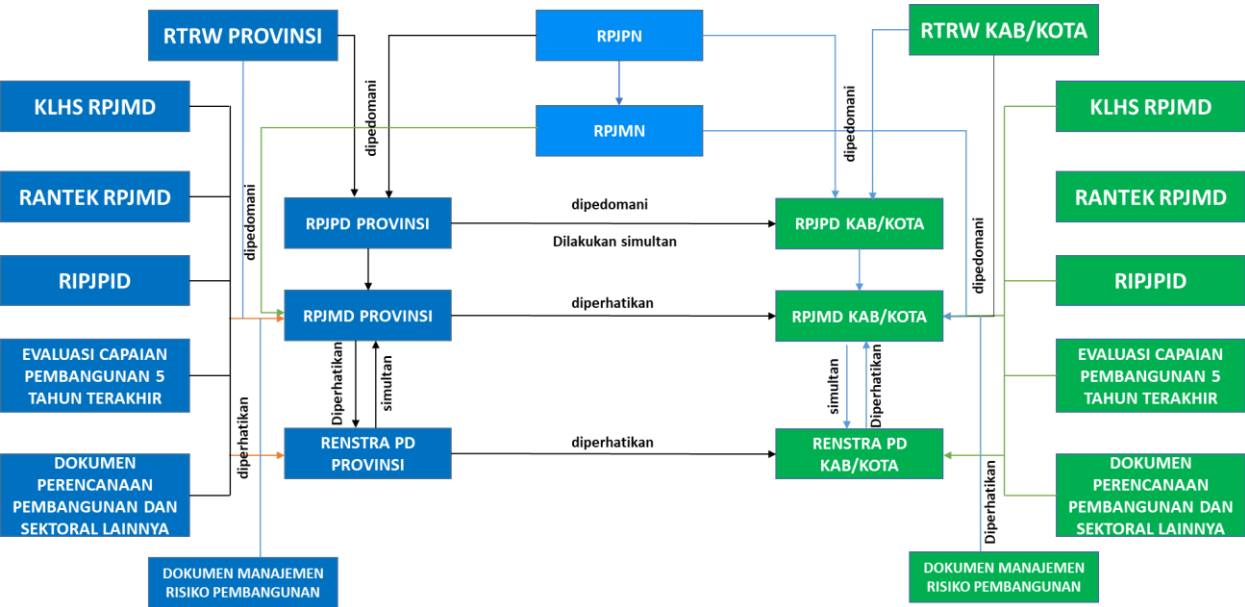
RIPPARDA menjadi acuan utama dalam pengembangan destinasi wisata, promosi, infrastruktur, serta penguatan pelaku dan kelembagaan pariwisata. RPJMD mengakomodasi rencana tersebut ke dalam program pembangunan daerah. Melalui penyelarasan ini, RPJMD dan RIPPARDA saling mendukung dalam mewujudkan Samosir sebagai destinasi pariwisata unggulan yang berdaya saing, ramah lingkungan, dan berbasis budaya lokal.

1.3.7 Hubungan RPJMD Kabupaten Samosir dengan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Samosir

Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) merupakan dokumen teknis jangka panjang (20 tahun) untuk pengembangan sistem penyediaan air minum secara terpadu dan berkelanjutan. RISPAM Kabupaten Samosir menjadi rujukan teknis dalam penyusunan program dan kegiatan di bidang air minum yang tercantum dalam RPJMD. Melalui sinkronisasi ini, pembangunan sistem penyediaan air minum yang andal, berkelanjutan, dan merata dapat diwujudkan sesuai arah pembangunan daerah. RPJMD menetapkan target-target pembangunan infrastruktur dasar, termasuk peningkatan cakupan layanan air bersih bagi masyarakat, yang dijabarkan lebih teknis dan terstruktur dalam RISPAM.

Dengan demikian, implementasi RISPAM sangat bergantung pada komitmen politik dan penganggaran daerah yang tertuang dalam RPJMD. Sebaliknya, RPJMD mendapatkan dukungan teknis dan perencanaan jangka panjang dari RISPAM agar perencanaan sektor air minum lebih terarah, efisien, dan sesuai kebutuhan riil masyarakat.

Selanjutnya, hubungan RPJMD Kabupaten Samosir dengan dokumen perencanaan pemabangunan lainnya dijelaskan pada bagan di bawah ini.



Gambar 1.1 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Sumber: Imendagri Nomor 2 Tahun 2025

1.4 Maksud dan Tujuan Penyusunan RPJMD

Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2029 adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah desa, masyarakat, dunia usaha, dan stakeholder lainnya) dalam mewujudkan visi misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Samosir terpilih, dalam rangka tercapainya cita-cita masyarakat Samosir maju, sejahtera dan berkelanjutan.

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2025- 2029, adalah:

1. Penjabaran visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Samosir;
2. Pengintegrasian arah kebijakan Pembangunan Nasional dan Daerah;
3. Pedoman Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Menjadi tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
5. Menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan
6. Memungkinkan terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergi dan kolaborasi baik antar daerah, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029 dan sebagai perwujudan dari visi-misi Kepala Daerah yang akan diimplementasikan melalui Program dan Kegiatan dengan tolok ukur indikator yang menjadi acuan dalam penentuan arah keberhasilan pembangunan.

1.5 Sistematika

Penulisan

Dokumen RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2029 ini disajikan dalam sistematika berikut ini.

BAB I PENDAHULUAN

Bab I RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2025–2029 disusun sebagai bagian pembuka yang memberikan landasan konseptual, hukum, dan strategis terhadap keseluruhan isi dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan. Secara substansi, struktur dan isi Bab I telah dirancang sesuai dengan Instruksi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Samosir 2025-2029 Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, yang menekankan pentingnya RPJMD sebagai dokumen jangka menengah yang terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Utara.

Bab I diawali dengan penjelasan latar belakang, yang menjabarkan urgensi penyusunan RPJMD dalam rangka menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir terpilih untuk masa bakti 2025–2030. RPJMD ini menjadi dokumen utama dalam merumuskan arah kebijakan dan pelaksanaan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan, dan sekaligus menjadi tahapan awal dari implementasi RPJPD Kabupaten Samosir 2025–2045. Dokumen ini tidak hanya sebagai perwujudan teknokrasi pembangunan, tetapi juga instrumen politik yang sah dalam menjalankan mandat konstitusional kepala daerah.

Selanjutnya, disampaikan landasan hukum yang memperkuat dasar penyusunan RPJMD, mulai dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, hingga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 sebagai pedoman terbaru penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah.

Bab ini juga memuat keterkaitan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, baik vertikal maupun horizontal. RPJMD berfungsi menjembatani antara arah pembangunan jangka panjang yang ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Samosir 2025–2045 dan arah pembangunan Provinsi Sumatera Utara dalam RPJMD 2025–2029 serta arah pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029. Selain itu, RPJMD juga terintegrasi dengan dokumen sektoral dan tematik lainnya seperti RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis), dan RIPPARKAB (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Samosir) yang memperkuat dimensi spasial, lingkungan dan kepariwisataan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Selanjutnya dijelaskan maksud dan tujuan penyusunan RPJMD, yaitu untuk menjadi pedoman utama dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2025-2029 selama masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati. Dokumen ini bertujuan mewujudkan pembangunan yang inklusif, terukur, dan berbasis hasil, serta memastikan konsistensi antara perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan.

Sebagai bagian akhir, Bab I menyajikan sistematika penulisan dokumen, yang terdiri dari lima bab utama dan lampiran-lampiran yang mendukung pelaksanaan RPJMD secara teknis. Sistematika ini memberikan gambaran menyeluruh tentang isi dokumen, mulai dari pendahuluan, kondisi daerah, arah kebijakan, rencana program perangkat daerah, hingga strategi pelaksanaan dan pengendalian.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Bab II RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2025–2029 berfungsi sebagai landasan analitis yang menyajikan potret menyeluruh mengenai kondisi objektif dan strategis daerah. Bab ini membahas secara mendalam berbagai dimensi pembangunan melalui empat aspek utama, yaitu geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, dan pelayanan umum, yang secara kolektif memberikan kerangka pemahaman utuh terhadap tantangan dan peluang pembangunan daerah.

Analisis dimulai dari aspek geografi dan demografi, dengan menggambarkan karakteristik topografi, iklim, kependudukan, dan penyebaran wilayah,

sebagai faktor fundamental yang membentuk dinamika pembangunan wilayah. Selanjutnya, aspek kesejahteraan masyarakat dievaluasi melalui data dan tren capaian pembangunan selama periode 2020–2024, termasuk pencapaian indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, ketimpangan sosial, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan kondisi ketenagakerjaan. Aspek ini juga menyoroti kondisi pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta akses terhadap layanan dasar sebagai indikator kualitas hidup masyarakat.

Aspek daya saing daerah dianalisis dari perspektif kualitas sumber daya manusia, kapasitas inovasi dan digitalisasi, penguatan ekonomi hijau dan biru, serta integrasi dengan rantai nilai domestik dan global. Fokus khusus diberikan pada kemampuan daerah dalam melakukan transformasi ekonomi melalui hilirisasi komoditas unggulan, pengembangan UMKM, dan peningkatan konektivitas infrastruktur sebagai pendorong efisiensi dan produktivitas wilayah. Dari sisi pelayanan umum, pembahasan mencakup evaluasi kualitas dan jangkauan layanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah, serta tantangan dalam mewujudkan tata kelola yang efektif, transparan, dan inklusif.

Salah satu bagian krusial dari Bab II adalah gambaran kondisi keuangan daerah, yang memuat analisis realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama lima tahun terakhir serta menyajikan proyeksi fiskal dan kapasitas keuangan daerah untuk periode 2025–2029. Hal ini menjadi instrumen penting dalam menjamin konsistensi antara perencanaan dan pembiayaan pembangunan daerah secara jangka menengah.

Selain menyajikan data dan tren historis, Bab II juga mengidentifikasi permasalahan pokok dan isu strategis utama yang bersumber dari dinamika lingkungan global (seperti perubahan iklim dan geostrategi ekonomi), nasional (arah kebijakan pemerintah pusat), maupun regional (perubahan struktur ekonomi dan sosial di kawasan Sumatera Utara dan sekitarnya). Melalui pendekatan analitis dan proyeksi strategis, bab ini merumuskan sejumlah tantangan krusial dan potensi unggulan yang akan menjadi basis penyusunan kebijakan pembangunan lima tahun ke depan.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab III RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2025–2029 merupakan bagian fundamental dari dokumen perencanaan daerah yang memuat arah kebijakan dan strategi pembangunan lima tahunan, berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Bab ini menyajikan kerangka berpikir strategis yang menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah secara terarah, terpadu, dan terukur.

Bab ini diawali dengan pemaparan visi pembangunan daerah, yang merupakan rumusan ideal tentang kondisi masa depan Kabupaten Samosir yang ingin dicapai pada akhir periode RPJMD. Visi ini disusun berdasarkan aspirasi masyarakat, kondisi factual daerah, serta mengacu pada visi jangka panjang yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Samosir 2025–2045 dan sinkronisasi dengan Visi RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025–2029 serta Visi Nasional sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2025–2029 dan Asta Cita Presiden. Visi tersebut menjadi landasan dalam merumuskan arah pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Selanjutnya, dijabarkan misi pembangunan daerah sebagai bentuk penjabaran visi ke dalam langkah-langkah strategis yang bersifat lebih operasional. Setiap misi dirancang untuk menjawab isu-isu strategis yang telah diidentifikasi pada bab sebelumnya, sekaligus menjadi kerangka arah kebijakan dalam pembangunan lintas sektor. Misi ini menjadi pijakan untuk menyusun tujuan dan sasaran pembangunan daerah, serta menentukan prioritas program pembangunan.

Dari misi tersebut kemudian diturunkan tujuan pembangunan daerah, yang menggambarkan hasil yang ingin dicapai secara umum dalam lima tahun ke depan. Tujuan ini bersifat strategis dan menjadi orientasi utama dalam pelaksanaan pembangunan. Turunan dari tujuan tersebut adalah sasaran pembangunan daerah, yang dirumuskan lebih spesifik dan terukur, serta disusun dengan pendekatan SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound*), sehingga memudahkan proses monitoring dan evaluasi pembangunan. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan, bab ini juga menetapkan indikator kinerja utama daerah, yang meliputi indikator makro seperti peningkatan PDRB per kapita, penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan IPM, peningkatan daya saing daerah, serta penurunan emisi gas rumah kaca. Setiap indikator dilengkapi dengan target kuantitatif lima tahunan yang sejalan dengan target RPJMN

dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), serta menjadi acuan utama dalam penyusunan rencana tahunan dan pengukuran kinerja pemerintah daerah.

Bab III menyajikan peta keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran, yang dituangkan dalam bentuk matriks atau diagram. Peta ini berfungsi untuk memperjelas hubungan logis antar komponen perencanaan strategis dan sebagai dasar dalam menyusun program prioritas serta arah kebijakan sektor-sektor pembangunan. Dengan struktur sistematis dan keterhubungan logis yang kuat, Bab III menjadi acuan utama dalam membangun sinergi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan RPJMD menuju pencapaian visi “Samosir Unggul, Inklusif dan Berkelanjutan”.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab IV RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2025–2029 merupakan bagian penting yang menjembatani arah strategis pembangunan daerah dengan implementasi operasional melalui program dan kegiatan perangkat daerah. Bab ini memuat rencana program pembangunan yang menjadi tanggung jawab masing-masing perangkat daerah, serta menjelaskan bagaimana program-program tersebut disusun untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya.

Pembahasan Bab IV diawali dengan penjelasan mengenai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik urusan wajib maupun pilihan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pemerintah Kabupaten Samosir memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren yang harus dijabarkan ke dalam program dan kegiatan yang relevan dengan karakteristik serta kebutuhan masyarakat daerah.

Selanjutnya, bab ini merinci program-program prioritas perangkat daerah berdasarkan misi dan tujuan RPJMD. Setiap program dikembangkan untuk mendukung pencapaian target sasaran pembangunan daerah dan dirancang secara spesifik oleh OPD sesuai tugas pokok dan fungsinya. Untuk memastikan akuntabilitas dan pengukuran kinerja, masing-masing program dilengkapi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja

Daerah (IKD). IKD yang bersifat makro, sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan secara menyeluruh. Indikator ini mencakup capaian PDRB per kapita, tingkat kemiskinan, pengangguran terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Daya Saing Daerah (IDSD), dan Indeks Risiko Bencana, yang dijadikan sebagai acuan evaluatif dan dasar pelaporan kinerja daerah secara nasional. Target capaian dirinci secara tahunan untuk memudahkan pelacakan kinerja secara periodik.

Bab ini juga menekankan pentingnya penyelarasan program dengan prioritas pembangunan daerah, termasuk integrasi dengan 9 Program Prioritas Daerah dan 10 Kegiatan *Quick Wins*/Kegiatan Hasil Terbaik Cepat (KHTC) yang dirancang untuk memberikan dampak nyata dan langsung kepada masyarakat. Selain itu, terdapat pula sinkronisasi dengan kebijakan pembangunan nasional seperti Proyek Strategis Nasional (PSN) dan prioritas yang tertuang dalam RPJMN 2025–2029, agar pembangunan daerah sejalan dengan agenda nasional dan global seperti SDGs. Untuk memperjelas hubungan antara sasaran pembangunan, program, indikator, dan perangkat pelaksana, bab ini menyajikan peta program perangkat daerah dalam bentuk matriks atau table yang menunjukkan keterkaitan logis antar elemen perencanaan. Peta ini menjadi acuan penting dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD tahunan.

Bab IV juga menguraikan strategi penguatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk langkah-langkah perbaikan tata kelola, peningkatan kapasitas birokrasi, penguatan pelayanan publik, serta optimalisasi sistem monitoring dan evaluasi berbasis indikator kinerja. Pendekatan ini memastikan bahwa seluruh program pembangunan tidak hanya dirancang secara teknokratis, tetapi juga dijalankan dengan prinsip tata kelola yang efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi hasil.

BAB V PENUTUP

Bab V RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2025–2029 berfungsi sebagai bagian penutup yang merangkum secara sistematis seluruh kerangka pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Bab ini tidak hanya menyimpulkan arah kebijakan yang telah dirumuskan dalam bab-bab sebelumnya, tetapi juga menetapkan prinsip-prinsip penting untuk memastikan implementasi yang konsisten, terarah, dan berkelanjutan. Salah satu fokus utama dalam bab ini adalah penegasan konsistensi antara

perencanaan dan penganggaran, sebagai syarat mutlak agar seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dapat diwujudkan secara efektif.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan yang realistis dan terukur, Bab V juga membahas skema pendanaan pembangunan daerah dari optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun non-pemerintah secara lebih inovatif, integratif, dan tepat sasaran. Tujuannya adalah untuk memperkuat keberlanjutan fiskal dalam menghadapi dinamika kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks dan multidimensional.

Lebih lanjut, bab ini menguraikan kerangka pengendalian dan sistem evaluasi, yang dirancang untuk mengukur efektivitas pelaksanaan RPJMD melalui pendekatan berbasis indikator kinerja dan penguatan sistem akuntabilitas. Bab ini juga menekankan pentingnya mekanisme perubahan RPJMD, yang diperlukan untuk menjamin fleksibilitas kebijakan dalam menghadapi perubahan situasi yang bersifat mendesak, seperti perubahan regulasi nasional, bencana alam, krisis ekonomi, atau dinamika politik. Penyesuaian dokumen RPJMD tetap dilakukan secara terstruktur dan legal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, agar tetap menjamin kepastian arah pembangunan.

Selain itu, komunikasi publik menjadi elemen penting dalam Bab V sebagai bagian dari strategi implementasi. RPJMD harus dikomunikasikan secara luas kepada masyarakat, akademisi, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya, agar tercipta dukungan kolektif dan keterlibatan aktif dalam pelaksanaan program pembangunan. Bab V juga menjelaskan mengenai usaha peningkatan kapasitas pembiayaan pembangunan yang dilakukan melalui pengembangan inovasi pembiayaan di sektor publik dan non-publik.

Bab ini ditutup dengan kesimpulan dan rekomendasi strategis, yang menegaskan kembali komitmen Pemerintah Kabupaten Samosir dalam menjadikan RPJMD sebagai pedoman utama pembangunan daerah selama periode 2025–2029.

Bab II

Gambaran

Umum Daerah

Samosir Unggul,
Inklusif dan
Berkelanjutan



2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Aspek Geografi dan Demografi

1. Posisi dan Peran Strategis Kabupaten Samosir

a. Letak geografi

Kabupaten Samosir terletak pada posisi 20 21’38” - 20 49’48” Lintang Utara; 980 24’00” - 990 01’48” Bujur Timur", dengan ketinggian antara 904 - 2.250 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Samosir adalah daerah yang unik karena memiliki pulau Samosir yang dikelilingi oleh Danau Toba dimana sepertiga dari wilayah Kabupaten Samosir terdiri atas luas wilayah danau yaitu seluar ± 624,80 km² (30,20 persen) dan luas daratan ± 1.444,25 km² (69,80 persen) yang terdiri dari seluruh Pulau Samosir dan sebagian wilayah daratan Pulau Sumatera. Total luas wilayah Kabupaten Samosir adalah ± 2.069,05 km², dengan batas administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun
- Sebelah Timur : Kabupaten Toba
- Sebelah Selatan : Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan
- Sebelah Barat : Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat

Secara spasial, orientasi wilayah Kabupaten Samosir dalam konstelasi Provinsi Sumatera Utara serta batas wilayah administratif Kabupaten Samosir ditunjukkan oleh gambar di bawah ini.



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Samosir

Sumber: RTRW Kabupaten Samosir

Kabupaten Samosir memiliki 9 kecamatan yang terdiri dari 128 desa dan 6 kelurahan serta 380 dusun/lingkungan. Kecamatan Harian adalah wilayah terluas yaitu seluas 38,81% dan kecamatan dengan luasan terkecil adalah Kecamatan Sitiotio seluas 3,51% dari luas wilayah Kabupaten Samosir. Lebih lanjut, wilayah Samosir berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

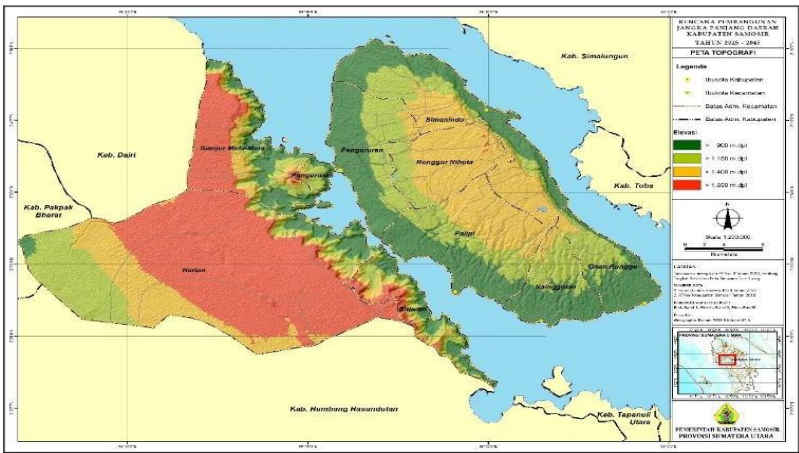
Tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten Samosir Berdasarkan Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah	% Luas
1	Sianjur Mulamula	12	-	140,20	9,71
2	Harian	13	-	560,45	38,81
3	Sitiotio	8	-	50,76	3,51
4	Onan Runggu	12	-	60,89	4,22
5	Nainggolan	13	2	87,86	6,08
6	Palipi	17	-	129,55	8,97
7	Ronggurnihuta	8	-	94,87	6,57
8	Pangururan	25	3	121,43	8,41
9	Simanindo	20	1	198,20	13,72
Jumlah		128	6	1.444,25	100

Sumber: Kabupaten Samosir Dalam Angka, 2025

b. Topografi

Kabupaten Samosir terletak pada jajaran Bukit Barisan dengan topografi berbukit dan bergelombang. Komposisi tanah didominasi jenis tanah *tuff* Toba, pasir bercampur tanah liat, kapur dan sebagian lainnya berupa lapisan tanah batuan yang relatif kurang subur untuk pertanian.



Gambar 2.2 Peta Topografi Kabupaten Samosir

Sumber: RTRW Kabupaten Samosir

Kabupaten Samosir terletak pada wilayah dataran tinggi, dengan ketinggian antara 904-2.250 meter di atas permukaan laut dengan kontur

sebagai berikut.

Tabel 2.2 Persentase ketinggian lahan di Kabupaten Samosir

No	Ketinggian	% luas
1.	904 m s / d 1.000 m dpl	± 10 %
2.	1.000 m s / d 1.500 m dpl	± 25 %
3.	> 1.500 m dpl	± 65 %

Sumber : RTRW Kabupaten Samosir

Topografi Kabupaten Samosir dan kontur tanah pada umumnya berbukit dan bergelombang, dengan komposisi kemiringan lahan seperti tabel berikut.

Tabel 2.3 Persentase kemiringan lahan di Kabupaten Samosir

No	Kemiringan Lahan (derajat)	Klasifikasi	% luas
1.	0 – 2	Datar	± 10 %
2.	2-15	Landai	± 20 %
3.	15 – 40	Miring	± 55 %
4.	> 40	Terjal	± 15 %

Sumber : RTRW Kabupaten Samosir

c. Geologi

Batuan yang tersusun di Kabupaten Samosir umumnya didominasi oleh material letusan gunung api yang sudah berusia ribuan tahun. Hal ini jelas terlihat dengan ditemukannya tanah-tanah berbatu di berbagai tempat di Kabupaten Samosir. Selain itu, pada lapisan atasnya banyak dijumpai kandungan tanah diatomea. Jenis tanah ini cukup ekonomis untuk dijadikan bahan baku pada beberapa jenis industri. Namun tentunya perlu ada kajian tersendiri mengenai kandungan unsur-unsur fisik dan kimia pada tanah diatomea tersebut.

Jenis batuan lainnya yang terdapat di Kabupaten Samosir adalah jenis sirtu (pasir batu) dan batu kapur yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan konstruksi bangunan. Saat ini sudah ada beberapa usaha masyarakat yang menggali jenis batuan sirtu serta mengolah batu kapur menjadi batu bata, seperti yang bisa kita jumpai di Desa Siambalo.

d. Hidrologi

Kondisi sungai yang ada khususnya di Pulau Samosir mengalami tingkat kerusakan sangat tinggi disebabkan terjadinya penggundulan hutan di daerah hulu sehingga gagal dalam menjalankan fungsinya sebagai

penampung, penyimpanan dan pendistribusian air. Kawasan yang perlu dikendalikan perkembangannya karena berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan yang berdampak bencana alam di sekitar pantai Danau Toba adalah :

- 1.** Wilayah perairan di Kecamatan Pangururan, Simanindo, Nainggolan, Onanrunggu dan Sianjur Mulamula;
- 2.** Bagian wilayah Sub DAS Aek Silang dan bagian wilayah Sub DAS Aek Parombahan di Kecamatan Harian;
- 3.** Bagian wilayah Sub DAS Binanga Bolon di Kecamatan Nainggolan
- 4.** Bagian wilayah Sub DAS Parombahan di Kecamatan Harian dan Kecamatan Sianjur Mulamula;
- 5.** Bagian wilayah Sub DAS Aek Tulas di Kecamatan Pangururan;
- 6.** Bagian wilayah Sub DAS Binanga Aron di Kecamatan Pangururan dan Kecamatan Ronggur Nihuta;
- 7.** Bagian wilayah Sub DAS Binanga Guluan dan DAS Binanga Silubung di Kecamatan Palipi;
- 8.** Bagian wilayah Sub DAS Sitiung-tiung di Kecamatan Simanindo;
- 9.** Bagian wilayah Sub DAS Simala di Kecamatan Onan Runggu.

Secara umum, peran dan kontribusi daerah Kabupaten Samosir terhadap wilayah sekitar antara lain:

1. Ekonomi & Pariwisata

- Menjadi ikon pariwisata Danau Toba, salah satu destinasi super prioritas nasional.
- Menyumbang devisa melalui sektor wisata budaya (adat Batak), wisata alam, danau, serta sejarah.
- Sektor pertanian: menghasilkan kopi, jagung, padi, dan hortikultura.
- UMKM lokal seperti ulos, kerajinan tangan, dan kuliner khas Batak ikut mendukung perekonomian.

2. Infrastruktur & Konektivitas

- Tersedia akses darat (jembatan Tano Ponggol, jalan lingkar Samosir).
- Akses udara melalui Bandara Silangit (Tapanuli Utara) yang terhubung dengan Samosir.

- Transportasi air: kapal ferry dan kapal penyeberangan yang menghubungkan Samosir dengan wilayah sekitar (Parapat, Tigaras, Balige, Muara).
- Pembangunan infrastruktur pariwisata meningkatkan arus wisatawan lokal maupun mancanegara.

3. Lingkungan Hidup & Ekologi

- Berada di tengah Danau Toba, yang merupakan danau vulkanik terbesar di dunia.
- Samosir memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem Danau Toba sebagai sumber air, oksigen, dan keanekaragaman hayati.
- Konservasi hutan, lahan, serta pengendalian pencemaran air danau sangat strategis untuk kelestarian lingkungan regional.

4. Budaya & Identitas

- Samosir adalah pusat kebudayaan Batak Toba, dengan peninggalan sejarah, tradisi, dan situs budaya seperti makam raja, rumah adat Batak, hingga musik gondang.
- Menjadi daya tarik budaya yang menguatkan identitas nasional dan memperkaya keberagaman Indonesia.

5. Kontribusi Sosial & Regional

- Memberikan lapangan kerja melalui sektor pariwisata, pertanian, dan jasa.
- Meningkatkan interaksi dan integrasi antarwilayah sekitar Danau Toba.
- Menjadi penopang pertumbuhan kawasan Danau Toba yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN).

2. Potensi Sumber Daya Alam

a. Pertanian

Pertanian merupakan lapangan usaha yang paling besar dan mendominasi perekonomian Kabupaten Samosir dimana pada tahun 2024, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan membentuk 49,98 persen dari total PDRB ADHB Kabupaten Samosir. Produksi komoditas tanaman pangan

terbesar di Kabupaten Samosir adalah jagung, padi, ubi jalar, ubi kayu dan kacang tanah. Sementara itu, untuk petanian hortikultura, komoditi yang paling besar produksinya adalah kentang, kubis, bawang merah dan cabe. Selanjutnya, hewan ternak yang paling banyak dipelihara yaitu ayam buras, babi, kerbau, itik, kambing dan sapi. Komoditi perkebunan terbesar adalah kopi, kemiri, aren, dan kakao. Metode pengembangan perikanan di Kabupaten Samosir telah mengalami perubahan, sebelumnya mayoritas dilakukan langsung di perairan Danau Toba, sekarang menjadi peningkatan teknologi penangkapan perikanan umum dan peningkatan/pengelolaan produksi yang baik terhadap jenis budidaya perikanan darat. Langkah ini ditempuh untuk menindaklanjuti penetapan Kawasan Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang dikembangkan Pemerintah Pusat dan kesepakatan bersama 7 (tujuh) kabupaten/kota sekitar Danau Toba untuk *zero-KJA* di perairan Danau Toba.

b. Pariwisata

Sumber daya lainnya yang dimiliki oleh Kabupaten Samosir adalah pariwisata. Objek wisata di Kabupaten Samosir dikategorikan dalam 3 jenis wisata yakni wisata alam sebanyak 47 objek, wisata budaya dan sejarah sebanyak 41 objek, dan wisata rohani sebanyak 3 objek (Rippda Kab. Samosir Tahun 2022). Didukung oleh Danau Toba, wisata alam menjadi salah satu tujuan wisata yang paling diminati. Berikut jenis wisata andalan yang dimiliki oleh Samosir, diantaranya: Waterfront city Pangururan, Menara Pandang Tele, Wisata Sibeabea, Bukit Holbung, dan Air terjun Efrata. Kabupaten Samosir juga memiliki kawasan ekowisata yang menarik, diantaranya: Ecovillage si Lima Lumbu di desa Lontung Kecamatan Onan Runggu dan agrowisata nenas di desa Sigaol Simbolon. Selain itu, budaya Batak dan agama yang menyatu dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Samosir, menjadikan wisata budaya dan rohani tidak kalah menarik untuk dikunjungi, diantaranya: Rumah Hela di Kecamatan Sianjur Mulamula, Rumah Parsaktian Datu Parulas Parultop di Kecamatan Onan Runggu, Museum Gere Katolik Inkulturatif di Kecamatan Pangururan, Kawasan Wisata Gua Bunda Maria di Kecamatan Palipi, Kuburan di atas pohon dan Pertunjukan Sigalegale di Kecamatan Simanindo, Boru Simenak-menak di Kecamatan Nainggolan, Mual Datu Parngongo di Kecamatan Sitiotio.

Taman Bumi Kaldera Toba

Selain wisata tersebut di atas, terdapat wisata Taman Bumi Kaldera Toba yang menjadi salah satu icon pariwisata Samosir. Kaldera Toba yang terbentuk dari ledakan *Supervolcano Toba* yang terjadi 74.000 tahun lalu melalui proses *volcano-tectonic explosive*. Letusan ini menyebabkan amblesnya bagian tengah gunung sehingga membentuk cekungan memanjang ke arah laut hingga tenggara dan permukaan tanah di daerah ini pun tergenang hingga akhirnya terbentuklah sebuah danau yang sangat luas yang disebut Danau Toba. Di tengah Danau Toba terdapat Pulau Samosir dengan ketinggian berkisar antara 900 hingga 1.600 m di atas permukaan laut, yang terbentuk akibat pengangkatan dasar danau pasca erupsi kaldera ‘supervolcano’ dalam proses pencapaian kesetimbangan baru pasca-erupsi kaldera (*resurgent doming*). Keindahan Kaldera Toba dengan kekayaan budaya masyarakat tepiannya menjadikan Danau Toba sebagai salah satu tujuan wisata andalan Indonesia yang masuk daftar 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.

Pada Juli 2020 Kaldera Toba ditetapkan sebagai Global Geopark oleh Dewan Eksekutif UNESCO lewat sidangnya yang ke-209 di Paris. Kaldera Toba berhasil masuk daftar 16 UNESCO Global Geopark baru setelah dinilai dan diputuskan oleh UNESCO Global Geopark Council pada Konferensi Internasional UNESCO Global Geoparks ke-IV di Lombok, Indonesia, pada 31 Agustus - 2 September 2019. Penetapan Kaldera Toba sebagai UNESCO Global Geopark melalui proses panjang dari upaya bersama berbagai pemangku kepentingan baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun masyarakat setempat yang tinggal di kawasan Danau Toba.

Dalam konteks inilah, UNESCO mendukung Kaldera Toba dilestarikan dan dilindungi sebagai warisan dunia melalui penetapan ini, Indonesia dapat mengembangkan geopark Kaldera Toba melalui jaringan *Global Geoparks Network* dan *Asia Pacific Geoparks Network* khususnya dalam kaitan pemberdayaan masyarakat lokal. Setelah ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark (UGG), Danau Toba bisa menjadi sumber pendapatan masyarakat yang berpotensi tinggi untuk dikembangkan menjadi destinasi dengan memadukan tiga potensi utama yaitu *geodiversity*, *biodiversity*, dan *culture diversity*, sehingga Danau Toba memiliki peranan penting menopang sektor pariwisata.

Kaldera Toba yang terbentuk dari ledakan *Supervolcano Toba* yang terjadi 74.000 tahun lalu melalui proses *volcano-tectonic explosive*. Letusan ini menyebabkan amblasnya bagian tengah gunung sehingga membentuk cekungan memanjang ke arah laut hingga tenggara dan permukaan tanah di daerah ini pun tergenang hingga akhirnya terbentuklah sebuah danau yang sangat luas yang disebut Danau Toba. Di tengah Danau Toba terdapat Pulau Samosir dengan ketinggian berkisar antara 900 hingga 1.600 m di atas permukaan laut, yang terbentuk akibat pengangkatan dasar danau pasca erupsi kaldera ‘supervolcano’ dalam proses pencapaian kesetimbangan baru pasca-erupsi kaldera (*resurgent doming*). Keindahan Kaldera Toba dengan kekayaan budaya masyarakat tepiannya menjadikan Danau Toba sebagai salah satu tujuan wisata andalan Indonesia yang masuk daftar 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.

Pada Juli 2020 Kaldera Toba ditetapkan sebagai Global Geopark oleh Dewan Eksekutif UNESCO lewat sidangnya yang ke-209 di Paris. Kaldera Toba berhasil masuk daftar 16 UNESCO Global Geopark baru setelah dinilai dan diputuskan oleh UNESCO Global Geopark Council pada Konferensi Internasional UNESCO Global Geoparks ke-IV di Lombok, Indonesia, pada 31 Agustus - 2 September 2019. Penetapan Kaldera Toba sebagai UNESCO Global Geopark melalui proses panjang dari upaya bersama berbagai pemangku kepentingan baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun masyarakat setempat yang tinggal di kawasan Danau Toba.

Dalam konteks inilah, UNESCO mendukung Kaldera Toba dilestarikan dan dilindungi sebagai warisan dunia melalui penetapan ini, Indonesia dapat mengembangkan geopark Kaldera Toba melalui jaringan *Global Geoparks Network* dan *Asia Pacific Geoparks Network* khususnya dalam kaitan pemberdayaan masyarakat lokal. Setelah ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark (UGG), Danau Toba bisa menjadi sumber pendapatan masyarakat yang berpotensi tinggi untuk dikembangkan menjadi destinasi dengan memadukan tiga potensi utama yaitu *geodiversity*, *biodiversity*, dan *culture diversity*, sehingga Danau Toba memiliki peranan penting menopang sektor pariwisata.

c. Hutan dan Keanekaragaman Hayati

Kabupaten Samosir memiliki hutan yang kaya akan keanekaragaman hayati, baik flora maupun fauna, yang menjadi salah satu potensi alam

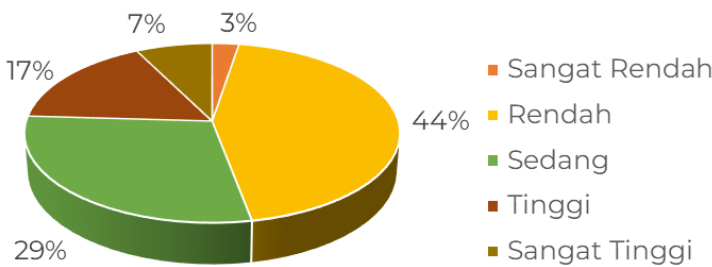
unggulan daerah. Kawasan hutan di Samosir berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem Danau Toba, mengatur tata air, serta melindungi keaslian lingkungan yang menjadi identitas kawasan geopark dunia. Keanekaragaman hayati yang terdapat di dalamnya mencakup berbagai jenis tumbuhan endemik, satwa khas, serta potensi plasma nutfah yang bernilai strategis bagi penelitian, pendidikan, dan ketahanan pangan.

Selain fungsi ekologis, hutan di Kabupaten Samosir juga menyimpan potensi ekonomi yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan, antara lain pemanfaatan hasil hutan non-kayu, ekowisata berbasis alam, dan produk herbal tradisional. Dengan pengelolaan yang baik dan melibatkan masyarakat sekitar, hutan serta keanekaragaman hayati Samosir bukan hanya menjadi penopang kesejahteraan masyarakat, tetapi juga aset penting dalam menjaga kelestarian Danau Toba sebagai kawasan destinasi pariwisata super prioritas nasional dan warisan geologi dunia.

3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

3.1 Daya dukung penyediaan pangan

Jasa lingkungan penyediaan pangan di Kabupaten Samosir dominan memiliki kategori rendah (44 persen) dan hanya 24 persen yang memiliki kategori tinggi dan sangat tinggi. Sedangkan kategori sedang melingkupi 29 persen (gambar 2.3). Jika dilihat dari wilayah administasi, Kecamatan Harian mendominasi kategori tinggi dan kategori sedang dan rendah yang tersebar di daerah lain di Kabupaten Samosir.



Gambar 2.3 Tingkat Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan Kabupaten Samosir

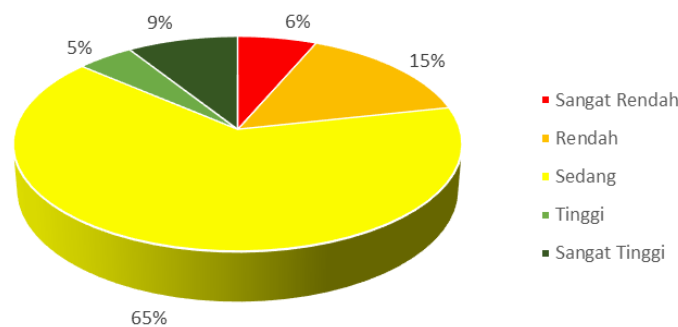
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2029

Secara umum produk pangan di Kabupaten Samosir terdiri dari beberapa jenis, seperti tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman biofarmaka

dan tanaman buah sayuran tahunan. Ketersediaan dan proyeksi ketersediaan pangan Kabupaten Samosir hingga tahun 2029 dengan mengacu kepada tata ruang bahwa untuk tutupan lahan berupa sawah atau pertanian lahan basah terjadi pertambahan luas sebesar 604,83 Ha per tahun atau sebesar 14,20%, sedangkan untuk pertanian lahan kering terjadi pengurangan sebesar 5.502,10 Ha per tahun atau berkurang sebesar 11,39%.

3.2 Daya dukung penyediaan air bersih

Jasa lingkungan penyediaan air bersih didominasi oleh kategori sedang (65 persen) dan rendah (15%) sedangkan kategori tinggi dan sangat tinggi hanya mencakup 14 persen (gambar 2.4). Kategori sedang sebagian besar dimiliki oleh Kecamatan Harian, Kecamatan Siamjur Mulamula, Kecamatan Simanindo dan Kecamatan Palipi. Sementara, kategori sangat rendah dimiliki oleh Kecamatan Onan Runggu dan Kecamatan Nainggolan.



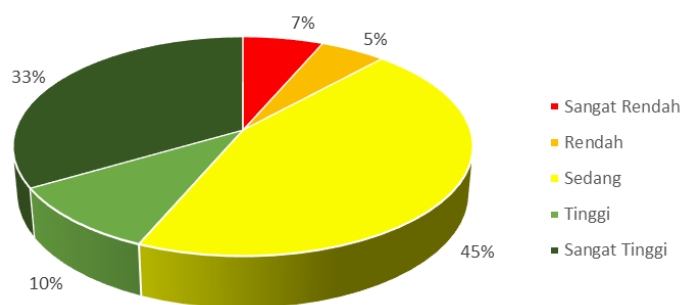
Gambar 2.4 Peta Jasa Lingkungan Penyediaan Air Bersih Kabupaten Samosir

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2029

Secara umum air bersih di Kabupaten Samosir berasal dari DAS Asahan Toba yang terdiri dari 15 (lima belas) sub DAS dan DAS Singkil yang terdiri dari 4 (empat) sub DAS seperti dijelaskan pada tabel sebelumnya. Dari hasil perhitungan diperoleh ketersediaan air Kabupaten Samosir sebesar 614.729.563,16 m3/tahun. Proyeksi status daya dukung air bersih Kabupaten Samosir berdasarkan ketersediaan air bersih pada tahun 2025-2029 termasuk dalam ketegori surplus, karena nilai proyeksi daya dukung air bersih setiap tahunnya mengalami peningkatan.

3.3 Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim

Secara umum luas wilayah Kabupaten Samosir dengan indikasi jasa ekosistem pengaturan Iklim kategori tinggi hingga sangat tinggi mencapai 43,00% sedangkan indikasi jasa ekosistem pengaturan Iklim kategori sangat rendah mencapai 7,00%. Untuk lebih jelasnya dapat pada Gambar 2.5 di bawah ini. Semetara itu, kecamatan yang memiliki kontribusi terbesar dalam penyediaan lahan dengan jasa ekosistem pengaturan iklim dalam kategori tinggi adalah Kecamatan Harian dengan luas 7.460,41 Ha dan Kecamatan Simanindo dengan luas sebesar 1.325,24 Ha.

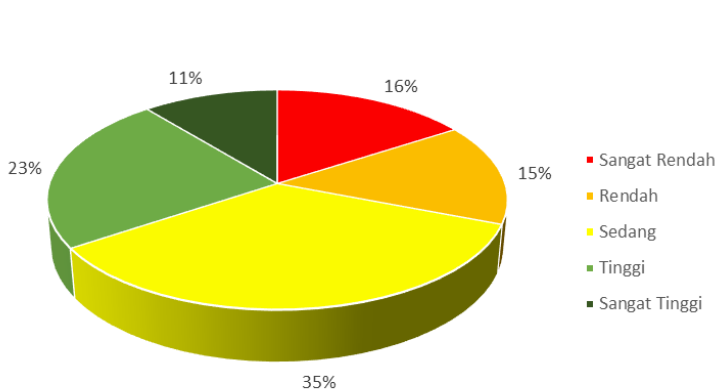


Gambar 2.5 Tingkat Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim Kabupaten Samosir

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2029

3.4 Jasa Ekosistem pengaturan perlindungan dari bencana alam

Secara umum luas wilayah Kabupaten Samosir dengan indikasi jasa ekosistem pengaturan perlindungan dan bencana alam kategori tinggi hingga sangat tinggi mencapai 34,00% sedangkan indikasi jasa ekosistem pengaturan perlindungan dan bencana alam kategori sangat rendah mencapai 3,26%. Untuk lebih jelasnya dapat pada Gambar 2.6 di bawah ini. Lebih lanjut, kecamatan yang memiliki kontribusi terbesar dalam penyediaan lahan dengan jasa ekosistem pengaturan perlindungan dan bencana alam dalam kategori tinggi adalah Kecamatan Harian dengan luas 9.220,51 Ha dan Kecamatan Sianjur Mula-mula dengan luas sebesar 4.741,41 Ha.

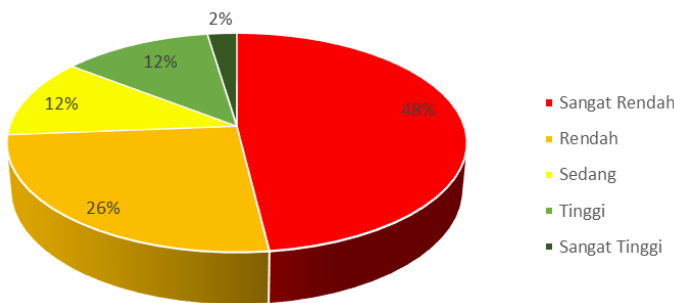


Gambar 2.6 Tingkat Jasa Lingkungan Pengaturan Perlindungan dari Bencana Alam Kabupaten Samosir

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2029

3.5 Jasa Lingkungan pengaturan pengelolaan dan penguraian limbah

Secara umum luas wilayah Kabupaten Samosir dengan indikasi jasa ekosistem pengaturan pengolahan dan penguraian limbah kategori tinggi hingga sangat tinggi mencapai 14,00% sedangkan indikasi jasa ekosistem pengaturan pengolahan dan penguraian limbah kategori sangat rendah mencapai 48,00% (Gambar 2.7). Kecamatan yang memiliki kontribusi terbesar dalam penyediaan lahan dengan jasa ekosistem pengaturan pengolahan dan penguraian limbah dalam kategori tinggi adalah Kecamatan Harian dengan luas 13.322,88 Ha dan Kecamatan Simanindo dengan luas sebesar 1.677,36 Ha.



Gambar 2.7 Tingkat Jasa Lingkungan Pengaturan Pengelolaan dan penguraian Limbah Kabupaten Samosir

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2029

4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan semakin menjadi perhatian utama dalam upaya pembangunan yang berkelanjutan. Ketiga aspek tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin keberlangsungan hidup manusia serta mendukung perekonomian suatu

negara. Ketahanan energi mencakup kemampuan untuk memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kabupaten Samosir relatif sudah teraliri listrik melalui jaringan interkoneksi Sumatera Utara yang didukung oleh pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di sekitar Danau Toba. Konsumsi listrik per kapita terus meningkat seiring pertumbuhan pariwisata, industri rumah tangga, dan kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai ketahanan energi, pengembangan energi terbarukan lokal seperti mikrohidro, tenaga surya di perbukitan, serta biomassa dari limbah pertanian dan peternakan menjadi kunci penting. Sedangkan ketahanan air berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air yang efisien dan merata. Sumber daya air di Samosir sangat ditopang oleh Danau Toba, yang berfungsi sebagai sumber air baku, irigasi, perikanan, sekaligus destinasi wisata. Sementara itu, kemandirian pangan merupakan upaya untuk memproduksi pangan secara mandiri dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang ada. Kabupaten Samosir memiliki potensi pertanian dan peternakan yang cukup besar, seperti padi, jagung, kopi, andaliman, serta sapi dan ikan air tawar dari Danau Toba. Ketiga hal ini saling terkait dan menjadi kunci utama dalam menciptakan suatu sistem yang dapat menjaga keseimbangan alam serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Energi diperlukan untuk mengolah dan mendistribusikan air serta meningkatkan nilai tambah hasil pangan. Sementara sektor pangan dapat menyumbang biomassa sebagai sumber energi alternatif. Hubungan timbal balik ini menunjukkan bahwa gangguan pada salah satu sektor akan memengaruhi dua sektor lainnya

Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Samosir mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2024, berada pada 80,35 poin. Sementara itu, cakupan layanan air bersih juga mengalami tren peningkatan, dimana pada tahun 2024 sebesar 55,84 persen rumah tangga yang memiliki layanan air bersih (tabel 2.4)

Tabel 2.4 Indikator Ketahanan Energi dan Air Kabupaten Samosir

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	75,92	77,60	75,06	78,89	80,35
2	Cakupan layanan air bersih	%	56,80	56,80	52,85	54,68	55,84

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2025

5. Lingkungan Hidup Berkualitas

Lingkungan Hidup menjadi isu yang tidak hanya menjadi perhatian Kabupaten Samosir, namun juga perhatian Nasional hingga internasional. Lingkungan hidup yang berkualitas akan memberikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kabupaten Samosir adalah kunci untuk menyeimbangkan kepentingan ekologis, sosial, dan ekonomi. Melalui strategi pengurangan jumlah keramba jaring apung untuk menekan beban nutrien di Danau Toba, peningkatan sistem pengelolaan limbah rumah tangga dan pariwisata, serta rehabilitasi hutan dan daerah tangkapan air melalui penanaman kembali pohon dan pengembangan agroforestry serta promosi pariwisata berwawasan lingkungan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di samping itu, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sanitasi, pengelolaan sampah, dan penggunaan teknologi ramah lingkungan menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.

Indeks lingkungan hidup Kabupaten Samosir mengalami tren peningkatan dari tahun 2021 hingga 2024 dengan sedikit penurunan pada tahun 2024 (tabel 2.5). Selanjutnya, Kabupaten Samosir terus menerus meningkatkan layanan rumah tangga atas akses sanitasi aman dan pengumpulan sampah. Terdapat tren meningkat dalam pelayanan tersebut di atas namun layanan tersebut belum komprehensif (masih dibawah 60 persen), begitu juga dengan layanan persampahan ke Rumah Tangga.

Tabel 2.5 Indikator Lingkungan Hidup Berkualitas Kabupaten Samosir

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	68,49	68,49	69,96	71,86	70,93
2.	Indeks Kualitas Air	indeks	51,82	51,82	56,36	58,18	53,64
3.	Indeks Kualitas Udara	indeks	91,68	91,68	91,13	92,23	93,9
4.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	indeks	54,23	54,23	54,23	57,67	58,17
5.	Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman	%	49,64	51,23	52,85	54,68	55,84
6.	Timbulan sampah yang ditangani	ton	11.210	12.500	16.500	22.624	12.866

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
7.	Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah	%	4,21	4,53	4,86	5,06	7,20
8.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Ha	12	8	10	3	65,92

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir, 2025

Ket. *) sejak tahun 2021, terdapat perbedaan metode dalam perhitungan IKLH yang memberikan hasil yang berbeda dengan tahun 2020.

6. Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Kabupaten Samosir termasuk rentan akan bencana gempa bumi, tanah longsor dan banjir selama 5 tahun terakhir, sebagaimana disajikan dalam tabel 2.7 di bawah ini.

Tabel 2.6 Jumlah Kejadian Bencana di Kabupaten Samosir

No.	Jenis Bencana	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Banjir	Kejadian	1	-	7	4	5
2.	Gempa bumi	Kejadian	31	349	146	71	65
3.	Tanah longsor	kejadian	4	4	9	6	21
4.	Angin puting beliung	Kejadian	1	2	7	1	6
5.	Kebakaran hutan dan lahan	Kejadian	1	-	32	37	43
6.	Likuifaksi	Kejadian	1	-	-	-	1

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir, 2025

Indeks Risiko Bencana Kabupaten Samosir termasuk stagnan pada 5 tahun terakhir di angka 114. Sementara Indeks Ketahanan Daerah mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,02 poin pertahun (tabel 2.7)

Tabel 2.7 Indikator Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Risiko Bencana	indeks	114	114	114	114	114
2.	Indeks Ketahanan Daerah	indeks	na*	na*	0,26	0,28	0,30

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir, 2025

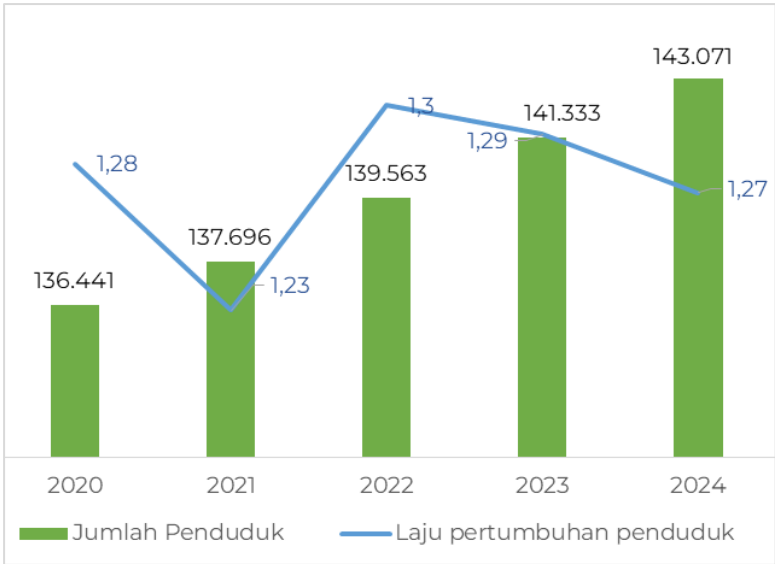
Ket. *) belum ada penilaian

7. Demografi

Perkembangan Demografi Kabupaten Samosir

Demografi Kabupaten Samosir mengalami beberapa perubahan yang cukup signifikan, dimulai dari populasi yang terus bertambah dari tahun

ke tahun namun laju pertumbuhan yang cukup fluktuatif, dengan rata-rata laju pertumbuhan 1,27 persen (Gambar 2.8). Selaras dengan jumlah penduduk yang terus tumbuh, kepadatan penduduk Kabupaten Samosir juga mengalami peningkatan sebesar 4,59 jiwa/km² pada 5 tahun belakangan, dimana pada tahun 2020 pada angka 94,47 jiwa/km² menjadi 99,06 jiwa/km² pada tahun 2024. Kecamatan dengan penduduk terpadat adalah Kecamatan Pangururan dimana 25,31 persen penduduk Kabupaten Samosir berada di kecamatan ini dengan tingkat kepadatan penduduknya mencapai 298,26 jiwa/km². Hal ini dimungkinkan mengingat Kecamatan Pangururan merupakan ibukota kabupaten, sebagai pusat perdagangan dan pusat pemerintahan, serta tingkat ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, perekonomian dan sektor lainnya lebih memadai bila dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya. Sedangkan distribusi penduduk terkecil ada di Kecamatan Sitiotio yaitu hanya 5,89 persen dari total penduduk Samosir yang tinggal di kecamatan tersebut. Sementara itu, kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Harian yaitu 17,28 jiwa/km².



Gambar 2.8
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Samosir

Sumber: BPS Kabupaten Samosir, 2025

Selanjutnya, Rasio jenis kelamin (RJK) Samosir selama 5 tahun terakhir mengalami perubahan, dimana pada tahun 2020 RJK Samosir sebesar 99,23 menjadi 100,14 pada tahun 2024. Hal ini berarti, pada tahun 2020, lebih banyak penduduk perempuan daripada penduduk laki-laki, sementara pada tahun 2024, penduduk laki-laki lebih banyak dari pada perempuan.

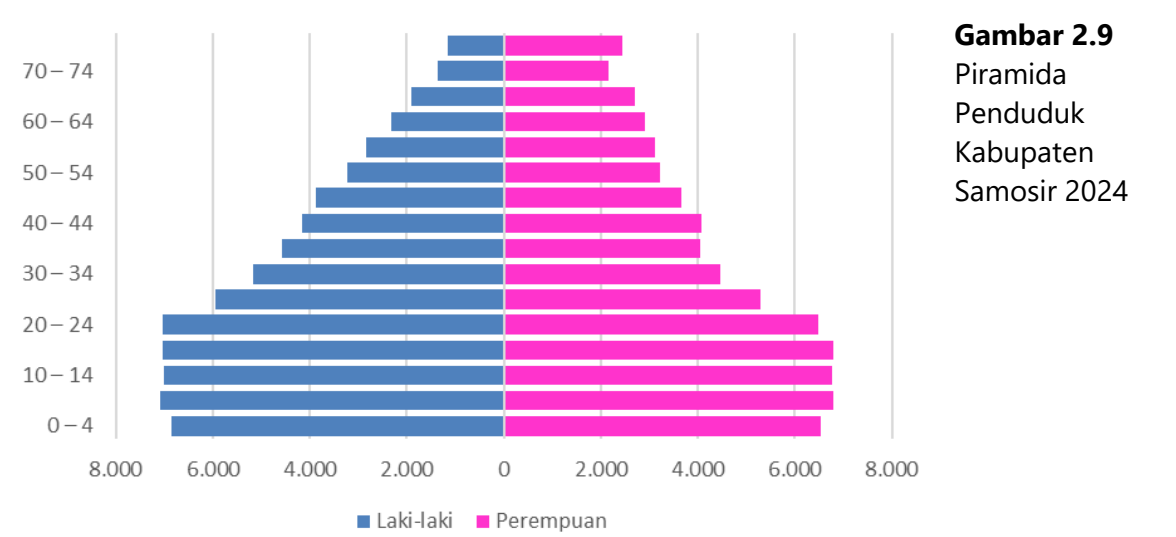
Tabel 2.8 Indikator Demografi Kabupaten Samosir

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Penduduk	jiwa	136.441	137.696	139.563	141.333	143.071

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
2.	Laju pertumbuhan penduduk	%	1,28	1,23	1,30	1,29	1,27
3.	Rasio jenis kelamin	rasio	99,23	99,29	99,35	99,95	100,14
4.	Kepadatan penduduk	Jiwa/km ²	94,47	95,34	96,48	99,06	99,06

Sumber: BPS Kabupaten Samosir, berbagai tahun

Komposisi penduduk Kabupaten Samosir berdasarkan bentuk piramida penduduknya termasuk dalam tipe ekspansif dimana jumlah penduduk muda lebih mendominasi daripada penduduk tua (Gambar 2.4). Walaupun demikian, Kabupaten Samosir tidak mendapat bonus demografi karena jumlah penduduk non-produktifnya lebih besar daripada penduduk produktif.



Sumber: BPS Kabupaten Samosir, data diolah

Keberadaan masyarakat adat juga memiliki dimensi hukum dan politik. Tanah ulayat yang dikelola secara komunal menjadi simbol kedaulatan masyarakat adat, namun sekaligus menghadapi tantangan dalam integrasi dengan sistem administrasi pemerintahan modern. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan inklusif agar hak-hak masyarakat adat tetap dihormati, sekaligus membuka ruang bagi mereka untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah. Melalui penguatan peran masyarakat adat, Samosir dapat menjaga warisan budaya Batak Toba, melestarikan lingkungan Danau Toba, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Proyeksi Penduduk Tahun 2030

Jumlah penduduk Kabupaten Samosir diproyeksikan meningkat sebanyak 8.617 jiwa menjadi 153.430 jiwa pada tahun 2030 (tabel 2.9). Pertumbuhan ini membutuhkan penyesuaian di berbagai sektor, diantaranya sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kesejahteraan sosial yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Samosir.

Tabel 2.9 Proyeksi Indikator Demografi Kabupaten Samosir

No.	Indikator	Satuan	2025	2030
1.	Jumlah Penduduk	jiwa	144.813*	153.430
2.	Proyeksi kebutuhan rumah	Unit	28.266	30.686
3.	Proyeksi kebutuhan air minum	Liter/hari	18.101.625	19.178.750
4.	Proyeksi Kebutuhan Listrik	VA	91.232.190	96.660.900
5.	Proyeksi Timbunan Sampah	(kg/hari)	108.610	115.073
6.	Rasio jenis Kelamin	%	100,29	100,96

Sumber: Perda RPJPD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2045

Jika dilihat dari proyeksi rasio ketergantungan yang menurun tahun 2025 ke tahun 2030 diharapkan dapat menjadi peluang untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan bonus demografi untuk meningkatkan capaian dan tujuan pembangunan melalui program-program peningkatan sumber daya manusia, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan produktifitas. Upaya peningkatan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, program-program pelatihan vokasi dan pemngembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja serta melakukan investasi dalam bidang pendidikan dan kesehatan untuk memastikan tenaga kerja memiliki kondisi fisik dan mental yang prima untuk bekerja secara produktif. Upaya perluasan kesempatan kerja dilakukan dengan menciptakan lapangan kerja baru, mendorong investasi sektor pariwisata pertanian dan industri kreatif serta pengembangan sektor informal dan UMKM. Sementara peningkatan upaya produktifitas dilakukan melalui penerapan teknologi tepat guna, inovasi dan peningkatan efisiensi dalam berbagai sektor untuk dapat membantu meningkatkan produktifitas tenaga kerja.

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

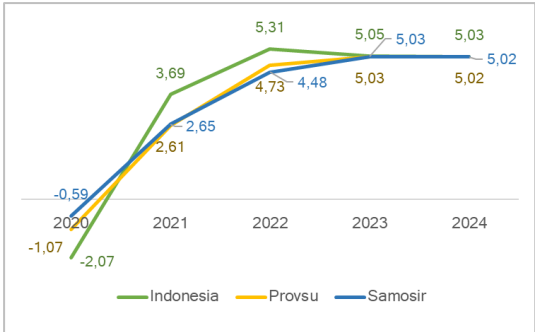
Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Samosir menjadi usaha yang menantang bagi Pemerintah Daerah. Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor, diantaranya tingkat kemiskinan yang masih tinggi dan pengentasannya cenderung melambat. Tahun 2024, tingkat kemiskinan Kabupaten Samosir masih di angka 11,63 persen, hanya menurun 0,03 persen dari tahun sebelumnya sehingga percepatan pengentasan kemiskinan menjadi isu yang sangat prioritas di Kabupaten Samosir. Selain itu, struktur ekonomi yang masih mengandalkan sektor pertanian menjadi tantangan selanjutnya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hilirisasi hasil pertanian menjadi salah satu solusi untuk memberikan nilai tambah bagi hasil-hasil pertanian. Walaupun pertumbuhan ekonomi Samosir dapat dikatakan baik (hampir sama dengan pertumbuhan Provinsi Sumatera dan Nasional) dan pemerataan pendapatan (gini rasio) kategori rendah namun dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi dapat diimplikasikan bahwa tidak ada kesenjangan pendapatan yang fantastis ditengah masyarakat, dimana distribusi pendapatan masyarakat hampir merata dan banyak yang masih di garis kemiskinan.

1. Kesejahteraan Ekonomi

Pada bagian ini, dijelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan dan Gini Rasio.

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Samosir bertumbuh dengan rata-rata pertumbuhan 3,32 persen selama 5 tahun terakhir. Dibandingkan dengan pertumbuhan Nasional dan Sumatera Utara, terdapat perbedaan yang tipis diantara pertumbuhan Kabupaten Samosir, Sumatera Utara dan Nasional (Gambar 2.10).



Sumber: BPS, data diolah

Gambar 2.10
Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional,
Provinsi Sumatera Utara dan
Kabupaten Samosir

Berdasarkan pertumbuhan ekonomi per sektor usaha, dengan mengasumsikan tahun 2020 dan 2021 masih dipengaruhi oleh *Covid-19*, rata-rata pertumbuhan tertinggi dialami oleh sektor usaha berturut-turut: Jasa Lainnya (11,36); Penyediaan akomodasi dan makan minum (10,37); dan Transportasi dan pergudangan (8,43). Lapangan usaha Penyediaan akomodasi dan makan minum yang merupakan sektor usaha hasil pendekatan untuk sektor pariwisata mengalami pertumbuhan tertinggi ke-2 yang menunjukkan sektor pariwisata sedang mengalami peningkatan yang signifikan pada 3 tahun terakhir (Tabel 2.10).

Tabel 2.10 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan berdasarkan Lapangan Usaha Kabupaten Samosir

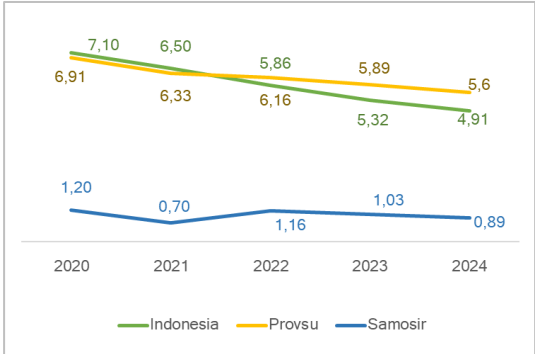
Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*)	2024**)	Rata-rata 2022-2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,28	2,51	4,59	4,46	2,24	3,76
Pertambangan dan Penggalian	2,43	3,01	3,03	4,8	5,36	4,40
Industri Pengolahan	1,09	1,67	2,61	3,53	4,27	3,47
Pengadaan listrik dan gas	5,61	4,8	6,19	4,1	6,88	5,72
Pengadaan air, Pengelolaan sampah, Limbah dan daur ulang	3,11	2,04	4,48	4,18	2,72	3,79
Konstruksi	-3,35	7,83	4,32	5,92	7,16	5,80
Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	-0,42	5,21	6,91	6,34	9,93	7,73
Transportasi dan pergudangan	-3,81	2,02	8,65	7,17	9,48	8,43
Penyediaan akomodasi dan makan minum	-2,86	0,03	6,95	9,69	14,47	10,37
Informasi dan Komunikasi	8,55	7,76	6,54	5,19	5,26	5,66
Jasa keuangan dan Asuransi	3,8	5,84	4,18	0,41	0,47	1,69
Real estat	3,97	0,4	2,11	1,81	1,32	1,75
Jasa Perusahaan	2,75	2,94	2,07	2,09	1,15	1,77
Administrasi pemerintahan,pertahanan dan jaminan sosial wajib	-0,3	-0,46	-0,05	3,82	6,02	3,26

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*)	2024**)	Rata-rata 2022-2024
Jasa Pendidikan	4,57	4,65	0,08	2,82	1,82	1,57
Jasa kesehatan dan Kegiatan sosial	-0,13	-1,16	1,6	4,6	3,44	3,21
Jasa lainnya	-0,27	2,85	9,68	8,56	15,85	11,36
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Samosir	-0,59	2,65	4,48	5,03	5,02	4,84

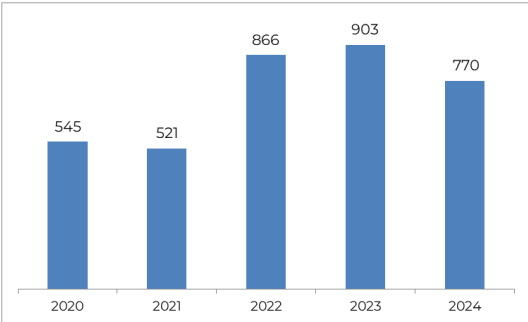
Sumber: BPS Kabupaten Samosir, 2025
*) Angka Sementara, **) Angka Sangat Sementara

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Samosir termasuk rendah dan berada jauh di bawah TPT Nasional dan Provinsi Sumatera Utara. Selama 5 tahun terakhir, TPT Samosir cukup berfluktuatif dan berkurang sebesar 0,31 poin sejak tahun 2020 hingga 2024.



Gambar 2.11
Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Samosir

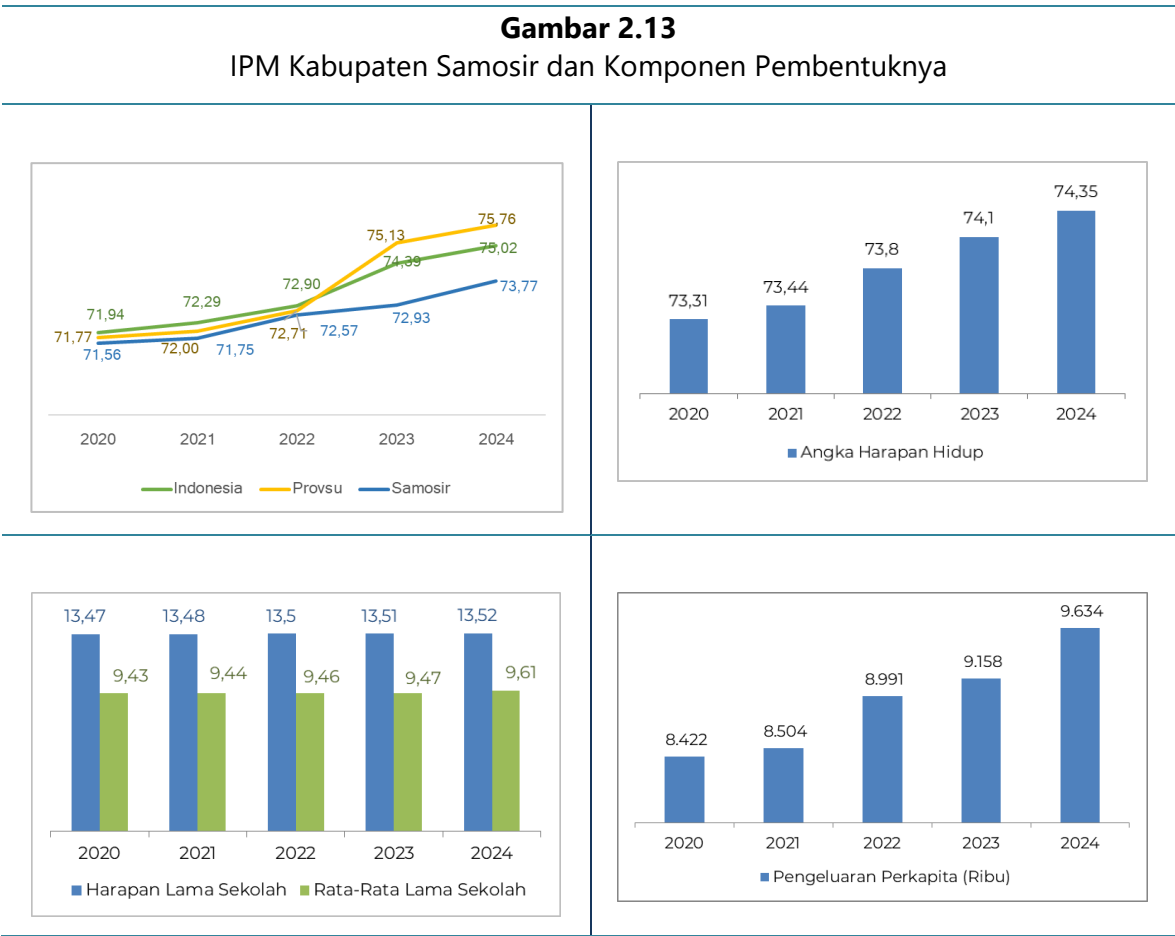


Gambar 2.12
Jumlah Pengangguran Kabupaten Samosir

Sumber: BPS, data diolah

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur dan mengakses kesehatan, pendapatan, dan pendidikan. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Samosir mengalami peningkatan sebesar 2,21 poin selama 5 tahun terakhir dari 71,56 pada 2020 hingga mencapai 73,77 poin pada tahun 2024 dengan kategori tinggi. Saat ini Kabupaten Samosir berada di urutan ke-17 dari 33 Kabupaten/kota se-Sumatera Utara, hal ini menunjukkan perbaikan yang terus menerus dalam berbagai aspek Pembangunan manusia antara lain: pendidikan melalui pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pendidikan, peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, pemberian bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu dan beasiswa bagi siswa berprestasi, kesehatan melalui Peningkatan kualitas dan fasilitas sarana dan prasarana kesehatan, Penyuluhan hidup sehat, Penguatan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, dan standar hidup melalui Peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan, Penciptaan lapangan kerja melalui UMKM, peningkatan perlindungan sosial. Perkembangan IPM Kabupaten Samosir dapat dilihat pada tabel berikut:



Sumber: BPS Kabupaten Samosir, 2025

a. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka harapan hidup menunjukkan derajat Kesehatan suatu daerah. Semakin tinggi harapan hidup suatu daerah menunjukkan semakin tinggi derajat Kesehatan. Angka Harapan Hidup Kabupaten Samosir terus meningkat dari 73,31 Tahun 2020 menjadi 74,35 pada Tahun 2024 (Gambar 2.13-Angka Harapan Hidup) . Hal ini menggambarkan peningkatan layanan kesehatan dan fasilitas pendukung disetiap fasilitas layanan kesehatan dari desa hingga kabupaten. Disamping meningkatnya kesadaran masyarakat dengan pola gerakan masyarakat hidup sehat.

b. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Samosir meningkat dari tahun 2020 sebesar 9,43 menjadi 9,61 pada Tahun 2024 (Gambar 2.13-Rata-rata lama sekolah). Hal ini disebabkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Pendidikan, perbaikan infrastuktur Pendidikan serta masifnya dukungan pemerintah untuk mendukung program-program Pendidikan di Kabupaten Samosir.

d. Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran perkapita Kabupaten Samosir meningkat dari tahun 2020 sebesar 8.422 Ribu Rupiah menjadi 9.634 Ribu Rupiah pada Tahun 2024 (Gambar 2.13- Pengeluaran Perkapita). Hal ini disebabkan karena adanya adanya pertumbuhan ekonomi yang signifikan terutama didorong oleh sektor pariwisata yang tergambar dari peningkatan jumlah wisatawan yang mengunjungi objek wisata sehingga berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi, yang didapat dari Pembangunan beberapa objek wisata baru di Kabupaten Samosir.

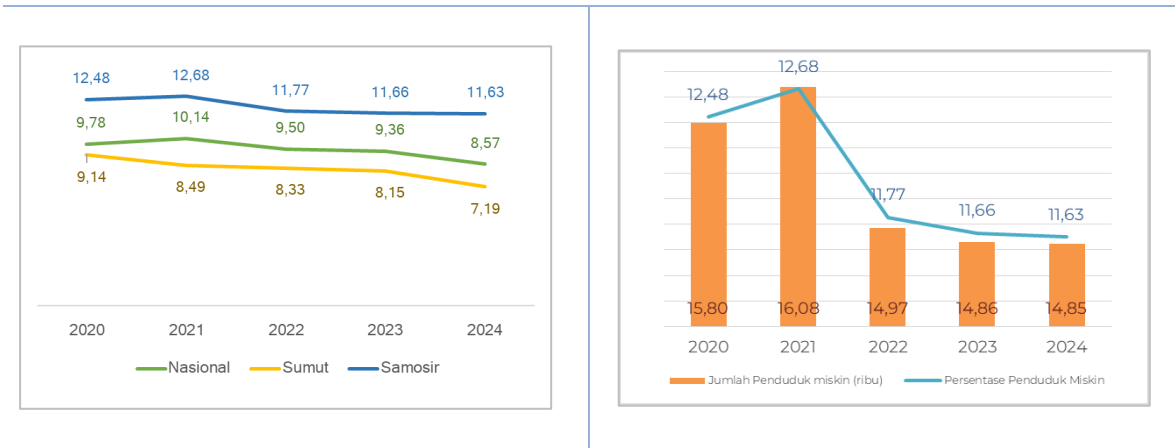
Angka Kemiskinan

Kemiskinan masih menjadi polemik bagi Kabupaten Samosir, dimana selama 5 tahun terakhir angka kemiskinan tidak mengalami perubahan yang signifikan, hanya berkurang sebesar 0,85 poin dan masih pada level 2 digit, yaitu 11,63 pada tahun 2024. Beberapa faktor yang menjadi tantangan untuk menurunkan angka kemiskinan antara lain:

1. Kondisi geografis yang unik dan masih memiliki wilayah yang terpencil dan sulit dijangkau sehingga memberikan tantangan sendiri dalam

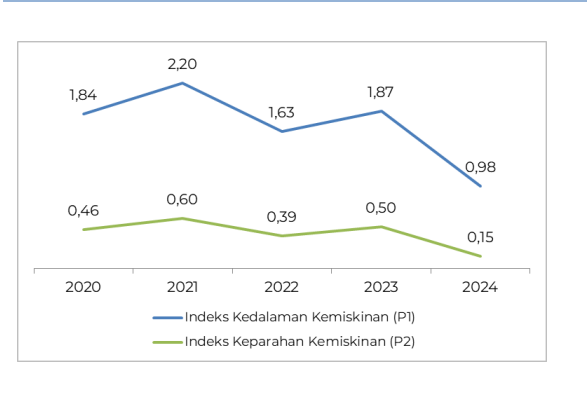
- memberikan implementasi program penanggulangan kemiskinan dilapangan.
2. Potensi sumber daya alam dan ekonomi yang belum terkelola optimal.
 3. Perilaku sekelompok masyarakat yang cenderung selalu mengharapkan bantuan pemerintah sehingga mempengaruhi efektivitas program penanggulangan kemiskinan.

Kondisi kemsikinan di Kabupaten Samosir dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.14
Angka Kemiskinan Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Samosir

Gambar 2.15
Angka Kemiskinan Kabupaten Samosir dan Jumlah Penduduk Miskin



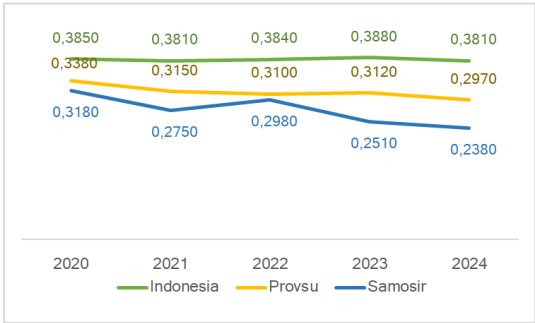
Gambar 2.16
Indeks Keparahan Kemiskinan dan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Samosir
Sumber: BPS Kabupaten Samosir, 2025

Beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Samosir dalam menangani masalah kesejahteraan sosial adalah penanganan PMKS fakir miskin, sejak Tahun 2020 dari 15.800 PMKS fakir miskin yang ada ditangani sebanyak 12.609 PMKS fakir miskin (80%) menjadi 16.338 PMKS fakir miskin yang ada ditangani sebanyak 16.338 PMKS fakir miskin (100%) pada Tahun 2024.

Sementara untuk PMKS anak terlantar, sejak Tahun 2020 dari 216 orang PMKS anak terlantar yang ada ditangani pemerintah Kabupaten Samosir sebanyak 45 orang atau 21%, meningkat menjadi 100% pada Tahun 2024 dari sebanyak 132 orang PMKS anak terlantar.

Gini Rasio

Kesenjangan di Kabupaten Samosir termasuk dalam kategori rendah, yaitu 0,2380 pada tahun 2024. Walaupun sedikit berfluktuatif, gini rasio Samosir menunjukkan tren menurun dan masih lebih baik bila dibandingkan dengan gini rasio Nasional dan Provinsi Sumatera Utara.



Gambar 2.17
Gini Rasio Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Samosir

Sumber: BPS, data diolah

Tabel 2.11 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Samosir

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	skor	71,56	71,75	72,57	72,93	73,77
2.	Laju Pertumbuhan ekonomi	%	-0,59	2,65	4,48	5,03	5,02
3.	Angka Kemiskinan	%	Sakip 12,48	12,68	11,77	11,66	11,63
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,20	0,70	1,16	1,03	0,89
5.	Gini Rasio	skor	0,3180	0,2750	0,2980	0,2510	0,2380

Sumber: BPS Kabupaten Samosir, 2025

2. Kesehatan untuk Semua

Pada subbab ini, dijabarkan kondisi kesehatan mencakup semua penduduk Kabupaten Samosir pada seluruh siklus hidup di seluruh wilayah dan bagi seluruh kelompok masyarakat baik laki-laki maupun perempuan yang meliputi Umur Harapan Hidup, Indeks Keluarga Sehat, Prevalensi Stunting dan Cakupan Jaminan Kesehatan.

Umur Harapan Hidup (UHH)

Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Samosir mengalami peningkatan sebesar 1,30 poin selama 5 tahun terakhir dimana pada tahun 2024 mencapai angka 74,61 tahun. Meningkatnya Usia Harapan Hidup menyebabkan meningkatnya penduduk Lanjut Usia (Lansia) sehingga Rasio Ketergantungan semakin meningkat. Faktor-faktor yang mendorong peningkatan UHH di Kabupaten Samosir antara lain Pertama, peningkatan akses layanan kesehatan yang disertai program nasional seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/BPJS) dan program imunisasi, pemeriksaan kesehatan rutin, serta peningkatan pelayanan ibu dan anak. Kedua, Perbaikan gizi dan ketahanan pangan melalui program penanggulangan stunting dan peningkatan asupan gizi masyarakat. Ketiga, akses air bersih dan sanitasi layak diberbagai wilayah melalui program perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yang mengurangi risiko penyakit menular.

Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Samosir yang digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup keluarga dengan mengintegrasikan aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi dan lingkungan dari tahun 2020 sebesar 0,18 meningkat menjadi 0,30 pada tahun 2024 atau masih tergolong dalam kategori keluarga tidak sehat, sehingga masih dibutuhkan intervensi guna peningkatan sektor ini.

Prevelensi Stunting

Pemerintah Kabupaten Samosir masih perlu membenahi masalah stunting, hal ini ditunjukkan dengan dinamika yang sangat signifikan, dengan tren penurunan yang jelas pada awalnya namun kemudian diikuti oleh sedikit kenaikan pada tahun terakhir yaitu 28,60.

Penurunan yang terjadi antara 2020 hingga 2023 merupakan hasil dari peningkatan berbagai program intervensi spesifik dan sensitif yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, antara lain pemberian makanan tambahan (PMT), kampanye edukasi gizi, peningkatan cakupan imunisasi, serta intervensi kesehatan ibu dan anak dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kebijakan seperti pendirian posyandu aktif, peningkatan anggaran desa untuk program gizi, serta pendampingan oleh tim pendamping keluarga (TPK) juga turut berperan dalam percepatan

penurunan stunting. Selain itu, perbaikan sanitasi lingkungan, penyediaan air bersih, dan peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan dasar memberikan kontribusi tidak langsung dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Namun, kenaikan kembali prevalensi stunting pada tahun 2024 menjadi 28,60% mengindikasikan bahwa upaya penurunan belum sepenuhnya stabil dan berkelanjutan. Terdapat beberapa kemungkinan penyebab dari kenaikan tersebut. Pertama, bisa jadi terjadi gangguan pada pelaksanaan program intervensi, baik karena keterbatasan anggaran, hambatan logistik, maupun lemahnya koordinasi lintas sektor di tingkat lapangan. Kedua, faktor sosial-ekonomi seperti inflasi harga pangan pokok, krisis global, dan pemulihan ekonomi pasca-pandemi dapat memengaruhi daya beli masyarakat, terutama keluarga miskin, sehingga berdampak pada asupan gizi anak. Ketiga, kurangnya keberlanjutan edukasi perubahan perilaku masyarakat terkait pola makan dan perawatan anak juga menjadi tantangan tersendiri. Dalam konteks ini, program tidak hanya memerlukan cakupan luas, tetapi juga pendalaman kualitas layanan dan perubahan perilaku secara konsisten.

Cakupan Jaminan Kesehatan

Cakupan Jaminan Kesehatan Kabupaten Samosir tergolong tinggi, dengan Universal Health Coverage (UHC) yang mencapai 98,04% atau 139.528 jiwa dari total penduduk 142.318 jiwa yang terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dapat dilihat pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12 Perkembangan Indikator Kesehatan Kabupaten Samosir

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Umur Harapan Hidup	Tahun	73,31	73,44	73,80	74,35	74,61
2.	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,18	0,19	0,27	0,28	0,30
3.	Prevalensi Stunting	%	30,75	28,40	26,30	22,40	28,60
4.	Cakupan Jaminan Kesehatan	%	78	84,02	97,70	97,84	98,04

Sumber: BPS Kabupaten Samosir, Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir, 2025

Beberapa kasus penyakit yang menjadi perhatian khusus di Kabupaten Samosir adalah penyakit Tuberculosis (TBC). Proporsi kasus TBC yang diobati dan sembuh dalam program DOTS pada Tahun 2020, target sebesar 90% yang sembuh sebesar 87,3% meningkat pada Tahun 2024 yang sembuh menjadi 87,5% dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.13 Indikator Proporsi Kasus TBC yang diobati dan sembuh di Kabupaten Samosir

No.	Indikator	Satuan	Target					Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Proporsi kasus TBC yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	90	91	92	93	94	87,3	62.2	87,2	94,5	87,5
2.	Proporsi jumlah kasus TBC yang terdeteksi dalam program DOTS	%	215	100	100	100	100	103	100	100	100	100
3.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	60	65	70	75	80	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Samosir, Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir, 2025

Sementara untuk menunjukkan kondisi kesehatan masyarakat lainnya terutama angka kematian Ibu sejak Tahun 2020 menurun menjadi 64,1 pada Tahun 2024, sementara untuk angka Kematian Bayi mengalami fluktuasi dari Tahun 2020 sebesar 11,7 menjadi 17 pada Tahun 2024. Angka Kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten Samosir dapat kami sampaikan seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.14 Indikator Angka Kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten Samosir

No.	Indikator	Satuan	Target					Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Angka Kematian Ibu	Per 100 Ribu Kelahiran	173	154	142	130	118	0	167	174	236	64,1
2.	Angka Kematian Bayi	Per 1000 Kelahiran Hidup	20	19	17	15	13	11,7	11	7,5	10	17

Sumber: BPS Kabupaten Samosir, Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir, 2025

3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

Subbab ini dijabarkan kondisi pendidikan masyarakat Kabupaten Samosir yang memiliki peranan sentral dalam peningkatan kualitas hidup manusia serta mewujudkan kehidupan masyarakat dan bangsa yang bermartabat

Rata-rata Lama Sekolah

Untuk sektor pendidikan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Samosir terus meningkat, dimana pada tahun 2024, RLS Samosir mencapai 9,61 tahun (tabel 2.13). Angka ini menunjukkan bahwa jumlah tahun pendidikan yang ditempuh oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas di Kabupaten Samosir masih pada level SMP - SMA tahun 1. Terjadi peningkatan sebesar 0,14 tahun dari Tahun 2023. Peningkatan tersebut meskipun terlihat kecil, namun memiliki dampak yang signifikan terhadap pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan daerah secara keseluruhan. Peningkatan RLS ini menjadi salah satu faktor penting dalam kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Samosir, yang mencapai angka 73,77 pada tahun 2024.

Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) pada tahun 2024 adalah 13,52 tahun, dimana artinya bagi penduduk Samosir yang lahir pada tahun 2024, harapan lama mereka untuk mengenyam pendidikan adalah selama 13,52 tahun atau hingga SMA/Pendidikan Tinggi. Semakin lama seseorang bersekolah, semakin besar kemungkinan mereka mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan, sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Sedangkan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Samosir menggambarkan kondisi yang belum ideal dengan kondisi tamat SMA tentu membutuhkan perhatian terutama untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan dan vokasi.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Kabupaten Samosir menunjukkan peningkatan selama periode 2022 hingga 2024. Pada tahun 2024, nilai indeks ini tercatat 49,27, yang mengindikasikan bahwa tingkat literasi masyarakat pada tahun tersebut relatif rendah. Rendahnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dipengaruhi oleh akses sarana literasi yang terbatas, rendahnya budaya baca, serta infrastruktur digital yang belum merata. Untuk meningkatkannya, dibutuhkan strategi kolaboratif antara pemerintah, sekolah, komunitas adat, dan masyarakat dalam penyediaan fasilitas, peningkatan minat baca, serta penguatan literasi digital.

Tabel 2.15 Perkembangan Indikator Pendidikan Kabupaten Samosir

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,43	9,44	9,46	9,47	9,61
2.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,47	13,48	13,50	13,51	13,52
3.	Angka Literasi SD sederajat	angka	na	na	na	62,95	62,95
4.	Angka Literasi SMP sederajat	angka	na	na	na	71,90	71,90
5.	Angka Numerasi SD sederajat	angka	na	na	na	54,24	54,27
6.	Angka Numerasi SMP sederajat	angka	na	na	na	65,90	65,90
7.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	indeks	na	na	29,7	33,21	49,27

Sumber: BPS Kabupaten Samosir, Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Samosir, 2025

4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Pada bagian ini, dijelaskan kondisi perlindungan sosial warga Kabupaten Samosir yang menjadi kunci untuk membangun masyarakat yang lebih tangguh dan inklusif sehingga semua warga Kabupaten Samosir memiliki kesempatan yang sama untuk hidup yang lebih baik.

Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Untuk Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi pekerja rentan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Samosir telah memberikan jaminan pekerja rentan atas 1.512 pekerja pada tahun 2024 atau sebesar 13,15%. Jaminan ini akan terus diberikan dan jumlahnya ditingkatkan setiap tahun.

Cakupan Kepesertaan JKN

Kabupaten Samosir terus berupaya memberikan perlindungan kepada segenap masyarakat terutama di bidang kesehatan. Selama 5 tahun terakhir, terdapat peningkatan 20,04% atas Kepesertaan JKN/Universal Health Care (UHC). Dimana pada tahun 2024, ketercapaian cakupan UHC (Universal Health Care) Kabupaten Samosir adalah sebesar 98,04% atau 139.528 jiwa dari total penduduk 142.318 jiwa yang terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Tabel 2.16 Perkembangan Indikator Perlindungan Sosial Kabupaten Samosir

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi pekerja rentan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah	%	-	-	-	-	13,15

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
2.	Cakupan Kepesertaan JKN/Universal Health Care (UHC)	%	78	84,02	97,70	97,84	98,04

Sumber: Dinas Kopnakerindag Kabupaten Samosir, 2025

5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Pada bagian ini, dijelaskan kondisi penguatan peran agama sebagai landasan spritual, etika, moral dan modal dasar pembangunan serta pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter serta memperteguh jadi diri bangsa yang meresap pada warga di Kabupaten Samosir.

Indeks Kerukunan Umat Beragama

Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju adalah konsep yang diusung dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Konsep ini menekankan pentingnya agama dalam konteks pembangunan yang berorientasi pada kemaslahatan umum dan kemajuan kebudayaan yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik, harmonis, dan sejahtera, serta mampu menghadapi tantangan zaman dengan berlandaskan pada nilai-nilai agama dan budaya yang luhur. Selama 5 tahun terakhir, Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Samosir adalah sebesar 82,25 poin. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kerukunan masuk dalam kategori tinggi, artinya masyarakat Kabupaten Samosir mampu menerima perbedaan agama dan kepercayaan serta menjaga hubungan harmonis antar umat beragama.

Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana kesenjangan antara pria dan wanita dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan partisipasi politik. Indeks Ketimpangan Gender di Kabupaten Samosir mengalami penurunan mulai tahun 2020 sampai 2024. Pada tahun 2024 sebesar 0,123 yang artinya bahwa ketimpangan gender di Kabupaten Samosir sangat rendah (setara).

Tabel 2.17 Perkembangan Indikator Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
Kabupaten Samosir

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	82,25	82,25	82,25	82,25	82,25
2.	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,320	0,287	0,265	0,244	0,123

Sumber: Dinas Sosial, Pemerintahan Desa Kabupaten Samosir, 2025

6. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif

Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif adalah tiga pilar penting yang saling berkaitan dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional, khususnya dalam mencapai Indonesia Emas 2045. Keluarga berkualitas menjadi dasar bagi pembentukan individu yang sehat dan produktif, yang kemudian berkontribusi pada masyarakat yang setara dan inklusif. Kesenjangan gender, yang memastikan hak dan kesempatan yang sama bagi semua, baik laki-laki maupun perempuan, adalah prasyarat untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara. Masyarakat inklusif, yang menghargai keberagaman dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua anggota masyarakat, termasuk mereka yang rentan, adalah tujuan akhir dari pembangunan yang berkelanjutan.

Tabel 2.18 Perkembangan Indikator Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan
Masyarakat Inklusif Kabupaten Samosir

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kabupaten Layak Anak	kategori	na	na	<500	<500	<500
2.	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	indeks	na	na	na	54,86	*
3.	Indeks Ketimpangan Gender	indeks	na	na	na	0,26	0,123
4.	Indeks Pembangunan Gender	indeks	96,51	96,59	96,76	96,74	*

*) data belum rilis

Sumber: Dinas PPA PPKB Kabupaten Samosir, 2025

Aspek Daya Saing Daerah

1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya saing sumber daya manusia (SDM) mengacu pada kemampuan suatu negara, organisasi, atau individu untuk bersaing dalam pasar tenaga kerja

global, baik dalam hal kualitas, produktivitas, maupun inovasi. SDM yang kompeten dan berdaya saing tinggi menjadi kunci penting dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan revolusi industri 4.0. Indikator yang menunjukkan kondisi dimaksud terlihat dari angka ketergantungan, untuk Kabupaten Samosir angka ketergantungan tahun 2020 sebesar 63,91 poin, yang mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi sebesar 60,68 poin, kemudian kembali naik pada tahun 2022 menjadi sebesar 60,93 poin dan kembali turun pada tahun 2023 menjadi sebesar 58,95 poin dan naik menjadi 62,22 poin di tahun 2024. Angka ini berarti untuk setiap 100 penduduk usia produktif (15 – 64 Tahun), menanggung sekitar 62 penduduk usia tidak produktif (0 -14 dan 65+). Beban tanggungan tersebut termasuk kategori sedang, tidak serendah wilayah yang sudah mendapatkan bonus demografi kuat (angka ketergantungan <50). Sehingga diperlukan kebijakan untuk menjaga kualitas dan partisipasi Angkatan kerja melalui Pendidikan, keterampilan dan penciptaan lapangan kerja sambil menata layanan anak dan lansia melalui PAUD, layanan Kesehatan, dan layanan jaminan hari tua.

Tabel 2.19 Perkembangan Indikator Daya Saing Sumber Daya Manusia Kabupaten Samosir

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Angka Ketergantungan	angka	63,91	60,68	60,93	58,95	62,22

Sumber: Dinas PPA PPKB Kabupaten Samosir, 2025

2. Iptek, Inovasi, dan produktivitas ekonomi

Iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi), inovasi, dan produktivitas ekonomi adalah sesuatu yang saling terkait erat. Kemajuan iptek mendorong inovasi, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas ekonomi. Peningkatan produktivitas ini dapat terjadi melalui berbagai cara, seperti efisiensi proses produksi, pengembangan produk baru, dan perluasan pasar. Indikator untuk melihat kondisi Iptek, Inovasi dan Produktifitas ekonomi adalah Rasio PDRB Industri pengolahan, Rasio PDRB Akomodasi makan dan minum, Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif dan Rasio Kewirausahaan. Untuk Rasio PDRB Industri pengolahan di Kabupaten Samosir cenderung sedikit menurun sejak tahun 2020 sebesar 0,52 menjadi 0,49 pada tahun 2024 yang dapat mengakibatkan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah, penurunan Pendapatan Asli

Daerah (PAD), berkurangnya lapangan pekerjaan atau menggambarkan adanya masalah pada daya saing industri pengolahan tersebut. Sedangkan untuk Rasio PDRB Akomodasi makan dan minum di Kabupaten Samosir pasca covid cenderung meningkat dari 5,09 pada tahun 2020 menjadi 5,46 pada tahun 2024 seiring dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur pariwisata di Kabupaten Samosir.

Rasio kewirausahaan di Kabupaten Samosir masih relative kecil yang artinya persentase masyarakat Kabupaten Samosir yang berwirausaha masih sedikit dibandingkan dengan total penduduk Samosir atau menandakan masih sedikit individu yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan nilai tambah ekonomi di Kabupaten Samosir.

Sementara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Samosir mulai dari tahun 2020 sebesar 52,17% menjadi 85,59% di tahun 2024, mengalami peningkatan yang menandakan sebagian besar dari penduduk usia kerja (15 tahun keatas) aktif secara ekonomi di Kabupaten Samosir sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menambah pasokan tenaga kerja.

Tabel 2.20 Perkembangan Indikator IPTEK, Inovasi dan Produktivias Ekonomi Kabupaten Samosir

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	0,52	0,51	0,51	0,50	0,49
2.	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	5,09	4,88	4,91	5,03	5,46
3.	Rasio Kewirausahaan	%	1,70	1,22	1,59	1,21	*
4.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	52,17	84,38	83,57	86,89	85,59
5.	Indeks Inovasi Daerah	poin	2.502	49,57	46,64	48,88	45,04

Sumber: BPS Kabupaten Samosir, berbagai sumber, 2025

3. Penerapan Ekonomi Hijau

Penerapan ekonomi hijau berfokus pada pengurangan dampak lingkungan dari aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir untuk penerapan ekonomi hijau adalah melalui program Pangula Nature (Bertani selaras alam) yang mengedepankan sistem tanam dengan pola organik, pengolahan sampah organik serta pengembangan eko wisata dengan membangun fasilitas

wisata yang ramah lingkungan dan mendukung pelestarian budaya lokal. Indikator penerapan Ekonomi Hijau Penurunan intensitas emisi GRK dan Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer. Pencapaian penurunan intensitas emisi GRK Kabupaten Samosir pada tahun 2024 adalah 124.353,23 dan porsi EBT dalam bauran energi primer pada tahun 2024 adalah 0,022.

Tabel 2.21 Perkembangan Indikator Penerapan Ekonomi Hijau Kabupaten Samosir

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Penurunan Intensitas Emisi GRK	tonCO2eq	na	na	na	na	124.353,23
2.	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	Porsi	na	na	na	na	0,022

Sumber: Bappeda Litbang Kabupaten Samosir, data diolah

4. Transformasi Digital

Transformasi digital adalah penggunaan teknologi digital untuk mengubah proses bisnis, budaya, dan pengalaman pelanggan dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar yang terus berubah. Ini melibatkan adopsi teknologi seperti komputasi awan, big data, Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan (AI), dan lainnya untuk mengoptimalkan operasi bisnis dan menciptakan nilai tambah yang dilihat dari empat pilar yaitu keterlibatan pelanggan, pemberdayaan karyawan, Optimasi Operasi dan Tranformasi bisnis. Percepatan penerapan transformasi digital di pemerintah Kabupaten Samosir dilakukan dengan menyusun rencana dan anggaran SPBE, menyelenggarakan kabupaten cerdas, perumusan/ penyusunan, dan penerapan kebijakan publik serta dalam penggunaan/ pemanfaatan layanan publik berbasis digital. Indikator yang digunakan untuk melihat kondisi tranformasi digital adalah Indeks pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan indikator proksi indeks SPBE, dimana sejak tahun 2020 sedikit mengalami penurunan dari 3,31 menjadi 2,70 pada tahun 2024. Hal ini dikarenakan arsitektur SPBE yang belum dievaluasi.

Tabel 2.22 Perkembangan Indikator Transformasi Digital Kabupaten Samosir

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi/Proksi Indeks SPBE	Angka	3,31	3,16	2,62	2,69	2,70

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Samosir, 2025

5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi ekonomi domestik dan global mengacu pada proses penyatuan ekonomi suatu negara dengan ekonomi global, yang ditandai dengan pengurangan hambatan perdagangan dan peningkatan interaksi ekonomi antar negara. Ini mencakup berbagai tingkatan, mulai dari kerjasama perdagangan hingga pembentukan pasar tunggal atau serikat ekonomi yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui spesialisasi dan skala ekonomi, menciptakan pasar yang lebih besar dan kompetitif, mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional dimana indikator untuk mengukur kondisi ini adalah dari pembentukan modal tetap bruto. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur total investasi dalam barang modal yang berfungsi dalam produksi barang dan jasa di suatu perekonomian. PMTB meliputi pembelian maupun perbaikan aset tetap seperti bangunan, mesin, peralatan, kendaraan, serta berbagai infrastruktur lain yang digunakan dalam kegiatan produksi. PMTB Kabupaten Samosir terjadi peningkatan setiap tahunnya, dari tahun 2020 sebesar 13,88% menjadi sebesar 14,91% pada tahun 2024 menunjukkan adanya pertumbuhan investasi pada sektor ini yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara nilai ekspor kabupaten samosir berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan menurun dari -6,24 pada tahun 2020 menjadi -68,02 pada tahun 2024, sementara untuk ekspor barang dan jasa atas dasar harga berlaku mulai membaik dari -38,69 tahun 2020 menjadi 23,42 pada tahun 2024, hal ini disebabkan karena nilai impor Kabupaten Samosir masih tinggi dibandingkan ekspor yang dilakukan.

Tabel 2.23 Perkembangan Indikator Integrasi Ekonomi Domestik dan Global Kabupaten Samosir

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	13,88	14,39	14,52	14,79	14,91
2.	Eksport Barang dan Jasa berdasarkan PDRB ADHK	Juta Rupiah	-6,24	-4,47	-0,21	-2,39	-68,02
3.	Eksport Barang dan Jasa berdasarkan PDRB ADHB	Juta Rupiah	-38,69	-54,77	-61,16	-64,85	23,42

Sumber: BPS Kabupaten Samosir, 2025

Salah satu strategi dalam peningkatan ekspor barang dan jasa, pemerintah Kabupaten Samosir mengupayakan pemenuhan ekspor untuk produk unggulan mulai dari pertanian, peternakan, dan industri. Produk unggulan di sektor pertanian seperti padi, jagung, kacang tanah dan kedelai. Produk unggulan sektor peternakan adalah kerbau dan babi. Dibidang industri tenun ulos tradisional dan alat tenun bukan mesin menjadi produk unggulan. Guna pengembangan sektor unggulan, peningkatan nilai tambah produk lokal, dan penciptaan iklim investasi yang kondusif.

6. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Perkotaan dan perdesaan memiliki peran krusial sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, namun pendekatannya perlu berbeda. Perkotaan, dengan konsentrasi penduduk dan kegiatan ekonomi, menjadi pusat inovasi, manufaktur, dan jasa. Sementara itu, perdesaan memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, pariwisata, dan energi terbarukan. Sinergi antara keduanya, melalui pembangunan berkelanjutan dan inklusif, dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan

Beberapa indikator untuk melihat perkembangan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten adalah Indeks kemantapan Infrastruktur, Rumah tangga dengan akses hunian layak dan persentase desa mandiri. Indeks kemantapan infrastruktur Kabupaten Samosir meningkat sebesar 11, 28 poin selama 5 tahun terakhir yang dicapai dari peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur umum, baik jalan, jembatan, dan irigasi. Sementara itu, rumah tangga dengan akses hunian layak di Kabupaten Samosir meningkat sejak tahun 2020 sebesar 79,97 menjadi 82 pada tahun 2024, yang dicapai dari program Program Bedah Rumah yang terus dilaksanakan. Untuk persentase Desa mandiri meningkat dari 2,34% pada tahun 2023 menjadi 4,69% pada tahun 2024.

Tabel 2.24 Perkembangan Indikator Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Samosir

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks kemantapan Infrastruktur	indeks	54,13	56,67	58,06	64,46	65,41
2.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	79,97	82,51	81	81	82
3.	Persentase Desa Mandiri	%	-	-	-	2,34	4,69

Sumber: BPS Kabupaten Samosir, berbagai sumber, 2025

7. Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi makro merujuk pada kondisi dimana indikator-indikator ekonomi utama, seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan nilai tukar mata uang, relatif stabil dan terkendali dalam jangka waktu yang panjang. Kondisi ini penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Indikator untuk melihat stabilitas Ekonomi Makro salah satunya adalah Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2024 rasio tersebut sebesar 0,53.

Tabel 2.25 Perkembangan Indikator Stabilitas Ekonomi Makro Kabupaten Samosir

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	persen	0,33	0,33	0,35	0,38	0,53

Sumber: BPS Kabupaten Samosir, berbagai sumber, 2025

Stabilitas ekonomi makro juga dipengaruhi oleh peningkatan konsumsi non pangan, keterbukaan ekonomi, dan penanganan kriminalitas yang memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing daerah. Peningkatan konsumsi non pangan menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan sektor lain dan menciptakan lapangan kerja. Keterbukaan ekonomi memungkinkan daerah untuk berpartisipasi lebih luas dalam pasar global, menarik investasi dan meningkatkan produktifitas. Sementara itu, penanganan kriminalitas yang efektif menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi investasi dan kegiatan ekonomi. Sehingga meningkatkan daya tarik daerah bagi pelaku bisnis dan investor. Upaya menjaga keamanan dan pencegahan kriminalitas dilakukan dengan meningkatkan koordinasi yang efektif antara pemerintah Kabupaten Samosir melalui Satuan Polisi Pamong Praja dengan kepolisian Kabupaten Samosir. Serta mengikutsertakan hulubalang yang ada pada masing-masing desa di Kabupaten Samosir.

Selain menurunnya daya beli masyarakat, rendahnya realisasi pengeluaran konsumsi non pangan perkapita juga bisa disebabkan oleh faktor lain, antara lain preferensi konsumen yang memilih menabung dari

pada membeli barang-barang non primer karena kekawatiran akan masa depan atau keinginan untuk memiliki cadangan keuangan yang lebih besar, selain adanya faktor eksternal seperti tingkat inflasi dan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi pola konsumsi.

Aspek Pelayanan Umum

1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif merujuk pada kerangka kerja yang dirancang untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan, sambil tetap mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Ini melibatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengambilan keputusan, serta kemampuan untuk merespon tantangan baru dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Indikator untuk mengukur perkembangan Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif Kabupaten antara lain Indeks SPBE. Dimana untuk Indeks SPBE Kabupaten Samosir sejak tahun 2020 sedikit mengalami penurunan dari 3,31 menjadi 2,70 pada tahun 2024. Hal ini dikarenakan arsitektur SPBE yang belum dievaluasi. Sementara untuk Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Samosir mengalami peningkatan setiap tahunnya menjadi 82,11 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Samosir telah menunjukkan komitmen kuat dalam reformasi pelayanan publik. Perkembangan indikator regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaftif Kabupaten Samosir dapat dilihat pada Tabel 2.26 dibawah ini:

Tabel 2.26 Perkembangan Indikator Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif Kabupaten Samosir

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	3,31	3,16	2,62	2,69	2,70
2.	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	-	-	75,14	80,65	82,11

Sumber: Dinas Kominfo Kabupayen Samosir, 2025

2. Hukum berkeadilan, keamanan nasional yang tangguh, dan demokrasi substansial

Hukum berkeadilan, keamanan nasional yang tangguh, dan demokrasi" merupakan tiga pilar utama yang menjadi fokus dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 di Indonesia. Ini berarti bahwa pembangunan negara akan diarahkan pada terciptanya sistem hukum yang adil, pertahanan negara yang kuat, serta sistem

pemerintahan yang demokratis, demi terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat dan berlandaskan hak asasi manusia. Beberapa indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan Hukum Berkeadilan, Kemanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial antara lain persentase penegakan Perda. Di Kabupaten Samosir untuk Persentase Penegakan Perda relatif stabil dan dapat dilaksanakan dengan baik atau 100 persen dilaksanakan.

Penerapan hukum berkeadilan dilakukan dengan menegakkan prinsip-prinsip keadilan yang dalam penerapannya memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama dimata hukum, tanpa diskriminasi dan hak-haknya dilindungi, yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan dan kedamaian dalam masyarakat serta menjamin kesejahteraan seluruh warga negara.

Tabel 2.27 Perkembangan Indikator Hukum Berkeadilan, Kemanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial Kabupaten Samosir

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Penegakan Perda	%	90	90	100	100	100

Sumber: Satpol PP Kabupaten Samosir, 2025

3. Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan

Diplomasi yang kuat dan efektif adalah kunci untuk membangun hubungan baik dengan negara-negara lain, menyelesaikan konflik secara damai, dan memperjuangkan kepentingan nasional di forum internasional. Ketangguhan diplomasi mencakup kemampuan untuk bernegosiasi, membangun aliansi, dan mengatasi tantangan keamanan regional. Kekuatan pertahanan yang mumpuni, baik dari segi teknologi maupun personel, dapat memberikan efek gentar terhadap potensi agresor. Hal ini tidak berarti mengarah pada militerisme, tetapi lebih pada kemampuan untuk mempertahankan diri dan mencegah terjadinya konflik. Fokus pada kawasan Asia Tenggara dan Indo-Pasifik, di mana Indonesia memiliki peran strategis. Diplomasi dan pertahanan yang kuat akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain penting di kawasan ini. Perkembangan Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan Kabupaten Samosir dilihat dari Indeks Daya saing Daerah yang meningkat dari tahun 2023 sebesar 2,75 meningkat menjadi 3,27 pada tahun 2024.

Tabel 2.28 Perkembangan Indikator Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya
Gentar Kawasan Kabupaten Samosir

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	-	-	-	2,75	3,27

Sumber: BPS Kabupaten Samosir, berbagai sumber, 2025

4. Kinerja setiap urusan pemerintah daerah

a. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib

Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Indeks Pendidikan merupakan salah satu dari 3 komponen utama dalam pengukuran IPM. Komponen ini mencakup Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Indeks Pendidikan Kabupaten Samosir mengalami peningkatan sebesar 0,007 poin selama 5 tahun terakhir dimana pada tahun 2024 sebesar 0,696 (Tabel 2.24). Angka ini masih di bawah Indeks Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (0,7057).

Jika dilihat dari kondisi wilayah Kabupaten Samosir, penyebaran lokasi pendidikan terutama sekolah masih pada kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk dan kondisi geografis yang landai seperti Kecamatan Pangururan, Kecamatan Simanindo, dan Kecamatan Palipi. Sehingga Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah pada ke-3 kecamatan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya yang Sebagian berada di pegunungan.

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Kabupaten Samosir selama 5 tahun terakhir cenderung menurun, namun di angka lebih dari 100, dimana pada tahun 2024 berada pada angka 107,53. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia sekolah SD termasuk penduduk yang berusia diluar usia jenjang pendidikan SD, telah mengakses pendidikan jenjang SD tersebut. Hal ini terjadi karena masih banyak anak yang berumur kurang dari 7 tahun yang masuk ke SD khususnya SD swasta. Sementara itu, APK SMP memiliki tren menurun, dimana pada tahun 2024 berada di angka 93,39. Ini berarti dari 100 penduduk usia sekolah 13-15 tahun, 93,39 diantaranya bersekolah di SMP.

Angka Partisipasi Murni (APM) SD Kabupaten Samosir sebesar 86,71 pada tahun 2024. Hal ini dikarenakan sebagian penduduk yang berumur 7-12

tahun sudah berada di jenjang pendidikan SMP. APM SMP Kabupaten Samosir memiliki tren menurun, dimana pada tahun 2024 pada angka 84,73. Ini menunjukkan bahwa dari 100 orang penduduk usia 13-15 tahun, sebanyak 84,73 orang diantaranya berada di jenjang pendidikan SMP.

Untuk peningkatan kualifikasi guru, porsi guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV semakin meningkat dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2024 sudah berada pada angka 93,22 persen.

Tabel 2.29 Perkembangan Indikator Kependidikan Kabupaten Samosir

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Pendidikan	indeks	0,689	0,689	0,690	0,691	0,696
2.	APK SD/MI/Paket A	%	115,93	116,16	116,05	107,76	107,53
3.	APK SMP/MTs/Paket B	%	101,46	99,47	96,03	92,13	93,39
4.	APM SD/MI/Paket A	%	99,39	99,32	99,86	98,95	86,71
5.	APM SMP/MTs/Paket B	%	90,92	91,51	90,69	87,29	84,73
6.	Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	%	89,88	89,9	92,62	92,62	93,22

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir, 2025

2. Kesehatan

Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten Samosir telah melakukan upaya peningkatan aksesibilitas masyarakat dari semua lapisan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil, mudah, murah dan merata. Penyelenggaraan program kesehatan di Kabupaten Samosir, tidak hanya menekankan kepada upaya kuratif dan rehabilitatif, akan tetapi melakukan upaya promotif dan prevantif dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Samosir berfluktuatif selama 5 tahun terakhir (Tabel 2.30), dimana pada tahun 2024 berada pada angka 17 dan tidak memenuhi target (13). Angka Kematian Ibu (AKI) juga berfluktuatif, pada tahun 2024 di angka 64,1 dan memenuhi target (118). Untuk prevalensi stunting menunjukkan tren menurun, namun pada tahun 2024 terjadi peningkatan di angka 28,60.

Tabel 2.30 Perkembangan Indikator Kesehatan Kabupaten Samosir

No	Indikator	Satuan	Target					Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Angka Kematian Bayi	Per 1000 kelahiran hidup	20	19	17	15	13	11,7	11	7,5	10	17
2.	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 Kelahiran	173	154	142	130	118	0	167	174	236	64,1
3.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	-	-	-	-	-	30,75	28,40	26,30	22,40	28,60

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir, 2025

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Hadrianus Sinaga

Pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Samosir salah satunya dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hadrianus Sinaga. Selama 5 tahun terakhir, IKM mengalami peningkatan.

Tabel 2.31 Perkembangan Indikator Kinerja RSUD dr. Hadrianus Sinaga

No.	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	78,73	79,15	84,02	86,67	81,92
2.	ALOS	%	3,20	3,53	3,84	3,97	4,28
3.	BOR	%	61,51	41,25	47,15	61,43	61,43

Sumber: RSUD dr. Hadrianus Sinaga, Kabupaten Samosir, 2025

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Ketersediaan fasilitas wilayah dan infrastruktur merupakan sarana penunjang untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar wilayah. Semakin lengkap ketersediaan (availability) fasilitas wilayah/infrastruktur, maka semakin kuat pula suatu daerah dalam menghadapi daya saing.

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Samosir masih pada angka 54,01 persen, artinya sebesar hampir 46 persen jaringan jalan di Kabupaten Samosir tidak dalam kondisi baik (Tabel 2.27). Begitu juga dengan penduduk yang memiliki akses ke air minum dan sanitasi,

hanya 55,84 persen, sementara hampir 45 persen lainnya tidak memiliki akses air minum dan sanitasi yang layak. Kemudian, irigasi kabupaten dengan kondisi baik hanya sebesar 69,27 persen. Angka ini terus meningkat selama 5 tahun terakhir, namun perlu perhatian yang lebih mengingat sektor pertanian adalah sektor dominan dalam perekonomian Samosir. Persentase rumah layak huni mengalami peningkatan, pada tahun 2024 sebesar 82,52 persen dan perlu terus ditingkatkan mengingat pariwisata merupakan sektor unggulan di Kabupaten Samosir. Secara umum, Kabupaten Samosir masih sangat perlu untuk berbenah dalam meningkatkan layanan infrastrukturnya kepada masyarakat terutama untuk meningkatkan kualitas dan kemerataannya.

Pada Tahun 2024 jumlah rumah layak huni di Kabupaten Samosir sebanyak 27.905 unit dari jumlah rumah tangga di Kabupaten Samosir sebanyak 33.819 unit. Sehingga persentase rumah layak huni Kabupaten Samosir terealisasi sebesar 82,51% atau meningkat sebesar 1,86% dari tahun 2023.

Tabel 2.32 Perkembangan Indikator Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir

No.	Indikator	Satuan	Target			Realisasi				
			2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	58,06	62,06	66,06	54,06	56,6	55,79	54,02	54,01
2.	Persentase penduduk berakses air minum/sanitasi	%	61	64	67	55,68	52,39	52,85	54,68	55,84
3.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	60	65	70	55	55	56,59	62,55	69,27
4.	Persentase rumah layak huni	%	85	87	89	79,97	82,51	81	81	82,52

Sumber: Dinas PUTR Kabupaten Samosir, 2025

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pelaksanaan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah upaya menyediakan tempat tinggal yang layak, aman, dan terjangkau bagi masyarakat, serta menciptakan lingkungan permukiman yang teratur dan berkelanjutan. Persentase rumah layak huni mengalami peningkatan, dari 79,97 persen pada tahun 2020 menjadi 82,52 persen pada tahun 2024

(Tabel 2.33). Peningkatan ini dilakukan melalui program subsidi perumahan dan program bedah rumah. Kondisi ini masih perlu terus ditingkatkan mengingat pariwisata merupakan sektor unggulan di Kabupaten Samosir.

Tabel 2.33 Perkembangan Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Samosir

No.	Indikator	Satuan	Target			Realisasi				
			2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase rumah layak huni	%	85	87	89	79,97	82,51	81	81	82,52

Sumber: Dinas PUTR Kabupaten Samosir, 2025

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat adalah bagian penting dari tugas pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial, melindungi masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Hal ini meliputi 3 aspek yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama.

a. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Capaian Indikator Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Samosir ditunjukkan pada tabel 2.29 di bawah ini. Tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan (K3) mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir, terutama pada tahun 2022-2024 dimana penyelesaiannya mencapai angka 100 persen. Hal ini terjadi melalui pendekatan dan fasilitasi yang tepat pada pelanggaran yang terjadi. Sementara itu, tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran, juga terus mengalami peningkatan, pada tahun 2024 mencapai 60 persen, dimana masih 60 persen kasus kebakaran yang ditangani dalam waktu maksimal 15 menit. Namun angka ini belum mencapai target (90 persen).

Selanjutnya, persentase penegakan perda sudah mencapai 100 persen terutama selama 3 tahun terakhir. Hal ini dapat dicapai melalui kolaborasi dan komitmen yang tinggi oleh Tim Penegak Perda dalam penegakan perda dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan yang ditetapkan.

Tabel 2.34 Perkembangan Indikator Satpol PP Kabupaten Samosir

No.	Indikator	Satuan	Target			Realisasi				
			2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	persen	85	86	87	81	83	100	100	100
2.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	persen	70	80	90	-	50	40	42,1	65
3.	Persentase Penegakan PERDA	persen	90	90	90	90	90	100	100	100

Sumber: Satpol PP Kabupaten Samosir, 2025

b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam pelaksanaan urusan Keamanan dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat, tingkat konflik IPOLEKSOSBUDHANKAM yang ditangani adalah 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa semua konflik yang terjadi ditangani dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Samosir yang dicapai melalui koordinasi dan kolaborasi yang baik antara pihak-pihak yang terkait sehingga penyelesaian dapat dicapai dan dapat diterima oleh semua pihak.

Tabel 2.35 Perkembangan Indikator Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir

No.	Indikator	Satuan	Target			Realisasi				
			2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tingkat Konflik IPOLEKSOSBUDHANKAM yang ditangani di Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Kesbangpol Kabupaten Samosir, 2025

c. Penanggulangan Bencana

Kabupaten Samosir berada dalam daerah yang rawan bencana. Oleh karena itu pencegahan dan penanggulangannya perlu diperhatikan. Untuk Indeks Risiko Bencana, capaiannya masih stagnan di level 114. Sementara itu, Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Samosir mengalami peningkatan selama 3 tahun terakhir, dimana pada tahun 2024 berada pada angka 0,30 dengan kategori rendah. Ini berarti, Kabupaten Samosir memiliki kemampuan yang masih rendah dalam hal kesiapsiagaan dan ketahanan terhadap bencana.

Tabel 2.36 Perkembangan Indikator Penanggulangan Bencana Kabupaten Samosir

No.	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Risiko Bencana	angka	114	114	114	114	114
2.	Indeks Ketahanan Daerah	angka	na	na	0,26	0,28	0,30

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir, 2025

6. Sosial

Urusan sosial mencakup berbagai kebijakan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan melindungi kelompok rentan dalam masyarakat. Untuk kinerja urusan sosial Kabupaten Samosir, PSKS yang ditangani dan memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar di Kabupaten Samosir mencapai 96,06 persen (Tabel 2.32). Kemudian, persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial mencapai 100 persen. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat mencapai 96,06 persen. Secara umum, masyarakat rentan di Kabupaten Samosir dilindungi dan difasilitasi pemenuhan hak-hak dasarnya.

Tabel 2.37 Perkembangan Indikator Sosial Kabupaten Samosir

No.	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase PSKS yang tertangani	%	100	100	100	100	96,09
2.	Persentase PSKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	100	100	100	100	96,09
3.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100
4.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	100	100	100	100	100
5.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	100	100	100	100	96,09

Sumber: Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Samosir, 2025

Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi suatu daerah. Kualitas, keterampilan, serta jumlah tenaga kerja yang tersedia menjadi penentu utama dalam mendukung pertumbuhan sektor-sektor ekonomi seperti pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata. Kabupaten Samosir, dengan potensi sumber daya alam pertanian dan pariwisata menghadapi tantangan dan peluang dalam mengoptimalkan tenaga kerjanya agar dapat berkontribusi maksimal terhadap kemajuan daerah.

Tabel 2.38 Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Samosir

No.	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Jumlah	25	30	237	127	82
2.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	orang	0	0	0	0	100
3.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Jumlah	16	16	228	75	160
4.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Jumlah	0	20	0	0	235
5.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Jumlah	0	16	272	128	180
6.	Rasio lulusan S1/S2/S3	%	10	12	16,67	16,06	10,91
7.	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian	%	59,88	58,98	50	50	50

Sumber: Dinas Koperasi Nakerindag Kabupaten Samosir, 2025

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pelaksanaan bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diantaranya dilakukan melalui penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan, pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah kabupaten.

Tabel 2.39 Perkembangan Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Samosir

No.	Indikator	Satuan	Target			Realisasi				
			2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	57,87	57,97	58,07	57,67	83,82	81,69	82,95	80,73
2.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100	100	100	100	100	100
4.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	100	100	100	100	100	100	100
5.	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	-	100	100	100	100
6.	Kontribusi Perempuan dalam Pekerjaan Upahan Di Sektor Non Pertanian	%	59,18	59,28	59,48	59,88	58,98	50	50	50

Sumber: Dinas P3A PPKB Kabupaten Samosir, 2025

3. Pangan

Pelaksanaan bidang urusan Pangan dilaksanakan melalui penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan, Diversifikasi pangan, Peningkatan sarana dan prasarana pertanian, Pengembangan pertanian perkotaan, Pengembangan kawasan pertanian terpadu, dan Peningkatan keamanan pangan. Capaian kinerja bidang pangan ditunjukkan pada tabel 2.40 berikut ini.

Tabel 2.40 Perkembangan Indikator Pangan Kabupaten Samosir

No.	Indikator	Satuan	Target			Realisasi				
			2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	83,5	84	84,5	81	82	82,1	83,4	92,85
2.	Ketersediaan pangan utama	ton	23.00 0,00	23.10 0,00	23.20 0,00	22.81 3,00	22.81 3,00	28.36 3,67	23.73 4,38	26.41 2,94
3.	Ketersediaan energi perkapita	Kkal/kap/h ari	3.144, 00	3.159, 72	3.175, 79	3.129, 00	3.129, 00	3.135, 00	3.194, 00	3.244, 68
4.	Ketersediaan protein perkapita	Gr/kap/hari	89,7	90,14	90,59	89,26	89,26	83,92	73,59	81,3
5.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	sampel	3	5	5	3	3	5	5	6

Sumber: Dinas KPP Kabupaten Samosir, 2025

Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) setiap tahunnya mengalami peningkatan dan sudah melebihi target. Ketersediaan pangan utama juga mengalami peningkatan dan melebihi target yang sudah ditetapkan.

4. Pertanian

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pertanian melalui diantaranya: pemberian ijin lokasi, penyelesaian sengketa tanah untuk kepentingan umum, pemberian ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan, Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* dalam Daerah kabupaten/kota, penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota. Untuk capaian kinerja bidang pertanian Kabupaten Samosir (Tabel 2.41) dilaksanakan secara optimal, dimana seluruh ganti rugi dan santunan dilaksanakan 100 persen dan penyelesaian sengketa tanah difasilitasi 100 persen.

Tabel 2.41 Perkembangan Indikator Pertanian Kabupaten Samosir

No.	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	%	100	100	100	100	100
2.	Persentase penyelesaian sengketa tanah yang terfasilitasi	%	100	100	100	100	100

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir, 2025

5. Lingkungan Hidup

Kelestarian lingkungan hidup menjadi fokus dalam pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dimana Pemerintah Daerah tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun tetap memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup. Capaian kinerja lingkungan hidup diperlihatkan pada tabel 2.42 di bawah ini.

Tabel 2.42 Perkembangan Indikator Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir

No.	Indikator	Satuan	Target			Realisasi				
			2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	angka	65-75	70	72	68,49	68,49	69,96	71,86	70,93
2.	Indeks Kualitas Air	angka	53,81	53,91	54,01	51,82	51,82	56,36	58,18	53,64
3.	Indeks Kualitas Udara	angka	89,5	89,61	89,71	91,68	91,68	91,13	92,23	93,9
4.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	angka	55,33	56,42	57,5	54,23	54,23	54,23	57,67	58,17

Sumber: Dinas LH Kabupaten Samosir, 2025

Berdasarkan tabel di atas, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sedikit berfluktuatif. Dimana pada tahun 2024, IKLH mengalami penurunan yang diakibatkan oleh penurunan Indeks Kualitas Air. Realisasi IKLH tahun 2024 tersebut tidak mencapai target yang telah ditentukan (72). Selanjutnya, Indeks Kualitas Air mengalami penurunan, hal ini diakibatkan oleh masih belum terkendalinya pencemaran Danau Toba. sehingga tidak mencapai target (54,01). Untuk Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan secara umum mengalami peningkatan dan mencapai target.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Untuk pelaksanaan bidang administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil, Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami fluktuasi dari Tahun 2020 sebesar 99,01% menjadi 99,42% di tahun 2024. Hal ini disebabkan karena data kependudukan bersifat dinamis. Pertambahan wajib KTP bisa lebih cepat daripada pertambahan pemilik KTP, sehingga persentasenya bisa tampak fluktuatif meskipun pelayanan KTP tetap berjalan.

Sementara untuk rasio bayi berakte kelahiran di Kabupaten Samosir pada tahun 2024 sudah diangka 100%. Hal ini merupakan pencapaian atas kerjasama Didukcapil dengan RSUD dr. Hadrianus Sinaga yang sama-sama berkomitmen dan berkolaborasi dalam pencapaian kinerja administrasi kependudukan. Namun, pasangan yang berakte nikah masih perlu ditingkatkan, dimana pada tahun 2024, hanya 71,65 persen yang memiliki akte nikah. Angka ini merupakan akibat dari msih banyaknya pasangan tua yang tidak mengurus akte pernikahannya. Upaya untuk

mendorong masyarakat agar sadar administrasi kependudukan dan pencatatan sipil masih harus perlu ditingkatkan.

Tabel 2.43 Perkembangan Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Samosir

No.	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk (rasio penduduk usia > 17 yang ber-KTP)	%	-	-	97,38	98,89	99,42
2.	Rasio bayi berakte kelahiran	%	100	100	100	100	100
3.	Rasio pasangan berakte nikah	%	-	-	65,85	70,17	71,65

Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten Samosir, 2025

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat serta memperkuat desa sebagai unit pemerintahan yang mandiri. Hal ini melibatkan berbagai inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat desa melalui partisipasi, pengembangan kapasitas, dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.

Capaian kinerja bidang Pemberdayaan Masyarakat dan desa diperlihatkan pada tabel 2.44 di bawah ini.

Tabel 2.44 Perkembangan Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Samosir

No.	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Desa Membangun	Angka	0,6135	0,6296	0,6397	0,6567	*
2.	Jumlah desa mandiri	desa	-	-	-	3	6
3.	Persentase PKK aktif	%	100	100	100	100	100
4.	Persentase Posyandu aktif	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Samosir, 2025

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pengendalia penduduk dan keluarga berencana, dilaksanakan melalui pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah kabupaten/kota, pelaksanaan

advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal, pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB, pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah kabupaten/kota, pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB, pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Capaian kinerja bidang Pengendalian penduduk dan keluarga berencana ditunjukkan pada tabel 2.45 di bawah ini. Total Fertilitu Rate (TFR) Samosir mengalami peningkatan.

Tabel 2.45 Perkembangan Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Samosir

No.	Indikator	Satuan	Target			Realisasi				
			2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Total Fertility Rate (TFR)	Angka	3,2	2,9	2,7	2,1	2,1	2,1	2,1	2,7

Sumber: Dinas P3A PPKB Kabupaten Samosir, 2025

9. Perhubungan

Capaian kinerja bidang perhubungan selama periode RPJMD menunjukkan perkembangan yang cukup baik dalam mendukung konektivitas, kelancaran mobilitas, serta pelayanan transportasi masyarakat di Kabupaten Samosir.

Untuk persentase layanan angkutan darat, kinerja mengalami peningkatan signifikan dari 59,96% pada tahun 2020 menjadi 428,61% pada tahun 2024 (Tabel 2.46). Lonjakan ini mencerminkan adanya peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat dan aktivitas sektor pariwisata yang meningkat tajam di Kabupaten Samosir.

Pada aspek pemasangan rambu-rambu lalu lintas, capaian masih stagnan di angka 55,83% sepanjang tahun 2020–2024. Hal ini menunjukkan masih terbatasnya upaya peningkatan sarana keselamatan transportasi, sehingga

menjadi catatan penting bagi perencanaan kedepan untuk memperkuat aspek keselamatan berlalu lintas.

Sementara itu, rasio panjang jalan per jumlah kendaraan mengalami peningkatan dari 21,69 pada tahun 2020 menjadi 29,64 pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara pertumbuhan kendaraan dengan penambahan panjang jalan, sehingga tingkat kepadatan lalu lintas relatif masih dapat terkendali.

Indikator jumlah orang yang melalui dermaga, bandara, dan terminal juga menunjukkan tren positif. Dari 15.055 orang pada tahun 2020 meningkat menjadi 50.745 pada tahun 2024. Lonjakan ini sejalan dengan meningkatnya aktivitas perekonomian, pariwisata, serta mobilitas masyarakat di Kabupaten Samosir.

Secara keseluruhan, capaian urusan perhubungan menggambarkan adanya kemajuan signifikan dalam layanan angkutan darat dan mobilitas masyarakat, namun masih menyisakan tantangan pada aspek ketersediaan sarana pendukung keselamatan transportasi serta keberlanjutan prasarana transportasi darat, laut, dan udara.

Tabel 2.46 Perkembangan Indikator Perhubungan Kabupaten Samosir

No.	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	47	47	47	45	45
2.	Persentase layanan angkutan darat	%	59,96	66,63	123,29	156,27	428,61
3.	Persentase Pemasangan Rambu-rambu	%	55,83	55,83	55,83	55,83	55,83
4.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	21,69	24,1	26,32	26,69	29,64
5.	Jumlah orang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	Orang	15.055	16.728	19.480	42.477	50.745

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir, 2025

10. Komunikasi dan Informatika

Urusan komunikasi dan informatika melibatkan pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta pemanfaatannya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Capaian kinerja bidang komunikasi dan informatika Kabupaten Samosir diperlihatkan pada tabel 2.47 di bawah ini.

Tabel 2.47 Perkembangan Indikator Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir

No.	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks SPBE	angka	3,31	3,16	2,62	2,69	2,70
2.	Aplikasi Satu Data Daerah	Ada/tidak	tidak	tidak	tidak	Ada	Ada
3.	Persentase Data Sektoral Terisi dalam Aplikasi SASADA	%	0	0	70	70	100

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Samosir, 2025

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menurun dari 3,31 poin pada tahun 2020 menjadi 2,70 poin pada tahun 2024 (Tabel 2.22). Penurunan ini menunjukkan bahwa semakin rendahnya pemanfaatan dan perawatan sistem informasi dalam ruang lingkup pemerintahan. Hal ini menandakan bahwa kurangnya perhatian dari instansi terhadap sistem pemerintahan yang telah dikembangkan. Selanjutnya, Kabupaten Samosir sudah mengembangkan aplikasi Satu Data Samosir (SASADA) dalam pengolahan dan perekaman data sektoral diresmikan pada tahun 2023. Hingga tahun 2024, peningkatan penginputan data sektoral pada aplikasi SASADA terus ditingkatkan, dimana pada tahun 2024, pencapaiannya mencapai 100 persen.

11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pelaksanaan bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (UKM) meliputi berbagai kebijakan dan program yang bertujuan untuk memajukan sektor koperasi dan UMKM dalam perekonomian suatu negara. Hal ini mencakup upaya-upaya untuk mendukung pertumbuhan, pengembangan, dan keberlanjutan koperasi serta UKM. Berikut diperlihatkan capaian kinerja bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah pada tabel 2.48 di bawah ini.

Tabel 2.48 Perkembangan Indikator Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Samosir

No.	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Proporsi jumlah UMKM non pertanian	%	na	29,33	34,08	34,36	41,85
2.	Proporsi Jumlah IKM	%	146	146	158	515	515
3.	Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB	%	3,24	6,14	6,26	1,68	0,54

Sumber: Dinas Koperasi Nakerindag Kabupaten Samosir, 2025

Proporsi jumlah UMKM non pertanian mengalami peningkatan dari 29,33 persen pada tahun 2019 menjadi 34,36% pada tahun 2023. Hal ini menandakan bahwa mayoritas UMKM yang terdapat di Kabupaten Samosir didominasi oleh UMKM yang bergerak pada bidang pertanian. Rasio volume koperasi terhadap PDRB pada tahun 2023 sebesar 1,26 persen. Hal ini menandakan bahwa kehadiran koperasi belum mampu mendorong perekonomian Kabupaten Samosir.

12. Penanaman Modal

Pelaksanaan bidang penanaman modal melibatkan berbagai kebijakan dan tindakan yang bertujuan untuk menarik investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri ke suatu wilayah atau negara. Tujuan dari urusan penanaman modal adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Capaian kinerja bidang penanaman modal diperlihatkan pada tabel 2.49 di bawah ini.

Tabel 2.49 Perkembangan Indikator Penanaman Modal Kabupaten Samosir

No.	Indikator	Satuan	Target			Realisasi				
			2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Pelaku Usaha	686	701	716	597	676	895	904	930
2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Miliar Rupiah	1.25 0,00	1.31 8,00	1.39 1,00	1.13 6,67	1.19 0,50	1.25 1,00	1.58 4,00	1.67 1,00
3.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	%	5	5,5	5,5	7,17	4,74	5,16	26,5 4	5,52

Sumber: Dinas PMPTSP Kabupaten Samosir, 2025

Berdasarkan Tabel 2.49 di atas, terjadi peningkatan jumlah investor selama 5 tahun terakhir. Demikian juga dengan nilai investasi berskala nasional baik Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Pembinaan terhadap organsiasi kepemudaan merupakan hal yang strategis bagi daerah untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah. Pembangunan daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab aparatur sipil

semata, akan tetapi organisasi kepemudaan dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan pembangunan daerah yang merata dan berkesinambungan. Selain itu, aktifitas olahraga juga merupakan wadah bagi masyarakat, khususnya pemuda untuk menyalurkan minat dan bakat serta menumbuhkembangkan kreatifitas di tengah masyarakat. Untuk itu, pembangunan prasarana dan sarana yang mendukung aktifitas kepemudaan dan olahraga menjadi penting dan strategis bagi daerah untuk dikembangkan. Adapun realisasi capaian indikator kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Pemerintah Kabupaten Samosir disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.50 Perkembangan Indikator Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir

No.	Indikator	Satuan	Target			Realisasi				
			2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah wirausaha muda	Kelompok	188	208	228	168	-	80	161	245
2.	Cakupan pembinaan olahraga	%	79	83	88	95	75	34,3	37,4	46,67
3.	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	50	63	76	37	37	15	16	17
4.	Cakupan pembinaan atlet muda	%	28	30	32	26,03	26,26	29	32	40
5.	Jumlah atlet berprestasi	atlet	2	2	3	0	2	2	2	2
6.	Jumlah prestasi olahraga	Cabang Olahraga	2	4	5	0	0	2	2	3

Sumber: Dinas Dikpora Kabupaten Samosir, 2025

14. Statistik

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang statistik secara garis besar berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang statistik daerah, antara lain perumusan kebijakan teknis perencanaan; pengkoordinasian penyusunan statistik daerah; dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang statistik daerah. Penyediaan dan pengelolaan sistem data dan statistik daerah yang terintegrasi dilakukan melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Pencapaian kinerja urusan statistik ditunjukkan dengan adanya sistem data dan statistik yang terintegrasi yang diresmikan dan dimanfaatkan sejak tahun 2023. Pengembangan selanjutnya pada bidang statistik dilakukan pada penerbitan dokumen data statistik sektoral Kabupaten Samosir setiap tahunnya.

Tabel 2.51 Perkembangan Indikator Statistik Kabupaten Samosir

No.	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/tidak	tidak	tidak	tidak	Ada	ada

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Samosir, 2025

15. Kebudayaan

Urusan kebudayaan mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pelestarian dan pengembangan terhadap warisan budaya suatu bangsa. Urusan ini meliputi upaya untuk menjaga dan mempromosikan keberagaman budaya, identitas daerah, dan ekspresi budaya yang khas. Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya meningkat dari 5 penyelenggaraan pada tahun 2020 menjadi 10 penyelenggaraan di tahun 2024 seiring dengan berlalunya covid-19 dan naiknya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Samosir akibat tuntasnya beberapa pembangunan infrastruktur pariwisata di Kabupaten Samosir seperti Waterfront City Pangururan, Panorama Tele, Wisata Sibeabea dll. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan meningkat dari 14,3% pada tahun 2020 menjadi sebesar 27,93% pada tahun 2024.

Tabel 2.52 Perkembangan Indikator Kebudayaan Kabupaten Samosir

No	Indikator	Satuan	Target			Realisasi				
			2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Festival	3	5	5	5	4	4	4	10
2.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Situs/cagar	16,3	17,8	19,3	14,3	14,8	19,23	25,37	27,93
3.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Karya budaya	5	5	5	0	5	6	5	2
4.	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Cagar budaya	2	2	2	25	0	0	59	16

Sumber: Dinas Budpar Kabupaten Samosir, 2025

16. Perpustakaan

Upaya pemerintah untuk mewujudkan SDM yang berkualitas adalah dengan memberikan dukungan berupa sarana dan prasarana pendidikan agar masyarakat dapat mengakses ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah dengan

menyediakan perpustakaan. Ketersediaan perpustakaan diharapkan dapat memfasilitasi masyarakat agar meningkatkan pengetahuan dan wawasannya. Jumlah kunjungan perpustakaan pertahun di Kabupaten Samosir meningkat seiring dengan tumbuhnya minat baca masyarakat terutama pelajar dari 0,03 persen dari total populasi pada tahun 2021 menjadi sebesar 0,5 persen pada tahun 2024. Angka ini termasuk sangat kecil dan masih sangat perlu ditingkatkan dan menjadi perhatian bagi Daerah. Pembenahan ruang baca dan fasilitas perpustakaan dalam upaya peningkatan kenyamanan dan kunjungan terus dilakukan untuk meningkatkan kunjungan perpustakaan setiap tahunnya.

Tabel 2.53 Perkembangan Indikator Perpustakaan Kabupaten Samosir

No.	Indikator	Satuan	Target			Realisasi				
			2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun dari total populasi	%	0,08	0,09	0,1	0,42	0,03	0,44	0,44	0,5
2.	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	pengunjung	8.569	9.452	10.367	3.240	3.740	4.020	3.906	4.614

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir, 2025

17. Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan di Kabupaten Samosir diperoleh dari kegiatan perikanan tangkap dan budidaya (kolam darat dan jaring apung). Pada tahun 2020 produksi perikanan tangkap sebanyak 7.470,15 ton dan perikanan budidaya sebanyak 7.673 ton. Produksi perikanan tangkap terbesar berada di Kecamatan Palipi, Kecamatan Nainggolan dan Kecamatan Onanrunggu. Sementara Produksi budidaya perikanan terbesar terdapat di Kecamatan Pangururan, Kecamatan Simanindo, dan Kecamatan Nainggolan.

Pada Tahun 2024 produksi perikanan mengalami penurunan menjadi 9.512,17 ton dengan penyumbang utama penurunan pada produksi perikanan budidaya. Hal ini terjadi karena memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 dan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.4/213/KPTS/2017 tentang Daya Tampung Beban Pencemaran dan Daya Dukung Danau Toba. Pemerintah Kabupaten Samosir telah melakukan penertiban Keramba Jaring Apung (KJA)/ Keramba Jaring Tancap (KJT) secara bertahap sejak Tahun 2021.

Cakupan Bina Kelompok Nelayan dari 35% di tahun 2020 menjadi 40% di Tahun 2024 dikarenakan meningkatnya kesadaran nelayan terhadap pentingnya pembinaan dan pendampingan untuk akses bantuan dan pemasaran produksi perikanan serta semakin meningkatnya kinerja penyuluh perikanan Kabupaten

Samosir. Perkembangan Indikator Kelautan dan Perikanan Kabupaten Samosir dapat dilihat pada Tabel 2.54 berikut.

Tabel 2.54 Perkembangan Indikator Kelautan dan Perikanan Kabupaten Samosir

No.	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Produksi perikanan	Ton	15.143,15	9.940,00	8.938,16	9.036,12	9.512,17
2.	Cakupan bina kelompok nelayan	%	35	36	39	40	40

Sumber: Dinas KPP Kabupaten Samosir, 2025

18. Pariwisata

Urusan pariwisata melibatkan berbagai aspek yang terkait dengan pengembangan, pengelolaan, dan promosi destinasi wisata suatu wilayah. Urusan ini meliputi upaya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata, serta menjaga keberlanjutan lingkungan dan budaya. Capaian kinerja urusan pariwisata disajikan dalam tabel 2.55 di bawah ini.

Tabel 2.55 Perkembangan Indikator Pariwisata Kabupaten Samosir

No.	Indikator	Satuan	Target			Realisasi				
			2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kunjungan wisata	%	100	100	100	101	100	122,98	122,38	209,07
2.	Lama kunjungan Wisata	Hari	1,32	1,4	2	1,32	1,32	1,32	1,4	1,5
3.	Nilai PAD sektor pariwisata	Miliar Rupiah	3,5	5,54	10,52	1,15	1,06	1,65	1,36	5,26
4.	Spend of Money (Pengeluaran Wisatawan)	Juta Rupiah		1,5	1,6	-	-	1,24	1,57	1,6

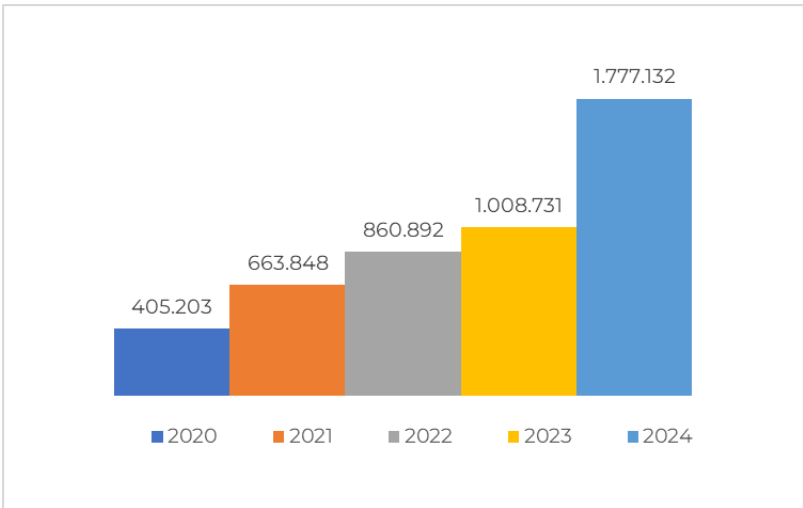
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir, 2025

Kunjungan wisata melebihi target yang sudah ditentukan. Dimana pada tahun terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 2024, yaitu sebesar lebih dari 700.000 kunjungan. Hal ini merupakan dampak dari antusiasme masyarakat untuk berkunjung ke spot wisata baru Kabupaten Samosir, diantaranya yang paling banyak dikunjungi adalah: Sibeabea, *Waterfront City* Pangururan, Menara Pandang Tele dan lainnya. Peningkatan ini sangat berdampak pada Pendapatan Asli Daerah, terutama pada retribusi. Masih diperlukan objek wisata baru agar wisatawan terus kembali ke Samosir. Selain itu, pemeliharaan objek wisata juga perlu menjadi perhatian.

Pengeluaran wisatawan merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur dampak ekonomi sektor pariwisata di suatu daerah. Di Kabupaten Samosir, tren pengeluaran wisatawan menunjukkan peningkatan (meningkat sebesar Rp. 360.000,00 selama 3 tahun terakhir) dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian lokal, terutama dalam sektor UMKM, transportasi, kuliner, akomodasi, serta jasa hiburan dan budaya, yang terlihat dari peningkatan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum beberapa tahun terakhir.

Peningkatan kualitas dan variasi atraksi wisata di Samosir, seperti pengembangan Desa Wisata, event budaya, dan wisata alam, turut mendorong pengeluaran wisatawan karena semakin banyak aktivitas yang bisa dinikmati. Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam menciptakan ekosistem pariwisata yang nyaman, aman, dan berkesan menjadi faktor penting dalam mendorong durasi tinggal dan besaran belanja wisatawan.

Optimalisasi pengeluaran wisatawan diharapkan dapat terus didorong melalui peningkatan kualitas layanan, promosi produk lokal, serta pengembangan destinasi wisata yang berkelanjutan. Dengan demikian, sektor pariwisata dapat menjadi penggerak ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja yang lebih luas di Kabupaten Samosir.



Gambar 2.18
Perkembangan kunjungan wisatawan

Sumber: Disbudpar Kabupaten Samosir Tahun 2020-2024

19. Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor dominan dalam struktur ekonomi Kabupaten Samosir, namun kontribusinya diharapkan menurun sehingga kontribusi sektor-sektor lain, baik sektor sekunder dan tersier, meningkat. Tren kontribusi

pertanian yang menurun namun masih terbilang lambat. Dimana selama 5 tahun belakangan, penurunan kontribusinya hanya 0,89 poin, tidak sampai 1 poin (Tabel 2.55). Pemerintah Daerah perlu memperhatikan dan mengupayakan percepatan pertumbuhan sektor –sektor unggulan lain.

Tabel 2.56 Perkembangan Indikator Pertanian Kabupaten Samosir

No.	Indikator	Satuan	Target			Realisasi				
			2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	50,88	50,77	50,66	50,87	51	51,25	51,68	49,98
2.	Produksi sektor pertanian	ton	107.047,88	108.118,36	109.199,54	163.975,76	165.879,04	189.138,89	163.975,76	165.879,04
3.	Produksi Sektor Perkebunan	ton	3.973,34	4.013,07	4.053,20	3.867,64	3.981,65	4.073,44	3.867,64	3.981,65
4.	Cakupan bina kelompok petani	%	8,4	10,9	13,4	5,9	6,1	10	15	20

Sumber: Dinas KPP Kabupaten Samosir, 2025

20. Perdagangan

Sektor perdagangan Kabupaten Samosir mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik dari laju pertumbuhannya maupun kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Samosir. Dimana selama 5 tahun terakhir, sektor kontribusi perdagangan meningkat sebesar 1,71 poin (tabel 2.56) dengan laju pertumbuhan meningkat sebesar 4,72 poin (tahun 2020 tidak dihitung, karena masih dalam kondisi Covid-19). Perdagangan merupakan sektor usaha terbesar kedua setelah sektor pertanian.

Tabel 2.57 Perkembangan Indikator Perdagangan Kabupaten Samosir

No.	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Laju pertumbuhan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (PDRB ADHK)	%	-0,42	5,21	6,91	6,34	9,93
2.	Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (PDRB ADHB)	%	10,84	11,03	11,49	11,96	12,55

Sumber: Dinas Koperasi Nakerindag Kabupaten Samosir, 2025

21. Perindustrian

Persentase data perusahaan industri pengolahan yang masuk dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SII NAS) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia terhadap total populasi perusahaan industri

pengolahan perindustrian di Kabupaten Samosir pada tahun 2024 masih sebesar 11,65% yang menggambarkan para pelaku usaha sudah mulai merasa pentingnya mendaftarkan usahanya secara berkala untuk mendapatkan data perkembangan, identifikasi tren dan kebutuhan serta potensi sektor industri.

Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB cenderung menurun dari tahun ke tahun. Dimana pada tahun 2024, besar kontribusi industri pengolahan hanya 0,49 persen (Tabel 2.58). Hal ini disebabkan karena tidak adanya industri pengolahan yang berskala besar di Kabupaten Samosir. Industri pengolahan yang ada hanya berskala industri rumah tangga. Hingga tahun 2024, tidak ada dokumen Rencana Pengemabngan Industri Kabupaten (RPIK) yang ditetapkan. Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah untuk menyusun pedoman pengembangan Industri yang menjadi dasar dalam pengembangan industri di Kabupaten Samosir di masa yang akan datang. Capaian kinerja bidang perindustrian ditunjukkan pada tabel 2.58 berikut ini.

Tabel 2.58 Perkembangan Indikator Perindustrian Kabupaten Samosir

No.	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Cakupan bina kelompok pengrajin	Kelompok	1	1	0	0	5
2.	Jumlah perda RPIK	%	0	0	0	0	0
3.	Persentase data perusahaan industri pengolahan yang masuk dalam SII NAS terhadap total populasi perusahaan industri pengolahan	%					11,65
4.	Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB (ADHB)	%	0,52	0,51	0,51	0,50	0,49

Sumber: Dinas Kopnakerindag Kabupaten Samosir, 2025

Penunjang Urusan

1. Sekretariat Daerah

Urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir telah menunjukkan kinerja strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum, baik dari aspek koordinasi, fasilitasi, maupun pelayanan administratif. Selama periode sebelumnya, Sekretariat Daerah berperan sebagai penggerak utama dalam memastikan sinkronisasi antar-perangkat daerah, harmonisasi kebijakan, serta pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang lebih adaptif.

Secara umum, capaian kinerja urusan Sekretariat Daerah ditunjukkan melalui:

1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
- Sekretariat Daerah berhasil memfasilitasi penyusunan kebijakan strategis daerah melalui perencanaan yang partisipatif dan terintegrasi, mendorong keterbukaan informasi publik, serta memperkuat sistem pelaporan dan evaluasi berbasis kinerja.
2. Dukungan terhadap Reformasi Birokrasi
- Sekretariat Daerah memfasilitasi penguatan kelembagaan perangkat daerah, pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), penguatan budaya kerja ASN, serta peningkatan digitalisasi administrasi perkantoran menuju birokrasi yang lincah dan responsif. Hingga tahun 2024, penilaian AKIP Kabupaten Samosir mengalami fluktuasi (Tabel 2.53), diperlukan penguatan perencanaan berbasis kinerja, penyempurnaan sistem penetapan kinerja, peningkatan SDM, penguatan peran APIP dan pengawasan internal, serta pemanfaatan teknologi yang lebih holistik dan terintegratif dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Samosir.
3. Efektivitas Layanan Administratif
- Capaian layanan administratif seperti penyusunan surat keputusan, fasilitasi kegiatan keprotokolan, pengelolaan keuangan sekretariat, dan pengadaan barang/jasa telah dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan efisiensi.
4. Peningkatan Kinerja Komunikasi Pemerintahan
- Sekretariat Daerah juga memfasilitasi peningkatan komunikasi publik dan hubungan antar-lembaga, termasuk dalam mendukung branding daerah melalui kanal informasi yang lebih terbuka dan dinamis.

Tabel 2.59 Perkembangan Indikator Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir

No.	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai	*	2,43	2,33	2,57	**
2.	Nilai AKIP Kabupaten Samosir	Nilai	70,19	69,57	69,87	68,73	68,80

Ket: *) tidak ada penilaian dari Kemendagri
**) masih dalam proses penilaian dari Kemendagri
Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir, 2025

2. Sekretariat Dewan

Dalam pelaksanaan urusan penunjang, Pemerintah Kabupaten Samosir telah berupaya memberikan layanan kepada DPRD dengan memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan DPRD Kabupaten Samosir melalui penyediaan Rencana Kerja Tahunan, penyusunan dan pengintegrasian Program Kerja DPRD dalam

dokumen perencanaan 5 tahunan (RPJMD) dan dokumen perencanaan tahunan (RKPD) sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.60 di bawah ini.

Tabel 2.60 Perkembangan Indikator Sekretariat Dewan Kabupaten Samosir

No.	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada
2.	Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada
3.	Terintegrasi Rrogram-Program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Samosir, 2025

2. Penelitian dan Pengembangan

Pemerintah Kabupaten Samosir melaksanakan urusan penelitian dan pengembangan melalui pengembangan inovasi dan peningkatan daya saing daerah. Hasil evaluasi Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Samosir bahwa terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2024 telah mencapai 3,27. Sementara itu, Indeks Inovasi Daerah secara umum mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2024, mengalami penurunan dari 48,88 (2023) menjadi 45,04 namun masih pada kategori yang sama, yaitu inovatif.

Tabel 2.61 Perkembangan Indikator Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir

No.	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Inovasi Daerah	Angka	2.502	49.57	46.64	48.88	45,04
2.	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	2,59	-	2,75	2,89	3,27

Sumber: Bappeda Litbang Kabupaten Samosir, 2025

3. Perencanaan Pembangunan

Pelaksanaan pembangunan dimulai dari perencanaan, oleh karena itu, perencanaan pembangunan memegang peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien. Perkembangan indikator perencanaan pembangunan ditunjukkan pada tabel 2.55 di bawah ini. Penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD terus dilakukan setiap tahun dengan Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD hampir setiap tahun sebesar 100 persen, kecuali tahun 2021 dan 2022 dimana terdapat program Dana Alokasi

Khusus dari Pemerintah Pusat yang secara rigid harus diakomodir melalui program/kegiatan/subkegiatan yang sudah diatur oleh peraturan menteri bersangkutan yang tidak ada akomodir dalam RKPD tahun bersangkutan.

Tabel 2.62 Perkembangan Indikator Perencanaan Pembangunan Kabupaten Samosir

No.	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada
2.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	90,76	91,24	100	100

Sumber: Bappeda Litbang Kabupaten Samosir, 2025

4. Keuangan

Pelaksanaan urusan penunjang bidang Keuangan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip *good governance*. Kabupaten Samosir telah meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 9 tahun berturut-turut dengan memperhatikan proporsi belanja pendidikan dan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku, bahkan selalu di atas batasan yang ditetapkan (Tabel 2.62). Penetapan selalu APBD dilaksanakan tepat waktu. Seluruh hasil ini dicapai melalui koordinasi dan komitmen yang kuat dari seluruh aspek Pemerintah Kabupaten Samosir dalam melaksanakan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabilitas, efisien dan efektif.

Tabel 2.63 Perkembangan Indikator Keuangan Kabupaten Samosir

No.	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	27,01	27,25	27,49	25,53	26,1
3.	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	13,17	14,3	13,68	15,77	17,53
4.	Penetapan APBD	kondisi	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu

Sumber: Badan PKPD Kabupaten Samosir, 2025

5. Pengawasan

Dalam pelaksanaan pengawasan, maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Samosir telah berada pada level 3, dengan kategori berkembang. Hal ini berarti bahwa Pemerintah Kabupaten Samosir sedang mengembangkan pengimplementasian pengendalian intern secara efektif dan berkelanjutan (Tabel.2.64).

Tabel 2.64 Perkembangan Indikator Pengawasan Kabupaten Samosir

No.	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Maturitas SPIP	Level	2	2	2	3	3
2.	Kapabilitas APIP	Level	2	2	2	3	3

Sumber: Inspektorat Kabupaten Samosir, 2025

6. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Pelaksanaan urusan penunjang bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan pada Pemerintah Kabupaten Samosir ditujukan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan (*good governance*) dengan memperbaiki cara pemerintahan bekerja dengan lebih efisien, transparan, akuntabel, dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai kondisi ideal ini, dibutuhkan kerja sama berbagai pihak dalam Upaya meningkatkan kinerja yang efektif salah satunya melalui penilaian Indeks Profesionalitas PNS, dimana pada tahun 2024 mencapai 70,41 dengan kategori sedang. Hal ini berarti tingkat profesionalisme ASN di Kabupaten Samosir berada pada tingkat sedang. Sementara itu, Indeks Profesionalitas PPPK pada tahun 2024 adalah 73,11 dengan kategori sedang (Tabel 2.64).

Pemerintah Kabupaten Samosir akan selalu berupaya meningkatkan kapasitas ASN melalui pendidikan dan pelatihan secara berkala untuk mewujudkan ASN yang profesional kemudian akan selalu memastikan kinerja pengawas (Inspektorat) dalam upaya memastikan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Tabel 2.65 Perkembangan Indikator kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Samosir

No.	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Profesionalitas PNS	point	54,19	55,09	56,02	57,07	70,41
2.	Indeks Profesionalitas PPPK	point	Na	Na	Na	Na	73,11

Sumber: Badan KPSPDM Kabupaten Samosir, 2025

Secara lebih rinci, capaian indikator Kinerja Urusan Pemerintah Kabupaten Samosir disajikan pada tabel di 2.67 berikut ini.

Tabel 2.67 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintah Kabupaten Samosir

Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target			Kondisi Akhir Periode RPJMD (2026)	Realisasi					Capaian pada akhir periode (2024)	Tingkat Capaian thd target akhir RPJMD	Ketercapaian
		2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/6*100	15
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT													
Layanan Kesejahteraan Masyarakat													
Kesejahteraan Masyarakat													
Pertumbuhan PDRB	%	5,7	5,8	5,9	6,1	-0,59	2,65	4,48	5,03	5,02	5,02	82,30	tidak tercapai
PDRB per kapita		33,27	34,14	35,02	37,08	33,29	34,53	37,08	40,02	42,64	42,64	114,99	tercapai
Indeks Gini	Angka	0,31	0,31	0,3	0,29	0,318	0,275	0,298	0,251	0,238	0,238	117,93	tercapai
Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	%	87,75	88,15	88,8	90,11	87,52	87,32	88,23	88,34	88,37	88,37	98,07	tidak tercapai
Rasio Kesenjangan Kemiskinan	Rasio	2,05	2,21	2,38	2,78	1,84	2,2	1,63	1,87	0,98	0,98	164,75	tercapai
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	70,68	70,73	70,78	71	71,56	71,75	72,57	72,93	73,77	73,77	103,90	tercapai
Angka melek huruf	%	91,73	91,81	91,89	92,05	91,57		99,33	98,19	97,27	97,27	105,67	tercapai
Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	9,67	9,79	9,91	10,15	9,43	9,44	9,46	9,47	9,61	9,61	94,68	tidak tercapai
Angka harapan hidup	Tahun	71,59	71,75	71,91	72,07	73,31	73,44	73,8	74,1	74,35	74,35	103,16	tercapai
Persentase balita gizi buruk	%	0,19	0,18	0,17	0,16	0,11	0,2	0,08	0,01	0,08	0,08	150,00	tercapai
Prevalensi balita gizi kurang	%	2,3	2,2	2,1	2	2,4	2,4	2,99	0,76	0,33	0,33	183,50	tercapai
Angka partisipasi angkatan kerja	%	66,17	68,51	74,65	80,11	52,17	84,38	83,57	86,89	85,59	85,59	106,84	tercapai
Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	66,17	68,51	74,65	80,11	52,17	84,38	83,57	86,89	85,59	85,59	106,84	tercapai
Tingkat pengangguran terbuka	%	1,18	1,17	1,16	1,14	1,20	0,70	1,16	1,03	0,89	0,89	121,93	tercapai
Rasio penduduk yang bekerja	%	51,7	51,75	51,81	51,85	51,54	51,64	52,71	61,18	59,62	59,62	114,99	tercapai

Gambaran Umum Daerah

Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target			Kondisi Akhir Periode RPJMD (2026)	Realisasi					Capaian pada akhir periode (2024)	Tingkat Capaian thd target akhir RPJMD	Ketercapaian
		2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/6*100	15
Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	%	14	15	17	19	0	0	0	0	0	0	0,00	tidak tercapai
Indeks Kepuasan Masyarakat		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	100,00	tercapai
Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	7,93	8,07	8,45	9,19			8,38	8,06	28	28	304,68	tercapai
Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	100	tercapai
Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	83,5	84	84,5	86	81	82	82,1	83,4	92,85	92,85	107,97	tercapai
Penanganan daerah rawan pangan	Desa	3	3	3	0	2	0	2	0	0	0	0	tidak tercapai
Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB		50,88	50,77	50,66	50,44	50,87	51	51,25	51,68	49,98	49,98	100,91	tercapai
Produksi sektor pertanian	ton	107.047,88	108.118,36	109.199,54	111.394,45	-	-	163.975,76	165.879,04	189.138,89	189.138,89	169,79	tercapai
Produksi Sektor Perkebunan	ton	3.973,34	4.013,07	4.053,20	4.134,67	-	-	3.867,64	3.981,65	4.073,44	4.073,44	98,52	tidak tercapai
Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	%	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,65	0,64	0,63	0,62	0,62	96,88	tidak tercapai
Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri		0,55	0,57	0,59	0,62	0,52	0,51	0,51	0,5	0,49	0,49	79,03	tidak tercapai
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	9,2	9,3	9,4	9,6	10,84	11,03	11,49	11,96	12,55	12,55	130,73	tercapai
Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	%	7	7,1	7,15	7,22	0,52	0,51	0,51	0,5	0,49	0,49	6,79	tidak tercapai
Pertumbuhan Industri	%	14	16	18	20	1,09	1,67	2,61	3,53	4,27	4,27	21,35	tidak tercapai
ASPEK DAYA SAING DAERAH													

Gambaran Umum Daerah

Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target			Kondisi Akhir Periode RPJMD (2026)	Realisasi					Capaian pada akhir periode (2024)	Tingkat Capaian thd target akhir RPJMD	Ketercapaian
		2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/6*100	15
Layanan Daya Saing Daerah													
Daya Saing Daerah													
Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rupiah	534.634	532.670	530.706	524.813	1.094.051	1.124.111	1.243.086	1.252.109	1.486.187	1.486.187	283,18	tercapai
Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%	46,95	48,45	49,95	52,95	40,86	39,31	42,83	39,3	38,94	38,94	73,54	tidak tercapai
Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	%	43,1	43,85	0	36,72	0	0	0	0	0	0	0	tidak tercapai
Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum	Rasio	1,67	1,76	1,85	2,03	0	0	6,14	5,99	5,91	5,91	291,13	tercapai
Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR	Rasio	1,67	1,76	1,85	2,03	0	0	6,14	5,99	5,91	5,91	291,13	tercapai
Angka kriminalitas yang tertangani	Angka	50	52	56	65	0	0	0	0	0	0	0	tidak tercapai
Rasio ketergantungan	%	72	71,74	71,47	70,95		60,68	60,93	58,95	48,16	48,16	67,88	tidak tercapai
ASPEK PELAYANAN UMUM													
Layanan Urusan Wajib Dasar													
Pendidikan													
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)													
Angka Partisipasi Kasar	%	60,03	60,05	60,07	60,1	59,69	60,01	70,28	72,83	94	94	156,41	tercapai
APK SD/MI/Paket A	%					115,93	116,16	116,05	107,76	107,53			
APK SMP/MTs/Paket B	%					101,46	99,47	96,03	92,13	93,39			

Gambaran Umum Daerah

Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target			Kondisi Akhir Periode RPJMD (2026)	Realisasi					Capaian pada akhir periode (2024)	Tingkat Capaian thd target akhir RPJMD	Ketercapaian
		2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/6*100	15
Angka Pendidikan yang ditamatkan	%	90	92	94	98	100	100	100	100	100	100	102,04	tercapai
Angka Partisipasi Murni (APM)	%	60,03	60,05	60,07	60,1	59,69	60,01	72,08	75,76	76,02	76,02	126,49	tercapai
APM SD/MI/Paket A	%	95,19	95,21	95,22	92,25	99,39	99,32	99,86	98,95	86,71	86,71	93,99	tidak tercapai
APM SMP/MTs/Paket B	%	84,46	84,47	84,48	84,52	90,92	91,51	90,69	87,29	84,73	84,73	100,25	tercapai
Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Paket A	%	98,87	98,89	98,9	98,93	98,83	98,85	98,87	98,91	98	98	99,06	tidak tercapai
Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs/Paket B	%	90,36	90,37	90,39	90,43	89,93	90,34	90,39	90,43	90,44	90,44	100,01	tercapai
Angka Putus Sekolah	%	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	100,00	tercapai
Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	100,00	tercapai
Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	100,00	tercapai
Angka Kelulusan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	tercapai
Angka Kelulusan SD/MI		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	tercapai
Angka Kelulusan SMP/MTs	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	tercapai
Angka Melanjutkan (AM)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	tercapai
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	tercapai
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	tercapai
Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	93,11	93,13	93,15	93,18	92,18	93,1	93,33	94	93,4	93,4	100,24	tercapai
Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	94,12	94,16	94,18	94,22	93,18	94,1	94,29	94,25	94,31	94,31	100,10	tercapai

Gambaran Umum Daerah

Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target			Kondisi Akhir Periode RPJMD (2026)	Realisasi					Capaian pada akhir periode (2024)	Tingkat Capaian thd target akhir RPJMD	Ketercapaian
		2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/6*100	15
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar (SD/MI + SMP/MTs)	%	85,57	85,94	85,94	85,94	85,57	85,57	81,29	83,14	81,79	81,79	95,17	tidak tercapai
Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	%	12,83	12,84	12,85	12,88	12,81	12,82	12,6	12,2	12,1	12,1	93,94	tidak tercapai
Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	Rasio	0,03	0,03	0,03	0,03	0,028	0,028	0,03	0,03	0,03	0,03	100,00	tercapai
Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan Sekolah Dasar	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	tercapai
Angka Melek huruf penduduk usia 15-24 tahun perempuan dan laki-laki	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	tercapai
Penduduk yang berusia 15 tahun ke atas melek huruf (tidak buta aksara)	%	98,02	98,24	98,46	98,9			99,33	98,19	97,27	97,27	98,35	tidak tercapai
Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	%	89,92	89,94	89,96	89,9	89,88	89,9	92,62	92,62	93,22	93,22	103,69	tercapai
Kesehatan													
Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 Kelahiran Hidup	17	15	13	11	11,7	11	7,5	10	17	17	45,45	tidak tercapai
Angka kelangsungan hidup bayi	per 1.000 Kelahiran Hidup	984	986	988	1.000,00	999	999	994	998	999	999	99,90	tidak tercapai
Angka Kematian Balita	per 1.000 Kelahiran Hidup	17	15	13	11	12,7	12	7,5	10,6	17	17	45,45	tidak tercapai

Gambaran Umum Daerah

Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target			Kondisi Akhir Periode RPJMD (2026)	Realisasi					Capaian pada akhir periode (2024)	Tingkat Capaian thd target akhir RPJMD	Ketercapaian
		2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/6*100	15
Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	per 1.000 Kelahiran Hidup	10	9	7	6	8,5	10	6	9,4	15	15	-50,00	tidak tercapai
Angka Kematian Ibu	100.000 Kelahiran	142	130	118	106	0	167	174	236	64,1	64,1	139,53	tercapai
Rasio posyandu per satuan balita	Rasio	22,59	22,69	22,79	22,89	17	19,206	24,24	25,03	26,32	26,32	114,98	tercapai
Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk	Rasio	0,95	0,95	0,95	0,95	0,334	0,334	0,9	0,9	0,9	0,9	94,74	tidak tercapai
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Rasio	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00726	0,00726	0,01	0,01	0,01	0,01	100,00	tercapai
Rasio dokter per satuan penduduk	Rasio	0,56	0,56	0,56	0,56		0,4866	0,55	0,46	0,45	0,45	80,36	tidak tercapai
Rasio tenaga medis persatuan penduduk	Rasio	3,83	3,83	3,83	3,83		3,297	3,83	0,52	0,66	0,66	17,23	tidak tercapai
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100	100	100	100	74	100	75	75	53	53	53,00	tidak tercapai
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	100	100	100	100	66,2	99	67	66	49	49	49,00	tidak tercapai
Cakupan Desa UCI (Universal Child Immunization)	%	100	100	100	100	88,1	99	85,5	94,8	80,6	80,6	80,60	tidak tercapai
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	tercapai
Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan	%	17,5	17	16,5	16	na	0	0	0	0	0	0	tidak tercapai

Gambaran Umum Daerah

Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target			Kondisi Akhir Periode RPJMD (2026)	Realisasi					Capaian pada akhir periode (2024)	Tingkat Capaian thd target akhir RPJMD	Ketercapaian
		2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/6*100	15
Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)													
Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	100	100	100	100	97,2	105	102,8	98,8	62,87	62,87	62,87	tidak tercapai
Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Angka	2	2	2	2	0	0	0	0,5	0	0	0,00	tidak tercapai
Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	tercapai
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	70	75	80	85	100	100	100	100	100	100	117,65	tercapai
Tingkat Prevalensi TBC (per 100.000) penduduk	Angka	187	186	185	184	136,7	132,9	176,6	53,2	158,49	158,49	86,14	tidak tercapai
Tingkat Kematian karena TBC (per 100.000) penduduk	Angka	9,5	9	8,5	8	3,5	11,619	6,3	2,96	2,12	2,12	26,50	tidak tercapai
Proporsi jumlah kasus TBC yang terdeteksi dalam program DOTS	%	100	100	100	100	102,5	100	100	100	100	100	100,00	tercapai
Proporsi Kasus TBC yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	92	93	94	95	87,3	62,2	87,2	94,5	87,5	87,5	92,11	tidak tercapai
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	tercapai
Penderita diare yang ditangani	%	85	90	95	100	80,4	82,2	83,77	100	100	100	100,00	tercapai
Angka kejadian Malaria	Angka	1	1	1	0	0	0	0,05	0,04	0,01	0,01	0	tidak tercapai
Tingkat Kematian akibat Malaria	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	tercapai

Gambaran Umum Daerah

Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target			Kondisi Akhir Periode RPJMD (2026)	Realisasi					Capaian pada akhir periode (2024)	Tingkat Capaian thd target akhir RPJMD	Ketercapaian
		2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/6*100	15
Proporsi Anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	%	6,3	6,5	6,7	7	0	0	0	0	0	0	0	tidak tercapai
Proporsi Anak Balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yan tepat	%	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	tidak tercapai
Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	0,02	0,02	0,02	0,02	0,001	0,00435	0,33	0,15	0	0	0	tidak tercapai
Penggunaan Kondom pada hubungan seks beresiko tinggi terakhir	%	85	90	95	100	0	0	0	0	100	100	100,00	tercapai
Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	%	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	tidak tercapai
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	11,2	11,1	11	10,9	0,0174	0,0174	0,42	0	0,02	0,02	0,18	tidak tercapai
Cakupan kunjungan bayi	%	100	100	100	100			79	74	74	74	74,00	tidak tercapai
Cakupan puskesmas	%	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	100,00	tercapai
Cakupan pembantu puskesmas	%	81	81	81	81	31	32	34	0	0,25	0,25	0,31	tidak tercapai
Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	100	100	100	100	52	55	59	58	43	43	43,00	tidak tercapai
Cakupan pelayanan nifas	%	100	100	100	100	61	62	63	66	46	46	46,00	tidak tercapai
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	100	100	100	100	13	15	16	61	19	19	19,00	tidak tercapai

Gambaran Umum Daerah

Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target			Kondisi Akhir Periode RPJMD (2026)	Realisasi					Capaian pada akhir periode (2024)	Tingkat Capaian thd target akhir RPJMD	Ketercapaian
		2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/6*100	15
Cakupan Pelayanan Anak Balita	%	100	100	100	100	72	73	75	57	71	71	71,00	tidak tercapai
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	%	100	100	100	100	84,56	86,12	87,86	99,6	100	100	100,00	tercapai
Cakupan Penjaring kesehatan siswa SD dan setingkat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	tercapai
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	30	31	32	33	6,75	6,93	7,23	0	0,19	0,19	0,58	tidak tercapai
Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)		100	100	100	100	100	100	100	0	100	100	100,00	tercapai
Cakupan Desa/Keluarga mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 Jam	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	tercapai
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang													
Pekerjaan Umum													
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	58,06	62,06	66,06	74	54,06	54,06	56,6	54,02	54,01	54,01	72,99	tidak tercapai
Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Rasio	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	100,00	tercapai
Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	58,06	62,06	66,06	74	54,06	54,87	55,79	58	62,1	62,1	83,92	tidak tercapai

Gambaran Umum Daerah

Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target			Kondisi Akhir Periode RPJMD (2026)	Realisasi					Capaian pada akhir periode (2024)	Tingkat Capaian thd target akhir RPJMD	Ketercapaian
		2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/6*100	15
Persentase Jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5m)	%	0	0	0	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	100,00	tercapai
Persentase Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	tercapai
Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	61	64	67	73	52,27	52,4	52,85	54,68	55	55	75,34	tidak tercapai
Persentase Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	tercapai
Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	50	55	60	70	0	0	0	0	0	0	0,00	tidak tercapai
Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	tercapai
Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	%	50	55	60	70	-	-	-	-	-	-	-	tidak tercapai
Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	60	65	70	80	55	55	56,59	62,55	69,27	69,27	86,59	tidak tercapai
Rasio jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya pertanian	%	0	0	0	0,58	57,61	57,61	0	0	0	0	0,00	tidak tercapai
Persentase penduduk berakses air minum	%	61	64	67	73	55,68	52,39	52,85	54,68	55,84	55,84	76,49	tidak tercapai

Gambaran Umum Daerah

Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target			Kondisi Akhir Periode RPJMD (2026)	Realisasi					Capaian pada akhir periode (2024)	Tingkat Capaian thd target akhir RPJMD	Ketercapaian
		2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/6*100	15
Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan		61	64	67	73	55,68	52,39	52,85	54,68	55,84	55,84	76,49	tidak tercapai
Persentase areal kawasan kumuh	%	20	18	16	12			1,07	0,13	0,13	0,13	1,08	tidak tercapai
Tersedianya Fasilitas pengurangan sampah di perkotaan		1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00	tidak tercapai
Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk		0	0	0	1:130.00 0	0	0	0	0	0	0	0,00	tidak tercapai
Penataan Ruang													
Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	kondisi	tidak	tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	100,00	tercapai
Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	Rasio	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	tercapai
Ruang Publik yang berubah peruntukannya	ada/tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	100,00	tercapai
Ketaatan terhadap RTRW	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	tercapai
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman													
Rasio rumah layak huni	%	85	87	89	93	79,97	82,51	81	81	82,52	82	88,17	tidak tercapai
Rasio permukiman layak huni	Rasio	57	60	63	70	51,87	54,16	98	99	99	99	141,43	tercapai
Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	92	95	97	100	86,67	89	81	81	82	82	82,00	tidak tercapai
Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	16	18	20	25	0	0	0	0	0	0	0,00	tidak tercapai

Gambaran Umum Daerah

Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target			Kondisi Akhir Periode RPJMD (2026)	Realisasi					Capaian pada akhir periode (2024)	Tingkat Capaian thd target akhir RPJMD	Ketercapaian
		2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/6*100	15
Persentase pemukiman yang tertata	%	20	26	32	45	0	0	0	0	0	0	0,00	tidak tercapai
Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	1,62	1,58	1,5	1,42	0	0	1	0	0	0	0,00	tidak tercapai
Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	11	10,5	10	9	0	0	0	0	0	0	0,00	tidak tercapai
Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	%	9,5	9,3	9	8,5	0	0	0	0	0	0	0,00	tidak tercapai
Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	60	62,5	65	70	0	0	0	0	0	0	0,00	tidak tercapai
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat													
Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Orang	128	190	250	350	0	0	0	0	1.513	1.513	432,29	tercapai
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	persen	85	86	87	90	81	83	100	100	100	100	111,11	tercapai
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Titik	38	36	34	32			40	50	70	70	218,75	tercapai
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	persen	70	80	90	100		50	40	42,1	65	65	65,00	tidak tercapai
Persentase Penegakan PERDA	persen	90	90	90	90	90	90	100	100	100	100	111,11	tercapai
Sosial													

Gambaran Umum Daerah

Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target			Kondisi Akhir Periode RPJMD (2026)	Realisasi					Capaian pada akhir periode (2024)	Tingkat Capaian thd target akhir RPJMD	Ketercapaian
		2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/6*100	15
Persentase PMKS yang tertangani	persen	52	54	56	60	100	100	100	100	96,09	96,09	160,15	tercapai
Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	persen	52	54	56	60	100	100	100	100	96,09	96,09	160,15	tercapai
Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	tercapai
Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	persen	22	24	26	30	100	100	100	100	100	100	333,33	tercapai
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	persen	52	54	56	60	100	100	100	100	96,09	96,09	160,15	tercapai
Layanan Urusan Wajib Non Dasar													
Urusan Ketenagakerjaan													
Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Jumlah	35	40	45	50	25	30	237	127	82	82	164,00	tercapai
Keselamatan dan perlindungan	%	50	55	60	65	0	0	0	0	0	0	0	tidak tercapai
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	orang	70	80	90	100	0	0	0	0	100	100	100,00	tercapai
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Jumlah	20	25	30	35	16	16	228	75	160	160	457,14	tercapai

Gambaran Umum Daerah

Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target			Kondisi Akhir Periode RPJMD (2026)	Realisasi					Capaian pada akhir periode (2024)	Tingkat Capaian thd target akhir RPJMD	Ketercapaian
		2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/6*100	15
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Jumlah	25	25	30	35	0	20	0	0	235	235	671,43	tercapai
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Jumlah	25	25	30	35	0	16	272	128	180	180	514,29	tercapai
Rasio lulusan S1/S2/S3	%	14	16	18	25	10	12	16,67	16,06	10,91	10,91	43,64	tidak tercapai
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	100	100	100	100	0	0	100	100	100	100	100,00	tercapai
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak													
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	25	27	30	35	28	28	28	28	28	28	80,00	tidak tercapai
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	persen	16	16	16	16	16	16	16	24	24	24	150,00	tercapai
Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	25	27	30	35	25	25	25	27	27	27	77,14	tidak tercapai
Rasio KDRT	Rasio	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0	0,01	0,01	100,00	tercapai
Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	tercapai
Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	57,87	57,97	58,07	58,27	57,67	57,72	57,87	59,34	59	59	101,25	tercapai

Gambaran Umum Daerah

Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target			Kondisi Akhir Periode RPJMD (2026)	Realisasi					Capaian pada akhir periode (2024)	Tingkat Capaian thd target akhir RPJMD	Ketercapaian
		2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/6*100	15
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	tercapai
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	tercapai
Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	tercapai
Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	tercapai
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	tercapai

Gambaran Umum Daerah

Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target			Kondisi Akhir Periode RPJMD (2026)	Realisasi					Capaian pada akhir periode (2024)	Tingkat Capaian thd target akhir RPJMD	Ketercapaian
		2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/6*100	15
Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	tercapai
Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	tercapai
Rasio APM perempuan/laki-laki di SD		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	tercapai
Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP		1	1	1	1	0,94	1	1	1	1	1	100	tercapai
Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	tercapai
Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian	%	59,18	59,28	59,48	59,88	58,98	50	50	50	50	50	83,50	tidak tercapai
Pangan													
Ketersediaan pangan utama	ton	23.000,00	23.100,00	23.200,00	23.500,00	22.813,00	22.813,00	28.363,67	23.734,38	26.412,94	26.412,94	112,40	tercapai
Ketersediaan energi perkapita	Kkal/kap/hari	3.144,00	3.159,72	3.175,79	3.217,51	3.129,00	3.129,00	3.135,00	3.194,00	3.244,68	3.244,68	100,84	tercapai
Ketersediaan protein perkapita	Gr/kap/hari	89,7	90,14	90,59	91,49	89,26	89,26	83,92	73,59	81,3	81,3	88,86	tidak tercapai
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	sampel	3	5	5	5	3	3	5	5	6	6	120,00	tercapai
Pertanahan													

Gambaran Umum Daerah

Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target			Kondisi Akhir Periode RPJMD (2026)	Realisasi					Capaian pada akhir periode (2024)	Tingkat Capaian thd target akhir RPJMD	Ketercapaian
		2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/6*100	15
Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	tercapai
Persentase penyelesaian sengketa tanah yang terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	tercapai
Lingkungan Hidup													
Tersedianya dokumen RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	100	tercapai
Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan Kabupaten/Kota	Dokumen	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	100	tercapai
Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	1	1	1	0	1	0	1	1	2	200,00	tercapai
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	Indeks	53,81	53,91	54,01	55,01	51,82	51,82	56,36	58,18	53,64	53,64	97,51	tidak tercapai
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	Indeks	89,5	89,61	89,71	89,91	91,68	91,68	91,13	92,23	93,9	93,9	104,44	tercapai
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	55,33	56,42	57,5	56,42	54,23	54,23	54,23	57,67	58,17	58,17	103,10	tercapai
Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	usaha	60	65	70	80	55	55	45	62	84	84	105,00	tercapai

Gambaran Umum Daerah

Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target			Kondisi Akhir Periode RPJMD (2026)	Realisasi					Capaian pada akhir periode (2024)	Tingkat Capaian thd target akhir RPJMD	Ketercapaian
		2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/6*100	15
Peningkatan Kapasitas dan sarana prasarana pejabat pengawas lingkungan hidup di daerah (PPLHD) di Kab/Kota	Orang	2	1	1	1	0	0	2	0	2	2	200,00	tercapai
Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA		ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	100	tercapai
Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional		ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	100	tercapai
Terverifikasinya hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional		ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	100	tercapai
Penetapan Hak MHA		ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	100	tercapai
Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan		ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	100	tercapai
Terfasilitasi Penyediaan sarana/prasarana		ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	100	tercapai
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	sekolah	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	tidak tercapai
Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup		0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	tidak tercapai
Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	usaha	3	3	3	3	0	0	0	0	3	3	100,00	tercapai

Gambaran Umum Daerah

Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target			Kondisi Akhir Periode RPJMD (2026)	Realisasi					Capaian pada akhir periode (2024)	Tingkat Capaian thd target akhir RPJMD	Ketercapaian
		2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/6*100	15
Timbulan sampah yang ditangani	ton	14.000,00	16.000,00	20.000,00	23.000,00	0	12500	16.500,00	22.624,00	12.866,00	12.866,00	55,94	tidak tercapai
Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%	26	27	28	35	22	24	12	4	10	10	28,57	tidak tercapai
Persentase cakupan area pelayanan	kecamatan	7	7	7	7		7	7	7	7	7	100,00	tercapai
Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	60	62	65	70		54	50	56	57	57	81,43	tidak tercapai
Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	tempat	0	2	2	2	0	0	1	1	1	1	50,00	tidak tercapai
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil													
Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP	%	100	100	100	100	100	100	97,38	98,89	99,42	99,42	99,42	tidak tercapai
Rasio bayi berakte kelahiran	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	tercapai
Rasio pasangan berakte nikah	%	100	100	100	100	100	100	65,85	70,17	71,65	71,65	71,65	tidak tercapai
Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	100,00	tercapai
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah/be lum	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	100,00	tercapai
Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)		99.119,00	102.395,00	105.588,00	111.976,00	93153	95807	95.367,00	99.728,00	103.413,00	103.413,00	92,35	tidak tercapai
Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	100	100	100	100	100	100	95,87	98,23	98,52	98,52	98,52	tidak tercapai

Gambaran Umum Daerah

Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target			Kondisi Akhir Periode RPJMD (2026)	Realisasi					Capaian pada akhir periode (2024)	Tingkat Capaian thd target akhir RPJMD	Ketercapaian
		2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/6*100	15
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa													
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	78,91	83,59	88,28	100	100	100	100	100	100	100	100,00	tercapai
Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Kelompok	25	50	75	128	0	0	0	128	128	128	100,00	tercapai
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK		134	134	134	134	128	128	128	128	128	128	95,52	tidak tercapai
Persentase LPM Berprestasi	%	0	12	18	27	0	0	0	0	0	0	0,00	tidak tercapai
Persentase PKK aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	tercapai
Persentase Posyandu aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	tercapai
Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	tercapai
Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	tercapai
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana													
Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,81	0,81	0,81	0,81	1,28	1,23	1,3	1,29	1,27	1,27	156,79	tercapai
Total Fertility Rate (TFR)	Angka	3,2	2,9	2,7	2,3	2,1	2,1	2,1	2,1	2,7	2,7	117,39	tercapai
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	41	48	56	56	0	41	13	13	13	13	23,21	tidak tercapai

Gambaran Umum Daerah

Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target			Kondisi Akhir Periode RPJMD (2026)	Realisasi					Capaian pada akhir periode (2024)	Tingkat Capaian thd target akhir RPJMD	Ketercapaian
		2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/6*100	15
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	17	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	tidak tercapai
Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Kebijakan	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	100,00	tercapai
Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	sektor	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	100,00	tercapai
Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	kerjasama	9	10	12	10	9	9	0	12	12	12	120,00	tercapai
Rata-rata jumlah anak per keluarga	anak	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	75,00	tidak tercapai
Ratio Akseptor KB	%	69	69	70	70	70	70	65	65	65	65	92,86	tidak tercapai
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi	%	64	64	64	65	64	64	64	61	61	61	93,85	tidak tercapai

Gambaran Umum Daerah

Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target			Kondisi Akhir Periode RPJMD (2026)	Realisasi					Capaian pada akhir periode (2024)	Tingkat Capaian thd target akhir RPJMD	Ketercapaian
		2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/6*100	15
perempuan menikah usia 15 – 49													
Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR15-19)	Angka	4,4	4,4	4,3	4,2	4,8	4,5	4,4	4,4	4,4	4,4	104,76	tercapai
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	4,4	4,4	4,3	4,2	4,8	4,5	4,4	4,4	4,4	4,4	104,76	tercapai
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	15	15	13	12	10	10	17	17	17	17	141,67	tercapai
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	51	52	53	53	55	55	48	48	48	48	90,57	tidak tercapai
Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	70	70	70	70	70	70	65	65	65	65	92,86	tidak tercapai
Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	60	62	64	65	55	55	60	70	70	70	107,69	tercapai
Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	60	62	64	65	55	55	60	70	70	70	107,69	tercapai
Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	60	62	64	65	55	55	60	30	30	30	46,15	tidak tercapai
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Unit	1	1	1	1	0	0	0	5	1	1	100,00	tercapai
Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	tercapai

Gambaran Umum Daerah

Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target			Kondisi Akhir Periode RPJMD (2026)	Realisasi					Capaian pada akhir periode (2024)	Tingkat Capaian thd target akhir RPJMD	Ketercapaian
		2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/6*100	15
Konseling Remaja/Mahasiswa													
Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	tercapai
Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber- KB mandiri	%	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	100,00	tercapai
Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	tercapai
Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	tercapai
Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	tercapai
Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	%	50	50	50	50	40	50	50	100	50	50	100,00	tercapai

Gambaran Umum Daerah

Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target			Kondisi Akhir Periode RPJMD (2026)	Realisasi					Capaian pada akhir periode (2024)	Tingkat Capaian thd target akhir RPJMD	Ketercapaian
		2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/6*100	15
Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	tercapai
Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	100	100	100	100	0	90	100	100	100	100	100,00	tercapai
Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	62	63	64	65	60	65	62	65	65	65	100,00	tercapai
Rata-rata usia kawin pertama wanita	Tahun	21	21	21	21	21	21	29,96	21	21	21	100,00	tercapai
Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	%	10	10	10	10	0,7	10	10	0	0	0	0	tidak tercapai
Perhubungan													
Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	1	1	150	200	0	0	0	19	41	41	20,50	tidak tercapai
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	46	47	48	50	47	47	47	45	45	45	90,00	tidak tercapai
Persentase layanan angkutan darat	%	0,05	0,05	262,9	262,9	59,96	66,63	123,29	156,27	428,61	428,61	163,03	tercapai
Persentase Pemasangan Rambu-rambu	%	68,55	71,67	74,78	80	55,83	55,83	55,83	55,83	55,83	55,83	69,79	tidak tercapai
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	19,24	20,15	21,09	22,9	21,69	24,1	26,32	26,69	29,64	29,64	129,43	tercapai

Gambaran Umum Daerah

Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target			Kondisi Akhir Periode RPJMD (2026)	Realisasi					Capaian pada akhir periode (2024)	Tingkat Capaian thd target akhir RPJMD	Ketercapaian
		2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/6*100	15
Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	Orang	37.926,00	39.732,00	41.538,00	45.150,00	15.055	16.728	19.480	42.477	50.745	50.745	112,39	tercapai
Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	Orang	256.846,00	282.530,00	310.783,00	376.048,00	15.055	16.728	19.480	42.477	50.745	50.745	13,49	tidak tercapai
Komunikasi dan Informatika													
Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	91,83	94,25	96,67	100	na	0	0	0	85,8	85,8	85,80	tidak tercapai
Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	92,65	93	93,36	94,07	71,35	0	0	0	74	74	78,66	tidak tercapai
Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	87,29	91,26	95,23	100	na	0	0	0	3,62	3,62	3,62	tidak tercapai
Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	9,92	10,32	10,91	12,3	na	na	na	na	na	0	0	tidak tercapai
Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	%	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	tidak tercapai
Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah													
Persentase koperasi aktif	%	85	87	88	90	28	36	100	100	100	100	111,11	tercapai
Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	4,7	6	7	8	0	0	100	100	100	100	100,00	tercapai
Penanaman Modal													
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Pelaku Usaha	686	701	716	761	597	676	895	904	930	930	122,21	tercapai

Gambaran Umum Daerah

Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target			Kondisi Akhir Periode RPJMD (2026)	Realisasi					Capaian pada akhir periode (2024)	Tingkat Capaian thd target akhir RPJMD	Ketercapaian
		2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/6*100	15
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	1.250,00	1.318,00	1.391,00	1.570,00	1.136,67	1.190,50	1.251,00	1.584,00	1.671,00	1.671,00	106,43	tercapai
Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	%	5	5,5	5,5	6,5	7,17	4,74	5,16	26,54	5,52	5,52	84,92	tidak tercapai
Kepemudaan dan Olah Raga													
Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	80	82	85	90			7,66	7,91	8,22	8,22	9,13	tidak tercapai
Persentase wirausaha muda	Kelompok	188	208	228	268	168		80	161	245	245	91,42	tidak tercapai
Cakupan pembinaan olahraga	%	79	83	88	96	95	75	34,3	37,4	46,67	46,67	48,61	tidak tercapai
Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	50	63	76	100	37	37	15	16	17	17	17,00	tidak tercapai
Cakupan pembinaan atlet muda	%	28	30	32	36	26,03	26,26	29	32	40	40	111,11	tercapai
Jumlah atlet berprestasi	atlet	2	2	3	7	0	2	2	2	2	2	28,57	tidak tercapai
Jumlah prestasi olahraga	Cabang Olahraga	2	4	5	7	0	0	2	2	3	3	42,86	tidak tercapai
Statistik													
Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	100	tercapai
Buku "kabupaten dalam angka"	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	100	tercapai
Buku "PDRB"	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	100	tercapai
Persandian													

Gambaran Umum Daerah

Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target			Kondisi Akhir Periode RPJMD (2026)	Realisasi					Capaian pada akhir periode (2024)	Tingkat Capaian thd target akhir RPJMD	Ketercapaian
		2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/6*100	15
Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	tercapai
Kebudayaan													
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kegiatan	3	5	5	5	5	4	4	4	10	10	200,00	tercapai
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	16,3	17,8	19,3	22,3	14,3	14,8	19,23	25,37	27,93	27,93	125,25	tercapai
Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Jumlah	5	5	5	5	0	5	6	5	2	2	40,00	tidak tercapai
Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Jumlah	2	2	2	2	25	0	0	59	16	16	800,00	tercapai
Perpustakaan													
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	pengunju ng	0,08	0,09	0,1	0,1	0,7	0,7	0,09	0,09	0,1	0,1	100,00	tercapai
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Angka	0,3	0,34	0,38	1,47	0,42	0,03	0,44	0,44	0,5	0,5	34,01	tidak tercapai
Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Angka	2,83	2,98	3,13	14,92	2,52	2,67	2,66	2,66	2,66	2,66	17,83	tidak tercapai
Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	pengunju ng	8.569	9.452	10.367	47.581	7.082	7.790	12.862	13.200	13.827	13.827	29,06	tidak tercapai
Jumlah koleksi judul buku perpustakaan		4.340	5.040	5.840	25.700	3.240	3.740	4.020	3.906	4.614	4.614	17,95	tidak tercapai
Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang	3	5	7	25	0	0	0	0	0	0	0	tidak tercapai

Gambaran Umum Daerah

Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target			Kondisi Akhir Periode RPJMD (2026)	Realisasi					Capaian pada akhir periode (2024)	Tingkat Capaian thd target akhir RPJMD	Ketercapaian
		2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/6*100	15
Kearsipan													
Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	0,5	0,7	1,7	3,1	0	0	75	75	75	75	2419,35	tercapai
Peningkatan SDM pengelola kearsipan		20	20	20	94	40	20	1	1	1	1	1,06	tidak tercapai
Layanan Urusan Pilihan													
Pariwisata													
Kunjungan wisata	kunjungan	100	100	100	100	101	100	122,98	122,38	209,07	209,07	209,07	tercapai
Lama kunjungan Wisata	Hari	1,32	1,4	2	2	1,32	1,32	1,32	1,4	1,4	1,4	70,00	tidak tercapai
Nilai PAD sektor pariwisata	Rupiah	3.500.000. 000	5.544.000. 000	10.523.520 .000	17.398.0 80.000	-	-	1.647.0 71.000	1.361.7 27.000	5.256.6 39.772	5.256.63 9.772	30,21	tidak tercapai
Pertanian													
Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	50,88	50,77	50,66	50,44	50,87	50,97	51,25	51,08	49,98	49,98	99,09	tidak tercapai
Cakupan bina kelompok petani	%	8,4	10,9	13,4	18,4	5,9	6,1	10	15	30	30	163,04	tercapai
Kehutanan													
Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Ha	10	10	10	50			10	3	65,92	78,92	157,84	tercapai
Kerusakan Kawasan Hutan		tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	100	tercapai
Rasio Luas Kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan		tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	100	tercapai

Gambaran Umum Daerah

Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target			Kondisi Akhir Periode RPJMD (2026)	Realisasi					Capaian pada akhir periode (2024)	Tingkat Capaian thd target akhir RPJMD	Ketercapaian
		2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/6*100	15
Energi dan Sumber Daya Mineral													
Persentase rumah tangga pengguna listrik	%	98,2	98,4	98,6	99	-	-	-	-	-	-	-	tidak tercapai
Rasio ketersediaan daya listrik	%	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	tidak tercapai
Persentase pertambangan tanpa izin	%	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	tidak tercapai
Perdagangan													
Ekspor Bersih Perdagangan	%	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	tidak tercapai
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	Kelompok	5	6	7	9	0	0	1	1	1	1	11,11	tidak tercapai
Perindustrian													
Cakupan bina kelompok pengrajin	Kelompok	5	6	7	9	1	1	0	0	5	5	55,56	tidak tercapai
Transmigrasi													
Persentase Transmigran Swakarsa	%	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	
Kelautan dan Perikanan													
Produksi perikanan	%	74	75	75	75	88	88	89,38	112,95	100,1	100,1	133,47	tercapai
Konsumsi ikan		0	0	0	0	0	0	0	0	57,58	57,58	100,00	tercapai
Cakupan bina kelompok nelayan	%	23	29	34	40		17	25	30	8	8	20,00	tidak tercapai
Produksi perikanan kelompok nelayan	%	89	90	91	93	87	88	100	100,03	100,05	100,05	107,58	tercapai

Gambaran Umum Daerah

Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target			Kondisi Akhir Periode RPJMD (2026)	Realisasi					Capaian pada akhir periode (2024)	Tingkat Capaian thd target akhir RPJMD	Ketercapaian
		2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/6*100	15
Proporsi Tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	tercapai
Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	%	0,04	0,04	0	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	50,00	tidak tercapai
Penunjang Urusan													
Perencanaan Pembangunan													
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	100	tercapai
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	100	tercapai
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	100	tercapai
Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	100	tercapai
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada		ada	ada	100	tercapai
Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	90	92	94	98	100	90,76	91,24	100	100	100	102,04	tercapai

Gambaran Umum Daerah

Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target			Kondisi Akhir Periode RPJMD (2026)	Realisasi					Capaian pada akhir periode (2024)	Tingkat Capaian thd target akhir RPJMD	Ketercapaian
		2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/6*100	15
Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	90	92	94	98	100	100	100	100	100	100	102,04	tercapai
Keuangan													
Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	tercapai
Persentase SILPA terhadap APBD	%	3,5	3	2,5	1,5	4,53	3,9	8,74	6,59	4,32	4,32	0,00	tidak tercapai
Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	tercapai
Persentase belanja pendidikan (20%)	%	27,48	27,72	27,96	28,43	27,01	27,25	27,49	25,53	26,1	26,1	91,80	tidak tercapai
Persentase belanja kesehatan (10%)	%	15,43	16,55	17,68	19,94	13,17	14,3	13,68	15,77	17,53	17,53	87,91	tidak tercapai
Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	%	66,08	67,91	69,74	82,52								
Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	2.773.002. 986	2.773.002. 986	2.773.002. 986	2.773.00 2.986	1.466.0 91.155	2.773.0 02.986	4.064.7 29.247	3.642.9 95.304	3.923.3 78.000	3.923.37 8.000	141,48	tercapai
Penetapan APBD		tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	100	tercapai
Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan													
Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	%	5	5	5	25	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,08	tidak tercapai
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	6,5	6,25	5,26	7,14	0,11	0,11	0,06	0,36	0,23	0,23	3,22	tidak tercapai

Gambaran Umum Daerah

Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target			Kondisi Akhir Periode RPJMD (2026)	Realisasi					Capaian pada akhir periode (2024)	Tingkat Capaian thd target akhir RPJMD	Ketercapaian
		2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/6*100	15
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	0,91	7,29	7,29	7,29	0	0	0	0	0	0	0,00	tidak tercapai
Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	33	33	33	33	28	28	28	28	26	26	78,79	tidak tercapai
Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Orang	279	120	120	120	259	263	234	119	941	941	784,17	tercapai
Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	2.150,00	2.200	2.250	2.400	2.365	2.456	1.857	1.329	1.799	1.799	74,96	tidak tercapai
Penelitian dan pengembangan													
Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	50	53	60	65	43	45	60	55,56	63	63	96,92	tidak tercapai
Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	50	55	57	65	47	50	60	55,56	63	63	96,92	tidak tercapai
Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	tercapai
Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	tercapai
Pengawasan													
Persentase tindak lanjut temuan	%	75	80	85	92	75	75	75	75	70	70	76,09	tidak tercapai
Persentase pelanggaran pegawai	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	tidak tercapai
Jumlah temuan BPK	%	91,29	92,5	92,6	93	92,26	93,18	95	88,46	65	65	69,89	tidak tercapai

Gambaran Umum Daerah

Aspek/Fokus/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target			Kondisi Akhir Periode RPJMD (2026)	Realisasi					Capaian pada akhir periode (2024)	Tingkat Capaian thd target akhir RPJMD	Ketercapaian
		2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/6*100	15
Sekretariat Dewan													
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	100	tercapai
Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	100	tercapai
Terintegrasi Rrogram-Program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	100	tercapai

2.2 Gambaran Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Pengelolaan keuangan yang baik adalah kunci untuk mewujudkan otonomi daerah yang efektif dan efisien. Setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut prinsip otonomi.

Keuangan daerah merupakan segala hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dalam bentuk uang yang dipergunakan untuk menjalankan pemerintahan daerah. Aspek keuangan daerah menjadi aspek yang sangat penting dalam rangka memastikan penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dapat terlaksana sebagai mestinya. Oleh karena itu keuangan daerah digunakan untuk kepentingan masyarakat, dan pengelolaannya harus dilakukan secara transparan, akuntabel, efisien, dan efektif. Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam berbagai peraturan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah meliputi kegiatan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan keuangan daerah. Tujuan dari pengelolaan keuangan daerah adalah agar kekayaan yang dimiliki daerah dapat digunakan dengan efektif dan efisien, serta untuk mendistribusikan sumber daya yang dimiliki daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Analisis keuangan daerah diperlukan untuk memberi gambaran terkait dengan kapasitas kemampuan daerah dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan daerah. Analisis keuangan daerah dimulai dengan melakukan evaluasi terhadap kinerja anggaran dan pendapatan daerah di masa lalu. Evaluasi tersebut bertujuan untuk mengungkapkan sejauh mana anggaran yang telah dipersiapkan tersebut dijalankan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dengan memperoleh gambaran realisasi keuangan daerah di masa lalu, pemerintah Kabupaten Samosir dapat menyusun perencanaan pembangunan daerah yang lebih baik dengan berpedoman kepada kapasitas pendanaan program pembangunan daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu dilakukan dengan prinsip transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Aspek keuangan daerah juga perlu dilaksanakan berdasarkan prinsip tersebut. Gambaran keuangan Kabupaten Samosir memberikan uraian terhadap penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten yang dilakukan dengan prinsip transparan dan akuntabel kepada publik. Gambaran keuangan daerah akan menguraikan capaian kinerja pelaksanaan keuangan daerah sekurang-kurangnya lima tahun sebelum dokumen perencanaan ini disusun.

Dalam upaya memahami kemampuan keuangan daerah Kabupaten Samosir, uraian pada bab ini akan memberikan gambaran keseluruhan keuangan daerah melalui keadaan kinerja keuangannya, baik kinerja keuangan masa lalunya maupun kebijakannya sebagai dasar pengelolaan daerah tersebut. Berdasarkan kondisi kinerja keuangan tersebut, dimungkinkan untuk memprediksi besaran pendapatan daerah, belanja daerah dan keuangan daerah sehingga dapat menjadi kerangka keuangan di masa yang akan datang. Sistematika pada bab keuangan daerah disusun dengan mengevaluasi kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, gambaran umum neraca keuangan daerah serta kerangka pendanaan yang menggambarkan proyeksi pendapatan dan belanja daerah selama periode perencanaan dalam RPJMD dilaksanakan.

Kinerja Keuangan Masa Lalu

Gambaran keuangan daerah dimulai dengan melakukan evaluasi terhadap kinerja keuangan daerah pada masa lalu. Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui gambaran dan kondisi keuangan daerah Kabupaten Samosir yang telah berlalu sehingga diperoleh rata-rata pertumbuhan serta penyerapan APBD dalam penyelenggaraan pemerintahan periode sebelumnya. Gambaran ini akan memberikan landasan yang kuat bagi pemerintah daerah untuk menyusun proyeksi serta kemampuan keuangan daerah selama periode perencanaan RPJMD. Analisis kinerja keuangan masa lalu meliputi evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan APBD yang meliputi pendapatan, belanja serta pembiayaan daerah. Uraian berikut memberikan gambaran umum terkait dengan kinerja pelaksanaan APBD masa lalu Pemerintah Kabupaten Samosir yang akan menjadi dasar untuk memproyeksikan kemampuan keuangan daerah selama periode RPJMD lima tahun ke depan.

Kinerja Pelaksanaan APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya disusun bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia agar tepat sasaran sesuai kebijakan pemerintah. Realisasi anggaran mencerminkan salah satu indikator kinerja pengelolaan keuangan yang baik, realisasi sektor pendapatan mutlak sangat strategis mengingat realisasi pendapatan inilah yang akan membiayai belanja daerah selama satu tahun. Tidak terealisasinya pendapatan daerah akan mengakibatkan Pemerintah Daerah tidak dapat membiayai belanja daerah yang telah direncanakan.

Evaluasi kinerja APBD dilakukan untuk menilai dan memperoleh gambaran pengelolaan keuangan daerah tentang sejauh mana realisasi anggaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan pada penyelenggaraan pemerintahan. Evaluasi kinerja APBD mencakup berbagai aspek, mulai dari penilaian terhadap pendapatan daerah, efisiensi belanja, hingga kebijakan pembiayaan daerah yang telah dilakukan selama periode sebelumnya.

Penilaian pendapatan daerah dilakukan dengan menilai sejauh mana realisasi pendapatan daerah sesuai dengan target yang ditetapkan. Analisis ini meliputi sumber-sumber pendapatan seperti PAD, dana perimbangan, dan lain-lain. Penilaian ini penting untuk mengidentifikasi potensi dan kendala dalam pengelolaan pendapatan daerah. Dalam hal ini pemerintah mempublikasikan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan daerah untuk mendukung program-program pembangunan daerah. Analisis ini juga berkaitan dengan tingkat kemandirian daerah dalam pengelolaan daerah secara otonomi.

Dari sisi belanja daerah, serapan anggaran mencerminkan bagaimana terserapnya manfaat oleh masyarakat pada kurun waktu satu tahun anggaran yang juga akan mendorong *multiplier effect* terhadap pertumbuhan ekonomi. Analisis belanja akan mengevaluasi struktur pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja daerah. Hal ini akan membantu dalam mengidentifikasi dan memberikan transparansi terkait dengan penggunaan anggaran Kabupaten Samosir selama menyelenggarakan program pembangunan pemerintah. Kondisi ini juga akan menjadi dasar dalam memproyeksikan rencana belanja daerah serta

struktur belanja daerah berdasarkan kinerja masa lalu.

Analisis terhadap pembiayaan daerah berupaya untuk menunjukkan bagaimana kondisi keuangan, seperti defisit anggaran dapat ditutupi atau tidak dalam satu tahun anggaran. Analisis pembiayaan daerah memberikan peluang bagi daerah dalam menilai potensi penerimaan pendapatan daerah tambahan sebagai unsur dari kapasitas riil keuangan daerah. Di sisi lain, pembiayaan daerah juga menunjukkan kewajiban-kewajiban daerah yang perlu dikeluarkan dari APBD untuk kegiatan pembiayaan lainnya.

Dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Samosir disusun dengan mengevaluasi kinerja keuangan daerah selama periode 2020 sampai dengan 2024. Evaluasi dilakukan dengan prinsip transparansi dan penuh tanggung jawab.

Kinerja Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan komponen utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menentukan kapasitas keuangan Pemerintah Daerah untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan pembangunan serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Analisis pendapatan daerah mencerminkan kemampuan daerah dalam mengumpulkan sumber-sumber keuangan yang dibutuhkan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan. Pemerintah perlu mengevaluasi kinerja pendapatan daerah untuk mengidentifikasi upaya dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah tanpa memberikan beban besar kepada masyarakat.

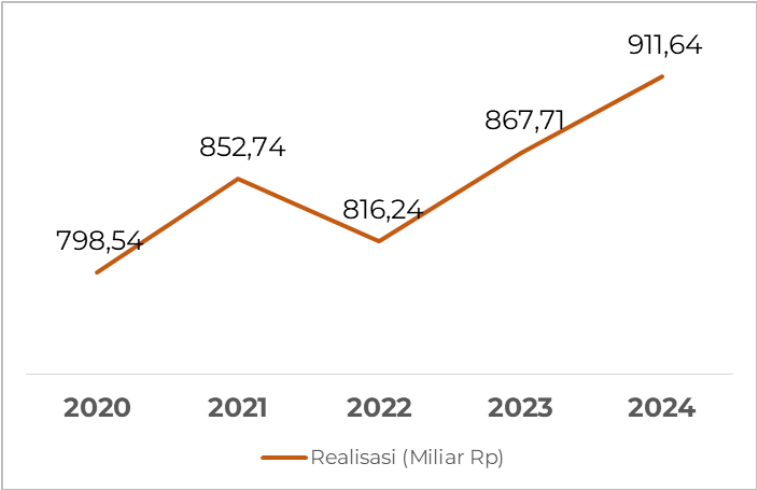
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur tentang pendapatan daerah. Pendapatan daerah didefinisikan sebagai semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Evaluasi kinerja APBD melalui pendapatan daerah dilakukan dengan mengevaluasi perkembangan target dan realisasi pendapatan daerah di masa lalu. Selain itu evaluasi kinerja berdasarkan pendapatan

daerah juga dilakukan dengan mengevaluasi struktur pendapatan daerah sehingga diperoleh gambaran tentang perkembangan pendapatan daerah, meliputi kemandirian daerah dalam menghasilkan pendapatan dan membiayai program-programnya serta ketergantungan daerah pada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya. Berikut merupakan gambaran perkembangan target dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Samosir tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tabel 2.67 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Samosir

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Realisasi (%)	Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6
2	2020	820.098.780.819,00	798.541.589.906,91	97,37	-
3	2021	879.645.686.223,00	852.740.359.764,27	96,94	6,79
4	2022	855.697.291.382,00	816.236.991.476,38	95,39	-4,28
5	2023	898.067.490.574,00	867.713.818.465,45	96,62	6,31
6	2024	927.767.529.252,00	911.637.915.808,07	98,3	5,06
Rata-rata				96,92	3,47

Sumber: BPKPD Kabupaten Samosir, 2025



Gambar 2.19
Realisasi Pendapatan
Kabupaten Samosir

Sumber: BPKAD Kabupaten Samosir, 2025

Kinerja realisasi pendapatan daerah Kabupaten Samosir selama periode 2020-2024 menunjukkan kinerja capaian yang sangat baik dengan pencapaian realisasi di atas 95% dari target pendapatan setiap tahunnya (Tabel 2.60) dan menunjukkan tren peningkatan (Gambar 2.19). Rata-rata kinerja pencapaian realisasi pendapatan terhadap targetnya mencapai 96,92% selama lima tahun terakhir. Dan pertumbuhan realisasi pendapatan per tahun juga menunjukkan tren positif, kecuali tahun 2022, dimana terjadi penurunan sebesar 4,28 persen. Penurunan ini disebabkan

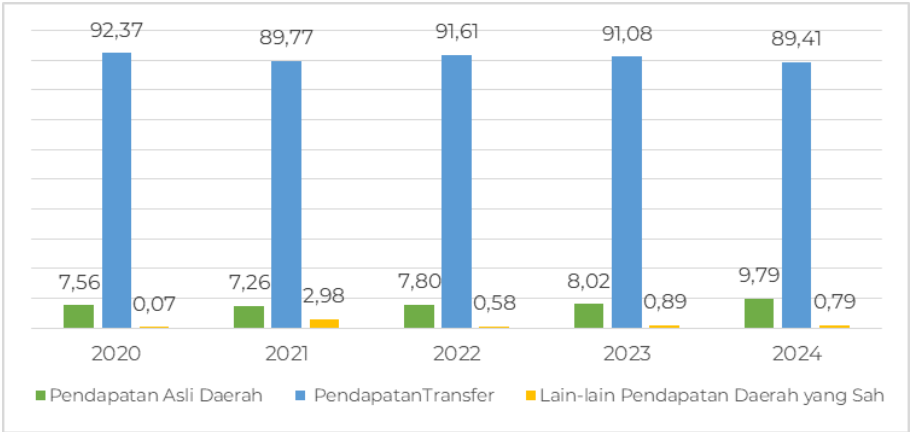
oleh penurunan jumlah Dana Insentif Daerah yang diterima oleh Kabupaten Samosir. Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan Kabupaten Samosir adalah 3,47 persen.

Tabel 2.68 Perkembangan Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir
(dalam miliar rupiah)

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pendapatan Asli Daerah	60,37	61,87	63,70	69,63	89,28	10,74
2	PendapatanTransfer	737,61	765,49	747,77	790,34	815,14	2,57
3	Lain - lain Pendapatan daerah yang Sah	0,56	25,38	4,77	7,75	7,22	1097,15
	JUMLAH	798,54	852,74	816,24	867,71	911,64	3,47

Sumber: BPKPD Kabupaten Samosir, 2025

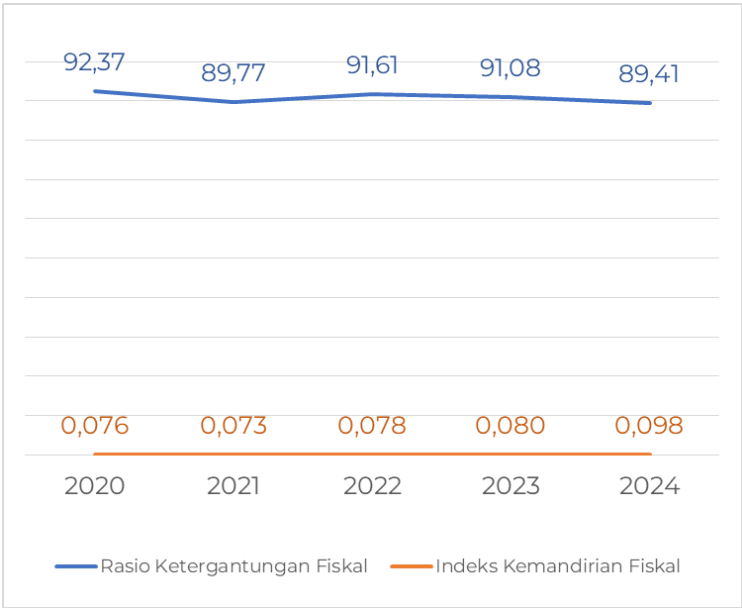
Secara umum, realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir setiap tahunnya terus meningkat. Namun jika dilihat dari proporsi komponen pendapatan daerah, pendapatan transfer merupakan kontributor paling dominan diantara komponen lainnya dengan tren perlahan menurun (Gambar 2.20). Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi kontributor terbesar kedua dengan tren perlahan meningkat, namun tidak lebih dari 10 persen selama 5 tahun terakhir. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan yang cukup signifikan pada pajak dan retribusi kepariwisataan yang melonjak cukup tajam yang menunjukkan sektor pariwisata Kabupaten Samosir sedang menggeliat. Selanjutnya, Lain-lain pendapatan daerah yang sah hanya menyumbang tidak lebih dari 1 persen dari total pendapatan daerah dan merupakan kontributor terkecil dalam pembentukan pendapatan daerah.



Gambar 2.20
Proporsi Realisasi
Komponen
Pendapatan
Daerah
Kabupaten
Samosir

Sumber: BPKPD Kabupaten Samosir, 2025

Dengan perkembangan komponen pendapatan daerah di atas, Indeks Kemandirian Fiskal Kabupaten Samosir yang menunjukkan kemampuan daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahannya dengan menggunakan Pendapatan yang dihasilkan oleh daerah itu sendiri, masih berada pada kategori Belum Mandiri (Gambar 2.21), dengan IKF 0,098 pada tahun 2024, masih jauh dari kategori Mandiri ($0,50 \leq \text{IKF} \leq 0,75$). Tren peningkatan terlihat, namun masih sangat kecil. Seiring dengan itu, Rasio Kemandirian Fiskal Kabupaten Samosir terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah atasan sangat tinggi. Terdapat tren penurunan namun sangat landai/lambat. Dalam 5 tahun terakhir, berkurang sebesar 2,95 persen. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus dan inovasi dalam upaya peningkatan potensi PAD baru maupun pengoptimalisasian potensi PAD yang sudah ada agar pembiayaan pembangunan Kabupaten Samosir meningkat dan Samosir semakin mandiri secara fiskal serta ketergantungan fiskal Samosir semakin menurun dengan tajam.



Gambar 2.21
Rasio Ketergantungan Fiskal dan Indeks Kemandirian Fiskal Kabupaten Samosir

Keterangan:

- $0 \leq \text{IKF} < 0,25$: Belum Mandiri.
- $0,25 \leq \text{IKF} < 0,50$: Menuju Mandiri.
- $0,50 \leq \text{IKF} < 0,75$: Mandiri.
- $0,75 \leq \text{IKF} \leq 1$: Sangat Mandiri.

Sumber: BPKPD Kabupaten Samosir, 2025

Kinerja Belanja Daerah

Pemerintah Kabupaten Samosir menggunakan pendapatan daerah untuk membiayai belanja daerah dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Samosir. Pengelolaan belanja daerah merupakan bagian dari pelaksanaan program pembangunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang akan

ditetapkan untuk pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Samosir periode pertama atau RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2025 - 2029. Kebijakan pengelolaan belanja daerah yang dilakukan di Kabupaten Samosir berbasis pada kinerja dengan orientasi pada pencapaian hasil, dan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta revisinya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 serta keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi dasar dalam penyusunan APBD Kabupaten Samosir dan penyelenggaraan belanja daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menjelaskan bahwa belanja daerah diklasifikasikan menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Sedangkan belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

Pemerintah juga mempersiapkan anggaran belanja tidak terduga yang merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi dalam perencanaan pembangunan sebelumnya. Belanja transfer menjadi pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Dalam upaya memperoleh gambaran kinerja keuangan daerah masa lalu, analisis belanja daerah dilakukan dengan tujuan memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan selama kurun waktu periode 2020 – 2024 yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan rencana Belanja Daerah di masa perencanaan RPJMD 2025 – 2029 dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan daerah. Target dan Realisasi belanja daerah di Kabupaten Samosir periode 2020 – 2024 dirangkum sebagai berikut.

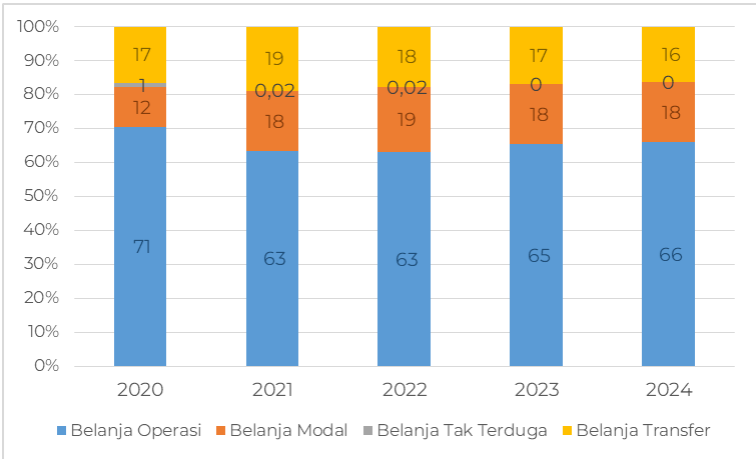
Tabel 2.69 Perkembangan Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Samosir (dalam miliar rupiah)

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Realisasi (%)	Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6
2	2020	866,63	808,47	93,29	-
3	2021	912,25	816,46	89,50	0,99
4	2022	901,07	810,32	89,93	-0,75
5	2023	968,10	880,49	90,95	8,66
6	2024	979,74	937,52	95,69	6,48
	Rata-rata	925,56	850,65	91,87	3,84

Sumber: BPKPD Kabupaten Samosir, 2025

Penetapan target belanja pada pengelolaan APBD Kabupaten Samosir periode tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa secara umum tingkat penetapan target belanja daerah Kabupaten Samosir berada pada rata-rata 925,56 miliar per tahun, sementara rata-rata realisasi belanja daerah sebesar 850,65 miliar per tahun dengan rata-rata capaian realisasi belanja daerah dibandingkan dengan targetnya adalah sebesar 91,87. Sementara itu, pertumbuhan realisasi belanja daerah sebesar 3,84% pertahun.

Komponen dari belanja daerah Kabupaten Samosir sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Secara umum komposisi proporsi terbesar yang digunakan sebagai belanja daerah adalah belanja operasi untuk memenuhi kegiatan operasional pemerintah daerah. Gambaran struktur belanja daerah di Kabupaten Samosir dirangkum dalam gambar 2.122 berikut.



Gambar 2.22 Struktur Belanja Daerah Kabupaten Samosir

Sumber: BPKPD Kabupaten Samosir, 2025

Struktur belanja Kabupaten Samosir secara umum digunakan untuk

melakukan pembiayaan atas kegiatan operasi penyelenggaraan pemerintahan dengan tingkat rata-rata proporsi belanja sebesar 65,6 persen. Proporsi dari belanja modal mencapai rata-rata sebesar 16,8 persen. Selanjutnya Proporsi dari belanja tidak terduga dan belanja transfer secara rata-rata berada pada tingkat 0,3% dan 17,3. Pembebanan penggunaan belanja pada belanja operasi menunjukkan keperluan dari penyelenggaraan pemerintahan. Tingkat belanja tidak terduga yang relatif rendah menunjukkan bahwa perencanaan APBD yang telah dilakukan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hanya sebagian kecil dari pengeluaran jatuh ke dalam kategori pendapatan tidak terduga. Pengeluaran yang cukup signifikan pada belanja modal menunjukkan bahwa Kabupaten Samosir melaksanakan pengembangan pembangunan daerah berdasarkan belanja modal yang dipergunakan untuk pembangunan Kabupaten Samosir yang lebih baik.

Kinerja Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Analisis pembiayaan daerah ini menunjukkan kemampuan pemerintah untuk mencukupi pembiayaan akibat selisih kebutuhan dan alokasi belanja. Adapun pembiayaan daerah tersebut terdiri dari:

1. Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Selisih Lebih Perhitungan (SiLPA) Anggaran Tahun Sebelumnya; Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; dan Penerimaan Pembiayaan Lainnya.
2. Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo; Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Pembentukan Dana Cadangan; Pemberian Pinjaman Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Lainnya.

Dalam upaya mengevaluasi kinerja keuangan dari aspek pembiayaan, langkah awal yang dilakukan adalah mengevaluasi komponen penerimaan pembiayaan Kabupaten Samosir yang bersumber dari berbagai penerimaan pembiayaan sebelumnya. Evaluasi yang dilakukan membandingkan pergerakan pembiayaan daerah selama periode 2020-2024. Hasil kinerja penerimaan pembiayaan tersebut dirangkum sebagai berikut:

Tabel 2.70 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Samosir
(dalam miliar rupiah)

Pembiayaan	2020	2021	2022	2023	2024
Penerimaan Pembiayaan	50,54	36,61	68,89	70,80	58,03
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	50,54	36,61	68,89	70,80	58,03
Pengeluaran Pembiayaan	4,00	4,00	4,00	-	6,00
Penyertaan Modal Daerah	4,00	4,00	4,00	-	6,00
Surplus/defisit	(9,93)	36,28	5,91	(12,77)	(25,88)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	36,61	68,89	70,80	58,03	26,15

Sumber: BPKPD Kabupaten Samosir, 2025

Kabupaten Samosir selama periode 2020 sampai dengan 2022 memiliki beban pengeluaran pembiayaan daerah secara rutin sebesar Rp 4 Miliar per tahun. Pada tahun 2023 tidak ada pengeluaran pembiayaan daerah. Sementara itu, SiLPA tahun sebelumnya mengalami fluktuasi. SiLPA Kabupaten Samosir menunjukkan kesempatan bagi Kabupaten Samosir untuk melakukan perencanaan APBD secara agresif, dimana pengeluaran untuk belanja daerah dapat disusun lebih besar sampai dengan Rp 58,03 Miliar atau sesuai dengan saldo SiLPA yang tersedia. Pemerintah Kabupaten Samosir juga perlu mempertimbangkan penggunaan SiLPA untuk meningkatkan efisiensi penganggaran kedepannya. Eksistensi SiLPA menjadi catatan penggunaan pendapatan yang belum optimal untuk mendorong pembangunan di Kabupaten Samosir. Posisi SiLPA dalam efisiensi perencanaan pembangunan diharapkan mencapai posisi nol ke depannya.

Kinerja Neraca Daerah

Neraca atau laporan posisi keuangan merupakan suatu bentuk laporan keuangan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi dengan menunjukkan posisi keuangan suatu entitas pemerintah daerah pada akhir periode tersebut. Neraca terdiri dari tiga unsur, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset atau aktiva adalah harta atau sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat usaha di kemudian hari. Aset terdiri atas aset lancar dan aset tetap. Sedangkan liabilitas merupakan kewajiban-kewajiban yang harus dibayar baik dalam periode jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya ekuitas merupakan kekayaan bersih yang dimiliki oleh suatu organisasi baik dalam bentuk ekuitas dana lancar,

ekuitas yang diinvestasikan pada aset tetap maupun ekuitas dana cadangan.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Kondisi Aset daerah juga memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Posisi pergerakan neraca keuangan daerah Kabupaten Samosir dirangkum sebagai berikut.

Tabel 2.71 Perkembangan Realisasi Neraca Daerah Kabupaten Samosir
(dalam miliar rupiah)

Uraian	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
ASET	1.555,77	1.697,70	1.760,60	1.826,11	1.866,71
A. Aset Lancar	70,48	111,47	96,77	111,48	71,78
B. Investasi Jangka Panjang	21,80	25,80	29,80	29,27	35,27
C. Aset Tetap	1.451,92	1.498,64	1.572,26	1.606,40	1.645,28
D. Aset Lainnya	11,58	61,79	61,76	78,96	74,96
KEWAJIBAN	7,54	9,47	13,23	16,99	13,21
A. Kewajiban Jangka Pendek	7,54	9,47	13,23	16,99	13,21
B. Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-
EKUITAS	1.548,23	1.688,22	1.747,36	1.809,12	1.853,50
A. Ekuitas	1.548,23	1.688,22	1.747,36	1.809,12	1.853,50
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.555,77	1.697,70	1.760,60	1.826,11	1.866,71

Sumber: BPKPD Kabupaten Samosir, 2025

Nilai Aset Kabupaten Samosir mengalami pertumbuhan dari sebelumnya berada pada posisi Rp 1.555,77 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 1.866,71 miliar pada tahun 2024. Pertumbuhan ini mencapai

rata-rata pertumbuhan sebesar 4,69 persen per tahun. Komposisi utama dari neraca aset Kabupaten Samosir adalah Aset tetap yang mencapai Rp 1.645,28 miliar pada tahun 2024 atau sebesar 88,14% dari total aktiva pemerintah Kabupaten Samosir. Aktiva tetap Kabupaten Samosir terdiri dari komponen utama Jalan, Irigasi dan Jaringan yang secara konsisten terus tumbuh seiring dengan prioritas pembangunan daerah pada infrastruktur dan aksesibilitas. Dari sisi aktiva lancar, komponen utama aktiva lancar terdiri dari kas, khususnya kas yang berada di Kasda.

Dari sisi struktur modal, pembiayaan aset Kabupaten Samosir mayoritas dibiayai melalui ekuitas. Dari sisi kewajiban, Kabupaten Samosir hanya memiliki utang jangka pendek lainnya sebesar Rp 13,21 miliar di tahun 2024. Meskipun secara nominal dan struktur pembiayaan hutang pemerintah daerah relatif kecil, namun terdapat konsistensi pertumbuhan hutang jangka pendek dari sebelumnya Rp 7,54 miliar di tahun 2020, meningkat menjadi Rp 13,21 miliar di tahun 2024.

Secara umum kondisi neraca daerah Kabupaten Samosir terkategori baik dimana pembiayaan atau pengadaan aset bersumber dari ekuitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Pertumbuhan aset yang dimiliki pemerintah cenderung menunjukkan tren positif. Proporsi beban hutang baik jangka pendek maupun jangka panjang kurang dari satu persen dari total aset pemerintah daerah yang mengindikasikan ketergantungan kepada hutang di Kabupaten Samosir masih relatif rendah (Tabel 2.65) . Meskipun secara umum tergolong rendah, terdapat peningkatan proporsi hutang yang mulai tumbuh dari 0,72 pada tahun 2020 ke 0,71% pada tahun 2024.

Tabel 2.72 Perkembangan Rasio Keuangan Neraca Daerah
Kabupaten Samosir

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio lancar (<i>current ratio</i>)	Kali	7,25	11,77	7,31	7,31	6,56	5,44
2	Rasio cepat (<i>quick ratio</i>)	Kali	5,42	7,77	5,67	5,67	4,49	2,76
3	Rasio total hutang terhadap total asset	Persen	0,72	0,56	0,75	0,75	0,93	0,71
4	Rasio hutang terhadap Modal	Persen	0,73	0,56	0,76	0,76	0,94	0,71

Sumber: BPKPD Kabupaten Samosir, data diolah, 2025

Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tecermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus APBD yang pelaksanaannya yang diawali dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, Pemerintah Daerah telah menyampaikan pertanggungjawaban yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK). Selanjutnya, pada bagian ini akan dijelaskan gambaran kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait dengan kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah.

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah tahun 2020-2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Selama periode tahun anggaran 2020-2024, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui (1) Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi daerah; (2) Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM pengelola pendapatan daerah; dan (3) peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya. Untuk itu digariskan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah, antara lain:

- a. meningkatkan pendapatan daerah dengan menerapkan sistem pembayaran pajak secara on-line dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan;
- b. meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
- c. meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

- d. meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
- e. meningkatkan peran dan fungsi Lembaga Teknis dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
- f. meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah;
- g. mengoptimalkan sumber pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- h. mengembangkan alternatif – alternatif pembiayaan pembangunan lainnya; dan
- i. melakukan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Samosir dengan DPRD Kabupaten Samosir, DPRD Provinsi Sumatera Utara, dan DPR RI.

2. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara efektif, efisien, adil dan merata sehingga dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam penyediaan pelayanan umum. Oleh karena itu, belanja daerah difokuskan pada upaya peningkatan pelayanan dasar seperti pelayanan kependudukan, pendidikan, kesehatan, prasarana dan sarana (infrastruktur), termasuk infrastruktur lingkungan pasar-pasar tradisional dan fasilitas sosial/fasilitas umum lainnya guna mempercepat proses pembangunan di wilayah administratif Kabupaten Samosir.

Penentuan besaran belanja yang dianggarkan mengacu pada prioritas utama pembangunan serta prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Adapun kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2020-2024 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan, antara lain:

- a. Peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;
- b. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat serta pengendalian inflasi daerah melalui kebijakan ketahanan pangan dan ketersediaan pasokan pangan;
- c. Anggaran belanja akan diarahkan sektor pemberdayaan KUKM, perdagangan dan perindustrian yang menopang laju

pertumbuhan ekonomi dengan didukung pembangunan infrastruktur;

- d. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan, Pemerintah Daerah mengarahkan anggaran pada kegiatan - kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam;
- e. Kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (fixed cost) dan pemenuhan program/kegiatan yang berorientasi kepada standar pelayanan minimal (SPM);
- f. Pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Samosir yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan, serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
- g. Kebijakan untuk operasi daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:
- h. mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta pemberian insentif kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. mengalokasikan belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi dan jasa yang dihasilkan dijangkau oleh masyarakat luas;
- j. mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- k. mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah Daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya; dan
- l. mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan umum pembiayaan Pemerintah Kabupaten Samosir adalah meningkatkan manajemen pembiayaan daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas sumber-sumber pembiayaan. Apabila APBD dalam keadaan surplus, maka kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan kas daerah dalam bentuk penyertaan modal atau pemberian pinjaman daerah yang dialokasikan kepada pemberian dana bergulir kepada UMKM. Apabila APBD dalam keadaan defisit maka kebijakan yang dilaksanakan adalah memanfaatkan penerimaan pembiayaan secara optimal seperti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dan penerimaan piutang daerah.

Kerangka Pendanaan

Hasil evaluasi kinerja keuangan daerah periode 2020 – 2024 menunjukkan bahwa ketergantungan Pemerintah Kabupaten Samosir terhadap pendapatan transfer selama periode lima tahun ke depan masih cukup tinggi dengan rata-rata sumber pendapatan daerah melalui pendapatan transfer masih dominan dalam pendanaan pembangunan di Kabupaten Samosir, namun perlahan menunjukkan penurunan. Dimana pada tahun 2020, proporsi pendapatan transfer terhadap total pendapatan daerah sebesar 92,36% menjadi 89,41% pada tahun 2024 (Gambar 2.20). Penurunan ini menjadi sinyal yang positif bahwa Kabupaten Samosir berusaha untuk mencari sumber dana lain untuk pembiayaan pembangunan. Namun tidak dapat dipungkiri, tingginya ketergantungan terhadap dana transfer disebabkan oleh adanya kebijakan Pemerintah Pusat terkait dengan gaji Pegawai Negeri Sipil dan kebijakan pembangunan di Daerah. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah sumber utama penerimaannya berasal dari bagi hasil pajak provinsi dan penerimaan lainnya berdasarkan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Sumatera Utara.

Dalam perencanaan yang dilakukan pada periode RPJMD 2025-2029 Pemerintah perlu mengupayakan agar meningkatnya fungsi Kabupaten Samosir sehingga dapat berpengaruh pada peningkatan belanja, baik belanja operasi maupun belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer. Jumlah belanja daerah ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan

pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sendiri.

Penggunaan belanja operasi tersebut tercermin dalam pengelolaan APBD tahun bersangkutan yang penggunaannya diarahkan kepada lebih prioritas untuk membiayai berbagai urusan Pemerintah Daerah baik urusan wajib yang berhubungan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berhubungan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang untuk menstimulus kegiatan ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Fokus belanja daerah pada tahun 2025-2029 diarahkan kepada program-program penguatan dasar infrastruktur, dalam upaya menguatkan persiapan dan menjadi landasan transformasi ekonomi, sosial dan tata kelola.

Selain itu anggaran belanja juga diarahkan penggunaannya untuk mendorong berkembangnya kegiatan-kegiatan di wilayah pusat pertumbuhan yang baru, sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam arah kebijakan pembangunan daerah RPJPD Kabupaten Samosir yang mempersiapkan pusat-pusat pertumbuhan di daerah. Penggunaan belanja operasi penggunaannya lebih diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Aktivitas pengeluaran belanja modal diarahkan untuk belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringan dan belanja aset tetap lainnya, belanja tak terduga dan belanja transfer.

Berpedoman kepada klasifikasi belanja sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Samosir Tahun 2025-2029 sebagaimana dipersiapkan untuk perencanaan APBD periode tersebut akan menyesuaikan dan mengacu kepada ketentuan berlaku, dimana belanja daerah yang terdiri dari belanja belanja operasi, belanja barang jasa, belanja transfer dan belanja hibah.

Adapun arah pengelolaan belanja Pemerintah Kabupaten Samosir untuk tahun 2025 – 2029 adalah: Belanja operasi mengalami peningkatan, disebabkan peningkatan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial untuk beberapa tahun ke depan. Untuk menekan pertumbuhan belanja pegawai tersebut perlu dilakukan melalui rasionalisasi jumlah pegawai dan efisiensi organisasi yang disesuaikan dengan kebijakan formasi dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Diharapkan jumlah pegawai yang diterima tiap tahunnya akan lebih kecil dari jumlah pegawai yang pensiun. Sedangkan operasi lainnya akan diupayakan pemanfaatannya dalam menstimulus aktivitas masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi, sosial dan budaya dan dalam pengalokasiannya disesuaikan dengan kondisi yang ada dan diupayakan seefisien mungkin disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Belanja modal mulai tahun anggaran 2025 diarahkan untuk mencapai percepatan pembangunan infrastruktur yang memperkuat pembangunan modal dasar berbasis transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola. Dalam implementasinya akan selalu diupayakan efisiensi dan efektivitas anggaran dalam rangka melaksanakan pemerintahan yang baik dan amanah. Untuk itu belanja barang dan jasa mulai tahun anggaran 2025 diperkirakan akan semakin meningkat.

Peningkatan pendapatan daerah tahun 2025 - 2029 diarahkan untuk dapat meningkatkan belanja operasi dan belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer untuk mendukung pembangunan daerah serta target pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan menekan peningkatan belanja pegawai serta belanja barang dan jasa, belanja modal diperkirakan dapat meningkat sejak tahun 2025. Peningkatan ini disebabkan adanya kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik yang perlu disediakan bagi masyarakat.

Arah kebijakan belanja daerah juga dilakukan dengan fokus penanganan permasalahan stunting dan penemuan serta penanganan kasus tuberculosis. Perhatian pemerintah daerah Kabupaten Samosir terhadap tingkat kesehatan masyarakat menjadi prioritas khusus, terutama dalam penanganan kedua kasus permasalahan tersebut serta kasus kematian ibu yang masih tinggi.

1. Proyeksi Pendapatan Daerah

Untuk proyeksi pendapatan daerah dapat dilakukan berdasarkan pada data realisasi pendapatan daerah sebelumnya dan mengaitkan dengan data indikator makro sebagai informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah. Adapun asumsi-asumsi yang digunakan untuk memproyeksi pendapatan daerah Kabupaten Samosir tahun anggaran 2026-2030, antara lain:

1. Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu.

Rata-rata Laju pertumbuhan proyeksi pendapatan Kabupaten Samosir tahun 2026-2030 sebesar 6,19%. Hal ini dilakukan dengan perencanaan sebagai berikut:

- a. Skema Pinjaman daerah sebesar Rp. 100 miliar yang dialokasikan untuk Pembangunan objek wisata rumah adat 5 puak Batak di Sigulati yang merupakan Proyek Strategis RPJPD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2045 Tahap I dan dapat meningkatkan retribusi objek wisata hingga tahun 2030.
 - b. Sumber-sumber PAD sektor pariwisata baru melalui pembangunan objek wisata baru, pengembangan agrowisata/ekowisata.
 - c. Potensi sumber PAD melalui retribusi pengelolaan air yang dikelola oleh:
 - a) Pemerintah, melalui pembangunan SPAM Sitapigagan dan akuisisi PDAM Tirtanadi menjadi PDAM Tirtanatio.
 - b) BUMDes/BUMDesMa, melalui pemanfaatan pompa air tenaga surya untuk kawasan di pinggiran Danau Toba.
 - d. Potensi sumber PAD melalui retribusi pengelolaan persampahan yang setiap tahunnya dilakukan peningkatan cakupan layanan persampahan rumah tangga melalui pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA), peningkatan sarana dan prasarana pengolahan persampahan serta edukasi kepada masyarakat tentang pengolahan sampah.
 - e. Potensi sumber-sumber PAD lainnya, seperti BLUD sektor perhubungan (uji KIR kendaraan bermotor), intensifikasi retribusi parkir tepi jalan umum dan kantong-kantong parkir milik Pemerintah Daerah dan swasta.
2. Asumsi indikator makro ekonomi, seperti laju pertumbuhan ekonomi, serta penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Samosir.

Kabupaten Samosir sempat mengalami kontraksi pada tahun 2020 sebagai salah satu dampak COVID-19 yang mencapai kontraksi sebesar 0,59%. Kondisi ini cenderung lebih baik daripada kondisi pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dan Indonesia pada tahun tersebut. Hal ini mengindikasikan resiliensi dan ketangguhan perekonomian di Kabupaten Samosir. Sejak saat ini perekonomian di Kabupaten Samosir mulai pulih dan terus mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 2,65%, hingga 5,02% untuk tahun 2021 dan 2024. Tren pertumbuhan ini mendukung optimalisasi perekonomian di Kabupaten Samosir. Kondisi ini akan mendukung peningkatan PAD dalam bentuk

pajak dan diharapkan akan mendorong pertumbuhan retribusi atas berbagai aktivitas dan pelayanan yang diberikan Kabupaten Samosir. Kondisi inflasi yang relatif terkendali dengan target inflasi yang kecil membuat daya tarik pertumbuhan ekonomi semakin memungkinkan peningkatan pendapatan daerah nantinya. Selain itu penyerapan tenaga kerja yang baik serta tingkat pengangguran terbuka yang rendah turut akan memberikan sumbangsih terhadap pertumbuhan ekonomi.

3. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

Kabupaten Samosir berupaya untuk melakukan ekstensifikasi pendapatan daerah melalui peningkatan jumlah wajib pajak dan sumber penerimaan pajak serta retribusi daerah. Salah satu kebijakan yang diambil adalah dengan mengoptimalkan titik parkir sebagai sumber penerimaan retribusi parkir di daerah. Ekstensifikasi juga dioptimalkan dengan melakukan pendataan serta pengoptimalan pendataan wajib pajak yang selama ini belum terdata oleh pemerintah Kabupaten Samosir. Dalam hal intensifikasi pendapatan daerah, pemerintah berupaya mengkaji kembali potensi retribusi dan pajak daerah sehingga dapat memperoleh gambaran nilai optimal atau tarif optimal yang dapat mendukung penerimaan pendapatan daerah sekaligus mengoptimalkan fungsi-fungsi penerimaan pendapatan retribusi daerah.

4. Kebijakan di bidang keuangan negara dan daerah.

Pertimbangan ini didasarkan pada kebijakan keuangan pendapatan transfer baik dalam bentuk penerimaan maupun pengeluaran berdasarkan kebijakan keuangan negara maupun daerah.

Dalam upaya untuk menyusun perencanaan anggaran yang lebih baik, diperlukan upaya proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Samosir selama satu periode ke depan. Berikut ini adalah proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Samosir untuk tahun anggaran 2026 – 2030.

Tabel 2.73 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir

URAIAN	2026	2027	2028	2029	2030	Rata-rata Pertumbu han
1	2	3	4	5	6	7
PENDAPATAN DAERAH	970.900.414.760,06	1.011.745.022.870,13	1.067.553.432.310,20	1.138.024.951.359,43	1.234.127.417.257,00	6,19%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	136.006.136.753	153.299.074.089	184.742.090.078	230.001.084.083	300.008.959.526	22,04%
Pajak Daerah	52.098.690.809,00	60.660.176.783,54	69.005.222.125,19	86.071.228.032,92	102.460.179.344,61	18,49%
Retribusi Daerah	25.497.930.945,60	28.441.955.734,72	43.514.164.958,72	65.130.805.211,68	82.265.000.634,72	35,13%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.987.904.880,00	14.840.000.000,00	21.160.000.000,00	24.880.000.000,00	51.300.000.000,00	53,73%
Lain-lain PAD yang Sah	48.421.610.118,52	49.356.941.570,29	51.062.702.993,85	53.919.050.838,75	63.983.779.547,14	7,41%
PENDAPATAN TRANSFER	826.571.078.006,94	849.956.284.781,58	874.151.884.952,44	899.191.220.850,47	925.109.158.376,42	2,86%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	806.463.173.431,20	829.446.222.114,32	853.231.621.031,84	877.852.551.651,46	903.343.715.793,42	
<i>Dana Perimbangan</i>	<i>806.463.173.431,20</i>	<i>829.446.222.114,32</i>	<i>853.231.621.031,84</i>	<i>877.852.551.651,46</i>	<i>903.343.715.793,42</i>	
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	16.673.742.120,00	17.007.216.962,40	17.347.361.301,65	17.694.308.527,68	18.048.194.698,23	
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	453.176.563.980,00	462.240.095.259,60	471.484.897.164,79	480.914.595.108,09	490.532.887.010,25	
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	228.459.507.150,00	239.882.482.507,50	251.876.606.632,88	264.470.436.964,52	277.693.958.812,75	
Dana Desa	101.012.103.480,00	103.032.345.549,60	105.092.992.460,59	107.194.852.309,80	109.338.749.356,00	
Insentif Fiskal	7.141.256.701,20	7.284.081.835,22	7.429.763.471,93	7.578.358.741,37	7.729.925.916,19	
Pendapatan Transfer Antar Daerah	20.107.904.575,74	20.510.062.667,25	20.920.263.920,60	21.338.669.199,01	21.765.442.582,99	
Pendapatan Bagi Hasil	20.107.904.575,74	20.510.062.667,25	20.920.263.920,60	21.338.669.199,01	21.765.442.582,99	
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.323.200.000,00	8.489.664.000,00	8.659.457.280,00	8.832.646.425,60	9.009.299.354,11	2,00%
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.323.200.000,00	8.489.664.000,00	8.659.457.280,00	8.832.646.425,60	9.009.299.354,11	

Sumber: BPKPD Kabupaten Samosir, 2025

Kebijakan Pendapatan Daerah

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan harus terus dilakukan baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan yang bersumber dari pusat (Dana Perimbangan), serta pendapatan lain-lain. Saat ini sumber pendapatan dari PAD masih relatif kecil dibandingkan dengan dana perimbangan. Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya.

Upaya pengelolaan dan peningkatan PAD diantaranya melalui :

1. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.
2. Peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah melalui sosialisasi regulasi pajak dan retribusi daerah kepada masyarakat.
3. Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.
4. Menaikkan pajak melalui peningkatan/penyesuaian tarif dan perluasan subyek dan obyek pajak dengan meninjau ulang beberapa ketentuan perda tentang pajak dan retribusi daerah.
5. Pemantapan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah (digitalisasi pendapatan daerah).
6. Peningkatan kualitas dan optimalisasi pengelolaan aset untuk peningkatan pendapatan melalui kerjasama dengan pihak ketiga.
7. Memberikan insentif/bonus dan penghargaan kepada perangkat daerah yang berhasil mencapai atau melampaui target dan menjatuhkan sanksi kepada perangkat daerah yang tidak berhasil mencapai target penerimaan pendapatan daerah secara optimal dalam satu tahun anggaran.
8. Penerapan dan penegakan ketentuan hukum bagi wajib pajak/retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya dan pemberian penghargaan kepada wajib pajak/retribusi yang telah memenuhi kewajibannya

sesuai ketentuan.

9. Peningkatan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Provinsi serta perangkat daerah penghasil.
10. Revitalisasi dan restrukturisasi Badan Usaha Milik Daerah agar memberikan peningkatan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah.
11. Tidak melaksanakan pemungutan terhadap peraturan daerah yang terkait dengan pajak dan retribusi daerah yang telah dibatalkan oleh pemerintah.
12. Bagian laba yang diperoleh dari PDAM diupayakan untuk direinvestasikan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan untuk menunjang Program Penambahan Sambungan Rumah Air Minum.
13. Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Daerah, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Laboratorium Lingkungan, dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Uji KIR Kendaraan Bermotor yang dicantumkan dalam APBD sebagai jenis pendapatan Lain-lain PAD yang Sah.

Dalam upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah, kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan penerimaan pajak pusat yang dapat di sharing dengan daerah guna meningkatkan bagian dari bagi hasil pajak.
2. Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Meningkatkan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah.
4. Meningkatkan upaya penggalangan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN/PHLN dan APBD Provinsi.
5. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam pelaksanaan pendapatan transfer.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa sumber pendapatan daerah yang berasal dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai perundang-undangan. Kebijakan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah diarahkan untuk dapat meningkatkan penerimaan pendapatan dari dana hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan dari pemerintah melalui peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

2. Proyeksi Belanja Daerah

Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam memproyeksikan belanja daerah harus memperhatikan asumsi indikator makro ekonomi, tingkat pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama kebijakan Pemerintah Kabupaten Samosir terkait belanja dan kebijakan pembiayaan. Secara keseluruhan, belanja daerah diproyeksikan mengalami rata-rata peningkatan sebesar 6,40% per tahun sebagaimana disajikan dalam tabel 2.67 di bawah ini.

Gambaran Umum Daerah

Tabel 2.74 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Samosir

URAIAN	2026	2027	2028	2029	2030	Rata-rata Pertumbuhan
1	2	3	4	5	6	7
BELANJA DAERAH	991.691.139.060,53	1.139.889.097.429,19	1.071.810.853.670,93	1.149.664.756.984,95	1.254.259.756.948,88	6,33%
BELANJA OPERASI	647.141.609.857,16	671.212.675.206,00	700.788.234.764,28	759.827.020.745,31	762.186.593.212,83	4,22%
Belanja Pegawai	367.294.996.761,96	370.917.946.729,58	374.577.126.196,88	378.272.897.458,85	384.005.626.433,43	1,12%
Belanja Barang dan Jasa	264.781.343.833,88	284.548.569.696,48	305.814.151.279,48	328.691.663.946,46	355.681.162.773,57	7,66%
Belanja Hibah	10.802.081.261,32	11.269.811.379,94	12.396.792.517,93	40.827.678.508,00	14.164.630.997,33	44,59%
Belanja Bantuan Sosial	4.263.188.000,00	4.476.347.400,00	4.700.164.770,00	8.734.780.832,00	4.935.173.008,50	13,09%
Belanja bunga			3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	3.400.000.000,00	
BELANJA MODAL	189.472.107.591,46	305.959.262.490,80	199.771.238.328,70	210.135.437.589,36	303.331.471.156,00	19,08%
Belanja Modal Tanah	6.359.404.776,00	6.677.375.014,80	10.011.243.765,54	14.221.581.078,51	15.293.796.889,29	26,13%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.559.799.372,00	18.187.789.340,60	16.847.178.807,63	17.928.088.817,14	39.265.363.607,62	35,74%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.983.784.845,00	135.182.974.087,25	27.112.683.802,31	53.970.965.247,44	60.240.674.899,92	107,93%
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	139.466.760.487,46	143.378.648.031,60	143.087.006.416,34	121.025.283.143,28	184.447.221.263,15	9,90%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.102.358.111,00	2.532.476.016,55	2.713.125.536,88	2.989.519.302,99	4.084.414.496,02	18,60%
BELANJA TIDAK TERDUGA	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.500.000.000,00	9,17%
Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.500.000.000,00	9,17%
BELANJA TRANSFER	152.577.421.611,91	160.217.159.732,38	168.251.380.577,95	176.702.298.650,28	185.241.692.580,05	4,97%
<i>Belanja Bagi Hasil</i>	<i>152.577.421.611,91</i>	<i>160.217.159.732,38</i>	<i>168.251.380.577,95</i>	<i>176.702.298.650,28</i>	<i>185.241.692.580,05</i>	<i>4,97%</i>
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	4.941.283.757,31	5.233.579.502,78	5.554.081.420,20	5.906.673.456,19	5.965.740.190,75	4,85%

Gambaran Umum Daerah

URAIAN	2026	2027	2028	2029	2030	Rata-rata Pertumbuhan
1	2	3	4	5	6	7
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.380.421.554,60	1.415.078.114,60	1.450.371.937,00	1.486.351.612,30	1.501.215.128,42	2,12%
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	146.255.716.300,00	153.568.502.115,00	161.246.927.220,75	169.309.273.581,79	177.774.737.260,88	5,00%
SURPLUS/DEFISIT	(20.790.724.300,47)	(128.144.074.559,06)	(4.257.421.360,73)	(11.639.805.625,52)	(20.132.339.691,89)	

Sumber: BPKPD Kabupaten Samosir, 2025

Kebijakan Belanja Daerah

Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah ke depan diarahkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance based) untuk mendukung capaian target kinerja utama dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja.
2. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.
3. Belanja daerah diprioritaskan untuk program-program yang bersifat mengikat seperti halnya dukungan pencapaian target pembangunan, pemenuhan ketentuan perundang-undangan, serta pendampingan program-program pemerintah pusat.
4. Belanja daerah diprioritaskan pada program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan.
5. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji ASN dan belanja operasional kantor dengan mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

3. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Analisis atas proyeksi pembiayaan daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran (SILPA). Proyeksi pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Berikut ini adalah besarnya proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Samosir selama kurun waktu tahun 2026-2030.

Tabel 2.75 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Samosir

URAIAN	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
PEMBIAYAAN DAERAH					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	25.790.724.300,47	133.144.074.559,06	42.257.421.360,73	52.639.805.625,52	62.132.339.691,89
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	25.790.724.300,47	33.144.074.559,06	42.257.421.360,73	52.639.805.625,52	62.132.339.691,89
Pinjaman		100.000.000.000,00			
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	38.000.000.000,00	38.000.000.000,00	39.000.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
Cicilan pinjaman			33.000.000.000,00	33.000.000.000,00	34.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO	20.790.724.300,47	128.144.074.559,06	4.257.421.360,73	14.639.805.625,52	23.132.339.691,89

Sumber: BPKPD Kabupaten Samosir, 2025

Kebijakan Pembiayaan Daerah

Adapun kebijakan pembiayaan daerah untuk menutup defisit anggaran diarahkan pada:

1. Dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan pembiayaan lainnya.
2. Pada tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan asumsi bahwa SiLPA harus mampu menutup defisit anggaran.
3. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kabupaten Samosir mengambil langkah untuk melakukan Pinjaman Daerah untuk membiayai salah satu pembangunan proyek strategis RPJPD Tahap I, yaitu Pembangunan Rumah Adat 5 Puak di Sigulatti yang akan menjadi objek wisata. Objek wisata ini nantinya akan berkontribusi dalam peningkatan kunjungan wisata dan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi objek wisata.
Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential management*), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.
4. Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi

masyarakat.

5. Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang mencakup antara lain: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Adapun kebijakan pengeluaran pembiayaan ke depan diarahkan pada:
 - a. Penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD.
 - b. Pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD dan Dana Bergulir (Kredit Program).

Pinjaman Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah serta memastikan pelaksanaan program prioritas pembangunan, Pemerintah Kabupaten Samosir perlu melakukan proyeksi keuangan secara realistis dan terukur. Proyeksi keuangan ini disusun dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah, potensi pendapatan asli daerah (PAD), transfer dari pemerintah pusat dan provinsi, serta sumber-sumber pembiayaan alternatif, termasuk melalui skema pinjaman daerah.

Berdasarkan proyeksi pendapatan daerah selama periode RPJMD 2025–2029, terdapat kebutuhan pembiayaan tambahan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar, penguatan pariwisata, pengembangan wilayah, dan layanan publik strategis lainnya. Skema pinjaman menjadi salah satu opsi pembiayaan yang akan ditempuh secara selektif, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten Samosir melakukan peminjaman melalui skema pinjaman daerah yang difasilitasi pemerintah pusat sebesar Rp 100 miliar untuk Pembangunan Rumah Adat 5 Puak di Sigulatti. Proyek strategis ini memenuhi kriteria proyek yang akan dibiayai melalui pinjaman, diantaranya:

- Proyek yang bersifat strategis, produktif, dan memiliki dampak ekonomi jangka menengah-panjang.

- Proyek yang dapat meningkatkan PAD secara langsung maupun tidak langsung.
- Proyek yang tidak dapat sepenuhnya didanai oleh APBD murni.

Proyeksi pinjaman daerah akan diselaraskan dengan kemampuan fiskal daerah, menjaga rasio beban pinjaman terhadap pendapatan agar tetap dalam batas aman sesuai dengan Permendagri tentang pengelolaan keuangan daerah. Langkah kehati-hatian, kajian kelayakan, dan uji rasio kapasitas fiskal akan menjadi bagian dari setiap rencana pinjaman. Dengan strategi ini, Pemerintah Kabupaten Samosir optimis dapat mempercepat pembangunan tanpa membebani keuangan daerah secara berlebihan, serta memastikan manfaat langsung bagi masyarakat.

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Identifikasi permasalahan pembangunan juga dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini dilakukan untuk dapat memetakan permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintah daerah. Selanjutnya, dilakukan identifikasi isu strategis untuk mengidentifikasi kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun peluang daerah Kabupaten Samosir di masa yang akan datang.

Permasalahan Pembangunan Kabupaten Samosir

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan Kabupaten Samosir yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dilakukan. Guna membantu memastikan visi dan misi daerah dirumuskan dengan tepat, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan pembangunan diperlukan dalam perumusan visi dan misi daerah, yang selanjutnya akan dituangkan dalam perumusan sasaran pokok RPJMD. Diantaranya permasalahan pembangunan Kabupaten Samosir adalah sebagai berikut.

1. Belum optimalnya kesejahteraan masyarakat

Permasalahan sosial di Kabupaten Samosir dari belum meratanya akses dan kualitas di sektor kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial. Dari sektor kesehatan, Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita tahun 2023 sebesar 22,48 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih tingginya stunting yang ada di Kabupaten Samosir.

Sementara itu, untuk sektor pendidikan dapat dilihat dari Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada tahun 2023 masih 9,47 Tahun dan bahkan masih dibawah rata-rata RLS Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2023 sebesar 9,82 Tahun dan berada pada urutan ke-19 dari ke-33 kabupaten/kota se- Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan dari aspek perlindungan sosial, tingkat kemiskinan di Kabupaten Samosir pada tahun 2023 sebesar 11,66 persen lebih tinggi dari tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2023 sebesar 8,15 persen, serta dengan tingginya beban pengeluaran yang harus dipenuhi oleh masyarakat miskin yang disebabkan masih tingginya harga kebutuhan pokok, biaya kesehatan, biaya pendidikan dan biaya perumahan. Masih sulitnya masyarakat miskin untuk dapat memiliki sumber pendapatan dan kemandirian ekonomi. Jaminan ketenagakerjaan pada tahun 2023 hanya sebesar 1,75 persen di mana hal ini menunjukkan bahwa banyak tenaga kerja yang belum berpartisipasi dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

2. Belum optimalnya produktivitas tenaga kerja dan perekonomian yang masih didominasi oleh sektor pertanian

Meskipun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Samosir tergolong rendah pada tahun 2023 sebesar 1,03 persen dan berada dibawah TPT Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2023 sebesar 5,89 persen dan Nasional pada tahun 2023 sebesar 5,32 persen, namun jika digali lagi terdapat beberapa permasalahan pada tenaga kerja Kabupaten Samosir. Di antaranya rendahnya akses tenaga kerja terhadap dunia usaha dan rendahnya kualitas tenaga kerja.

Sektor dominan pada perekonomian Kabupaten Samosir adalah sektor pertanian yang merupakan sektor tradisional. Kontribusi terbesar PDRB di Kabupaten Samosir adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 51,08 persen. Hal ini menunjukkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih mendominasi dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Samosir. Namun demikian, Transisi perekonomian ke sektor

modern (industri dan jasa) masih terbelang lambat.

3. Pembangunan wilayah dan pembangunan sarana dan prasarana yang belum merata

Disparitas ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur merupakan salah satu penyebab ketimpangan antar daerah di Kabupaten Samosir. Persentase kelayakan infrastruktur di Kabupaten Samosir pada tahun 2023 sebesar 58,91 persen. Konektivitas wilayah yang masih belum terhubung dan kondisi jaringan jalan yang belum memadai, merupakan salah satu penyebab belum meratanya pembangunan di Kabupaten Samosir. Kondisi ketersediaan infrastruktur akses jalan mantap di Kabupaten Samosir pada tahun 2023 sebesar 54,68 persen. Hal ini menunjukkan masih banyak akses jalan dengan kondisi rusak dan rusak berat pada berbagai wilayah di Kabupaten Samosir.

Selain itu, konektivitas digital juga sangat dibutuhkan sebagai sarana komunikasi dan informasi bagi masyarakat. Namun ketersediaan infrastruktur digital di Kabupaten Samosir masih belum optimal mengingat masih ditemukannya daerah yang belum terjangkau jaringan komunikasi. Dari sisi transportasi massal, layanan pengangkutan sungai, danau dan penyeberangan serta angkutan darat masih belum optimal baik dari segi kelayakan angkutan, kelayakan prasarana pendukung, kepemilikan izin, serta masih rendahnya kualitas sumber daya manusia yang bekerja di bidang pengangkutan massal. Pelayanan angkutan massal juga belum mampu melayani hingga ke seluruh wilayah permukiman di Kabupaten Samosir.

Penyediaan infrastruktur dasar lainnya seperti air minum, sanitasi, rumah layak huni, dan persampahan juga cukup rendah di beberapa wilayah di Kabupaten Samosir terutama di daerah yang tidak berada di sepanjang jalan nasional. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan pada tahun 2022 sebesar 52,85 persen. Kemudian persentase rumah tinggal bersanitasi pada tahun 2023 sebesar 54,63 persen. Rasio rumah layak huni pada tahun 2023 sebesar 81,78 persen. Serta persentase jumlah sampah yang tertangani pada tahun 2022 sebesar 60 persen. Selain itu, sebagai daerah dengan mayoritas penduduk sebagai petani, infrastruktur irigasi merupakan salah satu komponen penting yang harus diperhatikan. Namun saat ini, ketersediaan dan kualitas jaringan irigasi belum optimal di

beberapa wilayah pada tahun 2023 persentase irigasi Kabupaten Samosir dalam kondisi baik sebesar 58,62 persen. Layanan ketenagalistrikan juga belum dapat dikatakan optimal dikarenakan masih terdapatnya masyarakat yang belum memiliki jaringan listrik.

4. Belum optimalnya pengelolaan SDA dan lingkungan hidup yang berkelanjutan

Permasalahan pembangunan yang dirasakan terkait pengelolaan SDA dan lingkungan hidup adalah menurunnya kualitas air, kualitas tanah, pengelolaan limbah dan sampah yang masih minim. Indeks kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Samosir pada tahun 2023 sebesar 71,86 poin meningkat dari tahun 2022 sebesar 69,96 poin. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi tersebut harus menjadi perhatian dari sektor pertanian selain dari aktivitas manusia di darat.

5. Tata kelola pemerintahan yang belum optimal

Tata kelola pemerintahan Kabupaten Samosir masih belum optimal, terutama pada akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi. Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di Kabupaten Samosir pada tahun 2023 sebesar 2,85 poin menurun dari tahun 2021 sebesar 3,16 poin. Hal ini menunjukkan bahwa Implementasi SPBE yang belum optimal juga berakibat pada pelayanan publik yang tidak optimal juga. Kemudian, pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang belum sepenuhnya mendukung penyusunan kebijakan yang evidence-based serta keterbatasan munculnya inovasi- inovasi baru. Selanjutnya, peningkatan kapasitas aparatur Daerah masih perlu menjadi perhatian.

Permasalahan Pembangunan per Urusan Pemerintahan

Permasalahan pembangunan Kabupaten Samosir berdasarkan urusan pemerintahan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.76 Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Urusan	Masalah
Layanan Dasar	
Pendidikan	1 Belum adanya pemetaan kebutuhan PTK
	2 Kurang meratanya distribusi guru
	3 Kurangnya pemerataan sarana dan prasarana digital dalam ekosistem pembelajaran

Urusan	Masalah
	4 Belum tersedianya 1 desa 1 PAUD
	5 Rendahnya kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya di PAUD
	6 Belum tercukupinya buku teks dan non teks
	7 Masih rendahnya jumlah guru penggerak
	8 Ketersediaan guru mata pelajaran di satuan pendidikan belum merata
	9 Masih banyak sekolah belum sesuai standar nasional pendidikan
Kesehatan	1 Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
	2 Kurangnya kuantitas dan pemerataan distribusi dokter dan tenaga kesehatan
	3 Rendahnya pengetahuan ibu dan keluarga
	4 Kondisi budaya di masyarakat yang masih mempercayai pengobatan tradisional
	5 Rendahnya sarana dan prasarana Faskes
	6 Rendahnya kualitas SDM tenaga kesehatan
	7 Paritas tinggi dan jarak kehamilan kurang dari 2 tahun
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1 Minimnya ketersediaan dokumen tata ruang dan ketaatan pemanfaatan ruang
	2 Pemeliharaan jalan dan jembatan belum optimal
	3 Rasio anggaran yang tersedia dengan kebutuhan anggaran untuk peningkatan kualitas jalan masih belum seimbang
	4 Kualitas jalan lingkungan masih rendah
	5 Kualitas jaringan irigasi rendah
	6 Ketersediaan air untuk daerah irigasi terbatas
	7 Organisasi/lembaga pengurus Daerah Irigasi masih lemah
	8 Rendahnya inovasi terbaru untuk alternatif sumber air yang baru
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1 Minimnya penanganan kawasan kumuh
	2 Banyaknya rumah tidak layak huni
	3 Belum optimalnya pelayanan air bersih
	4 Belum optimalnya pengelolaan air limbah/sanitasi
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1 Rendahnya sosialisasi Perda ke masyarakat
	2 Rendahnya Penegakan Perda dengan humanis
	3 Minimnya jumlah PPNS
	4 Belum tersedianya peta wilayah manajemen kebakaran
	5 Minimnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran
	6 Belum tersedianya sumber daya manusia yang bersertifikat pemadam
	7 Rentannya muncul konflik sosial dan politik

Urusan	Masalah
	8 Rendahnya pengendalian tertib administrasi warga negara asing yang berkunjung
	9 Tingginya penyalahgunaan NAPZA
	10 Belum tersedianya pedoman/acuan dalam pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana
	11 Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana
	12 Belum tersedianya satuan tugas penanggulangan bencana
	13 Kurangnya kualitas dan kuantitas aparatur dalam penanggulangan bencana
	14 Belum terpenuhinya sarana prasarana penanggulangan bencana
	15 Keterbatasan logistik bagi korban bencana
	16 Rendahnya rehabilitasi/rekonstruksi pasca bencana
	17 Kurangnya koordinasi yang baik antara Pemerintah Atasan, Pemerintah Daerah, TNI/POLRI, masyarakat, dan dunia usaha
Sosial	1 Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan program perlindungan/pemberdayaan sosial
	2 Tingginya angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
	3 Kurangnya sarana dan prasarana pendukung kesejahteraan sosial
	4 Masih kurangnya pengendalian terhadap pemanfaatan bantuan
	5 Masih kurangnya pemberdayaan masyarakat
Layanan Non Dasar	
Tenaga Kerja	1 Rendahnya kemampuan masyarakat berwirausaha
	2 Belum efektifnya sertifikasi tenaga kerja
	3 Minimnya informasi kerjasama antara Dinas dengan Perusahaan
	4 Belum sesuai kualifikasi tenaga kerja dengan pengembangan sektor pertanian dan wisata
	5 Kurangnya ketersediaan SDM Instruktur
	6 Kurangnya sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja (BLK)
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Sarana publik belum responsif gender
	2 Masih rendahnya pemahaman isu gender serta manfaat PUG
	3 Belum optimalnya penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
Pangan	1 Masih rendahnya kemampuan masyarakat untuk mendapatkan bahan pangan
	2 Kurangnya pemahaman konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA)
Pertanahan	1 Kepemilikan tanah masih bersifat kolektif (keturunan marga)
	2 Tingginya harga tanah
	3 Belum terdokumentasinya tanah adat dan tanah ulayat

Urusan	Masalah
Lingkungan Hidup	4 Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus status hak kepemilikan tanah
	1 Tercemarnya badan danau dari limbah domestik
	2 Belum optimalnya pelaksanaan zonasi Keramba Jaring Apung
	3 Pemahaman standarisasi sanitasi masih rendah
	4 Pengelolaan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) yang masih rendah
	5 Tingginya penggunaan pupuk kimia/pestisida untuk pertanian
	6 Kurangnya sarana prasarana pengolahan limbah
	7 Rendahnya pengelolaan sampah berbasis masyarakat
	8 Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengolah limbah
	9 Rendahnya pengawasan dan pengendalian pencemaran dan penanganan limbah
	10 Belum adanya regulasi tentang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
	11 Tingginya alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi permukiman
	12 Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga hutan dan lahan
	13 Rendahnya pengawasan dan penegakan hukum terkait kebakaran hutan dan lahan
	14 Terbatasnya ketersediaan teknologi energi baru terbarukan (EBT)
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Masih rendahnya pemanfaatan dokumen Kartu Identitas Anak (KIA)
	2 Belum tersedianya sistem aplikasi pendaftaran penduduk non permanen
	3 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan belum optimal
	4 Minimnya prasarana fasilitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
	5 Kurangnya bimbingan teknis terkait layanan dan informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi petugas
	6 Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap arti pentingnya dokumen kependudukan
	7 Masih minimnya sinergitas perangkat daerah tentang pemanfaatan data
	8 Masih rendahnya pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD)
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1 Rendahnya kapasitas SDM aparatur desa
	2 Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
	3 Rendahnya kualitas perencanaan desa

Urusan	Masalah
	4 Masih rendahnya kapasitas Pemerintah Desa terhadap pemberdayaan
	5 Rendahnya kualitas SDM yang menangani lembaga masyarakat desa
	6 Kurang optimalnya pendampingan dalam hal penggalian potensi desa
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Rendahnya kesadaran pasangan usia subur (PUS) dalam ber-KB
	2 Kondisi sosial budaya masyarakat yang bersifat patrilineal
	3 Belum optimalnya pembinaan dan sosialisasi terhadap masyarakat dalam pentingnya ber-KB
	4 Belum optimalnya pembinaan terhadap kader IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) dalam program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)
Perhubungan	1 Kondisi dermaga belum sesuai standar pelayanan minimal
	2 Belum tersedianya pedoman penyelenggaraan transportasi lokal (TATRALOK)
	3 Belum optimalnya kapasitas SDM perhubungan
	4 Belum terdapatnya manifes orang dan barang di pelabuhan yang menjadi kewenangan kabupaten
	5 Masih banyak kapal masyarakat yang belum terdaftar dan memiliki ijin usaha
	6 Belum tersedianya angkutan umum pedesaan
	7 Sarana dan prasarana penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor belum terakreditasi
	8 Minimnya fasilitas keselamatan jalan
	9 Belum tersedianya kantong-kantong parkir di fasilitas umum
	10 Belum tersedianya terminal yang sesuai standar
Komunikasi dan Informatika	1 Topografi Kabupaten Samosir yang berbukit dan berlembah sehingga sulit membangun infrastruktur jaringan telekomunikasi
	2 Struktur pemukiman Kabupaten Samosir tidak terpusat
	3 Infrastruktur pusat data yang terstandarisasi belum tersedia
	4 Belum optimalnya kualitas data Perangkat Daerah
	5 Belum optimalnya koordinasi antar Perangkat Daerah terhadap fungsi Kominfo sebagai Wali Data
	6 Belum tersedianya SDM bidang Statistik
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	1 Belum optimalnya manajemen kelembagaan pengurus koperasi
	2 Kurangnya pemahaman anggota mengenai koperasi
	3 Koperasi yang bergerak di sektor riil masih rendah
	4 Rendahnya kapasitas SDM pengelola UMKM
	5 Belum optimalnya pembinaan dan pendampingan UMKM
	6 Rendahnya pemahaman skema bisnis oleh Pelaku Usaha Mikro

Urusan	Masalah
	7 Belum optimalnya pengembangan sentra Usaha Mikro pendukung wisata (kuliner, cinderamata, souvenir, dll)
	8 Minimnya sarana pendukung untuk standarisasi
	9 Terbatasnya akses pasar
Penanaman Modal	1 Rendahnya promosi investasi
	2 Belum optimalnya penggalian potensi investasi
	3 Keterbatasan ketersediaan lahan
	4 Belum tersedianya regulasi yang mengatur tentang pemberian insentif bagi investor
	5 Minimnya fasilitasi kemitraan antara usaha besar dengan UMKM
	6 Belum adanya kerjasama Pemerintah dengan badan usaha (KPBU)
	7 Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan izin
	8 Belum tersedianya fasilitas Mall Pelayanan Publik
Kepemudaan dan Olahraga	1 Masih banyaknya organisasi pemuda yang belum terdaftar
	2 Ketersediaan sarana dan prasarana olahraga masih terbatas
	3 Kurangnya event pertandingan olahraga
Kebudayaan	1 Kurangnya implementasi budaya asli dalam kehidupan sehari-hari
	2 Belum optimalnya penggalian objek pemajuan kebudayaan
	3 Belum optimalnya tata kelola kelembagaan budaya dan adat
	4 Belum optimalnya konservasi terhadap objek budaya
	5 Belum optimalnya pengelolaan objek cagar budaya
Persandian	1 Belum tersedianya SDM bidang keamanan informasi (persandian)
	2 Belum tersedianya perangkat pendukung keamanan informasi (persandian)
Perpustakaan	1 Jumlah koleksi buku yang masih kurang
	2 Kurangnya fasilitas pendukung perpustakaan
	3 Kurangnya kuantitas Pustakawan
	4 Belum optimalnya pemanfaatan perpustakaan
	5 Belum optimalnya fungsi perpustakaan desa
Kearsipan	1 Sistem kearsipan berbasis digital belum terlaksana
	2 Belum tersedianya ruang Depo Arsip
	3 Belum tersedianya Arsiparis di setiap Perangkat Daerah
Urusan Pilihan	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1 Rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pertanian
	2 Sistem pertanian masih konvensional
	3 Kualitas lahan masih rendah
	4 Belum tersedianya kelembagaan ekonomi pertanian
	5 Belum optimalnya pemasaran hasil pertanian
	6 Tingginya alih fungsi lahan pertanian

Urusan	Masalah
	7 Rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perikanan darat
	8 Rendahnya kualitas SDM Perikanan
	9 Rendahnya penerapan teknologi budidaya perikanan
Pariwisata	1 Kurangnya penataan objek wisata
	2 Minimnya fasilitas umum di lokasi objek wisata
	3 Kurang memadainya aksesibilitas menuju objek wisata
	4 Rendahnya fasilitasi pameran dan pemasaran pariwisata
	5 Minimnya peran pemerintah dalam fasilitasi mitra kepariwisataan (HPI, PHRI, ASITA, ASPPI, Asosiasi Homestay, DKS)
	6 Minimnya jumlah event pariwisata skala Nasional dan Internasional
	7 Belum optimalnya usaha pemasaran pariwisata
	8 Rendahnya kualitas pelaku usaha pariwisata
	9 Belum optimalnya dukungan pembinaan sadar wisata bagi masyarakat samosir
	10 Belum optimalnya peran masyarakat dalam kepariwisataan
	11 Belum adanya pendidikan muatan lokal Sapta pesona dan rendahnya minat pendidikan kepariwisataan
Perdagangan	1 Kurangnya kapasitas SDM bidang perdagangan
	2 Kurangnya sinergitas dalam pengawasan terhadap produk subsidi dan pengendalian harga pasar
Perindustrian	1 Belum tersedianya sarana dan prasarana pengemasan untuk produk UMKM/IKM
	2 Minimnya fasilitasi sertifikasi produk IKM
	3 Minimnya fasilitasi peralatan bagi pelaku IKM
	4 Terbatasnya kemampuan dan keterampilan pelaku industri
	5 Minimnya pengawasan di sektor industri
	6 Kurangnya promosi dan jejaring produk IKM
	7 Belum tersedianya pusat jajanan oleh-oleh khas Samosir
	8 Minimnya pemanfaatan teknologi informasi oleh pelaku IKM
	9 Rendahnya hilirisasi produk pertanian
Urusan Penunjang	
Keuangan	1 Belum sempurnanya database pajak daerah
	2 Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak
	3 Belum tersedianya SDM bidang penilai pajak, pemeriksa pajak dan juru sita pajak
	4 Perencanaan dan penganggaran belum berorientasi pada pendapatan pajak dan retribusi daerah
	5 Kurangnya pengawasan dalam pemungutan retribusi daerah

Urusan	Masalah
	6 Sistem pemungutan dan pelaporan belum didukung teknologi informasi
	7 Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung di objek-objek retribusi
	8 Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah dalam peningkatan retribusi daerah
	9 Belum optimalnya aset daerah yang dilegalisasi
	10 Belum optimalnya pengamanan terhadap aset daerah
Kepegawaian, serta Pendidikan dan Pelatihan	1 Kurangnya komitmen dalam melaksanakan sistem merit/NSPK
	2 Masih kuatnya politisasi birokrasi terhadap ASN
	3 Belum tersedianya dokumen Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia
	4 Minimnya perlindungan hukum terhadap ASN
	5 Pemberian kesempatan pengembangan kompetensi sesuai hasil penilaian kinerja belum sepenuhnya diberlakukan
	6 Belum optimalnya penyusunan ANJAB, ABK, EVJAB pada Perangkat Daerah
	7 Masih kurangnya penerapan digitalisasi manajemen ASN
Pengawasan	1 Kurangnya komitmen untuk mematuhi standar dan prosedur SPIP
	2 Keterbatasan sumber daya sarana prasarana, keuangan dan teknologi dapat menghambat kemampuan organisasi untuk mengembangkan dan menerapkan SPIP yang memadai
	3 Belum optimalnya kapasitas tim yang bertanggung jawab mengelola SPIP untuk mencapai tingkat maturitas yang lebih tinggi
	4 Kurangnya komitmen Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Samosir dalam memenuhi rencana aksi MCP KPK
Sekretariat Daerah	1 Kurangnya inovasi dalam sistem pemerintahan
	2 Belum optimalnya reformasi birokrasi
	3 Kurang optimalnya pelayanan publik

Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang bagi suatu daerah di masa yang akan datang. Isu strategis dapat juga dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan maupun yang berasal dari dunia

internasional, kebijakan nasional maupun regional. Dalam penyajiannya, hal terpenting yang diperhatikan adalah isu tersebut dapat memberikan dampak atau pengaruh terhadap suatu daerah di masa mendatang. Isu strategis merupakan salah satu dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan Kabupaten Samosir dalam 20 tahun ke depan.

1. Isu Strategis Internasional

Isu strategis global dijelaskan pada gambar berikut:



Gambar 2.23 Isu Strategis Global Jangka Menengah

Sumber: World Economic Forum, Risk Global Report 2024

Secara detail, isu strategis internasional dapat dijelaskan di bawah ini.

1. Cuaca ekstrim

Cuaca ekstrim yang terjadi berdampak bagi stabilitas pangan di dunia. Kejadian cuaca ekstrim menyebabkan kerusakan lingkungan di berbagai wilayah di mana akan berdampak bagi ketersediaan pangan, kelestarian lingkungan, serta keseimbangan ekosistem dunia.

2. Perubahan ekosistem

Perubahan ekosistem dunia akibat aktivitas manusia, seperti deforestasi, urbanisasi, pertanian, dan penangkapan ikan yang berlebihan merusak dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Eksploitasi terhadap sumber daya alam, seperti Pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan, seperti penebangan hutan menyebabkan

degradasi ekosistem dan hilangnya keanekaragaman hayati.

3. *Biodiversity loss* dan gangguan ekosistem

Peningkatan aktivitas manusia yang semakin intens berdampak pada kerusakan lingkungan di mana akan menyebabkan perubahan ekosistem dunia. Penebangan hutan secara paksa dan pembakaran hutan menyebabkan fauna yang terdapat di wilayah tersebut terancam punah dan kehilangan habitatnya, serta bermigrasi ke tempat lain. Pencemaran air akibat limbah pabrik akan merusak ekosistem perairan karena menyebabkan spesies yang hidup di dalam air keracunan. Ekosistem yang rusak juga berdampak bagi kualitas hidup manusia, seperti kurangnya kualitas udara, sumber air bersih, atau sumber daya pangan.

4. Krisis Sumber Daya Alam

Ketersediaan sumber daya alam semakin berkurang seiring dengan pertumbuhan penduduk yang menyebabkan peningkatan permintaan terhadap sumber daya alam. Permintaan yang semakin meningkat ini tidak diimbangi dengan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan

5. Misinformasi dan disinformasi

Penyebaran informasi di berbagai media, terutama pada media online akan memunculkan berbagai pandangan. Namun, dengan kebebasan tersebut, informasi yang diberikan dapat berupa informasi yang tidak akurat atau informasi yang menipu.

6. Dampak buruk *Artificial Intelligence* (A.I.)

Kehadiran A.I. tidak hanya mempermudah aktivitas manusia atau proses bisnis, namun juga berdampak buruk bagi manusia. Otomasi pekerjaan dan kesenjangan keterampilan muncul akibat perkembangan A.I. yang sangat cepat ini. Permintaan terhadap tenaga kerja berubah akibat kebutuhan terhadap keterampilan digital. Perkembangan A.I. juga berpotensi memberikan informasi palsu, seperti teknologi deepfake yang dapat digunakan untuk membuat konten yang menyesatkan atau menggiring opini.

7. *Involuntary migration*

Konflik yang terjadi seperti perang Ukraina-Rusia, Palestina-Israel, Invasi Irak atau kemiskinan ekstrim di suatu negara memaksa orang untuk meninggalkan tempat tinggalnya untuk menghindari konflik yang terjadi pada negaranya dan mencari kehidupan yang lebih baik di negara lain.

8. *Cyber insecurity*

Cyber insecurity adalah kondisi di mana sistem komputer, jaringan, atau data rentan terhadap ancaman atau serangan. Fenomena ini dapat mengakibatkan kerugian yang fatal baik bagi masyarakat secara luas. Masyarakat menjadi merasa terancam akibat pencurian data pribadi mereka.

9. Polarisasi sosial

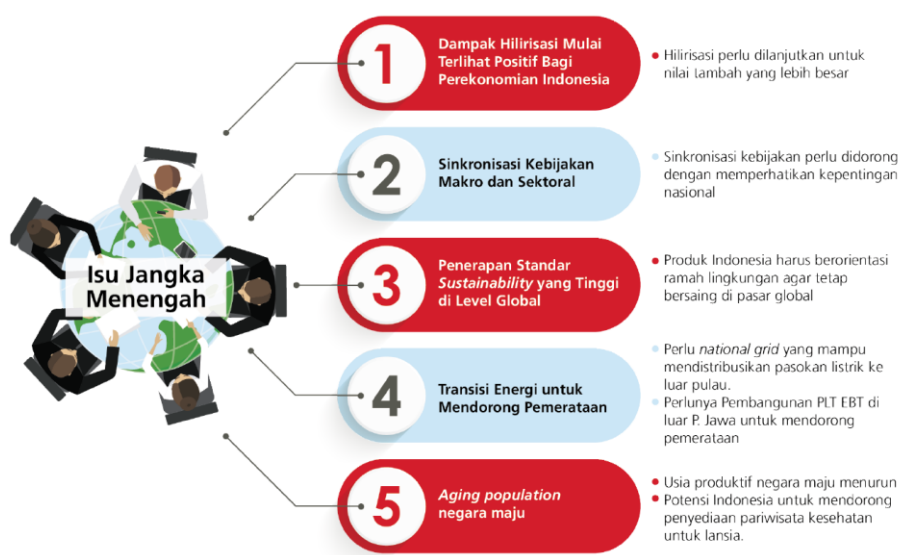
Polarisasi sosial merupakan perpecahan atau pemisahan masyarakat menjadi kelompok-kelompok yang memiliki pandangan, nilai, atau identitas yang sangat berbeda secara politik, sosial, atau budaya. Fenomena ini dapat terjadi di banyak negara dan dapat mempengaruhi stabilitas sosial serta proses demokrasi. Meningkatnya ketegangan antar kelompok sosial dapat memicu konflik atau kekerasan. Hal ini juga dapat menghambat kemampuan masyarakat untuk mencapai konsensus politik dan mengakibatkan pemerintahan yang kurang stabil.

10. Polusi

Polusi bisa berasal dari berbagai sumber dan memiliki dampak yang luas terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Emisi yang dihasilkan transportasi, industri, dan pembakaran bahan bakar fosil menyebabkan penurunan kualitas udara, meningkatnya penyakit pernapasan, dan kontribusi terhadap perubahan iklim. Pembuangan limbah industri, pertanian ke perairan menyebabkan kerusakan bagi ekosistem laut dan pencemaran air minum. Pembuangan limbah ke tanah juga menyebabkan keracunan tanah, pencemaran air tanah, dan degradasi kualitas tanah untuk pertanian.

2. Isu Strategis Nasional

Perumusan isu strategis nasional berdasarkan RPJMN sebagai berikut:



Gambar 2.24
Isu Strategis
Nasional

Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

Uraian isu strategis nasional dijelaskan sebagai berikut:

1. Dampak Hilirisasi

Hilirisasi produk di Indonesia memberikan nilai tambah ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hilirisasi perlu didorong secara merata ke seluruh wilayah untuk meningkatkan perekonomiannya. Pemerintah nasional mendorong investasi berbasis industri manufaktur untuk meningkatkan perekonomian di berbagai wilayah.

2. Sinkronisasi Kebijakan Makro dan Sektoral

Kebijakan-kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah perlu disinkronkan oleh seluruh wilayah agar pembangunan berjalan tepat sasaran dan mencapai visi yang diharapkan. Kondisi daerah tidak homogen sehingga perlu perencanaan yang matang dan sinergi antar daerah agar pembangunan yang dijalankan berjalan sebagaimana mestinya.

3. Sinkronisasi Kebijakan Makro dan Sektoral

Dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka perlu meningkatkan standar produk-produk yang dihasilkan. Persaingan di pasar global menuntut Indonesia untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkannya agar dapat bersaing dengan negara-negara lain. Hal ini diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan daya saing di mata dunia internasional. Hal ini harus dipersiapkan agar Indonesia berhasil meningkatkan statusnya menjadi negara maju

4. Transisi Energi untuk Mendorong Pemerataan

Bentuk dukungan terhadap ekonomi hijau adalah dengan beradaptasi menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT). Tujuannya adalah untuk mengurangi ketimpangan dalam akses energi, memajukan ekonomi, dan meningkatkan lingkungan yang berkelanjutan.

5. Negara Maju

Beberapa negara, seperti Jepang, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan negara-negara maju pada umumnya sedang mengalami perlambatan pertumbuhan penduduk. Hal ini berdampak pada berkurangnya populasi penduduk usia produktif di negara tersebut sehingga penduduk usia produktif semakin banyak menanggung penduduk usia lansia. Hal ini dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan kualitas sektor kesehatan untuk menjadi pariwisata kesehatan bagi penduduk usia lansia.

3. Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara

Isu-isu strategis Sumatera Utara yang diharapkan dapat teratasi dalam pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029 diuraikan sebagai berikut:

1. Pembangunan sarana dan prasarana yang merata dan berkeadilan

Pembangunan sarana dan prasarana yang belum memadai masih menjadi persoalan pembangunan yang perlu direspon ke depan. Luasan permukiman kumuh, rumah tangga dengan akses air minum layak, rumah tangga dengan akses sanitasi layak infrastruktur SDA dalam kondisi baik, penanganan banjir merupakan isu-isu penyediaan infrastruktur yang perlu direspon. Cakupan rumah tangga yang menempati hunian layak yang terpadu dengan akses air minum, sanitasi dan penanganan persampahan juga masih cukup rendah. Selain itu, kondisi kawasan perkotaan di Provinsi Sumatera Utara menghadapi perkotaan arah perkembangan yang tidak terstruktur (*urban sprawl*). Kelayakan dan keandalan perumahan yang dibangun secara swadaya juga perlu menjadi perhatian mengingat tingginya risiko bencana di Provinsi Sumatera Utara.

Layanan ketenagalistrikan Provinsi Sumatera Utara masih kekurangan pasokan daya atau beberapa sistem, atau cadangan di pembangkit eksisting yang tidak efisien serta kekurangan pasokan daya untuk daerah perbatasan serta pulau terluar. Penyediaan tenaga listrik di

Wilayah Sumatera masih belum menjangkau seluruh penduduk secara berkualitas. Fleksibilitas operasi masih belum optimal terutama saat kondisi di luar waktu beban puncak sebagai akibat dari minimum operasi PLTG. Infrastruktur ketenagalistrikan terdiri dari Sistem Interkoneksi Sumatera dan sistem-sistem yang terisolasi. Sistem transmisi ekstra tinggi belum tersambung untuk mengevakuasi daya energi yang tersebar di seluruh wilayah. Konsumen tenaga listrik masih didominasi oleh rumah tangga.

Jangkauan jaringan seluler di Provinsi Sumatera Utara belum diimbangi dengan pemanfaatannya untuk mendukung kegiatan produktif (masih terbatas untuk penggunaan telekomunikasi). Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan komunikasi di Provinsi Sumatera Utara sudah cukup merata dan hampir menjangkau seluruh area wilayah pemukiman dan pusat-pusat pertumbuhan.

Provinsi Sumatera Utara juga memiliki tantangan dalam penyediaan pelayanan dasar, yaitu belum terpenuhi dan meratanya penyediaan sarana dan prasarana dasar di seluruh daerah, khususnya di daerah afirmasi 3T. Permasalahan yang dihadapi di antaranya penyediaan air bersih, irigasi, banjir, dan abrasi. Jumlah kejadian bencana banjir masih tinggi terutama di Metropolitan Medan, pulau-pulau kecil di Provinsi Sumatera Utara juga terdampak risiko abrasi akibat perubahan iklim tersebut.

2. Pembangunan antar daerah serta desa-kota

Keterkaitan antar daerah serta desa-kota di Provinsi Sumatera Utara belum mencerminkan keterkaitan tidak bisa mengabaikan rantai pasok, sehingga wilayah kota dan kawasan-kawasan perlu memiliki rantai nilai dengan wilayah-wilayah lain untuk mendorong perekonomian yang merata. Pembangunan wilayah Metropolitan Medan (Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Karo) masih menghadapi permukiman kumuh seperti air bersih dan sanitasi, penurunan kualitas lingkungan hidup, dan infrastruktur transportasi massal yang belum mendukung mobilitas penduduk. Permasalahan ini muncul sebagai akibat dari urbanisasi yang tidak terkendali dan pertumbuhan ekonomi yang berpusat di inti bisnis dan perdagangan. wilayah pertumbuhan ekonomi yang pesat menjadi pull factor manusia bermigrasi ke wilayah dengan ekonomi yang relatif baik.

3. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Berkelanjutan

Dalam upaya pengelolaan SDA berkelanjutan menjadi perhatian terhadap pengelolaan investasi berbasis lahan yang belum seluruhnya mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik terutama kelestarian lingkungan dan menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat dalam jangka panjang. Pengoptimalan pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup berkelanjutan juga berkaitan dengan: adaptasi perubahan iklim; pengawasan terhadap deforestasi dan kebakaran hutan dan lahan dan harmonisasi antara manusia dengan satwa liar; akses dan partisipasi masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok marginal; dukungan dalam mewujudkan kelestarian dan kesejahteraan yang rendah; belum maksimalnya akses seluruh masyarakat terhadap energi, dan peningkatan pemanfaatan sumber energi terbarukan.

4. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing

Transisi Demografi dihadapkan pada pembangunan kesehatan dengan meningkatnya mobilitas penduduk dan urbanisasi serta perilaku hidup tidak sehat, sehingga meningkatkan beban penyakit menular dan tidak menular termasuk permasalahan kesehatan penduduk lanjut usia dan kesehatan jiwa. Pola konsumsi tidak sehat menyebabkan kekurangan gizi mikro dan makro serta kelebihan gizi, serta adanya ketimpangan akses terhadap lingkungan sehat, fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan serta perlu peningkatan dan inovasi pembiayaan kesehatan. selain itu Kualitas pendidikan juga masih rendah yang disebabkan oleh sarana-prasarana pendidikan dan fasilitas pembelajaran yang belum memadai, kualitas, kuantitas dan distribusi guru masih terbatas dengan sedikitnya guru yang memiliki sertifikat pendidik pada semua jenjang pendidikan serta pendidikan non formal yang berkualitas yang belum memadai, kualifikasi pendidikan yang masih rendah berdampak pada keterserapan tenaga kerja.

Selanjutnya masih rendahnya pemahaman manfaat jaminan sosial yang tercermin dari kepesertaan jaminan sosial dan tingkat kepatuhan pembayaran iuran jaminan sosial masih rendah, sementara itu bantuan sosial belum sepenuhnya terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi hal ini antara lain disebabkan pengguna data masih terfragmentasi dan belum termutakhirkan secara sistematis sehingga kesalahan sasaran masih cukup tinggi, daya ungkit bantuan sosial juga

masih rendah dan lingkungan yang belum inklusif terhadap kelompok rentan, termasuk terhadap penyandang disabilitas dan Lanjut Usia (Lansia).

5. Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Infrastruktur

Infrastruktur yang berkaitan dengan konektivitas dan sistem logistik berpotensi menekan aktivitas ekonomi berupa mahalnya biaya logistik dari wilayah penghasil komoditas menuju lokasi pengolahan dan pemasaran. Hal tersebut perlu diupayakan dengan upaya meningkatkan kelancaran arus barang, jasa, dan informasi, menurunkan biaya logistik, mengurangi ekonomi biaya tinggi, mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah, dan mewujudkan sinergi antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

Aksesibilitas daerah juga dapat ditinjau dari ketersediaan fasilitas perhubungan yang meliputi darat, laut dan udara. Perhubungan darat di dibagi atas beberapa bagian jaringan transportasi seperti jaringan angkutan jalan raya, jaringan jalur kereta api, jaringan angkutan sungai dan danau, dan jaringan angkutan penyeberangan.

6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel

Provinsi Sumatera Utara masih menghadapi persoalan pelayanan publik yang belum optimal kepada masyarakat. Kedepannya masih perlu dilakukan reformasi birokrasi dan peningkatan SDM yang profesional dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia, untuk perlu mendapatkan perhatian untuk dioptimalkan. Isu-isu berkaitan dengan tata kelola pemerintahan lainnya ialah berkaitan dengan optimalisasi ketersediaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) ke seluruh wilayah dan ke semua lapisan masyarakat; transparansi dan akuntabilitas guna mewujudkan pelayanan publik yang inklusif; perlunya optimalisasi manajemen kepegawaian, terutama setelah terjadinya restrukturisasi kelembagaan dan juga rekrutmen yang efektif dan efisien sehingga menjadi birokrasi yang ramping miskin struktur akan tetapi kaya fungsi berlandaskan merit system; dan optimalisasi implementasi reformasi birokrasi melalui penguatan pengawasan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

4. Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan dalam KLHS RPJMD Kabupaten Samosir

Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan RPJMD Kabupaten Samosir, dilakukan analisis dan sintesa isu-isu pembangunan berkelanjutan. Melalui metode *crosstab* dapat dilihat hubungan keterkaitan isu utama berdasarkan capaian TPB RPJMD dengan isu strategis RPJPN, isu kondisi umum wilayah, isu pokok RPPLH maupun isu paling strategis KLHS RTRW. Berdasarkan analisis tersebut, maka isu strategis Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Samosir adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kesejahteraan masyarakat;
2. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
3. Belum optimalnya produktivitas tenaga kerja dan perekonomian didominasi oleh sektor tradisional; dan
4. Pembangunan wilayah dan pembangunan sarana dan prasarana yang belum merata.

5. Isu Strategis Kabupaten Samosir

Isu Strategis Kabupaten Samosir diidentifikasi dan dirumuskan berdasarkan Isu Global, Isu Nasional, Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara, Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan dalam KLHS RPJMD Kabupaten Samosir dan permasalahan yang dihadapi Kabupaten Samosir sampai dengan tahun 2024 serta tantangan yang mungkin dihadapi 5 (lima) tahun yang akan datang sebagaimana diperlihatkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.77 Penetapan Isu Strategis Kabupaten Samosir

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
	Belum optimalnya kesejahteraan masyarakat	Belum optimalnya kesejahteraan masyarakat		Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Disparitas Kualitas Sumber Daya Manusia dan Brain Drain	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Dominasi sektor pertanian dalam pembentuk perekonomian Daerah	Belum optimalnya produktivitas tenaga kerja dan perekonomian yang masih didominasi oleh sektor pertanian	Belum optimalnya produktivitas tenaga kerja dan perekonomian didominasi oleh sektor tradisional	Ketidakpastian Ekonomi dan Perdagangan Global	- Geo Politik dan Geo Ekonomi - Rendahnya Produktivitas	Dominasi Ekonomi Berbasis Komoditas Primer	Peningkatan Kontribusi Koperasi dan UMKM Terhadap Perekonomian
Kekayaan alam dan budaya Samosir yang menjadi potensi pengembangan pariwisata serta ditetapkan Taman Bumi Kaldera Toba menjadi UNESCO Global Geopark						Pengelolaan Potensi Pariwisata yang Berkelanjutan
	Belum optimalnya pengelolaan SDA dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	- Cuaca ekstrim - Perubahan ekosistem - Biodiversity loss dan gangguan ekosistem - Krisis Sumber Daya Alam - Involuntary migration - Polusi	- Dampak Hilirisasi - Negara Maju	Degradasi Lingkungan yang Semakin Meningkat	Pelestarian dan Konservasi Danau Toba serta Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan
	Pembangunan wilayah dan pembangunan sarana dan prasarana yang belum merata	Pembangunan wilayah dan pembangunan sarana dan prasarana yang belum merata		Transisi Energi untuk Mendorong Pemerataan	Pembangunan sarana dan prasarana yang merata dan berkeadilan	
					Keterbatasan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah	
					Pembangunan antar daerah serta desa-kota	

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
	Tata kelola pemerintahan yang belum optimal		- Polarisasi sosial - Misinformasi dan disinformasi - Cyber insecurity - Dampak buruk Artificial Intelligence (AI)	Sinkronisasi Kebijakan Makro dan Sektoral	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif

Isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Samosir adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan sehingga kualitasnya harus terus menjadi prioritas. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia mempengaruhi nilai produktivitas tenaga kerja serta tingkat pengangguran terbuka sehingga peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dilakukan melalui sektor pendidikan, kesehatan serta perekonomiannya.

2. Peningkatan Produktivitas dan Hilirisasi Sektor Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor yang berkontribusi besar di perekonomian Kabupaten Samosir. Saat ini, industri menjadi penggerak ekonomi modern yang menjadi pilihan untuk meningkatkan nilai tambah terhadap hasil-hasil pertanian. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan nilai tambah melalui industri pengolahan yang berbasis pertanian. Industri pengolahan dapat menjadi salah satu sektor yang berkontribusi besar pada PDRB. Di samping itu, dapat mendukung peningkatan produktivitas petani yang merupakan lapangan usaha dominan.

3. Pengelolaan Potensi Pariwisata yang Berkelanjutan

Pariwisata merupakan sektor prioritas bagi Kabupaten Samosir, diharapkan sektor ini dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian. Untuk mencapai hal ini diperlukan peningkatan pemanfaatan potensi pariwisata melalui konsep 6A yaitu *Attraction, Accessibility, Amenities, Ancillary Service, Activities dan Available Package* hingga penerapan pariwisata dapat berkelanjutan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.

4. Peningkatan Kontribusi Koperasi dan UMKM Terhadap Perekonomian

Tidak adanya industri berskala besar di Kabupaten Samosir menjadikan usaha kecil (UMKM) dan koperasi menjadi opsi utama dalam upaya peningkatan perekonomian sehingga pelaku UMKM dan koperasi perlu ditingkatkan kapasitasnya serta perlu didampingi dalam pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam berwirausaha.

5. Pelestarian dan Konservasi Danau Toba serta Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan

Danau Toba memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat

Samosir, oleh karena itu keberlangsungannya harus terus dijaga dipelihara. Selain itu, pemerataan infrastruktur di Kabupaten Samosir masih menjadi tantangan hingga masa yang akan datang. Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Samosir juga perlu memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan sehingga tepat sasaran. Pembangunan infrastruktur pada jangka menengah harus dimulai dengan menerapkan prinsip pembangunan yang ramah lingkungan agar kelestarian lingkungan dan sumber daya dapat terjaga keberlangsungannya.

6. Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif

Di tengah transformasi digital yang sangat aktif dan masif, diperlukan tata kelola pemerintahan yang mampu beradaptasi terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi. Selain fleksibel, sistem tata kelola pemerintahan juga harus responsif terhadap perubahan-perubahan tersebut sehingga dibutuhkan dasar yang kuat dan upaya inovasi yang berkelanjutan untuk menunjang tata kelola pemerintahan yang responsif.

Sinkronisasi Isu strategis KLHS dan RPJMD ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.78 Sinkronisasi Isu strategis KLHS dan RPJMD Kabupaten Samosir

Isu Strategis RPJMD	Isu Strategis KLHS
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Belum Optimalnya Kesejahteraan Masyarakat
Peningkatan Produktivitas dan Hilirisasi Sektor Pertanian	- Belum Optimalnya Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup - Belum Optimalnya Produktivitas Tenaga Kerja dan Perekonomian Didominasi oleh Sektor Tradisional
Pengelolaan Potensi Pariwisata yang Berkelanjutan	
Peningkatan Kontribusi Koperasi dan UMKM Terhadap Perekonomian	
Pelestarian dan Konservasi Danau Toba serta Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	Pembangunan Wilayah dan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Belum Merata
Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif	

Sumber: KLHS RPJMD, 2025

Bab III

Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Samosir Unggul,
Inklusif dan
Berkelanjutan



3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Samosir

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah. Visi harus mampu menjelaskan menunjukkan gambaran masa depan yang ideal bagi masyarakat atau daerah dan merupakan suatu pernyataan umum yang menjadi dasar bagi semua elemen dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan daerah (Permendagri No. 86 Tahun 2017). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi, serta isu-isu strategis, maka visi Kabupaten Samosir Tahun 2025-2029 dapat dirumuskan, yaitu:



**Samosir Unggul, Inklusif dan
Berkelanjutan**

Visi

Visi ini memiliki makna yang terkandung didalamnya sudah mewakili dan menggambarkan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir di akhir periode RPJMD ini. Secara lebih detail, makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijelaskan berikut ini.

Tabel 3.1 Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2029

Visi	Penjelasan
Unggul	Berdaya saing melalui SDM yang berkualitas dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi SDA untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berbudaya luhur.
Inklusif	Memberikan ruang partisipasi seluas-luasnya dalam pembangunan dan pelayanan publik yang berkeadilan.
Berkelanjutan	Pemenuhan kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan secara seimbang.

Dalam rangka mewujudkan visi **Samosir Unggul, Inklusif dan Berkelanjutan** dan mendukung Program Prioritas Nasional untuk pencapaian sasaran utama Pembangunan Kabupaten Samosir yaitu:

Tabel 3.2 Sasaran Utama Pembangunan RPJPD Kabupaten Samosir Tahap I (2025-2029)

Sasaran Utama Pembangunan	Indikator	Satuan	Baseline 2025	2029
Peningkatan pendapatan per kapita	PBRB per kapita	juta rp.	43,97	79,76
	Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	0,51	1,5-3,6
Pengentasan kemiskinan dan Ketimpangan	Tingkat Kemiskinan	%	10,90-10,50	7,90-7,50
	Rasio Gini	poin	0,238-0,236	0,230-0,228
	Kontribusi PDRB (ADHB) terhadap PDRB Provinsi	%	0,53	0,53
	Pertumbuhan ekonomi	%	5,10-5,20	6,80-7,20

Sasaran Utama Pembangunan	Indikator	Satuan	Baseline 2025	2029
Peran dan Posisi Kab. Samosir di Tingkat Nasional	Indeks Inovasi Daerah	poin	50,22-57,75	60,05
	Indeks Daya Saing Daerah	poin	3,37	3,75
Peningkatan Daya Saing SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	poin	75,00-75,30	80,00-80,40
Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Penurunan Intensitas GRK	ton CO2eq	124.353,23	209.615,24
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	poin	77,37	78,06

Kemudian, misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor strategis, baik internal maupun eksternal (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan) yang dihadapi. Misi disusun untuk memperjelas langkah yang harus dilakukan dalam rangka mencapai visi.

Sesuai dengan Visi RPJMD ini, kemudian diturunkan kedalam 3 Misi yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing
2. Memantapkan Kemandirian Ekonomi Kerakyatan yang Berkelanjutan
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Responsif, Berintegritas, dan Adaptif

Makna yang terkandung dalam misi tersebut dijabarkan sebagaimana dijelaskan pada tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3 Makna Misi RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2029

Misi	Penjelasan
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui misi ini, komitmen dilakukan dalam membangun masyarakat yang sehat, cerdas, terampil, produktif, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Upaya ini dilaksanakan melalui peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan, kesehatan, dan pelatihan kerja yang merata di seluruh wilayah. Fokus utama diarahkan pada penguatan pendidikan karakter, peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan, serta pengembangan keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Selain itu, kualitas layanan kesehatan terus diperbaiki untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan produktif, diantaranya melalui Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau, penguatan upaya promotif dan preventif, serta perbaikan gizi masyarakat terutama bagi ibu hamil, balita, dan remaja. Penurunan angka stunting, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta peningkatan cakupan imunisasi menjadi prioritas utama untuk mewujudkan masyarakat yang sehat secara fisik, mental, dan sosial. Program pemberdayaan pemuda, perempuan, serta kelompok rentan juga ditingkatkan agar seluruh elemen masyarakat dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah.
Memantapkan Kemandirian Ekonomi Kerakyatan yang Berkelanjutan Berbasis Pertanian, Pariwisata didukung Infrastruktur Berkualitas	Penguatan Kemandirian Ekonomi yang didukung digitalisasi, melalui Penerapan teknologi pertanian organik modern, pengembangan kawasan pertanian terpadu sebagai bagian dari Tapanuli <i>Agriculture Highland</i>, dan pengembangan pariwisata Danau Toba sebagai kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif yang berasas 6A (<i>Attraction, Amenities, Ancillary, Activity, Accessibilities</i> dan <i>Available Package</i>) serta penerapan ekonomi hijau yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur berkualitas.
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Responsif,	Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) sebagai fondasi utama dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Misi ini

Misi	Penjelasan
Berintegritas dan Adaptif	diarahkan untuk membangun birokrasi yang profesional, akuntabel, efisien, dan mampu menjawab dinamika serta tantangan zaman secara cepat dan tepat. Pemerintahan yang efektif diwujudkan melalui perencanaan dan pelaksanaan program yang berbasis data, hasil evaluasi, serta mengedepankan kinerja. Pemerintahan yang responsif dicerminkan melalui pelayanan publik yang cepat, tanggap terhadap aspirasi masyarakat, serta terbuka terhadap masukan dan pengaduan. Integritas dijaga melalui penguatan sistem pengawasan, pencegahan korupsi, serta pembangunan budaya kerja yang jujur dan bertanggung jawab. Sedangkan adaptivitas ditumbuhkan dengan penerapan teknologi informasi, inovasi layanan publik, dan peningkatan kapasitas aparatur untuk menghadapi perubahan sosial dan kemajuan digital.

Sinkronisasi RPJMD dan RPJPD

a. Sinkronisasi Visi Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Samosir

Visi dan misi pembangunan jangka panjang dirumuskan melalui RPJPD dan dijabarkan untuk pembangunan jangka menengah melalui RPJMD. Visi dan misi digunakan untuk menjelaskan gambaran umum tentang apa yang akan diwujudkan dalam RPJPD serta kerangka umum kebijakan pembangunan untuk pencapaiannya. Visi dan misi RPJPD harus menggambarkan jangkauan kebijakan yang lebih luas dan secara konsisten dijabarkan dalam arah kebijakan pembangunan jangka menengah.

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Visi Kabupaten Samosir Tahun 2025-2045 disusun sejalan dengan Visi Dengan memperhatikan kondisi capaian masa lalu, proyeksi pembangunan, pertimbangan akan hasil analisa terhadap permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah, pertimbangan akan modal dasar yang

dimiliki serta mendukung Visi Indonesia Emas 2045 dan RPJPD Provinsi Sumatera Utara 2025 – 2045 maka Pemerintah Kabupaten Samosir bersama seluruh pemangku kepentingan menetapkan visi

“Samosir Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”

Visi pembangunan “Samosir Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan” merupakan kondisi yang diharapkan dalam upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Maju

Pada tahun 2045, penduduk Kabupaten Samosir memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan mengalami peningkatan kesejahteraan yang pesat. Seiring dengan peningkatan pendapatan, terjadi penurunan dalam tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Kondisi Maju ditandai dengan ketersediaan infrastruktur pelayanan publik dengan kualitas yang semakin meningkat dan tersedia secara merata di seluruh wilayah kabupaten yang menjadi pendukung dalam peningkatan produksi dan produktivitas daerah terutama pada sektor pertanian dan pariwisata dan ekonomi kreatif. Peningkatan kesejahteraan juga didorong oleh peran maksimal pusat-pusat pertumbuhan daerah. Dari sisi tata kelola pemerintahan, pemerintah daerah mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan aparatur yang kompeten dan berintegritas disertai kemandirian daerah yang semakin meningkat.

Sejahtera

Kondisi di mana kondisi sumber daya manusia yang inovatif dan mampu menghadapi berbagai tantangan, masyarakat mudah mendapatkan bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Dengan pemerataan infrastruktur semua kegiatan usaha berjalan dengan baik di semua wilayah, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, mendapat pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, terjangkau secara inklusif, sehingga masyarakat Kabupaten Samosir hidup aman, tenteram, sehat jasmani dan rohani.

Berkelanjutan

Kabupaten Samosir yang berkontribusi dalam menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap kelestarian lingkungan

dan kehidupan sosial masyarakat, dengan tata kelola yang baik untuk memastikan keberlangsungan kehidupan saat ini dan generasi mendatang.

Dua aspek dalam Visi Indonesia Emas, yaitu Maju dan Berkelanjutan merupakan aspek utama yang menjadi dasar dari penyusunan Visi RPJPD Kabupaten Samosir 2045. Dalam RPJPN, kedua aspek ini dijelaskan sebagai berikut

Maju

Pada tahun 2045, Indonesia sebagai negara maju, perekonomiannya mencapai posisi nomor lima terbesar dunia, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Indonesia menjadi negara berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil, sehingga memiliki daya saing yang tinggi di kancah domestik dan global, ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat. Peran Indonesia semakin penting dalam berbagai forum internasional.

Berkelanjutan

Sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik. Kualitas hidup masyarakat Indonesia ditandai dengan kehidupan yang sejahtera secara merata, kesehatan dan pendidikan yang prima, serta lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan permukiman hidup yang layak dan nyaman, bebas polusi udara, air, suara dan sampah, serta kondisi hutan, sungai, danau, dan laut beserta isinya terjaga dengan baik.

Visi pembangunan Provinsi Sumatera Utara 2045 sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara 2025-2045 adalah **Sumatera Utara Unggul, Maju, dan Berkelanjutan**. Visi ini diarahkan untuk mendukung Visi Indonesia Emas 2045. Dalam RPJPD Provinsi Sumatera Utara, visi ini dijelaskan sebagai berikut

Unggul

Sumatera Utara yang berperan penting dalam tataran nasional dan global, memiliki sumber daya manusia yang tangguh dengan keberagaman budaya yang harmonis, menjadi pusat bioindustri dan pariwisata bertaraf global.

Maju

Pada tahun 2045, Sumatera Utara menjadi Provinsi maju dengan posisi empat besar dalam perekonomian nasional, sejahtera, merata dan berkeadilan sosial, didukung infrastruktur modern dan pelayanan birokrasi kelas dunia berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya lokal. Sumatera Utara menjadi provinsi berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil sehingga memiliki daya saing yang tinggi di kancah domestik dan global, ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global. Kemajuan Sumatera Utara terlihat dari lancarnya akses dan konektivitas antar wilayah, terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan publik, berkurangnya kesenjangan antar wilayah dan antar strata pendapatan masyarakat, dan berkembangnya wilayah metropolitan.

Berkelanjutan

Sumatera Utara yang berkontribusi dalam menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap kelestarian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat, dengan tata kelola yang baik untuk memastikan keberlangsungan kehidupan saat ini dan generasi mendatang. Sementara itu, visi RPJPD Kabupaten Samosir Tahun 205-2045 sebagai berikut:

Samosir Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan

Visi ini merupakan kondisi yang diharapkan dalam upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Maju

Pada tahun 2045, penduduk Kabupaten Samosir memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan mengalami peningkatan kesejahteraan yang pesat. Seiring dengan peningkatan pendapatan, terjadi penurunan dalam tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Kondisi Maju ditandai dengan ketersediaan infrastruktur pelayanan publik dengan kualitas yang semakin meningkat dan tersedia secara merata di seluruh wilayah kabupaten yang menjadi pendukung dalam peningkatan produksi dan produktivitas daerah terutama pada sektor pertanian dan pariwisata dan ekonomi kreatif. Peningkatan kesejahteraan juga didorong oleh peran maksimal pusat-pusat pertumbuhan daerah. Dari sisi tata kelola

pemerintahan, pemerintah daerah mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan aparatur yang kompeten dan berintegritas disertai kemandirian daerah yang semakin meningkat.

Sejahtera

Kondisi di mana kondisi sumber daya manusia yang inovatif dan mampu menghadapi berbagai tantangan, masyarakat mudah mendapatkan bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Dengan pemerataan infrastruktur semua kegiatan usaha berjalan dengan baik di semua wilayah, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, mendapat pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, terjangkau secara inklusif, sehingga masyarakat Kabupaten Samosir hidup aman, tenteram, sehat jasmani dan rohani.

Berkelanjutan

Kabupaten Samosir yang berkontribusi dalam menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap kelestarian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat, dengan tata kelola yang baik untuk memastikan keberlangsungan kehidupan saat ini dan generasi mendatang.

b. Penyelarasan RPJMD dan RPJPD Kabupaten Samosir, RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2025–2029 disusun dengan mengacu pada RPJPD Kabupaten Samosir Tahun 2025–2045 dan prioritas pembangunan Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Utara dalam RPJMD Provinsi Tahun 2025–2029. Penyelarasan ini bertujuan untuk menciptakan efektivitas pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah melalui harmonisasi program, kegiatan, dan sasaran pembangunan lintas wilayah dan lintas sektor.

Fokus penyelarasan diarahkan pada penguatan konektivitas antarwilayah, pengembangan pariwisata berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber

daya manusia, pemantapan tata kelola pemerintahan, serta percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berbasis potensi lokal. Selain itu, isu-isu strategis seperti pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, pelestarian lingkungan, dan pembangunan infrastruktur dasar juga menjadi perhatian utama yang diselaraskan dalam dokumen perencanaan.

Melalui penyelarasan yang konsisten dan berorientasi pada hasil, Kabupaten Samosir berkomitmen untuk berperan aktif dalam mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045, sekaligus memperkuat posisi Kabupaten Samosir sebagai kawasan strategis nasional di wilayah Danau Toba yang memiliki peran penting dalam pembangunan regional Sumatera Utara.

RPJMD Tahun 2025-2029 ini merupakan implementasi tahap pertama RPJPD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2045. Untuk itu, dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dirumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPD Tahun 2025-2045 (Tabel 3.4).

Tabel 3.4 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029 dengan Misi dan Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045

RPJMD 2025-2029			RPJPD 2025-2045	
Visi: Samosir Unggul, Inklusif danBerkelanjutan			Visi: Samosir Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan	
Misi	Tujuan	Sasaran	Misi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Meningkatkan derajat hidup masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Transformasi pembangunan manusia dan perlindungan sosial	Mewujudkan transformasi sosial yakni dengan penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan untuk manusia produktif, penyuluhan gizi dan imunisasi untuk mencegah stunting, perlindungan sosial. Semuanya dalam rangka peningkatan SDM yang produktif. Penerapan nilai adat dan budaya, Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan peran perempuan dan anak, ketangguhan masyarakat dalam menghadapi perubahan dan bencana serta penurunan angka kemiskinan
		Meningkatnya kualitas pendidikan		
		Meningkatnya pendapatan masyarakat		
		Meningkatnya ketahanan pangan		
		Meningkatnya ketahanan sosial		
Memantapkan Kemandirian Ekonomi Kerakyatan yang Berkelanjutan	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Meningkatnya PDRB sektor unggulan	Mewujudkan keamanan dan ketangguhan daerah serta menjaga	Transformasi keamanan dan ketangguhan daerah serta menjaga stabilitas ekonomi makro dengan fokus wawasan kebangsaan dan idiologi Pancasila, penguatan komunikasi publik yang merata, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi. Mengurangi kriminalitas

Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

RPJMD 2025-2029			RPJPD 2025-2045	
Visi: Samosir Unggul, Inklusif danBerkelanjutan			Visi: Samosir Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan	
Misi	Tujuan	Sasaran	Misi	Arah Kebijakan
Berbasis Pertanian, Pariwisata didukung Infrastruktur Berkualitas		Meningkatnya produktivitas Koperasi, UMK dan IKM dalam perekonomian daerah	stabilitas ekonomi makro	masyarakat dengan lebih adaptif dan bersinergi dengan lembaga keamanan. Intensifikasi pendapatan pajak dan retribusi daerah serta penguatan pengendalian inflasi daerah.
	Meningkatkan infrastruktur berkualitas	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	Transformasi ekonomi yang berdaya saing	Mewujudkan transformasi ekonomi dengan penguatan sentra produksi pangan dan upaya proses hilirisasi produksi pertanian, pengelolaan dan pengembangan objek wisata serta peningkatan SDM tenaga kerja, pertumbuhan koperasi, UKM dan IKM. Implementasi pembangunan sarana prasarana kewilayahan dengan pemenuhan sarana prasarana dasar (air bersih, sanitasi, rumah layak huni, energi listrik) serta infrastruktur penunjang perekonomian, Peningkatan aksesibilitas dan teknologi informasi.

Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

RPJMD 2025-2029			RPJPD 2025-2045	
Visi: Samosir Unggul, Inklusif danBerkelanjutan			Visi: Samosir Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan	
Misi	Tujuan	Sasaran	Misi	Arah Kebijakan
		Meningkatnya kualitas ekologi	Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi	Perwujudan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan menerapkan nilai budaya dan agama dalam lingkungan masyarakat, nilai ketahanan keluarga berbasis pengarusutamaan gender, sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup, pengendalian pemanfaatan ruang, sarana dan prasarana pengelolaan sampah di setiap wilayah yang terintegrasi, Transisi energi difokuskan pada transformasi dan pemanfaatan EBT, penguatan inovasi dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta pembangunan sarana dan prasarana pencegahan bencana.
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Responsif, Berintegritas dan Adaptif	Meningkatkan kualitas kinerja birokrasi pemerintahan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif	Transformasi tata kelola pemerintahan	Dalam mewujudkan transformasi tata kelola di Kabupaten Samosir yakni perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN berbasis merit, kebijakan berbasis bukti, penerapan manajemen resiko perencanaan dan peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Kemudian, untuk mewujudkan pembangunan terpadu, efektif dan berkelanjutan yang dicapai melalui sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi antara Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, berikut disajikan keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Samosir dengan Dokumen RPJPD Kabupaten Samosir, RPJMD Provinsi Sumatera Utara, dan RPJMN pada tabel 3.5 di bawah ini.

Tabel 3.5 Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Samosir dengan Dokumen RPJPD Kabupaten Samosir, RPJMD Provinsi Sumatera Utara, dan RPJMN

RPJPD Kabupaten Samosir	RPJMD Kabupaten Samosir	RPJMD Provinsi Sumatera Utara	RPJMN
Misi 1 Transformasi Pembangunan Manusia dan Perlindungan Sosial	Misi 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Misi 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Asta Cita 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
Misi 5. Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi		Misi 5. Memperkuat Ketahanan Sosial dan Budaya untuk Membangun Masyarakat Sumut yang Tangguh	Asta Cita 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olah Raga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Kaum Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas.
			Asta Cita 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur

Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah			
RPJPD Kabupaten Samosir	RPJMD Kabupaten Samosir	RPJMD Provinsi Sumatera Utara	RPJMN
Misi 4 Mewujudkan keamanan dan ketangguhan daerah serta menjaga stabilitas ekonomi makro	Misi 2. Memantapkan Kemandirian Ekonomi Kerakyatan yang Berkelanjutan Berbasis Pertanian, Pariwisata didukung Infrastruktur Berkualitas	Misi 2. Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah	Asta Cita 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemadirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru.
Misi 2. Transformasi Ekonomi yang Berdaya Saing		Misi 4. Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang Berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan	Asta Cita 3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
Misi 6. Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan adil			Asta Cita 5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
Misi 7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Merata dan Ramah Lingkungan			Asta Cita 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
Misi 8. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan			
Misi 3. Transformasi Tata Kelola Pemerintah	Misi 3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Responsif, Berintegritas dan Adaptif	Misi 3. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Asta Cita 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyeludupan.

Selanjutnya, dukungan Kabupaten Samosir dalam mencapai Indikator Makro Sasaran Pembangunan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 dan RPJMN Tahun 2025-2029 ditunjukkan pada tabel 3.6 berikut.

Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel 3.6 Target Indikator Makro Kabupaten Samosir

No	Indikator	Capaian 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Kondisi akhir
1	Laju Pertumbuhan ekonomi	5,02	5,10-5,20	5,32-5,64	5,64-5,98	5,98-6,75	6,80-7,20	7,21-7,40	7,21-7,40
2	PDRB per kapita	42,64	43,97	57,49	64,91	72,34	79,76	87,18	87,18
3	Kontribusi PDRB Kabupaten	0,532	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
4	Angka Kemiskinan	11,63	10,90-10,50	10,49-10,01	10,00-9,50	9,49-8,00	7,90-7,50	7,49-7,01	7,49-7,01
5	Rasio Gini	0,238	0,238-0,236	0,236-0,234	0,234-0,232	0,232-0,230	0,230-0,228	0,228-20,226	0,228-20,226
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,77	75,00-75,30	75,01-76,47	76,48-77,65	77,66-78,82	80,00-80,40	80,41-82,1	80,41-82,1
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK	124.353,23	124.353,23	145.668,73	166.984,24	188.299,74	209.615,24	230.930,74	230.930,74
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,93	77,37	77,55	77,72	77,89	78,06	78,23	78,23
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	0,89	0,84-0,79	0,79-0,73	0,72-0,63	0,62-0,53	0,52-0,43	0,42-0,39	0,42-0,39

Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel 3.7 Penyeragaman Target Indikator Makro

No	RPJPN Tahun 2025-2029				RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029			RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2029		
	Sasaran per Provinsi				Indikator	Baseline 2025	Target 2029	Indikator	Baseline 2025	Target 2029
	Indikator	Satuan	Baseline 2025	Target 2029						
1	Laju Pertumbuhan ekonomi	%	5,3	7,6	Laju Pertumbuhan ekonomi	5,3	7,6	Laju Pertumbuhan ekonomi	5,10-5,20	6,80-7,20
2	PDRB per kapita	Rp juta	78,4	115,3	PDRB per kapita	78,4	115,3	PDRB per kapita	43,97	79,76
3	Kontribusi PDRB Provinsi	%	5,2	5,3	Kontribusi PDRB Provinsi	5,2	5,3	Kontribusi PDRB Kabupaten	0,53	0,53
4	Tingkat Kemiskinan	%	6,96-7,46	2,82-3,82	Tingkat Kemiskinan	6,96-7,46	2,82-3,82	Angka Kemiskinan	10,90-10,50	7,90-7,50
5	Rasio Gini	angka	0,303-0,305	0,287-0,291	Rasio Gini	0,303-0,305	0,287-0,291	Rasio Gini	0,238-0,236	0,230-0,228
6	Indeks Modal Manusia	angka	0,54	0,57	Indeks Modal Manusia	0o	0,57	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,00-75,30	80,00-80,40
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	1	16,88	Penurunan Intensitas Emisi GRK	1	16,88	Penurunan Intensitas Emisi GRK	124.353,23	230.930,74
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	angka	77,2	77,87	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,2	77,87	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,37	78,06
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,27-5,56	4,74-5,20	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,27-5,56	4,74-5,20	Tingkat Pengangguran Terbuka	0,84-0,79	0,52-0,43

Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

Tabel 3.8 Penyelarasan Indikator Utama Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Samosir

No	RPJMN Tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			No	RPJMD Kab. Samosir Tahun 2025-2029		
	(Sasaran per Propinsi)									
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029		Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
1	Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun	73,73	74,54	Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun	73,73	74,54	1	Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun	74,36-74,53	76,53-78,34
2	Kesehatan Ibu dan Anak			Kesehatan Ibu dan Anak				Kesehatan Ibu dan Anak		
	a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	146	94	a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	146	94	2	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	135	100
							3	Angka Kematian Balita (per 100.000 kelahiran hidup)	14,8	6,0
	b) Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat pendek pada balita (%))	16,4	12,3	b) Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat pendek pada balita (%))	16,4	12,3	5	Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat pendek pada balita (%))	26,58	18,5
3	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)			Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)			4	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		
	a) Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	90	90	a) Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	90	90		a) Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	100	100
	b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkolosis	90	90	b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkolosis	90	90		b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkolosis	90	90

Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	RPJMN Tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			No	RPJMD Kab. Samosir Tahun 2025-2029		
	(Sasaran per Propinsi)									
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029		Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
							6	Proporsi Kecamatan tereliminasi Malaria *	91,25	94
4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,6	99	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,6	99	14	a) Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan Nasional	98,6	98,6
5	Hasil Pembelajaran :			Hasil Pembelajaran :			7	Kualitas Pendidikan		
	a) Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk :			a) Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk :				a) Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional		
	- literasi membaca	6,06-12,12	27,27-30,30	- literasi membaca	6,06-12,12	27,27-30,30		- Literasi membaca SD	67,10	77,10
	-Numerasi	00,00-3,03	6,06-9,09	-Numerasi	00,00-3,03	6,06-9,09		- Numerasi SD	62,16	73,76
	b) persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk :			b) persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk :				b) Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional		
	-literasi membaca	35,99-38,49	41,53-44,03	-literasi membaca	35,99-38,49	41,53-44,03		- Literasi membaca SMP	74,78	79,18
	-Numerasi	33,70-36,20	37,70-40,20	-Numerasi	33,70-36,20	37,70-40,20		- Numerasi SMP	67,37	73,37

Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	RPJMN Tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			No	RPJMD Kab. Samosir Tahun 2025-2029		
	(Sasaran per Propinsi)									
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029		Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
								c) persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional	69,3	80,5
	c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	10,3-10,33	10,83-10,84	c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	10,3-10,33	10,83-10,84	8	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,66-9,86	10,40-10,60
	d) Harapan Lama Sekolah	13,61-13,63	13,86-13,87	d) Harapan Lama Sekolah	13,61-13,63	13,86-13,87	9	Harapan Lama Sekolah	13,60-13,68	13,94-14,01
							10	Angka Partisipasi Pendidikan Dasar		
								a) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD sederajat	109,51	110
								b) Angka Partisipasi Murni (APM) SD sederajat	89,35	99,91
								c) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat	93,61	94,5
								d) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP sederajat	89,80	99,95
							11	Kualifikasi pendidikan usia produktif		
6	Proporsi penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)	11,12	11,12-11,40	Proporsi penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)	11,12	11,12-11,40		a) Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	15,2	19,96

Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	RPJMN Tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			No	RPJMD Kab. Samosir Tahun 2025-2029		
	(Sasaran per Propinsi)									
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029		Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
7	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	71,1	76,59	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	71,1	76,59		b) Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	55	60
8	Tingkat kemiskinan (%)	6,96-7,46	2,82-3,82	Tingkat kemiskinan (%)	6,96-7,46	2,82-3,82	12	Tingkat kemiskinan	10,90-10,50	7,90-7,50
9	Cakupan kepesertaan jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	29,27	40,61	Cakupan kepesertaan jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	29,27	40,61	14	b) Cakupan kepesertaan jaminan Sosial Ketenagakerjaan tenaga kerja rentan	13,5	19,2
							15	Indeks Pembangunan Manusia	75,00-75,30	80,00-80,40
10	Persentase penyandang disabilitas bekerja disektor formal			Persentase penyandang disabilitas bekerja disektor formal			13	Persentase penyandang disabilitas bekerja disektor formal	5,14	20,76
							23	Rasio PDRB Sektoral terhadap pertanian		
11	a) Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	19-19,5	15,4-15,1	a) Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	19-19,5	15,4-15,1		a) Rasio PDB Industri Pengolahan	0,62-0,82	1,5-3,6
	b) Pertumbuhan PDB Pertanian, kehutanan, dan perikanan	5,2	7,8	b) Pertumbuhan PDB Pertanian, kehutanan, dan perikanan	5,2	7,8		b) Produk Industri Pengolahan Berstandar Ekspor	0	1
12	Pengembangan Pariwisata			Pengembangan Pariwisata						
	a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan minum	2,42	2,73	a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan minum	2,42	2,73		c. Rasio PDRB Pariwisata ADHB (sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan minum)	14,47	15,27

Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	RPJMN Tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			No	RPJMD Kab. Samosir Tahun 2025-2029		
	(Sasaran per Propinsi)									
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029		Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
	b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel berbintang)	300,00-350,00	421,14	b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel berbintang)	300,00-350,00	421,14	24	b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel berbintang)	16.705	20.705
								a. Jumlah Kunjungan Wisata	2.000.000	2.250.000
							25	Konektivitas		
								a. Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	54,01	63
								b. Tingkat Kemantapan Dermaga*	54,5	58,3
							26	Luas Sawah Yang terairi	69,27	73,0
							27	Proporsi Kontribusi PDRB Samosir (ADHB) terhadap Provinsi	0,53	0,53
14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN			Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN			16	Produktivitas UKM, IKM, Koperasi		
	a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	3,20%	3,51%	a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	3,20%	3,51%		a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) non pertanian	10.201	10.714
								b.Proporsi Jumlah IKM	100	100
	b. Rasio Kewirausahaan daerah (%)	3,63%	4,06%	b. Rasio Kewirausahaan daerah (%)	3,63%	4,06%		c. Rasio Kewirausahaan daerah	1,1	3,2
	c. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,79%	0,81%	c. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,79%	0,81%		d. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,28	3,3
13	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)*	5,45	5,43	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)*	5,45	5,43		e. Rasio PDRB Ekonomi Kreatif	0,2	0,8

Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	RPJMN Tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			No	RPJMD Kab. Samosir Tahun 2025-2029		
	(Sasaran per Propinsi)									
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029		Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
	d. Return on Asset (ROA) BUMD (%)	1,24	1,97	d. Return on Asset (ROA) BUMD (%)	1,24	1,97				
15	Penciptaan Lapangan Kerja yang baik			Penciptaan Lapangan Kerja yang baik						
	a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,27-5,56	4,74-5,20	a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,27-5,56	4,74-5,20	17	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	0,84-0,79	0,52-0,43
	b. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	43	50,4	b. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	43	50,4				
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	59,29-61,67	59,48-63,87	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	59,29-61,67	59,48-63,87	18	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	80,74-91,00	83,93-94,78
							19	Indeks Kapabilitas Inovasi	1,38	2,8
							20	Laju Pertumbuhan Investasi	2,11	13,47
							21	Produktifitas Tenaga Kerja		
								a. Rasio/Kontribusi PDRB pertanian, kehutanan dan perikanan	49,48	47,50
								b.Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan *	64,84	82,37
							22	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Kurang Informatif (40-60)	Informatif (90-100)

Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	RPJMN Tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			No	RPJMD Kab. Samosir Tahun 2025-2029		
	(Sasaran per Propinsi)									
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029		Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau						
	a. Indeks Ekonomi Hijau Daerah	51,12	51,18	a. Indeks Ekonomi Hijau Daerah	51,12	51,18				
	b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	18,42	21,49	b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	18,42	21,49				
19	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6	6,9	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6	6,9				
20	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	10,1	9,5	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	10,1	9,5				
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)	29,7	29,76-30,04	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)	29,7	29,76-30,04	33	c) Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB*	14,96	15,18
22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	16,45-16,54	17,13-17,41	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	16,45-16,54	17,13-17,41		d) Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB*	0,4	0,50
23	Kota dan Desa Maju, inklusif, dan berkelanjutan			Kota dan Desa Maju, inklusif, dan berkelanjutan			28	Kota dan Desa Maju, inklusif, dan berkelanjutan		
	a. Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional (%)	2,26	2,33	a. Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional (%)	2,26	2,33				
	b. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	74,36	81,01	b. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	74,36	81,01		a. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	82,51	85

Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	RPJMN Tahun 2025-2029 (Sasaran per Propinsi)			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			No	RPJMD Kab. Samosir Tahun 2025-2029		
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029		Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
	c. Persentase Desa Mandiri (%)	8,44%	8,93%	c. Persentase Desa Mandiri (%)	8,44%	8,93%		b. Persentase Desa Mandiri (%)	5,46	10,15
24	Indeks Materi Hukum	70	71,5	Indeks Materi Hukum	70	71,5	29	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik		
	Proksi di Daerah : Indeks Reformasi Hukum (IRH)			Proksi di Daerah : Indeks Reformasi Hukum (IRH)				b) Indeks Reformasi Hukum (IRH)	45	57
25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,45	3,71	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,45	3,71		c. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,78	3,2
26	Indeks Pelayanan Publik	3,57	3,69	Indeks Pelayanan Publik	3,57	3,69		a. Indeks Pelayanan Publik	3,69	3,86
							30	Integritas ASN Kab. Samosir		
27	Indeks Integritas Nasional	66,78	69,51	Indeks Integritas Nasional	66,78	69,51		a. Indeks Perilaku Anti Korupsi*	3,6	2,18
								b. Indeks Integritas Nasional *	66,78	70,10
								c. Indeks Persepsi Korupsi*	3,92	4,4
								d. Indeks Inovasi Daerah	48,04	60,05
							31	Angka Kriminalitas (Kasus)*	233	200
							32	Jumlah Konflik SARA	0	0
							33	Stabilitas Ekonomi Makro		
								a) Rasio PAD terhadap PDRB	1,71	2,82

Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	RPJMN Tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			No	RPJMD Kab. Samosir Tahun 2025-2029		
	(Sasaran per Propinsi)									
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029		Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
								b)Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	100	100
								e. Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan	0,81	0,96
28	a) Persentase penegakan Hukum Peraturan Daerah	70	75,7	a) Persentase penegakan Hukum Peraturan Daerah	70	75,7				
	b) Peresentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	60	70	b) Peresentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	60	70				
29	Proporsi Penduduk yang merasa aman berjalan sedirian di area tempat tinggalnya (%)	58,5	62	Proporsi Penduduk yang merasa aman berjalan sedirian di area tempat tinggalnya (%)	58,5	62		Indeks Rasa Aman	80	84
30	Indeks Demokrasi Indonesia	82,58-85,83	86,83-90,08	Indeks Demokrasi Indonesia	82,58-85,83	86,83-90,08				
31	Rasio Pajak terhadap PDB (%)			Rasio Pajak terhadap PDB (%)						
32	Tingkat Inflasi (%)	1,8-3,8	1,4-3,7	Tingkat Inflasi (%)	1,8-3,8	1,4-3,7				
33	Pendalaman/Intermediasi sektor keuangan			Pendalaman/Intermediasi sektor keuangan						
	a. Total Dana Pihak ketiga/PDRB (%)	28,77	33,92	a. Total Dana Pihak ketiga/PDRB (%)	28,77	33,92				
	b. Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,13	0,14	b. Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,13	0,14				

Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	RPJMN Tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			No	RPJMD Kab. Samosir Tahun 2025-2029		
	(Sasaran per Propinsi)									
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029		Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
	c. Nilai Transaksi Saham per Kapita per Provinsi (Rupiah)	8.103.064,03	10.402.072,39	c. Nilai Transaksi Saham per Kapita per Provinsi (Rupiah)	8.103.064,03	10.402.072,39				
	d. Total Kredit/PDRB (%)	25,7	31,49	d. Total Kredit/PDRB (%)	25,7	31,49				
34	Inklusi Keuangan (%)	97,52	97,88	Inklusi Keuangan (%)	97,52	97,88				
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,44-55,48	57,56-57,67	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,44-55,48	57,56-57,67	34	Persentase benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	33,76-36,76	50-54
38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	81,17-81,2	82,62-82,79	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	81,17-81,2	82,62-82,79	35	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	82,25	82,25
39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	71,04	73,67	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	71,04	73,67	37	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	56,72	57,92
40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,407	0,37	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,407	0,37	36	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,122	0,118
41	Indeks Pengolahan Keanekaragaman Hayati	0,562	0,581	Indeks Pengolahan Keanekaragaman Hayati	0,562	0,581	38	a. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	62,59	62,87
42	Kualitas Lingkungan Hidup			Kualitas Lingkungan Hidup			38	Lingkungan Hidup Berkualitas		
	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,2	77,87	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,2	77,87		b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,37	78,06

Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	RPJMN Tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			No	RPJMD Kab. Samosir Tahun 2025-2029		
	(Sasaran per Propinsi)									
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029		Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
	b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	10,00%	15%	b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	10,00%	15%	39	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	55,84	64
	c. Pengelolaan Sampah	16,00%	28%	c. Pengelolaan Sampah	16,00%	28%	40	Pengelolaan Sampah		
	-Timbunan Sampah terolah di fasilitas Pengolahan sampah (%)	62%	100%	-Timbunan Sampah terolah di fasilitas Pengolahan sampah (%)	62%	100%		a. Timbunan Sampah terolah di fasilitas Pengolahan sampah	0,29	0,46
	-Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%RT)			-Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%RT)				b. Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	10,25	22,46
43	Ketahanan Energi, Air dan Pangan			Ketahanan Energi, Air dan Pangan						
	a. Ketahanan Energi			a. Ketahanan Energi						
	- Konsumsi listrik per kapita (kWh)	850	1282	- Konsumsi listrik per kapita (kWh)	850	1282	41	Energi Listrik (akses RT terhadap Listrik PLN) *	97,99	98,0
	-Intensitas energi primer (SBM/Rp Milyar)	170,57	141,175	-Intensitas energi primer (SBM/Rp Milyar)	170,57	141,175				
	b. Prevalensi Ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>prevalence of Undernourishment</i>) (%)	7,35	4,48	b. Prevalensi Ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>prevalence of Undernourishment</i>) (%)	7,35	4,48	42	Indeks Ketahanan Pangan	81,46	85,89
	c. Ketahanan Air			c. Ketahanan Air			43	Kapasitas sumber daya air		

Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	RPJMN Tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			No	RPJMD Kab. Samosir Tahun 2025-2029		
	(Sasaran per Propinsi)									
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029		Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
	Kapasitas Tampungan Air (m3/kapita)			Kapasitas Tampungan Air (m3/kapita)				a. Kapasita Air Baku *	7,56	9,42
	Akses Rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	40,95	53	Akses Rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	40,95	53		b. Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Aman	55,84	64,0
44	Indeks Risiko Bencana (IRB) (untuk level propinsi)	157,53	152,55-147,69	Indeks Risiko Bencana (IRB) (untuk level propinsi)	157,53	152,55-147,69	44	a. Indeks Risiko Bencana (IRB)	114	112
45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)			Persentase Penurunan Emisi GRK (%)				b. Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,31	0,35
	a. kumulatif	10,06%	12,92%	a. kumulatif	10,06%	12,92%	45	Indeks Kualitas Udara	82,4	83,2
	b. tahunan	19,04%	25,38%	b. tahunan	19,04%	25,38%				

Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Samosir

Dalam mewujudkan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan berikut ini.

Tujuan 1 Meningkatnya derajat hidup masyarakat

Tujuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui program yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, dan ketahanan pangan. Dengan semakin meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan akan dapat meningkatkan derajat hidup masyarakat, hal ini akan berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan **mendukung pencapaian misi pertama RPJMD**, yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing yang berdampak pada kesejahteraan seluruh masyarakat Samosir.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan ini dituangkan dalam 5 (lima) sasaran, yaitu:

Sasaran 1.1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Sasaran ini menitikberatkan pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Samosir. Dengan meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, akan menghasilkan derajat hidup yang lebih baik yang **mendukung tujuan pertama RPJMD**. Outcome sasaran yang pertama ini adalah peningkatan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat.

Sasaran 1.2 Meningkatnya kualitas pendidikan

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan diantaranya melalui peningkatan akses dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, pemberian beasiswa, dan penguatan kecerdasan

emosional dan spiritual bagi tenaga pendidik dan anak didik. Dengan adanya peningkatan kualitas pendidikan, diharapkan akan meningkatkan daya saing sumber daya masyarakat Samosir, yang sejalan dengan tujuan pertama RPJMD. Outcome sasaran ini adalah peningkatan kualitas pendidikan.

Sasaran 1.3 Meningkatnya pendapatan masyarakat

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata dan inklusif. Peningkatan pendapatan masyarakat ini akan meningkatkan derajat hidup masyarakat yang akhirnya akan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan dengan **tujuan pertama RPJMD**. Outcome sasaran ini adalah peningkatan pendapatan masyarakat untuk peningkatan taraf hidup masyarakat

Sasaran 1.4 Meningkatnya ketahanan pangan

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan pangan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, dan keamanan pangan yang cukup dan aman bagi seluruh masyarakat Samosir. Selain itu, ketahanan pangan Samosir juga bertujuan mencakup aspek kedaulatan pangan, maksudnya Samosir mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya sendiri melalui produksi sendiri. Dengan tercapainya ketahanan pangan, akan dapat meningkatkan derajat hidup masyarakat Samosir yang **merupakan tujuan pertama RPJMD**. Outcome sasaran ini adalah Peningkatan ketahanan pangan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Sasaran 1.5 Meningkatnya ketahanan Sosial

Sasaran ini dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan masyarakat untuk mengatasi berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal, serta memelihara kohesi sosial dan stabilitas dalam menghadapi perubahan. Ini melibatkan berbagai aspek, termasuk membangun kapasitas individu dan komunitas, memperkuat lembaga-lembaga sosial, serta mempromosikan nilai-nilai seperti solidaritas, toleransi, dan kerjasama. Dengan meningkatnya ketahanan sosial, akan meningkatkan derajat hidup masyarakat Samosir yang **merupakan tujuan pertama RPJMD**. Outcome sasaran ini adalah meningkatnya ketahanan sosial masyarakat, terutama masyarakat yang rentan, seperti masyarakat miskin, korban bencana dan disabilitas, termasuk perempuan dan anak.

Tujuan 2 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Tujuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan memperhatikan pemerataan dan keberlanjutan melalui program yang berkaitan dengan pertanian, pariwisata, UMK, industri serta sektor usaha lainnya dengan menjaga kualitas lingkungan hidup yang baik. Dengan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan memperhatikan aspek lingkungan hidup akan memberikan **dukungan terhadap pencapaian misi kedua RPJMD**, yaitu memantapkan kemandirian ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan berbasis pertanian, pariwisata didukung infrastruktur berkualitas.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan ini dituangkan dalam 2 (dua) sasaran, yaitu:

Sasaran 2.1 Meningkatnya PDRB sektor unggulan

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan PDRB sektor-sektor unggulan yang dimiliki oleh Samosir, terutama sektor pertanian dan pariwisata. Dengan meningkatnya PDRB sektor unggulan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini sejalan **dengan tujuan kedua RPJMD**. Outcome sasaran ini adalah Peningkatan PDRB sektor unggulan, yaitu pertanian dan pariwisata.

Sasaran 2.2 Meningkatnya produktivitas Koperasi, UMK dan IKM dalam perekonomian daerah

Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas koperasi, UMK dan IKM. Pada sasaran ini dikhususkan pada koperasi, UMK dan IKM karena sebagian usaha masyarakat masih berbasis mikro dan kecil. Dengan adanya peningkatan produktivitas koperasi, UMK dan IKM, diharapkan akan **memberikan dampak positif terhadap tujuan kedua RPJMD**, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Outcome sasaran ini adalah peningkatan aktivitas perekonomian oleh pelaku koperasi, UMK dan IKM.

Tujuan 3 Meningkatnya infrastruktur berkualitas

Tujuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur melalui program pembangunan infrastruktur yang mantap dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Samosir mencakup daerah yang berada di lokasi terpencil/terisolir. Dengan terlaksananya peningkatan kualitas infrastruktur akan memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat

Samosir untuk dapat mengakses layanan publik dan pusat-pusat kegiatan perekonomian, meningkatkan kegiatan perekonomian sehingga dapat **mendukung ketercapaian misi kedua RPJMD**, yaitu memantapkan kemandirian ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan berbasis pertanian, pariwisata didukung infrastruktur berkualitas.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan ini dituangkan dalam 2 (dua) sasaran, yaitu:

Sasaran 3.1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur. Infrastruktur merupakan dukungan yang sangat penting terhadap seluruh aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, baik kualitas dan jumlah, hingga kemerataannya sangat penting untuk mendukung seluruh aktivitas masyarakat Samosir, terutama pada aktivitas sektor ekonomi. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur **akan mendukung tujuan ketiga RPJMD**, yaitu meningkatkan infrastruktur yang berkualitas. Outcome sasaran ini adalah peningkatan layanan infrastruktur yang berkualitas dan pemerataannya.

Sasaran 3.2 Meningkatnya kualitas ekologi

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas ekologi termasuk peningkatan kualitas lingkungan hidup yang bertujuan untuk kelestarian alam dan Danau Toba, serta pencegahan dan penanggulangan bencana alam. Dengan tercapainya peningkatan kualitas ekologi, akan **mendukung pencapaian tujuan ketiga RPJMD**, yaitu meningkatkan infrastruktur yang berkualitas. Outcome sasaran ini adalah peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Tujuan 4 Meningkatnya kualitas kinerja birokrasi pemerintahan

Tujuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kinerja birokrasi pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien, serta fleksibel terhadap perubahan dan kebutuhan. Tujuan ini dilaksanakan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan inovasi dan implementasinya. Dengan dilaksanakannya program ini, diharapkan dapat **mendukung ketercapaian misi ketiga RPJMD**, yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, berintegritas dan adaptif.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan ini dituangkan dalam 1 (satu) sasaran, yaitu:

Sasaran 4.1 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada pelayanan, kemudahan birokrasi, dan senantiasa beradaptasi terhadap kebutuhan dan perubahan. Dengan adanya peningkatan tata kelola pemerintahan diharapkan akan mendukung **tujuan keempat RPJMD**, yaitu Meningkatkan kualitas kinerja birokrasi pemerintahan. Outcome sasaran ini adalah peningkatan digitalisasi pelayanan publik dan penguatan tata kelola pemerintahan.

Tabel 3.9 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Outcome

RPJMD Kabupaten Samosir 2025-2029			
Visi : Samosir Unggul, Inklusif dan Berkelanjutan			
Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Meningkatnya derajat hidup masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat
		Meningkatnya kualitas pendidikan	Peningkatan kualitas pendidikan
		Meningkatnya pendapatan masyarakat	Peningkatan pendapatan masyarakat untuk peningkatan taraf hidup masyarakat
		Meningkatnya ketahanan pangan	Peningkatan ketahanan pangan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat
		Meningkatnya ketahanan sosial	Peningkatan ketahanan sosial masyarakat, terutama masyarakat yang rentan, seperti

RPJMD Kabupaten Samosir 2025-2029			
Visi : Samosir Unggul, Inklusif dan Berkelanjutan			
Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome
			masyarakat miskin, korban bencana dan disabilitas, termasuk perempuan dan anak.
Memantapkan kemandirian ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan berbasis pertanian, pariwisata didukung infrastruktur berkualitas	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Meningkatnya PDRB sektor unggulan	Peningkatan PDRB sektor unggulan, yaitu pertanian dan pariwisata
		Meningkatnya produktivitas Koperasi, UMK dan IKM dalam perekonomian daerah	Peningkatan aktivitas perekonomian oleh pelaku koperasi, UMK dan IKM
	Meningkatnya infrastruktur berkualitas	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	Peningkatan layanan infrastruktur yang berkualitas dan pemerataannya
		Meningkatnya kualitas ekologi	Peningkatan kualitas lingkungan hidup
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif dan berintegritas	Meningkatnya kualitas kinerja birokrasi pemerintahan (Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif)	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif	Peningkatan digitalisasi pelayanan publik dan penguatan tata kelola pemerintahan

Rangkaian kinerja tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel 3.10 berikut ini.

Tabel 3.10 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Samosir Tahun 2025-2029

Visi : Samosir Unggul, Inklusif dan Berkelanjutan													
No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						Kondisi akhir
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I.	Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing												
1.	Meningkatnya derajat hidup masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			skor	73,77	75,30-75,00	75,01-76,47	76,48-77,65	77,66-78,82	80,00-80,40	80,41-82,1	80,41-82,1
			1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1 Umur Harapan Hidup (UHH)	tahun	74,35	74,36-74,53	74,53-75,03	75,03-75,53	75,53-76,03	76,53-78,34	78,34-78,84	78,34-78,84
			2. Meningkatkan kualitas pendidikan	2 Rata-rata lama sekolah	tahun	9,61	9,66-9,86	9,86-10,06	10,06-10,26	10,26-10,39	10,40-10,60	10,61-10,81	10,61-10,81
				3 Harapan lama sekolah	tahun	13,52	13,60-13,68	13,69-13,76	13,77-13,85	13,86-13,93	13,94-14,01	14,02-14,10	14,02-14,10
		3. Meningkatkan pendapatan masyarakat	4 PDRB per kapita (ADHB)	juta rp	42,64	43,97	57,49	64,91	72,34	79,76	87,18	87,18	
		4. Meningkatkan ketahanan pangan	5 Indeks Ketahanan Pangan	indeks	80,35	81,46	82,57	83,67	84,78	85,89	87,00	87,00	
		5. Meningkatkan ketahanan sosial	6 Persentase Desa Mandiri	%	4,69	5,46	6,63	7,81	8,98	10,15	11,32	11,32	

Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						Kondisi akhir
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				7 Indeks Ketimpangan Gender	indeks	0,123	0,122	0,121	0,120	0,119	0,118	0,117	0,117
				8 Kabupaten Layak Anak	skor	<500	650	700	750	800	850	900	900
II.	Misi 2: Memantapkan Kemandirian Ekonomi Kerakyatan yang Berkelanjutan Berbasis Pertanian, Pariwisata didukung Infrastruktur Berkualitas												
2.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Laju Pertumbuhan ekonomi				5,02	5,10-5,20	5,32-5,64	5,64-5,98	5,98-6,75	6,80-7,20	7,21-7,40	7,21-7,40
			6 Meningkatkan PDRB sektor unggulan	9 Pertumbuhan PDRB sektor pertanian (ADHK)	%	2,24	3,76	4,14	4,56	5,02	5,53	6,08	6,08
				10 Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata (ADHK)(proxy: Penyediaan akomodasi, makanan dan minuman)	%	14,47	14,47	14,67	14,87	15,07	15,27	15,47	15,47
				11 Spend of Money (Pengeluaran Wisatawan)	ribu rp	1600,00	1633,69	1668,10	1703,23	1739,10	1775,72	1813,12	1813,12

Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						Kondisi akhir
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.	Meningkatnya infrastruktur berkualitas	Persentase Kelayakan Infrastruktur	7 Meningkatkan produktivitas Koperasi, UMK dan IKM dalam perekonomian daerah	12 Rasio PDRB Industri Pengolahan ADHB	%	0,49	0,62-0,82	0,82-1,02	1,22-1,42	1,42-1,5	1,5-3,6	3,6-3,9	3,6-3,9
				13 Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB ADHB	%	1,260	1,28	1,78	2,28	2,78	3,3	3,5	3,5
				14 Rasio PDRB Ekonomi Kreatif	%	na	0,2	0,35	0,5	0,65	0,8	0,95	0,95
		Persentase Kelayakan Infrastruktur	8 Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur	15 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	kategori	na	55-65	65-70	70-73	73-76	76-79	79-82	79-82
				16 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	skor	70,93	77,37	77,55	77,72	77,89	78,06	78,23	78,23
				17 Indeks Ketahanan Daerah	skor	0,30	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36

Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						Kondisi akhir
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
III.	Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Responsif, Berintegritas dan Adaptif												
4.	Meningkatnya kualitas kinerja birokrasi pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			skor	88	89,10	89,50	89,75	89,94	90,04	90,43	90,43
			10 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif	18 Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	skor	67,92	70,04	72,15	74,27	76,18	78,15	80,34	80,34
				19 Nilai AKIP	skor	68,80	69,10	69,40	69,70	70,03	70,38	70,58	70,58
				20 Opini BPK	kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				21 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	skor	3,27	3,37	3,46	3,56	3,65	3,75	3,85	3,85

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan dan sasaran dapat dicapai melalui strategi dan arah kebijakan jangka menengah. Strategi adalah cara yang dijalankan untuk mencapai sasaran, sedangkan arah kebijakan adalah fokus dan lokus dari strategi. Strategi dan arah kebijakan harus dirumuskan berdasarkan indentifikasi masalah, sehingga strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan benar-benar mampu menyasar masalah. Berikut adalah strategi dan arah kebijakan masing-masing misi jangka menengah Kabupaten Samosir:

Tabel 3.11 Strategi dan Arah Kebijakan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
1.	Meningkatnya derajat hidup masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatkan kualitas fasilitas dan layanan kesehatan	Peningkatan kualitas dan fasilitas sarana dan prasarana kesehatan
				Peningkatan sarana pendukung fasilitas publik untuk penyandang disabilitas
				Menjamin Ketersediaan dan Pengawasan Obat & Makanan
				Penyuluhan hidup sehat dan penerapan pola pangan harapan
				Penguatan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan
			Meningkatkan kualitas dan redistribusi SDM kesehatan	Peningkatan kapasitas tenaga medis dan tenaga kesehatan
				Peningkatan Kesehatan Keluarga

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
			Meningkatkan kualitas pelaksanaan aksi konvergensi penanganan stunting	Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)/Sanitasi
				Penyediaan Air Bersih
				Pemberdayaan ekonomi masyarakat
		Meningkatnya kualitas pendidikan	Meningkatkan manajemen layanan kualitas pendidikan	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan
				Pemberian bantuan pendidikan bagi siswa tidak mampu dan beasiswa bagi siswa berprestasi
				Penguatan Kecerdasan Emosional dan Spritual bagi tenaga pendidik dan anak didik dalam rangka menciptakan Generasi Z dan Alpha yang beradab dan tangguh
			Meningkatkan kualitas dan redistribusi SDM pendidikan	Pemetaan dan redistribusi kebutuhan SDM Pendidik
				Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan
		Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pengembangan dan penguatan kapasitas masyarakat serta permodalan	Fasilitasi penguatan kapasitas tenaga kerja produktif pada sektor unggulan berbasis BNSP dan pemberian bantuan permodalan bagi pelaku koperasi produktif, UKM/IKM
				Peningkatan sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja
		Meningkatnya ketahanan pangan	Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan keamanan	Diversifikasi pangan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
				Penguatan cadangan pangan
				Peningkatan sarana dan prasarana pertanian
				Pengembangan pertanian perkotaan
				Peningkatan keamanan pangan
		Meningkatnya ketahanan sosial	Pengembangan dan penguatan kapasitas masyarakat serta permodalan	Optimalisasi tata kelola pemerintahan desa
				Meningkatkan pemberdayaan, pemberian bantuan kesejahteraan sosial, dan penguatan kemandirian sosial ekonomi bagi penduduk miskin ekstrem
2.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Meningkatnya PDRB sektor unggulan	Intensifikasi lahan pertanian	Peningkatan sarana dan prasarana produksi pertanian organik
			Menerapkan sistem pertanian berkelanjutan dan pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (KPT)	Pelaksanaan "penyehatan" lahan marginal
				Penerapan Teknologi Tepat Guna melalui kerjasama dengan stakeholder pembangunan sektor pertanian
				Pengendalian alih fungsi lahan pertanian
				Penguatan kapasitas SDM pertanian
				Peningkatan populasi dan kesehatan hewan (lembu, kerbau, kambing, babi)
				Pengembangan pola budidaya ikan melalui metode bioflok

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
				Pengembangan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal yang berketahanan iklim
				Penyediaan dukungan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian
			Meningkatkan industri pengolahan hasil pertanian	Pelaksanaan hilirisasi produksi pertanian unggulan (bawang, cabe, kentang, mangga, ubi, kopi, andaliman, jagung, kemiri, ikan, susu kerbau-yogurt)
				Peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha pengolahan hasil pertanian
				Fasilitasi ijin dan pemasaran hasil pertanian (termasuk P-IRT, halal, BPOM)
				Penyediaan dukungan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian
			Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan objek wisata	Pembangunan kawasan objek wisata baru
				Pelestarian cagar alam dan cagar budaya
				Revitalisasi Geopark Kaldera Toba
			Meningkatkan diversifikasi dan pengembangan kawasan objek wisata	Pengembangan dan revitalisasi kawasan agrowisata, ekowisata, wisata kultur, wisata religi, wisata kuliner
			Menyelenggarakan event dan paket wisata	Melakukan kerjasama se-kawasan Danau Toba dalam penyelenggaraan event dan paket wisata
				Pelaksanaan 1 event 1 desa berbasis kearifan lokal

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
		Meningkatnya produktivitas Koperasi, UMK dan IKM dalam perekonomian daerah	Hilirisasi produk unggulan	Penguatan Kapasitas berbasis BNSP
				Pelaksanaan hilirisasi produksi unggulan pertanian dan ekonomi kreatif
				Digitalisasi pemasaran
			Menumbuhkan koperasi produktif (sektor riil) dan meningkatkan kapasitas koperasi	Mendirikan dan mengembangkan koperasi produktif sektor pertanian, UMK
				Meningkatkan kerjasama untuk pemasaran hasil produksi koperasi sektor riil
				Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis BNSP kepada pelaku koperasi
			Meningkatkan kapasitas pelaku ekonomi kreatif dan memberikan bantuan modal	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis BNSP kepada pelaku ekonomi kreatif
				Peningkatan pemasaran produk
				Pemberian bantuan permodalan untuk pelaku UKM dan IKM dengan bunga nol persen
3.	Meningkatnya infrastruktur berkualitas	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dengan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan	Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan kabupaten
				Peningkatan cakupan layanan air bersih
				Peningkatan cakupan layanan sanitasi

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
				Peningkatan efektivitas cakupan layanan irigasi
				Peningkatan kualitas permukiman
				Pengelolaan dan pemanfaatan ruang yang berbasis regulasi
				Peningkatkan kualitas SDM pelaku usaha konstruksi
				Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni
				Penataan kawasan kumuh
			Peningkatan kualitas sarana, prasarana dan keselamatan perhubungan darat	Peningkatan kualitas/kuantitas dermaga
				Peningkatan fasilitas kelengkapan keselamatan jalan
			Meningkatkan pemeliharaan infrastruktur yang terbangun	Pemeliharaan dan preservasi jalan dan jembatan secara berkala
				Peningkatan kualitas sarana, prasarana dan keselamatan Perhubungan Darat
				Penyediaan tanah untuk pembangunan
		Meningkatnya kualitas ekologi	Konservasi lingkungan berkelanjutan	Peningkatan sarana prasarana pengolahan sampah/limbah
				Konservasi lahan kritis dan daerah tangkapan air
				Pengembangan pengelolaan sampah berbasis masyarakat

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
				Peningkatan pengolahan limbah organik
				Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan diantaranya melalui penetapan regulasi
				Penguatan dan pemberdayaan masyarakat peduli lingkungan
				Kajian risiko bencana
				Mitigasi bencana
4.	Meningkatnya kualitas kinerja birokrasi pemerintahan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berintegritas dan adaptif	Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
				Pembangunan Zona Integritas (ZI)
				Digitalisasi Arsip
				Optimalisasi Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)
				Peningkatan Kualitas Kebijakan
				Peningkatan Reformasi Hukum
				Peningkatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral
				Peningkatan Tata Kelola Pengadaan
				Peningkatan Sistem Merit
				Pengoptimalan penerapan standar etika pelayanan publik
				Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik yang terstandar
				Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
				Pelaksanaan pengukuran Indeks BerAkhlak
				Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas
				Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
				Peningkatan Realisasi Investasi
				Pengendalian Inflasi
				Penggunaan Produk Dalam Negeri
				Peningkatan ketersediaan data dan informasi yang dapat digunakan dalam penyusunan perencanaan daerah
				Peningkatan konsistensi antar dokumen perencanaan perangkat daerah melalui Peningkatan implelementasi perencanaan berbasisTIK
				Peningkatan kerjasama dengan mitra strategis bidang riset, inovasi dan penelitian pengembangan
				Peningkatan kuantitas dan kualitas inovasi daerah
				Peningkatan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
			Meningkatkan kualitas manajemen tata kelola keuangan daerah	Peningkatan produktivitas aset daerah (<i>smart asset</i>)
				Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Strategi dan Arah Kebijakan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah sebagaimana terdapat dalam tabel diatas dijelaskan sebagai berikut.

Dalam rangka pencapaian **Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing** dengan tujuan yang ingin dicapai **Meningkatnya derajat hidup masyarakat**, yang dijabarkan dalam 4 (tiga) sasaran pembangunan, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan;
- c. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
- d. Meningkatkan ketahanan pangan;
- e. Meningkatkan ketahanan sosial.

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, meningkatnya kualitas pendidikan, meningkatnya pendapatan masyarakat, meningkatnya ketahanan pangan dan meningkatnya ketahanan sosial adalah langkah penting untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh hak dasar yang sama sehingga diharapkan dapat berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan nasional. Program-program ini memastikan akses yang lebih baik ke pendidikan berkualitas, pelayanan kesehatan, dan pelatihan keterampilan untuk semua warga negara, tanpa memandang jenis kelamin, kondisi fisik, atau latar belakang sosial yang dimulai dari akar budaya lokal yang kaya nilai-nilai kearifan lokal yang mencerminkan kejujuran, gotong royong, toleransi, dan tanggung jawab sosial.

Generasi Muda sebagai generasi penerus bangsa akan diberikan dukungan yang diperlukan untuk mengembangkan potensi mereka dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, teknologi, dan kewirausahaan. Perempuan akan diberdayakan melalui berbagai program yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi secara penuh dalam ekonomi dan kehidupan sosial. Penyandang disabilitas akan diberikan akses yang setara dan inklusif untuk berpartisipasi dalam semua aspek kehidupan, dari pendidikan hingga kesempatan kerja. Diharapkan dengan mendapatkan semua akses pelayanan dasar tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga perekonomian masyarakat membaik.

Dengan Strategi dan arah kebijakan yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Fasilitas dan Layanan Kesehatan

a. Peningkatan kualitas dan fasilitas sarana dan prasarana kesehatan

Peningkatan kualitas dan fasilitas sarana prasarana kesehatan dengan penyediaan dan perbaikan fasilitas fisik, peralatan medis, serta sumber daya manusia yang berkualitas di fasilitas kesehatan.

b. Menjamin Ketersediaan dan Pengawasan Obat Makanan

menjamin ketersediaan dan pengawasan obat dan makanan yang mencakup peningkatan efektivitas pengawasan, penguatan lembaga BPOM, peningkatan pemahaman masyarakat, dan penegakan hukum yang lebih kuat. Ini dilakukan melalui berbagai upaya, termasuk pengawasan pre-market dan post-market, peningkatan kapasitas SDM dan laboratorium, serta peningkatan kerja sama dengan berbagai pihak.

c. Penyuluhan hidup sehat dan penerapan pola pangan harapan

Penyuluhan hidup sehat dan penerapan Pola Pangan Harapan dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pola makan yang seimbang dan beragam untuk mencapai kesehatan optimal.

d. Penguatan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan

meningkatkan kapasitas masyarakat agar lebih mampu mengelola dan menjaga kesehatan mereka sendiri, melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan partisipasi aktif dalam upaya kesehatan melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan, penyuluhan, pembentukan kelompok swadaya, dan pengembangan program kesehatan berbasis masyarakat.

2. Meningkatkan kualitas dan redistribusi SDM kesehatan

• *Peningkatan kapasitas tenaga medis dan tenaga kesehatan*

meningkatkan kualitas dan efektivitas tenaga kesehatan dengan melibatkan berbagai kegiatan seperti pelatihan, pendidikan, pembinaan, dan pengembangan profesional untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal.

- *Peningkatan Kesehatan Keluarga*
meningkatkan kesehatan seluruh anggota keluarga, mulai dari ibu hamil, bayi, balita, anak-anak, remaja, hingga lansia dengan berbagai aspek antara lain pemenuhan kebutuhan fisik dan emosional, mencari bantuan medis jika diperlukan, serta menciptakan lingkungan rumah yang sehat.

3. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Aksi Konvergensi Penanganan Stunting

- Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)/ Sanitasi*
meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat melalui kesadaran akan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat melalui sosialisasi dan pendampingan.
- Penyediaan Air Bersih*
memastikan ketersediaan air yang aman dan sehat untuk berbagai aktivitas seperti minum, memasak, mandi, dan sanitasi. Melalui menyediakan air yang memenuhi persyaratan kualitas dan kuantitas untuk kebutuhan masyarakat.
- Pemberdayaan ekonomi masyarakat*
meningkatkan kemampuan dan potensi masyarakat, khususnya di perdesaan, agar mereka dapat mengelola sumber daya secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan. Ini melibatkan pengembangan keterampilan, akses informasi, partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, dan peningkatan akuntabilitas.

4. Meningkatkan Manajemen Layanan Kualitas Pendidikan

- Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan*
upaya strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan melalui penyediaan fasilitas dan peralatan yang memadai untuk menunjang proses belajar mengajar, serta pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan agar lebih profesional dan efektif.
- Pemberian bantuan pendidikan bagi siswa tidak mampu dan beasiswa bagi siswa berprestasi*
Pemberian bantuan pendidikan bagi siswa tidak mampu dan beasiswa bagi siswa berprestasi untuk mengurangi angka putus

sekolah dan memastikan bahwa semua anak, terlepas dari latar belakang ekonomi mereka, memiliki kesempatan untuk belajar.

- c. *Penguatan Kecerdasan Emosional dan Spiritual bagi tenaga pendidik dan anak didik dalam rangka menciptakan Generasi Z dan Alpha yang beradab dan Tangguh*

Penguatan kecerdasan emosional dan spiritual bagi tenaga pendidik dan anak didik dalam upaya penting untuk menciptakan Generasi Z dan Alpha yang beradab dan tangguh yang bertujuan untuk membekali mereka dengan kemampuan mengelola emosi, memahami makna hidup, serta berperilaku sesuai dengan nilai-nilai luhur.

5. Meningkatkan Kualitas dan Redistribusi SDM Pendidikan

- a. *Pemetaan dan redistribusi kebutuhan SDM Pendidik*

pengaturan ulang distribusi sumber daya manusia (pendidik) untuk memastikan pemerataan kualitas pendidikan di berbagai wilayah dan jenjang pendidikan melalui identifikasi kebutuhan, pemetaan kondisi, dan penataan ulang penempatan guru serta sumber daya lainnya.

- b. *Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan*

meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan mencakup pengembangan kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan agar mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dalam meningkatkan mutu pendidikan.

6. Pengembangan dan penguatan kapasitas masyarakat serta permodalan

- a. *Fasilitasi penguatan kapasitas tenaga kerja produktif pada sektor unggulan berbasis BNSP dan pemberian bantuan permodalan bagi pelaku koperasi produktif, UKM/IKM*

Memberikan dukungan kemampuan tenaga kerja yang unggul serta memberikan bantuan permodalan untuk mempercepat perkembangan UKM/IKM di Kabupaten Samosir.

- b. *Peningkatan sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja*

meningkatkan kualitas pelatihan, daya tampung, dan relevansi program pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja melalui

penyediaan fasilitas pelatihan yang memadai, peralatan modern, dan lingkungan belajar yang kondusif.

7. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Miskin Ekstrem dan Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan

- a. *Meningkatkan pemberdayaan, pemberian bantuan kesejahteraan sosial, dan penguatan kemandirian sosial ekonomi bagi penduduk miskin ekstrem*

meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin ekstrem melalui tiga strategi utama: pemberdayaan, bantuan kesejahteraan sosial, dan penguatan kemandirian sosial ekonomi dalam upaya mengurangi beban pengeluaran dengan meningkatkan pendapatan, dan mengatasi kantong-kantong kemiskinan.

8. Meningkatkan Ketersediaan, keterjangkauan dan keamanan

- a. *Diversifikasi Pangan*

Upaya untuk meningkatkan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya local yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada satu jenis pangan, terutama beras, dan mendorong masyarakat untuk mengonsumsi berbagai jenis makanan yang lebih sehat dan bergizi.

- b. *Penguatan cadangan Pangan*

Upaya untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pasokan pangan, terutama dalam situasi krisis atau darurat dengan melakukan tindakan seperti menjaga stok pangan yang cukup, diversifikasi sumber pangan, dan memperkuat sistem distribusi

- c. *Peningkatan sarana dan prasarana pertanian*

Peningkatan sarana dan prasarana pertanian merujuk pada upaya untuk memperbaiki dan mengembangkan fasilitas serta peralatan yang digunakan dalam sektor pertanian mulai dari perbaikan irigasi dan jalan usaha tani hingga penyediaan alat dan mesin pertanian yang modern.

- d. *Pengembangan pertanian perkotaan*

Pengembangan pertanian perkotaan (urban farming) adalah praktik bercocok tanam dan beternak di lingkungan perkotaan,

memanfaatkan lahan terbatas untuk produksi pangan lokal. Ini bisa menjadi solusi untuk ketahanan pangan, peningkatan gizi, dan kesejahteraan masyarakat perkotaan.

e. Peningkatan keamanan pangan

Peningkatan keamanan pangan dilakukan dengan serangkaian upaya untuk memastikan bahwa makanan yang diproduksi, diproses, dan didistribusikan aman untuk dikonsumsi dan tidak menimbulkan risiko kesehatan bagi konsumen. Ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari praktik kebersihan yang baik dalam produksi dan pengolahan hingga pengawasan ketat terhadap bahan baku dan produk akhir.

9. Pengembangan dan Penguatan Kapasitas Masyarakat serta permodalan

a. Optimalisasi tata kelola pemerintahan desa

peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa melalui prinsip-prinsip *good governance*.

b. Meningkatkan pemberdayaan, pemberian bantuan kesejahteraan sosial, dan penguatan kemandirian sosial ekonomi bagi penduduk miskin ekstrem

meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin ekstrem melalui tiga strategi utama: pemberdayaan, bantuan kesejahteraan sosial, dan penguatan kemandirian sosial ekonomi dalam upaya mengurangi beban pengeluaran dengan meningkatkan pendapatan, dan mengatasi kantong-kantong kemiskinan.

Dalam rangka pencapaian **Misi 2 : Memantapkan Kemandirian Ekonomi Kerakyatan yang Berkelanjutan Berbasis Pertanian, Pariwisata Didukung Infrastruktur Berkualitas** dengan tujuan yang ingin dicapai **Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan Meningkatnya infrastruktur berkualitas**, yang dijabarkan dalam 4 (empat) sasaran pembangunan, sebagai berikut:

- a. Meningkatnya PDRB sektor unggulan;
- b. Meningkatnya produktivitas Koperasi, UMK dan IKM dalam perekonomian daerah;
- c. Meningkatnya kualitas dan Kuantitas Infrastruktur;

d. Meningkatnya Kualitas Ekologi.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan Meningkatnya infrastruktur berkualitas merupakan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara ekonomi. Untuk mencapai ini, maka dilakukan serangkaian upaya antara lain melanjutkan kesinambungan pemerintah pusat dan daerah melalui pengembangan dan penataan infrastruktur yang berkualitas, estetik, dan ramah lingkungan. Peran penting dari berbagai pihak sangat krusial. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan kebijakan dan regulasi yang mendukung, serta mengalokasikan anggaran yang memadai. Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah akan memastikan sinergi dalam pelaksanaan program. Sektor swasta diharapkan berinvestasi dalam proyek infrastruktur, mengembangkan masyarakat inovatif, dan bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana. Partisipasi aktif masyarakat juga sangat diperlukan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan proyek. Lembaga masyarakat dan riset berperan dalam menyediakan riset dan pengembangan teknologi baru, serta menawarkan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja dalam pengembangan potensi daerah.

Pengembangan produktivitas ekonomi dapat terwujud melalui pemerataan Pembangunan dan Pembangunan konektivitas antar wilayah.

Dengan Strategi dan Arah Kebijakan :

1. Intensifikasi Lahan Pertanian

a. Peningkatan sarana dan prasarana produksi pertanian selaras alam

Peningkatan sarana dan prasarana produksi pertanian yang selaras alam berfokus pada penggunaan teknologi dan praktik pertanian yang ramah lingkungan, serta mengoptimalkan sumber daya alam yang ada untuk meningkatkan hasil pertanian dan kesejahteraan petani, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

2. Menerapkan Sistem Pertanian berkelanjutan dan pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (KPT)

Pengembangan kawasan pertanian terpadu (KPT) merupakan upaya untuk mengintegrasikan berbagai kegiatan pertanian dalam satu kawasan, seperti tanaman pangan, peternakan, perikanan, dan

lainnya, sehingga tercipta hubungan timbal balik yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.

a. Pelaksanaan penyehatan lahan marginal

Pelaksanaan penyehatan lahan marginal dilakukan melalui beberapa langkah untuk meningkatkan kesuburan dan produktivitas lahan yang kurang optimal. Tindakan ini meliputi perbaikan sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, serta penggunaan bahan amelioran seperti kapur, bahan organik, dan pupuk NPK. Selain itu, diperlukan juga upaya untuk meningkatkan ketersediaan air dan memperbaiki drainase pada lahan tersebut.

b. Penerapan teknologi tepat guna melalui kerjasama dengan stakeholder pembangunan sektor pertanian

Penerapan teknologi tepat guna melalui kerja sama dengan pemangku kepentingan pembangunan sektor pertanian dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kesejahteraan petani. Kolaborasi ini melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga penelitian, perusahaan swasta, dan petani sendiri, untuk mengembangkan serta menerapkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal.

c. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian

Pengendalian alih fungsi lahan pertanian adalah upaya untuk mengatur dan membatasi perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi non-pertanian, seperti perumahan atau industri yang bertujuan untuk menjaga ketersediaan lahan pertanian, mendukung ketahanan pangan, dan mencegah dampak negatif alih fungsi lahan terhadap lingkungan dan sosial.

d. Penguatan kapasitas SDM Pertanian

Upaya untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di sektor pertanian yang bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja pertanian yang profesional, mandiri, berdaya saing, dan memiliki jiwa wirausaha, serta mampu menjawab tantangan transformasi digital di sektor pertanian.

e. Peningkatan populasi dan kesehatan hewan (lembu, kerbau, kambing, babi)

Peningkatan populasi dan kesehatan hewan, termasuk lembu, kerbau, kambing, dan babi dilakukan untuk meningkatkan produktivitas peternakan dan memenuhi kebutuhan pangan di

Kabupaten Samosir. Usaha ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari perbaikan kualitas bibit, manajemen pemeliharaan yang baik, hingga pencegahan dan pengendalian penyakit.

f. Pengembangan pola budidaya ikan melalui metode perikanan ramah lingkungan

Pengembangan pola budidaya ikan melalui metode perikanan ramah lingkungan bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan keberlanjutan sektor perikanan melalui. Beberapa metode yang dapat diterapkan antara lain sistem bioflok, budidaya multi-spesies, akuaponik, dan penggunaan teknologi seperti sistem resirkulasi.

g. Pengembangan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal yang berketahanan iklim

Arah kebijakan difokuskan pada pengembangan pangan lokal Kabupaten Samosir yang beragam, bergizi, dan berkelanjutan melalui pemanfaatan potensi lahan, tanaman pangan lokal, serta penerapan pertanian cerdas iklim. Upaya ini dilakukan dengan pemberdayaan petani dan kelompok wanita tani, peningkatan kapasitas produksi ramah lingkungan, serta penguatan rantai nilai dan pemasaran produk pangan lokal. Kebijakan ini bertujuan mewujudkan sistem pangan daerah yang tangguh terhadap perubahan iklim dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Meningkatkan mutu dan Nilai Tambah hasil pertanian

a. Penyediaan dukungan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian

Penyediaan dukungan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian dilakukan dalam upaya pemerintah untuk menyediakan fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan petani dalam mengolah hasil panen mereka. Ini termasuk penyediaan alat dan mesin pertanian, fasilitas penyimpanan, serta akses ke teknologi pengolahan yang modern. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian, memperpanjang daya simpan produk, dan meningkatkan kesejahteraan petani.

4. Meningkatkan industri pengolahan hasil pertanian

- a. Pelaksanaan hilirisasi produksi pertanian unggulan (bawang, cabe, kentang, mangga, ubi, kopi, andaliman, jagung, kemiri, ikan, susu kerbau-yogurt)*

Meningkatkan proses pengolahan produk pertanian (hilirisasi) yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk tersebut, sehingga meningkatkan daya saing dan menciptakan peluang ekonomi baru. Fokus utamanya adalah mengubah bahan baku pertanian menjadi produk bernilai lebih tinggi, berkualitas, dan siap pakai dengan memanfaatkan teknologi untuk produksi pertanian unggulan yang ada di kabupaten Samosir antara lain bawang, cabe, kentang, mangga, ubi, kopi, andaliman, jagung, kemiri, ikan, susu kerbau-yogurt.

- b. Peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha pengolahan hasil pertanian*

Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku usaha pengolahan hasil pertanian adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pelaku usaha di sektor pengolahan hasil pertanian yang bertujuan agar pelaku usaha dapat mengelola usaha dengan lebih efektif, meningkatkan kualitas produk, dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta permintaan pasar melalui pelatihan-pelatihan.

- c. Fasilitasi ijin dan pemasaran hasil pertanian (termasuk P-IRT, halal, BPOM)*

Fasilitasi perizinan dan pemasaran produk pertanian, termasuk P-IRT, halal, dan BPOM, melibatkan serangkaian langkah untuk memastikan produk pertanian memenuhi standar keamanan, kualitas, dan legalitas, sehingga dapat dipasarkan secara luas melalui penyediaan informasi, pendampingan serta kerjasama² dengan pelaku usaha di kabupaten Samosir.

- d. Penyediaan dukungan sarana prasarana pengolahan hasil pertanian*

Penyediaan dukungan sarana prasarana pengolahan hasil pertanian dengan upaya untuk menyediakan dan memfasilitasi berbagai fasilitas, peralatan, dan infrastruktur yang diperlukan

untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian setelah panen. Ini mencakup penyediaan bangunan seperti gudang atau bangsal pascapanen, serta alat dan mesin pengolahan.

5. Meningkatkan Pengembangan dan Pengelolaan Objek Wisata

a. Pembangunan kawasan objek wisata baru

Pembangunan kawasan objek wisata baru di Samosir wajib dilakukan untuk menjaga lama tinggal wisatawan di kabupaten Samosir, berupaya menciptakan daya tarik wisata baru dengan menata ulang Kawasan Waterfront City Pangururan dan mengembangkan Pantai Pallombuan sebagai destinasi wisata. Pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah dan memberikan pengalaman wisata yang lebih menarik bagi pengunjung.

b. Pelestarian cagar alam dan cagar budaya

Pelestarian cagar alam dan cagar budaya dilakukan dalam upaya untuk melindungi dan menjaga keberadaan serta nilai penting dari keduanya. Cagar alam adalah kawasan konservasi yang dilindungi untuk menjaga ekosistem alami dan keanekaragaman hayati, sedangkan cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan yang memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan.

Selain itu, sebagai salah satu warisan budaya, rumah adat Batak tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai simbol identitas, kebanggaan, dan kearifan lokal masyarakat Batak. Namun, seiring berjalannya waktu dan modernisasi, banyak rumah adat Batak mengalami kerusakan, penurunan fungsi, bahkan terancam punah karena kurangnya perawatan dan perhatian. Untuk itu diperlukan revitalisasi rumah adat Batak sebagai upaya pelestarian warisan budaya yang memiliki nilai sejarah, arsitektur, dan filosofi yang tinggi.

Program revitalisasi rumah adat Batak bertujuan untuk mengembalikan fungsi dan bentuk asli rumah adat dengan tetap mempertahankan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Kegiatan ini mencakup pemugaran struktur bangunan, pemeliharaan ornamen tradisional, serta peningkatan

fungsi sosial dan ekonomi rumah adat, misalnya sebagai daya tarik wisata budaya dan pusat aktivitas komunitas lokal.

Melalui revitalisasi ini, diharapkan terjadi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian budaya, penguatan identitas lokal, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kegiatan ini juga menjadi wujud sinergi antara pemerintah, masyarakat adat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menjaga kelestarian warisan budaya Batak demi generasi mendatang.

c. Revitalisasi Geopark Kaldera Toba

Revitalisasi Geopark Kaldera Toba merupakan langkah strategis dalam rangka mengoptimalkan potensi warisan geologi dan keanekaragaman hayati serta budaya yang dimiliki kawasan Danau Toba, khususnya di wilayah Kabupaten Samosir sebagai bagian dari inti Geopark. Proses revitalisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur geowisata, memperkuat kapasitas masyarakat lokal, dan memperbaiki tata kelola destinasi sesuai dengan standar UNESCO Global Geopark (UGG). Kaldera Toba membutuhkan penanganan berkelanjutan untuk menjaga keberlanjutan nilai-nilai geologi (geoheritage), ekologi, dan budaya yang terkandung di dalamnya. Upaya revitalisasi difokuskan pada penguatan dan pengembangan interpretasi situs geowisata/geosite baru, pemeliharaan dan pengembangan sarana pendukung (akses jalan, pusat informasi, toilet ramah lingkungan, jalur tracking), serta pelibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi kreatif dan edukasi konservasi.

Revitalisasi juga menjadi kunci dalam meningkatkan daya tarik Geopark Kaldera Toba sebagai destinasi wisata unggulan berkelas dunia yang inklusif dan berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha sangat diperlukan untuk menjadikan Geopark Kaldera Toba sebagai pengungkit utama pembangunan wilayah dan kesejahteraan masyarakat lokal, khususnya di Kabupaten Samosir.

6. Meningkatkan diversifikasi dan pengembangan kawasan objek wisata

a. Pengembangan dan revitalisasi kawasan agrowisata, ekowisata, wisata kultur, wisata religi, wisata kuliner

Pengembangan dan revitalisasi kawasan agrowisata melibatkan peningkatan kualitas dan daya tarik kawasan pertanian untuk tujuan wisata. Ini mencakup perbaikan fasilitas, pengembangan atraksi, serta pemberdayaan masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam industri pariwisata berbasis pertanian yang bertujuan meningkatkan kunjungan wisatawan, pendapatan petani, dan kelestarian lingkungan serta budaya lokal.

7. Menyelenggarakan Event dan Paket Wisata

- a. Melakukan kerjasama se-kawasan Danau Toba dalam penyelenggaraan event dan paket wisata*

Penyelenggaraan dilakukan secara bersama dengan melakukan event serta paket wisata se kawasan Danau toba yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian sekawasan Danau Toba.

- b. Pelaksanaan 1 event 1 desa berbasis kearifan lokal*

Pelaksanaan "1 event 1 desa berbasis kearifan lokal" mengacu pada inisiatif untuk menyelenggarakan acara atau kegiatan di setiap desa yang berakar pada nilai-nilai budaya dan tradisi local yang bertujuan untuk melestarikan dan mempromosikan kearifan lokal, serta melibatkan masyarakat desa dalam kegiatan yang bermakna.

8. Hilirisasi produk unggulan

- a. Penguatan Kapasitas berbasis BNSP*

Penguatan Kapasitas berbasis BNSP dalam upaya peningkatan kompetensi dan keahlian tenaga kerja melalui sertifikasi yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebuah lembaga independen di Indonesia yang bertanggung jawab dalam memberikan sertifikasi kompetensi kerja.

- b. Pelaksanaan hilirisasi produksi unggulan pertanian dan ekonomi kreatif*

Hilirisasi produksi unggulan pertanian dan ekonomi kreatif dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan ekonomi kreatif melalui pengolahan lebih lanjut menjadi produk setengah jadi atau produk jadi, sehingga memberikan keuntungan ekonomi yang lebih besar bagi pelaku usaha dan masyarakat.

Adapun jenis Produk Unggulan Bahan Baku Kabupaten Samosir, diantaranya: kopi, kacang tanah, andaliman, bawang merah, jahe, kentang, ubi jalar, ubi kayu, labu, pisang, padi, kemiri, dan mangga. Sementara itu, produk unggulan olahan diantaranya: produk olahan kopi, produk olahan kacang tanah, produk olahan andaliman, produk olahan bawang merah, produk olahan jahe, produk olahan kentang, produk olahan ubi jalar, produk olahan ubi kayu, produk olahan labu, produk olahan pisang, produk olahan padi, produk olahan kemiri, produk olahan mangga, produk kerajinan tenun, produk kerajinan ukir, produk kerajinan anyaman, produk kerajinan tangan, produk kerajinan fashion.

c. Digitalisasi pemasaran

penggunaan teknologi digital dan internet untuk mempromosikan produk atau layanan kepada audiens target. Ini melibatkan berbagai platform online seperti situs web, media sosial, dan mesin pencari untuk menjangkau pelanggan secara lebih luas.

9. Menumbuhkan koperasi produktif (sektor riil) dan meningkatkan kapasitas koperasi

a. Mendirikan dan mengembangkan koperasi produktif sektor pertanian, UMK

mengembangkan koperasi produktif di sektor pertanian melalui beberapa langkah kunci antara lain memperkuat manajemen koperasi dan tingkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di dalamnya kemudian memfasilitasi akses pembiayaan bagi petani melalui koperasi serta mendorong pengembangan produk pertanian yang memiliki nilai tambah, serta perluas akses pasar. Keempat, bangun kemitraan strategis antara koperasi, pemerintah, dan pihak swasta untuk mendukung pertumbuhan.

b. Meningkatkan kerjasama untuk pemasaran hasil produksi koperasi sektor riil

meningkatkan pemasaran hasil produksi koperasi sektor riil melalui perkuatan kerjasama, baik antar anggota koperasi maupun dengan pihak lain guna membentuk jaringan pemasaran, memanfaatkan teknologi, dan menjalin kemitraan strategis.

- c. *Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis BNSP kepada pelaku koperasi*

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) kepada pelaku koperasi bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) koperasi, sehingga koperasi dapat bersaing dan berkembang lebih baik dengan fokus pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang relevan dengan kebutuhan operasional koperasi.

10. Meningkatkan kapasitas pelaku ekonomi kreatif dan memberikan bantuan modal

- a. *Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis BNSP kepada pelaku ekonomi kreatif*

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) kepada pelaku ekonomi kreatif bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing pelaku ekonomi kreatif melalui sertifikasi profesi yang diakui secara nasional dengan memberikan pelatihan teknis dan studi lapangan, serta diakhiri dengan uji kompetensi untuk mengukur penguasaan materi.

- b. *Peningkatan pemasaran produk*

Peningkatan pemasaran produktif dengan upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan pemasaran suatu produk atau layanan dengan strategi dan taktik untuk mencapai tujuan pemasaran dengan hasil yang lebih baik dan biaya yang lebih efisien.

- c. *Pemberian bantuan permodalan untuk pelaku UKM dan IKM dengan bunga nol persen*

Pemberian bantuan permodalan dengan bunga nol persen untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam upaya untuk meringankan beban finansial pelaku usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan melibatkan penyaluran dana tanpa bunga atau dengan subsidi bunga, sehingga pelaku UMKM dapat mengakses modal untuk mengembangkan usaha mereka tanpa terbebani biaya pinjaman yang tinggi.

11. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dengan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan

a. Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan kabupaten

Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan kabupaten dilakukan melalui pembukaan jalan, pembangunan dan rehabilitasi jalan kabupaten, peningkatan kualitas jalan desa, serta pembangunan dan perawatan jembatan penghubung antarwilayah. Pemerintah Kabupaten Samosir berupaya membuka daerah-daerah terisolasi, mengurangi waktu tempuh, dan menurunkan biaya logistik. Peningkatan ruas jalan, pembangunan jembatan, pelebaran jalan menuju kawasan wisata unggulan dan rintisan, daerah-daerah pertanian, permukiman, pusat fasilitas umum, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, jalan penghubung antar kecamatan terus dikejar dengan pendekatan berkelanjutan dan partisipatif.

Dengan arah kebijakan yang tepat dan konsisten, pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan diharapkan mampu menjadi penggerak utama transformasi wilayah, meningkatkan daya saing daerah, dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Samosir secara merata dan berkelanjutan.

b. Peningkatan cakupan layanan air bersih

Peningkatan cakupan layanan air bersih dalam upaya untuk memperluas akses masyarakat terhadap air bersih, sehingga lebih banyak orang dapat menikmati manfaat air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Ini adalah upaya untuk memastikan bahwa lebih banyak rumah tangga dan individu memiliki akses ke air bersih yang aman dan terjangkau.

c. Peningkatan cakupan layanan sanitasi

Peningkatan cakupan layanan sanitasi mengacu pada upaya untuk memperluas akses masyarakat terhadap fasilitas sanitasi yang layak dan aman, serta pengelolaan air limbah yang baik dengan melakukan berbagai kegiatan, termasuk pembangunan dan peningkatan fasilitas sanitasi, serta edukasi dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat.

d. *Peningkatan efektivitas cakupan layanan irigasi*

Peningkatan efektivitas cakupan layanan irigasi mengacu pada upaya untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan irigasi, sehingga lebih banyak lahan pertanian dapat diairi secara efektif dan efisien. Melalui berbagai kegiatan seperti pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, serta pengelolaan yang lebih baik untuk memastikan ketersediaan air yang cukup dan tepat waktu bagi petani.

e. *Peningkatan kualitas permukiman*

Peningkatan kualitas permukiman dengan upaya untuk memperbaiki kondisi fisik, sosial, dan lingkungan dari suatu kawasan permukiman agar lebih layak huni dan berkelanjutan dengan melakukan perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas bangunan, penyediaan fasilitas umum yang memadai, serta pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik.

f. *Pengelolaan dan pemanfaatan ruang yang berbasis regulasi*

Pengelolaan dan pemanfaatan ruang yang berbasis regulasi dengan upaya mengatur, mengendalikan, dan memanfaatkan ruang wilayah sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan yang dimulai dari perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

g. *Peningkatkan kualitas SDM pelaku usaha konstruksi*

Meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) pelaku usaha konstruksi sangat penting untuk memastikan keberhasilan proyek konstruksi dan daya saing industri melalui berbagai upaya seperti pelatihan, pendidikan, dan pembinaan, serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.

h. *Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni*

Peningkatan Kualitas RTLH dilakukan dengan meningkatkan kualitas rumah agar sesuai dengan persyaratan dan standar rumah layak huni. Hakekat dari *rumah layak huni* adalah rumah yang menjamin keamanan dan ketenangan/kenyamanan bagi penghuninya khususnya terhadap kondisi sekitar (alam dan lingkungan), sehingga persentase rumah tidak layak huni di Kabupaten Samosir dapat menurun.

i. Penataan kawasan kumuh

Penataan kawasan kumuh dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan permukiman di daerah yang termasuk dalam kategori kumuh sesuai dengan kewenangan Kabupaten yang tertuang dalam SK Kawasan Kumuh Kabupaten Samosir untuk menciptakan permukiman yang layak huni, sehat, aman, dan tertata, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

12. **Peningkatan kualitas sarana, prasarana dan keselamatan perhubungan darat**

a. Peningkatan kualitas/kuantitas dermaga

Meningkatkan fungsi dan kondisi fisik dermaga agar dapat melayani kapal dan kegiatan terkait pelabuhan dengan lebih baik yang dimulai dari perbaikan struktur fisik, peningkatan fasilitas, hingga optimalisasi operasional untuk meningkatkan aksesibilitas.

Kemudian, pembangunan Dermaga pengumpan perlu dilakukan sebagai simpul transportasi lokal yang menghubungkan desa-desa di pinggiran Danau Toba dan wilayah terpencil dengan dermaga utama, pelabuhan penyeberangan, serta kawasan wisata unggulan. Keberadaan dermaga ini mendukung kelancaran arus orang dan barang, mendorong efisiensi logistik, serta membuka peluang bagi peningkatan ekonomi masyarakat melalui sektor perdagangan, pertanian, perikanan, dan pariwisata.

Dermaga yang representatif dan terintegrasi dengan infrastruktur darat akan menciptakan sistem transportasi multimoda yang lebih handal dan berkelanjutan. Selain itu, pembangunan ini memperhatikan aspek keselamatan pelayaran, kenyamanan penumpang, serta kelestarian lingkungan danau. Dengan dibangunnya dermaga pengumpan yang memadai, diharapkan terjadi peningkatan konektivitas wilayah, pemerataan pembangunan antar kecamatan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Samosir secara berkelanjutan.

b. Peningkatan fasilitas kelengkapan keselamatan jalan

memperbaiki dan meningkatkan kondisi jalan, termasuk perbaikan kerusakan dan peningkatan fungsi jalan sesuai umur

rencana dimulai dari perbaikan kerusakan hingga penataan utilitas di bawah tanah atau di tepi jalan.

13. Meningkatkan pemeliharaan infrastruktur yang terbangun

- a. *Pemeliharaan dan preservasi jalan dan jembatan secara berkala*
pemeliharaan yang dilakukan secara terencana dan terjadwal untuk mempertahankan kondisi jalan dan jembatan agar tetap berfungsi optimal dan aman digunakan. Kegiatan ini mencakup pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi, dan rekonstruksi, bertujuan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan mengembalikan kondisi jalan dan jembatan ke tingkat yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- b. *Peningkatan kualitas sarana, prasarana dan keselamatan Perhubungan Darat*
Peningkatan kualitas sarana, prasarana, dan keselamatan perhubungan darat dilakukan untuk mewujudkan sistem transportasi darat yang lebih baik, aman, dan efisien yang dimulai dari perbaikan jalan dan fasilitas pendukung, hingga peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan umum.
- c. *Penyediaan tanah untuk pembangunan*
pengadaan tanah yang diperlukan untuk mengimbangi pembangunan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, atau proyek strategis lainnya melalui beberapa tahapan, mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga penyerahan hasil.

14. Konservasi lingkungan berkelanjutan

- a. *Peningkatan sarana prasarana pengolahan sampah/limbah*
Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan sampah/limbah dilakukan untuk mengatasi masalah lingkungan dan kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas yang memadai, seperti tempat pengolahan sampah sementara (TPS), tempat pemrosesan akhir (TPA), dan sistem pengolahan lanjutan, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik.

b. *Konservasi lahan kritis dan daerah tangkapan air*

Konservasi lahan kritis dan daerah tangkapan air adalah upaya untuk memulihkan dan menjaga kualitas lahan kritis serta daerah yang berfungsi sebagai penampung air hujan. Dalam upaya mencegah erosi, banjir, kekeringan, dan menjaga ketersediaan air bersih bagi kehidupan.

Konservasi lahan kritis dilakukan untuk memperbaiki kondisi tanah yang rusak, dengan reboisasi, pembuatan terasering, dan penerapan metode konservasi tanah dan air. Sedangkan konservasi daerah tangkapan air fokus pada upaya menjaga fungsi daerah tersebut sebagai penyedia air bersih, misalnya dengan pembuatan sumur resapan, biopori, dan pemeliharaan hutan di daerah resapan air.

c. *Pengembangan pengelolaan sampah berbasis masyarakat*

Pengembangan pengelolaan sampah berbasis masyarakat adalah pendekatan pengelolaan sampah yang melibatkan aktif dan partisipasi masyarakat dalam seluruh prosesnya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, hingga evaluasi untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan serta kondisi lokal.

d. *Peningkatan pengolahan limbah organik*

Peningkatan pengolahan limbah organik dalam upaya untuk mengelola dan memanfaatkan limbah organik (seperti sisa makanan, daun-daunan, dan kotoran hewan) secara lebih efektif, mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan, dan mengubahnya menjadi sumber daya yang bermanfaat.

e. *Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan diantaranya melalui penetapan regulasi*

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dilakukan dengan penetapan regulasi yang berfungsi untuk menetapkan standar, batasan, dan prosedur yang harus diikuti oleh berbagai pihak untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan.

f. *Penguatan dan pemberdayaan masyarakat peduli lingkungan*

Penguatan dan pemberdayaan masyarakat peduli lingkungan dilakukan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan

melalui pemberian informasi, pelatihan, serta dukungan yang memungkinkan masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan dan mengambil tindakan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan.

g. *Kajian risiko bencana*

Melakukan Kajian Risiko Bencana (KRB) secara sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko bencana di suatu wilayah untuk memahami potensi dampak negatif bencana, seperti kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta untuk merencanakan upaya mitigasi dan kesiapsiagaan yang efektif.

h. *Mitigasi bencana*

Melakukan Mitigasi bencana dalam upaya mengurangi risiko dan dampak buruk yang disebabkan oleh bencana, baik melalui tindakan fisik maupun peningkatan kesadaran masyarakat yang Tujuannya adalah untuk meminimalkan kerugian dan risiko akibat bencana, serta meningkatkan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Dalam rangka pencapaian **Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Responsif dan Berintegritas** dengan tujuan yang ingin dicapai **Meningkatnya kualitas kinerja birokrasi pemerintahan**, yang dijabarkan dalam 1 (satu) sasaran pembangunan, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan Adaptif.

Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan Adaptif dilakukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi, maka perlu dilakukan penyederhaan proses administrasi, mengurangi birokrasi yang berlebihan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Dalam memastikan setiap tindakan pemerintahan dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan, system transparansi dan akuntabilitas akan diterapkan. Selain itu, pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) akan dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme dalam pelayanan publik. Kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan seperti sektor swasta,

masyarakat sipil, dan organisasi internasional akan diperkuat untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Kolaborasi antar lembaga pemerintah akan ditingkatkan untuk memastikan sinergi dalam pelaksanaan kebijakan dan program. Pelayanan publik yang berkualitas merupakan indikator penting dari tata kelola pemerintahan yang baik. Digitalisasi layanan publik akan dikembangkan dan diperluas untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kenyamanan bagi masyarakat. Standar layanan publik yang tinggi akan diterapkan untuk memastikan bahwa semua warga negara mendapatkan pelayanan yang adil dan berkualitas. Selain itu, pusat layanan terpadu (*one-stop service*) akan didirikan untuk memudahkan akses masyarakat terhadap berbagai layanan pemerintah. Menegakkan integritas dan supremasi hukum adalah dasar dari tata kelola pemerintahan yang baik. Penegakan hukum yang adil dan transparan akan dipastikan, serta program anti korupsi akan dilaksanakan dan pengawasan internal diperkuat untuk mencegah praktik korupsi. Kebijakan yang fleksibel dan adaptif akan diterapkan untuk menanggapi perubahan kebutuhan dan kondisi masyarakat, serta infrastruktur data yang kuat akan dibangun untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Kolaborasi dan partisipasi aktif masyarakat dalam tata kelola pemerintahan adalah kunci keberhasilan Dengan Strategi dan Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berintegritas dan adaptif

a. Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilakukan untuk meningkatkan tingkat kematangan dan efektivitas sistem pengendalian internal di instansi pemerintah yang tujuan utamanya adalah untuk mencapai tujuan organisasi yang lebih baik, termasuk efektivitas dan efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan kepatuhan terhadap peraturan.

b. Pembangunan Zona Integritas (ZI)

Pembangunan Zona Integritas (ZI) adalah upaya instansi pemerintah untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani melalui reformasi birokrasi, terutama dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

ZI juga dilakukan guna mengukur serta memberikan predikat yang diberikan kepada instansi yang berhasil mencapai ZI.

c. *Digitalisasi Arsip*

Melakukan proses mengubah arsip dari bentuk fisik (seperti kertas) menjadi bentuk digital atau elektronik. Tujuannya adalah untuk melestarikan informasi, memudahkan akses, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan arsip sehingga arsip pemerintahan dapat terjaga dalam waktu yang panjang.

d. *Optimalisasi Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)*

upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan pengaduan yang masuk melalui sistem tersebut yang indikatornya adalah peningkatan kecepatan respon, peningkatan kualitas solusi, dan peningkatan transparansi dalam proses penanganan pengaduan.

e. *Peningkatan Kualitas Kebijakan*

Peningkatan kualitas kebijakan (policy) mengacu pada upaya untuk memperbaiki dan mengoptimalkan proses pembuatan, implementasi, dan evaluasi kebijakan public yang bertujuan untuk menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat.

f. *Peningkatan Reformasi Hukum*

Peningkatan reformasi hukum dalam upaya untuk memperbaiki dan memperbarui sistem hukum agar lebih adil, transparan, dan efisien. Ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari perbaikan regulasi, penguatan lembaga peradilan, hingga peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Untuk menjaga ketentraman masyarakat Pemerintah Kabupaten Samosir Melibatkan tokoh agama, pemimpin adat, dan masyarakat/komunitas dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) guna memperkuat harmonisasi suku, agama, ras, dan antar-golongan.

Kegiatan ini dilakukan melalui bantuan Honorarium kepada Tim FKUB dan pelaksanaan dialog antar-komunitas setiap tahun.

Pemerintah Kabupaten Samosir juga berkomitmen untuk menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sebagai bagian dari upaya menciptakan sumber daya manusia

yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Arah kebijakan difokuskan pada penguatan sinergi lintas sektor dalam pencegahan, pemberantasan, serta rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Edukasi sejak dini, pengawasan wilayah rawan, serta pemberdayaan generasi muda menjadi prioritas untuk mewujudkan Kabupaten Samosir yang bersih dari narkoba (*drug free community*).

g. *Peningkatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral*

Peningkatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral adalah upaya untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data statistik di berbagai sektor pemerintahan yang bertujuan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

h. *Peningkatan Tata Kelola Pengadaan*

Melakukan Perbaikan dan mengoptimalkan proses pengadaan barang/jasa pemerintah, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan. Yang bertujuan untuk mewujudkan pengadaan yang lebih profesional, efisien, efektif, transparan, bersaing, adil, dan akuntabel.

i. *Peningkatan Sistem Merit*

Dilakukan guna menciptakan birokrasi yang profesional, efisien, dan transparan. Sistem merit menekankan pada prinsip keadilan dan objektivitas dalam pengelolaan ASN, dengan memastikan bahwa promosi, mutasi, dan pengembangan karir didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, bukan pada faktor-faktor seperti latar belakang politik, ras, atau hubungan pribadi.

j. *Pengoptimalan penerapan standar etika pelayanan publik*

Melakukan Optimalisasi dengan penerapan standar etika pelayanan publik melalui pemahaman dan komitmen dari seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk menjalankan tugas dan kewajibannya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan profesionalitas yang dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik, mewujudkan birokrasi yang bersih dan berintegritas, serta memastikan pelayanan yang adil, transparan, dan responsif.

k. *Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik yang terstandar*

Melakukan Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik yang terstandar dengan menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang memenuhi standar kualitas dan kebutuhan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini mencakup penyediaan fasilitas fisik, peralatan, dan sistem yang mendukung kelancaran proses pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

l. *Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)*

Melakukan Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan pelayanan publik dan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dengan memanfaatkan teknologi digital.

m. *Pelaksanaan pengukuran Indeks BerAkhlak*

Melakukan Pelaksanaan pengukuran Indeks BerAKHLAK untuk mengukur implementasi nilai-nilai dasar ASN (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) serta Employer Branding "Bangga Melayani Bangsa" di instansi pemerintah Kabupaten Samosir melalui pengukuran dan survei yang melibatkan ASN sebagai responden, dengan tujuan untuk mengetahui tingkat penerapan nilai-nilai BerAKHLAK dan dampaknya terhadap budaya kerja organisasi.

n. *Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas*

Melaksanakan Survei Penilaian Integritas (SPI) bersama dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk memetakan dan memonitor risiko korupsi di berbagai instansi pemerintah bertujuan untuk mengukur efektivitas upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan dan memberikan rekomendasi perbaikan sistem dan tata kelola pemerintahan.

o. *Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat*

Melakukan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi. Tujuannya

adalah untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan pelayanan, serta sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kualitas layanan.

p. Peningkatan Realisasi Investasi

Menjaga Peningkatan realisasi investasi dengan mengupayakan peningkatan jumlah investasi yang terealisasi, baik dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), dibandingkan dengan periode sebelumnya atau target yang ditetapkan. Peningkatan ini seringkali menjadi indikator positif bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara karena menunjukkan kepercayaan investor dan aktivitas ekonomi yang meningkat.

q. Pengendalian Inflasi

Melakukan Pengendalian inflasi untuk menjaga agar tingkat kenaikan harga barang dan jasa tetap terkendali, sehingga tidak mengganggu stabilitas perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Inflasi yang tidak terkendali dapat menurunkan daya beli masyarakat dan mengganggu stabilitas ekonomi.

r. Penggunaan Produk Dalam Negeri

Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) merujuk pada upaya untuk lebih mengutamakan dan menggunakan barang serta jasa yang diproduksi di dalam negeri, baik oleh industri besar maupun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ini merupakan bagian dari Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kemandirian bangsa, dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.

s. Peningkatan ketersediaan data dan informasi yang dapat digunakan dalam penyusunan perencanaan daerah

Peningkatan ketersediaan data dan informasi yang dapat digunakan dalam penyusunan perencanaan daerah sangat penting untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada fakta dan kondisi terkini, sehingga lebih efektif dan tepat sasaran. Data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan akan membantu dalam merumuskan strategi, menetapkan tujuan jangka panjang, serta menyusun standar dan prosedur yang akan memajukan daerah.

- t. Peningkatan konsistensi antar dokumen perencanaan perangkat daerah melalui Peningkatan implelementasi perencanaan berbasis TIK*

Melakukan Peningkatan konsistensi antar dokumen perencanaan perangkat daerah, seperti Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), untuk memastikan sinkronisasi dan efektivitas perencanaan pembangunan. Konsistensi ini memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renja PD selaras dengan tujuan strategis yang ditetapkan dalam Renstra, serta mendukung pencapaian visi dan misi daerah yang dilakukan dengan aplikasi atau berbasis TIK.

- u. Peningkatan kerjasama dengan mitra strategis bidang riset, inovasi dan penelitian pengembangan*

Peningkatan kerjasama dengan mitra strategis dalam bidang riset, inovasi, dan pengembangan merujuk pada upaya untuk memperkuat kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, lembaga penelitian, industri, dan pemerintah, untuk mendorong kemajuan dalam penelitian dan pengembangan yang bertujuan untuk menciptakan solusi inovatif yang bermanfaat bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

- v. Peningkatan kuantitas dan kualitas inovasi daerah*

Peningkatan kuantitas dan kualitas inovasi daerah sangat penting untuk kemajuan suatu wilayah. Inovasi daerah, yang mencakup berbagai aspek seperti administrasi, manajemen, kebijakan, teknologi, dan sosial, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pelayanan publik, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

- w. Peningkatan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)*

Peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan kinerja instansi pemerintah. Ini melibatkan serangkaian aktivitas, alat, dan prosedur sistematis untuk menetapkan, mengukur, mengumpulkan, mengklasifikasikan, meringkas, dan melaporkan kinerja.

2. Meningkatkan kualitas manajemen tata kelola keuangan daerah

a. Peningkatan produktivitas aset daerah (smart asset)

Melakukan Peningkatan produktivitas aset daerah (smart asset) untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, baik aset fisik maupun non-fisik, melalui penerapan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan dalam pengelolaan asset dengan menggunakan sistem informasi, analisis data, dan otomatisasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

b. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan, efisien, dan bertanggung jawab yang mencakup pelaporan keuangan yang akurat, penggunaan dana yang sesuai dengan peraturan, serta pertanggungjawaban atas setiap tindakan dan keputusan yang berkaitan dengan keuangan daerah. Peningkatan akuntabilitas dilakukan dalam upaya membangun kepercayaan publik, mencegah korupsi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Arah Kebijakan Tahunan Pembangunan Daerah

Penahapan pembangunan sebagai salah satu bentuk dari strategi pembangunan merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Penahapan Pembangunan RPJMD disajikan pada tabel 3.12 di bawah ini.

Tabel 3.12 Penahapan Pembangunan RPJMD

Penahapan Rencana Pembangunan					
2025	2026	2027	2028	2029	2030
Penyelarasan Keberlanjutan Program dan Penguatan Fondasi Pembangunan	Implementasi dan kolaborasi pembangunan:	Percepatan akselerasi pembangunan:	Optimalisasi Pembangunan	Konsolidasi, Penyelesaian Program Unggulan/prioritas, Evaluasi Capaian Pembangunan:	Keberlanjutan dan Legacy
Pelaksanaan Kegiatan Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) dan Program Unggulan Kabupaten, Proyek Strategis Daerah	Pelaksanaan Kegiatan Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) dan Program Unggulan Kabupaten, Proyek Strategis Daerah	Akselerasi pelaksanaan Kegiatan Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) dan Program Unggulan Kabupaten, Proyek Strategis Daerah	Penyesuaian Pelaksanaan Program Unggulan Kabupaten, Proyek Strategis Daerah berdasarkan hasil evaluasi	Penuntasan Pelaksanaan Program Unggulan Kabupaten, Proyek Strategis Daerah	Penyiapan skema lanjutan Program Unggulan Kabupaten, Proyek Strategis Daerah
	Peningkatan kolaborasi dan sinergitas program antar OPD dan lintas pemerintah pusat-daerah	Akselerasi Kemitraan Pembiayaan pembangunan berbasis proyek strategis	Optimalisasi Kemitraan Pembiayaan pembangunan berbasis proyek strategis	Konsolidasi Kemitraan Pembiayaan pembangunan berbasis proyek strategis	Pelembagaan ekosistem kolaborasi multipihak
Penyusunan kebijakan dan kelembagaan pendukung pelaksanaan RPJMD	Peningkatan kemitraan strategis antara pemerintah, swasta dan masyarakat	Akselerasi kemitraan strategis antara pemerintah, swasta dan masyarakat	Optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber PAD	Evaluasi dampak pelaksanaan kebijakan pembangunan terhadap masyarakat	Penyiapan regulasi pendukung pembangunan jangka panjang Tahap II

Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Penahapan Rencana Pembangunan					
2025	2026	2027	2028	2029	2030
Digitalisasi layanan publik dan peningkatan kapasitas SDM aparatur	Penguatan kelembagaan dan regulasi pendukung	Penyesuaian kebijakan dan regulasi dengan dinamika nasional	Optimalisasi kolaborasi dan sinergitas program antar OPD dan lintas pemerintah pusat-daerah	Pemantapan kolaborasi dan sinergitas program antar OPD dan lintas pemerintah pusat-daerah	
	Penyempurnaan program berdasarkan evaluasi kinerja	Evaluasi capaian pelaksanaan program prioritas kepala daerah			

Sumber: Bappeda Litbang Kabupaten Samosir, data diolah

Program Prioritas Pembangunan Daerah

a. Program Unggulan Daerah

Program pembangunan daerah Kabupaten Samosir Tahun 2025-2029, disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2025-2045, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 – 2029. Untuk itu, dalam rangka mempercepat pembangunan, dirumuskan Program Prioritas Pembangunan Daerah yang merupakan program-program unggulan yang bertujuan langsung untuk menjawab kebutuhan masyarakat Samosir untuk mewujudkan Samosir Unggul, Inklusif dan Berkelanjutan. Selain ini, ketujuh program unggulan ini merupakan janji politik Bupati dan Wakil Bupati kepada masyarakat Samosir.

Program prioritas pembangunan Kabupaten Samosir adalah sebagai berikut.

Tabel 3.13 Program Unggulan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir

No.	Progam Unggulan	Kegiatan Unggulan	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						Akhir Periode
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	BERANTAS (Berobat Tanpa Batas)	Cakupan Pemeriksaan kesehatan gratis	%	-	40	50	55	60	65	70	70
			Pembangunan Rumah Sakit Pratama penunjang pariwisata	Unit	0	-	-	-	1	-	-	1
			Cakupan UHC	%	97,30	98,60	98,60	98,60	98,60	98,60	98,60	98,60
		LANJUTKAN (Layanan Jaminan Untuk Tenaga Kerja Rentan)	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja rentan	%	13,15	13,15	17,48	21,80	26,12	30,45	34,79	34,79
		RAMOS PANTAS (Rantang Samosir Penurunan Angka Stunting)	Persentase Anak Stunting menerima manfaat	%	100	100	100	100	100	100	100	100
			Prevalensi Stunting	%	28,60	26,58	24,56	22,54	20,52	18,50	16,48	16,48
			Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapatkan makanan pendamping ASI	%	100	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase Ibu hamil KEK/Resikko KEK yang	%	100	100	100	100	100	100	100	100

Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Progam Unggulan	Kegiatan Unggulan	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						Akhir Periode
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			mendapatkan makanan Tambahan									
2.	Peningkatan Kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan, Pemberian Beasiswa pada Pelajar/Mahasiswa Berprestasi dan Kurang Mampu	SAMOSIR MARSIKKOLA	Jumlah Pelajar/Mahasiswa Berprestasi dan Kurang Mampu yang mendapatkan beasiswa	orang	2.183	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000	24.683
			Persentase PTK PAUD yang mendapatkan pelatihan	%	10	20	30	40	50	60	70	70
			Persentase PTK SD yang mendapatkan pelatihan	%	10	20	30	40	50	60	70	70
			Persentase PTK SMP yang mendapatkan pelatihan	%	10	20	30	40	50	60	70	70
3.	Pemerataan pembangunan infrastruktur	Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan										
		Jalan	Persentase kondisi jalan mantap	%	54,01	54,01	56	58	60	63	64	64
		Irigasi (Panel Surya)	Jumlah pompa air tenaga surya yang dibangun	Unit	5	2	2	2	2	2	2	17
		Air bersih/Sanitasi	Persentase Cakupan Layanan Air Bersih	%	55,84	55,84	58	60	62	64	65	65

Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Progam Unggulan	Kegiatan Unggulan	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						Akhir Periode
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		SAMOSIR PAPAGA (Pature Padenggan Bagas) rumah tidak layak huni (RTLH)	Persentase Rumah Layak Huni	%	82,51	82,51	83	84	85	86	87	87
		Persampahan	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	57,20	60	63	66	68	70	72	72
			Cakupan layanan persampahan rumah tangga	RT	2.500	2.700	3.000	6.500	7.500	8.500	9.500	9.500
			Stasiun Peralihan Antara (SPA)	Unit	0	0	0	1	0	0	0	1
4.	Pembangunan pariwisata Samosir dengan melibatkan pelaku ekonomi kreatif berazas 6A (Attraction, Amenities, Ancillary, Activity, Accessibilities dan Available Package)	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (KALENDER FIESTA/FESTIVAL WISATA)	Jumlah Event	event	25	30	87	87	87	87	87	490
		Pengembangan kawasan agrowisata/ekowisata	Jumlah kawasan agrowisata/ekowisata yang dikembangkan	kawasan	2	1	2	2	2	2	2	13
		Pengembangan Objek Wisata Baru	Jumlah objek wisata baru	Objek wisata		-	-	4	4	5	5	18

Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Progam Unggulan	Kegiatan Unggulan	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						Akhir Periode
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5.	Peningkatan kualitas Tenaga Kerja dan Produk Unggulan UMK berdasarkan potensi wilayah	SAMOSIR NA LAS (NAIK KELAS)										
		Pemberian subsidi bunga modal kerja 0 (nol) persen	Jumlah Pelaku Usaha mikro	Usaha	-	200	1.360	2.320	2.320	2.320	2.320	10.840
		Pembangunan sentra IKM dan UKM/Pusat Layanan Usaha Terpadu	Jumlah sentra/PLUT yang dibangun	Unit	0	-	-	1	-	-	-	1
		Meningkatkan Produk Unggulan Olahan Hasil pertanian	Jumlah Komoditi	Jenis	6	2	2	2	2	2	2	18
		Meningkatkan produk unggulan yang masuk ke pasar modern	Jumlah produk	produk	9	2	2	2	2	2	2	21
		Peningkatan kualitas Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	orang	160	100	160	160	160	160	160	1.060
6.	Peningkatan produktivitas pertanian untuk mendukung	Pangula Nature										
		Penyediaan pupuk organik	Jumlah pupuk organik yang diberikan dan diproduksi oleh petani	Ton	4.065	4.290,6	4.823,8	5.357	5.890,2	6.423,4	6.956,6	37.807

Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Progam Unggulan	Kegiatan Unggulan	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						Akhir Periode
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	peningkatan ketahanan pangan	Penyediaan bibit/benih komoditi unggulan	Persentase peningkatan penyediaan bibit/benih yang diberikan	%	10	10	12	12	12	12	12	12
		Mencetak Petani Milenial	Jumlah masyarakat yang menjadi petani milenial	orang	9	27	45	90	90	135	135	531
		Optimalisasi pemanfaatan lahan Kawasan Pertanian Terpadu (KPT)	Luas Lahan zona Tanaman hortikultura	Ha	-	-	44,4	44,4	44,4	44,4	44,4	222
			Luas Lahan zona Tanaman pangan	Ha	-	-	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	24,75
			Luas Lahan zona Budidaya perikanan	Ha	-	-	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	25,25
			Luas Lahan zona Agroforestry	Ha	-	-	19,55	19,55	19,55	19,55	19,55	97,75
7.	Pengelolaan dan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan	SERDADU DATA (Konservasi daya dukung dan daya tampung)	Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Ha	150	14	50	75	100	125	150	514

Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Progam Unggulan	Kegiatan Unggulan	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						Akhir Periode
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Penataan sempadan danau (<i>greenbelt</i>)	Panjang sempadan danau yang ditata	Km	0	2	6	6	6	6	6	32

Program unggulan tersebut di atas dilaksanakan sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
 - Pemberian pemeriksaan kesehatan gratis;
 - Pembangunan Rumah Sakit Pratama penunjang pariwisata dengan memperhatikan Daya Dukung Lingkungan Hidup di wilayah kepadatan penduduk tinggi;
 - Pencapaian UHC.
2. Peningkatan Kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan, Pemberian Beasiswa pada Pelajar/Mahasiswa Berprestasi dan Kurang Mampu
3. Pemerataan pembangunan infrastruktur

Pemerataan pembangunan infrastruktur dilakukan melalui:

- a. Pembangunan jalan;
- b. Pembangunan pompa irigasi dengan tenaga surya;
Pelaksanaan pembangunan pompa irigasi dengan tenaga surya dilakukan dengan:
 - mengoptimalkan daya dukung ketersediaan air dan daya dukung pangan;
 - memperhatikan Intake berada di kawasan lindung sebagai Daerah Tangkapan Air perlu dilengkapi dokumen amdal;
 - mempertahankan Baku Mutu Air Danau Toba Kelas I.
- c. Pemenuhan layanan air bersih/sanitasi.

Musim kemarau yang melanda wilayah Kabupaten Samosir setiap tahunnya membawa tantangan tersendiri, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terhadap air bersih dan layanan sanitasi layak. Penurunan debit air sumber, kekeringan lahan, dan terbatasnya/jauhnya akses air bersih menjadi permasalahan yang memerlukan penanganan cepat, terpadu, dan berkelanjutan.

Sebagai bentuk respon terhadap kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Samosir melalui perangkat daerah terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, BPBD, Satpol PP, serta pemerintah desa terus melakukan langkah-langkah strategis dalam memastikan ketersediaan dan distribusi air bersih tetap terjaga, terutama bagi masyarakat di daerah rawan air dan sulit akses.

Langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain:

1. Distribusi Air Bersih Darurat

Pemerintah daerah bekerja sama dengan BPBD dan Satpol PP melalui mobil Damkar melakukan pendistribusian air bersih menggunakan mobil tangki ke desa-desa terdampak kekeringan.

2. Optimalisasi Sumber Air Alternatif

Sebagian besar cadangan seperti sumur dalam, mata air lereng bukit pada musim kemarau mengering, sehingga air irigasi yang dipompa dari Danau Toba menjadi alternatif sumber air bersih untuk kegiatan MCK (mandi, cuci, kakus). Dengan dibangunnya pompa irigasi tenaga surya sesuai target yang direncanakan (Tabel 3.9), tantangan kekurangan air bersih di musim kemarau dapat teratasi di beberapa daerah. Untuk sebagian besar wilayah Kabupaten Samosir, termasuk Kecamatan Pangururan, Kecamatan Simanindo, Kecamatan Palipi, sebagian Kecamatan Ronggurnihuta diharapkan dapat terlayani air bersih melalui pembangunan SPAM Sitapigagan yang perencanaan RAB dan DEDnya sudah dialokasikan pada tahun 2025 dan pembangunannya dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Dengan sinergi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat, Kabupaten Samosir berupaya untuk pelayanan air bersih dan sanitasi tidak terhenti meskipun dihadapkan pada kondisi iklim yang ekstrem. Upaya ini bukan hanya menjaga kesehatan masyarakat, tetapi juga menjamin keberlanjutan pembangunan, utamanya dalam sektor pendidikan, pariwisata, dan pertanian yang sangat bergantung pada ketersediaan air.

d. SAMOSIR PAPAGA (Pature Padenggan Bagas) rumah tidak layak huni (RTLH);

e. Persampahan

a. Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA) dan peningkatan cakupan layanan persampahan dilakukan dengan memperhatikan kondisi Kabupaten Samosir, dimana secara umum luas wilayah Kabupaten Samosir dengan indikasi jasa ekosistem budaya tempat tinggal dan ruang hidup kategori tinggi hingga sangat tinggi mencapai 22% dan kategori sedang mencapai

21% sedangkan indikasi jasa ekosistem budaya tempat tinggal dan ruang hidup kategori sangat rendah mencapai 55%. Hal ini juga perlu dipertimbangkan untuk pelaksanaan konservasi lahan kritis dan daerah tangkapan air,

4. Pembangunan pariwisata Samosir dengan melibatkan pelaku ekonomi kreatif berazas 6A (*Attraction, Amenities, Ancillary, Activity, Accessibilities* dan *Available Package*)
 - a. Penyelenggaraan festival seni dan budaya (KALENDER FIESTA/FESTIVAL WISATA), dimana seluruh desa di Kabupaten Samosir turut serta dalam menyelenggarakan event melalui gerakan ‘1 desa 1 event’.
 - b. Pengembangan kawasan agrowisata/ekowisata
 - c. Pengembangan Objek Wisata Baru

Pemerintah Kabupaten Samosir terus mendorong **pengembangan objek wisata baru** yang tersebar di berbagai wilayah kecamatan untuk mendukung pemerataan ekonomi dan memperluas daya tarik kunjungan wisatawan. Pengembangan objek wisata baru dilakukan dengan menggali dan memanfaatkan potensi lokal yang selama ini belum tereksplorasi secara optimal, baik yang bersifat alam, budaya, maupun buatan. Lokasi-lokasi dengan panorama, situs budaya, desa adat, serta kawasan dengan keunikan geologi dan kearifan lokal kini menjadi prioritas untuk dikembangkan sebagai daya tarik baru. Dalam prosesnya, pendekatan partisipatif menjadi prinsip utama, dengan melibatkan masyarakat setempat, pelaku ekonomi kreatif, dan kelompok sadar wisata (pokdarwis) dalam setiap tahap perencanaan dan pengelolaan.

Objek wisata baru yang dikembangkan:

1. **Pembangunan *waterfront city* Onan Runggu dan Nainggolan**

Pembangunan *waterfront city* Onan Runggu dan Nainggolan merupakan sebuah kawasan tepian air yang dirancang menjadi pusat pertumbuhan baru berbasis wisata, budaya, dan ekonomi kreatif. Onan Runggu dan Nainggolan, yang secara geografis berada di wilayah pesisir Danau Toba, memiliki keunggulan alamiah berupa panorama danau yang memukau, garis pantai yang landai, dan nilai-nilai budaya masyarakat Batak yang masih kuat terpelihara. Potensi ini menjadi dasar utama dalam pengembangan kawasan *waterfront city*, yaitu kawasan pesisir yang terintegrasi secara estetis, fungsional, dan berkelanjutan antara

lingkungan alam, infrastruktur, ruang publik, dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Pembangunan *Waterfront City* Onan Runggu dan Nainggolan dirancang dengan pendekatan terpadu yang meliputi:

- Penataan kawasan tepian danau menjadi area publik yang representatif, ramah pejalan kaki, dan estetik, dengan jalur pedestrian, ruang terbuka hijau, serta titik-titik pandang (*viewpoint*) yang menarik.
- Pengembangan dermaga wisata dan fasilitas transportasi air untuk mendukung konektivitas antar wilayah di sekitar Danau Toba.
- Pembangunan sentra UMKM dan ekonomi kreatif yang menampung produk-produk lokal seperti kuliner khas Batak, tenun ulos, dan suvenir wisata.
- Revitalisasi pasar tradisional Onan Runggu sebagai pusat perdagangan rakyat dan destinasi belanja berbasis budaya lokal.
- Pengembangan zona budaya dan rekreasi yang menampilkan pertunjukan seni, festival tahunan, dan atraksi wisata edukatif.
- Pembangunan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas infrastruktur dan estetika kawasan, tetapi juga memperkuat identitas budaya lokal dan memperluas peluang kerja dan usaha bagi masyarakat. Prinsip keberlanjutan dan partisipasi masyarakat menjadi landasan utama, di mana seluruh proses pembangunan melibatkan warga lokal, pelaku usaha, tokoh adat, dan pemuda kreatif.

Dengan terbangunnya *Waterfront City* Onan Runggu, Kabupaten Samosir menargetkan terwujudnya pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menarik investasi, meningkatkan daya saing pariwisata, yang meningkatkan lama kunjung wisata, serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan merata, tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Selain itu, promosi objek wisata baru dilakukan melalui berbagai platform, baik media sosial, festival budaya, hingga kemitraan dengan agen perjalanan. Narasi yang diangkat mengedepankan keunikan lokal, nuansa keaslian, dan pengalaman yang otentik — menjadikan Samosir sebagai destinasi wisata budaya dan alam yang tak hanya indah, tapi juga bermakna.

Melalui pengembangan objek wisata baru ini, Kabupaten Samosir menargetkan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, perluasan

lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif serta berkelanjutan, sekaligus memperkuat identitas budaya Batak di panggung pariwisata nasional dan internasional.

2. Pembangunan dan pengembangan situs budaya

Kabupaten Samosir dikenal sebagai pusat peradaban budaya Batak Toba yang menyimpan kekayaan sejarah, tradisi, dan warisan leluhur yang sangat berharga dan merupakan bukti nyata peradaban masa lampau yang memiliki nilai historis, edukatif, dan spiritual yang tinggi. Pembangunan dan pengembangan situs budaya dilakukan sebagai upaya untuk melestarikan dan memanfaatkan potensi ini secara optimal, dimana tujuan utama dari program ini adalah menjaga kelestarian warisan budaya leluhur, memperkuat jati diri masyarakat, serta menjadikan situs budaya sebagai bagian integral dari daya tarik pariwisata daerah.

Pengembangan dilakukan melalui pendekatan holistik yang mencakup:

1. Pemugaran dan Penataan Fisik Situs

Pemerintah daerah bekerja sama dengan Balai Pelestarian Kebudayaan, akademisi, dan komunitas adat untuk memugar situs-situs bersejarah agar tetap terjaga keasliannya, sekaligus menata lingkungan sekitar situs agar lebih nyaman dan aman bagi pengunjung.

2. Penyediaan Sarana Edukasi dan Interpretasi Budaya

Dibangun fasilitas seperti galeri budaya, pusat informasi, papan narasi sejarah, dan pelatihan pemandu wisata budaya untuk memberikan pengalaman yang edukatif bagi wisatawan serta mendukung program pendidikan karakter berbasis budaya.

3. Pelibatan Masyarakat Adat dan Pelaku Ekonomi Kreatif

Masyarakat lokal, khususnya yang berada di sekitar situs, dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan. Produk-produk budaya seperti ulos, ukiran kayu, musik gondang, dan pertunjukan tortor menjadi bagian dari atraksi dan penguatan ekonomi berbasis budaya.

4. Digitalisasi dan Promosi Situs Budaya

Untuk menjangkau generasi muda dan wisatawan global, situs budaya dikembangkan melalui platform digital seperti tur virtual, dokumenter budaya, serta promosi melalui media sosial dan *website* resmi pemerintah.

Melalui pembangunan dan pengembangan situs budaya ini, Kabupaten Samosir tidak hanya melestarikan nilai-nilai luhur warisan Batak, tetapi juga menjadikan budaya sebagai motor penggerak pariwisata dan pembangunan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Dengan menjadikan situs budaya sebagai ruang edukasi, refleksi, dan destinasi wisata, Samosir memperkuat posisinya sebagai "Titik nol Peradaban Batak" yang hidup dan relevan di era modern.

Daftar Situs Budaya di Kabupaten Samosir yang berpotensi untuk dikembangkan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14 Daftar Situs Budaya Potensial Dikembangkan Kabupaten Samosir

No	Nama	Jenis ODCB	Kecamatan	Desa/ Kelurahan
1	Aek Natonang	Situs	Simanindo	Aek Natonang
2	Namartua Silengge	Situs	Simanindo	Ambarita
3	Batanggor (Kuburan Op. Sidabutar)	Situs	Simanindo	Ambarita
4	Namartua Aek Sioma (sidabutar)	Situs	Simanindo	Ambarita
5	Batu Kursi Parhapuran	Situs	Simanindo	Ambarita
6	Namartua Batu Batang	Situs	Simanindo	Ambarita
7	Namartua Batu Parendean	Situs	Simanindo	Ambarita
8	Namartua Batu Horbo	Situs	Simanindo	Ambarita
9	Parbuisan Dusun II Ambarita	Situs	Simanindo	Ambarita
10	Mual Lumban Nabolak	Situs	Simanindo	Ambarita
11	Sarkofagus Op. Bohang Sidabutar	Situs	Simanindo	Ambarita
12	Mual Duru Ambarita	Situs	Simanindo	Ambarita
13	Pulo Tao	Situs	Simanindo	Cinta Dame
14	Bulu Turak	Situs	Simanindo	Cinta Dame
15	Kuburan Makam Tua Op. Sohalompoan	Situs	Simanindo	Cinta Dame
16	Pantai Malau	Situs	Simanindo	Cinta Dame
17	Paranggiran Nantinja	Situs	Simanindo	Cinta Dame
18	Partungkoan Silau Raja	Situs	Simanindo	Cinta Dame
19	Pantai Ikan Mas	Bangunan	Simanindo	Dosroha
20	Namartua Simangende	Situs	Simanindo	Garoga
21	Mual Ni Si Boru Langgatan Natumimbo	Situs	Simanindo	Huta Ginjang
22	Mual Ni Raja Dapoton	Situs	Simanindo	Huta Ginjang
23	Tala Parik Sabungan	Situs	Simanindo	Huta Ginjang
24	Aek Situngko (Sitolu Tali)	Situs	Simanindo	Maduma
25	Aek Panantanan	Situs	Simanindo	Maduma
26	Sampuran Napitu	Situs	Simanindo	Martoba
27	Aek Sidabalok	Situs	Simanindo	Martoba

Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Nama	Jenis ODCB	Kecamatan	Desa/ Kelurahan
28	Namatua Sipohul-pohul	Situs	Simanindo	Martoba
29	Mual Silahi Sabungan/Namartua Pinagar	Situs	Simanindo	Martoba
30	Mual Silahi Sabungan/Namartua Panantanan	Situs	Simanindo	Martoba
31	Mual Silahi Sabungan/Pansur Napitu- Mual Ni Boruna)	Situs	Simanindo	Martoba
32	Liang Pangururan	Situs	Simanindo	Martoba
33	Tagading Ni Namartua Sitapangi	Situs	Simanindo	Martoba
34	Simarauga (Namartua Simanukmira)	Situs	Simanindo	Martoba
35	Pulo Tolping	Situs	Simanindo	Martoba
36	Batu Parholian	Situs	Simanindo	Martoba
37	Aek Narambean	Situs	Simanindo	Martoba
38	Bontean	Situs	Simanindo	Pardomuan
39	Parik Debata	Situs	Simanindo	Pardomuan
40	Liang Marlangkop	Situs	Simanindo	Pardomuan
41	Pagar Batu Pardomuan	Situs	Simanindo	Pardomuan
42	Pagar Batu	Situs	Simanindo	Parmonangan
43	Batu Marhosa	Situs	Simanindo	Parmonangan
44	Paromasan Op. Solaosan Sidabalok Boru	Benda	Simanindo	Sangkal
45	Paromasan Op. Solaosan Sidabalok Doli	Benda	Simanindo	Sangkal
46	Pangulubalang Op. Banua Turnip	Benda	Simanindo	Sangkal
47	Liang Sipogu	Situs	Simanindo	Sangkal
48	Aek Ni Namartua Joring	Situs	Simanindo	Sangkal
49	Joro-joro	Situs	Simanindo	Sangkal
50	Joro-joro di Panghirapan	Situs	Simanindo	Sangkal
51	Joro-joro di Siguna Ni Lombu	Situs	Simanindo	Sangkal
52	Joro-joro di Dolok Martahan	Situs	Simanindo	Sangkal
53	Parharean Ni Sidabalok	Situs	Simanindo	Sangkal
54	Parbiusan Ni Raja Sitolu Tali	Situs	Simanindo	Sangkal
55	Aek Parsadaan Sitolu Tali	Situs	Simanindo	Sangkal
56	Batu Passa Sangkal	Situs	Simanindo	Sangkal
57	Liang Sipogu Sangkal	Situs	Simanindo	Sangkal
58	Parulubalangan Siminggot-inggot	Situs	Simanindo	Siallagan Pindaraya
59	Situs Huta Siallagan	Situs	Simanindo	Siallagan Pindaraya
60	Batu Kubur/ Sarkofagus Oppung Rosuhul Sihaloho	Benda	Simanindo	Sibolazi
61	Makam Raja Op. Rosuhul Sihaloho	Bangunan	Simanindo	Sibolazi
62	Harangan Sipege	Situs	Simanindo	Sihusapi

Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Nama	Jenis ODCB	Kecamatan	Desa/ Kelurahan
63	Aek Sigornang Simataraja	Situs	Simanindo	Sihusapi
64	Aek Sigornang	Situs	Simanindo	Sihusapi
65	Aek Sipituama	Situs	Simanindo	Sihusapi
66	Museum Huta Bolon	Bangunan	Simanindo	Simanindo
67	Harangan dan Aek Panantanan	Situs	Simanindo	Simanindo
68	Batu Kubur/ Sarkofagus Op Dosiraja Simarmata	Benda	Simanindo	Simarmata
69	Tugu Simataraja	Struktur	Simanindo	Simarmata
70	Namartua Singkam	Situs	Simanindo	Simarmata
71	Sigordang	Situs	Simanindo	Simarmata
72	Namartua Sibahul Nasaur Matua	Situs	Simanindo	Simarmata
73	Parbuisan	Situs	Simanindo	Simarmata
74	Batu Holi/ batu Hundulan	Situs	Simanindo	Simarmata
75	Batu Suga	Situs	Simanindo	Sosor Tolong Tomok
76	Batu Ugan	Situs	Simanindo	Tanjungan
77	Tala Ugan	Situs	Simanindo	Tanjungan
78	Tala Sogit	Situs	Simanindo	Tanjungan
79	Ambar Na Manik	Situs	Simanindo	Tanjungan
80	Sisangapan	Situs	Simanindo	Tanjungan
81	Sarkofagus Op. Soribuntu Sidabutar	Benda	Simanindo	Tomok
82	Tambak Dolok/ Batu Sidabutar Dohot Boruna	Situs	Simanindo	Tomok
83	Batu Gordang	Situs	Simanindo	Tomok
84	Parsombaonan	Situs	Simanindo	Tomok
85	Parpunguan Raja Naualu	Situs	Simanindo	Tomok
86	Namartua Silimun-limun	Situs	Simanindo	Tomok
87	Namartua Sampuran	Situs	Simanindo	Tomok
88	Namartua Silobu-lobu	Situs	Simanindo	Tomok
89	Parbuisan Tomok	Situs	Simanindo	Tomok
90	Namartua Siholing	Situs	Simanindo	Tomok
91	Kompleks Makam Raja Sidabutar	Situs	Simanindo	Tomok Parsaoran
92	Batu Gu	Situs	Simanindo	Tomok Parsaoran
93	Namartua Silosung	Situs	Simanindo	Tuktuk Siadong
94	Namartua Batu Tanggang	Situs	Simanindo	Tuktuk Siadong
95	Namartua Tuktuk Siasu	Situs	Simanindo	Tuktuk Siadong
96	Batu Silop dan Toguan	Benda	Simanindo	
97	Kuburan Tua Marga Siadari	Bangunan	Simanindo	
98	Jea Ni Tano	Situs	Ronggurnihuta	Lintong Nihuta
99	Batu Paromasan Sirimbang	Situs	Ronggurnihuta	Lintong Nihuta
100	Aek Somaila	Situs	Ronggurnihuta	Lintong Nihuta

Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Nama	Jenis ODCB	Kecamatan	Desa/ Kelurahan
101	Jorojoro Partangiang Op. Moradolok Simbolon	Situs	Ronggurnihuta	Lintong Nihuta
102	Tambak Sibaganding Tua Op. Moradolok Simbolon	Situs	Ronggurnihuta	Lintong Nihuta
103	Pea Sibbora Paridian Op. Moradolok Simbolon	Situs	Ronggurnihuta	Lintong Nihuta
104	Sitonggor	Situs	Ronggurnihuta	Paraduan
105	Batu Dorpi	Situs	Ronggurnihuta	Paraduan
106	Sigumbang	Situs	Ronggurnihuta	Paraduan
107	Batu Sibirong	Situs	Ronggurnihuta	Paraduan
108	Aek Sirara	Situs	Ronggurnihuta	Paraduan
109	Aek Bagot	Situs	Ronggurnihuta	Paraduan
110	Hariara Madungdung	Situs	Ronggurnihuta	Paraduan
111	Aek Sibane-bane	Situs	Ronggurnihuta	Paraduan
112	Batu Gordang	Situs	Ronggurnihuta	Paraduan
113	Aek Gambiri	Situs	Ronggurnihuta	Paraduan
114	Namartua Tanjungan	Situs	Ronggurnihuta	Paraduan
115	Liang Panggambirian	Situs	Ronggurnihuta	Paraduan
116	Batu Sidamdandam	Situs	Ronggurnihuta	Paraduan
117	Aek Sipangolu	Situs	Ronggurnihuta	Paraduan
118	Aek Sasawan	Situs	Ronggurnihuta	Paraduan
119	Gua Simaliting	Situs	Ronggurnihuta	Parduan
120	Aek Sihalisung	Situs	Ronggurnihuta	Ronggu Nihuta
121	Pea Nabagas	Situs	Ronggurnihuta	Ronggu Nihuta
122	Sipalionggang	Situs	Ronggurnihuta	Ronggu Nihuta
123	Namartua Gorat Natonggi	Situs	Ronggurnihuta	Ronggu Nihuta
124	Sibatu Hoda	Situs	Ronggurnihuta	Ronggu Nihuta
125	Aek Tulpak	Situs	Ronggurnihuta	Ronggu Nihuta
126	Taharan	Situs	Ronggurnihuta	Ronggurnihuta
127	Aek Tawar	Situs	Ronggurnihuta	Ronggurnihuta
128	Silau Raja	Situs	Ronggurnihuta	Salaon Dolok
129	Mual Silau Raja	Situs	Ronggurnihuta	Salaon Dolok
130	Sopo Silau Raja	Situs	Ronggurnihuta	Salaon Dolok
131	Batu Saur Matua	Situs	Ronggurnihuta	Salaon Dolok
132	Aek Pea Porohan	Situs	Ronggurnihuta	Salaon Toba
133	Aek Siguti-guti	Situs	Ronggurnihuta	Salaon Tonga-tonga
134	Mual Sampuran Napitu	Situs	Ronggurnihuta	Salaon Tonga-tonga
135	Sioguan Nagodang	Situs	Ronggurnihuta	Salaon Tonga-tonga
136	Aek Simargolang (Aek Pohon Pohonan)	Situs	Ronggurnihuta	Sijambur
137	Aek Gaol	Situs	Ronggurnihuta	Sijambur
138	Aek Batu	Situs	Ronggurnihuta	Sijambur

Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Nama	Jenis ODCB	Kecamatan	Desa/ Kelurahan
139	Sogit	Situs	Ronggurnihuta	Sijambur
140	Tempayan Batu Simbolon Sirimbang	Benda	Ronggurnihuta	
141	Mual Simarsasar (Sisingamangaraja)	Situs	Sitio-tio	Buntu Mauli
142	Paranggiran si Boru Saroding	Situs	Sitio-tio	Buntu Mauli
143	Ulu Darat	Situs	Sitio-tio	Buntu Mauli
144	Aek Simarsasar	Situs	Sitio-tio	Buntu Mauli
145	Aek Marhusor	Situs	Sitio-tio	Buntu Mauli
146	Mual Simangohi Raja	Situs	Sitio-tio	Cinta Maju
147	Mual Simata Raja	Situs	Sitio-tio	Cinta Maju
148	Mual Hombani Sihombing	Situs	Sitio-tio	Cinta Maju
149	Aek Sipangolu Sijambur	Situs	Sitio-tio	Cinta Maju
150	Mual Sian Sirnip	Situs	Sitio-tio	Cinta Maju
151	Liang Ni Datu Parngongo	Situs	Sitio-tio	Cinta Maju
152	Mual Datu Parngongo	Situs	Sitio-tio	Cinta Maju
153	Mual Si Sopak Dila Ni Musu	Situs	Sitio-tio	Cinta Maju
154	Sampuran Sihalisung	Situs	Sitio-tio	Janji Maria
155	Sampuran Piso Somalim	Situs	Sitio-tio	Janji Maria
156	Batu Gorga Op. Batu Songkal Sitingjak	Situs	Sitio-tio	Janji raja
157	Batu Maranak	Situs	Sitio-tio	Janji raja
158	Aek Raja	Situs	Sitio-tio	Janji raja
159	Mual Boru Si Menakmenak	Situs	Sitio-tio	Janji raja
160	Aek Sirnip	Situs	Sitio-tio	Parsaoran
161	Mual Sisinga mangaraja	Situs	Sitio-tio	Parsaoran
162	Monumen Siraja Lontung	Struktur	Sitio-tio	Sabulan
163	Mual Op. Palti Raja	Situs	Sitio-tio	Sabulan
164	Mual Siboru Saroding	Situs	Sitio-tio	Sabulan
165	Mual Siraja Lontung	Situs	Sitio-tio	Sabulan
166	Mual Siboru Pareme	Situs	Sitio-tio	Sabulan
167	Banuaraja	Situs	Sitio-tio	Sabulan
168	Losung Di Huta Ni Ompu Mosa	Situs	Sitio-tio	Sabulan
169	Monumen raja Lontung	Situs	Sitio-tio	Sabulan
170	Mual Simataniari	Situs	Sitio-tio	Sabulan
171	Mual Ni Palti Op Raja (Mual Si Paulak Hosa)	Situs	Sitio-tio	Sabulan
172	Mual Sitonggi-tonggi	Situs	Sitio-tio	Sabulan
173	Batu Bolon Sitapi-tapi/ Batu Parpadanan	Situs	Sitio-tio	Sabulan
174	Liang Sakti	Situs	Sitio-tio	Sabulan
175	Aek Nalambok	Situs	Sitio-tio	Sabulan
176	Aek Asom	Situs	Sitio-tio	Sabulan
177	Mual Pansopan Ni Si Boru Pareme	Situs	Sitio-tio	Sabulan

Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Nama	Jenis ODCB	Kecamatan	Desa/ Kelurahan
178	Mual Baringin	Situs	Sitio-tio	Sabulan
179	Namartua Simundea	Situs	Sitio-tio	Sabulan
180	Perkampungan Siraja Lonung di Banuaraja	Situs	Sitio-tio	Sabulan
181	Toguan Sibaganding	Situs	Sitio-tio	Sabulan
182	Banua Raja	Situs	Sitio-tio	Sabulan
183	Mual Boru Saroding	Situs	Sitio-tio	Sabulan
184	Mual Sipaulak Hosa	Situs	Sitio-tio	Sabulan
185	Batu Parpadanan Sitapi-tapi	Situs	Sitio-tio	Sabulan
186	Mual Op.Palti Raja	Situs	Sitio-tio	Sabulan
187	Losung Dihuta Op.Mosa	Situs	Sitio-tio	Sabulan
188	Tao Sihaporas	Situs	Sitio-tio	Tamba Dolok
189	Batu Marompa	Benda	Sitio-tio	Tamba Dolok
190	Mual Ni Tamba Tua	Situs	Sitio-tio	Tamba Dolok
191	Mual Paramburan	Situs	Sitio-tio	Tamba Dolok
192	Mual Tamba Tua	Situs	Sitio-tio	Tamba Dolok
193	Mual Panambunan	Situs	Sitio-tio	Tamba Dolok
194	Mual Somba Huta	Situs	Sitio-tio	Tamba Dolok
195	Mual Siharanggian	Situs	Sitio-tio	Tamba Dolok
196	Batu Rante	Situs	Palipi	Gorat Pallombuan
197	Makam Raja Ompu Palti Raja XII Sinaga	Situs	Palipi	Gorat Pallombuan
198	Mual Guru Mardidang Bunga Sihombing	Situs	Palipi	Hatoguan
199	Batu Tindang	Situs	Palipi	Huta Ginjang
200	Batu Somong/Batu Partolonan	Situs	Palipi	Palipi
201	Aek Pamulungan	Situs	Palipi	Palipi
202	Tombak Namartua Pangaribuan dan Mual Pangaribuan	Situs	Palipi	Pardomuan Nauli
203	Mual Sibabiat	Situs	Palipi	Parsaoran Urat
204	Makam Pisosomalim	Struktur	Palipi	Saornaui Hatoguan
205	Binanga Bolon	Situs	Palipi	Suhut Nihuta Pardomuan
206	Namartua Limang	Situs	Palipi	Suhut Nihuta Pardomuan
207	Tambal Ni Raja Parhutala	Situs	Palipi	Suhut Nihuta Pardomuan
208	Jabi-Jabi Sisangapon	Situs	Palipi	Suhut Nihuta Pardomuan
209	Tugu Toga Sinaga	Struktur	Palipi	Urat
210	Tugu Sitohang	Struktur	Palipi	Urat
211	Tugu Toga Pandiangan	Struktur	Palipi	Urat
212	Batu Bontean	Situs	Palipi	Urat
213	Tugu Tuan Situmorang	Struktur	Palipi	Urat II

Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Nama	Jenis ODCB	Kecamatan	Desa/ Kelurahan
214	Hariara Maranak dan Mual Ni Si Raja Lontung, Lobu Sinaga	Situs	Palipi	Urat II
215	Mual Ni Toga Pandiangan	Situs	Palipi	
216	Losung Batu Parbaba Dua	Situs	Nainggolan	Hurarihit
217	Namartua Sigaranggal/sontulon/ulok tano	Situs	Nainggolan	Nainggolan
218	Batu makam Ompu Soimbangan Parhusip	Situs	Nainggolan	Nainggolan
219	Pantai Pandua	Situs	Nainggolan	Nainggolan
220	Mual Siboru Menak-Henak	Situs	Nainggolan	Pananggangan
221	Mual Hinandang	Situs	Nainggolan	Pananggangan II
222	Rumah Bolon Datu Parulas	Bangunan	Nainggolan	Pangaloan
223	Batu Guru	Situs	Nainggolan	Pangaloan
224	Parbatu Palhang	Situs	Nainggolan	Pasaran Parsaoran
225	Losung Parmata Dua	Situs	Nainggolan	Sinaga Uruk Pandiangan
226	Mual Simataniari (sisingamangaraja)	Situs	Nainggolan	Sinaga Uruk Pandiangan
227	Tugu lumban tungkup	Situs	Nainggolan	Sirumahombar
228	Namartua Sioma	Situs	Onanrunggu	Janji Matogu
229	Liang Sijalujalu	Situs	Onanrunggu	Onanrunggu
230	Tambun Surlau di Sungkean	Situs	Onanrunggu	Onanrunggu
231	Mual Ni Raja Sonang	Situs	Onanrunggu	Pardomuan
232	Makam Ni Si Raja Sonang	Situs	Onanrunggu	Pardomuan
233	Hamborbor	Situs	Onanrunggu	Pardomuan
234	Mual Gonong (Mual Baba Ni Siampang)	Situs	Onanrunggu	Pardomuan
235	Mual Sibual	Situs	Onanrunggu	Pardomuan
236	Batu Martindi	Situs	Onanrunggu	Silimalombu
237	Lintong Na Bolon	Situs	Onanrunggu	Sipira
238	Liang Bolon	Situs	Onanrunggu	Sitamiang
239	Hariara Na Bolon	Situs	Onanrunggu	Tambun Sungkean
240	Sampuran Bala	Situs	Harian	Dolok Raja
241	Batu Sarkofagus Simbolon	Benda	Harian	Harian
242	Batu Sarkofagus Simarmata	Benda	Harian	Harian
243	Batu Sarkofagus Simarsoit Uruk	Benda	Harian	Harian
244	Sarkofagus Malau	Benda	Harian	Harian
245	Mual Raja Oppu Sigodang Ulu Sihotang	Situs	Harian	Harian
246	Sarkofagus Op. Pangulu Baringin Sorganimusu	Benda	Harian	Harian
247	Sarkofagus Sinaga	Benda	Harian	Harian
248	Tugu R.O Sigodang Ulu Sihotang	Bangunan	Harian	Harian

Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Nama	Jenis ODCB	Kecamatan	Desa/ Kelurahan
249	Ruma Bolon	Bangunan	Harian	Harian
250	Mual Simillam	Situs	Harian	Harian
251	Sarkofagus Op. Pialang Simarmata (Sipukka Batu)	Benda	Harian	Hariara Pohan
252	Parik Huta Simarmata	Benda	Harian	Hariara Pohan
253	Batu Sikkop	Benda	Harian	Hariara Pohan
254	Sopo	Bangunan	Harian	Hariara Pohan
255	Aek Homban	Situs	Harian	Hutagalung
256	Batu Janggar Marga Pasaribu	Benda	Harian	Janji Martahan
257	Batu Marsanggul	Situs	Harian	Janji Martahan
258	Aek Martua Julu	Situs	Harian	Janji Martahan
259	Tambak Ompu Tuan Rikkar Sinaga	Bangunan	Harian	Partungkonaginjang
260	Kuburan Batu Lumban Si Sonak (Sarkofagus)	Bangunan	Harian	Partungkonaginjang
261	Mual Sitamborbona/Pultong Nabolon	Situs	Harian	Partungkonaginjang
262	Aek Simarhire	Situs	Harian	Partungkonaginjang
263	Batu Joro	Situs	Harian	Partungkonaginjang
264	Goa Panonggor	Situs	Harian	Partungkonaginjang
265	Goa Kelelawar	Situs	Harian	Partungkonaginjang
266	Ruma Bolon	Situs	Harian	Partungkonaginjang
267	Bulu Simargolang	Situs	Harian	Partungkonaginjang
268	Togaraja	Situs	Harian	Partungkonaginjang
269	Hutan Wisata Situmorang	Situs	Harian	Partungkonaginjang
270	Mual Silimbat	Situs	Harian	Sampur Toba
271	Mual Bonan Dolok	Situs	Harian	Sampur Toba
272	Sopo Baoa Kepala Nagari Sihotang	Bangunan	Harian	Siparmahan
273	Sopo Parompuan Kepala Nagari Sihotang	Bangunan	Harian	Siparmahan
274	Batu Losung Huta Turpuk	Benda	Harian	Turpuk Sihotang
275	Batu Losung Huta Sipardabuan	Benda	Harian	Turpuk Sihotang
276	Rumah Bolon Turpuk Sihotang	Bangunan	Harian	Turpuk Sihotang
277	Sarkopagus dan Kawasan. perkampungan perjuangan Raja Lintong Situmorang, Oppu Babiak Situmorang dan Raja Sisingamangaraja.	Situs	Harian	Turpuk Sihotang
278	Sarkofagus dan Kawasan Perkampungan Milik Keturunan Op. Sinitta Sihotang Sitorban Dolok Turpuk Sihotang	Situs	Harian	Turpuk Sihotang
279	Batu Hoda-hoda	Situs	Sianjur Mulamula	Boho

Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Nama	Jenis ODCB	Kecamatan	Desa/ Kelurahan
280	Pangasean	Situs	Sianjur Mulamula	Boho
281	Harangan Ruru Onan dan Aek Sibontar	Situs	Sianjur Mulamula	Boho
282	Rumah Kepala Nagari Sagala	Bangunan	Sianjur Mulamula	Ginolat
283	Aek Ruma Pittu	Situs	Sianjur Mulamula	Ginolat
284	Batu Pangulu Balang	Situs	Sianjur Mulamula	Ginolat
285	Parhutaan Di Dalam Danau	Situs	Sianjur Mulamula	Hasinggahan
286	Batu Sidogor	Situs	Sianjur Mulamula	Huta Ginjang
287	Harangan Pulo-pulo	Situs	Sianjur Mulamula	Huta Ginjang
288	Batu Parpadanan	Situs	Sianjur Mulamula	Huta Ginjang
289	Batu Gajah	Situs	Sianjur Mulamula	Huta Ginjang
290	Batu Naga	Situs	Sianjur Mulamula	Huta Ginjang
291	Batu Sopo (di tala)	Situs	Sianjur Mulamula	Huta Ginjang
292	Batu Ni Op. Parimbulu Bosi (harbangan Puncak)	Situs	Sianjur Mulamula	Huta Ginjang
293	batu Nahong	Situs	Sianjur Mulamula	Huta Ginjang
294	Mata Ni Aek Nabasa	Situs	Sianjur Mulamula	Huta Ginjang
295	Batu Opputta Raja Isombaon	Situs	Sianjur Mulamula	Huta Ginjang
296	Tala-tala	Situs	Sianjur Mulamula	Huta Ginjang
297	Batu Kursi Parhapuran	Situs	Sianjur Mulamula	Huta Ginjang
298	Batu Sopo (di tala)	Situs	Sianjur Mulamula	Huta Ginjang
299	Batu Parraporan/ Batu Ni Opputta Raja Batak	Situs	Sianjur Mulamula	Huta Ginjang
300	Harangan Etek-etek	Situs	Sianjur Mulamula	Huta Ginjang
301	Harangan Nabolak	Situs	Sianjur Mulamula	Huta Ginjang
302	Harangan Sihumonong (Partapaan Ni Si Raja Batak)	Situs	Sianjur Mulamula	Huta Ginjang
303	Aek Sitapangi	Situs	Sianjur Mulamula	Huta Ginjang
304	Batu Gansip	Situs	Sianjur Mulamula	Huta Ginjang
305	Aek Tolong	Situs	Sianjur Mulamula	Huta Ginjang
306	Batu Napal	Situs	Sianjur Mulamula	Huta Lintong
307	Baringin Partonggoan	Situs	Sianjur Mulamula	Huta Urat
308	Rumah Kepala Nagari Limbong	Bangunan	Sianjur Mulamula	Limbong
309	Aek Narumo/ Aek Sitampar Leang	Situs	Sianjur Mulamula	Limbong
310	Aek Manggaja	Situs	Sianjur Mulamula	Sagala
311	Gua/ Liang Tanah 1	Situs	Sianjur Mulamula	Sagala
312	Gua/ Liang Tanah 2	Situs	Sianjur Mulamula	Sagala
313	Aek Boras-Sagala	Situs	Sianjur Mulamula	Sagala
314	Aek Bunga-bunga	Situs	Sianjur Mulamula	Sagala
315	Aek Homang	Situs	Sianjur Mulamula	Sagala
316	Aek Sombaon Namaruta Bong-bong	Situs	Sianjur Mulamula	Sagala
317	Bahal-bahal	Situs	Sianjur Mulamula	Sagala

Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Nama	Jenis ODCB	Kecamatan	Desa/ Kelurahan
318	Bius Nadapdap Limbong Mulana	Situs	Sianjur Mulamula	Sagala
319	Huta Batu Bolon	Situs	Sianjur Mulamula	Sagala
320	Parulubalangan / Partungkoan Sagala	Situs	Sianjur Mulamula	Sagala
321	Sitapigagan/ Mual Datu	Situs	Sianjur Mulamula	Sagala
322	Simanggurguri dan Air Terjun Sibintangor	Situs	Sianjur Mulamula	Sagala
323	Aek Siporhas	Situs	Sianjur Mulamula	Sagala
324	Simanampang	Situs	Sianjur Mulamula	Sagala
325	Batu Sawan	Benda	Sianjur Mulamula	Sari Marrihit
326	Batu Hobon	Benda	Sianjur Mulamula	Sari Marrihit
327	Batu Tangga-tangga-Batu Martinggi-tinggi	Situs	Sianjur Mulamula	Sari Marrihit
328	Batu Marguling	Situs	Sianjur Mulamula	Sari Marrihit
329	Batu Nanggarjati (Batu Martil)	Situs	Sianjur Mulamula	Sari Marrihit
330	Sibungbung Ruma/ Tano Tinggir	Situs	Sianjur Mulamula	Sari Marrihit
331	Batu Habonaran	Situs	Sianjur Mulamula	Sari Marrihit
332	Mual Tuan Saribunga (Aek Meong)	Situs	Sianjur Mulamula	Sari Marrihit
333	Aek Boras-Parik Sabungan	Situs	Sianjur Mulamula	Sari Marrihit
334	Losung Parik Sabungan	Situs	Sianjur Mulamula	Sari Marrihit
335	Aek Malum	Situs	Sianjur Mulamula	Sari Marrihit
336	Batu Ruma Bolon	Situs	Sianjur Mulamula	Sari Marrihit
337	Batu Sondi (Liang Sakti)	Situs	Sianjur Mulamula	Sari Marrihit
338	Batu Parhusipan	Situs	Sianjur Mulamula	Sari Marrihit
339	Mual Siborupareme	Situs	Sianjur Mulamula	Sari Marrihit
340	Dolok Sibagot-bagot	Situs	Sianjur Mulamula	Sari Marrihit
341	Tatea Bulan	Bangunan	Sianjur Mulamula	Sarimarihit
342	Rumah Tanah	Bangunan	Sianjur Mulamula	Sianjur Mulamula
343	Rumah Parsaktian Si Raja Batak	Bangunan	Sianjur Mulamula	Sianjur Mulamula
344	Aek Bintatar	Situs	Sianjur Mulamula	Sianjur Mulamula
345	Aek Bulugading	Situs	Sianjur Mulamula	Sianjur Mulamula
346	Sigulatti	Situs	Sianjur Mulamula	Sianjur Mulamula
347	Binanga Sogop	Situs	Sianjur Mulamula	Sianjur Mulamula
348	Simarguriguri	Situs	Sianjur Mulamula	Sianjur Mulamula
349	Aek Bona-bona	Situs	Sianjur Mulamula	Siboro
350	Aek Toba-toba	Situs	Sianjur Mulamula	Siboro
351	Aek Simargolang	Situs	Sianjur Mulamula	Siboro
352	Aek Parsuangan	Situs	Sianjur Mulamula	Sijambur
353	Ulu Ni Dolok Sinabung	Situs	Sianjur Mulamula	Silinjauang
354	Mual Raja Lontung	Situs	Sianjur Mulamula	Silinjauang
355	Aek Bong Bong	Situs	Sianjur Mulamula	Singkam
356	Batu Pinggan	Situs	Sianjur Mulamula	Singkam

Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Nama	Jenis ODCB	Kecamatan	Desa/ Kelurahan
357	Batu Nadera	Situs	Sianjur Mulamula	Singkam
358	Batu Passa	Situs	Sianjur Mulamula	Singkam
359	Batu Humusor	Situs	Sianjur Mulamula	Singkam
360	Aek Mual	Situs	Sianjur Mulamula	Singkam
361	Sisangkala	Situs	Sianjur Mulamula	Singkam
362	Mual Siguru Lombu	Situs	Sianjur Mulamula	Singkam
363	Batu Nanggar	Situs	Sianjur Mulamula	Singkam
364	Onan Gurgur	Situs	Sianjur Mulamula	Singkam
365	Mata Air (Aek Sipitu Dai) dan Batu Dakon	Situs	Sianjur Mulamula	Sipitudai
366	Aek Baringin	Situs	Sianjur Mulamula	Sipitudai
367	Batu Anduhur	Situs	Sianjur Mulamula	Sipitudai
368	Batu Gordang	Situs	Sianjur Mulamula	Sipitudai
369	Batu Ijuk	Situs	Sianjur Mulamula	Sipitudai
370	Batu Palangka	Situs	Sianjur Mulamula	Sipitudai
371	Batu Parbuisan	Situs	Sianjur Mulamula	Sipitudai
372	Batu Simarlage-lage	Situs	Sianjur Mulamula	Sipitudai
373	Siharbangan	Situs	Sianjur Mulamula	Sipitudai
374	Simangarambang	Situs	Sianjur Mulamula	Sipitudai
375	Aek Sipitu Dai	Situs	Sianjur Mulamula	Sipitudai
376	Aek Sihapiti (Baoa Ni Tano)	Situs	Sianjur Mulamula	Sipitudai
377	Tano Sitaiktangan	Situs	Sianjur Mulamula	Sosor Nangka
378	Batu Ogung Huta Parik	Benda	Pangururan	Huta Parik
379	Kantor Nagari Pangururan	Bangunan	Pangururan	Pangururan
380	Pesanggrahan	Bangunan	Pangururan	Pangururan
381	Siboru Naitang	Situs	Pangururan	Pangururan
382	Rumah Bolon Ganti Sinamot Raja Sisingamangaraja XII	Benda	Pangururan	Siogung-ogung
383	Batu Sibolak bolak Huta Parik	Benda	Pangururan	Siogung-ogung
384	Rumah Bolon Op. Tabak Naibaho	Bangunan	Pangururan	Siogung-ogung
385	Terusan Tano Ponggol	Struktur	Pangururan	Siogung-ogung
386	Rumah Hela	Situs	Pangururan	Siogung-ogung
387	Batu Siogung-ogung	Situs	Pangururan	Siogung-ogung
388	Batu Partangiangan Sisingamangaraja	Situs	Pangururan	Siogung-ogung
389	Batu Hoda	Situs	Pangururan	Siogung-ogung
390	Batu Gaja	Situs	Pangururan	Siogung-ogung
391	Aek Rangat Pusuk Buhit	Situs	Pangururan	Siogung-ogung
392	Tano Ponggol	Situs	Pangururan	Siogung-ogung
393	Mual/ Aek Tada-tada	Situs	Pangururan	Siogung-ogung
394	Mual Sipultak Mataniari	Situs	Pangururan	Siogung-ogung
395	Sijambur/ Jabu Hela	Situs	Pangururan	Siogung-ogung
396	Batu Guru	Situs	Pangururan	Siogung-ogung
397	Batu Losung Huta Godang	Benda	Pangururan	Tanjung Bunga

No	Nama	Jenis ODCB	Kecamatan	Desa/ Kelurahan
398	Batu Parsuri-surian Natikka Nasumurung Br. Nadeak	Benda	Pangururan	Tanjung Bunga
399	Rumah Bolon Huta Parik	Bangunan	Pangururan	Tanjung Bunga

Sumber: Disbudpar Kabupaten Samosir, 2025

Pelaksanaan kegiatan tersebut di atas tetap memperhatikan :

- Tingkat optimal pemanfaatan sumberdaya alam, agar kebutuhan terpenuhi namun sumber daya alam beserta ekosistemnya dapat tetap dilestarikan;
- keterukuran berdasarkan kesesuaian antar tingkat pemanfaatan dan pencadangan terhadap potensi dan kebutuhan;
- keterukuran dengan nilai manfaat sumber daya alam melalui valuasi ekonomi.
- Pembangunan Kawasan memperhatikan Daya Dukung Lingkungan Hidup
- Memperhatikan pemanfaatan ruang sesuai arahan RTRW

5. Peningkatan kualitas Tenaga Kerja dan Produk Unggulan UMK berdasarkan potensi wilayah

Pembangunan sentra IKM dan UKM atau Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dilakukan dengan :

- a. memperhatikan konsentrasi/kepadatan penduduk
- b. kelengkapan kajian mengenai dampak lingkungan.

6. Peningkatan produktivitas pertanian melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian, pupuk organik dan bibit yang merata untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan

7. Pengelolaan dan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan

b. Kegiatan Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*)

Untuk mempercepat dampak pembangunan, dirumuskan Kegiatan Hasil Terbaik Cepat (KHTC) sebagai *quick wins* Pembangunan yang merupakan program-program strategis yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat dan untuk mempercepat fondasi awal tujuan dan sasaran

RPJMD Kabupaten Samosir. Pemilihan dan penetapan KHTC bagi Kabupaten Samosir dititikberatkan pada urgensi untuk dilakukan dengan segera, menjawab permasalahan yang mendesak dan tidak dapat ditunda, serta manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Kabupaten Samosir menetapkan Kegiatan Hasil Terbaik Cepat yang diambil dari Kegiatan Unggulan, diantaranya:

1. BERANTAS (Berobat Tanpa Batas)

Kegiatan Berobat Tanpa Batas merupakan merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Samosir dalam menjamin bahwa masyarakat Samosir dapat berobat tanpa ada hambatan, terutama dalam hal pemanfaatan Jaminan Kesehatan Nasional. Setiap tahun, Pemerintah Kabupaten Samosir berkomitmen untuk mencapai batas minimum keanggotaan JKN untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) sebesar 98,6 persen. Dengan terjaminnya penduduk Samosir dalam keanggotaan JKN, maka Berobat Tanpa Batas bukan hanya slogan, tapi gerakan untuk menyelamatkan hidup dan derajat kesehatan masyarakat Samosir secara menyeluruh serta dampaknya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Kegiatan ini mendukung pencapaian **sasaran RPJMD, yakni meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.**

Berobat tanpa batas menjadi langkah awal yang dilaksanakan dengan **segera** (tahun 2025) dan dipertahankan/ditingkatkan hingga akhir periode RPJMD.

Strategi pembiayaan dilakukan dengan memberikan dukungan anggaran dari Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Samosir. Secara rinci, konsep Kegiatan Hasil Terbaik Cepat: Berantas (Berobat Tanpa Batas) ditunjukkan pada tabel 3.15 di bawah ini.

Tabel 3.15 Kegiatan Hasil Terbaik Cepat: Berantas (Berobat Tanpa Batas)

Kegiatan Hasil terbaik Cepat: Berantas (Berobat Tanpa Batas)	
Output	: Terbayarkannya iuran JKN masyarakat rentan
Manfaat langsung	: Seluruh masyarakat, termasuk masyarakat rentan, dapat berobat gratis
Indikator keberhasilan	: Cakupan UHC minimal 98,6 persen pertahun
Target waktu pencapaian	: Tahun 2025 (13,, dipertahankan/ditingkatkan hingga akhir periode

Sumber: Bappeda Litbang, data diolah

2. LANJUTKAN (Layanan Jaminan Untuk Tenaga Kerja Rentan)

Kegiatan Layanan Jaminan untuk Tenaga Kerja Rentan merupakan bentuk komitmen dan keberpihakan Pemerintah Kabupaten Samosir untuk memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok tenaga kerja rentan. Melalui kegiatan Layanan Jaminan untuk Tenaga Kerja Rentan, pemerintah daerah memberikan dukungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja sektor informal, seperti petani, nelayan, buruh harian, pedagang kecil, hingga ojek dan sopir angkutan umum, yang selama ini belum terjangkau sistem perlindungan formal.

Dengan adanya KHTC ini, dampak langsung yang didapatkan oleh masyarakat adalah meningkatnya rasa aman dan kesejahteraan para pekerja rentan, sekaligus mendorong inklusi jaminan sosial sebagai bagian dari pembangunan ketenagakerjaan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Kegiatan ini juga mendukung pencapaian **sasaran RPJMD, yakni meningkatnya ketahanan sosial.**

Strategi pembiayaan dilakukan melalui kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan serta dukungan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Samosir. Mengingat lebih dari 80,44 persen penduduk Kabupaten Samosir bekerja di sektor formal (BPS, 2025), pemenuhan 100 persen kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Samosir, namun komitmen untuk melaksanakan kegiatan ini dengan **segera** (tahun 2025) dan secara bertahap meningkatkan cakupannya, menjadi perwujudan kepedulian Pemerintah Kabupaten Samosir kepada seluruh lapisan masyarakatnya.

Secara rinci, konsep Kegiatan Hasil Terbaik Cepat: Layanan Jaminan untuk Tenaga Kerja Rentan (LANJUTKAN) ditunjukkan pada tabel 3.16 di bawah ini.

Tabel 3.16 Kegiatan Hasil Terbaik Cepat:
Layanan Jaminan untuk Tenaga Kerja Rentan (LANJUTKAN)

Kegiatan Hasil terbaik Cepat: Layanan Jaminan untuk Tenaga Kerja Rentan (LANJUTKAN)	
Output	: Terbayarkannya iuran BPJS Ketenagakerjaan masyarakat rentan
Manfaat langsung	: Terwujudnya rasa aman dalam berkerja bagi pekerja rentan

Kegiatan Hasil terbaik Cepat: Layanan Jaminan untuk Tenaga Kerja Rentan (LANJUTKAN)	
Indikator keberhasilan	: Cakupan BPJS Ketenagakerjaan tenaga kerja rentan yang dibayarkan
Target waktu pencapaian	: Dimulai tahun 2025, ditingkatkan hingga akhir periode
Sumber: Bappeda Litbang, data diolah	

3. RAMOS PANTAS (Rantang Samosir Penurunan Angka Stunting);

Kegiatan Hasil Terbaik Cepat Rantang Samosir Penurunan Angka Stunting (RAMOS PANTAS) merupakan langkah awal dan segera yang diambil Pemerintah Kabupaten Samosir dalam upaya percepatan penurunan angka stunting melalui pendekatan pemenuhan gizi secara langsung dan berkelanjutan. Program ini menyasar keluarga berisiko stunting, khususnya balita dengan status gizi buruk atau kurang, serta ibu hamil dan menyusui yang mengalami kekurangan energi kronis (KEK).

Melalui skema pemberian edukasi/pemahaman kepada keluarga risiko stunting terkait pengolahan makanan yang bergizi dan seimbang serta langsung dipraktikkan. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa asupan nutrisi yang dibutuhkan oleh anak dan ibu hamil dapat terpenuhi dengan tepat sasaran. Menu makanan yang telah diolah oleh keluarga risiko stunting tetap memperhatikan nilai gizi seimbang dan berbasis pada potensi pangan lokal Samosir.

Rantang Samosir Penurunan Angka Stunting (RAMOS PANTAS) tidak hanya berperan sebagai program intervensi gizi, tetapi juga menjadi sarana edukasi keluarga mengenai pentingnya pola makan sehat, sanitasi, dan perawatan anak. Program ini memperkuat kolaborasi antara pemerintah desa, tenaga kesehatan, kader posyandu, dan masyarakat dalam mengawal tumbuh kembang anak secara optimal. Kegiatan ini mendukung pencapaian **sasaran RPJMD, yakni meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.**

Dengan pelaksanaan yang terarah dan partisipatif, RAMOS PANTAS menjadi bukti nyata keberpihakan daerah terhadap generasi masa depan, sekaligus mendukung target nasional penurunan prevalensi stunting menuju 12,3% pada tahun 2029 sehingga pelaksanaan KHTC ini dilakukan dengan **segera** (tahun 2025).

Strategi pembiayaan dilakukan melalui dukungan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Samosir dan potensi pembiayaan melalui APBD Provinsi Sumatera Utara. Secara rinci, konsep Kegiatan Hasil Terbaik Cepat: Rantang Samosir Penurunan Angka Stunting (RAMOS PANTAS) ditunjukkan pada tabel 3.17 di bawah ini.

Tabel 3.17 Kegiatan Hasil Terbaik Cepat:
Rantang Samosir Penurunan Angka Stunting (RAMOS PANTAS)

Kegiatan Hasil terbaik Cepat: Rantang Samosir Penurunan Angka Stunting (RAMOS PANTAS)	
Output	: Meningkatkan pemahaman Keluarga Resiko Stunting terkait pengolahan makanan yang bergizi dan seimbang
Manfaat langsung	: Terpenuhinya kebutuhan gizi bagi anak stunting, anak usia 0-23 bulan, Ibu hamil KEK/Resikko KEK
Indikator keberhasilan	: 1. Persentase Anak Stunting menerima manfaat 2. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapatkan makanan pendamping ASI 3. Persentase Ibu hamil KEK/Resikko KEK yang mendapatkan makanan Tambahan
Target waktu pencapaian	: Dimulai tahun 2025, target 100 persen untuk ketiga indikator, dan dipertahankan hingga akhir periode.

Sumber: Bappeda Litbang, data diolah

4. SAMOSIR MARSIKKOLA

Pemerintah Kabupaten Samosir berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas akses belajar bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi keluarga kurang mampu dan siswa-siswa berprestasi. Kegiatan Samosir Marsikkola: Pemberian bantuan pendidikan/beasiswa pada masyarakat tidak mampu dan siswa berprestasi ini, pemerintah memberikan bantuan biaya pendidikan sebagai bentuk nyata keberpihakan terhadap kelompok rentan dan sebagai upaya menciptakan keadilan pendidikan.

Beasiswa ini tidak hanya diberikan kepada siswa/mahasiswa dari keluarga miskin agar mereka tidak putus sekolah karena kendala biaya, tetapi juga kepada siswa berprestasi sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan capaian akademik mereka. Diharapkan, program ini dapat menjadi pemicu semangat belajar, mendorong peningkatan mutu sumber daya manusia, serta membuka peluang generasi muda untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Dengan adanya program beasiswa ini, Pemerintah Kabupaten Samosir menegaskan pentingnya investasi di sektor pendidikan sebagai fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Kegiatan ini mendukung pencapaian **sasaran RPJMD** yakni **meningkatnya kualitas pendidikan**.

Strategi pembiayaan dilakukan melalui dukungan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Samosir dan potensi kerjasama dengan pihak swasta. Secara rinci, konsep Kegiatan Hasil Terbaik Cepat: Samosir Marsikola ditunjukkan pada tabel 3.18 di bawah ini.

Tabel 3.18 Kegiatan Hasil Terbaik Cepat: Samosir Marsikkola

Kegiatan Hasil terbaik Cepat: Samosir Marsikkola	
Output	: Tersalurkannya bantuan pendidikan/beasiswa kepada siswa keluarga kurang mampu, siswa berprestasi
Manfaat langsung	: Meningkatnya akses bagi siswa dari keluarga miskin, berkurangnya Angka Putus Sekolah, Meningkatnya semangat dan motivasi belajar siswa
Indikator keberhasilan	: Jumlah Pelajar/Mahasiswa Berprestasi dan Kurang Mampu yang mendapatkan beasiswa
Target waktu pencapaian	: telah dilaksanakan sejak tahun-tahun sebelumnya, dilanjutkan tahun 2025, target ditingkatkan setiap tahunnya

Sumber: Bappeda Litbang, data diolah

5. Pemanfaatan Energi Terbarukan

Menghadapi tantangan perubahan iklim dan potensi kemarau panjang yang terjadi setiap tahun, Pemerintah Kabupaten Samosir terus mendorong pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan, khususnya di sektor penyediaan air bersih dan irigasi. Fokus utama diarahkan pada pembangunan irigasi dengan pendekatan inovatif seperti pemanfaatan energi terbarukan, misalnya panel surya untuk pompa air dan sistem distribusi berbasis gravitasi, diterapkan untuk memastikan ketersediaan air tanpa menambah beban lingkungan dan dapat diandalkan sepanjang tahun, termasuk pada musim kemarau panjang. Penerapan teknologi ini sejalan dengan prinsip pembangunan hijau yang menekankan efisiensi, ketahanan, dan keadilan akses sumber daya. Kegiatan ini mendukung pencapaian **sasaran RPJMD** yakni **meningkatnya infrastruktur berkualitas**.

Dengan infrastruktur yang tangguh terhadap perubahan cuaca ekstrem, masyarakat – terutama petani dan kelompok rentan – akan lebih siap menghadapi dampak kemarau panjang, menjaga ketahanan pangan, dan mempertahankan keberlanjutan mata pencaharian mereka. Ini merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah daerah untuk membangun masa depan yang lebih resilien dan inklusif.

Secara rinci, konsep Kegiatan Hasil Terbaik Cepat: PLTS untuk Masyarakat ditunjukkan pada tabel 3.19 di bawah ini.

Tabel 3.19 Kegiatan Hasil Terbaik Cepat: Infrastruktur Berkelanjutan dan Berkualitas

Kegiatan Hasil terbaik Cepat: Infrastruktur Berkelanjutan dan Berkualitas	
Output	: Tersedianya PLTS
Manfaat langsung	: Terairnya sawah masyarakat sepanjang tahun
Indikator keberhasilan	: Jumlah PLTS yang dibangun
Target waktu pencapaian	: telah dilaksanakan sejak tahun-tahun sebelumnya, dilanjutkan tahun 2025 hingga akhir periode RPJMD

Sumber: Bappeda Litbang, data diolah

6. Pengelolaan Persampahan

Dalam upaya mewujudkan Kabupaten Samosir sebagai destinasi pariwisata unggulan dan wilayah hunian yang sehat serta berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Samosir menggagas KHTC Samosir Bersih sebagai kegiatan yang harus dilaksanakan dengan segera. Selain dilaksanakan bersama lintas sektor dan seluruh lapisan masyarakat, program ini berfokus pada perluasan layanan persampahan rumah tangga, serta pengolahan timbulan sampah di fasilitas persampahan.

Kondisi saat ini, belum semua kecamatan dapat dijangkau layanan persampahan. Peningkatan layanan persampahan dan pengolahan timbulan sampah di fasilitas persampahan dilakukan melalui peningkatan sarana dan prasarana pengangkutan sampah serta edukasi kepada masyarakat tentang pengolahan sampah. Kegiatan ini mendukung pencapaian **sasaran RPJMD** yakni **meningkatnya infrastruktur berkualitas**.

Keberhasilan program ini akan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, daya tarik pariwisata, dan

pelestarian ekosistem Danau Toba. KHTC Samosir Bersih adalah langkah strategis menuju Samosir yang lebih hijau, sehat, dan berdaya saing.

Secara rinci, konsep Kegiatan Hasil Terbaik Cepat: Samsoir Bersih ditunjukkan pada tabel 3.20 di bawah ini.

Tabel 3.20 Kegiatan Hasil Terbaik Cepat: Samosir Bersih

Kegiatan Hasil terbaik Cepat: Samosir Bersih	
Output	: Terangkutnya sampah rumah tangga
Manfaat langsung	: Peningkatan kebersihan rumah tangga
Indikator keberhasilan	: 1. Cakupan layanan persampahan rumah tangga 2. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah
Target waktu pencapaian	: dilaksanakan tahun 2025, dan ditingkatkan hingga akhir periode RPJMD

Sumber: Bappeda Litbang, data diolah

7. SAMOSIR FIESTA

Sebagai salah satu destinasi unggulan di kawasan Danau Toba, Kabupaten Samosir memiliki kekayaan budaya dan keindahan alam yang menjadi potensi besar dalam pengembangan sektor pariwisata. Untuk mengoptimalkan daya tarik tersebut, Pemerintah Kabupaten Samosir melaksanakan berbagai event pariwisata yang terstruktur melalui penyusunan Kalender Wisata Tahunan. Kalender wisata ini disusun secara komprehensif dan berkelanjutan untuk memastikan keterpaduan kegiatan budaya, olahraga, religi, dan atraksi alam agar dapat dinikmati wisatawan domestik maupun mancanegara sepanjang tahun.

Setiap event yang tercantum dalam kalender wisata tidak hanya menjadi sarana hiburan dan promosi daerah, tetapi juga menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku UMKM, seniman, komunitas adat, dan masyarakat sekitar. Penyusunan kalender ini melibatkan berbagai pihak agar selaras dengan potensi lokal, kalender nasional, dan agenda pariwisata provinsi maupun nasional.

Selain itu, pengembangan ekowisata/agrowisata menjadi fokus utama dalam menghadirkan konsep pariwisata berkelanjutan yang ramah lingkungan dan berbasis masyarakat. Ekowisata di Samosir diarahkan untuk mengangkat kearifan lokal, menjaga kelestarian lingkungan, serta membuka ruang partisipasi aktif bagi masyarakat dalam mengelola dan memperoleh manfaat dari sektor

pariwisata. Kegiatan ini mendukung pencapaian **sasaran RPJMD** yakni **meningkatnya PDRB sektor unggulan**.

Dengan integrasi antara kalender wisata yang terencana dan pengembangan ekowisata yang berbasis potensi lokal, Kabupaten Samosir terus berupaya meningkatkan daya saing pariwisata daerah, memperluas jangkauan pasar wisatawan, serta menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat.

Secara rinci, konsep Kegiatan Hasil Terbaik Cepat: SAMOSIR FIESTA ditunjukkan pada tabel 3.21 di bawah ini.

Tabel 3.21 Kegiatan Hasil Terbaik Cepat: Samosir Pusat Pariwisata

Kegiatan Hasil terbaik Cepat: Samosir Pusat Pariwisata	
Output	: - Terlaksananya event kepariwisataan/kebudayaan - Terbangunnya kawasan agrowisata/ekowisata
Manfaat langsung	: Menciptakan peluang usaha bagi pelaku UMKM lokal seperti kuliner, kerajinan tangan, homestay, dan transportasi wisata
Indikator keberhasilan	: 1. Jumlah event yang dilaksanakan 2. Jumlah kawasan ekowisata/agrowisata yang dikembangkan
Target waktu pencapaian	: dilaksanakan tahun 2025 akhir periode RPJMD

Sumber: Bappeda Litbang, data diolah

8. Samosir Na Las (Samosir Naik Kelas)

Kegiatan Hasil Terbaik Cepat Samosir Naik Kelas merupakan salah satu inisiatif strategis Pemerintah Kabupaten Samosir dalam mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat secara inklusif dan berkelanjutan. Melalui skema pinjaman dengan bunga nol persen, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diberikan akses permodalan yang lebih terjangkau dan ramah terhadap kondisi ekonomi lokal. Skema ini bertujuan untuk menghilangkan hambatan awal yang sering dihadapi UMKM, seperti keterbatasan modal dan beban bunga pinjaman, sekaligus mendorong semangat kewirausahaan.

Selain memberikan dukungan dari sisi permodalan, kegiatan ini juga didorong dengan strategi hilirisasi produk lokal melalui pendampingan, pelatihan, dan kurasi produk unggulan daerah agar mampu menembus pasar modern, retail nasional, hingga platform digital. Kegiatan ini

mendukung pencapaian **sasaran RPJMD** yakni **meningkatnya produktivitas Koperasi, UMK dan IKM dalam perekonomian daerah.**

Sinergi antara akses permodalan tanpa bunga dan pembukaan jalur distribusi ke pasar modern ini menjadi wujud nyata dari komitmen Pemerintah Daerah dalam menaikkan kelas UMKM lokal dari skala kecil menjadi pelaku usaha yang kompetitif dan berdaya saing tinggi. Samosir Naik Kelas bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang penguatan identitas lokal, pemberdayaan masyarakat, dan keadilan ekonomi di tingkat akar rumput.

Secara rinci, konsep Kegiatan Hasil Terbaik Cepat: Samosir Na Las (Naik Kelas) ditunjukkan pada tabel 3.22 di bawah ini.

Tabel 3.22 Kegiatan Hasil Terbaik Cepat: Samosir Na Las (Samosir Naik Kelas)

Kegiatan Hasil terbaik Cepat: Samosir Na Las (Samosir Naik Kelas)	
Output	: - Tersalurkannya pinjaman bunga nol persen - Terlaksananya pengembangan produk unggulan olahan hasil pertanian - Terlaksananya pemasaran produk unggulan masuk pasar modern - Terlaksananya pelatihan
Manfaat langsung	: • Meningkatnya akses permodalan bagi pelaku UKM dan IKM • Meningkatnya pendapatan pelaku UKM, IKM • Meningkatnya akses pemasaran bagi pelaku UKM dan IKM
Indikator keberhasilan	: 1. Jumlah Pelaku Usaha mikro yang diberikan subsidi bunga 0 persen 2. Jumlah Produk Unggulan Olahan Hasil pertanian 3. Jumlah produk unggulan yang masuk ke pasar modern
Target waktu pencapaian	: dilaksanakan tahun 2025 akhir periode RPJMD

Sumber: Bappeda Litbang, data diolah

9. Pangula Nature

Bertani Selaras Alam/Pangula Nature merupakan inisiatif inovatif Pemerintah Kabupaten Samosir untuk mendorong transformasi sektor pertanian menuju sistem yang lebih produktif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Program ini lahir dari kebutuhan mendesak untuk meningkatkan hasil pertanian secara efisien, tanpa mengorbankan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lahan.

Dengan mengedepankan prinsip pertanian selaras alam, program ini mengarahkan petani untuk menerapkan praktik-praktik agroekologi seperti penggunaan pupuk organik, pengendalian hama terpadu, rotasi tanaman, dan konservasi air. Teknologi tepat guna serta pelatihan kepada petani diberikan untuk mempercepat peningkatan hasil panen sekaligus menjaga kesuburan tanah dan keanekaragaman hayati.

Fokus kegiatan ini juga untuk menciptakan petani milenial yang sebagai upaya strategis untuk mendorong generasi muda agar tertarik, terlibat, dan berdaya saing dalam sektor pertanian yang modern, inovatif, dan berkelanjutan. Kegiatan ini juga ini bertujuan menciptakan petani milenial yang adaptif terhadap perubahan iklim, digitalisasi, dan pasar global, serta mampu menjadikan pertanian sebagai sektor yang menjanjikan secara ekonomi dan prestisius secara sosial.

Melalui dukungan permodalan, akses terhadap benih unggul, serta integrasi dengan sistem informasi pertanian digital, petani didorong untuk mengoptimalkan hasil tanam dalam waktu singkat namun tetap menjaga kelestarian lingkungan. Pendekatan ini tidak hanya menjawab tantangan perubahan iklim dan degradasi lahan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani secara langsung serta mendukung program ketahanan pangan Nasional. Kegiatan ini mendukung **sasaran RPJMD** yakni **meningkatnya PDRB sektor unggulan**.

Secara rinci, konsep Kegiatan Hasil Terbaik Cepat: Bertani Selaras Alam (Pangula Nature) ditunjukkan pada tabel 3.23 di bawah ini.

Tabel 3.23 Kegiatan Hasil Terbaik Cepat: Bertani Selaras Alam (Pangula Nature)

Kegiatan Hasil terbaik Cepat: Bertani Selaras Alam (Pangula Nature)	
Output	: Terciptanya petani milenial
Manfaat langsung	: terciptanya agropreneur muda yang mampu menciptakan lapangan kerja baru di sektor pertanian
Indikator keberhasilan	: Jumlah pemuda yang menjadi petani milenial
Target waktu pencapaian	: dilaksanakan tahun 2025 akhir periode RPJMD

Sumber: Bappeda Litbang, data diolah

10. Konservasi daya dukung dan daya tampung (SERDADU DATA)

Kabupaten Samosir, sebagai daerah kepulauan di kawasan Danau Toba, memiliki kekayaan alam yang luar biasa, namun juga menghadapi tantangan serius akibat degradasi lahan, alih fungsi lahan, dan praktik pertanian yang belum seluruhnya berkelanjutan. Untuk menjaga kelestarian lingkungan, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan produktivitas lahan, Pemerintah Kabupaten Samosir berkomitmen melaksanakan Konservasi Daya Dukung dan Daya Tampung (SERDADU DATA) secara terpadu dan berkelanjutan.

Konservasi Daya Dukung dan Daya Tampung (SERDADU DATA) difokuskan pada lahan kritis, lahan tidur, dan kawasan rawan erosi yang tersebar di berbagai kecamatan. Kegiatan ini dilakukan melalui pendekatan vegetatif (penanaman pohon pelindung dan tanaman produktif), sipil teknis (pembuatan terasering, rorak, dan dam penahan air). Kegiatan ini mendukung **sasaran RPJMD** yakni **meningkatnya kualitas ekologi**.

Tabel 3.24 Kegiatan Hasil Terbaik Cepat: Konservasi Daya Dukung dan Daya Tampung (SERDADU DATA)

Kegiatan Hasil terbaik Cepat: Konservasi Daya Dukung dan Daya Tampung (SERDADU DATA)	
Output	: Terlaksananya rehabilitasi lahan kritis
Manfaat langsung	: - Meningkatkan kesuburan tanah, sehingga dapat digunakan untuk pertanian/perkebunan - Meningkatkan perekonomian masyarakat
Indikator keberhasilan	: Luas area yang dilakukan rehabilitasi yang menjadi kewenangan
Target waktu pencapaian	: dilaksanakan tahun 2025 akhir periode RPJMD

Sumber: Bappeda Litbang, data diolah

Indikator keberhasilan dan target KHTC, secara rinci disajikan pada tabel 3.25 di bawah ini.

Tabel 3.25 Indikator Keberhasilan dan Target Kegiatan Hasil Terbaik Cepat Kabupaten Samosir

Kegiatan HTC	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						Akhir Periode
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1. BERANTAS (Berobat Tanpa Batas)	Cakupan Pemeriksaan kesehatan gratis	%	-	40	50	55	60	65	70	70
	Cakupan UHC	%	97,3	98,6	98,6	98,6	98,6	98,6	98,6	98,6
2. LANJUTKAN (Layanan Jaminan Untuk Tenaga Kerja Rentan)	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerjarentan	%	13,15	13,15	17,48	21,8	26,12	30,45	34,79	34,79
3. RAMOS PANTAS (Rantang Samosir Penurunan Angka Stunting)	Persentase Anak Stunting menerima manfaat	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapatkan makanan pendamping ASI	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Ibu hamil KEK/Resikko KEK yang mendapatkan makanan Tambahan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
4. SAMOSIR MARSIKKOLA	Jumlah Pelajar/Mahasiswa Berprestasi dan Kurang Mampu yang mendapatkan beasiswa	orang	2.183	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	17.183
5. Pemanfaatan Energi terbarukan	Jumlah pompa air tenaga surya yang dibangun	Unit	5	2	2	2	2	2	2	17
6. Pengelolaan Persampahan	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	57,2	60	62	63	64	65	66	66

Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Kegiatan HTC	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target						Akhir Periode
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Cakupan layanan persampahan rumah tangga	RT	2.500	2.700	3.000	6.500	7.500	8.500	9.500	9.500
7. SAMOSIR FIESTA	Jumlah Event	event	25	30	87	87	87	87	87	490
	Jumlah kawasan agrowisata/ekowisata yang dikembangkan	kawasa n	2	1	2	2	2	2	2	13
8. SAMOSIR NA LAS (NAIK KELAS)	Jumlah Pelaku Usaha mikro yang diberikan subsidi bunga 0 persen	Usaha	-	200	1.360	2.320	2.320	2.320	2.320	10.840
	Jumlah Produk Unggulan Olahan Hasil pertanian	Jenis	6	2	2	2	2	2	2	18
	Jumlah produk unggulan yang masuk ke pasar modern	produk	9	2	2	2	2	2	2	21
9. Bertani Selaras Alam (Pangula Nature)	Jumlah pemuda yang menjadi petani milenial	orang	9	27	45	90	90	135	135	531
10. SERDADU DATA (Konservasi daya dukung dan daya tampung)	Luas area yang dilakukan rehabilitasi yang menjadi kewenangan	Ha	65	14	50	75	100	125	150	514

Keterkaitan antara Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Nasional, Provinsi Sumatera Utara dengan Kegiatan Hasil Terbaik Cepat (KHTC) Kabupaten Samosir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.26 Keterkaitan antara Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Nasional, Provinsi Sumatera Utara dengan Kegiatan Hasil Terbaik Cepat (KHTC) Kabupaten Samosir

No	Nasional	Provinsi Sumatera Utara	Kabupaten Samosir
1	Poin ke-4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi	Poin ke-1. Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG)	Poin ke-4. SAMOSIR MARIKKOLA
2	Point ke-2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten	Poin ke-2. Program Berobat Gratis (PROBIS)	Poin ke-1. BERANTAS (Berobat Tanpa Batas)
	Poin ke-1. Memberikan makanan bergizi gratis untuk siswa siswi, ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita		Poin ke-3. RAMOS PANTAS (Rantang Samosir Penurunan Angka Stunting)
3	Point ke-3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional	Poin ke-3. Jaminan Kestabilan Harga Komoditi Pangan (JASKOP)	Poin ke-2. LANJUTKAN (Layanan Jaminan Untuk Tenaga Kerja Rentan)
			Poin ke-9. Bertani Selaras Alam (PANGULA NATURE)
4	Point ke-6. Peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara, termasuk melalui digitalisasi proses kerja birokrasi dan sistem pelayanan publik berbasis teknologi	Poin ke-4. Digitalisasi Pelayanan Publik “Cepat Responsif, Handal, dan Solutif” (CERDAS)	Poin ke-6. Pengelolaan Persampahan
			Poin ke-7. SAMOSIR FIESTA
			Poin ke-8. SAMOSIR NALAS (NAIK KELAS)
5	Point ke-7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, bantuan langsung tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), generasi milenial dan generasi Z.”	Poin ke-5. Infrastruktur Strategis Terintegrasi (INSTANSI)	Poin ke-5. Pemanfaatan Energi Terbarukan
6	Point ke-5. Penghapusan kemiskinan absolut dan pemberdayaan masyarakat rentan	Poin ke-6. Perlindungan Rakyat Melalui Restorative Justice (PRESTICE)	Poin ke-10. SERDADU DATA (Konservasi daya dukung dan daya tampung)

c. Proyek Strategis Jangka Panjang Daerah Tahap I

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Samosir tahun 2025-2045, disusun beberapa proyek strategis jangka panjang Daerah, yang dibagi atas 4 periode perencanaan jangka menengah. RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2029 merupakan tahap I dari periode RPJPD, proyek strategis jangka panjangnya sebagai berikut.

Tabel 3.27 Proyek Strategis RPJPD Tahap I

Proyek Strategis Daerah	Tujuan Pembangunan	Dokumen Pendukung
Pembangunan SPAM Sitapigagan	Rendahnya capaian layanan air bersih sebagai kebutuhan dasar masyarakat di Kabupaten Samosir yang hanya mencapai 55,68% dan keberadaan layanan dimaksud dapat mempengaruhi keberhasilan sektor pariwisata di Kabupaten Samosir.	1. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Samosir Tahun 2018 – 2038 Pasal 26 2. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Samosir 2021 – 2045 Bab VI poin 6.2.5 Binanga Sitapigagan
Penyusunan RDTR Kecamatan Palipi, Kecamatan Sitiotio; Kecamatan Ronggur Nihuta; Kecamatan Nainggolan.	Instrumen pengendalian dan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTRW	1. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Samosir Tahun 2018 – 2038 2. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Samosir 2022 – 2032 3. Dokumen Rencana Induk Pembangunan Pertanian (RIPP) Kabupaten Samosir
Pembangunan rumah adat 5 puak Batak di Sigulati	Pusuk Buhit merupakan Titik Nol Peradaban Orang Batak di mana dalam mitologi suku Batak, puncak tersebut diceritakan sebagai tempat "kelahiran si Raja Batak" yang melahirkan Suku Batak yang terdiri dari Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Pakpak Dairi, Batak Simalungun, dan Batak Toba. Pembangunan Rumah Adat 5 Puak Batak di kaki pusuk buhit diharapkan menjadi simbol dari kesatuan dari etnis batak tersebut.	

Proyek Strategis Daerah	Tujuan Pembangunan	Dokumen Pendukung
Pembangunan Jalan Outer Ringroad Kab. Samosir	Merupakan akses ke Kabupaten Dairi pada tepian Danau Toba, bagian konektivitas ruas 7 kabupaten pada jalan lingkaran luar Danau Toba sepanjang 23 km	1. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Samosir Tahun 2018 – 2038 Pasal 14 ayat (4) 2. Dokumen <i>Integrated Tourism Master Plan (ITMP) for Lake Toba</i> Bagian III Strategi Pengembangan Kawasan.
Penataan Kawasan Tomok	Tomok sebagai salah satu gerbang masuk ke Kabupaten Samosir melalui jalur danau dan sebagai destinasi wisata budaya membutuhkan peningkatan amenitas dan wajah baru untuk meningkatkan daya tarik dan lama tinggal di kawasan wisata Tomok.	1. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Samosir Tahun 2018 – 2038 Pasal 10 ayat (3) 2. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Samosir 2022 – 2032 Pasal 9 ayat (3) 3. Surat Pernyataan Minat Bupati Samosir Nomor 050.12/431/BPD.04/IV/2022 tanggal 5 April 2022 tentang Penataan Kawasan Wisata Tomok - Dokumen <i>Integrated Tourism Master Plan (ITMP) for Lake Toba</i> Bagian III Strategi Pengembangan Kawasan 5.2.5.2 Arah Pengembangan Kluster Tomok
Pembangunan Jalan By-Pass Sialanguan – Rianiate	Berada di Key Tourism Area (KTA) Pangururan, bertujuan untuk : - Jalan alternatif untuk mengurangi kepadatan lalu lintas jalan nasional ruas Pangururan –	1. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Proyek Strategis Daerah	Tujuan Pembangunan	Dokumen Pendukung
	Nainggolan - Pengembangan kawasan perkotaan Pangururan	Kabupaten Samosir Tahun 2018 – 2038 Pasal 14 ayat (6)
		2. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Samosir 2022 – 2032 Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 12
		3. Dokumen Integrated Tourism Master Plan (ITMP) for Lake Toba Bagian III Strategi Pengembangan Kawasan 5.3. KTA Pangururan 5.3.1 Konsep Pengembangan Wisata
Pembangunan Kantor Bupati Samosir di Kompleks Perkantoran Parbaba	Dalam rangka peningkatan Pelayanan Publik dibutuhkan integrasi antar perangkat daerah terutama yang berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Pembangunan Kantor Bupati diharapkan menjadi solusi dalam rangka mempercepat akses terhadap pelayanan publik sehingga seluruh perangkat daerah yang berhubungan dengan pelayanan publik seutuhnya dalam satu atap.	DED Pembangunan Kantor Bupati di Kompleks Perkantoran Parbaba, tahun 2017.
Optimalisasi dan pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (KPT)	Pemerintah Kabupaten Samosir memiliki Kawasan Pertanian Terpadu seluas 2.650 Ha yang menerapkan pola integrasi antara pertanian, peternakan, dan perikanan yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi petani tanpa merusak lingkungan (berkelanjutan).	1. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Samosir Tahun 2018 – 2038 Pasal 37 ayat (4)

Proyek Strategis Daerah	Tujuan Pembangunan	Dokumen Pendukung
	KPT tersebut terdiri atas zona: - tanaman hortikultura (888 Ha) - tanaman pangan (99 Ha) - Budidaya perikanan (101 Ha) - Agroforestry (391 Ha) - Investasi (727 Ha) Badan Air dan perlindungan sungai (220 Ha) Buffer ke Kawasan Hutan produksi (144 Ha) Badan dan sempadan jalan (80 Ha)	2. Keputusan Bupati Samosir Nomor 254 Tahun 2022 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Pertanian Terpadu (KPT) di Desa Hariara Pintu Kecamatan Hariar Kabupaten Samosir 3. Dokumen Survei Investigasi Desain (SID) KPT Samosir 2023 4. Dokumen UKL-UPL 2023 Pembangunan KPT Samosir 5. Dokumen Rencana Induk Pembangunan Pertanian (RIPP) Kab. Samosir TA 2022
Peningkatan Kualitas RTLH di Kabupaten Samosir	1. Menuntaskan Kabupaten Samosir dari kawasan kumuh 2. Membantu menurunkan angka prevalensi stunting di Kabupaten Samosir 3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.	-
Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Penataan kawasan gunung Pusuk Buhit dan Ulu Darat	Sebagai salah satu tindakan nyata yang dilakukan untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan adalah dengan melakukan penghijauan. Penghijauan sangat berguna untuk manusia, karena dengan adanya penghijauan dapat memperbaiki kualitas air demi menjaga keberlanjutan ketersediaan air.	-

Proyek Strategis Daerah	Tujuan Pembangunan	Dokumen Pendukung
Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset Daerah	Pemerintah Daerah memiliki beragam aset publik seperti infrastruktur, properti, tanah, lahan, bangunan, kendaraan, dan lain sebagainya, sehingga penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan manajemen aset karena dapat membantu untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pendapatan. Tujuan manajemen aset pemerintah adalah memastikan bahwa aset publik yang dimiliki dikelola dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Hal ini melibatkan pemantauan, perencanaan, pemeliharaan, dan pengoptimalan aset-aset tersebut. Dengan pemahaman yang mendalam tentang kondisi, nilai, dan potensi aset yang dimiliki, pemerintah daerah dapat mengambil keputusan yang tepat dan berdasarkan data untuk mengelola dan mengalokasikan sumber daya.	-

d. Perumusan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Samosir

Perumusan program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Samosir disusun secara hierarkis dan sistematis. Visi pembangunan daerah dijabarkan dalam Misi. Selanjutnya, misi dijabarkan ke dalam Tujuan, yang kemudian dirinci menjadi Sasaran. Dari sasaran tersebut diturunkan *Outcome*, yaitu hasil langsung yang dapat dirasakan masyarakat sebagai dampak dari program dan kegiatan pembangunan. Untuk menjamin ketercapaian *outcome*, disusun Program Prioritas yang merupakan instrumen operasional guna menjawab kebutuhan masyarakat, mengatasi permasalahan daerah, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan provinsi dan nasional.

Dengan demikian, keterkaitan antar komponen tersebut memastikan pembangunan daerah berjalan terarah, terukur, konsisten, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Samosir.

Perumusan program prioritas RPJMD Kabupaten Samosir dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.28 Perumusan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2029

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
Visi - Samosir Unggul, Inklusif dan Berkelanjutan					
1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Meningkatnya derajat hidup masyarakat			Indeks Pembangunan Manusia(Indeks)	
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Umur Harapan Hidup (Tahun)	
			Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
			Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM Kesehatan	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Rasio)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
			Meningkatnya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Jumlah kematian balita (Orang)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Jumlah kematian ibu (Orang)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
			Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat di Fasilitas	Nilai SPM (Nilai)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
			Pelayanan Kesehatan Rujukan		
			Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan	Persentase pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (%)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
			Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui penguatan kesadaran, pengetahuan, dan penerapan untuk hidup sehat	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
			Meningkatnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase pelaksanaan program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
			Meningkatnya sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman (Persentase)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
		Meningkatnya kualitas pendidikan		Rata-rata lama sekolah (Tahun)	
				Harapan lama sekolah (Tahun)	
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (% Nilai)	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
			Meningkatnya Kemampuan Literasi dan Numerasi	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	
				Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	
				Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	
			Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
			Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
			Meningkatnya Prestasi Olahraga	Peningkatan Prestasi Olahraga (% Indeks)	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
		Meningkatnya pendapatan masyarakat		Produk Domestik Regional Bruto per Kapita ((Rp Juta))	
			Meningkatnya ARG pada belanja langsung APBD	Persentase ARG Daerah (%)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
			Meningkatnya Kualitas Penanganan Bencana	Persentase Penanganan Korban Bencana yang ditangani (%)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan DTKS dan PPKS	Persentase DTKS dan PMKS yang dimanfaatkan (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
			Meningkatnya Nilai Kabupaten Layak Anak	Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) (Nilai)	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
			Meningkatnya pelayanan anak korban kekerasan di kabupaten	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instasi terkait kabupaten (%)	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
			Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
			Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembinaan Kelurga Berencana (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
				Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
			Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar PPKS	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
			Meningkatnya Pengendalian Pertambahan Jumlah Penduduk	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
				Total Fertility Rate (TFR). (Orang)	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
			Meningkatnya tata kelola Taman Makan Pahlawan	Persentase terkelolanya taman makam pahlawan (%)	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
			Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.00 penduduk perempuan) (%)	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
		Meningkatnya ketahanan pangan		Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)	
			Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
			Meningkatnya Penanganan kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
			Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Pangan	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
		Meningkatnya ketahanan sosial		Persentase Desa Mandiri (%)	
				Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	
				Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) (Nilai)	
			Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
			Meningkatnya Kuantitas Pemberdayaan Kemasyarakatan	Jumlah Desa yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat (Angka)	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
2. Memantapkan Kemandirian Ekonomi Kerakyatan yang Berkelanjutan Berbasis Pertanian, Pariwisata didukung Infrastruktur Berkualitas	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan			Laju pertumbuhan ekonomi(%)	
		Meningkatnya PDRB sektor unggulan		Spend of money (Pengeluaran wisatawan) (Rp)	
				Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian (ADHK) (%)	
				Laju pertumbuhan PDRB ADHK sektor pariwisata (penyediaan akomodasi, makanan dan minuman) (%)	
			Meningkatnya Aksesibilitas Pertanian	Jumlah Prasarana yang Dibangun/Dikembangkan (Unit)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
			Meningkatnya Jumlah Destinasi Baru	Destinasi Pariwisata Unggulan (Objek)	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
			Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Petani	Cakupan bina kelompok petani (%)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
			Meningkatnya Kesehatan Hewan/Ternak	Persentase Penanganan kasus Penyakit Hewan/Ternak (%)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
			Meningkatnya Luas Lahan Tertanggulangi Serangan OPT	Persentase Luas Lahan Terkena Serangan OPT yang Ditanggulangi (%)	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
			Meningkatnya objek cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (Angka)	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
			Meningkatnya pelaksanaan Pengawasan Sumberdaya Danau	Peningkatan Produksi Perikanan tangkap (%)	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota (%)	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
			Meningkatnya Penggunaan Sarana Pertanian yang Spesifik Lokasi	Persentase Peningkatan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pertanian (%)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
			Meningkatnya penyelenggaraan Event	Jumlah Event (Event)	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
			Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Peningkatan produksi Perikanan Budidaya (%)	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
			Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Peningkatan Produksi Perikanan tangkap (%)	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
			Meningkatnya SDM Parekraf yang berdaya saing	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang tersertifikasi (%)	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
		Meningkatnya produktivitas Koperasi, UMK dan IKM dalam perekonomian daerah		Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB ADHB (%)	
				Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	
				Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	
			Meningkatnnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota (%)	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
			Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitasi pengembangan produk (%)	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
			Meningkatnya Investor	Persentase Peningkatan Investor (%)	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
			Meningkatnya kapasiatas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan. ((%))	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Jumlah barang beredar yang diawasi (%)	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
			Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
			Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (Persentase)	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
			Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan (%)	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
				Persentase perusahaan yang telah memiliki peraturan perusahaan (PP) (%)	
				Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama oleh mediator hubungan industrial (%)	
			Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan (%)	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
			Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk (%)	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
			Meningkatnya pelayanan ijin usaha simpan pinjam	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (Persentase)	2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
			Meningkatnya Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Usaha yang Memiliki Izin (%)	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
			Meningkatnya pemanfaatan Informasi industri	Persentase data perusahaan industri pengolahan yang masuk dalam SII NAS terhadap total populasi perusahaan industri pengolahan (%)	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
				Persentase data perusahaan industri pengolahan yang masuk dalam SII NAS terhadap total populasi perusahaan industri pengolahan (%)	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
			Meningkatnya penatausahaan administrasi perkantoran, perencanaan dan keuangan	Persentase terlaksananya pengadministrasian umum di OPD (%)	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Meningkatnya Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan yang Dimanfaatkan (%)	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
			Meningkatnya pengelolaan informasi tenaga kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%)	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA

Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
			Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Menyampaikan LKPM (%)	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
			Meningkatnya produktifitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
			Meningkatnya produktifitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (%)	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
			Meningkatnya Promosi Penanaman Modal	Persentase Promosi Penanaman Modal yang Dilaksanakan (%)	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Jumlah dokumen perdan RPIK (Dokumen)	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
				Kontribusi PDRB Industri Pengolahan ((%))	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
			Meningkatnya Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
			Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Jumlah barang beredar yang diawasi (%)	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
	Meningkatnya infrastruktur berkualitas			Indeks kelayakan infrastruktur(Indeks)	
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur		Indeks kepuasan layanan infrastruktur (Angka)	

Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
			Meningkatnya Kepatuhan Tata Ruang	Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (Kasus)	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
			Meningkatnya Cakupan Layanan Air Bersih	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (%)	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
			Meningkatnya Cakupan Layanan Sanitasi	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman ((%))	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
			Meningkatnya drainase dalam kondisi baik	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
			Meningkatnya fasilitas kelengkapan keselamatan jalan	Persentase Jalan yag memiliki fasilitas kelengkapan keselamatan jalan (%)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
			Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota (%)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
			Meningkatnya kualitas dermaga	Persentase Jumlah Dermaga dalam Kondisi Baik (%)	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
			Meningkatnya kualitas SDM pelaku usaha konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi analis/tekhnisi operator terlatih dan tersertifikasi (Orang)	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
			Meningkatnya Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak (Persentase)	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
			Meningkatnya Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
			Meningkatnya Pengembangan Perumahan	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (%)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
			Meningkatnya Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Persentase kab/kota yang menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung (%)	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
			Meningkatnya Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase pengadaan tanah untuk pembangunan dan kepentingan umum (%)	2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi.	Rasio luas daerah irigasi kewenangankabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (%)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
			Meningkatnya Sistem Drainase Perkotaan Dalam Kondisi Baik	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
		Meningkatnya kualitas ekologi		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)	
				Indeks Ketahanan Daerah (Angka)	
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Indeks Kapasitas Daerah (Indeks)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
			Meningkatnya kualitas perencanaan lingkungan hidup	Persentase Dokumen Perencanaan yang sesuai dengan peraturan (%)	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
			Meningkatnya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang mengikuti diklat (Orang)	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
			Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah lokasi yang dikelola oleh pemerintah daerah (Angka)	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
			Meningkatnya pengelolaan persampahan	Cakupan pelanggan pelayanan persampahan (Rumah Tangga)	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
			Meningkatnya usaha/kegiatan yang memenuhi ketentuan peraturan lingkungan	Jumlah rekomendasi persetujuan lingkungan (Usaha/Kegiatan)	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks kualitas tutupan lahan (Angka)	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Responsif, Berintegritas dan Adaptif	Meningkatnya kualitas kinerja birokrasi pemerintahan		Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
				Indeks Kepuasan Masyarakat(Angka)	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif		Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	
				Indeks daya saing daerah (IDSD) (Angka)	
				Nilai AKIP Daerah (Angka)	
				Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)	
			Meningkatkan Kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD	Persentase Capaian Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Daerah (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
				Persentase kepatuhan Wajib Pajak terhadap Jumlah Wajib Pajak (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
			Meningkatnnya pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
			Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
			Meningkatnya akurasi database kependudukan	Tersedianya Data Agregat Kependudukan per Semester (%)	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
				Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama (OPD)	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
			Meningkatnya cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil	Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan bagi penduduk yang menikah (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
				Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
			Meningkatnya cakupan kepemilikan identitas kependudukan	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
				Perekaman KTP elektronik (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
			Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota (*)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
				Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) (*)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
				Jumlah ranperda yang disepakati antara legislatif dan eksekutif (Perda/Perkada)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
				Terintegrasi Rrogram-Program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD (*)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Pemberdayaan masyarakat (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase masyarakat yang aktif dalam pelaksanaan pembangunan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
			Meningkatnya etika dan budaya politik	Meningkatnya Persatuan dan stabiitas Politik di daerah Meningkatnya Persatuan dan stabilitas Politik di daerah Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dengan penguatan infrastruktur demokrasi	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
			Meningkatnya jumlah pendampingan untuk peningkatan kepuasan masyarakat.	Maturitas SPIP (Level)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
			Meningkatnya Jumlah pengunjung perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan/tahun (Orang)	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
			Meningkatnya kebijakan strategis di bidang perekonomian dan pembangunan	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yg berkelanjutan (%)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
				Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah (%)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan Budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
				Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	
			Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
			Meningkatnya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi tentang ketenteraman dan ketertiban umum dengan pihak terkait (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
			Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
			Meningkatnya kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan otonomi daerah (%)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
			Meningkatnya kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
			Meningkatnya kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan otonomi daerah (%)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
			Meningkatnya kualitas pengelolaan kepegawaian	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kualitas pembangunan desa	Persentase Desa/Kelurahan Tertib Administrasi (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kualitas pembangunan desa	Persentase Desa yang Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Kategori Baik dan Benar (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan otonomi daerah (%)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilimpahkan ke Camat (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase tingkat keselarasan dokumen perencanaan OPD koordinasi lintas Bidang perekonomian, infrastruktur dan kewilayahan, pemerintahan dan sosial budaya terhadap RPJMD (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah (%)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
			Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan	Persentase Penyaluran Dana Perimbangan, dana transfer lainnya (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
				Persentase Kesesuaian Pengalokasian Anggaran dengan Kaidah-Kaidah Penganggaran (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
				Persentase Penyerapan belanja ADD, DBH dan BTT (%)	
				Kesesuaian Laporan Keuangan Pemda dengan SAP (%)	
				Persentase Penyerapan Anggaran Belanja (%)	
				Persentase kesesuaian Dokumen Perencanaan dengan Penganggaran (%)	
			Meningkatnya Kualitas PSKS	Persentase PSKS yang aktif (%)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
			Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan di kecamatan	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
			Meningkatnya Masyarakat yang Aktif dalam Pelaksanaan Pembangunan	Persentase masyarakat yang aktif dalam pelaksanaan pembangunan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
			Meningkatnya Masyarakat yang Aktif dalam Pelaksanaan Pembangunan	Persentase masyarakat yang aktif dalam pelaksanaan pembangunan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
			Meningkatnya pelaksanaan Koordinasi tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
			Meningkatnya pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
			Meningkatnya pelaksanaan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah	Rasio Pajak terhadap PAD (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
				Indeks ETPD (Indeks)	
				Kesesuaian implementasi peraturan pajak dan retribusi daerah (Perda/Perkada)	
				Indeks retribusi sewa tanah terhadap PAD (Indeks)	
			Meningkatnya pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase pelaksanaan koordinasi tentang ketenteraman dan ketertiban umum dengan pihak terkait (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
			Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
			Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Perda/Perkada	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/Perkada (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
				Persentase Penurunan Pelanggaran K3 (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
			Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan daerah	Persentase hasil kajian bidang litbang yang ditindaklanjuti (%)	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase masyarakat yang aktif dalam pelaksanaan pembangunan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Jumlah Desa yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat (Angka)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik pada Masyarakat yang Ditangani/ Dimediasi/ Difasilitasi (%)	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
			Meningkatnya Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang mengimplementasikan IT (%)	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
			Meningkatnya pengelolaan arsip yang efektif dan efisien	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
			Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase OPD yang mempublikasikan Daftar Informasi Publik sesuai standar (%)	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
			Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi	Persentase terlaksananya penyelenggaraan persandian dan pengamanan informasi (%)	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
			Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektor	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data (%)	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
			Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
			Meningkatnya Sinergitas dengan kepolisian negara RI, TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Persentase pelaksanaan koordinasi tentang ketenteraman dan ketertiban umum dengan pihak terkait (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
			Meningkatnya tata kelola aset daerah	Indeks Pemanfaatan Pengamanan, Penghapusan, Mutasi dan Inventarisasi barang milik daerah (Indeks)	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
			Meningkatnya tata kelola Taman Makan Pahlawan	Persentase terkelolanya taman makam pahlawan (%)	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
			Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas atas rekomendasi perbaikan pada laporan hasil pemeriksaan	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
			Meningkatnya Upaya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa yang melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
			Menurunnya dampak kerugian Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase jumlah kebakaran dan non kebakaran yang ditangani (%)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

e. Prioritas Kabupaten, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas

Dalam rangka sinkronisasi Pembangunan dari Pusat hingga Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Samosir melakukan sinkronisasi Prioritas Nasional, Program Prioritas hingga Kegiatan Prioritas yang disinkronisasikan meUntunjadi Prioritas Kabupaten, Program Prioritas dan Kegiatan Strategis Daerah seperti disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.29 Prioritas Kabupaten, Program Prioritas, dan Kegiatan Strategis Daerah Kabupaten Samosir

Prioritas Daerah	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
1. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudaya	1.1 Peningkatan kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan, pemberian bantuan pendidikan pada pelajar/ mahasiswa berprestasi dan kurang mampu	1.1.1 Pemberian bantuan pendidikan kepada siswa dan mahasiswa berprestasi/tidak mampu (Kartu Samosir Marsikkola/SAMARA)
		1.1.2 Penguatan kecerdasan emosional dan spritual bagi tenaga pendidik dan anak didik dalam rangka menciptakan Generasi Z dan Alpha yang beradab dan tangguh
		1.1.3 Penguatan pendidikan vokasi berstandar BNSP melalui Balai Latihan Kerja serta Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja
	1.2 Pemantapan kualitas kesehatan masyarakat	1.2.1 Perlindungan jaminan sosial kesehatan mencapai UHC (Berobat Tanpa Batas)
		1.2.2 Gerakan masyarakat hidup sehat di 134 desa/kelurahan
		1.2.3 Penanganan stunting dengan prevalensi
		1.2.4 Pemberian makanan bergizi (balita, siswa, ibu hamil) serta Program Rantang Samosir Penurunan Angka Stunting (RAMOS PANTAS)
		1.2.5 Penguatan keamanan obat, makanan dan pangan segar

Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas Daerah	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
		1.2.6 Penanggulangan penyakit menular (HIV/AIDS, TBC, Malaria)
		1.2.7 Diversifikasi konsumsi pangan
	1.3 Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Masyarakat Miskin untuk melakukan pengembangan diri dalam meningkatkan kualitas hidup	1.3.1 Peningkatan pengarusutamaan gender
		1.3.2 Pemberian bantuan sosial bagi masyarakat miskin ekstrem dan korban bencana
		1.3.3 Pembangunan desa mandiri
		1.3.4 Peningkatan kapasitas masyarakat tanggap bencana di daerah rawan bencana
		1.3.5 Kabupaten Samosir menuju kabupaten layak anak 2026
	1.4 Peningkatan kualitas petani dan penyuluh kepariwisataan	1.4.1 Mencetak petani milenial
		1.4.2 Jaminan sosial ketenagakerjaan pekerja rentan (Layanan Jaminan Untuk Tenaga Kerja Rentan / LANJUTKAN)
		1.4.3 Penyuluhan kepariwisataan pada desa wisata di 9 Kecamatan
2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan optimalisasi sumber daya alam	2.1 Pembangunan pariwisata samosir dengan melibatkan pelaku ekonomi kreatif berazas 6A (<i>Attraction, Amenities, Ancillary, Activity, Accessibilities</i> dan <i>Available Package</i>)	2.1.1 Penguatan kelembagaan dan kapasitas pelaku UMKM, koperasi (Koperasi Desa Merah Putih), subsidi bunga 0 % dan ekonomi kreatif (Samosir Naik Kelas)
		2.1.2 Dukungan pelaksanaan event nasional dan internasional
		2.1.3 Pelaksanaan event wisata (atraksi seni budaya, atraksi alam, atraksi olahraga, dll) dari 134 desa/kelurahan
	2.2 Peningkatan produktivitas pertanian melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian, pupuk organik dan bibit yang merata untuk mendukung	2.2.1 Pengembangan pertanian selaras alam dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian (Penyediaan Pupuk Organik, Bibit/Benih Komoditi Unggulan)
		2.2.2 Hilirisasi produk lokal (nilai tambah, pemasaran) serta meningkatkan produk unggulan masuk ke pasar modern

Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas Daerah	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
	peningkatan ketahanan pangan	
3. Peningkatan layanan infrastruktur yang berkelanjutan	3.1 Peningkatan sarana dan prasarana guna pemerataan infrastuktur dan pemenuhan kebutuhan akses layanan dasar	3.1.1 Kemantapan jalan kabupaten dan jalan desa meningkat
		3.1.2 Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni / SAMOSIR PAPAGA (Pature Padeggan Bagas)
		3.1.3 Peningkatan pengairan sawah (luas sawah yang terairi serta Pembangunan Panel Surya Irigasi
		3.1.4 Peningkatan akses rumah tangga terhadap air bersih.
		3.1.5 Peningkatan kualitas dermaga dan pemenuhan fasilitas kelengkapan keselamatan jalan/dermaga.
	3.2 Pengendalian lingkungan dan Pengelolaan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan	3.2.1 Pengelolaan dan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan (Konservasi Daya Dukung dan Daya Tampung)
		3.2.2 Penanaman pohon (konservasi) pada lahan kritis dan <i>catchment area</i>
		3.2.3 Penanganan timbulan sampah (rumah tangga yang dilayani)
		3.2.4 Peningkatan ketahanan daerah
	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang inovatif	4.1 Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan peningkatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)
4.1.2 Peningkatan kualitas pelayanan publik		
4.1.3 Peningkatan kualitas AKIP		
4.1.4 Peningkatan kualitas SPIP		
4.1.5 Penguatan tata kelola SPBE		
4.1.6 Tata kelola aset daerah		
4.1.7 Peningkatan kompetensi SDM aparatur pemerintah dan Inovatif berbasis TIK		
4.1.8 Optimalisasi kontribusi PAD terhadap APBD dengan produktifitas pengelolaan aset daerah		

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan, Kabupaten Samosir secara konsisten melakukan sinkronisasi antara prioritas pembangunan nasional, prioritas Provinsi Sumatera Utara, dan prioritas pembangunan daerah. Sinkronisasi ini menjadi landasan penting agar arah pembangunan di tingkat daerah tidak berjalan secara parsial, melainkan selaras dengan kebijakan dan sasaran pembangunan yang lebih luas.

Melalui sinergi dan harmonisasi perencanaan ini, Pemerintah Kabupaten Samosir berupaya memastikan bahwa program dan kegiatan pembangunan daerah dapat berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan nasional dan provinsi, sekaligus menjawab kebutuhan riil masyarakat lokal. Sinkronisasi ini juga memperkuat peluang akses pembiayaan dan dukungan program dari pemerintah pusat dan provinsi, terutama dalam proyek strategis seperti pengembangan infrastruktur pariwisata, peningkatan akses jalan ke destinasi wisata, serta pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal.

Lebih lanjut, sinkronisasi Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi dan Prioritas Kabupaten diperlihatkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.30 Sinkronisasi Prioritas Nasional dan Prioritas Kabupaten

Prioritas Nasional	Prioritas Kabupaten
Mencapai swasembada pangan, energi, dan air	Peningkatan produktivitas pertanian melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian, pupuk organik dan bibit yang merata untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan
Penyempurnaan sistem penerimaan negara	-
Reformasi politik, hukum, dan birokrasi	Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Pencegahan dan pemberantasan narkoba	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Masyarakat Miskin untuk melakukan pengembangan diri dalam meningkatkan kualitas hidup

Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas Nasional	Prioritas Kabupaten
Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat	Pemantapan kualitas kesehatan masyarakat
Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi	Peningkatan kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan, pemberian bantuan pendidikan pada pelajar/ mahasiswa berprestasi dan kurang mampu
Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif	-
Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Masyarakat Miskin untuk melakukan pengembangan diri dalam meningkatkan kualitas hidup
Menjamin pelestarian lingkungan hidup	Pengendalian lingkungan dan Pengelolaan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan
Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani	Peningkatan produktivitas pertanian melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian, pupuk organik dan bibit yang merata untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan
Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau, bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan	Peningkatan sarana dan prasarana guna pemerataan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan akses layanan dasar
Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif, karakteristik- mandiri lainnya	Pembangunan pariwisata samosir dengan melibatkan pelaku ekonomi kreatif berazas 6A (<i>Attraction, Amenities, Ancillary, Activity, Accessibilities dan Available Package</i>)
Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA), termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi	Pembangunan pariwisata samosir dengan melibatkan pelaku ekonomi kreatif berazas 6A (<i>Attraction, Amenities, Ancillary, Activity, Accessibilities dan Available Package</i>)
Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah	-
Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga	Pembangunan pariwisata samosir dengan melibatkan pelaku ekonomi kreatif berazas 6A (<i>Attraction, Amenities, Ancillary, Activity, Accessibilities dan Available Package</i>)

Tabel 3.31 Sinkronisasi Prioritas Provinsi dan Prioritas Kabupaten

Prioritas Provinsi	Prioritas Kabupaten
Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal.	Peningkatan kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan, pemberian bantuan pendidikan pada pelajar/ mahasiswa berprestasi dan kurang mampu
Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas Dalam Berkarya dan Berprestasi	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Masyarakat Miskin untuk melakukan pengembangan diri dalam meningkatkan kualitas hidup
Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu.	Pemantapan kualitas kesehatan masyarakat
Penguatan Stabilitas Makro Ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah.	Pembangunan pariwisata samosir dengan melibatkan pelaku ekonomi kreatif berazas 6A (<i>Attraction, Amenities, Ancillary, Activity, Accessibilities</i> dan <i>Available Package</i>)
Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru.	Pengendalian lingkungan dan Pengelolaan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan
Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal.	Peningkatan produktivitas pertanian melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian, pupuk organik dan bibit yang merata untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan
Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/Desa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal).	Pembangunan pariwisata samosir dengan melibatkan pelaku ekonomi kreatif berazas 6A (<i>Attraction, Amenities, Ancillary, Activity, Accessibilities</i> dan <i>Available Package</i>)
Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi.	Pembangunan pariwisata samosir dengan melibatkan pelaku ekonomi kreatif berazas 6A (<i>Attraction, Amenities, Ancillary, Activity, Accessibilities</i> dan <i>Available Package</i>)
Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran.	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Masyarakat Miskin untuk melakukan pengembangan diri dalam meningkatkan kualitas hidup
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan.	Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan peningkatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)
Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat.	Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan peningkatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)
Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal.	Peningkatan sarana dan prasarana guna pemerataan infrastuktur dan pemenuhan kebutuhan akses layanan dasar

Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas Provinsi	Prioritas Kabupaten
Pengembangan Sistem Logistik dan Transportasi yang Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Daya Saing.	Peningkatan sarana dan prasarana guna pemerataan infrastuktur dan pemenuhan kebutuhan akses layanan dasar
Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	Pengendalian lingkungan dan Pengelolaan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan
Melanjutkan pembangunan berbasis desa	-
Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Susarana yang Harmonis, Toleran dan Rukun	-
Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	-

BAB IV

Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Samosir Unggul,
Inklusif dan
Berkelanjutan



4.1 Program Perangkat Daerah

Strategi dan arah kebijakan yang digunakan sebagai basis penyusunan kebijakan umum dan program pembangunan daerah. Rangkaian program-program prioritas yang dipilih menjelaskan secara nyata mengenai arah pembangunan daerah 5 tahun berikutnya. Rumusan program prioritas juga memperjelas arah penentuan pagu anggaran indikatif serta penanggung jawab pelaksana. Bab ini akan menjelaskan secara rinci mengenai program-program prioritas yang dipilih hingga tahun 2030, dimana program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab Kepala Daerah periode 2030-2034.

Program Perangkat Daerah RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2030 dijabarkan pada tabel berikut.

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Samosir

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					252.563.0 76.290,00 0		236.928.84 6.915,000		246.329.258. 499,000		255.498.689. 415,000		263.684.147. 201,000	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A					181.916.4 41.000,00 0		187.499.45 6.000,000		194.954.435. 000,000		202.226.235. 000,000		208.717.697. 000,000	
Terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase layanan penjunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi (%)	100	100	100	181.916.4 41.000,00 0	100	187.499.45 6.000,000	100	194.954.435. 000,000	100	202.226.235. 000,000	100	208.717.697. 000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					70.000.00 0.000,000		48.778.255. 389,000		50.717.678.8 24,000		52.609.448.2 44,000		54.298.211.5 32,000	

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kemampuan Literasi dan Numerasi	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	59,26	62,16	65,06	70.000.00 0.000,000	67,96	48.778.255. 389,000	70,86	50.717.678.8 24,000	73,76	52.609.448.2 44,000	76,66	54.298.211.5 32,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	65,87	67,37	68,87		70,37		71,87		73,37		74,87		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	64.60-	67.10-	69.60-		72.10-		74.60-		77.10-		79.60-		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	73,68	74,78	75,88		76,98		78,08		79,18		80,28		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGA N KURIKULUM					390.125.1 00,000		392.891.03 9,000		396.584.387, 000		400.186.984, 000		403.402.986, 000	
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangk an Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	100	100	100	390.125.1 00,000	100	392.891.03 9,000	100	396.584.387, 000	100	400.186.984, 000	100	403.402.986, 000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					256.510.1 90,000		258.244.48 7,000		260.560.288, 000		262.819.187, 000		264.835.683, 000	
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	50	55	60	256.510.1 90,000	65	258.244.48 7,000	67	260.560.288, 000	69	262.819.187, 000	70	264.835.683, 000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					172.302.3 54.219,00 0		177.121.60 0.202,000		180.998.855. 043,000		186.873.544. 459,000		190.001.172. 094,000	

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A					66.254.33 5.271,000		68.291.567. 659,000		69.652.263.6 14,000		71.851.171.1 50,000		72.870.945.4 91,000	
Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksanaanya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah (%)	100	100	100	42.432.53 7.271,000	100	43.739.791. 839,000	100	44.124.654.9 52,000	100	45.371.286.0 75,000	100	45.541.056.3 76,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksanaanya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah (%)	100	100	100	11.000.00 0,000	100	11.015.290, 000	100	11.353.349,0 00	100	11.804.758,0 00	100	12.183.691,0 00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksanaanya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah (%)	100	100	100	10.000.000,000	100	10.013.900,000	100	10.321.227,000	100	10.731.599,000	100	11.076.083,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksanaanya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah (%)	100	100	100	10.000.000,000	100	10.013.900,000	100	10.321.227,000	100	10.731.599,000	100	11.076.083,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksanaanya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah (%)	100	100	100	7.000.000,000	100	7.009.730,000	100	7.224.859,000	100	7.512.119,000	100	7.753.258,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	72,2	73,6	75,0	23.783.798.000,000	76,4	24.513.723.000,000	77,8	25.488.388.000,000	79,2	26.439.105.000,000	80,6	27.287.800.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					104.545.810.748,000		107.298.479.073,000		109.804.903.614,000		113.450.683.666,000		115.553.058.776,000	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Jumlah kematian balita (Orang)	27	26	25	51.059.935.251,000	23	52.618.906.542,000	22	53.090.078.276,000	20	54.581.591.756,000	20	54.794.269.789,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Jumlah kematian ibu (Orang)	1	2	2		2		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan	Nilai SPM (Nilai)	-	80	82	38.203.117.000,000	84	39.375.571.000,000	86	40.941.144.000,000	88	42.468.249.000,000	88	43.831.479.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase pelaksanaan program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (%)	100	100	100	1.115.265.000,000	100	1.116.815.218,000	100	1.151.090.277,000	100	1.196.857.627,000	100	1.235.276.757,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase pelaksanaan program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (%)	100	100	100	838.907.000,000	100	840.073.081,000	100	865.854.924,000	100	900.281.315,000	100	929.180.346,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase pelaksanaan program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (%)	100	100	100	1.157.699.000,000	100	1.159.308.202,000	100	1.194.887.370,000	100	1.242.396.092,000	100	1.282.277.007,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase pelaksanaan program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (%)	100	100	100	2.536.850.000,000	100	2.540.376.222,000	100	2.618.340.368,000	100	2.722.445.581,000	100	2.809.836.084,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase pelaksanaan program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (%)	100	100	100	950.934.000,000	100	952.255.798,000	100	981.480.529,000	100	1.020.504.195,000	100	1.053.262.379,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase pelaksanaan program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (%)	100	100	100	1.645.059.000,000	100	1.647.345.632,000	100	1.697.902.669,000	100	1.765.411.280,000	100	1.822.080.982,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase pelaksanaan program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (%)	100	100	100	1.064.349.698,000	100	1.065.829.144,000	100	1.098.539.441,000	100	1.142.217.369,000	100	1.178.882.546,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase pelaksanaan program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (%)	100	100	100	1.348.548.000,000	100	1.350.422.482,000	100	1.391.866.948,000	100	1.447.207.578,000	100	1.493.662.941,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase pelaksanaan program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (%)	100	100	100	1.243.741.000,000	100	1.245.469.800,000	100	1.283.693.268,000	100	1.334.732.912,000	100	1.377.577.839,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase pelaksanaan program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (%)	100	100	100	1.193.790.999,000	100	1.195.450.368,000	100	1.232.138.740,000	100	1.281.128.577,000	100	1.322.252.804,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase pelaksanaan program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (%)	100	100	100	1.388.632.000,000	100	1.390.562.198,000	100	1.433.238.552,000	100	1.490.224.117,000	100	1.538.060.331,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase pelaksanaan program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (%)	100	100	100	798.982.800,000	100	800.093.386,000	100	824.648.252,000	100	857.436.267,000	100	884.959.971,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					1.240.000.000,000		1.262.710.600,000		1.269.422.400,000		1.291.159.705,000		1.294.120.859,000	
Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	0	5	5	500.000.000,000	5	500.000.000,000	10	500.000.000,000	10	500.000.000,000	10	500.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Rasio)	2:2	3:3	3:3	740.000.000,000	4:4	762.710.600,000	4:4	769.422.400,000	5:5	791.159.705,000	5:5	794.120.859,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					106.000.000,000		109.253.140,000		110.214.560,000		113.328.282,000		113.752.447,000	
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman (Persentase)	0	80	82	106.000.000,000	84	109.253.140,000	86	110.214.560,000	88	113.328.282,000	88	113.752.447,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					156.208.200,000		159.589.730,000		162.050.855,000		167.201.656,000		169.294.521,000	

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	62,6	65,00	66,10	108.000.000,000	67,90	111.314.520,000	69,70	112.294.080,000	86,00	115.466.551,000	86,00	115.898.719,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan	Persentase pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (%)	100	100	100	3.766.000,000	100	3.771.235,000	100	3.886.974,000	100	4.041.520,000	100	4.171.253,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan	Persentase pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (%)	100	100	100	9.200.000,000	100	9.212.788,000	100	9.495.528,000	100	9.873.071,000	100	10.189.996,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan	Persentase pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (%)	100	100	100	3.613.000,000	100	3.618.022,000	100	3.729.059,000	100	3.877.327,000	100	4.001.789,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan	Persentase pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (%)	100	100	100	0,000	100	0,000	100	0,000	100	0,000	100	0,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan	Persentase pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (%)	100	100	100	600.000,000	100	600.834,000	100	619.274,000	100	643.896,000	100	664.565,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan	Persentase pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (%)	100	100	100	4.479.000,000	100	4.485.226,000	100	4.622.877,000	100	4.806.683,000	100	4.960.978,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan	Persentase pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (%)	100	100	100	7.160.000,000	100	7.169.952,000	100	7.389.998,000	100	7.683.825,000	100	7.930.475,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan	Persentase pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (%)	100	100	100	2.460.000,000	100	2.463.419,000	100	2.539.022,000	100	2.639.973,000	100	2.724.716,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan	Persentase pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (%)	100	100	100	3.474.000,000	100	3.478.829,000	100	3.585.594,000	100	3.728.157,000	100	3.847.831,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan	Persentase pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (%)	100	100	100	5.520.000,000	100	5.527.673,000	100	5.697.317,000	100	5.923.842,000	100	6.113.998,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan	Persentase pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (%)	100	100	100	2.402.000,000	100	2.405.339,000	100	2.479.159,000	100	2.577.730,000	100	2.660.475,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan	Persentase pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (%)	100	100	100	5.534.200,000	100	5.541.893,000	100	5.711.973,000	100	5.939.081,000	100	6.129.726,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					107.928.9 16.030,00 0		221.890.18 9.843,000		126.094.303. 168,000		137.361.555. 961,000		153.858.156. 503,000	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A					11.599.50 0.000,000		12.276.500. 000,000		12.631.540.0 00,000		12.789.640.8 00,000		13.226.823.6 16,000	
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi (%)	100	100	100	7.000.000. 000,000	100	7.000.000.0 00,000	100	7.000.000.00 0,000	100	7.000.000.00 0,000	100	7.000.000.00 0,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penatausahaan administrasi perkantoran, perencanaan dan keuangan yang dilaksanakan (%)	100	100	100	4.599.500.000,000	100	5.276.500.000,000	100	5.631.540.000,000	100	5.789.640.800,000	100	6.226.823.616,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					6.805.894.780,000		6.892.007.690,000		7.006.993.916,000		7.119.154.789,000		7.219.279.658,000	
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi.	Rasio luas daerah irigasi kewenanganka bupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (%)	64	64	66	6.805.894.780,000	68	6.892.007.690,000	70	7.006.993.916,000	72	7.119.154.789,000	74	7.219.279.658,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGA					3.133.070.000,000		2.720.460.000,000		3.192.570.000,000		3.587.750.000,000		4.500.200.000,000	

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
N SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM														
Meningkatnya Cakupan Layanan Air Bersih	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (%)	55,84	56	57	3.133.070. 000,000	58	2.720.460.0 00,000	59	3.192.570.00 0,000	60	3.587.750.00 0,000	61	4.500.200.00 0,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGA N SISTEM AIR LIMBAH					1.030.000. 000,000		1.000.000.0 00,000		1.691.030.50 0,000		1.000.000.00 0,000		1.000.000.00 0,000	

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Cakupan Layanan Sanitasi	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman ((%))	55,84	55,84	58	1.030.000.000,000	60	1.000.000.000,000	62	1.691.030.500,000	64	1.000.000.000,000	65	1.000.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					900.278.000,000		936.424.531,000		944.631.971,000		952.637.743,000		959.784.415,000	
Meningkatnya drainase dalam kondisi baik	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	54	54	56	200.278.000,000	58	206.424.531,000	60	214.631.971,000	63	222.637.743,000	64	229.784.415,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Meningkatnya Sistem Drainase Perkotaan Dalam Kondisi Baik	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	0	1	1	700.000.000,000	1	730.000.000,000	1	730.000.000,000	1	730.000.000,000	1	730.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					2.200.000. 000,000		2.250.000.0 00,000		2.200.000.00 0,000		2.200.000.00 0,000		2.200.000.00 0,000	
Meningkatnya Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Persentase kab/kota yangmenerbitk an PersetujuanBan gunan Gedung (%) (%)	100	100	100	2.200.000. 000,000	100	2.250.000.0 00,000	100	2.200.000.00 0,000	100	2.200.000.00 0,000	100	2.200.000.00 0,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNY A					1.050.000. 000,000		101.050.00 0.000,000		1.050.000.00 0,000		1.050.000.00 0,000		1.050.000.00 0,000	
Meningkatnya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	1	1	1	1.050.000. 000,000	1	101.050.00 0.000,000	1	1.050.000.00 0,000	1	1.050.000.00 0,000	1	1.050.000.00 0,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN					80.532.87 6.000,000		93.284.784. 591,000		96.235.885.5 60,000		107.166.146. 386,000		123.045.265. 149,000	
Meningkatnya jaringan jalan dalam kondisi baik	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota (%)	54	54	56	80.532.87 6.000,000	58	93.284.784. 591,000	60	96.235.885.5 60,000	63	107.166.146. 386,000	64	123.045.265. 149,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGA N JASA KONSTRUKSI					200.278.0 00,000		206.424.53 1,000		214.631.971, 000		222.637.743, 000		229.784.415, 000	
Meningkatnya kualitas SDM pelaku usaha konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi analisis/teknisi operator terlatih dan tersertifikasi (Orang)	48	48	50	200.278.0 00,000	55	206.424.53 1,000	60	214.631.971, 000	65	222.637.743, 000	70	229.784.415, 000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENATAAN RUANG					477.019.2 50,000		1.273.588.5 00,000		927.019.250, 000		1.273.588.50 0,000		427.019.250, 000	
Meningkatnya Kepatuhan Tata Ruang	Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (Kasus)	100	100	100	477.019.2 50,000	100	1.273.588.5 00,000	100	927.019.250, 000	100	1.273.588.50 0,000	100	427.019.250, 000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					9.074.495. 251,000		8.143.722.7 60,000		13.995.293.3 42,610		20.599.163.5 09,000		29.766.859.1 58,000	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A					4.699.495. 251,000		4.843.722.7 60,000		5.036.309.17 7,000		5.224.163.50 9,000		5.391.859.15 8,000	

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	100	100	100	4.699.495.251,000	100	4.843.722.760,000	100	5.036.309.177,000	100	5.224.163.509,000	100	5.391.859.158,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					2.125.000.000,000		1.050.000.000,000		6.708.984.165,610		13.125.000.000,000		22.125.000.000,000	
Meningkatnya Pengembangan Perumahan	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (%)	0	100	100	2.125.000.000,000	100	1.050.000.000,000	100	6.708.984.165,610	100	13.125.000.000,000	100	22.125.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					2.250.000.000,000		2.250.000.000,000		2.250.000.000,000		2.250.000.000,000		2.250.000.000,000	
Meningkatnya Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak (Persentase)	82	83	84	2.250.000.000,000	85	2.250.000.000,000	86	2.250.000.000,000	87	2.250.000.000,000	88	2.250.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Kawasan Permukiman
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					14.401.38 0.394,000		14.843.358. 758,000		15.433.530.7 02,000		16.009.201.3 96,000		16.523.096.7 61,000	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A					8.860.907. 836,000		9.132.849.0 97,000		9.495.971.17 8,000		9.850.170.90 2,000		10.166.361.3 88,000	
Meningkatnya layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase layanan penjunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi (%)	100	100	100	2.651.471. 796,000	100	2.732.845.4 65,000	100	2.841.503.40 1,000	100	2.947.491.47 7,000	100	3.042.105.95 4,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penatausahaan administrasi perkantoran, perencanaan dan keuangan yang dilaksanakan (%)	100	100	100	6.209.436.040,000	100	6.400.003.632,000	100	6.654.467.777,000	100	6.902.679.425,000	100	7.124.255.434,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					800.073.968,000		824.628.238,000		857.415.456,000		889.397.053,000		917.946.698,000	
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Perda/Perkada	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/Perkada (%)	85	90	90	800.073.968,000	90	824.628.238,000	90	857.415.456,000	90	889.397.053,000	90	917.946.698,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Penurunan Pelanggaran K3 (%)	85	90	95		95		95		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULAN GAN BENCANA					1.908.381. 751,000		1.966.949.9 87,000		2.045.155.91 9,000		2.121.440.23 4,000		2.189.538.46 6,000	
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Indeks Kapasitas Daerah (Indeks)	0,30	0,31	0,33	1.908.381. 751,000	0,35	1.966.949.9 87,000	0,37	2.045.155.91 9,000	0,39	2.121.440.23 4,000	0,41	2.189.538.46 6,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULAN GAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					2.832.016. 839,000		2.918.931.4 36,000		3.034.988.14 9,000		3.148.193.20 7,000		3.249.250.20 9,000	
Menurunnya dampak kerugian Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase jumlah kebakaran dan non kebakaran yang ditangani (%)	100	100	100	2.832.016. 839,000	100	2.918.931.4 36,000	100	3.034.988.14 9,000	100	3.148.193.20 7,000	100	3.249.250.20 9,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					7.380.316. 162,210		7.591.685.4 25,410		7.872.249.47 8,420		8.046.042.58 3,030		8.290.991.44 9,420	

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A					5.694.255. 616,210		5.869.012.3 21,070		6.102.364.25 0,950		6.329.982.43 7,510		6.533.174.87 3,760	
Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penatausahaan administrasi perkantoran, perencanaan dan keuangan yang dilaksanakan (%)	100	100	100	5.694.255. 616,210	100	5.869.012.3 21,070	100	6.102.364.25 0,950	100	6.329.982.43 7,510	100	6.533.174.87 3,760	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					206.000.0 00,000		211.000.00 0,000		216.000.000, 000		221.000.000, 000		226.000.000, 000	
Meningkatnya Kualitas PSKS	Persentase PSKS yang aktif (%)	100	100	100	206.000.0 00,000	100	211.000.00 0,000	100	216.000.000, 000	100	221.000.000, 000	100	226.000.000, 000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					934.650.4 96,000		957.196.92 0,000		987.303.070, 000		916.669.474, 000		942.884.564, 000	
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar PPKS	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan (%)	100	100	100	934.650.4 96,000	100	957.196.92 0,000	100	987.303.070, 000	100	916.669.474, 000	100	942.884.564, 000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					87.120.93 0,000		89.794.671, 340		93.364.907,4 70		96.847.418,5 20		99.956.220,6 60	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan DTKS dan PPKS	Persentase DTKS dan PMKS yang dimanfaatkan (%)	100	100	100	87.120.93 0,000	100	89.794.671, 340	100	93.364.907,4 70	100	96.847.418,5 20	100	99.956.220,6 60	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					408.289.1 20,000		414.681.51 3,000		423.217.250, 000		431.543.253, 000		438.975.791, 000	
Meningkatnya Kualitas Penanganan Bencana	Persentase Penanganan Korban Bencana yang ditangani (%)	100	100	100	408.289.1 20,000	100	414.681.51 3,000	100	423.217.250, 000	100	431.543.253, 000	100	438.975.791, 000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					50.000.00 0,000		50.000.000, 000		50.000.000,0 00		50.000.000,0 00		50.000.000,0 00	
Meningkatnya tata kelola Taman Makan Pahlawan	Persentase terkelolanya taman makam pahlawan (%)	100	100	100	50.000.00 0,000	100	50.000.000, 000	100	50.000.000,0 00	100	50.000.000,0 00	100	50.000.000,0 00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					2.425.669. 278,000		2.254.267.2 78,000		2.392.388.62 2,000		2.529.578.07 4,000		2.663.402.46 7,000	
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					300.000.0 00,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Meningkatnya pengelolaan informasi tenaga kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%)	0	0	100	300.000.0 00,000	100	0,000	100	0,000	100	0,000	100	0,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN					1.095.080. 946,000		1.104.136.9 80,000		1.116.229.46 6,000		1.128.024.82 5,000		1.138.554.42 2,000	

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA														
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (%)	0	0	100	1.095.080. 946,000	100	1.104.136.9 80,000	100	1.116.229.46 6,000	100	1.128.024.82 5,000	100	1.138.554.42 2,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					595.080.9 46,000		604.136.98 0,000		616.229.466, 000		628.024.825, 000		638.554.422, 000	
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kot a (%)	0	11,95	13	595.080.9 46,000	14	604.136.98 0,000	15	616.229.466, 000	16	628.024.825, 000	17	638.554.422, 000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					435.507.3 86,000		545.993.31 8,000		659.929.690, 000		773.528.424, 000		886.293.623, 000	

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenaga kerjaan (%)	0	0	5	435.507.3 86,000	10	545.993.31 8,000	15	659.929.690, 000	20	773.528.424, 000	25	886.293.623, 000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					4.238.190. 637,040		4.357.519.2 07,690		4.506.999.67 4,130		4.672.281.98 1,170		4.811.027.23 2,780	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A					3.713.879. 277,040		3.826.323.7 32,050		3.967.180.60 7,250		4.122.927.70 8,200		4.253.668.68 7,630	

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Penatausahaan Administrasi Perkantoran, Perencanaan dan Keuangan	Persentase penatausahaan administrasi perkantoran, perencanaan dan keuangan yang dilaksanakan (%)	100	100	100	3.663.879.277,040	100	3.776.323.732,050	100	3.917.180.607,250	100	4.072.927.708,200	100	4.203.668.687,630	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Meningkatnya Penatausahaan Administrasi Perkantoran, Perencanaan dan Keuangan	Persentase terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah (%)	0	0	100	50.000.000,000	100	50.000.000,000	100	50.000.000,000	100	50.000.000,000	100	50.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					28.038.920,000		28.899.434,450		29.977.383,360		31.169.284,120		32.169.818,140	
Meningkatnya ARG pada belanja langsung APBD	Persentase ARG Daerah (%)	0	0	5	28.038.920,000	6	28.899.434,450	7	29.977.383,360	8	31.169.284,120	8	32.169.818,140	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					215.125.1 00,000		217.891.03 9,320		221.355.875, 090		225.186.984, 680		228.402.986, 890	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.00 penduduk perempuan) (%)	0.00017: 0	0.0001 3:0	0:0	125.000.0 00,000	0:0	125.000.00 0,000	0:0	125.000.000, 000	0:0	125.000.000, 000	0:0	125.000.000, 000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.00 penduduk perempuan) (%)	0.00017: 0	0.0001 3:0	0:0	90.125.10 0,000	0:0	92.891.039, 320	0:0	96.355.875,0 90	0:0	100.186.984, 680	0:0	103.402.986, 890	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN					50.000.00 0,000		50.000.000, 000		50.000.000,0 00		50.000.000,0 00		50.000.000,0 00	

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KUALITAS KELUARGA														
Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	0	0	100	50.000.00 0,000	100	50.000.000, 000	100	50.000.000,0 00	100	50.000.000,0 00	100	50.000.000,0 00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					56.077.84 0,000		57.798.868, 910		59.954.766,7 20		62.338.568,2 40		64.339.636,2 90	
Meningkatnya Nilai Kabupaten Layak Anak	Nilai dalam Kabupaten/Kot a Layak Anak (KLA) (Nilai)	450	500	550	56.077.84 0,000	600	57.798.868, 910	650	59.954.766,7 20	700	62.338.568,2 40	750	64.339.636,2 90	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					175.069.5 00,000		176.606.13 2,960		178.531.041, 710		180.659.435, 930		182.446.103, 830	
Meningkatnya pelayanan anak korban kekerasan di kabupaten	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instasi terkait kabupaten (%)	100	100	100	50.069.50 0,000	100	51.606.132, 960	100	53.531.041,7 10	100	55.659.435,9 30	100	57.446.103,8 30	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Meningkatnya pelayanan anak korban kekerasan di kabupaten	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instasi terkait kabupaten (%)	100	100	100	125.000.0 00,000	100	125.000.00 0,000	100	125.000.000, 000	100	125.000.000, 000	100	125.000.000, 000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					1.124.162. 646,000		1.127.973.1 97,000		1.133.061.41 1,000		1.138.024.60 1,000		1.142.455.19 1,000	
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN					1.058.591. 629,000		1.060.389.8 06,000		1.062.790.90 5,000		1.065.133.00 5,000		1.067.223.77 5,000	

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT														
Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	92,85	93	93,15	1.058.591.629,000	93,30	1.060.389.806,000	93,45	1.062.790.905,000	93,60	1.065.133.005,000	93,75	1.067.223.775,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					20.000.000,000		20.613.800,000		21.433.404,000		22.232.870,000		22.946.545,000	
Meningkatnya Penanganan kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	51,49	50	48,51	20.000.000,000	47	20.613.800,000	45,5	21.433.404,000	44	22.232.870,000	40	22.946.545,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					45.571.017,000		46.969.591,000		48.837.102,000		50.658.726,000		52.284.871,000	
Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Pangan	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	70	70	75	45.571.017,000	80	46.969.591,000	85	48.837.102,000	90	50.658.726,000	90	52.284.871,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					1.188.936. 793,560		3.150.000.0 00,000		5.150.000.00 0,000		13.150.000.0 00,000		22.150.000.0 00,000	
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					1.188.936. 793,560		3.150.000.0 00,000		5.150.000.00 0,000		13.150.000.0 00,000		22.150.000.0 00,000	
Meningkatnya Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase pengadaan tanah untuk pembangunan dan kepentingan umum (%)	100	100	100	1.188.936. 793,560	100	3.150.000.0 00,000	100	5.150.000.00 0,000	100	13.150.000.0 00,000	100	22.150.000.0 00,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					18.689.82 6.279,090		28.291.387. 668,090		26.676.161.4 80,560		33.267.246.1 34,890		43.487.062.8 88,630	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG					7.771.571. 227,000		8.018.674.3 68,000		8.220.583.10 0,000		8.391.171.85 0,000		8.647.343.74 5,000	

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A														
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi (%)	-	-	100	400.000.0 00,000	100	425.000.00 0,000	100	435.000.000, 000	100	450.000.000, 000	100	500.000.000, 000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi (%)	100	100	100	7.093.890. 374,000	100	7.307.634.2 85,000	100	7.488.383.55 0,000	100	7.633.086.83 3,000	100	7.829.540.54 1,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi (%)	100	100	100	277.680.8 53,000	100	286.040.08 3,000	100	297.199.550, 000	100	308.085.017, 000	100	317.803.204, 000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					300.000.0 00,000		0,000		0,000		236.878.331, 000		0,000	
Meningkatnya kualitas perencanaan lingkungan hidup	Persentase Dokumen Perencanaan yang sesuai dengan peraturan (%)	100	0	100	300.000.0 00,000	0	0,000	0	0,000	100	236.878.331, 000	0	0,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					3.287.844. 581,000		3.340.092.5 31,000		3.386.476.61 0,000		3.436.966.68 7,000		3.518.648.31 8,000	
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	53,64	80,57	80,77	2.387.844. 581,000	80,97	2.415.092.5 31,000	81,17	2.451.476.61 0,000	81,37	2.486.966.68 7,000	81,57	2.518.648.31 8,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
Menurunnya pencemaran dan/atau	Luas area yang dilakukan rehabilitasi di	30	0	6	500.000.0 00,000	6	500.000.00 0,000	7	500.000.000, 000	7	500.000.000, 000	6	500.000.000, 000	Dinas/Badan yang menangani Bidang

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
kerusakan lingkungan hidup	kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)													Lingkungan Hidup
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	53,64	80,57	80,77	400.000.000,000	80,97	425.000.000,000	81,17	435.000.000,000	81,37	450.000.000,000	81,57	500.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					157.886.569,700		162.732.108,530		169.202.337,160		175.513.584,340		181.147.570,400	
Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah lokasi yang dikelola oleh pemerintah daerah (Angka)	9	9	9	25.000.000,000	9	27.000.000,000	9	28.000.000,000	9	30.000.000,000	9	30.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks kualitas tutupan lahan (Angka)	0	0	0	132.886.569,700	1	135.732.108,530	0	141.202.337,160	0	145.513.584,340	0	151.147.570,400	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					43.894.30 3,390		45.241.419, 560		47.040.218,4 00		48.794.818,5 50		50.361.132,2 30	
Meningkatnya usaha/kegiatan yang memenuhi ketentuan peraturan lingkungan	Jumlah rekomendasi persetujuan lingkungan (Usaha/Kegiata n)	15	70	90	43.894.30 3,390	110	45.241.419, 560	130	47.040.218,4 00	150	48.794.818,5 50	155	50.361.132,2 30	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN					30.000.00 0,000		30.000.000, 000		30.000.000,0 00		30.000.000,0 00		30.000.000,0 00	

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
HIDUP UNTUK MASYARAKAT														
Meningkatnya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang mengikuti diklat (Orang)	0	0	2	30.000.000,000	2	30.000.000,000	2	30.000.000,000	2	30.000.000,000	2	30.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					7.098.629.598,000		16.694.647.241,000		14.822.859.215,000		20.947.920.864,000		31.059.562.123,000	
Meningkatnya pengelolaan persampahan	Cakupan pelanggan pelayanan persampahan (Rumah Tangga)	2.500	2.700	3.000	7.098.629.598,000	6.500	16.694.647.241,000	7.500	14.822.859.215,000	8.500	20.947.920.864,000	9.500	31.059.562.123,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					3.231.539.489,900		3.330.715.436,840		3.463.144.682,610		3.592.319.979,280		3.707.633.450,610	

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A					2.835.927. 895,080		2.922.962.5 22,180		3.039.179.51 2,070		3.152.540.90 7,870		3.253.737.47 1,010	
Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	70,15	72	75	2.835.927. 895,080	78	2.922.962.5 22,180	80	3.039.179.51 2,070	85	3.152.540.90 7,870	90	3.253.737.47 1,010	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					249.676.7 97,020		257.339.37 7,920		267.571.191, 580		277.551.597, 030		286.461.003, 290	
Meningkatnya cakupan kepemilikan identitas kependudukan	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	88,10	90	91	249.676.7 97,020	92	257.339.37 7,920	93	267.571.191, 580	94	277.551.597, 030	95	286.461.003, 290	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Perekaman KTP elektronik (%)	99,23	99,4	99,5		99,6		99,7		99,8		99,9		

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIIL					74.202.99 9,000		76.480.289, 040		79.521.145,3 30		82.487.284,0 50		85.135.125,8 70	
Meningkatnya cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun (%)	98,52	98,8	99	74.202.99 9,000	99,2	76.480.289, 040	99,4	79.521.145,3 30	99,6	82.487.284,0 50	99,8	85.135.125,8 70	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan bagi penduduk yang menikah (Persentase)	71,65	75	78		83		86		90		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					71.731.79 8,800		73.933.247, 700		76.872.833,6 30		79.740.190,3 30		82.299.850,4 40	

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya akurasi database kependudukan	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama (OPD)	0	2	3	71.731.79 8,800	4	73.933.247, 700	5	76.872.833,6 30	6	79.740.190,3 30	7	82.299.850,4 40	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Tersedianya Data Agregat Kependudukan per Semester (%)	2	2	2		2		2		2		2		
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					5.570.486. 500,000		6.601.242.9 30,000		3.635.605.94 9,000		3.669.616.05 1,000		3.702.122.72 6,000	
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					1.000.000. 000,000		1.000.000.0 00,000		1.000.000.00 0,000		1.000.000.00 0,000		1.000.000.00 0,000	
Meningkatnya Desa yang memiliki sarana prasarana	Persentase desa yang memiliki sarana prasarana	0	15,62	16,40	1.000.000. 000,000	17,18	1.000.000.0 00,000	17,96	1.000.000.00 0,000	18,75	1.000.000.00 0,000	19,53	1.000.000.00 0,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pemerintah menjadi kewenangan desa	pemerintahan yang menjadi kewenangan desa (%)													Masyarakat Dan Desa
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					220.000.0 00,000		240.000.00 0,000		260.000.000, 000		280.000.000, 000		300.000.000, 000	
Meningkatnya Peningkatan Kerja Sama Desa	Persentase Kawasan Perdesaan yang aktif (%)	100	100	100	220.000.0 00,000	100	240.000.00 0,000	100	260.000.000, 000	100	280.000.000, 000	100	300.000.000, 000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					3.500.000. 000,000		4.500.000.0 00,000		1.500.000.00 0,000		1.500.000.00 0,000		1.500.000.00 0,000	
Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa yang melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (%)	100	100	100	3.500.000. 000,000	100	4.500.000.0 00,000	100	1.500.000.00 0,000	100	1.500.000.00 0,000	100	1.500.000.00 0,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKAT AN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					850.486.5 00,000		861.242.93 0,000		875.605.949, 000		889.616.051, 000		902.122.726, 000	
Meningkatnya Kuantitas Pemberdayaan Kemasyarakatan	Jumlah Desa yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat (Angka)	45	47	50	850.486.5 00,000	53	861.242.93 0,000	56	875.605.949, 000	60	889.616.051, 000	62	902.122.726, 000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					3.817.144. 465,940		3.934.292.6 29,600		4.084.973.67 3,750		4.243.303.96 4,450		4.379.514.02 1,720	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					207.888.5 64,000		214.268.66 4,030		222.787.986, 110		231.097.977, 990		238.516.223, 090	

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pengendalian Pertambahan Jumlah Penduduk	Total Fertility Rate (TFR). (Orang)	2,78	2,77	2,77	207.888.5 64,000	2,77	214.268.66 4,030	2,76	222.787.986, 110	2,76	231.097.977, 990	2,76	238.516.223, 090	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15- 19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	6.9-	6.4-	6-		5.7-		5.3-		5-		5-		
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					2.266.391. 911,940		2.335.947.4 79,720		2.423.078.32 0,710		2.519.419.91 4,740		2.600.293.29 4,010	
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembinaan	Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	14,8	14,5	14,25	2.266.391. 911,940	14	2.335.947.4 79,720	13,5	2.423.078.32 0,710	13,25	2.519.419.91 4,740	12	2.600.293.29 4,010	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kelurga Berencana (KB)														
	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	58	58	61		62		63		64		65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					1.342.863.990,000		1.384.076.485,850		1.439.107.366,930		1.492.786.071,720		1.540.704.504,620	
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	70	70	75	1.342.863.990,000	80	1.384.076.485,850	85	1.439.107.366,930	90	1.492.786.071,720	90	1.540.704.504,620	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					9.389.168.165,920		15.646.595.467,050		10.990.421.814,570		11.589.323.962,220		12.023.841.138,200	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.163.030.102,000		4.290.793.496,000		4.461.395.445,000		4.627.805.496,000		4.776.358.052,000	
Meningkatnya urusan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase layanan penjunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi (%)	100	100	100	4.163.030.102,000	100	4.290.793.496,000	100	4.461.395.445,000	100	4.627.805.496,000	100	4.776.358.052,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					4.638.416.299,920		9.265.424.296,170		5.435.017.566,180		5.600.443.721,400		5.748.117.964,860	

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya fasilitas kelengkapan keselamatan jalan	Persentase Jalan yag memiliki fasilitas kelengkapan keselamatan jalan (%)	12,30	12,30	13,0	4.638.416.299,920	13,0	9.265.424.296,170	14,00	5.435.017.566,180	14,0	5.600.443.721,400	15,0	5.748.117.964,860	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					587.721.764,000		2.090.377.674,880		1.094.008.803,390		1.361.074.744,820		1.499.365.121,340	
Meningkatnya kualitas dermaga	Persentase Jumlah Dermaga dalam Kondisi Baik (%)	54,5	54,5	55,6	587.721.764,000	56,5	2.090.377.674,880	57,4	1.094.008.803,390	58,3	1.361.074.744,820	59,2	1.499.365.121,340	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					6.211.124.506,990		6.411.715.829,580		6.439.350.424,930		6.574.297.183,740		6.692.958.963,040	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					3.065.105.523,990		3.169.145.523,990		3.067.855.523,990		3.077.045.523,000		3.083.445.523,990	

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya Pengelolaan Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase terlaksanaanya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah (%)	70	75	80	3.065.105. 523,990	85	3.169.145.5 23,990	90	3.067.855.52 3,990	95	3.077.045.52 3,000	100	3.083.445.52 3,990	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					949.513.4 51,690		978.654.01 9,520		1.017.565.30 3,340		1.055.520.48 9,150		1.089.402.69 6,850	
Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase OPD yang mempublikasik an Daftar Informasi Publik sesuai standar (%)	65	70	75	949.513.4 51,690	80	978.654.01 9,520	85	1.017.565.30 3,340	90	1.055.520.48 9,150	95	1.089.402.69 6,850	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					2.196.505. 531,310		2.263.916.2 86,070		2.353.929.59 7,600		2.441.731.17 1,590		2.520.110.74 2,200	

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang mengimplemen tasikan IT (%)	85	87	89	2.196.505. 531,310	91	2.263.916.2 86,070	93	2.353.929.59 7,600	96	2.441.731.17 1,590	100	2.520.110.74 2,200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					5.774.304. 779,000		6.496.644.6 02,000		6.856.586.07 0,000		7.112.848.08 6,000		7.554.040.44 6,000	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A					3.004.170. 000,000		3.096.367.9 77,000		3.219.479.56 8,000		3.339.566.15 5,000		3.446.766.22 9,000	
Meningkatnya penatausahaan administrasi perkantoran, perencanaan dan keuangan	Persentase terlaksananya pengadministra sian umum di OPD (%)	100	100	100	3.004.170. 000,000	100	3.096.367.9 77,000	100	3.219.479.56 8,000	100	3.339.566.15 5,000	100	3.446.766.22 9,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					20.000.00 0,000		30.000.000, 000		40.000.000,0 00		50.000.000,0 00		60.000.000,0 00	
Meningkatnya pelayanan ijin usaha simpan pinjam	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (Persentase)	91	93	95	20.000.00 0,000	97	30.000.000, 000	99	40.000.000,0 00	100	50.000.000,0 00	100	60.000.000,0 00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					200.000.0 00,000		300.000.00 0,000		400.000.000, 000		400.000.000, 000		600.000.000, 000	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	100	100	100	200.000.0 00,000	100	300.000.00 0,000	100	400.000.000, 000	100	400.000.000, 000	100	600.000.000, 000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN					435.507.3 86,000		545.993.31 8,000		659.929.690, 000		773.528.424, 000		886.293.623, 000	

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KSP/USP KOPERASI														
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	100	100	100	435.507.3 86,000	100	545.993.31 8,000	100	659.929.690, 000	100	773.528.424, 000	100	886.293.623, 000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					300.000.0 00,000		500.000.00 0,000		500.000.000, 000		500.000.000, 000		500.000.000, 000	
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	0	0	10	300.000.0 00,000	20	500.000.00 0,000	30	500.000.000, 000	40	500.000.000, 000	50	500.000.000, 000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					200.000.0 00,000		500.000.00 0,000		500.000.000, 000		500.000.000, 000		500.000.000, 000	

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya produktifitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	100	100	100	200.000.000,000	100	500.000.000,000	100	500.000.000,000	100	500.000.000,000	100	500.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					1.000.000.000,000		850.000.000,000		850.000.000,000		850.000.000,000		850.000.000,000	
Meningkatnya kapasiatas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan. ((%))	0	8	10	1.000.000.000,000	12	850.000.000,000	14	850.000.000,000	16	850.000.000,000	18	850.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					614.627.393,000		674.283.307,000		687.176.812,000		699.753.507,000		710.980.594,000	
Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase pelaku usaha yang	0	100	100	614.627.393,000	100	674.283.307,000	100	687.176.812,000	100	699.753.507,000	100	710.980.594,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi,

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	memperoleh fasilitasi pengembangan produk (%)													Usaha Kecil, Dan Menengah
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					3.089.311. 323,000		3.182.587.7 89,000		3.307.139.47 9,000		3.428.630.78 1,000		3.537.084.82 9,000	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A					2.656.184. 624,000		2.737.702.9 30,000		2.846.553.99 9,000		2.952.730.46 3,000		3.047.513.11 1,000	
Meningkatnya layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan administrasi perkantoran yang disusun	100	100	100	2.656.184. 624,000	100	2.737.702.9 30,000	100	2.846.553.99 9,000	100	2.952.730.46 3,000	100	3.047.513.11 1,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	sesuai ketentuan (%)													
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGA N IKLIM PENANAMAN MODAL					50.000.00 0,000		50.000.000, 000		50.000.000,0 00		50.000.000,0 00		50.000.000,0 00	
Meningkatnya Investor	Persentase Peningkatan Investor (%)	50	50	50	50.000.00 0,000	50	50.000.000, 000	75	50.000.000,0 00	75	50.000.000,0 00	75	50.000.000,0 00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					99.258.24 5,000		102.304.48 1,000		106.372.107, 000		110.339.786, 000		113.881.693, 000	
Meningkatnya Promosi Penanaman Modal	Persentase Promosi Penanaman Modal yang Dilaksanakan (%)	100	100	100	99.258.24 5,000	100	102.304.48 1,000	100	106.372.107, 000	100	110.339.786, 000	100	113.881.693, 000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					210.217.1 57,000		217.282.52 2,000		226.716.875, 000		235.919.414, 000		244.134.427, 000	
Meningkatnya Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Usaha yang Memiliki Izin (%)	100	100	100	210.217.1 57,000	100	217.282.52 2,000	100	226.716.875, 000	100	235.919.414, 000	100	244.134.427, 000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					53.651.29 7,000		55.297.856, 000		57.496.498,0 00		59.641.118,0 00		61.555.598,0 00	
Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Menyampaikan LKPM (%)	100	100	100	53.651.29 7,000	100	55.297.856, 000	100	57.496.498,0 00	100	59.641.118,0 00	100	61.555.598,0 00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI					20.000.00 0,000		20.000.000, 000		20.000.000,0 00		20.000.000,0 00		20.000.000,0 00	

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENANAMAN MODAL														
Meningkatnya Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan yang Dimanfaatkan (%)	100	100	100	20.000.00 0,000	100	20.000.000, 000	100	20.000.000,0 00	100	20.000.000,0 00	100	20.000.000,0 00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					5.025.827. 796,000		5.180.070.4 51,000		5.386.030.05 2,000		5.586.928.97 3,000		5.766.269.39 3,000	
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGA N KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					3.600.797. 351,000		3.711.305.8 22,000		3.858.867.34 1,000		4.002.803.09 3,000		4.131.293.07 2,000	
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (% Nilai)	0,65	0,65	0,66	3.600.797. 351,000	0,67	3.711.305.8 22,000	0,67	3.858.867.34 1,000	0,68	4.002.803.09 3,000	0,68	4.131.293.07 2,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGA N KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					1.425.030. 445,000		1.468.764.6 29,000		1.527.162.71 1,000		1.584.125.88 0,000		1.634.976.32 1,000	
Meningkatnya Prestasi Olahraga	Peningkatan Prestasi Olahraga (% Indeks)	3	3	3	1.425.030. 445,000	4	1.468.764.6 29,000	4	1.527.162.71 1,000	5	1.584.125.88 0,000	5	1.634.976.32 1,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					60.000.00 0,000		70.000.000, 000		80.000.000,0 00		90.000.000,0 00		100.000.000, 000	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGAR AAN STATISTIK SEKTORAL					60.000.00 0,000		70.000.000, 000		80.000.000,0 00		90.000.000,0 00		100.000.000, 000	
Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh	0	60	65	60.000.00 0,000	70	70.000.000, 000	75	80.000.000,0 00	80	90.000.000,0 00	85	100.000.000, 000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	pengguna data (%)													
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					50.000.00 0,000		55.000.000, 000		60.000.000,0 00		65.000.000,0 00		70.000.000,0 00	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGAR AAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					50.000.00 0,000		55.000.000, 000		60.000.000,0 00		65.000.000,0 00		70.000.000,0 00	
Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi	Persentase terlaksananya penyelenggara an persandian dan pengamanan informasi (%)	0	0	50	50.000.00 0,000	55	55.000.000, 000	60	60.000.000,0 00	65	65.000.000,0 00	70	70.000.000,0 00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					6.389.921. 803,900		12.555.338. 504,060		12.776.218.7 62,970		18.991.671.7 22,840		28.184.004.3 85,140	

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A					4.677.506. 481,140		4.821.059.1 55,050		5.012.744.46 7,050		5.199.719.83 5,680		5.366.630.84 2,400	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Angka)	1.777.13 2	2.000.0 00	2.100.0 00	4.677.506. 481,140	2.200.0 00	4.821.059.1 55,050	2.300.0 00	5.012.744.46 7,050	2.400.0 00	5.199.719.83 5,680	2.500.0 00	5.366.630.84 2,400	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGA N KEBUDAYAAN					1.656.369. 026,540		7.676.512.9 91,960		7.703.411.14 8,520		13.729.648.3 84,360		22.753.070.0 97,500	
Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kot a (%)	6	7	8	1.656.369. 026,540	9	7.676.512.9 91,960	10	7.703.411.14 8,520	11	13.729.648.3 84,360	12	22.753.070.0 97,500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN					56.046.29 6,220		57.766.357, 050		60.063.147,4 00		62.303.502,8 00		64.303.445,2 40	

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA														
Meningkatnya objek cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (Angka)	17	18	19	56.046.29 6,220	20	57.766.357, 050	21	60.063.147,4 00	22	62.303.502,8 00	23	64.303.445,2 40	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					2.245.627. 437,060		2.306.873.2 43,100		2.388.654.52 3,240		2.468.426.33 6,960		2.539.637.82 2,380	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A					1.567.583. 054,030		1.615.692.1 77,960		1.679.932.09 8,950		1.742.593.56 6,240		1.798.530.81 9,720	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi perkantoran	Persentase terlaksananya pengadministra sian umum di OPD (%)	100	100	100	1.567.583. 054,030	100	1.615.692.1 77,960	100	1.679.932.09 8,950	100	1.742.593.56 6,240	100	1.798.530.81 9,720	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					428.044.3 83,030		441.181.06 5,140		458.722.424, 290		475.832.770, 720		491.107.002, 660	
Meningkatnya Jumlah pengunjung perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan/t ahun (Angka)	13.000	13.200	15.000	428.044.3 83,030	16.000	441.181.06 5,140	17.000	458.722.424, 290	18.000	475.832.770, 720	19.000	491.107.002, 660	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					250.000.0 00,000		250.000.00 0,000		250.000.000, 000		250.000.000, 000		250.000.000, 000	
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	0	5	5	250.000.0 00,000	5	250.000.00 0,000	5	250.000.000, 000	5	250.000.000, 000	5	250.000.000, 000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					482.899.5 22,600		486.978.20 8,950		492.424.462, 530		497.736.894, 990		502.479.249, 320	
2.24.02 - PROGRAM					132.899.5 22,600		136.978.20 8,950		142.424.462, 530		147.736.894, 990		152.479.249, 320	

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENGELOLAAN ARSIP														
Meningkatnya pengelolaan arsip yang efektif dan efisien	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	0	20	22	132.899.5 22,600	24	136.978.20 8,950	26	142.424.462, 530	28	147.736.894, 990	30	152.479.249, 320	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					250.000.0 00,000		250.000.00 0,000		250.000.000, 000		250.000.000, 000		250.000.000, 000	
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	0	100	100	250.000.0 00,000	100	250.000.00 0,000	100	250.000.000, 000	100	250.000.000, 000	100	250.000.000, 000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGUNAAN ARSIP					100.000.0 00,000		100.000.00 0,000		100.000.000, 000		100.000.000, 000		100.000.000, 000	
Meningkatnya pelayanan perizinan akses	Persentase Akses Masyarakat	0	0	2	100.000.0 00,000	4	100.000.00 0,000	6	100.000.000, 000	8	100.000.000, 000	10	100.000.000, 000	Dinas/Badan yang menangani

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
terhadap arsip tertutup	terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Persentase)													Bidang Kearsipan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					1.494.364.101,000		1.540.226.135,000		1.601.465.526,000		1.661.200.191,000		1.714.524.716,000	
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					75.000.000,000		77.301.750,000		80.375.267,000		83.373.265,000		86.049.546,000	
Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Peningkatan Produksi Perikanan tangkap (%)	5	5	5	75.000.000,000	5	77.301.750,000	5	80.375.267,000	5	83.373.265,000	5	86.049.546,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					830.947.337,000		856.449.111,000		890.501.528,000		923.717.235,000		953.368.558,000	

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Peningkatan produksi Perikanan Budidaya (%)	1	5	5	830.947.3 37,000	5	856.449.11 1,000	5	890.501.528, 000	5	923.717.235, 000	5	953.368.558, 000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					588.416.7 64,000		606.475.27 4,000		630.588.731, 000		654.109.691, 000		675.106.612, 000	
Meningkatnya pelaksanaan Pengawasan Sumberdaya Danau	Peningkatan Produksi Perikanan tangkap (%)	1	5	5	588.416.7 64,000	5	606.475.27 4,000	5	630.588.731, 000	5	654.109.691, 000	5	675.106.612, 000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					23.703.11 7.858,570		23.752.317. 545,120		23.818.013.6 91,440		24.882.095.6 01,660		38.939.300.8 70,630	
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					21.501.75 0.164,000		21.544.769. 876,000		21.602.213.9 27,000		22.658.246.5 06,000		36.708.266.2 19,000	

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Jumlah Destinasi Baru	Destinasi Pariwisata Unggulan (Objek)	1	1	1	21.501.75 0.164,000	1	21.544.769. 876,000	1	21.602.213.9 27,000	1	22.658.246.5 06,000	1	36.708.266.2 19,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					2.000.000. 000,000		2.000.000.0 00,000		2.000.000.00 0,000		2.000.000.00 0,000		2.000.000.00 0,000	
Meningkatnya penyelenggaraan Event	Jumlah Event (Event)	25	30	30	2.000.000. 000,000	30	2.000.000.0 00,000	31	2.000.000.00 0,000	31	2.000.000.00 0,000	31	2.000.000.00 0,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGA N SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					201.367.6 94,570		207.547.66 9,120		215.799.764, 440		223.849.095, 660		231.034.651, 630	
Meningkatnya SDM Parekraf yang berdaya saing	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang tersertifikasi (%)	320	360	400	201.367.6 94,570	440	207.547.66 9,120	480	215.799.764, 440	520	223.849.095, 660	560	231.034.651, 630	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN					22.280.90 3.069,000		31.857.288. 982,000		33.626.934.7 93,000		42.377.669.4 61,000		55.047.842.6 49,000	

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
BIDANG PERTANIAN														
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A					11.831.19 5.385,000		12.194.294. 771,000		12.679.139.9 31,000		13.152.071.8 51,000		13.574.253.3 57,000	
Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	69,25	69,75	70,25	11.831.19 5.385,000	70,75	12.194.294. 771,000	71,25	12.679.139.9 31,000	71,75	13.152.071.8 51,000	72,25	13.574.253.3 57,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGA N SARANA PERTANIAN					6.031.757. 399,000		7.170.837.0 33,000		8.356.549.51 4,000		9.537.698.81 1,000		10.699.408.9 42,000	
Meningkatnya Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Pemanfaatan Sarana dan	5	5	5	6.031.757. 399,000	7	7.170.837.0 33,000	7	8.356.549.51 4,000	8	9.537.698.81 1,000	8	10.699.408.9 42,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
yang Spesifik Lokasi	Prasarana Pertanian (%)													
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					1.600.834.000,000		8.619.273.595,000		7.643.895.913,000		13.667.913.231,000		23.689.353.245,000	
Meningkatnya Aksesibilitas Pertanian	Jumlah Prasarana yang Dibangun/Dikembangkan (Unit)	10	10	12	1.600.834.000,000	14	8.619.273.595,000	16	7.643.895.913,000	18	13.667.913.231,000	18	23.689.353.245,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					205.645.450,000		211.956.709,000		220.384.108,000		228.604.435,000		235.942.637,000	
Meningkatnya Kesehatan Hewan/Ternak	Persentase Penanganan kasus Penyakit Hewan/Ternak (%)	5	5	5	205.645.450,000	7	211.956.709,000	7	220.384.108,000	8	228.604.435,000	8	235.942.637,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULAN GAN BENCANA PERTANIAN					150.208.5 00,000		154.818.39 8,000		160.973.978, 000		166.978.307, 000		172.338.311, 000	
Meningkatnya Luas Lahan Tertanggulangi Serangan OPT	Persentase Luas Lahan Terkena Serangan OPT yang Ditanggulangi (%)	80	80	83	150.208.5 00,000	86	154.818.39 8,000	90	160.973.978, 000	92	166.978.307, 000	92	172.338.311, 000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					2.461.262. 335,000		3.506.108.4 76,000		4.565.991.34 9,000		5.624.402.82 6,000		6.676.546.15 7,000	
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Petani	Cakupan bina kelompok petani (%)	30	40	45	2.461.262. 335,000	50	3.506.108.4 76,000	55	4.565.991.34 9,000	60	5.624.402.82 6,000	60	6.676.546.15 7,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					1.026.499. 025,000		1.101.179.2 20,000		1.177.428.66 6,000		1.253.524.55 5,000		1.328.966.29 3,000	
3.30.03 - PROGRAM					152.499.0 25,000		157.179.22 0,000		163.428.666, 000		169.524.555, 000		174.966.293, 000	

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN														
Meningkatnya Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	8	9	10	152.499.025,000	11	157.179.220,000	12	163.428.666,000	13	169.524.555,000	14	174.966.293,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					24.000.000,000		24.000.000,000		24.000.000,000		24.000.000,000		24.000.000,000	
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Jumlah barang beredar yang diawasi (%)	20	21	22	24.000.000,000	23	24.000.000,000	24	24.000.000,000	25	24.000.000,000	26	24.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGA N EKSPOR					250.000.0 00,000		300.000.00 0,000		350.000.000, 000		400.000.000, 000		450.000.000, 000	
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitasi pengembangan produk (%)	10	12	14	250.000.0 00,000	16	300.000.00 0,000	18	350.000.000, 000	20	400.000.000, 000	22	450.000.000, 000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					500.000.0 00,000		520.000.00 0,000		540.000.000, 000		560.000.000, 000		580.000.000, 000	
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Indeks Keberdayaan Konsumen (Angka)	0	45	46	400.000.0 00,000	48	400.000.00 0,000	50	400.000.000, 000	52	400.000.000, 000	54	400.000.000, 000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Jumlah barang beredar yang diawasi (%)	10	15	20	100.000.0 00,000	25	120.000.00 0,000	30	140.000.000, 000	35	160.000.000, 000	40	180.000.000, 000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.07 - PROGRAM					100.000.0 00,000		100.000.00 0,000		100.000.000, 000		100.000.000, 000		100.000.000, 000	

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI														
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang bermitra dengan ritel modern (Pelaku Usaha)	-	155	160	100.000.0 00,000	165	100.000.00 0,000	170	100.000.000, 000	180	100.000.000, 000	190	100.000.000, 000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					5.800.000. 000,000		5.900.000.0 00,000		6.000.000.00 0,000		6.100.000.00 0,000		6.200.000.00 0,000	
3.31.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A					4.200.000. 000,000		4.300.000.0 00,000		4.400.000.00 0,000		4.500.000.00 0,000		4.600.000.00 0,000	
Peningkatan Penatausahaan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya pengadministra	100	100	100	4.200.000. 000,000	100	4.300.000.0 00,000	100	4.400.000.00 0,000	100	4.500.000.00 0,000	100	4.600.000.00 0,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	sian umum di OPD (%)													
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					1.500.000. 000,000		1.500.000.0 00,000		1.500.000.00 0,000		1.500.000.00 0,000		1.500.000.00 0,000	
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Jumlah dokumen perdan RPIK (Dokumen)	0	0	1	1.500.000. 000,000	0	1.500.000.0 00,000	0	1.500.000.00 0,000	0	1.500.000.00 0,000	0	1.500.000.00 0,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	0,49	0,51	0,52		0,53		0,54		0,55		0,56		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					100.000.0 00,000		100.000.00 0,000		100.000.000, 000		100.000.000, 000		100.000.000, 000	
Meningkatnya pemanfaatan Informasi industri	Persentase data perusahaan industri pengolahan	22	26	30	100.000.0 00,000	32	100.000.00 0,000	34	100.000.000, 000	36	100.000.000, 000	40	100.000.000, 000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	yang masuk dalam SII NAS terhadap total populasi perusahaan industri pengolahan (%)													
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					30.970.37 4.148,070		31.920.854. 930,670		33.190.028.1 22,710		34.997.016.1 71,690		35.533.155.4 90,800	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					29.441.14 4.000,000		30.350.830. 709,360		31.324.387.7 38,360		32.750.386.0 72,210		33.808.093.4 65,120	
Meningkatnya kebijakan strategis di bidang administrasi umum	Persentase terlaksananya pengadministrasian umum di OPD (%)	100	100	100	29.441.14 4.000,000	100	30.350.830. 709,360	100	31.324.387.7 38,360	100	32.750.386.0 72,210	100	33.808.093.4 65,120	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN					200.000.0 00,000		200.000.00 0,000		441.144.000, 000		769.000.000, 000		200.000.000, 000	

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT														
Meningkatnya kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan otonomi daerah (%)	100	0	0	0,000	0	0,000	0	0,000	100	100.000.000, 000	0	0,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	1	0	0	0,000	0	0,000	0	0,000	1	80.000.000,0 00	0	0,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan otonomi daerah (%)	0	0	0	0,000	0	0,000	0	0,000	100	50.000.000,0 00	0	0,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan	Persentase pelaksanaan	100	0	0	0,000	0	0,000	0	0,000	100	75.000.000,0 00	0	0,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	otonomi daerah (%)													Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan otonomi daerah (%)	100	0	0	0,000	0	0,000	0	0,000	100	50.000.000,0 00	0	0,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan otonomi daerah (%)	100	0	0	0,000	0	0,000	0	0,000	100	50.000.000,0 00	0	0,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan otonomi daerah (%)	100	100	100	0,000	100	0,000	100	0,000	100	50.000.000,0 00	100	0,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas	Persentase pelaksanaan	1	0	0	0,000	0	0,000	0	0,000	1	64.000.000,0 00	1	0,000	Dinas/Badan yang menangani

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	otonomi daerah (%)													Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan otonomi daerah (%)	100	0	0	0,000	0	0,000	0	0,000	100	50.000.000,000	0	0,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	80	81	82	200.000.000,000	83	200.000.000,000	84	441.144.000,000	85	200.000.000,000	86	200.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					1.329.230.148,070		1.370.024.21,310		1.424.496.384,350		1.477.630.099,480		1.525.062.025,680	
Meningkatnya kebijakan strategis di	Persentase ketercapaian sasaran	100	100	100	1.329.230.148,070	100	1.370.024.21,310	100	1.424.496.384,350	100	1.477.630.099,480	100	1.525.062.025,680	Dinas/Badan yang menangani Bidang

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
bidang perekonomian dan pembangunan	pembangunan daerah (%)													Sekretariat Daerah
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yg berkelanjutan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					28.833.75 3.270,000		29.718.661. 157,000		30.200.275.1 25,000		30.352.855.3 87,000		30.581.752.0 46,000	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A					23.270.55 8.143,000		23.984.731. 572,000		24.238.364.4 99,000		24.168.565.4 95,000		24.198.946.4 48,000	
Meningkatnya kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD (Indeks)	95	95	95	23.270.55 8.143,000	97	23.984.731. 572,000	97	24.238.364.4 99,000	98	24.168.565.4 95,000	98	24.198.946.4 48,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					5.563.195. 127,000		5.733.929.5 85,000		5.961.910.62 6,000		6.184.289.89 2,000		6.382.805.59 8,000	
Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/K ota (*)	Ada	Ada	Ada	5.563.195. 127,000	Ada	5.733.929.5 85,000	Ada	5.961.910.62 6,000	Ada	6.184.289.89 2,000	Ada	6.382.805.59 8,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Tersusun dan Terintegrasinya Program- Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran	Ada	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) (*)													
	Terintegrasi Rrogram- Program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD (*)	Ada	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah ranperda yang disepakati antara legislatif dan eksekutif (Perda/Perkada)	3	3	3		3		3		3		3		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN					6.687.905. 684,910		6.877.812.5 09,960		7.131.394.33 5,470		7.378.745.34 4,150		7.599.553.06 9,810	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A					4.851.075. 899,900		4.999.955.4 19,270		5.198.753.64 6,740		5.392.667.15 7,760		5.565.771.77 3,530	
Meningkatnya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah (%)	100	100	100	4.851.075. 899,900	100	4.999.955.4 19,270	100	5.198.753.64 6,740	100	5.392.667.15 7,760	100	5.565.771.77 3,530	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN,					1.059.947. 334,980		1.077.132.1 18,690		1.100.078.89 1,730		1.122.461.83 4,390		1.142.442.85 9,280	

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH														
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	100	100	100	1.059.947. 334,980	100	1.077.132.1 18,690	100	1.100.078.89 1,730	100	1.122.461.83 4,390	100	1.142.442.85 9,280	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					776.882.4 50,030		800.724.97 2,000		832.561.797, 000		863.616.352, 000		891.338.437, 000	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase tingkat keselarasan dokumen perencanaan OPD koordinasi lintas Bidang perekonomian, infrastruktur dan	96,41	97	98	776.882.4 50,030	99	800.724.97 2,000	100	832.561.797, 000	100	863.616.352, 000	100	891.338.437, 000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	kewilayahan, pemerintahan dan sosial budaya terhadap RPJMD (%)													
5.02 - KEUANGAN					181.743.6 40.791,77 0		187.453.38 8.813,830		195.065.577. 284,580		202.990.720. 979,290		209.619.053. 320,700	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A					16.646.28 9.933,070		17.249.233. 980,120		18.054.343.5 77,410		19.339.670.9 87,440		20.040.703.8 53,440	
Meningkatnya layanan Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi (%)	-	0	100	6.632.389. 933,070	100	6.928.007.9 80,120	100	7.322.745.57 7,410	100	8.207.783.98 7,440	100	8.551.503.85 3,440	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya layanan Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	70	71	71	10.013.900.000,000	71	10.321.226.000,000	71	10.731.598.000,000	71	11.131.887.000,000	71	11.489.200.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					160.776.960.000,000		165.711.205.000,000		172.299.882.000,000		178.726.667.300,000		184.463.794.000,000	
Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan	Kesesuaian Laporan Keuangan Pemda dengan SAP (%)	85	98	100	160.776.960.000,000	100	165.711.205.000,000	100	172.299.882.000,000	100	178.726.667.300,000	100	184.463.794.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase kesesuaian Dokumen Perencanaan dengan Penganggaran (%)	65	65	70		72		73		74		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Kesesuaian Pengalokasian Anggaran	80	85	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	dengan Kaidah-Kaidah Penganggaran (%)													
	Persentase Penyaluran Dana Perimbangan, dana transfer lainnya (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Penyerapan Anggaran Belanja (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Penyerapan belanja ADD, DBH dan BTT (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					734.305.000,000		766.117.000,000		796.580.000,000		826.290.000,000		852.814.000,000	
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Indeks Pemanfaatan Pengamanan,	100	100	100	734.305.000,000	100	766.117.000,000	100	796.580.000,000	100	826.290.000,000	100	852.814.000,000	Dinas/Badan yang menangani

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Penghapusan, Mutasi dan Inventarisasi barang milik daerah (Indeks)													Bidang Keuangan
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					3.586.085. 858,700		3.726.832.8 33,710		3.914.771.70 7,170		4.098.092.69 1,850		4.261.741.46 7,260	
Meningkatkan Kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD	Persentase Capaian Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Daerah (%)	0	0	0,08	3.586.085. 858,700	0,09	3.726.832.8 33,710	0,09	3.914.771.70 7,170	0,1	4.098.092.69 1,850	0,1	4.261.741.46 7,260	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase kepatuhan Wajib Pajak terhadap Jumlah Wajib Pajak (%)	0	0	80		85		85		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.03 - KEPEGAWAIAN					3.379.995. 751,670		3.483.727.8 21,290		3.622.240.83 9,460		3.757.350.42 2,780		3.877.961.37 1,350	
5.03.01 - PROGRAM					3.079.739. 405,670		3.174.256.6 08,030		3.300.465.05 0,760		3.423.572.39 7,160		3.533.469.07 1,110	

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A														
Meningkatnya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penatausahaan administrasi perkantoran, perencanaan dan keuangan yang dilaksanakan (%)	98	98	98	3.079.739. 405,670	98	3.174.256.6 08,030	98	3.300.465.05 0,760	98	3.423.572.39 7,160	98	3.533.469.07 1,110	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					300.256.3 46,000		309.471.21 3,260		321.775.788, 700		333.778.025, 620		344.492.300, 240	
Meningkatnya kualitas pengelolaan kepegawaian	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	71,06	72	73	300.256.3 46,000	74	309.471.21 3,260	75	321.775.788, 700	76	333.778.025, 620	77	344.492.300, 240	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					270.767.0 05,720		279.076.84 5,120		290.172.940, 480		300.996.391, 160		310.658.375, 320	

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA					270.767.0 05,720		279.076.84 5,120		290.172.940, 480		300.996.391, 160		310.658.375, 320	
Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	10	10	12	270.767.0 05,720	14	279.076.84 5,120	16	290.172.940, 480	18	300.996.391, 160	20	310.658.375, 320	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N					1.778.710. 544,610		1.905.678.1 71,230		2.041.687.93 5,320		2.176.812.89 5,300		2.308.168.58 9,240	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH					878.710.5 44,610		905.678.17 1,230		941.687.935, 320		976.812.895, 300		1.008.168.58 9,240	
Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan daerah	Persentase hasil kajian bidang litbang yang ditindaklanjuti (%)	63	64	65	878.710.5 44,610	66	905.678.17 1,230	67	941.687.935, 320	68	976.812.895, 300	69	1.008.168.58 9,240	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					900.000.0 00,000		1.000.000.0 00,000		1.100.000.00 0,000		1.200.000.00 0,000		1.300.000.00 0,000	
Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	63	64	65	900.000.0 00,000	66	1.000.000.0 00,000	67	1.100.000.00 0,000	68	1.200.000.00 0,000	69	1.300.000.00 0,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					7.952.185. 123,000		8.165.547.6 91,000		8.450.449.86 0,000		8.728.351.64 0,000		8.976.431.72 8,000	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A					6.019.972. 225,000		6.204.725.1 79,000		6.451.425.04 5,000		6.692.063.20 0,000		6.906.878.42 8,000	
Meningkatnya layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah (%)	100	100	100	6.019.972. 225,000	100	6.204.725.1 79,000	100	6.451.425.04 5,000	100	6.692.063.20 0,000	100	6.906.878.42 8,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah

**Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENGAWASAN					1.770.313. 299,000		1.793.954.2 14,000		1.825.521.83 4,000		1.856.313.79 8,000		1.883.801.47 1,000	
Meningkatnya pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	72	72	73	1.770.313. 299,000	73	1.793.954.2 14,000	73	1.825.521.83 4,000	73	1.856.313.79 8,000	73	1.883.801.47 1,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					161.899.5 99,000		166.868.29 8,000		173.502.981, 000		179.974.642, 000		185.751.829, 000	
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Maturitas SPIP (Level)	3	3	3	161.899.5 99,000	3	166.868.29 8,000	4	173.502.981, 000	4	179.974.642, 000	4	185.751.829, 000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
7.01 - KECAMATAN					29.383.29 8.094,320		30.129.283. 743,480		31.054.190.7 23,990		31.504.505.2 08,170		32.803.816.2 41,710	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG					22.310.77 2.519,150		22.715.050. 956,540		23.487.972.9 90,510		23.938.702.5 74,230		24.902.620.5 72,410	

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A														
Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksanaanya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah (%)	100	100	100	4.642.840. 675,000	100	4.723.039.7 88,000	100	4.894.564.21 0,000	100	4.996.645.50 5,000	100	5.215.039.07 5,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya layanan penunjang urusan pemerintahan	Persentase terlaksanaanya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah (%)	100	100	100	1.749.270. 746,000	100	1.758.367.3 47,000	100	1.832.853.98 5,000	100	1.835.891.24 9,000	100	1.932.254.17 8,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase layanan penjunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi (%)	100	100	100	3.364.365. 702,000	100	3.439.899.3 49,000	100	3.539.488.60 0,000	100	3.603.549.68 5,000	100	3.772.580.79 0,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	100	100	100	1.830.801.802,000	100	1.882.017.329,000	100	1.950.405.218,000	100	1.972.112.733,000	100	2.058.661.851,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya layanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan administrasi perkantoran yang disusun sesuai ketentuan (%)	100	100	100	1.357.928.336,880	100	1.399.603.157,540	100	1.455.251.379,080	100	1.509.532.255,520	100	1.557.988.240,920	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan administrasi perkantoran yang disusun	100	100	100	2.372.394.440,270	100	2.375.483.264,000	100	2.487.194.270,430	100	2.555.888.466,710	100	2.704.199.288,490	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	sesuai ketentuan (%)													
Meningkatnya layanan penunjang urusan permerintahan daerah	Persentase layanan penjunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi (%)	100	100	100	3.137.338.059,000	100	3.224.415.964,000	100	3.340.690.743,000	100	3.454.108.508,000	100	3.555.355.391,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya layanan urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi (%)	80	80	82	2.037.466.000,000	85	2.093.858.000,000	87	2.169.157.827,000	90	2.192.607.414,000	92	2.288.175.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilimpahkan ke Camat (%)	0	0	65		70		75		80		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningktanya Layanan	Persentase layanan	100	100	100	1.818.366.758,000	100	1.818.366.758,000	100	1.818.366.758,000	100	1.818.366.758,000	100	1.818.366.758,000	Dinas/Badan yang menangani

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	penjunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi (%)													Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					476.099.9 99,000		516.194.42 1,640		560.500.000, 000		513.000.000, 000		582.000.000, 000	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif (%)	100	100	100	0,000	100	0,000	100	10.000.000,0 00	100	10.000.000,0 00	100	10.000.000,0 00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilimpahkan ke Camat (%)	0	0	100	69.999.99 9,000	100	70.000.000, 000	100	70.000.000,0 00	100	70.000.000,0 00	100	70.000.000,0 00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilimpahkan ke Camat (%)	0	0	100	66.000.000,000	100	72.694.421,640	100	75.500.000,000	100	64.000.000,000	100	70.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilimpahkan ke Camat (%)	0	0	100	160.000.000,000	100	176.000.000,000	100	202.000.000,000	100	163.000.000,000	100	204.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilimpahkan ke Camat (%)	100	100	100	87.600.000,000	100	102.000.000,000	100	108.000.000,000	100	114.000.000,000	100	117.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan	Persentase pelaksanaan urusan	0	0	65	50.500.000,000	70	52.500.000,000	75	51.000.000,000	80	52.000.000,000	85	52.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
dan pelayanan publik	pemerintahan dan pelayanan publik yang dilimpahkan ke Camat (%)													Bidang Kecamatan
Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilimpahkan ke Camat (%)	0	0	100	10.000.000,000	100	11.000.000,000	100	12.000.000,000	100	13.000.000,000	100	14.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilimpahkan ke Camat (%)	100	100	100	5.000.000,000	100	5.000.000,000	100	5.000.000,000	100	5.000.000,000	100	5.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	100	100	100	27.000.000,000	100	27.000.000,000	100	27.000.000,000	100	22.000.000,000	100	40.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					4.437.207. 933,000		4.578.845.6 57,000		4.679.909.59 6,000		4.782.640.25 3,000		4.896.451.12 5,000	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase masyarakat yang aktif dalam pelaksanaan pembangunan (%)	100	100	100	180.500.3 00,000	100	187.500.30 0,000	100	194.500.300, 000	100	201.500.300, 000	100	208.500.300, 000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Pemberdayaan masyarakat (%)	100	100	100	47.958.04 6,000	100	49.200.000, 000	100	50.700.000,0 00	100	52.200.000,0 00	100	53.700.000,0 00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Masyarakat yang Aktif dalam Pelaksanaan Pembangunan	Persentase masyarakat yang aktif dalam pelaksanaan pembangunan (%)	100	100	100	300.000.0 00,000	100	310.000.00 0,000	100	320.000.000, 000	100	330.000.000, 000	100	340.000.000, 000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Masyarakat yang Aktif dalam Pelaksanaan Pembangunan	Persentase masyarakat yang aktif dalam pelaksanaan pembangunan (%)	100	100	100	300.000.000,000	100	310.000.000,000	100	320.000.000,000	100	330.000.000,000	100	340.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	100	100	100	61.000.000,000	100	61.000.000,000	100	61.000.000,000	100	61.000.000,000	100	61.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase masyarakat yang aktif dalam pelaksanaan pembangunan (%)	100	100	100	757.200.000,000	100	784.000.000,000	100	800.000.000,000	100	816.000.000,000	100	831.500.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase masyarakat yang aktif dalam pelaksanaan pembangunan (%)	100	100	100	657.000.000,000	100	677.000.000,000	100	688.000.000,000	100	699.000.000,000	100	711.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase masyarakat yang aktif dalam pelaksanaan pembangunan (%)	100	100	100	657.000.000,000	100	677.000.000,000	100	688.000.000,000	100	699.000.000,000	100	711.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase masyarakat yang aktif dalam pelaksanaan pembangunan (%)	100	100	100	657.000.000,000	100	677.000.000,000	100	688.000.000,000	100	699.000.000,000	100	711.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase masyarakat yang aktif dalam pelaksanaan pembangunan (%)	100	100	100	48.000.000,000	100	48.000.000,000	100	48.000.000,000	100	48.000.000,000	100	48.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Persentase masyarakat yang aktif dalam pelaksanaan	100	100	100	291.084.693,000	100	300.018.082,000	100	311.946.801,000	100	323.582.416,000	100	333.969.412,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	pembangunan (%)													
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Persentase masyarakat yang aktif dalam pelaksanaan pembangunan (%)	82	82	83	291.000.000,000	84	300.000.000,000	85	310.000.000,000	86	323.000.000,000	86	333.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Persentase Pemberdayaan masyarakat (%)	75	75	100	69.000.000,000	100	73.000.000,000	100	77.000.000,000	100	70.000.000,000	100	70.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Persentase masyarakat yang aktif dalam pelaksanaan pembangunan (%)	0	0	100	30.562.232,000	100	34.000.000,000	100	35.000.000,000	100	36.000.000,000	100	38.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Jumlah Desa yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat (Angka)	12	12	12	89.902.662,000	12	91.127.275,000	12	87.762.495,000	12	94.357.537,000	12	105.781.413,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					236.600.0 00,000		241.000.00 0,000		243.500.000, 000		192.000.000, 000		268.500.000, 000	
Meningkatnya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi tentang ketenteraman dan ketertiban umum dengan pihak terkait (%)	84	85	86	13.100.00 0,000	87	16.000.000, 000	88	17.000.000,0 00	89	18.000.000,0 00	90	18.500.000,0 00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi tentang ketenteraman dan ketertiban umum dengan pihak terkait (%)	0	0	85	60.000.00 0,000	86	60.000.000, 000	87	60.000.000,0 00	88	10.000.000,0 00	89	60.000.000,0 00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi tentang ketenteraman dan ketertiban umum dengan pihak terkait (%)	100	100	100	22.500.000,000	100	23.000.000,000	100	23.500.000,000	100	20.000.000,000	100	20.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi tentang ketenteraman dan ketertiban umum dengan pihak terkait (%)	0	0	85	25.000.000,000	86	26.000.000,000	87	27.000.000,000	88	28.000.000,000	89	29.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)	0	0	100	10.000.000,000	100	15.000.000,000	100	20.000.000,000	100	25.000.000,000	100	30.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Koordinasi Ketenteraman	Persentase pelaksanaan koordinasi	0	0	65	41.000.000,000	67	36.000.000,000	70	31.000.000,000	75	31.000.000,000	80	46.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
dan Ketertiban Umum	tentang ketenteraman dan ketertiban umum dengan pihak terkait (%)													Bidang Kecamatan
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi tentang ketenteraman dan ketertiban umum dengan pihak terkait (%)	84	85	86	5.000.000,000	87	5.000.000,000	88	5.000.000,000	89	5.000.000,000	90	5.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pelaksanaan Koordinasi tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	75	76	78	10.000.000,000	80	10.000.000,000	83	10.000.000,000	85	5.000.000,000	90	10.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Sinergitas dengan kepolisian negara RI, TNI dan	Persentase pelaksanaan koordinasi tentang ketenteraman	100	100	100	50.000.000,000	100	50.000.000,000	100	50.000.000,000	100	50.000.000,000	100	50.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
instansi vertikal di wilayah kecamatan	dan ketertiban umum dengan pihak terkait (%)													
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					1.033.248. 352,170		1.055.203.9 70,300		1.093.811.11 9,480		1.109.169.92 3,940		1.128.470.77 9,300	
Meningkatnya pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	100	100	100	120.000.0 00,000	100	120.000.00 0,000	100	120.000.000, 000	100	115.000.000, 000	100	120.000.000, 000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan di kecamatan	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (%)	100	100	100	91.550.00 0,000	100	96.000.000, 000	100	99.000.000,0 00	100	102.000.000, 000	100	104.500.000, 000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan di kecamatan	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (%)	100	100	100	82.802.92 6,000	100	85.344.148, 000	100	88.737.431,0 00	100	92.047.337,0 00	100	95.002.057,0 00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan di kecamatan	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (%)	100	100	100	125.000.0 00,000	100	128.000.00 0,000	100	131.000.000, 000	100	129.000.000, 000	100	132.000.000, 000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan di kecamatan	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (%)	100	100	100	185.000.0 00,000	100	190.000.00 0,000	100	200.000.000, 000	100	205.000.000, 000	100	210.000.000, 000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas urusan	Persentase pelaksanaan urusan	100	100	100	81.000.00 0,000	100	82.000.000, 000	100	83.000.000,0 00	100	86.000.000,0 00	100	89.000.000,0 00	Dinas/Badan yang menangani

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
pemerintahan di kecamatan	pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (%)													Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan di kecamatan	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (%)	0	0	100	97.917.697,170	100	100.922.791,300	100	104.935.481,480	100	108.849.574,940	100	112.343.646,300	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan di kecamatan	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (%)	60	65	65	165.914.126,000	70	167.937.031,000	77	180.638.207,000	80	183.273.012,000	85	175.625.076,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase pelaksanaan koordinasi tentang ketenteraman dan ketertiban umum dengan pihak terkait (%)	100	100	100	84.063.603,000	100	85.000.000,000	100	86.500.000,000	100	88.000.000,000	100	90.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					889.369.291,000		1.022.988.738,000		988.497.018,000		968.992.457,000		1.025.773.765,000	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kualitas pembangunan desa	Persentase Desa yang Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Kategori Baik dan Benar (%)	100	100	100	82.767.722,000	100	83.159.563,000	100	93.682.788,000	100	104.193.156,000	100	114.648.756,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas pengelolaan	Persentase Desa yang Menyelenggara	100	100	100	89.000.000,000	100	92.000.000,000	100	92.000.000,000	100	94.000.000,000	100	96.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
keuangan dan kualitas pembangunan desa	kan Pemerintahan Desa Kategori Baik dan Benar (%)													Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kualitas pembangunan desa	Persentase Desa yang Menyelenggara kan Pemerintahan Desa Kategori Baik dan Benar (%)	100	100	100	5.500.000,000	100	5.500.000,000	100	5.500.000,000	100	5.500.000,000	100	5.500.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kualitas pembangunan desa	Persentase Desa/Kelurahan Tertib Administrasi (%)	100	100	100	60.000.000,000	100	60.000.000,000	100	60.000.000,000	100	60.000.000,000	100	60.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kualitas pembangunan desa	Persentase pemerintahan desa yang melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (%)	80	85	85	97.151.569,000	86	101.329.175,000	88	104.814.230,000	90	101.299.301,000	100	107.625.009,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kualitas pembangunan desa	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	100	100	100	120.000.000,000	100	120.000.000,000	100	120.000.000,000	100	100.000.000,000	100	125.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kualitas pembangunan desa	Persentase pemerintahan desa yang melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (%)	100	100	100	18.100.000,000	100	51.000.000,000	100	12.500.000,000	100	14.000.000,000	100	15.500.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Kualitas Pembangunan Desa	Persentase pemerintahan desa yang melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (%)	100	100	100	265.350.000,000	100	305.000.000,000	100	322.500.000,000	100	340.000.000,000	100	351.500.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Upaya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa yang melaksanakan tata kelola	100	100	100	151.500.000,000	100	205.000.000,000	100	177.500.000,000	100	150.000.000,000	100	150.000.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	pemerintahan yang baik (%)													
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					3.730.944. 822,680		3.845.447.5 18,120		3.998.342.51 2,160		4.147.480.68 7,180		4.280.614.81 7,080	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A					2.054.990. 369,680		2.118.058.0 24,120		2.202.272.01 1,160		2.284.416.75 7,180		2.357.746.53 5,080	
Meningkatnya layanan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	73,1	73,2	73,3	2.054.990. 369,680	73,4	2.118.058.0 24,120	73,5	2.202.272.01 1,160	73,6	2.284.416.75 7,180	73,7	2.357.746.53 5,080	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					499.830.6 31,000		515.170.43 3,000		535.653.609, 000		555.633.489, 000		573.469.324, 000	

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	90	90	92	499.830.631,000	93	515.170.433,000	95	535.653.609,000	96	555.633.489,000	100	573.469.324,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					647.136.791,000		666.997.419,000		693.517.237,000		719.385.430,000		742.477.702,000	
Meningkatnya etika dan budaya politik	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dengan penguatan	80	0	0	647.136.791,000	0	666.997.419,000	0	693.517.237,000	85	719.385.430,000	0	742.477.702,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	infrastruktur demokrasi (%)													
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKAT AN					90.125.10 0,000		92.891.039, 000		96.584.387,0 00		100.186.984, 000		103.402.986, 000	
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakata n yang Aktif (Persentase)	20	30	35	90.125.10 0,000	35	92.891.039, 000	40	96.584.387,0 00	40	100.186.984, 000	40	103.402.986, 000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGA N KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					161.776.5 05,000		166.741.42 6,000		173.371.065, 000		179.837.805, 000		185.610.599, 000	

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan Budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	100	100	100	161.776.505,000	100	166.741.426,000	100	173.371.065,000	100	179.837.805,000	100	185.610.599,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI					277.085.426,000		285.589.177,000		296.944.203,000		308.020.222,000		317.907.671,000	

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELI NE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL														
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik pada Masyarakat yang Ditangani/ Dimediasi/ Difasilitasi (%)	100	100	100	277.085.4 26,000	100	285.589.17 7,000	100	296.944.203, 000	100	308.020.222, 000	100	317.907.671, 000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					991.691. 139.060, 530		1.139.889. 097.429,19 0		1.071.810.8 53.670,930		1.149.664.7 56.984,950		1.254.259.7 56.948,880	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja Utama (IKU) dirumuskan dan ditetapkan dari pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD 2025-2029, yang telah mempertimbangkan RPJPD tahun 2025-2045 serta memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Visi, misi, tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis, yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi, sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Pengukuran keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam pencapaian tujuan Pembangunan Daerah periode 2025-2029 tercermin dari capaian Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4.2 Target Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2029

Indikator (IKU)		Satuan	Baseline 2024	Target						Kondisi akhir
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Umur Harapan Hidup (UHH)	tahun	74,35	74,36-74,53	74,53-75,03	75,03-75,53	75,53-76,03	76,53-78,34	78,34-78,84	78,34-78,84
2	Rata-rata lama sekolah	tahun	9,61	9,66-9,86	9,86-10,06	10,06-10,26	10,26-10,39	10,40-10,60	10,61-10,81	10,61-10,81
3	Harapan lama sekolah	tahun	13,52	13,60-13,68	13,69-13,76	13,77-13,85	13,86-13,93	13,94-14,01	14,02-14,10	14,02-14,10
4	PDRB per kapita (ADHB)	juta rp	42,64	43,97	57,49	64,91	72,34	79,76	87,18	87,18
5	Indeks Ketahanan Pangan	indeks	80,35	81,46	82,57	83,67	84,78	85,89	87,00	87,00
6	Persentase Desa Mandiri	%	4,69	5,46	6,63	7,81	8,98	10,15	11,32	11,32
7	Indeks Ketimpangan Gender	indeks	0,123	0,122	0,121	0,120	0,119	0,118	0,117	0,117
8	Kabupaten Layak Anak	skor	<500	650	700	750	800	850	900	900
9	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian (ADHK)	%	2,24	3,76	4,14	4,56	5,02	5,53	6,08	6,08
10	Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata (ADHK)(proxy: Penyediaan akomodasi, makanan dan minuman)	%	14,47	14,47	14,67	14,87	15,07	15,27	15,47	15,47
11	<i>Spend of Money</i> (Pengeluaran Wisatawan)	ribu rp	1600,00	1633,69	1668,10	1703,23	1739,10	1775,72	1813,12	1813,12

**Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

Indikator (IKU)		Satuan	Baseline 2024	Target						Kondisi akhir
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
12	Rasio PDRB Industri Pengolahan ADHB	%	0,49	0,62-0,82	0,82-1,02	1,22-1,42	1,42-1,5	1,5-3,6	3,6-3,9	3,6-3,9
13	Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB ADHB	%	1,260	1,28	1,78	2,28	2,78	3,3	3,5	3,5
14	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif	%	na	0,2	0,35	0,5	0,65	0,8	0,95	0,95
15	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	kategori	na	55-65	65-70	70-73	73-76	76-79	79-82	79-82
16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	skor	70,93	77,37	77,55	77,72	77,89	78,06	78,23	78,23
17	Indeks Ketahanan Daerah	skor	0,30	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36

2. Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja Daerah adalah indikator kinerja yang terdiri dari indikator kinerja makro dan indikator kinerja kunci. Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Daerah (IKD) dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu: 1. Aspek kesejahteraan Masyarakat; 2. Aspek pelayanan umum; dan 3. Aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Tabel 4.3 Target Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI								
1	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	80,35	81,46	82,57	83,67	84,78	85,89	87,00
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	70,93	77,37	77,55	77,72	77,89	78,06	78,23
3	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,30	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36
4	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	(%)	5,31	4,31	3,31	2,31	1,31	0,31	0
5	Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)	Ton CO2 eq	124.353,23	150.109,90	175.866,57	201.623,24	227.379,90	253.136,57	278.893,24
6	Konsumsi Listrik per Kapita	Kwh/Kapita	164.250	164.250	164.250	164.250	164.250	164.250	164.250
7	Cakupan pelanggan pelayanan persampahan	Rumah Tangga	2.500	2.700	3.000	6.500	7.500	8.500	9.500
8	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	(%)	55,84	55,84	58	60	62	64	65
9	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	Kg/Orang	0,25	0,29	0,34	0,38	0,42	0,46	0,51
10	Kepadatan Penduduk	Orang/km2	99,06	100,20	101,39	102,59	103,79	104,98	106,16
11	Kapasitas Air Baku	(%)	7,56	7,56	8,03	8,49	8,96	9,42	9,89
12	Indeks Risiko Bencana	Indeks	114	114	113,5	113	112,5	112	111,5

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
13	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	55,84	55,84	58	60	62	64	65
14	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,27	1,22	1,19	1,18	1,16	1,15	1,13
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Laju pertumbuhan ekonomi	%	5,02	5.10-5.20	5.32-5.64	5.64-5.98	5.98-6.75	6.80-7.20	7.21-7.40
2	Indeks pembangunan manusia	Angka	73,77	75.30-75.00	75.01-76.47	76.48-77.65	77.66-78.82	80.00-80.40	80.41-82.10
3	Umur Harapan Hidup	Tahun	74,35	74.36-74.53	74.53-75.03	75.03-75.53	75.53-76.03	76.53-78.34	78.34-78.84
4	Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,61	9.66-9.86	9.86-10.06	10.06-10.26	10.26-10.39	10.40-10.60	10.61-10.81
5	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita	(Rp Juta)	42,64	43,97	57,49	64,91	72,34	79,76	87,18
6	Harapan lama sekolah	Tahun	13,52	13.60-13.68	13.69-13.76	13.77-13.85	13.86-13.93	13.94-14.01	14.02-14.10
7	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	(%) Indeks	0,123	0,122	0,121	0,120	0,119	0,118	0,117
8	Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Nilai	500	650	700	750	800	850	900
9	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	14,91	14,96	15,02	15,07	15,13	15,18	15,23
10	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	49,27	53,56	57,85	62,14	66,42	70,71	75
11	Rasio Sektor Jasa Keuangan terhadap PDRB ADHB	%	0,77	0,81	0,85	0,88	0,92	0,96	1,00
12	Tingkat Kemiskinan	%	11,63	10.90-10.50	10.49-10.01	10.00-9.50	9.49-8.00	7.90-7.50	7.49-7.01
13	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Indeks	3,92	3,6	3,24	2,89	2,53	2,18	1,82

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
14	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	%	28,6	26,58	24,56	22,54	22,52	18,5	16,48
15	Rasio Gini	Indeks	0,238	0.238-0.236	0.236-0.234	0.234-0.232	0.232-0.230	0.230-0.228	0.228-0.226
16	Indeks Persepsi Korupsi	Indeks	-	3,92	4,04	4,16	4,28	4,40	4,52
17	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	0,89	0.84-0.79	0.79-0.73	0.72-0.63	0.62-0.53	0.52-0.43	0.42-0.39
18	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tenaga Kerja Rentan	%	13,15	13,15	17,48	21,80	26,12	30,45	34,79
19	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	0,38	0,40	0,43	0,45	0,48	0,50	0,52
20	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	0,022	0,031	0,04	0,048	0,083	0,101	0,119
21	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	(%)	82,25	82,25	82,25	82,25	82,25	82,25	82,25
22	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%	100	100	100	100	100	100	100
23	Indeks Kapabilitas Inovasi	Indeks	1,33	1,38	1,74	2,09	2,45	2,80	3,16
24	Persentase kesertaan KB di Kabupaten/Kota dengan kesertaan rendah	%	0	9,5	9	8,7	8,5	8,3	8
25	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	96,74	96,76	96,78	96,8	97	97,2	97,4
26	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*)	(%)	54,86	56,72	57,02	57,32	57,62	57,92	58,22

**Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
27	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	80,74	81,23	82,13	83,03	83,03	83,93	84,83
28	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	Orang	0	0	10	15	20	25	30
29	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Lembaga	0	0	3	4	5	6	7
30	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0	0,28	0,29	0,31	0,33	0,34	0,35
31	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,28	0,29	0,31	0,33	0,34	0,35	0,35
32	Persentase fasilitasi kesehatan (faskes) yang siap melayani KB MKJP	%	100	100	100	100	100	100	100
33	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pelatihan	Lembaga	0	0	3	4	5	6	7
34	Jumlah media massa (cetak elektronik) yang bekerja sama dengan Pemkab/kota (dinas ppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Media	0	0	1	2	3	4	5
35	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	Lembaga	0	2	3	4	5	6	7

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
36	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	%	100	100	100	100	100	100	100
37	Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	Tahun	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5
38	Jumlah lembaga layanan yang mendapat pelatihan	Lembaga	0	0	3	4	5	6	7
39	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan aktif dalam pengelolaan program KKBPk	Angka	8	8	8	8	8	8	8
40	Persentase pelayanan KB pasca persalinan	%	0	60	61	62	63	64	65
41	Pemerintah daerah yang memiliki kelompok kerja KKBPk yang efektif	Desa/Kelurahan	134	134	134	134	134	134	134
42	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah di evaluasi	Kebijakan	0	3	4	5	6	7	8
43	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	Persentase	12,1	12,1	10,9	10,1	9,4	8,9	8,7

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
44	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	%	77,8	77,8	80,3	82,3	83,9	85,2	85,2
45	Persentase masyarakat yang terpapar isi program KKBPK (advokasi dan KIE)	%	100	100	100	100	100	100	100
46	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	Lembaga	0	0	3	4	5	6	7
47	Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perbupkan	Dokumen	0	0	0	1	0	0	0
48	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	76,6	76,6	81,8	85	86,9	88,1	89
49	Jumlah program PUG pada perangkat daerah yang sudah di evaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	Program	0	0	2	3	4	5	6
50	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kabupaten/kota)	Lembaga	0	0	3	4	5	6	7
51	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat	Organisasi	9	9	10	11	12	13	14

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
	kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan								
52	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	Lembaga	0	0	2	3	4	5	6
53	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	%	100	100	100	100	100	100	100
54	Persentase peserta KB aktif (PA) metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	%	45,5	45,5	46	47	48	49	50
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Indeks kelayakan infrastruktur	Indeks	65,41	65,41	66,41	67,41	68,41	69,41	70,41
2	Laju pertumbuhan PDRB ADHK sektor pariwisata (penyediaan akomodasi, makanan dan minuman)	%	14,47	14,47	14,67	14,87	15,07	15,27	15,47
3	Rasio Industri Pengolahan terhadap PDRB ADHB	%	0,49	0.62-0.82	0.82-1.02	1.22-1.42	1.42-1.5	1.5-3.6	3.6-3.9
4	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	-	0,2	0,35	0,5	0,65	0,8	0,95
5	Indeks kepuasan layanan infrastruktur	Angka	-	55-65	65-70	70-73	73-76	76-79	79-82
6	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	68,24	70,04	72,15	74,27	76,18	78,15	80,34
7	Nilai AKIP Daerah	Angka	68,80	69,10	69,40	69,70	70,03	70,38	70,58
8	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
9	Persentase Desa Mandiri	%	4,69	5,46	6,63	7,81	8,98	10,15	11,32
10	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,27	3,37	3,46	3,56	3,65	3,75	3,85
11	Rasio PAD terhadap PDRB	%	1,46	1,71	2,00	2,13	2,41	2,82	3,43
12	Rasio Kewirausahaan	Persentase	0,9	1,1	1,6	2,2	2,7	3,2	3,5
13	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	3,19	3,26	3,30	3,33	3,37	3,40	3,42
14	Angka Ketergantungan	%	62,22	61,80	61,38	60,95	60,53	60,11	59,69
15	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	(%)	1,46	1,71	2,00	2,13	2,41	2,82	3,43
16	Indeks Inovasi Daerah	Angka	45,04	48,04	51,04	54,05	57,05	60,05	63,05
17	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	85,59	85,6	85,7	85,75	85,8	85,9	85,95
18	Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap PDRB Provinsi	%	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM								
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	88	89,10	89,50	89,75	89,94	90,04	90,43
2	Akses Rumah Tangga terhadap listrik PLN	%	97,98	97,99	97,993	97,995	97,998	98,00	98,00
3	Angka kriminalitas	Angka	373	233	225	217	208	200	192
V	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								
1	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	59,26	62,16	65,06	67,96	70,86	73,76	76,66

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
2	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	Persentase	50	55	60	65	67	69	70
4	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	65,87	67,37	68,87	70,37	71,87	73,37	74,87
5	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	64,60	67,10	69,60	72,10	74,60	77,10	79,60
6	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	73,68	74,78	75,88	76,98	78,08	79,18	80,28
7	Persentase layanan penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	%	100	100	100	100	100	100	100
8	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	99,18	99,38	99,58	99,78	99,98	100	100
9	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP sederajat	%	84,73	89,80	92,34	94,88	97,41	99,95	102,99
10	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD sederajat	%	107,53	109,51	108,52	109,01	109,51	110,00	110,49
11	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	Persentase	78,21	78,51	78,81	79,11	79,41	79,71	79,71
12	Angka Partisipasi Murni (APM) SD sederajat	%	86,71	89,35	91,99	94,63	97,27	99,91	102,55

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
13	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca dan Numerasi	Persentase	66,5	69,3	72,1	74,9	77,7	80,5	83,3
14	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat	%	93,39	93,61	93,83	94,06	94,28	94,50	94,72
AB	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	(%)	80	82	83	84	85	86	88
2	Angka Kematian Ibu (AKI)	(per 100.000 kelahiran hidup)	64,1	135	130	128	110	100	90
3	Angka Kematian Balita	Per 100.000 Kelahiran Hidup	17	14,8	12,6	10,4	8,2	6	3,8
4	Persentase Hipertensi dalam pengendalian	%	19,80	20,00	21,00	22,00	23,00	24,00	24,00
5	Net Death Rate (NDR)	Per 1000	13,93	12,91	11,90	10,88	9,87	8,85	7,83
6	Cakupan imunisasi bayi lengkap	Persentase	63,50	70,00	80,00	90,00	95,00	100	100
7	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	(%)	98,42	98,6	98,7	98,8	98,9	99	99,01
8	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	Persentase	0	40	50	55	60	65	70

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
9	Jumlah kematian balita	Orang	27	26	25	23	22	20	20
10	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	%	62,6	65,00	66,10	67,90	69,70	86,00	86,00
11	Jumlah kematian ibu	Orang	1	2	2	2	1	1	1
12	Proporsi kecamatan tereliminasi malaria	%	89,1	91,25	91,94	92,63	93,31	94,00	94,69
13	Persentase anak usia 6-23 bulan mendapatkan MPASI	%	100	100	100	100	100	100	100
14	Insidensi Tuberkulosis	Kasus	100	313,4	270,9	240,5	217,9	200,2	200,2
15	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	43	48	53	58	63	68	73
16	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun.	(%)	8,56	8,50	8,4	8,3	8,2	8,1	8,0
17	Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK)	%	6,22	6,20	6,1	6,0	5,9	5,8	5,7
18	Penemuan Kasus TBC	%	100	100	100	100	100	100	100
19	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Persentase	4,48	4,4	4,3	4,2	4,1	4,0	3,9
20	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	(%)	100	100	100	100	100	100	100

**Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
21	Angka Kesembuhan Penyakit TB (Success Rate)	%	87,5	87,5	90	92,5	94,5	96,5	98,5
22	Cakupan kunjungan nifas (KF) lengkap sesuai standar	%	46,4	78	83	88	92	97	100
AC	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1	Rasio luas daerah irigasi kewenangkabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	64	64	66	68	70	72	74
2	Jumlah pelatihan tenaga operator/analisis konstruksi di wilayah kabupaten	%	1	1	2	2	2	2	2
3	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	-	55	65	70	73	76	79
4	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	62,36	62,36	64	66	68	70	72
5	Rasio kemantapan jalan	%	54.01:54.01	54.01:54.01	56:56	58:58	60:60	63:63	64:64
6	Persentase luas sawah yang terairi	%	69,27	69,27	70	71	72	73	74
AD	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
1	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	Persentase	55,84	55,84	58	60	62	64	65
2	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kabupaten	%	0	0	100	100	100	100	100

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
3	Persentase penduduk berakses air minum	%	55,84	55,84	58	60	62	64	65
4	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	-	55	65	70	73	76	79
5	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	82,51	82,51	83	84	85	86	87
6	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	%	0,18	0,18	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4
7	Ketaatan terhadap permohonan RTRW	%	71	71	75	80	85	90	100
AE	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Persentase	20	30	35	40	42	45	50
2	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	65	70	75	80	85	90	90
3	Persentase penanganan pra bencana	%	10	15	20	25	30	35	40
4	Perbup Wilayah Manajemen Kebakaran	Dokumen	0	0	1	0	0	0	0
5	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	100	100	100	100	100	100	100

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
6	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Angka	-	80	81	82	83	84	85
7	Indeks Rasa Aman	Angka	-	80	81	82	83	84	85
8	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	%	70	70	80	85	90	90	90
9	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100	100	100	100	100
10	Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana	%	80	84	86	88	90	92	95
11	Persentase pendampingan penanganan pasca bencana	%	20	25	30	35	40	45	50
AF	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	73	75	77	79	81	83	85
2	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	86,01	86,05	86,1	86,15	86,2	86,25	86,3
3	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
4	Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin	%	73	87	90	91	93	96	98
5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100
AG	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
1	Persentase Penyerapan Lulusan	%	33,75	35	40	45	50	55	60
2	Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat Pelatihan	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	0	5	10	15	20	25	30
4	Persentase perusahaan yang telah memiliki peraturan perusahaan (PP)	%	11,43	15	20	25	30	35	40
5	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	%	65	70	75	80	85	90	95
6	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama oleh mediator hubungan industrial	%	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	(%)	1,24	5,14	9,05	12,95	16,86	20,76	24,66

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
AH	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								
1	Konsumsi Daging	Kg/KAP/TH	19,32	21,32	31,32	41,32	51,32	61,32	71,32
2	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	1	70	75	80	85	90	95
3	Protein (gram/hari)	Angka	1	81,3	81,71	82,12	82,53	82,94	83,35
4	Energi (kkal/hari)	Angka	1	3.245	3261,23	3277,53	3293,92	3310,39	3326,94
5	Ketersediaan Pangan Utama (Beras)	Ton	1	26412,94	26.545	26677,73	26811,12	26945,17	27079,9
AI	2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								
1	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase penyelesaian sengketa tanah yang terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100
AJ	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
1	Indeks Kualitas Udara	Indeks	93,9	82,4	82,6	82,8	83	83,2	83,4
2	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	58,17	62,59	62,66	62,73	62,80	62,87	62,94
3	Indeks Kualitas Air	Indeks	53,64	80,57	80,77	80,97	81,17	81,37	81,57
4	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%	0,1	0,12	0,14	0,16	0,18	0,2	0,22
5	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	0,572	0,58	0,6	0,62	0,63	0,64	0,65

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
6	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Usaha	84	90	100	110	120	130	140
7	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100
8	Timbulan sampah yang ditangani	Ton	11.950	12.500	13.000	13.500	14.000	14.500	15.000
9	Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Ha	65	14	50	75	100	125	150
AK	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
1	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	88,1	90	91	92	93	94	95
2	Perekaman KTP elektronik	%	99,23	99,4	99,6	99,7	99,8	99,9	100
3	Kepemilikan akta kelahiran	%	98,6	99	99,1	99,2	99,3	99,4	99,5
4	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada	%	71,65	73	75	77	79	81	83

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
	semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan								
5	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	OPD	3	4	5	6	7	8	9
AL	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa	Desa	1	2	3	4	5	6	7
2	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Lembaga	1	2	3	4	5	6	7
3	Jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa tahun sebelumnya	Desa	1	2	3	4	5	6	7
4	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	%	22,27	10,00	11,11	12,5	14,28	16,66	20,00
5	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	4,69	5,46	6,63	7,81	8,98	10,15	11,32
6	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Desa	1	2	3	4	5	6	7

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
AM	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	%	83	83,2	83,3	83,4	84,5	84,5	84,6
2	Persentase pemasangan rambu-rambu	%	55,83	2,87	2,87	2,91	22,78	26,8	41,7
3	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	1.500	1.555	1.560	1.570	1.575	1.580	1.585
4	Rasio Izin Trayek	Angka	0,0047	0,0046	0,0045	0,0044	0,0043	0,0042	0,0041
5	Jumlah terminal	Unit	1	1	1	1	1	1	1
6	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	29.63:29.63	29.70:29.70	29.80:29.80	29.85:29.85	29.90:29.90	29.95:29.95	29.98:29.98
7	Jumlah pelabuhan penyeberangan	unit	44	45	45	45	45	45	45
8	Jumlah Uji KIR angkutan umum/surat rekomendasi	Surat	41	30	35	40	45	50	55
AN	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
1	Indeks keterbukaan Informasi	Indeks	88	90	92	94	96	98	100
2	Tingkat Implementasi kebijakan Arsitektur SPBE	Angka	0	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2,00
3	Tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	%	80	90	100	100	100	100	100
4	Indeks SPBE	Indeks	2,70	2,78	2,96	3,04	3,12	3,2	3,28
AO	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dalam wilayah keanggotaan dalam satu kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase jumlah usaha mikro kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	%	7,76	8	9	10	11	12	14
4	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kelembagaan dan usaha dalam wilayah keanggotaan dalam satu kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM)	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan dalam wilayah keanggotaan dalam satu kabupaten/kota	%	3,95	5	6	7	8	9	10
7	Persentase jumlah usaha mikro kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	%	4,66	5	6	7	8	9	10

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
8	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian	%	9.945	10.201	10.330	10.458	10.586	10.714	10.842
9	Persentase usaha mikro kecil yang bermitra	%	0,52	1	1,5	2	2,5	3	3,5
10	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian dalam wilayah keanggotaan dalam satu kabupaten/kota	%	0,1	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
AP	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								
1	Kenaikan/penurunan realisasi investasi PMDN (Milyar Rupiah)	%	5,52	5,52	5,70	6,00	6,20	6,50	6,80
2	Rasio daya serap tenaga kerja	%	1	2,1	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5
3	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Milyar Rupiah	65	87	90	95	100	110	120
4	Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	1	26	28	30	32	34	36
AQ	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
1	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan organisasial kemasyarakatan	%	8,22	8,24	8,26	8,28	8,30	8,32	8,34
2	Jumlah prestasi olahraga tingkat Nasional	Prestasi	3	3	3	4	4	5	5
3	Tingkat Partispasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,65	0,66	0,66	0,67	0,67	0,68	0,68
AR	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data	%	60	65	70	75	80	85	90
2	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	%	0,600	0,605	0,700	0,705	0,800	0,805	0,900
3	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	2,14	2,16	2,18	2,20	2,22	2,24	2,26
AS	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
AT	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
1	Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	6	7	8	9	10	11	12
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Angka	17	18	19	20	21	22	23
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Karya Budaya	2	2	2	2	2	2	2
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Cagar Budaya	5	5	10	15	20	25	30
5	Jumlah objek pemajuan yang di manfaatkan dan tersusunnya story telling Cagar Budaya	Angka	0	2	4	6	8	10	12
AU	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1	Status akreditasi perpustakaan	Nilai Akreditasi	0	0	0	1	1	1	1
2	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang	0	0	0	0	0	0	1
3	Jumlah kunjungan perpustakaan per tahun	Angka	13.200	13.200	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000
4	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Angka	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
5	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Angka	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66
6	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	%	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
7	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	4.614	4.800	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
AV	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	75	80	85	90	95	98	100
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1
3	Tingkat digitalisasi arsip	%	36,86	50	52	54	56	58	60
AW	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
1	Konsumsi ikan	%	43,32	46,7856	50,53	54,57	58,94	63,65	68,74
2	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	3.701,62	3.886,70	4.081,04	4.285,09	4.499,34	4.724,31	4.960,52
3	Produksi perikanan	%	1	93	94	95	96	97	97

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
4	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	%	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
5	Cakupan bina kelompok nelayan	Kelompok	8	10	15	20	25	30	35
AX	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Angka	1.777.132	2.000.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000	2.300.000
2	Destinasi Pariwisata Unggulan	Objek	1	1	1	1	1	1	1
3	Jumlah Event	Event	25	30	30	30	31	31	31
4	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang tersertifikasi	%	320	360	400	440	480	520	560
5	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Event	25	30	30	30	31	31	31
6	Kunjungan wisata	Angka	1.777.1	2.000.0	2.100.0	2.150.0	2.200.0	2.250.0	2.300.0
7	Lama kunjungan Wisata	Hari	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0
8	Jumlah wistawan mancanegara perkebangaan	Angka	15.705	16.705	17.705	18.705	19.705	20.705	21.705
9	PAD sektor pariwisata	Milyar Rupiah	5.265.639.772	6.264.600.000	6.577.830.000	6.906.721.500	7.252.057.575	7.614.660.453	7.995.393.475
AY	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								
1	Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Juta Rupiah/Tenaga Kerja	58,93	64,84	69,22	73,61	77,99	82,37	86,75

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
2	Peningkatan produksi buah- buahan	%	2	3	4,5	6	7,5	9	10,5
3	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Ton/Ha	1	5,85	5,88	5,91	5,94	5,96	5,99
4	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	49,98	49,48	48,99	48,49	48	47,50	47
5	Cakupan bina kelompok petani	%	1	40	45	50	55	60	65
6	Peningkatan produksi sayur- sayuran	%	2	2	4	6	8	10	12
AZ	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitasi pengembangan produk	%	0	1	2	3	4	5	5
2	Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga Kemendag	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Jumlah barang beredar yang diawasi	%	41	50	55	60	65	70	70
4	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitasi promosi dagang	%	10	15	20	25	30	35	40
BA	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								
1	Produk Industri Pengolahan Berstandar Ekspor	Jenis	1	0	0	0	1	1	0

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
2	Persentase data perusahaan industri pengolahan yang masuk dalam SII NAS terhadap total populasi perusahaan industri pengolahan	%	11,65	15	20	25	30	35	40
3	Jumlah dokumen perdan RPIK	Dokumen	0	0	0	1	0	0	0
BB	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH								
1	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	42,6	45	48	51	54	57	60
2	Efektivitas Kerja Sama Daerah	Persentase	60	62	64	66	68	70	72
3	Nilai Skor LPPD	Nilai	2,75 (2	2,85	2,98	3,11	3,24	3,37	3,5
4	Tingkat Kematangan UKPBJ	Angka	7	7	7	7	7	8	8
5	Indeks kepatuhan standar pelayanan publik	Indeks	82,11	84,25	86,39	85,25	87,39	86,25	88,39
6	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase	68	70	72	74	76	78	80
7	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	88,67	89,87	91,07	92,27	93,47	94,67	95,87
8	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase	68	70	72	74	76	78	80
9	Indeks kualitas kebijakan	Indeks	49,37	52	54	56	58	60	62
10	Indeks tata kelola pengadaan	Indeks	56,3	57,5	58,7	59,9	61,1	62,3	63,5
11	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	Angka	3	3	3	3	3	3	3

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
12	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	3,67	3,69	3,71	3,76	3,81	3,86	3,91
13	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase	80	81	82	83	84	85	86
14	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	Persentase	58	60	62	64	66	68	70
BC	4.02 - SEKRETARIAT DPRD								
1	Jumlah ranperda yang disepakati antara legislatif dan eksekutif	Perda/Perkada	3	3	3	3	3	3	3
2	Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	*	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Terintegrasi Rrogram-Program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	*	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat	*	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
	Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota								
BD	5.01 - PERENCANAAN								
1	Jumlah dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	Angka	0	1	0	0	0	0	0
2	Jumlah Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	0	1	0	0	0	0	0
3	Jumlah dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan perkara	Angka	1	1	1	1	1	1	1
4	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persentase	94,01	94,5	94,7	95	95,2	95,4	95,6
BE	5.02 - KEUANGAN								
1	Persentase SILPA terhadap APBD	%	2,79	2,50	2,65	3,28	4,03	4,83	5,52
2	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	0,4	0,72	0,65	0,66	0,67	0,68	0,66
3	Persentase belanja pendidikan (min 20%)	%	27,96	27,03	27,30	27,57	27,85	28,13	29,12
4	Rasio Pajak terhadap PAD	%	40	50	53	55	57	58	60
5	Rasio retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	11	25	30	35	40	42	43
6	Persentase belanja kesehatan (min 10%)	%	17,68	17,62	17,80	17,98	18,16	18,34	19,35

**Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
7	Penetapan APBD	*	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
8	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	%	0	0	0	0	0	0	0
BF	5.03 - KEPEGAWAIAN								
1	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Orang	914	914	914	914	914	914	914
2	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	26	28	28	28	28	28	28
3	Indeks Profesionalitas PNS	Angka	70,41	72	74	76	78	80	82
4	Indeks Profesionalitas PPPK	Angka	73,11	75	77	79	81	83	85
5	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	1.824	1.824	1.824	1.824	1.824	1.824	1.824
BG	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan (hari/tahun)	Angka	0,02	1	1	1	1	1	1
2	ASN yang mendapatkan layanan diklat dan sertifikasi jabatan fungsional	Angka	0	0	5	5	5	5	5
3	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	Persentase	30	35	40	45	50	55	60
4	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase	30	35	40	45	50	55	60

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
5	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	0	1	1	1	1	1	1
6	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	0,36	1	1	1	1	1	1
7	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	Persentase	-	100	100	100	100	100	100
BH	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
1	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	32	32	36	36	36	36	36
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	63	65	67	69	71	73	75
BI	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH								
1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Angka	71,80	71,85	71,90	71,95	72,00	72,20	72,20
2	Peningkatan Kebabilitasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	1	3	3	3	3	3	3
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3	3	3	3	3	3	4
BJ	7.01 - KECAMATAN								
1	Jumlah Desa/ Kelurahan yang Dibina dan Diawasi	Desa/Kelurahan	28	28	28	28	28	28	28
2	Jumlah Desa/ Kelurahan yang Dibina dan Diawasi	Desa/Kelurahan	8	8	8	8	8	8	8

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
3	Jumlah Desa/ Kelurahan yang Dibina dan Diawasi	Desa/Kelurahan	12	12	12	12	12	12	12
4	Jumlah Desa/ Kelurahan yang Dibina dan Diawasi	Desa/Kelurahan	8	8	8	8	8	8	8
5	Persentase Desa/Kelurahan Tertib Administrasi	%	50	55	60	65	70	75	80
6	Jumlah Desa/ Kelurahan yang Dibina dan Diawasi	Desa/Kelurahan	28	28	28	28	28	28	28
7	Persentase Desa/Kelurahan Tertib Administrasi	%	50	55	60	65	70	75	80
8	Persentase Desa/Kelurahan Tertib Administrasi	%	40	45	50	55	60	65	70
9	Jumlah Desa/ Kelurahan yang Dibina dan Diawasi	Desa/Kelurahan	17	17	17	17	17	17	17
10	Jumlah Desa/ Kelurahan yang Dibina dan Diawasi	Desa/Kelurahan	28	28	28	28	28	28	28
11	Persentase Konflik pada Masyarakat yang Ditangani/ Dimediasi/ Difasilitasi	%	82	100	100	100	100	100	100
12	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif di Desa/Kelurahan	%	68	70	71	72	73	74	75
13	Persentase Konflik pada Masyarakat yang Ditangani/ Dimediasi/ Difasilitasi	%	82	100	100	100	100	100	100
14	Persentase Desa/Kelurahan Tertib Administrasi	%	50	55	60	65	70	75	80

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
15	Persentase Konflik pada Masyarakat yang Ditangani/ Dimediasi/ Difasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100
16	Persentase Desa/Kelurahan Tertib Administrasi	%	50	55	60	65	70	75	80
17	Persentase Konflik pada Masyarakat yang Ditangani/ Dimediasi/ Difasilitasi	%	82	100	100	100	100	100	100
18	Persentase Konflik pada Masyarakat yang Ditangani/ Dimediasi/ Difasilitasi	%	82	100	100	100	100	100	100
19	Persentase Konflik pada Masyarakat yang Ditangani/ Dimediasi/ Difasilitasi	%	84	85	86	87	88	89	90
20	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif di Desa/Kelurahan	%	68	70	71	72	73	74	75
21	Persentase Desa/Kelurahan Tertib Administrasi	%	50	55	60	65	70	75	80
22	Persentase Konflik pada Masyarakat yang Ditangani/ Dimediasi/ Difasilitasi	%	82	100	100	100	100	100	100
23	Persentase Konflik pada Masyarakat yang Ditangani/ Dimediasi/ Difasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100
24	Persentase Desa/Kelurahan Tertib Administrasi	%	50	55	60	65	70	75	80

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
25	Persentase Konflik pada Masyarakat yang Ditangani/ Dimediasi/ Difasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100
26	Persentase Desa/Kelurahan Tertib Administrasi	%	50	55	60	65	70	75	80
27	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif di Desa/Kelurahan	%	65	70	71	72	73	74	75
28	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif di Desa/Kelurahan	%	75	76	77	78	79	80	81
29	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif di Desa/Kelurahan	%	68	70	71	72	73	74	75
30	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif di Desa/Kelurahan	%	75	76	77	78	79	80	81
31	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif di Desa/Kelurahan	%	68	70	71	72	73	74	75
32	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif di Desa/Kelurahan	%	50	70	71	72	73	74	75
33	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif di Desa/Kelurahan	%	75	76	77	78	79	80	81

Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
34	Persentase Desa/Kelurahan Tertib Administrasi	%	50	55	60	65	70	75	80
35	Jumlah Desa/ Kelurahan yang Dibina dan Diawasi	Desa/Kelurahan	21	21	21	21	21	21	21
36	Jumlah Desa/ Kelurahan yang Dibina dan Diawasi	Desa/Kelurahan	15	15	15	15	15	15	15
BK	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
1	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persentase	-	-	20	30	35	40	40
2	Persentase Konflik pada Masyarakat yang Ditangani/ Dimediasi/ Difasilitasi	%	80	100	100	100	100	100	100
3	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	-	-	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8

3. Dukungan Program Daerah terhadap RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

Dukungan Kabupaten Samosir terhadap Kegiatan Prioritas Utama dan Program dalam RPJMN Tahun 2025-2029 serta terhadap PTHC, Program Prioritas maupun Proyek Strategis Daerah (PSD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 bertujuan untuk menciptakan sinergi antara perencanaan nasional dan daerah, serta memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan di daerah berkontribusi langsung terhadap pencapaian target pembangunan Nasional. Dukungan tersebut ditunjukkan pada tabel tabel-tabel berikut ini.

Tabel 4.4 Dukungan Program Daerah terhadap Kegiatan Prioritas Utama RPJMN Tahun 2025-2029 dan Prioritas Provinsi Tahun 2025-2029

RPJMN Tahun 2025-2029	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten Samosir 2025-2029
Kegiatan Prioritas Utama	Program Prioritas	Program Daerah
Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah	Pendidikan melalui program sekolah unggulan berbasis peningkatan skill yang berhubungan dengan kebutuhan industri dan potensi wilayah di tingkat lokal.	
	Bentuk Intervensi:	
	• Pemenuhan 100% Fasilitas Listrik dan Layanan Internet pada Seluruh SMA/SMK/SLB di Sumatera Utara	Ketersediaan dukungan akses jalan, akses listrik (SMA Negeri 1 Sianjurnulamula, SMA Negeri 1 Harian, SMKN 1 Simanindo)
	• Pembangunan 4 SMA/SMK/SLB Unggulan	• Ketersediaan dukungan lahan (SMA Negeri 1 Sianjurnulamula, SMA Negeri 1 Harian, SMKN 1 Simanindo) • Penyediaan basis data siswa SMP/SLTP kelas IX yang berprestasi dan direkomendasikan masuk ke dalam sekolah unggulan
	• Penguatan Pendidikan Vokasi dan Pengembangan Kurikulum Bermuatan Lokal MARSIPATURE HUTANABE	- Kurikulum Muatan Lokal - Optimalisasi dan Revitalisasi fungsi BLK
	• Pengembangan Minat Bakat Siswa melalui Event Lomba dan Pergelaran Seni, Budaya dan Olahraga Unggulan Daerah antar SMA/SMK dan MA	- Penyelenggaraan Festival Seni Budaya

**Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

RPJMN Tahun 2025-2029	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten Samosir 2025-2029
Kegiatan Prioritas Utama	Program Prioritas	Program Daerah
	Penguatan Pengembangan Pusat Pelatihan dan Keterampilan serta Kerjasama Rekrutmen Tenaga Kerja dengan Dunia Usaha - Dunia Industri	Kegiatan Unggulan: Peningkatan kualitas Tenaga Kerja
		Kegiatan Prioritas: Penguatan pendidikan vokasi berstandar BNSP melalui Balai Latihan Kerja serta Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja
	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, Dan Penyandang Disabilitas Dalam Berkarya Dan Berprestasi Bentuk Intervensi:	Program Unggulan: Peningkatan kualitas Tenaga Kerja dan Produk Unggulan UMK berdasarkan potensi wilayah
	Inkubasi Usaha untuk Perempuan dan Pemuda	Kegiatan Unggulan: Pemberian subsidi bunga modal kerja 0 (nol) persen
		Program Prioritas Daerah: Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudaya
		1.3. Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pemuda, dan Masyarakat Miskin untuk melakukan pengembangan diri dalam meningkatkan kualitas hidup
	Dukungan terhadap Pengembangan Prestasi Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas khususnya pada Bidang Seni Budaya dan Olahraga	1.3. Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Masyarakat Miskin untuk melakukan pengembangan diri dalam meningkatkan kualitas hidup

**Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

RPJMN Tahun 2025-2029	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten Samosir 2025-2029
Kegiatan Prioritas Utama	Program Prioritas	Program Daerah
	Pengembangan Keterampilan dan Penempatan Kerja Inklusif	Kegiatan Unggulan: Peningkatan kualitas Tenaga Kerja
Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis	Kesehatan yang terintegrasi beberapa titik kawasan yang menjadi sentral layanan kesehatan masyarakat terpadu Bentuk Intervensi:	Program Unggulan: Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
	Sistem Informasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan, Ketersedian Dokter dan Layanan Pengaduan Kesehatan	Aplikasi SIMRS (RSUD Hadrianus Sinaga Pangururan)
	Dukungan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Kegiatan Unggulan : Berobat Tanpa Batas (BERANTAS)
	Penuntasan Kasus TBC	Program Prioritas: Pemantapan kualitas kesehatan masyarakat Kegiatan Prioritas: Penanggulangan penyakit menular (HIV/AIDS, TBC, Malaria)
Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses	Dukungan Pembangunan dan Pengembangan Sentra Pelayanan Kesehatan dan RSUD Kab/Kota dengan Layanan Unggulan	Pembangunan gedung Catheterization Laboratory (Catlab)
		Pelatihan SDM tenaga kesehatan

**Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

RPJMN Tahun 2025-2029	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten Samosir 2025-2029
Kegiatan Prioritas Utama	Program Prioritas	Program Daerah
	Kerjasama Penyediaan Dokter Spesialis dengan Perguruan Tinggi	Penyediaan Dokter yang akan melanjutkan ke Spesialis
	Bapak Asuh dalam penurunan Gizi Buruk dan Prevelensi Stunting	Penyusunan dasar hukum pelaksanaan Bapak Asuh Stunting
	Dapur Sehat Atasi Stunting (DAHSYAT)	Kegiatan Unggulan: Rantang Samosir Penurunan Angka Stunting (RAMOS PANTAS)
	Pengembangan RS Haji Medan menuju RS berstandar Internasional	Pengoptimalan kompetensi layanan kesehatan RSUD dr. Hadrianus Sinaga menuju paripurna
	Pemberantasan kemiskinan melalui perlindungan dan pemberdayaan masyarakat rentan secara menyeluruh dan tepat sasaran	
	Bentuk Intervensi:	Samosir Na Las
	MARIPRO (Masyarakat Rentan Produktif)	Kegiatan Unggulan: Pemberian subsidi bunga modal kerja 0 (nol) persen
		Kegiatan Unggulan: Layanan Jaminan Untuk Tenaga Kerja Rentan (LANJUTKAN)
	Penguatan Stabilitas Makro Ekonomi dan kesinambungan fiskal daerah	Program Unggulan: Peningkatan kualitas Tenaga Kerja dan Produk Unggulan UMK berdasarkan potensi wilayah
	Bentuk Intervensi :	

**Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

RPJMN Tahun 2025-2029	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten Samosir 2025-2029
Kegiatan Prioritas Utama	Program Prioritas	Program Daerah
	INDHIRA (Industrialisasi dan Hilirisasi Sumatera Utara)	Kegiatan Unggulan: SAMOSIR NA LAS (NAIK KELAS)
		Pembangunan sentra IKM dan UKM/Pusat Layanan Usaha Terpadu
		Meningkatkan Produk Unggulan Olahan Hasil pertanian
		Meningkatkan produk unggulan yang masuk ke pasar modern
	SEMESTA (Sinergi Ekonomi dan Investasi Sumatera Utara)	- Promosi Investasi - Penyiapan dokumen RDTR berbasis OSS - Memberikan kemudahan perizinan melalui Perda Insentif dan Disinsentif
	Reformasi, Efisiensi dan Penyesuaian Model Bisnis serta tata kelola BUMD	- Pembentukan BUMD - Penyusunan skema bisnis asset daerah (berupa objek wisata)
	Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang stabil	Kegiatan Prioritas: Optimalisasi kontribusi PAD terhadap APBD dengan produktifitas pengelolaan aset daerah
Pengembangan Pangan Hewani	Perkembangan Ekonomi Hijau dan Biru. Bentuk Intervensi:	

**Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

RPJMN Tahun 2025-2029	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten Samosir 2025-2029
Kegiatan Prioritas Utama	Program Prioritas	Program Daerah
	Pengembangan Ekonomi Hijau	- Program Bertani Selaras Alam (PANGULA NATURE) - Pembangunan pompa irigasi bertenaga surya - Budidaya perikanan darat dengan metode bioflok - Pengembangan kawasan pertanian terpadu
Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	Ketahanan Pangan melalui penguatan nilai budaya dan kearifan lokal agar diversifikasikan hasil pertanian menjadi lebih produktif dan berdampak pada kesejahteraan Masyarakat local	
	Bentuk Intervensi :	
	• Peningkatan Produktivitas Pangan	Kegiatan Unggulan: Peningkatan irigasi melalui panel surya
		Kegiatan Unggulan: Pangula Nature - Penyediaan pupuk organik - Penyediaan bibit/benih komoditi unggulan - Mencetak Petani Milenial
	Pariwisata yang menggerakkan potensi alam lokal di pedesaan dan perkotaan dengan melibatkan partisipasi Masyarakat secara langsung (komunitas, pemerintah daerah/desa/kelurahan dan pengusaha lokal)	Program Unggulan: Pembangunan pariwisata Samosir dengan melibatkan pelaku ekonomi kreatif berazas 6A (<i>Attraction, Amenities, Ancillary, Activity, Accessibilities</i> dan <i>Available Package</i>)

**Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

RPJMN Tahun 2025-2029	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten Samosir 2025-2029
Kegiatan Prioritas Utama	Program Prioritas	Program Daerah
	Bentuk Intervensi :	
	Perkembangan Desa Wisata Berbasis Budaya, Kearifan lokal dan Alam	Kegiatan Unggulan: Penyelenggaraan festival seni dan budaya (KALENDER FIESTA/FESTIVAL WISATA)
		Gerakan 1 desa 1 event
		Pengembangan objek wisata baru
		Kegiatan prioritas: Penyuluhan kepariwisataan pada desa wisata di 9 Kecamatan
	Ekonomi Kreatif dan Industri berbasis teknologi	
	Bentuk Intervensi :	
	Perkembangan Ekonomi Kreatif dan Industri berbasis digital	Program Unggulan: Pembangunan pariwisata Samosir dengan melibatkan pelaku ekonomi kreatif berazas 6A (<i>Attraction, Amenities, Ancillary, Activity, Accessibilities dan Available Package</i>)
	Reformasi Birokrasi dan tata Kelola Pemerintahan	Program Prioritas: Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan peningkatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)
	Bentuk Intervensi :	
	Inovasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Kegiatan Prioritas: Peningkatan inovasi daerah

**Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

RPJMN Tahun 2025-2029	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten Samosir 2025-2029
Kegiatan Prioritas Utama	Program Prioritas	Program Daerah
	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi pada pelayanan publik dan perekonomian Masyarakat	Program Prioritas: Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan peningkatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)
	Bentuk Intervensi :	
	Digitalisasi Layanan Publik	Kegiatan Prioritas: Penguatan tata kelola SPBE
Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	Program Unggulan: Pemerataan pembangunan infrastruktur
Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba	Bentuk Intervensi :	Kegiatan Unggulan: Infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan
Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir	Program PIJAR (Peningkatan Infrastruktur Jalan Jembatan dan Irigasi)	Peningkatan jalan dan jembatan
		Peningkatan layanan irigasi
Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau	Pengelolaan lingkungan dan sumber Daya alam secara berkelanjutan dan berketahanan terhadap bencana.	Program Unggulan: Pengelolaan dan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan
	Bentuk Intervensi :	
	Konservasi Sumber Daya Alam	Kegiatan Unggulan: Konservasi daya dukung dan daya tampung (SERDADU DATA)
	Pengurangan Emisi Karbon	

**Program Perangkat Daerah
dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

RPJMN Tahun 2025-2029	RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten Samosir 2025-2029
Kegiatan Prioritas Utama	Program Prioritas	Program Daerah
	Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa Bentuk Intervensi :	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program Membangun Desa Produktif Terpadu	Kegiatan prioritas: Pembangunan 6 desa mandiri
	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang mendukung suasana yang harmonis, toleran dan rukun Bentuk Intervensi :	
	Program BERHATI (Berbudaya, Rukun, Harmonis, Toleran dan Empati)	Cakupan kegiatan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat kepercayaan di Daerah
	Terciptanya Kehidupan yang lebih aman dan tertib. Bentuk Intervensi :	
	SUMUT BERSATU (Bersama, Aman, Tertib, dan Unggul)	Masyarakat demokratis dan penciptaan lingkungan aman

Tabel 4.5 Dukungan Program Daerah terhadap Kegiatan Prioritas Utama
RPJMN Tahun 2025-2029

RPJMN Tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2029
Kegiatan Prioritas Utama	Kegiatan Prioritas Daerah
Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
	1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
	1.04.06 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
	1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pengembangan KEK Sei Mangkei	
Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
Pengembangan Pangan Hewani	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
	2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir	1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau	2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
	1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

RPJMN Tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2029
Kegiatan Prioritas Utama	Kegiatan Prioritas Daerah
	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR?	1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba	1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
	3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
	2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
	3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Tabel 4.6 Dukungan Pemerintah Kabupaten Samosir terhadap PHTC Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2030

PHTC	Tahun	Rencana Aksi dan Lokasi Pelaksanaan	Dukungan Kabupaten/Kota	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	OPD Kab/Kota
1. Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) (Kepulauan Nias – 2026, + Pantai Barat - 2027, + Dataran Tinggi – 2028, + Pantai Timur – 2029) 33 Kabupaten/Kota	2025	Menyusun Kajian Akademis/Konsultan Pendidikan Tentang Bersekolah Gratis • 33 Kabupaten/Kota	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pendidikan Provsu, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan: - basis data penerima - mengelola operasional sekolah - mengawasi implementasi agar tepat sasaran	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Samosir
	2026	Pelaksanaan Kegiatan PUBG • Zona Kepulauan Nias		Kegiatan Pengelolaan pendidikan sekolah dasar dan Kegiatan Pengelolaan pendidikan Sekolah menengah pertama	
	2027	Pelaksanaan Kegiatan PUBG •Zona Kepulauan Nias dan Pantai Barat		Sub Kegiatan Pengelolaan dana BOS sekolah Dasar	
	2028	Pelaksanaan Kegiatan PUBG •Kepulauan Nias, Pantai Barat, dan dataran tinggi		Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS sekolah dasar	
	2029	Pelaksanaan Kegiatan PUBG •Kepulauan Nias, Pantai Barat, Dataran tinggi, dan Pantai Timur		Sub Kegiatan Pengelolaan dana BOS sekolah Menengah Pertama	
	2030	Pelaksanaan Kegiatan PUBG •Kepulauan Nias, Pantai Barat, Dataran tinggi, dan Pantai Timur		Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS sekolah menengah pertama	
2. Program Berobat Gratis (Probis) melalui Program Universal Health Coverage (UHC) (mulai Oktober	2025	Melakukan Launching UHC Penyusunan regulasi MoU 33 Kabupaten/Kota dimulai Oktober 2025 • 33 Kabupaten/Kota	Dukungan anggaran Kabupaten/Kota pada Tahun 2025 80% dan setiap tahun akan berkurang sebesar 2,5% Verifikasi dan Validasi Data Peserta : - Memastikan data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) akurat untuk sasaran PBI	Program perlindungan dan jaminan sosial	Dinas Sosial dan Pemberdayaan masyarakat Desa Kabupaten Samosir

PHTC	Tahun	Rencana Aksi dan Lokasi Pelaksanaan	Dukungan Kabupaten/Kota	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	OPD Kab/Kota
tahun 2025, UHC+ tahun 2026 - 2030).	2026	- Melakukan peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara - Integrasi dengan Sumut e-Health (verifikasi online dan data pasien otomatis) • 33 Kabupaten/Kota	JKN Pusat dan PBI JKN Daerah. - Melakukan pemutakhiran data PBI JKN Pusat dan PBI JKN Daerah. secara berkala melalui Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. - Menghapus data ganda atau peserta yang tidak memenuhi kriteria. - Menyinkronkan basis data peserta PBI JKN Pusat dan PBI JKN Daerah. dengan provinsi dan BPJS Kesehatan	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir
	2027	- Melakukan peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara - Integrasi dengan Sumut e-Health (verifikasi online dan data pasien otomatis) • 33 Kabupaten/Kota		Kegiatan Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten kota	RSUD Hadrianus Sinaga Pangururan
	2028	- Melakukan peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara - Integrasi dengan Sumut e-Health (verifikasi online dan data pasien otomatis) • 33 Kabupaten/Kota		Kegiatan Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKT Rujukan tingkat daerah kabupaten/Kota	
	2029	- Melakukan peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara - Integrasi dengan Sumut e-Health (verifikasi online dan data pasien otomatis) • 33 Kabupaten/Kota		Sub Kegiatan Pendataan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten kota	
	2030	- Melakukan peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara - Integrasi dengan Sumut e-Health (verifikasi online dan data pasien otomatis) • 33 Kabupaten/Kota		Sub kegiatan Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	

PHTC	Tahun	Rencana Aksi dan Lokasi Pelaksanaan	Dukungan Kabupaten/Kota	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	OPD Kab/Kota
3. Program Jaminan Kestabilan Harga Komoditi Pangan (JASKOP)	2025	Identifikasi lokasi sentra cabai; sosialisasi teknologi Solar Dry Dome (SDD) pelatihan awal pengolahan cabai kering Pembangunan SDD 10 unit •Deli serdang •Batubara •Karo •Serdang Bedagai •Langkat dan •Simalungun	- Memperkuat sistem informasi harga dan produksi di tingkat petani - Verifikasi lapangan bersama kelompok tani - Melakukan dukungan terhadap sosialisasi SDD	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Samosir
	2026	- Melakukan uji coba produksi cabai kering & bubuk - pendampingan koperasi/UMKM - Pembangunan unit Solar Dry Dome 15 unit •Tapanuli Utara • Humbang Hasundutan	- Dukungan terhadap Uji Coba Produksi cabe kering dan bubuk - Verifikasi lapangan bersama kelompok tani - Melakukan dukungan terhadap sosialisasi SDD	Kegiatan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	
	2027	- Implementasi Skala Produksi & Digitalisasi - Pembangunan SDD 17 unit •Dairi •Mandailing Natal	- Verifikasi lapangan bersama kelompok tani - Melakukan dukungan terhadap sosialisasi SDD	sub kegiatan Koordiansi sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya	
	2028	- Perluasan Kabupaten & Skema Pembiayaan UMKM - Pembangunan SDD 20 Unit •Toba •Nias Selatan	- Verifikasi lapangan bersama kelompok tani - Melakukan dukungan terhadap sosialisasi SDD	sub kegiatan penyediaan informasi harga pangan tingkat produsen dan konsumen wilayah kabupaten/kota	
	2029	- Ekspansi Ekspor & Sertifikasi Global - Pembangunan SDD 25 Unit • Tapanuli Selatan •Samosir	- Verifikasi lapangan bersama kelompok tani - Melakukan dukungan terhadap sosialisasi SDD	Sub Kegiatan koordinasi dan singkronisasi pemantauan stok,pasokandan harga pangan pokok	
	2030	Evaluasi Final & Perumusan Kebijakan Keberlanjutan di Tahun 2030			

PHTC	Tahun	Rencana Aksi dan Lokasi Pelaksanaan	Dukungan Kabupaten/Kota	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	OPD Kab/Kota
4. Digitalisasi Pelayanan Publik “Cepat, Responsif, Handal, dan Solutif” (CERDAS)	2025	Pemetaan layanan publik yang akan didigitalisasi, Audit kesiapan infrastruktur dan SDM, Penyusunan roadmap & kebijakan pendukung • 33 Kabupaten/Kota	Kesiapan Infrastruktur Internet di Kabupaten/Kota	Program pengelolaan aplikasi informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir
	2026	Pengembangan dan pengujian platform digital layanan, Integrasi dengan data kependudukan & sistem informasi lainnya, dan Pelatihan SDM internal • 33 Kabupaten/Kota	Kesiapan Infrastruktur Internet, Kesiapan SDM di Kabupaten/Kota	Kegiatan Pengelolaan nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup pemerintahan daerah Kabupaten/kota	
	2027	Peluncuran resmi layanan digital tahap pertama, Integrasi lintas instansi, Peningkatan kapasitas jaringan & infrastruktur • 33 Kabupaten/Kota	Kesiapan Infrastruktur Internet di Kabupaten/Kota	Kegiatan Pengelolaan e government di lingkup pemerintah daerah	
	2028	Peluncuran resmi layanan digital tahap pertama, Integrasi lintas instansi, Peningkatan kapasitas jaringan & infrastruktur • 33 Kabupaten/Kota	Kesiapan Infrastruktur Internet di Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pengelolkaan nama domain dan sub domain penyelenggaraan pemerintah daerah dan nama domain pemerintah desa	
	2029	Optimalisasi user experience, Penyempurnaan kebijakan, regulasi, dan SOP, Pelaksanaan audit mutu dan keamanan sistem • 33 Kabupaten/Kota	Kesiapan Infrastruktur Internet, Kesiapan SDM di Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Koordinasi pemanfaatan pusat data nasional	
	2030	Optimalisasi user experience, Penyempurnaan kebijakan, regulasi, dan SOP, Pelaksanaan audit mutu dan keamanan sistem • 33 Kabupaten/Kota	Kesiapan Infrastruktur Internet, Kesiapan SDM di Kabupaten/Kota		

PHTC	Tahun	Rencana Aksi dan Lokasi Pelaksanaan	Dukungan Kabupaten/Kota	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	OPD Kab/Kota
5 a. Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi (INSTANSI)	2025	Progress pelaksanaan lelang dan Melakukan Uji mutu struktur, kualitas material, dan uji kelayakan fungsi jalan/jembatan •Kawasan Pertumbuhan : Kota Padangsidempuan Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Labuhanbatu Utara, Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Asahan Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi : Kab. Simalungun, Kab. Karo, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Tapanuli Utara Kab. Serdang Bedagai, Kab. Toba, Kab. Dairi Kawasan Afirmasi : Kab. Nias Utara, Kab. Nias, Kab. Nias Barat, Kota Gunungsitoli Target pembangunan tahun ini mencakup 103,23 km jalan dan 245,5 meter jembatan	Kabupaten/kota yang menjadi lokasi proyek akan terlibat aktif dalam koordinasi lapangan, penyediaan data lokal, dan dukungan administratif. Dalam rangka penyiapan dukungan RC.		
	2026	Progress pelaksanaan lelang dan Melakukan Uji mutu struktur, kualitas material, dan uji kelayakan fungsi jalan/jembatan • Kawasan Pertumbuhan : Kota Medan, Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Padang Lawas, Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi : Kab. Deli Serdang, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Batu Bara, Kab. Simalungun, Kab. Dairi, Kab. Tapanuli Tengah, Kota Padangsidempuan, Kota Sibolga, Kab. Karo, Kab. Asahan, Kab. Labuhanbatu, Kab. Labuhanbatu Utara, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Langkat, Kab. Toba, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Humbang Hasundutan Kawasan Afirmasi : Kab. Nias Selatan, kab. Nias Barat, Kab. Nias Utara, target: jalan 187,95 km jembatan 231,10 m.			

PHTC	Tahun	Rencana Aksi dan Lokasi Pelaksanaan	Dukungan Kabupaten/Kota	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	OPD Kab/Kota
	2027	Progress pelaksanaan lelang dan Melakukan Uji mutu struktur, kualitas material, dan uji kelayakan fungsi jalan/jembatan • Kawasan Pertumbuhan : Kota Padangsidempuan Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Asahan, Kab. Labuhanbatu, Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Padang Lawas, Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi : Kab. Toba, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Simalungun, Kab. Langkat, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Mandailing Natal, Kab. Pakpak Bharat serta target: jalan 120,10 km & jembatan 666,65 m			
	2028	Progress pelaksanaan lelang dan Melakukan Uji mutu struktur, kualitas material, dan uji kelayakan fungsi jalan/jembatan • Kawasan Pertumbuhan : Kota Padangsidempuan, Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Asahan, Kab. Labuhanbatu, Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Nias Utara Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi : Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Toba, serta target: jalan 105,60 km & jembatan 367,30 m			
	2029	Progress pelaksanaan lelang dan Melakukan Uji mutu struktur, kualitas material, dan uji kelayakan fungsi jalan/jembatan • Kawasan Komoditas Unggulan:Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Nias Utara, Kab. Asahan serta target: jalan 50,60 km & jembatan 122,30 m			

PHTC	Tahun	Rencana Aksi dan Lokasi Pelaksanaan	Dukungan Kabupaten/Kota	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	OPD Kab/Kota
	2030	Progress pelaksanaan lelang dan Melakukan Uji mutu struktur, kualitas material, dan uji kelayakan fungsi jalan/jembatan Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi : •Kab.Asahan serta target: jalan 43 km & jembatan 98,50 m			
b. Penguatan Infrastruktur Irigasi dan Sumber Air Pertanian untuk Mendukung Swasembada Pangan Berkelanjutan	2025	Rehabilitasi dan optimalisasi jaringan irigasi Pelaksanaan awal di 4 DI prioritas (Serdang Bedagai dan Asahan) dengan target 1.857 Ha.	- Dukungan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan jaringan irigasi tersier - sinergi antara pemerintah daerah, kelompok tani, dan BUMDes untuk pemeliharaan jaringan irigasi - Pembangunan embung, sumur bor, dan pompanisasi untuk sumber air cadangan. - Digitalisasi sistem irigasi (smart irrigation) berbasis sensor dan aplikasi. - Pemberdayaan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) untuk pengelolaan irigasi. - Integrasi dengan program ketahanan pangan daerah.		
	2026	Rehabilitasi dan optimalisasi jaringan irigasi target 6.776 Ha. •Batubara, Padang Lawas Utara, P.Siantar, Simalungun			
	2027	Rehabilitasi dan optimalisasi jaringan irigasi dengan target 3.175 Ha •Padang Lawas, langkat, Madina, Serdang Bedagai			
	2028	Rehabilitasi dan optimalisasi jaringan irigasi •Toba, Madina, Dairi, Deli Serdang			
	2029	Rehabilitasi dan optimalisasi jaringan irigasi •Simalungun, Deli Serdang, Padang Lawas			
	2030	-			

PHTC	Tahun	Rencana Aksi dan Lokasi Pelaksanaan	Dukungan Kabupaten/Kota	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	OPD Kab/Kota
c. Peningkatan Kualitas Permukiman Layak, Terjangkau, dan Inklusif melalui Penyediaan Hunian Murah serta dukungan terhadap pelaksanaan program 3 juta rumah	2025	- Menbentuk Tim Pelaksana, Anggaran Biaya - Survey Lokasi di setiap Kab/Kota - Membuat Nota Kesepahaman/Nota kerjasama dengan mitra terkait (REI dan Bank Sumut, dll) - Penyediaan data dan/atau informasi statistika MBR dan ASN Pemerintah Daerah - Pembangunan Fisik setiap Tahun - Mengevaluasi dampak program dan penataan lingkungan •Kab. Simalungun, Kab. Batubara, Kab. Labuhan batu Utara, Kab. Samosir, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Mandailing Natal, Kab. Nias Utara, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Tapanuli Tengah, Kota Pematang Siantar dan Kota Padang Sidimpuan	Bupati/Walikota: 1. Pendataan dan Validasi Calon Penerima (BNBA = by name by addres) 2. SK Kumuh yang dikeluarkan Bupati atau Wali Kota terkait wewenang Provinsi untuk luasan 10 – 15 Ha 3. SK Pokja Penanganan Kawasan Kumuh pada kabupaten/Kota Dinas yang Membidangi Perumahan Rakyat (di Kab/Kota): Pelaksana teknis utama di lapangan. Bertanggung jawab atas pendataan, verifikasi, penyaluran bantuan, pendampingan, monitoring, dan pelaporan langsung dari lokasi perbaikan.		
	2026	- Menbentuk Tim Pelaksana, Anggaran Biaya - Survey Lokasi di setiap Kab/Kota - Membuat Nota Kesepahaman/Nota kerjasama dengan mitra terkait (REI dan Bank Sumut, dll) - Penyediaan data dan/atau informasi statistika MBR dan ASN Pemerintah Daerah - Pembangunan Fisik setiap Tahun - Mengevaluasi dampak program dan penataan lingkungan •Kab. Labuhanbatu Selatan, Kab. Toba, Kab. Langkat, Kab. Nias Selatan, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Padang Lawas dan Kab. Padang Lawas Utara	Dinas PUPR Kabupaten/Kota: Memberikan bantuan teknis konstruksi, menyusun RAB, dan memberikan supervisi teknis kepada pelaksana di lapangan. Dinas Sosial Kabupaten/Kota: Membantu dalam pembaruan dan verifikasi data kemiskinan di tingkat lokal. Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan: Ujung tombak identifikasi awal calon penerima, sosialisasi langsung kepada masyarakat, memfasilitasi gotong royong, dan membantu monitoring di lapangan.	Program pengembangan perumahan dan Program Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir

PHTC	Tahun	Rencana Aksi dan Lokasi Pelaksanaan	Dukungan Kabupaten/Kota	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	OPD Kab/Kota
	2027	- Menbentuk Tim Pelaksana, Anggaran Biaya - Survey Lokasi di setiap Kab/Kota - Membuat Nota Kesepahaman/Nota kerjasama dengan mitra terkait (REI dan Bank Sumut, dll) - Penyediaan data dan/atau informasi statistika MBR dan ASN Pemerintah Daerah - Pembangunan Fisik setiap Tahun - Mengevaluasi dampak program dan penataan lingkungan •Kab. Mandailing Natal, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Labuhanbatu, Kab. Simalungun, Kab. Dairi, Kab. Samosir, Nias dan Nias Selatan		Kegiatan Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota dan Kegiatan Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha	Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Samosir
	2028	•Kab. - Menbentuk Tim Pelaksana, Anggaran Biaya - Survey Lokasi di setiap Kab/Kota - Membuat Nota Kesepahaman/Nota kerjasama dengan mitra terkait (REI dan Bank Sumut, dll) - Penyediaan data dan/atau informasi statistika MBR dan ASN Pemerintah Daerah - Pembangunan Fisik setiap Tahun - Mengevaluasi dampak program dan penataan lingkungan •Nias, Kab. Karo, Kab. Langkat, Kab. Nias Utara, Kota Tanjung Balai, Kota Pematang Siantar, Kab. Serdang Bedagai, Kota Medan, Labuhanbatu dan Labuhanbatu Utara		Sub Kegiatan Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	

PHTC	Tahun	Rencana Aksi dan Lokasi Pelaksanaan	Dukungan Kabupaten/Kota	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	OPD Kab/Kota
	2029	- Menbentuk Tim Pelaksana, Anggaran Biaya - Survey Lokasi di setiap Kab/Kota - Membuat Nota Kesepahaman/Nota kerjasama dengan mitra terkait (REI dan Bank Sumut, dll) - Penyediaan data dan/atau informasi statistika MBR dan ASN Pemerintah Daerah - Pembangunan Fisik setiap Tahun - Mengevaluasi dampak program dan penataan lingkungan •Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Nias Utara, Kab. Nias Barat, Kota Binjai, Kota Padangsidempuan, Kab. Batu Bara, Kab. Simalungun, Kota Tebing Tinggi, Humbang Hasundutan dan Kab. Toba		Sub Kegiatan Pelaksanaan pemugaran kawasan permukiman kumuh	
	2030	- Menbentuk Tim Pelaksana, Anggaran Biaya - Survey Lokasi di setiap Kab/Kota - Membuat Nota Kesepahaman/Nota kerjasama dengan mitra terkait (REI dan Bank Sumut, dll) - Penyediaan data dan/atau informasi statistika MBR dan ASN Pemerintah Daerah - Pembangunan Fisik setiap Tahun - Mengevaluasi dampak program dan penataan lingkungan •Kab. Asahan, Kota Tanjung Balai, Kab. Nias Selatan, Kab. Nias, Kota Gunungsitoli, Serdang Bedagai dan Tebing Tinggi		Sub Kegiatan Pelaksanaan pemugaran kawasan permukiman kumuh	
6. Bantuan Hukum dan perlindungan	2025	Penandatanganan Nota Kesepahaman, penetapan SK Tim, penyusunan panduan teknis pelaksanaan dan Sosialisasi program PRESTICE di 8 kab/kota	1. Penyediaan fasilitator, pembiayaan dan penyusunan data pendukung, serta integrasi dengan program perlindungan sosial lainnya di		

PHTC	Tahun	Rencana Aksi dan Lokasi Pelaksanaan	Dukungan Kabupaten/Kota	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	OPD Kab/Kota
rakyat melalui Restorative Justice (PRESTICE).	2026	Pelaksanaan awal PRESTICE di 15 kabupaten/kota, Pelatihan mediator tingkat kabupaten/kota dan pemutakhiran strategi tahun berikutnya, monev pelaksanaan kegiatan •15 Kabupaten/Kota (Padang Lawas Utara, Kab. Dairi, Kab. Simalungun, Kab. Asahan, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Labuhan Batu Utara, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Samosir, Kab. Toba, Kab. Labuhan Batu, Kab. Tapanuli Utara, Kota Tanjung Balai, Kota Sibolga, Kab. Labuhanbatu Selatan, Kab. Tapanuli Tengah)	daerah. 2. Pelaksanaan pelatihan mediator dilakukan sembari pemberian bantuan bantuan hukum 3. Replikasi Satgas Kabupaten/Kota 4. Pembangunan Posko Pengaduan	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dan Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir
	2027	Ekspansi pelaksanaan ke 20 kabupaten/kota, Pelatihan mediator gelombang kedua, monev pelaksanaan kegiatan •20 Kab/Kota (Kab. Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Kab. Nias Utara, Kab. Nias Barat, Kab. Nias, Kab. Nias Selatan, Kota Gunungsitoli, Kab. Mandailing Natal, Kab. Padang Lawas, Kota Medan, Kab. Deli Serdang, Kab. Langkat, Kab. Karo, Kab. Serdang Bedagai, Kota Tebing Tinggi, Kab. Batu Bara, Kota Pematang Siantar, Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Dairi, Kab. Simalungun)		Kegiatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota dan Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi hukum	
	2028	Perluasan wilayah ke 25 kabupaten/kota, Sosialisasi publik dan pelatihan mediator gelombang III, monev pelaksanaan kegiatan •25 Kabupaten/Kota (Kab. Asahan, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Labuhan Batu Utara, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Samosir, Kab. Toba, Kab. Labuhan Batu, Kab. Tapanuli Utara, Kota Tanjung Balai, Kota Sibolga, Kab. Labuhanbatu Selatan, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Kab. Nias Utara, Kab. Nias Barat, Kab. Nias, Kab. Nias Selatan, Kota Gunungsitoli, Kab. Mandailing Natal, Kab. Padang		sub kegiatan fasilitasi penataan,pemberdayaan dan pendaya gunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM dan Karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	

PHTC	Tahun	Rencana Aksi dan Lokasi Pelaksanaan	Dukungan Kabupaten/Kota	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	OPD Kab/Kota
		Lawas, Kota Medan, Kab. Deli Serdang, Kab. Langkat, Kab. Karo)			
	2029	33 Kabupaten Kota		sub kegiatan Fasilitasi penyusunan produk hukum daerah	
	2030	33 Kabupaten Kota		Sub Kegiatan Fasilitasi bantuan hukum	

Tabel 4.7 Dukungan Pemerintah Kabupaten Samosir terhadap Program Prioritas/Proyek Strategis Daerah (PSD)
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2030

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi Dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Samosir
			Utama	Pendukung	
PP1. PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM SEKOLAH UNGGULAN BERBASIS PENINGKATAN SKILL YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEBUTUHAN INDUSTRI DAN POTENSI WILAYAH DI TINGKAT LOKAL					
1. Pemenuhan 100% Fasilitas Listrik dan Layanan Internet pada Seluruh SMA/SMK/SLB di Sumatera Utara	2025	tidak ada	Dinas Pendidikan	Disperindag ESDM (pendampingan terhadap akses listrik), Dinas Kominfo (pendampingan terhadap akses internet dan publikasi kegiatan).	Ketersediaan dukungan lahan, akses jalan dan listrik serta Data pada SMA dan SMK di Kabupaten Samosir
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			
	2030	tidak ada			
2. Pembangunan 4 SMA/SMK/SLB Unggulan (Nias/SMA - 2026, Asahan/SMK - 2027, Samosir/SMK – 2028, Karo/SLB - 2029)	2025	tidak ada	Dinas Pendidikan	PUPR (Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi) Dinas Kominfo (Publikasi kegiatan)	Ketersediaan dukungan lahan, akses jalan dan listrik (SMA Negeri 1 Sianjurnmulamula, SMA Negeri 1 Harian dan SMKN I Simanindo) serta ketersediaan basis Data Siswa.
	2026	tidak ada			
	2027	Pembangunan fisik sekolah Unggulan SMKN 1 Tinggi Raja Asahan, Kajian Akademis dan Perencanaan Pembangunan sekolah unggulan SMKN 1 Pariwisata Samosir			
	2028	Pembangunan fisik sekolah unggulan SMKN 1 Pariwisata Samosir, Kajian Akademis dan Perencanaan			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi Dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Samosir
			Utama	Pendukung	
		Pembangunan sekolah unggulan SLB Alpha Omega Kab. Karo			
	2029	tidak ada			
	2030				
3. Rehabilitasi Ruang Kelas SMA/SMK/SLB sebanyak 490 Sekolah	2025	Pendataan valid rehab ruang kelas tahun 2026-2029 •Provinsi Sumatera Utara (Dokumen Aprasial)	Dinas Pendidikan	PUPR (Appraisal/Penilaian Kerusakan, Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi) Dinas Kominfo (Publikasi kegiatan)	Ketersediaan dukungan akses jalan dan listrik serta basis data SMA/SMK yang perlu direhab
	2026	Pelaksanaan Fisik Tahap I – 150 Ruang Kelas (2026) di 21 kab/kota •Medan, Binjai, Langkat, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Asahan, Tanjung Balai, Labuhanbatu, Pematangsiantar, Samosir, Toba, Sibolga, Padangsidempuan, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padangsidempuan, Padang Lawas Utara, Nias, Nias Selatan, Gunungsitoli, Nias Utara, Nias Barat			
	2027	Pelaksanaan Fisik Tahap II – 150 Ruang Kelas (2027) di 22 kab/kota • Medan, Binjai, Langkat, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Asahan, Tanjung Balai, Labuhanbatu, Pematangsiantar, Samosir, Toba, Sibolga, Padangsidempuan, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padangsidempuan, Padang Lawas Utara, Nias, Nias Selatan, Gunungsitoli, Nias Utara, Nias Barat			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi Dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Samosir
			Utama	Pendukung	
	2028	Pelaksanaan Fisik Tahap III – 190 Ruang Kelas (2028) di 28 kab/kota •Medan, Binjai, Langkat, Karo, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Dairi, Tebing Tinggi, Batu Bara, Asahan, Tanjung Balai, Labuhanbatu, Labura, Labusel, Simalungun, Pematangsiantar, Samosir, Toba, Humbahas, Taput, Tapsel, Tapteng, Sibolga, Padangsidimpuan, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padangsidimpuan, Padang Lawas			
	2029	Monitoring, Evaluasi & Pemutakhiran Data (2029)			
	2030				
4. Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Unit Sekolah Baru					
	2025	tidak ada	Dinas Pendidikan	PUPR (Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi) Dinas Kominfo (Publikasi kegiatan)	Ketersediaan dukungan lahan, akses jalan dan listrik . air bersih serta ketersediaan basis data sekolah untuk pembangunan Ruang Kelas baru.
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	Pembangunan RKB sebanyak 30 RKB di 13 kab/kota Binjai, Langkat, Tebing Tinggi, Pematangsiantar, Asahan, Tanjung Balai, Samosir, Toba, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Labuhanbatu, Labusel, Sibolga Pembangunan 2 Sekolah Baru			
2029	-				

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi Dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Samosir
			Utama	Pendukung	
05. Optimalisasi Sarana dan Prasarana BLK Provsu menuju BLK Tematik Bioindustri dan Pariwisata	2025	tidak ada	DISNAKER	Dinas Perindustrian Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral: Disperindag ESDM bersifat mendukung dan lintas sektor, bukan pelaksana utama pelatihan. Maka Disperindag ESDM mendukung proyek strategis BLK, sebagai berikut: • Menjadi penghubung antara pelaku industri/perusahaan dengan Disnaker dan BLK. • Memfasilitasi program magang industri dan penempatan lulus BKL ke industri lokal. • Disperindag ESDM dapat menjadi mitra dalam pengembangan program pelatihan vokasi di BLK melalui fasilitasi pelatihan berbasis proyek industri, penyediaan instruktur ahli dari sektor industri dan akses terhadap bantuan alat pelatihan. Dinas Pendidikan: Dinas Pendidikan memiliki peran dalam proyek strategis ini dalam hal pelatihan kerja, sebagai berikut: • Mendorong sinkronisasi kurikulum SMK/vokasi dengan skema pelatihan BLK agar lulusan SMK lebih siap kerja. • Memastikan kompetensi lulusan SMK sejalan dengan kebutuhan industri dan program <i>pelatihan BLK</i>. • Mengintegrasikan teaching factory di SMK dengan fasilitas pelatihan <i>BLK untuk</i> menciptakan ekosistem pelatihan dual system. • Mendorong peserta didik SMK mengikuti sertifikasi kompetensi melalui LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) yang terhubung dengan BLK. • Bersama Disnaker, mendata dan menyiapkan guru produktif/tenaga pelatih yang memenuhi standar	-Menyiapkan Sarana dan Prasarana melalui BLK dan memberikan penguatan pendidikan vokasi berstandar BNSP guna Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja -Menyiapkan data peserta program pelatihan
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029-2030	tidak ada			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi Dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Samosir
			Utama	Pendukung	
				pelatihan. Dinas Koperasi dan UMKM: • Mengintegrasikan hasil pelatihan BLK dengan program inkubasi usaha UMKM • Membina lulusan BLK agar mampu mengembangkan usaha mandiri berbasis keahlian yang telah diperoleh • Menyediakan pendampingan usaha lanjutan bagi peserta pelatihan BLK yang ingin berwirausaha • Menyediakan ruang inkubasi bisnis di sentra-sentra UMKM daerah yang terhubung dengan BLK • Membantu lulusan BLK yang berwirausaha dalam promosi dan digitalisasi produk melalui <i>E-commerce</i> dan platform digital UMKM. Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: • Menyediakan ruang promosi bagi hasil karya lulusan BLK di sektor kriya, kuliner, dan fesyen etnik melalui festival budaya, event pariwisata, serta platform pemasaran digital. • Menjalin kolaborasi dengan Disnaker untuk mendukung pengembangan ekosistem pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat dan budaya lokal melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan. • Memberikan dukungan fasilitasi uji kompetensi dan sertifikasi bagi peserta pelatihan BLK untuk meningkatkan daya saing dan kesiapan kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. • Bekerja sama dengan Disnaker dalam menyusun kurikulum pelatihan di BLK yang relevan dengan kebutuhan industri pariwisata dan subsektor ekonomi kreatif. Dinas Sosial:	

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi Dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Samosir
			Utama	Pendukung	
				• Menjangkau dan Memberdayakan Kelompok Rentan Sosial. • Integrasi Program Rehabilitasi Sosial dan Pelatihan Kerja. • Bersinergi dengan Disnaker dalam memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memastikan program pelatihan BLK tepat sasaran, terutama bagi warga miskin dan rentan sosial. • Melalui tenaga pekerja sosial, Dinas Sosial dapat melakukan pendampingan bagi peserta pelatihan selama dan setelah masa pelatihan, untuk memastikan mereka mampu menerapkan keterampilan yang diperoleh, baik untuk bekerja maupun memulai usaha secara mandiri. Badan Kepegawaiaan Daerah: • BKD berperan dalam mendukung ketersediaan ASN dengan kompetensi teknis dan manajerial yang relevan, untuk memperkuat kapasitas kelembagaan BLK, baik sebagai instruktur, tenaga administrasi, maupun pengelola program pelatihan. • Melakukan pemetaan dan perencanaan kebutuhan SDM aparatur di bidang pelatihan vokasional agar sejalan dengan arah pengembangan BLK, termasuk dalam pengadaan, rotasi, dan pengembangan karier ASN yang ditempatkan di unit-unit pelatihan. • BKD dapat mengintegrasikan program pelatihan teknis fungsional dan manajerial bagi ASN yang bertugas di lingkungan BLK ke dalam <i>rencana</i> pengembangan kompetensi tahunan, guna meningkatkan efektivitas dan kualitas layanan pelatihan. • Berperan dalam membangun sistem penilaian kinerja yang berbasis output dan dampak, termasuk	

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi Dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Samosir
			Utama	Pendukung	
				mengawasi efektivitas kinerja ASN di BLK dalam menyelenggarakan pelatihan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja. Kominfo: Dukungan Publikasi Kegiatan	
PP2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMUDA, DAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM BERKARYA DAN BERPRESTASI					
6. Liga Olahraga Pelajar Sumut Piala Gubernur Sumatera Utara Cabang Olahraga Sepak Bola dan Voli tahun 2026 - 2030	2025	1. Inisiasi dan konsolidasi melalui rapat rapat koordinasi tahun 2025 2. Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar 2025 • Provinsi Sumatera Utara	Dispora	Dinas Pendidikan/Cabang Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan (pembinaan, edukasi dan sosialisasi kepada pelajar untuk dapat menjadi atlet pelajar) Dinas Kominfo (Publikasi kegiatan)	- Melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan liga olahraga pelajar sumut untuk cabor sepak bola dan voli - Melaksanakan <i>side event</i> pada saat pelaksanaan liga olahraga (pameran UMKM) dan sejenisnya - Melaksanakan pendampingandan pembinaan pada olahraga pelajar
	2026	Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar 2026 Penguatan Pembinaan & Kemitraan Tahun 2026 • Provinsi Sumatera Utara			
	2027	Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar 2027 Penguatan Pembinaan & Kemitraan Tahun 2027 • Provinsi Sumatera Utara			
	2028	Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar 2028 Penguatan Pembinaan & Kemitraan Tahun 2028 • Provinsi Sumatera Utara			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi Dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Samosir
			Utama	Pendukung	
	2029	Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar 2029 Penguatan Pembinaan & Kemitraan Tahun 2029 • Provinsi Sumatera Utara			
	2030	Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar 2030 Penguatan Pembinaan & Kemitraan Tahun 2030 Penguatan Legacy & Keberlanjutan Tahun 2030 • Provinsi Sumatera Utara			
7. Pekan Olahraga Paralimpik Pelajar Sumatera Utara pada Cabang Olahraga Atletik Tahun 2026 - 2030	2025	Inisiasi konsolidasi melalui pertemuan koordinasi Tahun 2025 • Kota Medan dan Kab Deli Serdang	Dispora	Dinas pendidikan / Cabang Dinas Pendidikan (Edukasi dan Sosialisasi bagi Pelajar Difabel untuk dapat mendata dan membina atlet sesuai potensi dan minat siswa) Dinas Kominfo (Publikasi kegiatan)	Melakukan perekrutan dan pembinaan para atlet disabilitas di Kabupaten Samosir
	2026	1. Pelaksanaan Pekan paralimpik pelajar daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Cabang Olahraga para atletik tahun 2026 2. Perluasan Partisipasi & Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2026-2027 •Kota Medan dan Kab. Deli Serdang			
	2027	1. Pelaksanaan Pekan paralimpik pelajar daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Cabang Olahraga para atletik tahun 2027 2. Perluasan Partisipasi & Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2027-2028 •Kota Medan dan Kab. Deli Serdang			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi Dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Samosir
			Utama	Pendukung	
	2028	1. Pelaksanaan Pekan paralimpik pelajar daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Cabang Olahraga para atletik tahun 2028 2. Perluasan Partisipasi & Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2028-2029 •Kota Medan dan Kab. Deli Serdang			
	2029	1. Pelaksanaan Pekan paralimpik pelajar daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Cabang Olahraga para atletik tahun 2029 2. Perluasan Partisipasi & Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2029-2030 •Kota Medan dan Kab. Deli Serdang			
	2030	1. Pelaksanaan Pekan paralimpik pelajar daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Cabang Olahraga para atletik tahun 2030 2. Perluasan Partisipasi & Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2030 •Kota Medan dan Kab. Deli Serdang			
PP 3 KESEHATAN YANG TERINTEGRASI DI BEBERAPA TITIK KAWASAN YANG MENJADI SENTRA LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT TERPADU					
8. Digitalisasi sistem kesehatan terintegrasi (<i>Sumut e-Health Integration system</i>)	2025	Penyusunan Kajian dan Bisnis Proses Platform e-Health Integration System Tahun 2025 Pembangunan Aplikasi Tahun 2025 <i>Launching Aplikasi Sumut e-Health</i>	Dinas Kesehatan	Dinas Kominfo (Penyediaan Web, Server dan Publikasi Kegiatan)	-Menyediakan data kepesertaan JKN kab Samosir -Melakukan Sosialisasi dan edukasi

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi Dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Samosir
			Utama	Pendukung	
		Integration System Tahun 2025 •33 Kabupaten/Kota			platform kepada faskes tingkat kab Samosir
	2026	Edukasi penggunaan Aplikasi ke Masyarakat Tahun 2026 Pengembangan Aplikasi <i>Sumut e-Health Integration System</i> Tahun 2026-2029 33 Kabupaten/Kota			
	2027	Edukasi penggunaan Aplikasi ke Masyarakat Tahun 2027 Pengembangan Aplikasi <i>Sumut e-Health Integration System</i> Tahun 2026-2029 33 Kabupaten/Kota			
	2028	Edukasi penggunaan Aplikasi ke Masyarakat Tahun 2028 Pengembangan Aplikasi <i>Sumut e-Health Integration System</i> Tahun 2026-2029 33 Kabupaten/Kota			
	2029	Edukasi penggunaan Aplikasi ke Masyarakat Tahun 2029 Pengembangan Aplikasi <i>Sumut e-Health Integration System</i> Tahun 2026-2029 33 Kabupaten/Kota			
	2030	"-			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi Dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Samosir
			Utama	Pendukung	
9. Beasiswa Ikatan Dinas bagi Dokter Spesialis dan dokter spesialis residen di Wilayah Kurang Terlayani (2025 – 2030)	2025	- Pemenuhan Dokter Spesialis melalui pemberian beasiswa bekerja sama dengan Perguruan Tinggi yakni USU dan UGM - Distribusi Dokter Spesialis sebagai upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Primer dan Rujukan melalui dokter residen (Layanan MedisMerata) Tahun 2025-2030 •DTPK di Kepulauan Nias (6 RSUD di 3 Kabupaten) RSUD Nias Selatan (3 Orang), RSUD Tafaeri Nias Utara (6 Orang), RSUD Pratama Kab. Nias Barat (5 Orang), RSUD Pratama Lologolu Soguna Bazato Nias Barat (4 Orang). RSUD KJSU Unggulan RSUD Drs. Hadrianus Sinaga Samosir, Kab. Samosir, RSUD Sipirok Kab. Tapanuli Selatan, RSUD Lausimomo UPT Dinkes	Dinas Kesehatan	Badan Kepegawaian (Pelaksanaan assesmen kompetensi dokter spesialis sesuai kebutuhan, Pembinaan Monitoring kepada Badan Kepegawaian kab/kota agar Dokter Spesialis yang sudah dididik tidak berpindah tempat kerja) Biro Pemotda (Fasilitasi Penyusunan Dokumen kerja sama dengan USU dan UGM) Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	• Penyediaan data dokter umum yang memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh beasiswa dokter spesialis dan identifikasi jenis dan jumlah spesialis yang dibutuhkan di RSUD atau faskes daerah • Penyiapan surat komitmen bersama dengan para Bupati/Wali Kota yang menyatakan bahwa peserta dokter spesialis akan kembali ke daerah asal dan RSUD setempat • Penentuan jenis spesialis yang paling dibutuhkan • Kesiapan Sarana dan Prasarana RSUD • Penyiapan Surat Penugasan & Dukungan Legal Formal • Penyediaan Akomodasi dokter residen
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi Dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Samosir
			Utama	Pendukung	
	2029	- Pemenuhan dokter spesialis melalui pemberian beasiswa bekerja sama dengan Perguruan Tinggi yakni USU dan UGM - Distribusi dokter spesialis sebagai upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Primer dan Rujukan melalui dokter residen (Layanan MedisMerata) Tahun 2025-2030 •RSU Pirngadi Kota Medan, RSUD dr. Hadrianus Sinaga Kab. Samosir, RSUD Drs. H. Amri Tambunan Deli Serdang, RSUD Perdagangan Kab. Simalungun, RSUD Penyabungan Kab. Mandailing Natal, RSUD Porsea Kab. Toba, RSUD Pintupadang Kab. Tapsel, RSUD dr. Husni Thamrin Kab. Mandailing Natal, RSUD Tafaeri Kab. Nias Utara, RSUD Pratama Lologulu Soguna Bazato Kab. Nias Barat, RSUD Nias Selatan, RSUD Kabupaten Nias Barat			
	2030	- Pemenuhan dokter spesialis melalui pemberian beasiswa bekerja sama dengan Perguruan Tinggi yakni USU dan UGM - Distribusi dokter spesialis sebagai upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Primer dan Rujukan melalui dokter residen (Layanan MedisMerata) Tahun 2025-2030 •kab/kota yang terintervensi pada tahun 2026, 2027, 2028 dan 2029			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi Dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Samosir
			Utama	Pendukung	
10. Dukungan Pengembangan Rumah Sakit Unggulan (Pengembangan Rumah Sakit Unggulan dan Pemenuhan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan)	2025	-	Dinas Kesehatan	PUPR (Manajamen Konstruksi, Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi) Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	- Penyediaan Lahan dan Dokumen Legalitas clear and clean - Penyediaan tenaga non-medis, mendukung rekrutmen tenaga kesehatan, dan pemeliharaan fasilitas - Koordinasi Lintas Pemerintahan
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			
	2030				-
PP4 PEMBERANTASAN KEMISKINAN MELALUI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RENTAN SECARA MENYELURUH DAN TEPAT SASARAN					
11. Bantuan Sosial Produktif melalui Program Masyarakat Produktif (MAPRO).	2025	tidak ada	Dinas Sosial	Disperindag dan Dinas Koperasi UMKM (Dukungan Pelatihan dan Pendampingan bagi sasaran kegiatan Mapro yaitu KUBe dan UEP, fasilitasi keikutsertaan Kelompok Usaha Bersama/Usaha Ekonomi Produktif Mapro dalam pameran/expo yang dilaksanakan oleh Dinas) Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	- Pemberikan Dukungan Data dengan melakukan penjajakan calon penerima bantuan agar tepat sasaran. -Pelaksanaan koordinasi penyiapan kegiatan pelatihan bagi calon penerima bantuan di kab Samosir. - Pembuatan Replikasi kegiatan serupa di kab Samosir
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			
	2030				

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi Dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Samosir
			Utama	Pendukung	
12. Pelaksanaan Program Pasar Murah Bergerak (PMB)	2025	Identifikasi kebutuhan dan lokasi sasaran (IHK, P3KE, desa rentan pangan, dan wilayah 3T); Penentuan komoditas & harga jual; Penyusunan Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) Pasar Murah Bergerak (PMB); Koordinasi dan Kemitraan dengan TPID, BULOG, CSR, Distributor, Pengusaha daerah/koperasi/bumdes, Pemerintah kab/kota; Penentuan jadwal & titik lokasi; Pelaksanaan Pasar Murah Bergerak (PMB)	DISPERINDA G ESDM	• Dinas TPH : Data pangan strategis dan penyediaan stok • Dinas Perhubungan : Transportasi logistik • Dinas Sosial : Data P3KE <i>by name by address</i> (untuk menentukan titik titik PMB dilakukan) • Dinas Koperasi & UMKM : Pelibatan UMKM dan Koperasi dalam penyediaan stok • Biro Perekonomian : pelibatan TPID untuk menghitung dampak terhadap pengendalian inflasi • Dinas Kominfo : Publikasi Pelaksanaan • Bappelitbang: Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan • Inspektorat : Pengawasan Pelaksanaan	Penyediaan data 1. Pendataan kecamatan dan jumlah penduduk miskin dan rawan miskin; 2. Pendataan jumlah KUMKM penyedia Bahan Kebutuhan Pokok; 3. Pengawasan distribusi dan harga bahan kebutuhan pokok; 4. kerja sama antar kabupaten dalam penyediaan Bahan Kebutuhan Pokok 5. Penyediaan lokasi untuk pelaksanaan; 6. Monitoring dan evaluasi
		tidak ada			
	2026	Konsolidasi kelembagaan, integrasi sistem informasi daerah; Pelaksanaan Pasar Murah Bergerak (PMB)			
		Lokasi: Mandailing Natal (kemiskinan struktural), Tapanuli Utara (akses terbatas), Nias Barat (isolasi logistik), Humbahas (wilayah dataran tinggi), Pakpak Bharat (akses sangat terbatas), Dairi (wilayah perbatasan), Kab. Batu Bara (wilayah pesisir), Toba (hinterland), Samosir (wilayah tertutup), Labuhanbatu Selatan (kemiskinan tinggi), Nias Selatan (akses sulit), Padang Lawas (rawan logistik), Padang Lawas Utara (wilayah sulit distribusi), Tapanuli Tengah (akses dan harga tinggi), Langkat (distribusi padat dan IHK)			
	2027	Pelaksanaan Pasar Murah Bergerak (PMB) • 15 Kabupaten/Kota			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi Dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Samosir
			Utama	Pendukung	
		Lokasi; Karo (rawan inflasi sayur), Deli Serdang (kontributor IHK), Mandailing Natal (kemiskinan ekstrem), Humbahas (akses distribusi sulit), Tapanuli Tengah (harga fluktuatif), Toba (wilayah pegunungan), Nias Barat (daerah pulau terluar), Padang Lawas (akses distribusi), Nias Utara (rawan kemiskinan), Nias Selatan (akses logistik laut), Langkat (wilayah Pantai Timur), Samosir (pulau tengah danau), Serdang Bedagai (penyangga distribusi), Tapanuli Selatan (akses transportasi terbatas), Simalungun (wilayah padat penduduk)			
	2028	Pelaksanaan Pasar Murah Bergerak (PMB) • 15 Kabupaten/Kota			
		tidak ada			
	2029	Pelaksanaan Pasar Murah Bergerak (PMB) • 15 Kabupaten/Kota			
		Tebing Tinggi (kota IHK baru), Binjai (urban miskin), Toba (wilayah distribusi luas), Langkat (wilayah perbatasan), Samosir (akses logistik air), Pakpak Bharat (akses sangat terbatas), Humbahas (wilayah dataran tinggi), Tapanuli Tengah (harga fluktuatif), Mandailing Natal (kemiskinan struktural), Padang Lawas (akses distribusi sulit), Deli Serdang (wilayah IHK), Karo (rawan inflasi hortikultura), Nias Selatan (logistik laut), Simalungun (distribusi lintas kabupaten), Asahan (wilayah urban pertanian)			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi Dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Samosir
			Utama	Pendukung	
	2030	Pelaksanaan Pasar Murah Bergerak (PMB) • 15 Kabupaten/Kota Medan (pusat IHK), Tebing Tinggi (akses perdagangan), Pematangsiantar (wilayah urban), Padangsidimpuan (akses logistik terbatas), Gunungsitoli (pulau terluar), Dairi (wilayah perbatasan), Tapanuli Tengah (kontributor inflasi lokal), Toba (pariwisata dan pertanian), Mandailing Natal (daerah rawan kemiskinan), Nias Barat (akses sulit), Labusel (wilayah miskin), Humbahas (akses dataran tinggi), Langkat (wilayah distribusi utama), Samosir (pulau tengah danau), Serdang Bedagai (penyangga Medan)			
13. Perlindungan Sosial bagi Tenaga Kerja Rentan (Subsidi BPJS Ketenagakerjaan)	2025	1. Pendataan dan verifikasi 2. Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan (Pekerja rentan yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja dibawah standar) sebanyak 21.000 (APBD dan DBH Sawit) 3. Penguatan peran dan komitmen kabupaten/kota dalam pembiayaan dan regulasi (MoU Pemprovsum dengan Kabupaten dan Kota) -33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara informal prioritas Masyarakat miskin ekstrem di Desil 1 dan 2)	DISNAKER	• Dinas Sosial • Dinas Sosial berperan dalam memberikan data dukung DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) untuk memastikan penerima termasuk dalam kategori penerima bantuan. • Pendataan dan Validasi Calon Penerima, Mengelola dan memutakhirkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai dasar penetapan penerima bantuan iuran BPJS. • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil • Penyediaan dan Verifikasi Data Identitas	Penyiapan data 1. Pendukung pelaksanaan agar bisa mencapai target <i>Universal Coverage Jamsostek</i> (UCJ) sebesar 60% sesuai RPJMD 2025-2029 2. Pemberian sosialisasi untuk masyarakat, khususnya untuk tenaga kerja rentan dan masyarakat yang berada di garis kemiskinan 3. Pengalokasian DBH sawit dan APBD dengan persentase pembagian 80 persen kab/kota dan 20 persen provinsi utk

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi Dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Samosir
			Utama	Pendukung	
	2026	Perluasan kepesertaan pekerja rentan di sektor informal sebanyak 44.645 dengan skema penganggaran 20% Provinsi dan 80% kab/kota -33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara informal prioritas Masyarakat miskin ekstrem di Desil 1 dan 2		• Menyediakan data kependudukan yang valid (NIK, KK, KTP) sebagai prasyarat utama pendaftaran peserta BPJS Ketenagakerjaan. • Melakukan verifikasi dan sinkronisasi data dengan sistem BPJS, DTKS (Dinas Sosial), dan lembaga lain untuk memastikan data pekerja rentan terverifikasi secara administratif. • Dukungan Pemutakhiran Data DTKS, Bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk memastikan kesesuaian dan kelengkapan data identitas dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), yang digunakan untuk menetapkan penerima bantuan iuran BPJS. • Membantu mempercepat proses registrasi atau koreksi data calon penerima manfaat yang belum memiliki dokumen kependudukan lengkap.	perlindungan pekerja rentan miskin ekstrem desil 1 dan 2
	2027	Pembayaran kepesertaan pekerja rentan di sektor informal sebanyak 44.646 dengan skema penganggaran 20% Provinsi dan 80% kab/kota -33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara informal prioritas Masyarakat miskin ekstrem di Desil 1 dan 2			
	2028	Pembayaran kepesertaan pekerja rentan di sektor informal sebanyak 44.647 dengan skema penganggaran 20% Provinsi dan 80% kab/kota -33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara informal prioritas Masyarakat miskin ekstrem di Desil 1 dan 2			
	2029	Pembayaran kepesertaan pekerja rentan di sektor informal sebanyak 44.648 dengan skema penganggaran 20% Provinsi dan 80% kab/kota -33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara informal prioritas Masyarakat miskin ekstrem di Desil 1 dan 2			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi Dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Samosir
			Utama	Pendukung	
	2030	1. Pembayaran kepesertaan pekerja rentan di sektor informal sebanyak 44.648 dengan skema penganggaran 20% Provinsi dan 80% kab/kota 2. Evaluasi menyeluruh dan pencapaian target cakupan 60% UCJ -33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara			
14. Revitalisasi, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Panti Sosial Provinsi	2025	tidak ada		PUPR (Dokumen appraisal, pendampingan, monitoring dan evaluasi untuk revitalisasi panti sosial) Disperindag, Dinas Koperasi UMKM, Disnaker (Dukungan Pelatihan dan Keterampilan Kerja bagi sasaran Penghuni Panti) Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	- Kabupaten Samosir mendukung pelaksanaan pelatihan bimbingan mental, dan pendidikan paket A/B/C bagi penerima manfaat yang dirujuk dari panti sosial provinsi khususnya panti anak dan remaja - Kabupaten Samosir bersama Provinsi melakukan pemantauan, evaluasi atas keberlanjutan penerima manfaat.
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			
	2030	tidak ada			
PP 5 PENGUATAN STABILITAS MAKRO EKONOMI DAN KESINAMBUNGAN FISKAL DAERAH					
	2025	KEK Pertanian tidak ada	DISBUDPARE KRAF DAN	• Bappelitbang : Menyelaraskan rencana pengajuan KEK Pariwisata dan Pertanian dengan RPJMD, RTRW,	2025: 'Dukungan kab/kota untuk Pengembangan KEK Pariwisata

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi Dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Samosir
			Utama	Pendukung	
15. Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Pertanian dan pariwisata		KEK Pariwisata : Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba 1. Penentuan lokasi pengusulan KEK Pariwisata 2. Pengusulan KEK Pariwisata melalui proses kelengkapan dokumen: a. Tata lokasi b. Rencana tata ruang KEK c. Rencana sumber pembiayaan d. Studi kelayakan ekonomi penguasaan lahan 50% e. Persetujuan Pemkab	DINAS KETAPANG TPH	RPJPD, dan RIPPARNAS/RIPPARDA , Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan • Dinas Lingkungan Hidup : Kajian AMDAL dan pengelolaan lingkungan • Dinas Ketenagakerjaan : Peningkatan Capacity Building Pariwisata dan Pertanian • Dinas Pendidikan : Penguatan Vokasi SMK Pariwisata dan Pertanian • Dinas PUPR : Percepatan Perda RTRW Perubahan, sinkronisasi lokasi KEK pada RTRW • Dinas Kominfo : Dukungan Publikasi Kegiatan • Biro Hukum : Penetapan Regulasi Perda/Pergub • DPMPTSP : fasilitasi perizinan	Koordinasi terkait rencana pengajuan DPSP Danau Toba menjadi KEK 2026: '• Persetujuan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kawasan Danau Toba dan Penetapan Lokasi • Penertapan Pebup RTRW; Kesesuaian Dokumen RTRW dan RDTR 2027: '• Penyediaan Lahan (Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang KEK dalam hal terdapat lahan yang belum dibebaskan) • Peningkatan infrastruktur kewenangan kabupaten (jalan, air, sarana persampahan, sanitasi) • Kemudahan Perizinan Usaha Kewenangan kab/kota 2028: '• Peningkatan SDM Pariwisata dan Pertanian '• Penyediaan Lahan '• Peningkatan Infrastruktur kewenangan kab/kota • Kemudahan Perizinan Usaha Kewenangan kab/kota 2029: '• Peningkatan SDM Pariwisata '• Penyediaan Lahan '• Peningkatan Infrastruktur kewenangan kab/kota • Kemudahan Perizinan Usaha Kewenangan kab/kota
	2026	KEK Pertanian tidak ada			
		KEK Pariwisata: Penyusunan Kajian Peningkatan Status KSPN Danau Toba menjadi KEK Pariwisata dan Penyusunan Masterplan 1. Penentuan lokasi pengusulan KEK Pariwisata 2. Pengusulan KEK Pariwisata melalui proses kelengkapan dokumen: a. Tata lokasi b. Rencana tata ruang KEK c. Rencana sumber pembiayaan d. Studi kelayakan ekonomi penguasaan lahan 50% e. Persetujuan Pemkab 3. Pembentukan kelembagaan badan usaha pengelolaan KEK			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi Dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Samosir
			Utama	Pendukung	
	2027	KEK Pertanian tidak ada			• Promosi Investasi 2030: ' • Peningkatan SDM Pariwisata dan Pertanian '• Penyediaan Lahan '• Peningkatan Infrastruktur kewenangan kab/kota • Kemudahan Perizinan Usaha Kewenangan kab/kota • Promosi Investasi
		KEK Pariwisata Danau Toba : 1. Penyusunan Prosedur dan Persyaratan (Menyediakan lahan dengan luas minimal 50% dari area yang diusulkan, sesuai dengan RTRW dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung); Kelengkapan Dokumen (Peta lokasi ;Rencana tata ruang KEK; Rencana dan sumber pembiayaan; Persetujuan lingkungan; Jangka waktu beroperasinya KEK dan rencana strategis pengembangan KEK; Bukti penguasaan lahan paling sedikit 50% dari rencana; Persetujuan Pemerintah Kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi. 2. Peningkatan kapasitas SDM Lokal			
	2028	KEK Pertanian tidak ada			
		KEK Pariwisata Danau Toba : 1. Mekanisme Proses Pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus (Pemerintah Daerah / Badan Usaha mengajukan surat usulan kepada Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus; Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK melakukan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen usulan; Dewan Nasional KEK melakukan kajian pemenuhan kriteria lokasi dan kebenaran dan kelayakan isi dokumen			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi Dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Samosir
			Utama	Pendukung	
		yang dipersyaratkan; Berdasarkan hasil kajian, Dewan Nasional 2. Kolaborasi dengan perguruan tinggi dan BLK Tematik 3. Perluasan badan usaha pengelolaan KEK dengan BUMN, Swasta dan Investor potensial			
	2029	KEK Pertanian tidak ada			
		KEK Pariwisata 1. Peningkatan kapasitas pelaku UMKM dan Industri pariwisata sekitar kawasan KEK 2. Pembangunan infrastruktur dasar di kawasan KEK dan infrastruktur pendukung (jalan)			
	2030	KEK Pertanian tidak ada			
		KEK Pariwisata: Promosi dan Investasi untuk meningkatkan occupancy investor di KEK Pariwisata Danau Toba			
16. Penguatan Hilirisasi Komoditas Unggulan di Kawasan Industri Sumatera Utara	2025	tidak ada	DISPERINDA G ESDM	• Dinas TPH : Peningkatan Produksi Cabe melalui Sarprodi; Pemberian Bibit Cabai varietas tahan hama & cocok untuk pengeringan, <i>capacity building</i> bagi petani • Dinas Perkebunan dan Peternakan : Peningkatan Produksi Kelapa, Aren dan Kopi melalui Sarprodi; Pemberian Bibit Kelapa genjah, Kopi Unggu, Aren, <i>capacity building</i> bagi petani • Dinas PUPR : Penguatan Infrastruktur Jalan dan	Dukungan kab Samosir: • Menyediakan Data IKM sektor Kopi, Kelapa, Aren, Cabe
		tidak ada			Melakukan Peningkatan <i>capacity building</i> pada IKM (kelapa, cabe, kopi, aren); menyusun regulasi pengembangan hilirisasi,
	2026	tidak ada			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi Dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Samosir
			Utama	Pendukung	
	2027	tidak ada		Jembatan Dinas Kominfo : Dukungan Publikasi Kegiatan	Penguatan kemitraan hilirisasi antar kab/kota. Pemasaran, dukungan promosi, capacity buliding diversivikasi produk hilirisasi , Penyediaan Rumah kemasan oleh kab Samosir
	2028	tidak ada			Menentukan IKM yang akan dilakukan <i>capacity building</i> , menyusun regulasi pengembangan hilirisasi, penguatan kemitraan hilirisasi antar kab/kota, peningkatan akses pembiayaan melalui KUR atau Koperasi, fasilitasi <i>capacity building</i> standarisasi ekspor bagi pelaku IKM.
	2029	tidak ada			Dukungan pembiayaan KUR , identifikasi IKM berpotensi untuk dilakukan <i>business matching</i> .
	2030	tidak ada			Branding Ekspor
17. BUMD Reform Program (Penguatan Peran BUMD sebagai Motor Ekonomi)	2025	tidak ada	-	Bappelitbang: Penyusunan konsep dan perencanaan kesehatan BUMD, GCG Biro Hukum : percepatan fasilitasi regulasi Biro PemOtda : Fasilitasi Kerja sama Diskominfo : Publikasi Kegiatan Inspektorat : Audit BUMD	-
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			
	2030	tidak ada			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi Dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Samosir
			Utama	Pendukung	
18. Pemanfaatan Aset barang milik daerah melalui kerja sama ekonomi	2025	• Inventarisasi Barang Milik Daerah yang belum optimal, serta potensi pemanfaatan • Penyusunan skema/proses bisnis pemanfaatan aset BMD • Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil investarisasi • Proses digitalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah	BKAD	Bapenda Provsu : Dukungan dalam proses bisnis pendapatan melalui pemafaatan aset BMD dengan kerja sama ekonomi Bappelitbang Provsu : Dukungan dalam penyusunan konsep dan perencanaan Diskominfo : Dukungan dalam penyediaan web aplikasi dan promosi OPD Pengguna BMD : Dukungan dalam inventarisir dan pengamanan aset serta pemeliharaan BMD	Dukungan Pemerintah kab Samosir pada pelaksanaan pengamanan BMD dalam penerbitan SKT lahan (Surat Keterangan Kepemilikan Lahan) dari Pemerintah Setempat (Kelurahan atau Kepala Desa)
	2026	• Pemanfaatan aset Barang Milik Daerah yang berdasarkan hasil inventarisasi (target 2 BMD yang termanfaatkan) • Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil investarisasi • Penyusunan Regulasi penggunaan web aplikasi pemanfaatan Barang Milik Daerah • Peningkatan kapasitas dan kuantitas SDM penilai barang			
	2027	•Pemanfaatan aset Barang Milik Daerah yang berdasarkan hasil inventarisasi (target 2 BMD yang termanfaatkan) • Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil investarisasi • Pengembangan skema peman faatan Barang Milik Daerah • Pengembangan sistem informasi atau promosi			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi Dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Samosir
			Utama	Pendukung	
	2028	• Pemanfaatan aset Barang Milik Daerah yang berdasarkan hasil inventarisasi (target 2 BMD yang termanfaatkan) • Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil investarisasi • Penguatan kemitraan dalam perluasan pemanfaatan Barang Milik Daerah termasuk kerja sama dengan platform lain			
	2029	• Pemanfaatan aset Barang Milik Daerah yang berdasarkan hasil inventarisasi (target 2 BMD yang termanfaatkan) • Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil investarisasi •Penguatan kemitraan dalam perluasan pemanfaatan Barang Milik Daerah termasuk kerja sama dengan platform lain (kerja sama dengan 1 Platform) • Evaluasi dan Monitoring secara berkala terhadap Pemanfaatan Barang Milik Daerah produktif berkelanjutan			
	2030	• Pemanfaatan aset Barang Milik Daerah yang berdasarkan hasil inventarisasi (target 2 BMD yang termanfaatkan) • Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil investarisasi • Evaluasi dan Monitoring secara berkala terhadap Pemanfaatan Barang Milik Daerah melalui kerja sama ekonomi berkelanjutan			
PP.6 PENGEMBANGAN EKONOMI HIJAU DAN BIRU					

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi Dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Samosir
			Utama	Pendukung	
19. Pengembangan Kawasan Perkebunan (Kelapa, Kopi, Aren)	2025	tidak ada	DISBUNAK	1. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Provinsi Sumatera Utara: memberikan pelatihan pengemasan izin edar hasil produk, pelatihan pengemasan produk dan sertifikasi halal serta pemberian alat untuk mengolah hasil produksi dalam rangka hilirisasi hasil Perkebunan kelapa seperti alat untuk menjadikan air kelapa menjadi minyak kelapa/VCO, dan <i>coconut milk</i> , kemudian biji kopi menjadi kopi bubuk dan kopi ekstrak, kemudian aren menjadi gula aren dan bioetanol 2. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara: pembentukan dan pelatihan UMKM bagi kelompok pekebun dan alat pengolah hasil produksi kelapa, kopi dan aren; 3. Dinas PMD Dukcapil: untuk pembentukan dan pemberdayaan BUMDes di lokasi intervensi pengembangan kawasan perkebunan 4. Diskominfo: untuk publikasi media	Menyiapkan 1. Dukungan data CPCL di lokasi intervensi 2. Melakukan Pembinaan dan pelatihan peningkatan produksi atau peningkatan pasca produksi di lokasi intervensi pengembangan kawasan perkebunan
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			
	2030	tidak ada			
20. Pengembangan Kawasan Unggulan Perikanan Tangkap dan Budidaya	2025	tidak ada	DISKANLA	• Dinas Perindustrian dan Perdagangan – Pengolahan, pemasaran, dan ekspor produk perikanan. • Dinas Koperasi dan UKM – Penguatan kelembagaan usaha nelayan/pembudidaya. • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang – Pembangunan infrastruktur pendukung (jalan dan pelabuhan). • Dinas Kominfo: Publikasi, sosialisasi, dan edukasi masyarakat	menyiapkan: - Pendataan kelompok nelayan dan pembudidaya kab Samosir - Klasterisasi Kawasan - Sosialisasi dan Edukasi - Melakukan Replikasi di daerah yang sama
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			
	2030	tidak ada			
	2025	tidak ada	DISKANLA		

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi Dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Samosir
			Utama	Pendukung	
21. Pengawasan Konservasi Laut SEMESTA (Pemberdayaan Nelayan Sebagai Pasukan Penjaga Laut)	2026	tidak ada		• BAPPELITBANG : Integrasi program SEMESTA dalam perencanaan daerah. • Dinas Lingkungan Hidup Provsu : Kebijakan dan pemantauan kualitas lingkungan laut. • Dinas Perhubungan Provsu : Dukungan transportasi laut dan keselamatan pelayaran patroli. • Satpol PP Provsu : Penegakan perda terkait konservasi laut. • Dinas Pariwisata Provsu : Sinergi dengan wisata bahari berkelanjutan. • Dinas Kominfo Provsu : Publikasi, sosialisasi, dan edukasi masyarakat. • Dinas Koperasi & UKM Provsu : Penguatan kelembagaan nelayan pengawas. • Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provsu : Kesiapsiagaan dan tanggap darurat di laut. • Inspektorat: Pengawasan dan pendampingan jalannya program	menyiapkan: - Pendataan Nelayan kab Samosir - Klasterisasi Kawasan - Sosialisasi dan Edukasi kepada masyarakat
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			
	2030	tidak ada			
22. Rehabilitasi Mangrove dan Pesisir berbasis Masyarakat	2025	tidak ada	DLHK	1. Dinas Kominfo - Media massa - Publikasi kegiatan 2. Kementerian Kehutanan - Penyediaan Regulasi - Koordinasi program-program	Melakukan dan Mempersiapkan diantaranya: 1. Kolaborasi <i>Multistakeholder</i> dalam kegiatan 2. Pemberdayaan Masyarakat: Program rehabilitasi yang sukses tidak hanya tentang menanam pohon, tapi juga tentang memberdayakan masyarakat. 3. Membantu dalam proses pengadaan lahan dan memastikan status hukum lahan tersebut jelas 4. Pemerintah kabupaten melakukan
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			
	2030	tidak ada			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi Dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Samosir
			Utama	Pendukung	
					pemantauan dan pemeliharaan secara berkala untuk memastikan pertumbuhan mangrove berjalan baik dan program mencapai tujuannya.
23. Pengembangan Energi Baru Terbarukan (PLTS Pompa Air Untuk Irigasi Pertanian/PLTA Mikrohidro dan lainnya)	2025	Survei Lokasi terkait PLTS Pompa Air/PLTA Mikro Hidro; Persiapan dan pemilihan penyedia melalui tender oleh Pokja ULP, penandatanganan kontrak, pembangunan dan pengawasan PLTS pompa air/PLTA Mikrohidro , hingga serah terima pekerjaan (BAST) ke pemanfaatan - 1 unit Kecamatan Onan Runggu-Kabupaten Samosir	DISPERINDA G ESDM	TPH : Pembinaan Kelompok Petani dalam penggunaan PLTS . • Bappelitbang : Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan • Inspektorat : Pengawasan Pelaksanaan • Dinas Kominfo : Dukungan Publikasi Kegiatan	Mempersiapkan : 1. Data Kelompok Tani (CPCL) kab. Samosir 2. data penentuan lokasi 3. pengadaan kesediaan lahan 4. Data produksi pertanian; kondisi air 5. Persiapan pendukung melalui Data readiness criteria
	2026	Evaluasi lokasi baru berdasarkan hasil proyek sebelumnya, perencanaan dan perizinan, desain teknis dan RAB, pengadaan peralatan dan pekerjaan sipil, instalasi dan uji coba sistem, pelatihan petani, monitoring awal, serta evaluasi dan serah terima akhir proyek - Kawasan pertanian yang memiliki keterbatasan irigasi di Sumatera Utara			
	2027	Evaluasi lokasi baru berdasarkan hasil proyek sebelumnya, perencanaan dan perizinan, desain teknis dan RAB, pengadaan peralatan dan pekerjaan sipil, instalasi dan uji coba sistem, pelatihan petani, monitoring awal, serta evaluasi dan serah terima akhir proyek - Kawasan pertanian yang memiliki keterbatasan irigasi di Sumatera Utara			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi Dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Samosir
			Utama	Pendukung	
	2028	Evaluasi lokasi baru berdasarkan hasil proyek sebelumnya, perencanaan dan perizinan, desain teknis dan RAB, pengadaan peralatan dan pekerjaan sipil, instalasi dan uji coba sistem, pelatihan petani, monitoring awal, serta evaluasi dan serah terima akhir proyek - Kawasan pertanian yang memiliki keterbatasan irigasi di Sumatera Utara			
	2029	Evaluasi lokasi baru berdasarkan hasil proyek sebelumnya, perencanaan dan perizinan, desain teknis dan RAB, pengadaan peralatan dan pekerjaan sipil, instalasi dan uji coba sistem, pelatihan petani, monitoring awal, serta evaluasi dan serah terima akhir proyek - Kawasan pertanian yang memiliki keterbatasan irigasi di Sumatera Utara			
	2030	Evaluasi lokasi baru berdasarkan hasil proyek sebelumnya, perencanaan dan perizinan, desain teknis dan RAB, pengadaan peralatan dan pekerjaan sipil, instalasi dan uji coba sistem, pelatihan petani, monitoring awal, serta evaluasi dan serah terima akhir proyek - Kawasan pertanian yang memiliki keterbatasan irigasi di Sumatera Utara			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi Dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Samosir
			Utama	Pendukung	
PP 7 KETAHANAN PANGAN MELALUI PENGUATAN NILAI BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL AGAR DIVERSIFIKASI HASIL PERTANIAN MENJADI LEBIH PRODUKTIF DAN BERDAMPAK PADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LOKAL					
24. Pembentukan dan Pengembangan Kawasan Unggulan Padi, Jagung, Cabai Merah, dan bawang merah	2025	1. Kajian pengembangan kawasan unggulan padi, jagung, cabai merah dan bawang merah 2. Pembuatan masterplan 3. Penyusunan tim kerja dan Inventarisir data 4. Pengembangan kawasan unggulan padi, jagung, cabai merah dan bawang merah 5. Pembangunan sarana dan prasarana produksi pertanian Kawasan Padi :Kab. Asahan dan Kab. Serdang Bedagai Kawasan jagung : Kab. Tapanuli utara dan Kab. Karo kawasan cabai Merah: Kota Padangsidimpuan, Kab. Batu Bara, dan Kab. Deli Serdang Kawasan Bawang Merah : Kab. Simalungun, Kab. Samosir, dan Kab. Humbang Hasundutan	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Ketahanan Pangan dan TPH	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memiliki peran krusial dalam pembangunan infrastruktur dasar pendukung pertanian. Ini mencakup pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, jalan usaha tani, serta infrastruktur penunjang lainnya yang memperlancar distribusi hasil panen dan aksesibilitas kawasan pertanian. Penataan ruang juga menjadi fokus penting untuk memastikan kawasan pertanian unggulan tidak terganggu oleh alih fungsi lahan. 2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) turut berperan dalam mendorong hilirisasi produk pertanian melalui pengembangan industri pengolahan hasil tani, seperti pengeringan, pengemasan, dan pengolahan lanjutan produk padi, jagung, cabai, dan bawang merah. Di sisi perdagangan, dinas ini memastikan	• Memfasilitasi penyediaan benih unggul, pupuk, dan alat pertanian dasar. • Mendorong sinergi antar pemangku kepentingan lokal (petani, penyuluh, BUMDes). • Memfasilitasi pembangunan/peningkatan akses jalan produksi di kawasan unggulan. • Mendukung pembangunan fasilitas pascapanen: gudang, alat pengering, rumah sortasi. • Mengkoordinasikan petani/UMKM untuk mengikuti pelatihan sertifikasi ekspor dan standar internasional. • Memberikan laporan lengkap atas capaian program, kendala, dan

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi Dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Samosir
			Utama	Pendukung	
	2026	1. Pengembangan kawasan unggulan padi, jagung, cabai merah dan bawang merah 2. Pembangunan sarana dan prasarana produksi pertanian Kawasan Padi: Kab. Deli Serdang, Kab. Simalungun, Kab. Asahan dan Kab. Serdang Bedagai. Kawasan Jagung: Kab. Humbahas, Kab. Langkat, Kab. Tapanuli utara dan Kab. Karo Kawasan Cabai Merah: Kab. Simalungun, Kab. Dairi, Kab. Batu Bara, dan Kab. Deli Serdang Kawasan Bawang Merah: Kab. Humbang, Kab. Samosir dan Kab. Simalungun		akses pasar yang lebih luas dan stabil melalui promosi, fasilitasi perdagangan, dan penguatan sistem rantai pasok. Adanya kegiatan Gerakan pangan Murah membuat Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dapat berkolaborasi dengan Dinas ketahanan Pangan dan TPH dalam menjalankan kegiatan ini 3) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) memegang peranan sebagai koordinator perencanaan strategis lintas sektor. Bappelitbang merumuskan arah kebijakan, menyusun rencana aksi, serta memastikan sinergi antar-dinas dalam pengembangan kawasan unggulan. 4) Diskominfo (Publikasi)	peluang lanjutan. Replikasi di daerah yang sama

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi Dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Samosir
			Utama	Pendukung	
	2027	1. Pengembangan kawasan unggulan padi, jagung, cabai merah dan bawang merah 2. Pembangunan sarana dan prasarana produksi pertanian 3. Pengembangan bibit olahan dan kemitraan usaha Kawasan Padi: Kab. Mandailing Natal, Kab. Deli Serdang, Kab. Simalungun, Kab. Asahan dan Kab. Serdang Bedagai. Kawasan Jagung: Kab. Humbahas, Kab. Langkat, Kab. Tapanuli utara dan Kab. Karo Kawasan Cabai Merah: Kab. Humbahas, Kab. Taput, Kab. Simalungun dan Kab. Dairi Kawasan Bawang Merah: Kab. Dairi, Kab. Taput, Kab. Humbang, Kab. Samosir dan Kab. Simalungun			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi Dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Samosir
			Utama	Pendukung	
	2028	1. Pengembangan kawasan unggulan padi, jagung, cabai merah dan bawang merah 2. Pembangunan sarana dan prasarana produksi pertanian 3. Pengembangan bibit olahan dan kemitraan usaha 4. Digitalisasi pemasaran dan sistem logistik hasil pertanian Kawasan Padi (Kab. Langkat, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Mandailing Natal, Kab. Deli Serdang, Kab. Simalungun, Kab. Asahan dan Kab. Serdang Bedagai.), Kawasan Jagung (Kab. Deli Serdang, Kab. Toba, Kab. Humbahas, Kab. Langkat, Kab. Tapanuli utara dan Kab. Karo) Kawasan Cabai Merah (Kab. Deli Serdang, Kab. Langkat, Kab. Humbahas, Kab. Taput, Kab. Simalungun, Kab. Dairi) Kawasan Bawang Merah (Kab. Toba, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Dairi, Kab. Taput, Kab. Humbang, Kab. Samosir, dan Kab. Simalungun)			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi Dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Samosir
			Utama	Pendukung	
	2029	1. Pengembangan kawasan unggulan padi, jagung, cabai merah dan bawang merah 2. Pembangunan sarana dan prasarana produksi pertanian 3. Pengembangan bibit olahan dan kemitraan usaha 4. Digitalisasi pemasaran dan sistem logistik hasil pertanian 5. Membuka akses pasar ekspor dan pasar bermutu Kawasan Padi (Kab. Karo, Kab. Toba, Kab. Langkat, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Mandailing Natal, Kab. Deli Serdang, Kab. Simalungun, Kab. Asahan dan Kab. Serdang Bedagai) Kawasan Jagung (Kab. Samosir, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Deli Serdang, Kab. Toba, Humbahas, Kab. Langkat, Kab. Tapanuli utara dan Kab. Karo) Kawasan Cabai (Kab. Mandailing Natal, Kab. Samosir, Kab. Deli Serdang, Kab. Langkat, Kab. Humbahas, Kab. Taput, Kab. Simalungun, Kab. Dairi) Kawasan Bawang Merah (Kab. Mandailing Natal, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Toba, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Dairi, Kab. Taput, Kab. Humbang, Kab. Samosir, dan Kab. Simalungun)			
	2030	Evaluasi dan monitoring Kegiatan			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi Dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Samosir
			Utama	Pendukung	
25. Pembentukan dan Pengembangan Kawasan Peternakan unggulan	2025	tidak ada	DISBUNAK	1. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Provinsi Sumatera Utara: Memberikan pelatihan pengemasan izin edar hasil produk, pelatihan pengemasan produk dan sertifikasi halal serta pemberian alat untuk mengolah hasil produksi 2. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara: Koordinasi pembentukan dan pelatihan UMKM bagi kelompok peternak 3. Dinas PMD Dukcapil: Untuk pembentukan dan pemberdayaan BUMDes di lokasi intervensi pengembangan kawasan peternakan 4. Diskominfo: Untuk publikasi media	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan: 1. Dukungan data CPCL di lokasi intervensi 2. Melakukan Pembinaan dan pelatihan peningkatan produksi atau peningkatan pasca produksi di lokasi intervensi pengembangan kawasan peternakan 3. Pemberian izin usaha untuk koperasi, UMKM, BUMDes yang mengolah hasil produksi berada di kawasan peternakan 4. Replikasi di daerah yang sama
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			
	2030	tidak ada			
26. Program Pengembangan Bibit Unggul Pertanian	2025	tidak ada	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH Provinsi berperan sebagai inisiator utama program. Mereka bertanggung jawab atas perumusan	PT. Dirga Surya : memasarkan produksi bibit unggul padi	Dinas Pertanian Kabupaten Samosir mempromosikan dan menggunakan bibit unggul padi varietas baru.
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			
	2030	tidak ada			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi Dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Samosir
			Utama	Pendukung	
			kebijakan, penyediaan alokasi anggaran, serta koordinasi lintas sektor di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dalam implementasinya, mereka juga menetapkan lokasi uji multilokasi dan mendukung pelepasan varietas secara resmi		
27. Fasilitasi Akses Permodalan Terhadap Kelompok Tani	2025	Fokus pada persiapan program, pembentukan Tim Pokja FPPS di provinsi dan kabupaten/kota, rekrutmen dan pelatihan Fasilitator Pembiayaan Petani Swadaya (FPPS), pemutakhiran data kelompok tani, koordinasi dengan lembaga keuangan, dan sosialisasi program. • 33 Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH bertindak sebagai penghubung antara	a) Dinas Koperasi dan UKM memiliki peran sentral dalam penguatan kelembagaan kelompok tani melalui pembinaan koperasi tani dan UMKM berbasis pertanian. Dinas ini dapat memfasilitasi akses permodalan bagi kelompok tani melalui penguatan koperasi simpan pinjam, pelatihan manajemen usaha tani, hingga menjembatani kerja sama antara koperasi dan lembaga keuangan.	Memetakan kelompok tani yang layak dan potensial untuk memperoleh akses permodalan, berdasarkan data luas lahan, komoditas yang diusahakan, serta rekam jejak kelembagaan kelompok di Kabupaten Samosir

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi Dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Samosir
			Utama	Pendukung	
	2026	Mulai pelaksanaan Temu Pembiayaan tahap I dan II, pendampingan realisasi kredit, pelatihan manajemen keuangan bagi kelompok tani penerima pembiayaan, serta monitoring awal terhadap usaha penerima kredit. • 33 Kabupaten/Kota	kelompok tani dengan lembaga keuangan formal seperti bank, koperasi, serta lembaga penjaminan kredit. Melalui penyediaan data kelompok tani, pelatihan manajemen usaha tani, serta pembentukan kelembagaan petani yang kuat, dinas membantu petani memenuhi persyaratan	b) Disperindag ESDM berkontribusi dalam mendorong hilirisasi produk pertanian dan menjaga stabilitas harga hasil tani. Melalui penguatan rantai nilai dan pasar hasil tani, dinas ini dapat membuka peluang tambahan pendapatan bagi petani yang dapat digunakan sebagai modal atau premi asuransi. c) Dinas Kominfo memainkan peran dalam penyebarluasan informasi terkait program bantuan iuran premi asuransi dan akses permodalan. Melalui berbagai saluran komunikasi digital dan non-digital, Kominfo dapat menjamin transparansi program, meningkatkan literasi digital kelompok tani, dan mendorong penggunaan teknologi informasi dalam pengajuan permodalan dan asuransi pertanian. e) Dinas Pemdesdukcapil memiliki peran strategis dalam verifikasi dan validasi data kependudukan serta kelembagaan desa sebagai basis penyaluran bantuan. Melalui data kependudukan dan basis kelompok tani di desa, Pemdesdukcapil memastikan agar bantuan permodalan maupun iuran premi asuransi diberikan secara tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil kelompok tani. f) Diskominfo (Publikasi)	
	2027	Memperluas cakupan penerima pembiayaan, memperkuat kemitraan dengan BUMN, BUMD, dan swasta, serta memberikan pelatihan lanjutan kepada FPPS terkait negosiasi bisnis dan pemasaran. • 33 Kabupaten/Kota			
	2028	Mengintegrasikan pemasaran digital dan <i>e-commerce</i> , mengembangkan sistem informasi pembiayaan pertanian berbasis aplikasi, serta melatih FPPS dan kelompok tani dalam penggunaannya • 33 Kabupaten/Kota			
	2029	Melakukan diversifikasi sumber pembiayaan melalui koperasi, CSR, dan investor. Mengembangkan usaha hilir di bidang pascapanen dan olahan, memberikan pelatihan manajemen usaha hilir, serta mendorong pemasaran produk hilir. • 33 Kabupaten/Kota			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi Dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Samosir
			Utama	Pendukung	
	2030	Melaksanakan kajian dampak ekonomi program, menyusun model pendampingan berkelanjutan, dan melatih FPPS menjadi konsultan atau koperasi tani. • 33 Kabupaten/Kota	administratif dan teknis agar layak mengakses program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan skema pembiayaan pertanian lainnya.		
PP 8 PARIWISATA YANG MENGGERAKKAN POTENSI ALAM LOKAL DI PEDESAAN DAN PERKOTAAN DENGAN MELIBATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT SECARA LANGSUNG (KOMUNITAS, PEMERINTAH DAERAH/DESA/KELURAHAN DAN PENGUSAHA LOKAL)					

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi Dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Samosir
			Utama	Pendukung	
28. Dukungan terhadap Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba	2025	Penguatan Tata kelola Kelembagaan melalui Pokja P3TB Provinsi dan Pokja P3TB 8 Kabupaten se-Kawasan Danau Toba: 1. Pelaksanaan evaluasi rencana aksi tahap I RIDPN Danau Toba 2. Penyusunan draft renaksi tahap II RIDPN Danau Toba 3. Integrasi hasil evaluasi tahap I kedalam draft rencana aksi tahap II 2025-2029 4. Penyusunan rencana aksi tahun 2025 5. Rapat koordinasi regular dengan 8 kab/kota • 8 Kabupaten se- Kawasan Danau Toba: 1. Simalungun 2. Humbang 3. Toba 4. Dairi 5. Pakpak Bharat 6. Karo 7. Samosir 8. Tapanuli Utara	DISBUDPARE KRAF	KOMINFO : Publikasi Media DISBUDPAREKRAF : Penguatan Atraksi Budaya dan Pariwisata; Pengembangan SDM dan Ekonomi Kreatif; Promosi dan Pemasaran Destinasi; Pengembangan Infrastruktur dan Amenitas Pariwisata; Kolaborasi dan Sinkronisasi Program; Penguatan Tata Kelola Destinasi; PERAN BPODT (Badan Pelaksana Otorita Danau Toba) : Koordinasi Pengelolaan Kawasan Pariwisata Strategis; Pengembangan infrastruktur dan Investasi; Promosi dan Branding Kawasan; Pengembangan SDM dan Ekosistem Wisata PERAN BAPPELITBANG (Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah) : Integrasi Perencanaan Pengembangan DPP Danau Toba; Sinkronisasi Program Daerah dengan Nasional; Litbang & Evaluasi Program Pengembangan Pariwisata; Dukungan Kebijakan Inovatif & Kolaboratif Sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumut Nomor 188.44/159/KTPS/2019 Tentang Pembentukan	1. Memastikan keselarasan Program/Kegiatan dalam Rencana Aksi Tahap II telah sesuai dengan Dokumen Perencanaan di daerah (RPJMD Kab & RKPD Kab) dan Integrasi RIDPN kedalam renja OPD 2. Menyusun rencana aksi tahunan 3. Memastikan ketersediaan anggaran dalam mendukung Pengembangan DPSP Danau Toba 4. Penyediaan Lahan yang Clean & Clear (jika terdapat pembangunan fisik) 5. Pembentukan Desa Wisata sesuai dengan potensi; 6. Pembentukan Tata Kelola / Kelembagaan untuk Desa Wisata; 7. Pendampingan Desa Wisata; 8. Pendataan Potensi Unggulan Daerah di bidang Kebudayaan, Pariwisata & Ekonomi Kreatif; 9. Pendataan jumlah Pelaku Usaha Industri Pariwisata (Usaha Penyediaan Makan-Minum,

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi Dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Samosir
			Utama	Pendukung	
	2026	Pemetaan Kegiatan Strategis yang akan dilaksanakan melalui Rencana Aksi Tahap II RIDPN & Konsolidasi dengan Pemerintah Pusat; Pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Tahap II RIDPN: 1. Pelaksanaan pilar Tata kelola dan Kelembagaan antara lain: • 8 Kabupaten se- Kawasan Danau Toba		Kelompok Kerja P3TB Provinsi Sumatera Utara, seluruh Opd Pemprov yg termasuk dalam SK Gubsu tersebut berperan dalam mendukung Pengembangan DPSP Danau Toba sesuai dengan Rencan Aksi yang disusun	Penyediaan Akomodasi (Homestay/Hotel), Penyedia Jasa Transportasi, Penyeda Jasa Travel Agent)); 10. Pendampingan Pelaku Usaha Pariwisata 11. Pelaksaan Event Budaya, Pariwisata dan Ekonomi Keratif berskala Nasional
	2027	Pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Tahap II RIDPN: 1. Pelaksanaan pilar infrastruktur: peningkatan kualitas jalan dan jembatan, peningkatan konektivitas (transportasi darat dan danau), dan SPAM • 8 Kabupaten se- Kawasan Danau Toba: 1. Karo 2. Simalungun 3. Samosir			
	2028	Pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Tahap II RIDPN 1. Pelaksanaan pilar SDM: Pelatihan pelaku pariwisata, Pokdarwis, dan Pengelola desa wisata • 8 Kabupaten se- Kawasan Danau Toba			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi Dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Samosir
			Utama	Pendukung	
	2029	Pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Tahap II RIDPN: 1. Pelaksanaan pilar Investasi: Penyusunan IPRO, dan penyusunan Lake Toba <i>Tourism Destination Investment Book</i> untuk diintegrasikan kedalam <i>North Sumatera Invest</i> • 8 Kabupaten se- Kawasan Danau Toba			
	2030	Monitoring dan evaluasi: Perluasan kemitraan ekonomi • 8 Kabupaten se- Kawasan Danau Toba			
29. Pengelolaan dan Penataan Kawasan Toba Caldera UGGp dan Kawasan Geopark lainnya	2025	a. Tata Kelola Reformasi tata kelola BP TCUGGp b. Alokasi Hibah Operasional BP TCUGGp c. Pembangunan Visibilitas di 16 Geosite (Panel dan Letter Plank) • 16 Geosite di Toba Caldera (Kab. Samosir, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Simalungun, Kab. Karo, Kab. Dairi, Kab. Taput, dan Kab. Toba)	DISBUDPARE KRAF	1. DISBUDPAREKRAF : Penyaluran Belanja Operasional BP TCUGGp; Pembangunan <i>Visibilities di</i> Geosite; Pelatihan dan Pembinaan Pelaku Pariwisata dan Pengelola Desa Wisata; Identifikasi dan Penetapan Cultural Heritage di Kawasan Geopark; Melaksanakan <i>Event Geofest</i> . 2. DINAS Koperasi &UMK: Melakukan Pelatihan & Pembinaan UMKM terutama di Kawasan <i>Geosite</i> ; 3. Dinas Pendidikan: Melaksanakan kegiatan <i>Geopark to School</i> dan edukasi terkait Geopark kepada	1. Memastikan ketersediaan dukungan anggaran dalam pengelolaan Geosite di masing-masing Kabupaten; 2. Penyusunan muatan Lokal; 3. Bekerja sama dengan BP dalam melaksanakan sosialisasi & edukasi kepada Masyarakat, Pelaku Wisata, Pelajar dan ASN tentang <i>Geopark</i> ; 4. Melaksanakan pelatihan dan

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi Dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Samosir
			Utama	Pendukung	
	2026	1. Pembangunan Visibilitas (<i>Gate</i>, Panel Informasi, <i>Letter Plank</i>) di 8 Geosite (Pusuk Buhit; Tele; Hutatinggi-Sidihoni; Ambarita-TukTuk; Batu Hoda,(Sipiso-piso; Silalahi-Sabungan; Muara-Sibandang) 2. Tindak lanjut pengusulan 2 geosite baru rekomendasi revalidasi UNESCO: a. Kajian b. Pengusulan 3. Penyusunan Bahan Promosi (<i>Leaflet</i> dan Video Promosi) khusus untuk Geosite, Pelatihan dan edukasi terkait Geopark bagi <i>Tour Guide</i> dan pemenuhan Rekomendasi UNESCO • Pusuk Buhit; Tele; Hutatinggi-Sidihoni; Ambarita-TukTuk; Batu Hoda,(Sipiso-piso; Silalahi-Sabungan; Muara-Sibandang		pelajar; 4. Dinas PUPR : Peningkatan kualitas jalan/jembatan di ruas jalan Provinsi yang menghubungkan antar geosite; 5.Bappeltpang: Melaksanakan penelitian terkait <i>Geological Heritage/Natural/Biological Heritage/Cultural Heritage</i> di Kawasan Toba Caldera UGGp maupun di Kawasan Geopark yang baru; 6. BPBD : Mitigasi Bencana & Sosialisasi; 7. Dinas LHK : Pelestarian Hutan dan ekosisten di Kawasan Danau Toba 8. Dinas Kominfo: Publikasi kegiatan;	pendampingan kepada UMKM terutama dalam pengembangan Geoproduk; 5. Mengidentifikasi dan menginventarisasi serta melakukan penelitian terkait potensi <i>Geological Heritage, Biological/Natural Heritage</i> dan <i>Cultural Heritage</i>; 6. Rutin melaksanakan <i>Event GeoFest</i>; 7. Menyusun kajian awal terkait Kawasan Geopark baru; 8. Pembentukan Desa Wisata sesuai dengan potensi; 9. Pembentukan Tata Kelola / Kelembagaan untuk Desa Wisata; 10. Pendampingan Desa Wisata; 11. Pendataan jumlah Pelaku Usaha Industri Pariwisata (Usaha Penyediaan Makan-Minum, Penyediaan Akomodasi

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi Dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Samosir
			Utama	Pendukung	
	2027	Pembangunan Visibilitas (<i>Gate</i> , Panel Informasi, <i>Letter Plank</i>) di 8 Geosite (Haranggaol; Sibaganding; Hutaginjang; Sipinsur; Bakara-Tipang,Taman Eden, Balige-Meat, Situmurun), Peningkatan jumlah penelitian terkait <i>Geological Heritage/Cultural Heritage/ Biological Heritage</i> dengan melalui kerja sama dengan PTN/PTS, Pemenuhan Rekomendasi UNESCO • Haranggaol; Sibaganding; Hutaginjang; Sipinsur; Bakara-Tipang,Taman Eden, Balige-Meat, Situmurun			(Homestay/Hotel), Penyedia Jasa Transportasi, Penyedia Jasa Travel Agent); 12. Pendampingan Pelaku Usaha Pariwisata
	2028	Konsolidasi dan Penyusunan Kajian awal Pengusulan Geopark Nasional baru (Nias & Humbahas) dan Pemenuhan Rekomendasi UNESCO • 16 Geosite di Toba Caldera (Kab. Samosir, Kab. HumbangHas, Kab. Simalungun, Kab. Karo, Kab. Dairi, Kab. Taput, dan Kab. Toba)			
	2029	Persiapan dan Pelaksanaan Revalidasi Toba Caldera UGGp, Evaluasi Kinerja BP TCUGGp Periode 2025-2030 • 16 Geosite di Toba Caldera (Kab. Samosir, Kab. HumbangHas, Kab. Simalungun, Kab. Karo, Kab. Dairi, Kab. Taput, dan Kab. Toba)			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi Dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Samosir
			Utama	Pendukung	
	2030	Pemilihan BP TCUGGp Periode 2030-2035, Penyusunan Program Kerja dan Pemenuhan Rekomendasi UNESCO • 16 Geosite di Toba Caldera (Kab. Samosir, Kab. HumbangHas, Kab. Simalungun, Kab. Karo, Kab. Dairi, Kab. Taput, dan Kab. Toba)			
30. Pembentukan & Pengembangan Kawasan Strategis Budaya, Parawisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi yang Terintegrasi (TATABUSE, SIBANDAN, SIPUAN, KARDAPAK dan BAHLIKE)	2025	tidak ada	DISBUDPARE KRAF	1. Dinas Koperasi & UMKM: Pelatihan dan Pembinaan kepada UMKM di Kawasan. 2. Dinas PUPR: Pembangunan Kawasan (jika ada pembangunan fisik); Peningkatan Akses Ruas Jalan Provinsi menuju Kawasan. 3. Dinas PMD : Pelatihan dan Pembinaan pengelola BUMDES Wisata 4. Dinas Kominfo : Penyediaan Failitas Digital di Kawasan; Publikasi Kegiatan	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, sementara kabupaten/kota berperan dalam: 1. Memastikan ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan Proyek Strategis; 2. Penyediaan Lahan yang Clean & Clear (jika terdapat pembangunan fisik); 3. Pembentukan Desa Wisata sesuai dengan potensi; 4. Pembentukan Tata Kelola / Kelembagaan untuk Desa Wisata; 5. Pendampingan Desa Wisata; 6. Pendataan Potensi Unggulan Daerah di bidang Kebudayaan, Pariwisata & Ekonomi Kreatif; 7. Pendataan jumlah Pelaku Usaha Industri Pariwisata (Usaha Penyediaan Makan-Minum, Penyediaan Akomodasi (Homestay/Hotel), Penyedia Jasa
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			
	2030	tidak ada			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi Dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Samosir
			Utama	Pendukung	
					Transportasi, Penyedia Jasa Travel Agent)); 8. Pendampingan Pelaku Usaha Pariwisata; 9. Pendataan dan inventarisasi pelaku UMKM; 10. Pendampingan kepada pelaku UMKM; 11. Pelaksaaan Event Budaya, Pariwisata dan Ekonomi Keratif berskala Nasional
31. Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Situs Cagar Budaya Sumatera Utara	2025	tidak ada	DISBUDPARE KRAF	1. Dinas Koperasi & UMKM: Pelatihan dan Pembinaan kepada UMKM di Kawasan. 2. Dinas PUPR: Peningkatan Akses Ruas Jalan Provinsi menuju Kawasan. 3. Dinas PMD: Pelatihan dan Pembinaan pengelola BUMDes Wisata 4. Dinas Kominfo: Penyediaan Failitas Digital di Kawasan; Publikasi Kegiatan 5. Dinas Pendidikan: Edukasi kepada pelajar tentang Situs Cagar Budaya	1. Memastikan ketersediaan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Provinsi; 2.Penyediaan Lahan yang Clean & Clear (jika terdapat pembangunan fisik); 3. Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Tingkat kab/kota; 4. Pembentukan Pengelola Kawasan Situs Cagar Budaya; 5. Melaksanakan Program edukasi kepada masyarakat dan pelajar tentang Kawasan Situs Cagar Budaya;
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi Dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Samosir
			Utama	Pendukung	
	2029	tidak ada			6. Pendataan, Inventarisasi, Pendaftaran dan Penetapan Cagar Budaya di kab/kota 7. Pembentukan Desa Wisata sesuai dengan potensi; 8. Pembentukan Tata Kelola / Kelembagaan untuk Desa Wisata; 9. Pendampingan Desa Wisata; 10. Pendataan jumlah Pelaku Usaha Industri Pariwisata (Usaha Penyediaan Makan-Minum, Penyediaan Akomodasi (Homestay/Hotel), Penyedia Jasa Transportasi, Penyedia Jasa Travel Agent)); 11. Pendampingan Pelaku Usaha Pariwisata; 12. Pendataan dan Pendampingan UMKM; 13. Pelaksaaan Event Budaya, Pariwisata dan Ekonomi Keratif berskala Nasional
	2030	Pelaksanaan konservasi/pemugaran bangunan bersejarah; Pelatihan konservasi dasar & manajemen situs budaya; Pelaksanaan Program Edukasi di Sekolah & Masyarakat; Promosi melalui pelaksanaan event budaya maupun media digital Kab. Samosir & Kab. Pakpak Bharat			
32. Pelaksanaan Event Internasional, pengembangan paket wisata dan digitalisasi promosi pariwisata global	2025	tidak ada	DISBUDPARE KRAF	1. Dinas Perhubungan: Memastikan ketersediaan transportasi dan lalu lintas saat event internasional dilaksanakan 2. Dinas Kesehatan: Dukungan Tenaga Kesehatan dan Ambulans 3. Dinas Koperasi &UMKM: Pelatihan dan pendampingan UMKM untuk mendukung pelaksaaan event internasional 4. Dinas Kominfo: Memastikan ketersediaan jaringan	1. Pelaksanaan Side Event saat pelaksanaan Event Internasional; 2. Pelaksanaan Promosi melalui media digital dan cetak; 3. Sosialisasi & Edukasi kepada Pelaku Usaha Pariwisata (Penyedia Jasa Akomodasi (Hotel & Homestay), Penyedia Jasa makan-minum, Penyedia Jasa Transportasi,
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			
	2030	tidak ada			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi Dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Samosir
			Utama	Pendukung	
				digital saat pra event-event-pasca event internasional; publikasi kegiatan 5. Satpol PP: Keamanan Pelaksanaan Event dan ketertiban penyelenggaraan acara 6. Dinas Pemuda dan Olahraga; Pembinaan Pemuda untuk partisipasi dalam penyelenggaraan event (sport, e-sport, dsb)	dan Travel Agent); 4. Pendataan & pendampingan terhadap UMKM; 5. Memastikan kelancaran aksesibilitas terutama saat pelaksanaan Event internasional (Pengaturan lalu lintas; Peningkatan kualitas jalan)
PP 9 EKONOMI KREATIF DAN INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI					
33. Sentra industri kreatif di Kawasan Sport Center Sumatera Utara	2025	tidak ada	DISBUDPARE KRAF	1. Dinas PUPR: Pembangunan Sentra Industri Kreatif 2. Biro Perekonomian : Menyusun Kajian pembentukan BLUD; Pembentukan BLUD pengelola Sentra Industri Kreatif. 3. Dinas PerindagESDM: Pendataan, Pelatihan & Pembinaan IKM Kreatif. 4. Dinas Koperasi UMK: Pendataan, Pelatihan & Pembinaan UMKM 5. Dinas Kominfo : Penyediaan Fasilitas Digital (Internet, dll) di Kawasan Sentra Industri Kreatif; Publikasi Kegiatan	1. Pendataan Pelaku Industri Kreatif & Data UMKM Potensial; 2. Kurasi Pelaku Ekonomi Kreatif; 3. Fasiitasi HAKI bagi Pelaku Ekonomi Kreatif; 4. Pelaksanaan Event Ekonomi Kreatif secara rutin di Sentra Industri Kreatif; 5. Promosi terkait Sentra Industri Kreatif melalui media digital dan cetak;
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			
	2030	tidak ada			
	2025	Evaluasi <i>Platform e-commerce</i> yang sudah ada (SIMITRA)	DISKOP UMKM	KOMINFO : Publikasi Media	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi Dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Samosir
			Utama	Pendukung	
34. Sumut digital market dan galeri virtual produk UMKM kreatif	2026	Desain dan pengembangan platform e-commerce; Kurasi awal 100 produk UMKM; Kemitraan dengan <i>platform</i> logistik & <i>payment gateway</i> . Manajemen Operasional <i>platform e-commerce</i> ; Promosi dan sosialisasi <i>platform e-commerce</i> ; • PLUT		DISKOP UKM : Pendataan dan Kurasi Produk UMKM; Pelatihan dan Literasi Digital UMKM; Pembangunan dan Pengelolaan Platform; Promosi dan Akses Pasar; Pendampingan dan Skema Dukungan Lanjutan DISKOP UKM : Pendataan dan Kurasi Produk UMKM; Pelatihan dan Literasi Digital UMKM; Pembangunan dan Pengelolaan Platform; Promosi dan Akses Pasar; Pendampingan dan Skema Dukungan Lanjutan	Sumatera Utara melalui Dinas Koperasi dan UKM, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan: - Pendataan UMKM binaan kab/kota - Kurasi Produk UMKM - Klasterisasi UMKM yang dapat dimasukkan ke dalam Galeri - <i>Capacity Building</i>
	2027	<i>Onboarding</i> UMKM; Pelatihan dan fasilitasi branding, dan manajemen toko online. Manajemen Operasional <i>platform e-commerce</i> ; Promosi dan sosialisasi <i>platform e-commerce</i> ; • PLUT			
	2028	Pengembangan <i>E-commerce</i> menjadi Market Place; Integrasi dengan katalog elektronik, Manajemen Operasional <i>platform e-commerce</i> ; Promosi dan sosialisasi <i>platform e-commerce</i> ; • PLUT			
	2029	Galeri Virtual 3D; Kampanye digital nasional & regional, Manajemen Operasional <i>platform e-commerce</i> ; Promosi dan sosialisasi <i>platform e-commerce</i> ; • PLUT			
	2030	Kurasi produk ekspor; Promosi virtual di <i>event</i> internasional (<i>virtual expo, marketplace ASEAN</i>), Manajemen Operasional <i>platform e-commerce</i> dan Promosi dan sosialisasi <i>platform e-commerce</i> ; • PLUT			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi Dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Samosir
			Utama	Pendukung	
PP 10 REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN					

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi Dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Samosir
			Utama	Pendukung	
35. Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	2025	1. Penyusunan SK Tim Forum Pemangku Kepentingan SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2030 2. Sosialisasi SK Tim forum dan <i>milestone</i> TPB SDGs 2025-2030 3. Updating target capaian SDGs tahun 2025 disesuaikan dengan dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 4. Penyusunan skema <i>Declaration and Registration System</i> 5. Pembangunan fitur aplikasi pendaftaran BRS SDGs 6. Replikasi, instalasi dan <i>Capacity Building</i> Aplikasi E-Monev SDGs (Inovasi) 7. Menyusun Draf Rancangan Awal RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2030 8. <i>Launching</i> dan Pelaksanaan BRS <i>pilot project</i> sekaligus penyerahan sertifikat kepada 15 UMKM 9. <i>Workshop</i> Penyusunan <i>Voluntary Local Review</i> (VLR) Kabupaten/Kota 10. Modifikasi Aplikasi E-Monev SDGs 11. <i>Workshop E-Monev</i> dengan Bappeda/Bapperida/Bappelitbang Kabupaten/Kota 12. Menyusun <i>draf Monev</i> capaian SDGs tahun 2025	Bappelitbang	Seluruh Perangkat Daerah	1. Penyusunan dokumen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs kab/kota se-Sumut tahun 2025-2030 2. Dukungan pelaksanaan skema BRS Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs : identifikasi UMKM/IMK serta pelaku usaha 3. Dukungan pelaksanaan <i>North Sumatera SDGs Action Awards</i> 4. Dukungan proses penginputan E-Monev Kabupaten/Kota 5. Peningkatan Kapasitas untuk implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi Dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Samosir
			Utama	Pendukung	
	2026	1. Inovasi <i>Business Registration System Policy TPB/SDGs</i> 2. Diseminasi Skema BRS TPB/SDGs (Kolaborasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM pada acara FYP, BRS SDGs dijadikan kurikulum) 3. Menyusun Laporan Monev TPB/SGDs Tahun 2025 4. Finalisasi Draf RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026-2030 melalui desk per pilas TPB/SDGs 5. <i>Launching</i> Aplikasi e-Monev 6. Pelaksanaan skema <i>Declaration and Registration System BRS TPB/SDGs</i> 7. Diseminasi RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026-2030 8. Penyusunan Rancang Bangun aplikasi e-Monev SDGs (INOVASI) 9. <i>Workshop</i> Penyusunan <i>Voluntary Local Review (VLR)</i> Kabupaten/Kota 10. Menyusun draf Monev capaian SDGs tahun 2026 11. Sosialisasi <i>North Sumatra SDGs Action Award 2027</i> (Indikator RAD TPB/SDGs, VLR dan Laporan Monev)			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi Dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Samosir
			Utama	Pendukung	
	2027	1. Pembangunan aplikasi e-Monev SDGs (INOVASI) 2. Menyusun Laporan Monev TPB/SGDs Tahun 2026 3. Forum <i>Business Registration System</i> (BRS) 4. <i>North Sumatra SDGs Action Award 2027</i> (Indikator RAD TPB/SDGs, VLR dan Laporan Monev) 5. <i>Desk</i> capaian pelaksanaan program unggulan tematik berbasis lokus prioritas SDGs Tahun 2026 6. <i>Workshop</i> Penyusunan <i>Voluntary Local Review</i> (VLR) Kabupaten/Kota 7. Menyusun draf Monev capaian SDGs tahun 2027 8. Sosialisasi penyusunan rancang bangun Integrasi Satu Data SDGs Provinsi Sumatera Utara (INOVASI)			
	2028	1. Menyusun Laporan Monev TPB/SGDs Tahun 2027 2. Finalisasi aplikasi e-Monev SDGs 3. Penyusunan rancang bangun Integrasi Satu Data SDGs Provinsi Sumatera Utara (INOVASI) 4. <i>North Sumatra SDGs Action Award 2028</i> 5. <i>Launching</i> aplikasi e-Monev SDGs 6. Diseminasi pemanfaatan aplikasi e-Monev SDGs 7. <i>Desk</i> capaian pelaksanaan program unggulan tematik berbasis lokus prioritas SDGs Tahun 2027 8. <i>Workshop</i> Penyusunan <i>Voluntary Local Review</i> (VLR) Kabupaten/Kota			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi Dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Samosir
			Utama	Pendukung	
		9. Menyusun draf Monev capaian SDGs tahun 2028			
	2029	1. Menyusun Laporan Monev TPB/SGDs Tahun 2028 2. Pelaksanaan Skema BRS 3. Finalisasi integrasi Satu Data SDGs pada aplikasi SADAINA 4. <i>Launching</i> integrasi Satu Data SDGs pada aplikasi SADAINA 5. Diseminasi pemanfaatan aplikasi e-Monev SDGs 6. <i>Desk</i> capaian pelaksanaan program unggulan tematik berbasis lokus prioritas SDGs Tahun 2028 7. Penyusunan rancang bangun Integrasi Satu Data SDGs Provinsi Sumatera Utara (INOVASI) 8. <i>North Sumatra SDGs Action Award 2029</i> 9. Pelaksanaan Skema BRS 10. Menyusun draf Monev capaian SDGs tahun 2029			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi Dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Samosir
			Utama	Pendukung	
	2030	1. Menyusun Laporan Monev TPB/SGDs Tahun 2029 2. Desk capaian pelaksanaan program unggulan tematik berbasis lokus prioritas SDGs tahun 2029 3. <i>North Sumatra SDGs Action Award 2030</i> 4. Menyusun Draf Laporan Monev RAD TPB/SGDs Tahun 2026-2030 5. <i>Workshop</i> Penyusunan <i>Voluntary Local Review</i> (VLR) Kabupaten/Kota 6. Menyusun laporan akhir kegiatan SDGs			
36 kerja sama APIP dan APH dalam Pendampingan Proyek Strategis dan Kegiatan Unggulan Daerah melalui pendampingan sejak tahapan perencanaan, pelaksanaan dan serah terima kegiatan proyek strategis	2025	- Penyusunan MoU antara APIP dengan APH (Kejaksaan Tinggi, Kepolisian) - Pendampingan Penyusunan Perencanaan dan Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah	Inspektorat	Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan) Perangkat Daerah yang memiliki Proyek Strategis	Inspektorat kab/kota : Melakukan Koordinasi Pengawasan dengan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara terkait pelaksanaan Proyek Strategis yang dilaksanakan di Kabupaten Samosir
	2026	- Reviu Perencanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara - Pendampingan Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara - Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara			
	2027	- Reviu Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara - Pelaksanaan Kolaborasi Pendampingan Proyek Strategis Daerah - Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan Proyek Strategis Daerah			
	2028	- Reviu Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi Dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Samosir
			Utama	Pendukung	
		- Pelaksanaan Kolaborasi Pendampingan Proyek Strategis Daerah - Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan Proyek Strategis Daerah			
	2029	- Reviu Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara - Pelaksanaan Kolaborasi Pendampingan Proyek Strategis Daerah - Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan Proyek Strategis Daerah			
	2030	- Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan Proyek Strategis Daerah			
PP 11. TRANSFORMASI DIGITAL DAN INOVASI TEKNOLOGI PADA PELAYANAN PUBLIK DAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT					
37. Pemanfaatan Satu Data SUMUT pusat data dan informasi pembangunan	2025	- Tindak lanjut MoU terkait kerja sama teknis dengan BPS dan Diskominfo dalam pembangunan aplikasi Satu Data (SADAINA Reborn) - Proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD - <i>Launching</i> SADAINA Reborn di Konreg PDRB ISEI (BPS dan Diskominfo) - <i>Updating</i> SK Tim Pelaksana SADAINA - Diseminasi aplikasi dan tupoksi tim SADAINA	Dinas Kominfo	Seluruh OPD menginput data statistik sektoral	Replikasi aplikasi, menyediakan SDM, menyiapkan regulasi terkait
	2026	- Pemanfaatan SADAINA Reborn - Proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi Dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Samosir
			Utama	Pendukung	
		- Forum Satu Data tingkat Daerah - Proses integrasi Satu Data dengan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Provsu - Penyusunan Proses Bisnis integrasi SADAINA dan Data Geospasial - Penyusunan Proses Bisnis integrasi SADAINA dan Data SDGs			
	2027	- Pemanfaatan SADAINA Reborn - Proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD - Forum Satu Data tingkat Daerah - Pemanfaatan SADAINA dan Data Geospasial - Pemanfaatan SMART SADAINA SDGs - Proses bisnis integrasi SADAINA Reborn dengan kab/kota			
	2028	- Pemanfaatan SADAINA Reborn - Proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD - Forum Satu data tingkat Daerah - Pengembangan fitur SADAINA (API) - Peningkatan kapasitas user SADAINA Reborn - Pemanfaatan dan replikasi SADAINA Reborn			
	2029	- Pemanfaatan SADAINA Reborn - Proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD - Forum Satu data tingkat Daerah - Menyediakan API (<i>Application Programming Interface</i>) - Peningkatan kapasitas user SADAINA			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi Dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Samosir
			Utama	Pendukung	
		Reborn - Pemanfaatan dan replikasi SADAINA Reborn			
	2030	- Menyediakan API (<i>Application Programming Interface</i>) - Pemanfaatan SADAINA Reborn - Proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD - Forum Satu data tingkat Daerah - Monitoring dan Evaluasi			
PP 12. INFRASTRUKTUR DENGAN PRIORITAS JALAN, JEMBATAN, DAN IRIGASI YANG LANGSUNG BERDAMPAK PADA PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT LOKAL					
	2025	tidak ada	Dinas PUPR		

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi Dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Samosir
			Utama	Pendukung	
38. Pembangunan Ruas Jalan Baru Penghubung Wilayah Terisolir atau Strategis yang Merupakan kewenangan Provinsi	2026	Pelaksanaan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2025 hingga 2030, dengan prioritas pada ruas-ruas yang menghubungkan desa-desa terpencil dengan pusat layanan, serta memperkuat jalur distribusi antar kabupaten/kota • Penanganan sepanjang total 51,96 km pada 9 ruas jalan provinsi belum tembus yang masih dalam kondisi tanah dan belum layak dilalui. Ruas-ruas tersebut menghubungkan wilayah Kab. Mandailing Natal, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Labuhanbatu, Kab. Asahan, Kab. Labuhanbatu Utara, Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Samosir		Dinas Kominfo, untuk publikasi kegiatan, Dinas LHK mendukung proses penyusunan dokumen lingkungan, AMDAL dan izin pinjam pakai Hutan, Dinas Perhubungan untuk penyediaan Fasilitas Keselamatan Jalan, Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi, Inspektorat melaksanakan pengawasan	1. Memberikan dukungan administratif atas pembangunan jalan yang berada di wilayah kewenangannya, mendukung penyediaan lahan pada trase jalan serta perizinan 2. Menyelaraskan program jalan dengan perencanaan pembangunan daerah dan usulan prioritas lokal. 3. Melaksanakan koordinasi teknis lapangan dan penyedia data kondisi eksisting jalan serta kebutuhan daerah.
	2027	Pelaksanaan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2025 hingga 2030, dengan prioritas pada ruas-ruas yang menghubungkan desa-desa terpencil dengan pusat layanan, serta memperkuat jalur distribusi antar kabupaten/kota • Total penanganan sepanjang 56,20 km difokuskan pada 9 ruas jalan provinsi yang saat ini belum tembus dan sebagian besar masih berupa jalan tanah. Ruas-ruas ini tersebar di wilayah Kab. Mandailing Natal, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Tapanuli Selatan, Kab.			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi Dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Samosir
			Utama	Pendukung	
		Labuhanbatu, Kab. Asahan, Kab. Nias Utara, Kab. Padang Lawas, Kab. Samosir			
	2028	Pelaksanaan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2025 hingga 2030, dengan prioritas pada ruas-ruas yang menghubungkan desa-desa terpencil dengan pusat layanan, serta memperkuat jalur distribusi antar kabupaten/kota •Penanganan sepanjang 64,63 km akan difokuskan pada 6 ruas jalan provinsi yang belum tembus dan masih dalam kondisi tanah. Lokasi tersebar di wilayah Kab. Mandailing Natal, Kab. Samosir, Kab. Labuhanbatu, Kab. Asahan, Kab. Nias Utara, Kab. Padang Lawas			
	2029	Pelaksanaan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2025 hingga 2030, dengan prioritas pada ruas-ruas yang menghubungkan desa-desa terpencil dengan pusat layanan, serta memperkuat jalur distribusi antar kabupaten/kota •Pembangunan ruas jalan baru sepanjang 47,17 km akan difokuskan pada 7 ruas jalan provinsi yang belum tembus dan masih berupa tanah. Lokasi berada di kawasan Kab. Mandailing Natal, Kab. Samosir, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Labuhanbatu, Kab. Asahan, Kab. Nias Utara, Kab. Langkat			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi Dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Samosir
			Utama	Pendukung	
	2030	Pelaksanaan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2025 hingga 2030, dengan prioritas pada ruas-ruas yang menghubungkan desa-desa terpencil dengan pusat layanan, serta memperkuat jalur distribusi antar kabupaten/kota •Penanganan sepanjang 22,50 km akan dilakukan pada 4 ruas jalan provinsi yang masih berupa jalan tanah dan belum tembus. Lokasi berada di kawasan Kab. Samosir, Kab. Asahan, Kab. Nias Utara			
39. Pemerataan Infrastruktur Layanan Dasar bagi Kawasan Afirmasi, Terluar, dan Terpencil untuk Mewujudkan Keadilan Pembangunan	2025	tidak ada	Dinas PUPR	Dinas LHK untuk penyediaan dokumen lingkungan, AMDAL, Dinas Kominfo untuk publikasi kegiatan, Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi, Inspektorat melaksanakan pengawasan	1. Pemerintah Kabupaten/Kota: Menyediakan lahan, mengarahkan program RTLH (Air Minum dan Sanitasi), menetapkan penerima bantuan, dan mengalokasikan anggaran daerah. 2. Dinas Perumahan Rakyat kab/kota: Pelaksana utama di lapangan yang mengurus pendataan, verifikasi, penyaluran bantuan, pendampingan, monitoring, dan pelaporan. 3. Dinas PUPR kab/kota: Memberikan dukungan teknis konstruksi, membuat RAB, dan mengawasi pelaksanaan di lapangan. 4. Dinas Sosial kab/kota: Membantu memperbarui dan memverifikasi
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			
	2030				

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi Dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Samosir
			Utama	Pendukung	
					data kemiskinan lokal. 5. Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan pada kab/kota: Melakukan identifikasi penerima bantuan, sosialisasi, memfasilitasi gotong royong, serta membantu pemantauan di lapangan.
PP13. PENGEMBANGAN SISTEM LOGISTIK DAN TRANSPORTASI YANG MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN DAYA SAING					
40. Dukungan Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Melalui Pembangunan BRT dan Peningkatan Kereta <i>Commuter</i>	2025	tidak ada	Dinas Perhubungan	Dinas Kominfo untuk publikasi Media, Dinas PUPR terkait penyelenggaraan Jalan Provinsi (jika trayek melalui jalan provinsi) Dinas LHK untuk penyediaan dokumen lingkungan dan AMDAL, Biro Organisasi membentuk kelembagaan (BLUD) BRT Mebidang, Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi, Inspektorat melaksanakan pengawasan	Dinas Perhubungan Kab/Kota Pelaksana operasional harian, koordinator lapangan. Kota Binjai: Dukungan penetapan lokasi lahan depo BRT Kab. Deli Serdang: Dukungan penetapan lokasi lahan depo BRT
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi Dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Samosir
			Utama	Pendukung	
	2030	tidak ada			
41. Subsidi Transportasi Bus Perintis untuk Daerah-Daerah Terpencil	2025	tidak ada	Dinas Perhubungan	Dinas Kominfo untuk publikasi Media, Dinas PUPR terkait penyelenggaraan Jalan Provinsi (jika trayek melalui jalan provinsi) Dinas LHK untuk penyediaan dokumen lingkungan dan AMDAL, Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi, Inspektorat melaksanakan pengawasan	1. Koordinasi dan Penyediaan Data: Pemerintah kabupaten/kota berperan menyediakan data dan kebutuhan daerah terkait angkutan perintis serta berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi agar subsidi dapat tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi wilayah terpencil yang membutuhkan akses transportasi. 2. Fasilitasi Pelaksanaan Program: Kabupaten/kota membantu pelaksanaan program subsidi dengan memastikan armada bus perintis dapat beroperasi di wilayahnya, menyediakan dukungan administratif, dan memantau pelaksanaan layanan agar berjalan lancar dan memenuhi kebutuhan masyarakat yaitu penyediaan fasilitas pendukung untuk kelancaran operasional, berupa lahan untuk titik keberangkatan 3. Penentuan Rute dan Kebijakan Lokal: Pemerintah daerah menetapkan rute bus perintis yang strategis sesuai kebutuhan wilayah dan sinkron dengan program nasional, serta mengeluarkan
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			
	2030	tidak ada			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi Dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Samosir
			Utama	Pendukung	
					kebijakan pendukung agar subsidi bisa dimanfaatkan optimal untuk membuka keterisolasian daerah, yaitu pengusulan dan penetapan trayek dan sosialisasi program kepada masyarakat serta kesiapan infrastruktur jalan di kabupaten dalam kondisi layak dan aman, yang akan dilalui oleh trayek 4. Pengawasan dan <i>Monitoring</i> : Kabupaten/kota melakukan pemantauan operasional bus perintis di lapangan untuk memastikan layanan tetap berjalan dengan baik, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat di daerah terpencil.
PP 14. PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN DAN BERKETAHANAN TERHADAP BENCANA					

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi Dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Samosir
			Utama	Pendukung	
42. Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir	2025	tidak ada	Dinas PUPR	Dinas LHK untuk dokumen lingkungan dan AMDAL, BPBD menyusun kajian resiko bencana, rencana mitigasi, dan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat pada wilayah bencana, Diskominfo untuk publikasi kegiatan	1. Penyediaan Data dan Koordinasi: Kabupaten/kota berperan menyediakan data wilayah yang terdampak banjir serta kebutuhan teknis di lapangan dan melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi agar pembangunan bisa tepat sasaran dan efektif (BPBD) 2. Fasilitasi Pelaksanaan dan Administrasi: Kabupaten/kota membantu kelancaran pelaksanaan pembangunan dengan menyediakan dukungan administratif, perizinan, penyediaan lahan, dan tenaga lokal di wilayahnya (PUPR) 3. Pemeliharaan dan Pengawasan: Setelah pembangunan infrastruktur pengendali banjir dilakukan, pemerintah kabupaten/kota turut bertanggung jawab melakukan pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian agar fasilitas yang dibangun tetap berfungsi sesuai
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi Dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Samosir
			Utama	Pendukung	
	2030	tidak ada			perencanaan dan umur yang diharapkan (PUPR) 4. Pemberdayaan Masyarakat dan Kolaborasi: Pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dan bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk pemerintah provinsi dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan pengendalian banjir melalui manajemen drainase, normalisasi sungai, dan pengelolaan ruang terbuka hijau (LHK, Dinas PKP kab/kota) 5. Penyesuaian Kebijakan Lokal: Kabupaten/kota juga menetapkan kebijakan lokal yang mendukung implementasi program pengendalian banjir provinsi, termasuk pengelolaan tata ruang dan penggunaan teknologi mitigasi banjir (LHK, Dinas PKP kab/kota, BPBD)
43. Pembangunan TPST Regional	2025	tidak ada	Dinas PUPR : pelaksana	PUPR: -Penyiapan dokumen Lingkungan, -Dalam pembuatan FS dan DED, dan pembangunan infrastruktur serta pendukungnya, Dinas LHK : - Dukungan dalam proses penyusunan dokumen lingkungan hidup	1. Penyusunan peraturan atau SK terkait pengelolaan sampah terpilah 2. Penyediaan dan penentuan lokasi 3. Dukungan pengumpulan sampah terpilah oleh Dinas Lingkungan Hidup kab/kota 4. Dukungan pengangkutan sampah
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			
	2030	tidak ada			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi Dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Samosir
			Utama	Pendukung	
				-Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi, -Dinas Kominfo untuk publikasi media	terpilah ke tempat pengolahan 5. Dukungan pemilahan sampah terpilah dan pra pengolahan 6. Dukungan SDM
44. Pembangunan PLTSa	2025	tidak ada	DISPERINDA G ESDM	• PUPR : Pembangunan TPST • LHK: Pengelolaan Sampah • Dinas Kominfo : Dukungan Publikasi Kegiatan	1.Menyiapkan Penyusunan peraturan atau SK terkait pengelolaan sampah terpilah 2. Penyediaan dan penentuan lokasi pengolahan 3. Dukungan pengumpulan sampah terpilah oleh Dinas Lingkungan Hidup kab Samosir 4. Dukungan pengangkutan sampah terpilah ke tempat pengolahan 5. Dukungan pemilahan sampah terpilah dan pra pengolahan 6. Dukungan SDM
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			
	2030	tidak ada			
45 Pengembangan SPAL Regional	2025	tidak ada	Dinas PUPR	Dinas LHK untuk penyediaan dokumen lingkungan dan AMDAL, PDAM dalam peningkatan layanan, Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi, Dinas kominfo untuk publikasi media	1. Perencanaan tata ruang (PKP Tata Ruang) 2. Membuat regulasi dan menerbitkan perizinan (LHK, DPMPTSP) 3. Sosialisasi kepada masyarakat (Dinas Kesehatan) 4. Dukungan penyediaan lahan (PKP Tata Ruang) 5. Menyediakan alokasi anggaran (BKAD) 6. Pembentukan kelembagaan untuk
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			
	2030	tidak ada			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi Dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Samosir
			Utama	Pendukung	
					mengelola operasional IPLT (Biro Organisasi)
46. Pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati	2025	Rapat koordinasi, pembentukan tim <i>appraisal</i> dan pembentukan pokja rencana Pembangunan Taman Kehati	DLHK	1. Biro Pem Otda - SK Penlok 2. BPN - Sertifikat Lahan 3. Diskominfo - Publikasi Media	1. Dukungan terhadap pengadaan lahan 2. Penetapan Taman Hayati pada RTRW kab Samosir
	2026	Penyusunan dokumen DPPT dan pembebasan lahan			
	2027	Penyusunan dokumen FS, DED, dan dokumen administrasi lainnya			
	2028	Pekerjaan fisik di lapangan sesuai dengan Perdirjen KSDAE Nomor P.5 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan <i>Design</i> Dasar (<i>Design</i> Vegetasi dan <i>Design</i> Infrastruktur Taman Kehati)			
	2029	Tahap lanjutan kegiatan penanaman dan pemeliharaan vegetasi serta - Membuat Rencana Kesepakatan Bersama/ kerja sama Pembangunan Taman Kehati sebagai dukungan Pengembangan Kawasan Konservasi Taman Kehati			
	2030	1. Pembukaan dan peresmian Taman Kehati serta tahap lanjutan kegiatan penanaman 2. Pemeliharaan vegetasi serta kegiatan pengembangan 3. Pembentukan UPT Taman Keanekaragaman Hayati			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi Dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Samosir
			Utama	Pendukung	
PP 15. MELANJUTKAN PEMBANGUNAN BERBASIS DESA					
47. Penguatan Ekonomi Desa untuk Mengurangi Ketergantungan pada Pusat Kota dengan Penguatan Ekonomi Lokal melalui Pembuatan <i>Master Plan</i> Desa Produktif dan Mandiri.	2025	tidak ada		Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan) Dinas Perkebunan (Pemberian bantuan/pelatihan pengembangan komoditas gula aren, kopi, dan kelapa kepada kelompok yang terdapat pada desa yang menjadi sasaran intervensi kegiatan ini)	-Menyediakan data potensi desa yang akurat termasuk peta sebaran komoditi unggulandi Kabupaten Samosir -Memperbaiki jalan produksi, pasar desa, gudang, sentra dan pengolahan -Memfasilitasi kerja sama antar desa atau antar BUMDes untuk memperkuat rantai pasok. -Memfasilitasi sertifikasi produk (halal, organik, SNI) untuk meningkatkan daya saing. -Pembinaan Penggunaan dana desa untuk ekonomi desa pada Lokus yang di intervensi
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			
	2030	tidak ada			
48. Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan bagi Pengelola BUMDES	2025	Pendataan BUMDES/BUMDesma yang akan menerima pemanfaatan kegiatan •27 Kabupaten/Kota yang memiliki desa		Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan) Disperindag, Dinas Koperasi UMKM, (Dukungan Pelatihan dan Keterampilan bagi pengelola BUMDES/Masyarakat Desa).	- Menugaskan tenaga pendamping desa atau penyuluh ekonomi untuk mendampingi operasional BUMDES. - Memfasilitasi akses internet dan

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi Dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Samosir
			Utama	Pendukung	
	2026	- Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi pengelola BUMDES/BUMDesma - Monitoring dan Evaluasi kegiatan •Tapteng, Taput, Nias, Simalungun, Asahan, Dairi, Mandailing Natal, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Samosir, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Labura, Gunungsitoli, Padangsidempuan, Karo, Toba, Labusel, Tapsel, Labuhanbatu (20 Kabupaten/Kota)			teknologi informasi untuk mendukung pemasaran digital. - Memfasilitasi sertifikasi kompetensi pengelola BUMDES melalui lembaga pelatihan resmi.
	2027	- pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi pengelola BUMDes/BUMDesma - Monitoring dan Evaluasi kegiatan •*27 Kabupaten/kota yang memiliki desa			
	2028	- pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi pengelola BUMDES/BUMDesma - Monitoring dan Evaluasi kegiatan •*27 Kabupaten/kota yang memiliki desa			
	2029	- pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi pengelola BUMDES/BUMDesma - Monitoring dan Evaluasi kegiatan •*27 Kabupaten/kota yang memiliki desa			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi Dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Samosir
			Utama	Pendukung	
	2030				
PP 16. MENINGKATKAN KETAHANAN SOSIAL DAN BUDAYA YANG MENDUKUNG SUASANA YANG HARMONIS, TOLERAN DAN RUKUN					
49. Bantuan Hibah Rumah Ibadah di 33 Kabupaten/Kota	2025	-Penyusunan perubahan Pergub Hibah Rumah Ibadah dengan mekanisme penyaluran hibah yang memuat alokasi terhadap biaya operasional pengelola dan sarpras rumah ibadah Tahun 2025 -Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 -<i>Monitoring</i> dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara	Biro KESRA	Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan) Inspektorat (pendampingan menyeluruh dan tinjauan terhadap tata kelola pemberian bantuan hibah rumah ibadah)	-
	2026	-Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 -<i>Monitoring</i> dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi Dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Samosir
			Utama	Pendukung	
	2027	-Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 - <i>Monitoring</i> dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara			
	2028	-Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 - <i>Monitoring</i> dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara			
	2029	-Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 - <i>Monitoring</i> dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara			
	2030	-Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 - <i>Monitoring</i> dan Evaluasi pelaksanaan			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi Dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Samosir
			Utama	Pendukung	
		kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara			
50. Festival Seni dan Budaya Daerah	2025	tidak ada	DISBUDPARE KRAF	1. Dinas Perhubungan : Memastikan ketersediaan transportasi dan lalu lintas saat <i>event</i> internasional dilaksanakan 2. Dinas Kesehatan : Dukungan Tenaga Kesehatan dan Ambulans 3. Dinas Koperasi &UMKM : Pelatihan dan pendampingan UMKM untuk mendukung pelaksanaan <i>event</i> internasional 4. Dinas Kominfo : Memastikan ketersediaan jaringan digital saat pra <i>event-event</i> -pasca <i>event</i> internasional; publikasi kegiatan 5. Satpol PP : Keamanan Pelaksanaan <i>Event</i> dan ketertiban penyelenggaraan acara	1. Memastikan ketersediaan anggaran dalam mendukung Proyek Strategis Provinsi; 2. Pelatihan dan pembinaan Sanggar Kesenian Daerah; 3. Pendataan/Inventarisasi potensi Festival Seni Budaya di masing-masing daerah; 4. Memastikan kontinuitas pelaksanaan Festival Seni Budaya di Kabupaten Samosir 5. Promosi pelaksanaan Festival Seni-Budaya; 6. Penyelenggaraan festival seni dan budaya (KALENDER FIESTA/FESTIVAL WISATA)
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			
	2030	tidak ada			
51. Edukasi dan Pembekalan Solidaritas, Ketahanan Sosial Dan Wawasan Kebangsaan bagi Organisasi Masyarakat Dan Kelompok Masyarakat	2025	tidak ada		Dinas Pendidikan (Koordinasi rekomendasi satuan pendidikan yang membutuhkan pembekalan terhadap edukasi wawasan kebangsaan) Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	Replikasi pelaksanaan kegiatan Edukasi dan Pembekalan Solidaritas, Ketahanan Sosial Dan Wawasan Kebangsaan bagi Organisasi Masyarakat Dan Kelompok Masyarakat di Kabupaten Samosir
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			

Proyek Strategis	Tahun	Rencana Aksi Dan Lokus Pelaksanaan	Perangkat Daerah		Dukungan Kabupaten Samosir
			Utama	Pendukung	
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			
	2030	tidak ada			
PP 17. TERCIPTANYA KEHIDUPAN YANG LEBIH AMAN DAN TERTIB					
52. Patroli Gabungan untuk Narkoba di Pintu Masuk Narkoba dan Kawasan-Kawasan Kenakalan Remaja (Genk Motor).	2025	tidak ada	Satpol PP	Kesbangpol (Penyediaan data dan peta daerah rawan narkoba) Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	Melakukan koordinasi dengan Satpol PP Kabupaten/Kota terkait dukungan personel dalam pelaksanaan kegiatan. Kesbangpol (Penyediaan data dan peta daerah rawan narkoba di Kab Samosir)
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			
	2030	tidak ada			
53. Pemberantasan Pengguna dan Bandar Narkoba melalui Pemindahan Gembong Narkoba dari Lapas ke Nusakambangan	2025	tidak ada		Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan) Dinas Perhubungan (pengaturan lalu lintas untuk pemindahan gembong narkoba) Satpol PP (pendampingan saat pemindahan gerbong narkoba)	Melakukan Penguatan pencegahan narkoba di pemerintahan daerah serta mempertegas pelaksanaan Kegiatan Kampung Bersinar di Kabupaten Smaosir
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			
	2030	tidak ada			

Bab V

Penutup

Samosir Unggul,
Inklusif dan
Berkelanjutan



5.1 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Samosir dalam lima tahun ke depan, serta menjadi arahan bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Samosir untuk turut andil dalam pembangunan daerah Samosir selama kurun waktu lima tahun ke depan sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing melalui kaidah pelaksanaan.

RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran tahap pertama RPJPD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2045. RPJMD Tahun 2025-2029 ini disusun dengan tetap memperhatikan kebijakan dalam RPJPD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029, dan kebijakan lainnya yang berlaku. RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan harapan akan dapat menjawab permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis daerah Kabupaten Samosir dalam lima tahun ke depan. Sehubungan dengan hal tersebut, rumusan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) Seluruh Perangkat Daerah dan para pihak terkait, berkewajiban untuk bersinergi dan konsisten mempedomani dan melaksanakan program-program dalam RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
- 2) Seluruh Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang memuat program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun;

- 3) Seluruh Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2029 dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Kaidah pelaksanaan mencakup konsistensi perencanaan dan pendanaan, kerangka pengendalian, sistem insentif, dan mekanisme perubahan. Cakupan tersebut menjadi instrumen pengaman untuk memastikan terwujudnya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 sesuai dengan cita-cita masyarakat Kabupaten Samosir.

Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan

Konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan serta sinkronisasinya dengan kebijakan pendanaan diperlukan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal. Perencanaan yang berkualitas merupakan kunci bagi pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan. Perencanaan yang berkualitas juga diperlukan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan, baik pemerintah provinsi, pelaku non-pemerintah, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Upaya menjamin konsistensi perencanaan dan pendanaan juga perlu didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas. Hal tersebut dilakukan, khususnya untuk menentukan prioritas pembangunan daerah sampai dengan level proyek/keluaran, serta memastikan pelaksanaannya. Penguatan mekanisme proses utamanya dilakukan dengan penekanan pada kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan.

1. Keterkaitan RPJMD dengan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Pusat

RPJMD memiliki posisi penting dalam perencanaan pembangunan daerah, menjadi pedoman bagi dokumen perencanaan turunannya. Dokumen perencanaan pembangunan meliputi Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), di tingkat daerah. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman bagi penyusunan anggaran pemerintah di tingkat daerah (APBD). Penekanan substansi RPJMD adalah berupa visi, misi, tujuan, sasaran, arah (tujuan) pembangunan dan indikator capaian tujuan pembangunan daerah dipedomani oleh RKPD untuk menyusun tujuan dan sasaran serta program pembangunan tahunan. Semua rencana pembangunan daerah tersebut mempedomani rencana pembangunan di tingkat nasional atau pemerintah pusat yang mana RPJPD mempedomani RPJPN, RPJM Daerah mempedomani RPJMN, dan RKP Daerah mempedomani RKP. Semua rencana sektoral mempedomani rencana pembangunan daerah baik jangka panjang, menengah, dan pendek/tahunan.

Dalam rangka mempedomani dokumen perencanaan di tingkat pusat, RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan RPJMD Kabupaten Samosir, beberapa hal yang diperhatikan, antara lain:

- a) RPJMD Kabupaten Samosir bersifat jangka menengah sehingga memberikan arah pembangunan jangka menengah dan khusus memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang mendukung visi misi RPJMN dan Visi Indonesia Emas 2045 dan Visi Misi RPJMD Provinsi Sumatera Utara. RPJMD menjadi rencana strategis 5 tahunan daerah.
- b) Penyusunan RPJMD Kabupaten Samosir seperti penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan indikator pembangunan mempedomani arah (tujuan) pembangunan dan indikator yang tercantum dalam RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara.
- c) Tujuan dan sasaran pada RPJMD Kabupaten Samosir berpedoman pada sasaran dan indikator prioritas pembangunan pada RPJM di tingkat Nasional dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara. Selain itu RPJMD Kabupaten menjadi pedoman sasaran dan indikator prioritas pembangunan daerah pada RKPD, serta sasaran dan indikator strategis/program pada rencana strategis organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten.
- d) Sasaran dan indikator strategis/program Rencana Strategis (Renstra) OPD menjadi pedoman dalam menyusun sasaran dan indikator program pada rencana kerja (Renja) OPD, sedangkan tujuan dan

sasaran pada RPJMD menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun sasaran program RKPD.

- e) Sasaran program RKPD berpedoman pada sasaran dan indikator prioritas pembangunan nasional pada RKPD. RKPD juga menjadi pedoman dalam menyusun sasaran dan indikator program Renja OPD. Indikator prioritas pembangunan daerah dilaksanakan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD yang pada gilirannya dipergunakan sebagai penilaian akuntabilitas kinerja OPD.

Pencapaian sasaran pembangunan daerah juga harus didukung dengan kebijakan kelembagaan, regulasi, serta pendanaan dan investasi. Sebagai upaya mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah juga ditentukan sasaran program pada RPJMD dan RKPD. Sasaran program daerah tersebut dilengkapi dengan ukuran keberhasilan yang mendukung tercapainya sasaran program pembangunan daerah.

2. Skema Pendanaan dan Penganggaran

Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam RPJPD, RPJM Daerah, dan RKP Daerah, perlu didukung dengan sinkronisasi perencanaan dan pendanaan pembangunan. Sebagai upaya menjamin pencapaian sasaran pembangunan daerah, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun non-pemerintah secara lebih inovatif, integratif, dan tepat sasaran. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan, dilakukan peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan. Selain melakukan efisiensi dan peningkatan efektivitas dalam belanja, pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan pendanaan pembangunan yang bersumber dari TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa), Belanja K/L, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pembiayaan Utang Daerah, KPBU dan Non-APBN/APBD untuk penganggaran pencapaian prioritas pembangunan secara berkelanjutan.

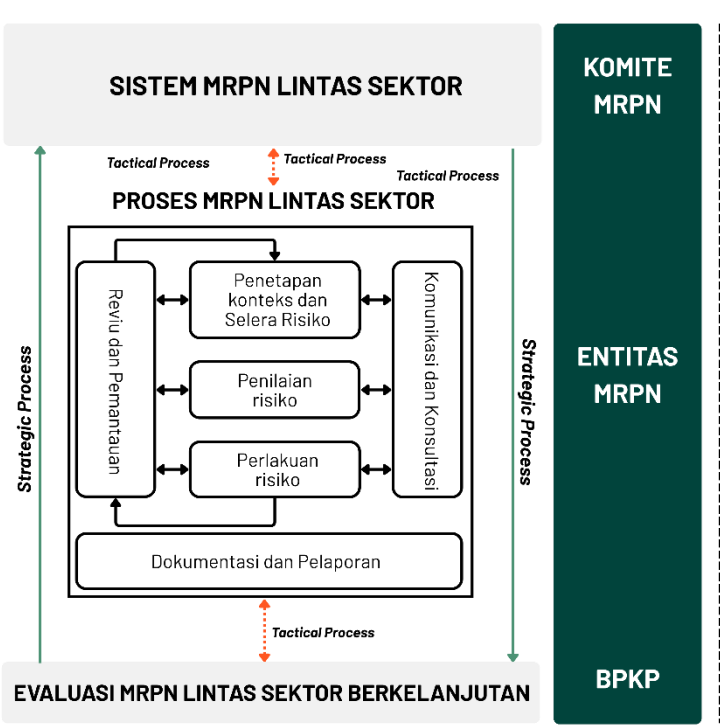
Kerangka Pengendalian

Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pembangunan daerah, diperlukan pengendalian yang kontinu dan partisipatif dengan

memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pengendalian didukung oleh sistem elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Sistem elektronik terpadu juga diintegrasikan dengan tata kelola data pembangunan yang mendorong kebijakan pembangunan berbasis bukti (*evidence-based planning*).

Terkait dengan manajemen risiko, manajemen risiko merujuk kepada manajemen risiko pembangunan nasional (MRPN). MRPN adalah kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan, mengendalikan dan mengelola risiko pada program, kegiatan, proyek, prioritas pembangunan dan/atau jenis risiko tertentu yang bersifat lintas sektor yang bertujuan untuk meningkatkan pencapaian sasaran pembangunan nasional.

MRPN mengkolaborasikan eksisting Manajemen Risiko Organisasi ke dalam sebuah Pengendalian Manajemen Risiko Lintas Sektor yang secara lebih lanjut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023. Adapun Kerangka Kerja MRPN dapat dilihat pada Gambar 5.1 di bawah ini.



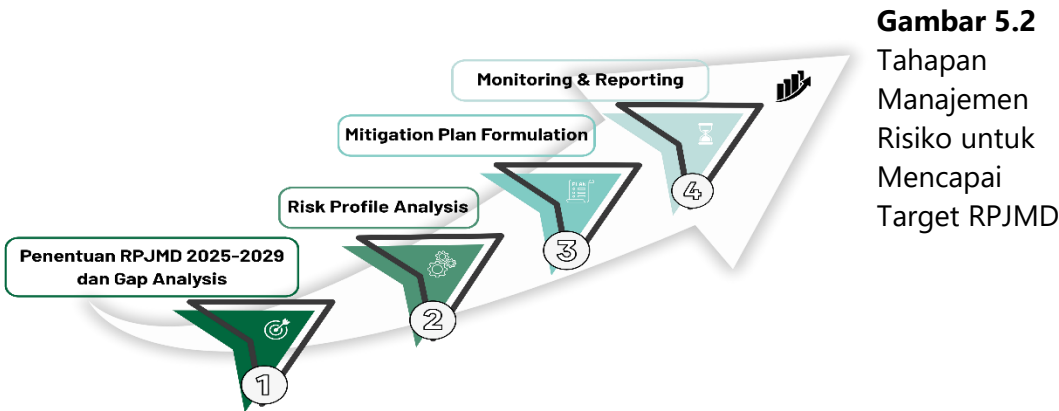
Gambar 5.1
Kerangka Kerja
MRPN

Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

Sebagai salah satu entitas MRPN, pemerintah daerah perlu menerapkan MRPN sejak tahap perencanaan pembangunan daerah. Penerapan MRPN

di daerah dilakukan dengan pembentukan komite manajemen risiko dan penyusunan kebijakan manajemen risiko. Proses yang dilakukan untuk menerapkan MRPN antara lain perencanaan kinerja prioritas pembangunan, penentuan objek dan entitas MRPN, dan proses assessment risiko. Proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan dari manajemen risiko sangat diperlukan dalam meningkatkan probabilitas pencapaian tujuan dan mengurangi dampak merugikan pada suatu kejadian bagi entitas MRPN.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2029 harus berkesinambungan dengan perencanaan pembangunan jangka panjang antar periode serta menjaga sinkronisasi periodisasi dan substansi yang mengacu pada RPJPD Kabupaten Samosir, RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional. Langkah ini sangat penting dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari visi Indonesia Emas Tahun 2045. Dalam rangka percepatan pembangunan di berbagai sektor sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan, diperlukan tahapan dan integrasi manajemen risiko yang menyeluruh serta pembentukan dasar hukum yang memastikan integrasi tersebut dalam penyelenggaraan manajemen risiko. Tahapan manajemen risiko untuk membantu tercapainya target RPJMD dapat diperlihatkan dalam gambar berikut.



Gambar 5.2
Tahapan
Manajemen
Risiko untuk
Mencapai
Target RPJMD

Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

Rincian penjelasan tahapan-tahapan dalam manajemen risiko di atas adalah berupa:

- a) Penentuan RPJMD periode 2025-2029 dengan menetapkan arah kebijakan dan target yang akan dicapai pada tahun 2029. Hal ini mencakup penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Samosir menuju pencapaian visi

Samosir Unggul, Inklusif dan Berkelanjutan. Hal tersebut perlu dilakukan melalui *gap analysis* terhadap target yang telah ditetapkan dalam RPJMD periode sebelumnya. *Gap analysis* dilakukan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara pencapaian yang diharapkan dengan kinerja yang telah tercapai, sehingga langkah-langkah strategis dapat ditentukan untuk mengatasi perbedaan tersebut dan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dalam RPJMD.

- b) *Risk Profile Analysis* dilakukan dengan proses identifikasi dan *assessment* risiko. Proses identifikasi risiko mencakup pengenalan dan penilaian terhadap berbagai potensi risiko yang mungkin timbul, baik dari internal maupun eksternal, yang dapat menghambat pencapaian target dalam RPJMD periode 2025-2029. Selanjutnya, dilakukan *assessment* risiko untuk mengevaluasi kemungkinan terjadinya risiko (*likelihood*) dan dampak serius (*severity*) dari risiko-risiko yang telah diidentifikasi. Penilaian ini membantu untuk memahami tingkat urgensi dan tingkat risiko yang harus dihadapi, sehingga tindakan pencegahan dan mitigasi yang sesuai dapat diambil dalam penyusunan RPJMD.
- c) Penyusunan Rencana Mitigasi (*Mitigation Plan Formulation*) yang dilakukan bersama dengan Kementerian/Lembaga/Daerah terkait dalam proses perumusan rencana mitigasi. Proses ini mencakup identifikasi risiko yang diprioritaskan untuk ditangani dan menetapkan jadwal yang jelas untuk pelaksanaan rencana mitigasi. Dengan demikian, rencana mitigasi dapat disusun secara sistematis dan efektif untuk mengatasi risiko yang dihadapi dalam penyusunan RPJMD periode 2025-2029.
- d) Melakukan *monitoring and reporting* untuk memastikan bahwa implementasi RPJMD berjalan dengan baik, memungkinkan evaluasi berkala terhadap pencapaian target, serta memastikan partisipasi dan keterlibatan berbagai pihak dalam proses pembangunan daerah. Proses tersebut mencakup pemantauan secara internal terhadap implementasi RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2029 dan mengikutsertakan pihak eksternal, seperti lembaga pengawas, organisasi masyarakat, atau pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap pembangunan daerah. Tujuannya adalah untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan RPJMD, sekaligus mendapatkan masukan yang diperlukan dari berbagai pemangku kepentingan guna meningkatkan implementasi RPJMD.

Adapun identifikasi risiko terhadap misi, tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Dalam mengidentifikasi manajemen risiko yang berfokus pada pencapaian **Misi 1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing**, terdapat beberapa aspek yang menjadi fokus utama untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan nasional. Program-program ini memastikan akses yang lebih baik ke pendidikan berkualitas, pelayanan kesehatan, dan pelatihan keterampilan untuk semua warga negara, tanpa memandang jenis kelamin, kondisi fisik, atau latar belakang sosial.
2. Dalam mengidentifikasi manajemen risiko yang berfokus pada pencapaian **Misi 2 Memantapkan Kemandirian Ekonomi Kerakyatan yang Berkelanjutan Berbasis Pertanian, Pariwisata didukung Infrastruktur Berkualitas**
3. Dalam mengidentifikasi manajemen risiko yang berfokus pada pencapaian **Misi 1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Responsif, Berintegritas dan Adaptif.**

Dengan mengidentifikasi dan merancang strategi manajemen risiko yang tepat di setiap pencapaian misi tersebut, rencana pembangunan dalam jangka menengah dapat berjalan lebih efektif serta meminimalkan risiko yang mungkin ditimbulkan.

Pengendalian RPJMD dilaksanakan melalui pengendalian jangka pendek (tahunan) yang hasilnya disampaikan kepada Kepala Daerah. Berdasarkan tahapan pelaksanaannya, ruang lingkup pengendalian pembangunan daerah terbagi menjadi dua bagian.

1. Pengendalian perencanaan.

Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas desain sasaran program pembangunan daerah, serta menjamin ketersediaan alokasi anggaran, baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

2. Pengendalian pelaksanaan.

Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan jangka pendek (tahunan). Pengendalian pembangunan tersebut perlu didukung dengan tatanan regulasi agar pelaksanaannya berjalan dengan efektif. Tatanan regulasi tersebut menyinergikan regulasi terkait pemantauan, evaluasi, pengendalian, manajemen risiko pembangunan, dan manajemen kinerja. Sinergi regulasi diperlukan untuk konsistensi pelaksanaan pengendalian dengan kinerja Pemerintah Daerah dan OPD terkait yang akan menjadi salah satu dasar pengaturan sistem manajemen kinerja pemerintah. Kerangka kelembagaan pengendalian yang komprehensif juga diperlukan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini, diperlukan kelembagaan pengendalian yang mengkoordinasikan pengendalian lintas dan internal Pemerintah Daerah dan OPD.

Dalam mencapai misi dan tujuan pembangunan, beberapa risiko strategis atas pelaksanaan program dan kegiatan telah dipetakan. Risiko yang muncul ke depan dapat bersumber dari anggaran, kualitas SDM, pemanfaatan waktu, dan proses koordinasi serta kolaborasi antar pihak. Rincian hubungan dari risiko, dampak, probabilitas, dan bagaimana memitigasi risiko tersebut dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 5.1 Risiko dan Rencana Mitigasi

Misi	Risiko	Dampak	Probabilitas	Rencana Mitigasi	OPD Pelaksana
• Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing. • Memantapkan Kemandirian Ekonomi Kerakyatan yang Berkelanjutan Berbasis Pertanian, Pariwisata didukung Infrastruktur Berkualitas. • Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Responsif, Berintegritas dan Adaptif.	1. Anggaran yang terbatas	Kurang optimalnya pelaksanaan program/ kegiatan	50%	Kolaborasi dengan pihak swasta, terkait fasilitasi pendanaan (KPBU)	DPMPTSP, Badan Keuangan/Pendapatan
				Konsultasi yang intens dengan Pemerintah Pusat	Bappeda Litbang
				Inovasi pembiayaan baru (pinjaman, pemanfaatan CSR yang optimal)	Bappeda Litbang bersama seluruh OPD
				Menggali potensi sumber-sumber penerimaan diluar pajak.	Bappedalitbang; Badan Keuangan/Pendapatan DPMPTSP
	2. Koordinasi dan Kolaborasi antar OPD terkait dan pihak eksternal	Sasaran tidak tercapai	50%	Pengendalian atas pelaksanaan RPJMD terkait koordinasi dan kolaborasi pelaksanaan antar sektor dan pihak eksternal	Bappeda Litbang bersama akademisi

Misi	Risiko	Dampak	Probabilitas	Rencana Mitigasi	OPD Pelaksana
	3. Integritas ASN	Inefisiensi dan tidak efektifnya program kegiatan dalam mencapai sasaran	50%	Penguatan pendidikan dan pelatihan ASN yang berbasis integritas dan profesionalisme pekerjaan	Badan Kepegawaian
				Memperkuat pengawasan kinerja ASN	Inspektorat dan pengawasan melekat dari atasan langsung
	4. Ketepatan jadwal pelaksanaan program/kegiatan	Kecepatan dalam pencapaian sasaran	50%	Membuat roadmap dan alokasi jadwal kegiatan	Seluruh OPD

Kerangka kerja implementasi pengendalian dan mitigasi risiko merupakan panduan sistematis yang digunakan organisasi untuk mengidentifikasi, menilai, mengendalikan, dan memantau risiko agar tidak mengganggu pencapaian tujuan RPJMD ini. Kerangka ini juga membantu dalam memastikan bahwa risiko ditangani secara proaktif dan efisien.

Peta jalan konkret (*roadmap*) untuk mengatasi kegagalan implementasi, pengendalian dan mitigasi resiko di masa lalu mencakup :

1. Struktur operasionalisasi yang sistematis
2. Program pelatihan ASN
3. Protokol data dan pelaporan yang jelas
4. Tautan eksplisit antara pengendalian dan akuntabilitas
5. Upaya penguatan kapasitas tata kelola pemerintah daerah

Strategi implementasi bertahap (*phased implementation strategy*) yang dirancang secara sistematis untuk memastikan bahwa kerangka kerja mitigasi risiko benar-benar dioperasionalkan guna mengatasi kelemahan implementasi masa lalu, khususnya di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Samosir dilaksanakan dengan tahapan :

1. Tahap I : Fondasi dan mobilisasi untuk Membangun dasar hukum, kelembagaan, dan komitmen.
 - Penetapan regulasi/peraturan kepala daerah tentang manajemen risiko.
 - Pembentukan atau pengaktifan kembali **Tim Pengelola Risiko Daerah (TPRD)**.
 - Sosialisasi kerangka manajemen risiko ke seluruh OPD.
 - Identifikasi akar penyebab kegagalan implementasi sebelumnya.
 - Revisi dan sinkronisasi SOP terkait risiko, pengendalian, dan akuntabilitas.
2. Tahap 2 : Kapasitas SDM dan Pelatihan untuk Penguatan kapasitas dan mindset ASN terhadap risiko.
 - Pelatihan ASN berjenjang (level pimpinan, manajerial, pelaksana).
 - Simulasi dan studi kasus kegagalan implementasi sebelumnya.
 - Pembuatan modul *e-learning* risiko berbasis Permendagri
 - Penunjukan risk champion di setiap OPD.

3. Tahap 3 : Operasionalisasi dan Alat Kerja untuk menerapkan alat dan mekanisme yang konkret
 - Implementasi risk register terstandar untuk seluruh OPD.
 - Penggunaan dashboard risiko berbasis data.
 - SOP pelaporan risiko bulanan/triwulan.
 - Mekanisme umpan balik (*feedback loop*) dari insiden ke mitigasi.
4. Tahap 4 : Tautan ke Akuntabilitas dan Pengendalian untuk Menjadikan risiko bagian dari pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja.
 - Integrasi risiko ke dalam kontrak kinerja (PK) pejabat struktural.
 - Keterkaitan antara risiko dan indikator kinerja utama (IKU/IKD).
 - Evaluasi efektivitas kontrol oleh Inspektorat.
 - Rapat evaluasi bulanan mencakup pembahasan risiko dan pengendalian.
5. Tahap 5 : Monitoring Berkelanjutan dan Peningkatan untuk konsistensi, adaptasi, dan peningkatan kualitas tata kelola risiko.
 - Evaluasi tahunan efektivitas manajemen risiko (*Risk Maturity Assessment*).
 - Audit risiko tematik berbasis insiden aktual.
 - Penerbitan laporan risiko daerah (transparansi publik & akuntabilitas).
 - Update sistem, pelatihan, dan protokol berdasarkan pelajaran baru.
 - Institutionalization: risiko menjadi budaya kerja OPD.

Dengan pelatihan ASN yang terstruktur dan tautan langsung antara pengendalian dan data digital yang terdokumentasi, implementasi manajemen risiko akan bertransformasi dari kerangka normatif menjadi praktik nyata, terukur, dan berkelanjutan.

Sistem Insentif

Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan daerah memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan meliputi unsur pemerintah dan nonpemerintah, seperti dunia usaha, lembaga penelitian, dan kelompok masyarakat lainnya.

Untuk mendorong partisipasi aktif semua unsur pelaku pembangunan, perlu diciptakan sistem insentif yang baik. Sistem insentif ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan pelaku pembangunan secara luas dan partisipatif sehingga dapat mempercepat capaian sasaran prioritas pembangunan daerah. Untuk pelaku pembangunan unsur pemerintah, sistem insentif diintegrasikan di dalam sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen anggaran. Pemberian insentif dilaksanakan berdasarkan kinerja Pemerintah Daerah dan OPD terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Kinerja diukur antara lain dari aspek konsistensi perencanaan, konsistensi perencanaan dan pendanaan, pencapaian indikator kerangka ekonomi makro pusat dan daerah, pencapaian indikator-indikator kinerja utama lainnya, dan pencapaian program prioritas. Untuk pelaku pembangunan non pemerintah, sistem insentif dapat berupa dukungan regulasi dan fasilitas kemudahan lainnya.

Mekanisme Perubahan

Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan. Dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi, dan bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah, target RPJMD dapat dimutakhirkan melalui RKPD. Pemutakhiran target ini dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Penerapan kaidah pelaksanaan didukung oleh pemanfaatan transformasi digital melalui penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan pada seluruh tahapan siklus pembangunan. Sistem elektronik terpadu tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi

operasional dan ketangkasan proses bisnis perencanaan dan pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029. Adapun tata kelola data bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan melalui pemanfaatan data referensi yang sama.

Komunikasi Publik

Komunikasi publik sangat penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif. Dengan komunikasi publik yang baik, diharapkan kebijakan dan program pemerintah dapat dengan mudah dipahami oleh publik dan dapat mengundang partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kebijakan pembangunan.

Prinsip dasar komunikasi publik terdiri dari tiga hal pokok, yaitu: (i) struktur dan tata kelola komunikasi lintas sektor dan daerah yang objektif, akuntabel, inovatif, dan profesional; (ii) penyediaan informasi yang akurat, transparan, tepat waktu, menarik, dan dapat dimanfaatkan oleh para pihak secara mudah dan murah; serta (iii) keterlibatan semua kelompok masyarakat secara demokratis berbasis data yang valid dengan metode komunikasi yang sesuai kebutuhan publik yang beragam.

Komunikasi publik RPJMD Tahun 2025-2029 berprinsip “tidak ada yang tertinggal” (*no one left behind*) dan partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*). Komunikasi publik melibatkan tiga pemangku kepentingan utama, yaitu Pemerintah Daerah, Organisasi Perangkat Daerah dan masyarakat. Komunikasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilakukan melalui Forum OPD agar OPD dapat memberikan masukan terhadap prioritas pembangunan, sedangkan komunikasi kepada pemerintah daerah dilakukan secara berjenjang mulai dari musyawarah kabupaten dan provinsi untuk membangun pemahaman dan partisipasi. Selanjutnya, komunikasi kepada masyarakat umum termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora/perantau, pemuda dan kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas dan lansia dilakukan melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan masukan, kritik, atau dukungan.

Komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan objektif. Dengan demikian komunikasi publik dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pembangunan.

5.2 Pembiayaan Pembangunan

Upaya untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Panjang Samosir Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan memerlukan kapasitas pembiayaan yang memadai. Peningkatan kapasitas pembiayaan dilakukan melalui pengembangan inovasi pembiayaan, baik berupa perluasan sumber-sumber pembiayaan, penerapan skema atau mekanisme pelaksanaan yang baru, hingga optimalisasi peran sektor keuangan.

Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dilakukan melalui perluasan sumber-sumber dan pengembangan inovasi skema pembiayaan yang mencakup: (i) penguatan perencanaan pembiayaan yang meliputi: penataan regulasi daerah, pembentukan kelembagaan daerah yang adaptif, pembentukan kelompok kerja (POKJA) kelembagaan daerah, pemanfaatan teknologi digital dalam proses bisnis, penguatan branding dengan marketing digital dalam mempromosikan pariwisata, dan pengembangan inovasi mekanisme pelaksanaan (*delivery mechanism*) yang mendukung ruang gerak untuk mendapatkan skema pembiayaan yang berdampak (*impact investment*); (ii) perluasan kerja sama bilateral, multilateral dan kerjasama keuangan lainnya untuk mengembangkan sumber-sumber pembiayaan, terutama pembiayaan inovatif dengan syarat dan ketentuan yang paling menguntungkan, investasi infrastruktur pariwisata dan yang mendukung kerja sama ekonomi lainnya; (iii) penguatan dan perluasan berbagai instrumen dalam kerangka kerjasama pemerintah dan badan usaha, khususnya pada aspek regulasi, tata kelola dan kelembagaan menuju model *private financial initiative* yang mencakup sektor

infrastruktur publik, utilitas dan infrastruktur sosial; (iv) penerapan skema-skema pembiayaan yang mendukung pemberdayaan industri daerah, salah satunya meningkatkan UMKM Lokal dalam peningkatan ekonomi kreatif dan mendorong alih teknologi; (v) optimalisasi pemanfaatan aset melalui daur ulang aset (*asset recycling*), tukar guling aset (*asset offset*) hingga pemanfaatan peningkatan nilai aset yang dihasilkan dari investasi, aktivitas, dan kebijakan di suatu kawasan (*asset value capture*).

Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor non publik dilakukan melalui: (i) pemanfaatan instrumen pendanaan jangka menengah (antara lain: dana pensiun, asuransi, instrumen di pasar modal, dan dana abadi daerah), (ii) inovasi produk pembiayaan syariah yang disusun berdasarkan prinsip sewa-menyewa, jual beli, dan bagi hasil, (iii) inovasi pembiayaan untuk merespon perubahan iklim yang mencakup berbagai jenis pembiayaan hijau, biru dan sirkular, (iv) produk pembiayaan berbasis transaksi, seperti bursa karbon, bursa plastik ataupun bursa tematik lainnya, (v) serta penguatan bauran pendanaan (*blended financing*) melalui pemanfaatan dana yang bersifat katalitik seperti dana filantropi, dana sosial korporasi maupun dana keagamaan, termasuk jaminan, yang seluruhnya ditujukan untuk mengurangi risiko finansial bagi partisipasi sektor non publik dalam pembangunan daerah.

Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dan non publik perlu diikuti dengan manajemen investasi yang berkualitas sehingga kapasitas pembiayaan yang ada dapat digunakan secara optimal. Beberapa langkah penguatan manajemen investasi publik tersebut mencakup: (i) penajaman identifikasi investasi publik dalam setiap periode jangka menengah; (ii) penyempurnaan proses penyiapan dan penilaian proyek investasi publik; (iii) penyelarasan prioritas investasi publik skala daerah; (iv) modernisasi pemantauan dan pengendalian pelaksanaan investasi publik; (v) pelibatan swasta dan masyarakat dalam siklus investasi publik; (vi) penyempurnaan kerangka regulasi, tata kelembagaan dan organisasi serta kapasitas sumber daya manusia manajemen investasi publik; dan (vii) penguatan transparansi dan akuntabilitas atas seluruh aspek investasi publik.

5.3 Kesimpulan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Samosir Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Dokumen RPJMD menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran pokok dan arah kebijakan daerah serta indikator kinerja dan program prioritas selama kurun waktu 5 tahun yang menjawab tantangan permasalahan serta isu-isu strategis daerah sehingga dapat dicapai visi yang telah dirumuskan.

Dokumen ini merupakan manifestasi dari Tahap I RPJPD Kabupaten Samosir, yang diarahkan pada "Penguatan Fondasi Transformasi" sebagai langkah awal untuk mewujudkan visi Samosir Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan. Periode I diarahkan untuk penguatan fondasi transformasi di berbagai bidang yang didukung oleh penyediaan infrastruktur. Pada kondisi ini, penguatan transformasi tata kelola pemerintahan dilakukan melalui perbaikan lembaga yang tepat fungsi, berkualitas, produktif serta inovatif. Kemudian optimalisasi penyediaan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas kinerja ASN yang handal berbasis merit serta kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan serta peningkatan pelayanan publik yang transparan berbasis teknologi informasi.

RPJMD Kabupaten Samosir Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang berperan penting dalam keberhasilan Pembangunan jangka menengah Kabupaten Samosir untuk pencapaian visi dan misi daerah yaitu: **Samosir Unggul, Inklusif dan Berkelanjutan**. Keberhasilan tersebut perlu didukung oleh :

- a) komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis;
- b) konsistensi kebijakan pemerintah dan daerah;
- c) keberpihakan pembangunan kepada masyarakat; dan

- d) peran serta aktif segenap pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Samosir; serta
- e) dalam rangka menjaga keseimbangan Pembangunan dan menjaga kesinambungan rencana.

Dukungan, kesungguhan, tanggung jawab, semangat gotong royong, peran aktif, serta komitmen, berbagai pihak di Kabupaten Samosir sangat diharapkan dalam mewujudkan daerah Samosir Unggul, Inklusif dan Berkelanjutan. Terwujudnya visi dan misi pembangunan tersebut diharapkan dapat mendukung perwujudan visi pembangunan Indonesia Emas 2045.

BUPATI SAMOSIR

Cap/dto

VANDIKO T. GULTOM

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2025 NOMOR 37
NOMOR REGISTER (4-52/2025)**